

MENJAGA KESEIMBANGAN,
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG BERKELANJUTAN





LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2012

ISSN 0522-2572

Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Nilai- nilai Strategis

Nilai- nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas , Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan

Darmin Nasution

Gubernur Bank Indonesia

"Kebijakan Bank Indonesia akan tetap diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran sasarannya dan mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal, melalui penguatan bauran kebijakan moneter, nilai tukar, dan makroprudensial. Bauran kebijakan tersebut akan ditopang oleh penguatan koordinasi dan penajaman strategi komunikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut."



Daftar Isi

iv	Daftar Isi
viii	Daftar Tabel
x	Daftar Grafik
xvi	Dewan Gubernur Bank Indonesia
xx	Prakata
xxiv	Tinjauan Umum
xxxii	Boks 1 Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2012

Bagian 1

Perlambatan Ekonomi Global 1

Bab 1

Perekonomian Dunia	5
1.1 Perkembangan Ekonomi Global	8
1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Global	10
1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Global	15
1.4 Perkembangan Harga Komoditas Global	19

Bab 2

Respons Kebijakan Ekonomi Global	27
2.1 Kebijakan Moneter dan Fiskal	30
2.2 Kerjasama Internasional	35

Bagian 2

Ketahanan Ekonomi Domestik 3

Bab 3

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	43
3.1 Kinerja Pertumbuhan Ekonomi	46
3.2 Permintaan Agregat	49
3.3 Penawaran Agregat	58
3.4 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	63
Boks 3.1 Peran Kelas Menengah dalam Perekonomian Indonesia	67

Bab 4

Neraca Pembayaran Indonesia	71
4.1 Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia	74
4.2 Transaksi Berjalan	76
4.3 Transaksi Modal dan Finansial	82
4.4 Cadangan Devisa dan Indikator Kerentanan Eksternal	87
Boks 4.1 Perkembangan Neraca Pendapatan Tahun 2012	89

Bab 5

Nilai Tukar	93
5.1 Kinerja Nilai Tukar	96
5.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi	97

Bab 6

Inflasi	105
6.1 Perkembangan Inflasi Inti	110
6.2 Perkembangan Inflasi <i>Volatile Food</i>	114
6.3 Perkembangan Inflasi <i>Administered Prices</i>	116
6.4 Inflasi Indonesia dan Negara Kawasan	117
Boks 6.1 Memahami Ketahanan Pangan di Indonesia Melalui Pendekatan Model Panel Data Spasial	119

Bab 7

Operasi Keuangan Pemerintah	123
7.1 Perkembangan Operasi Keuangan Pemerintah	126
7.2 Pendapatan Negara dan Hibah	127
7.3 Belanja Negara	130
7.4 Pembiayaan	134
Boks 7.1 Perkembangan Keseimbangan Primer Pemerintah	137

Bab 8

Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran	141
8.1 Kinerja Perbankan	144
8.2 Kinerja Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	153
8.3 Kinerja Sistem Pembayaran	158

Daftar Isi

Bagian 3

Respons Bauran Kebijakan 169

Bab 9

Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar 173

9.1 Kebijakan Moneter 176

9.2 Kebijakan Nilai Tukar 178

9.3 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moneter 179

Boks 9.1 Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Bank

Indonesia 188

Boks 9.2 Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan

Penerimaan Devisa Hasil Ekspor
(DHE) 191

Boks 9.3 Evaluasi Term Deposit Valas 193

Boks 9.4 Penguatan JIBOR Sebagai Suku Bunga

Acuan PUAB 195

Bab 10

Kebijakan Makroprudensial, Mikroprudensial dan Sistem Pembayaran 197

10.1 Kebijakan Makroprudensial 200

10.2 Kebijakan Mikroprudensial 201

10.3 Kebijakan Sistem Pembayaran 205

Boks 10.1 Dampak Penerapan Kebijakan *Loan To*

Value (LTV) dan *Down Payment* (DP) 214

Boks 10.2 Kebijakan *Multilicensing*: Latar

Belakang dan Tujuan 217

Boks 10.3 Peningkatan Perlindungan Konsumen

dan Prinsip Kehati-hatian dalam Alat

Pembayaran Menggunakan Kartu

(APMK) 221

Bab 11

Koordinasi Kebijakan 225

11.1 Pengendalian Inflasi 228

11.2 Penyesuaian Keseimbangan Eksternal 230

11.3 Pencegahan dan Penanganan Krisis 231

11.4 Sistem Pembayaran 233

11.5 Kebijakan Pemerintah di Bidang Fiskal,
Sektor Riil dan Sektor Keuangan 235

Bagian 4

Prospek, Tantangan dan Arah Kebijakan 241

Bab 12

Prospek, Tantangan dan Arah Kebijakan 245

12.1 Prospek Perekonomian 2013 248

12.2 Prospek Perekonomian Jangka Menengah 255

12.3 Tantangan dan Arah Kebijakan 257

Daftar Tabel

1. Perekonomian Dunia	6
Tabel 1.1 Indikator Perekonomian Global	8
Tabel 1.2 Indikator Makroekonomi Negara Maju	9
2. Respons Kebijakan Ekonomi Global	28
Tabel 2.1 Stimulus Fiskal Beberapa Negara <i>Emerging Market</i>	34
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	43
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	49
Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB Permintaan (yoy)	50
Tabel 3.3 Ekspor Nonmigas Berdasarkan Komoditas (Nilai Riil)	58
Tabel 3.5 Angkatan Kerja dan Pengangguran	64
Tabel 3.6 Pertumbuhan Angkatan Kerja berdasarkan Pendidikan	65
Tabel 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan	66
Tabel 3.8 Indeks Keparahan Kemiskinan	66
4. Neraca Pembayaran Indonesia	72
Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia	75
Tabel 4.2. Perkembangan Ekspor	77
Tabel 4.3. Perkembangan Ekspor Minyak	78
Tabel 4.4. Perkembangan Ekspor Gas	79
Tabel 4.5 Perkembangan Impor (c.i.f)	80
Tabel 4.6 Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Menurut Instrumen	87

Daftar Tabel

6. Inflasi	106
Tabel 6.1 Penyumbang Utama Inflasi <i>Administered Prices</i>	116
7. Operasi Keuangan Pemerintah	124
Tabel 7.1 Perkembangan Asumsi Makro 2012	127
Tabel 7.2 Perkembangan Operasi Keuangan Pemerintah	128
8. Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran	142
Tabel 8.1 Pembiayaan Ekonomi dari Pasar Modal	153
Tabel 8.2 Porsi Kepemilikan Pasar Saham	157
Tabel 8.3 Jenis-Jenis Instrumen Keuangan	158
Tabel 8.4 Perkembangan Rata-rata dan Posisi UYD	162
10. Kebijakan Makroprudensial, Mikroprudensial dan Sistem Pembayaran	198
Tabel 10.5 Pengaturan DP-KKB di Bank dan Lembaga Pembiayaan	215
12. Prospek Tantangan dan Arah Kebijakan	245
Tabel 12.1 Proyeksi PDB Dunia (% , yoy)	249
Tabel 12.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan	250
Tabel 12.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran	252

Daftar Grafik

1. Perekonomian Dunia	6	Grafik 1.21 Selisih Libor - OIS 3 Bulan	18
Grafik 1.1 Neraca Perdagangan Eropa	9	Grafik 1.22 Suku Bunga Tertinggi - Terendah Bank Eropa	18
Grafik 1.2 Kinerja Ekspor Negara-Negara <i>Emerging Market</i> Asia	10	Grafik 1.23 Aliran Modal Asing ke <i>Emerging Market</i> Asia	18
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju	10	Grafik 1.24 Harga Minyak Dunia	20
Grafik 1.4 Indikator Sektor Perumahan AS	11	Grafik 1.25 Permintaan dan Penawaran Minyak Dunia	20
Grafik 1.5 Lingkaran Krisis Eropa	12	Grafik 1.26 Produksi Minyak Beberapa Negara OPEC	21
Grafik 1.6 Indikator Konsumsi dan Produksi Negara Maju	12	Grafik 1.27 Kontrak Nonkomersial	21
Grafik 1.7 Neraca Perdagangan Jepang	13	Grafik 1.28 Harga Komoditas Nonminyak	22
Grafik 1.8 Inflasi Negara Maju	13	Grafik 1.29 Harga Komoditas Pertambangan	22
Grafik 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang	14	Grafik 1.30 Harga Komoditas Pertanian	23
Grafik 1.10 Pertumbuhan PDB dan Investasi China	14	Grafik 1.31 Harga Emas dan Pasar Keuangan	24
Grafik 1.11 Inflasi Negara Berkembang Asia	15		
Grafik 1.12 Perubahan Imbal Hasil Obligasi	15	2. Respons Kebijakan Ekonomi Global	28
Grafik 1.13 Perubahan Harga Indeks Saham	15	Grafik 2.1 <i>Nonfarm Payroll</i> dan Pengangguran AS	31
Grafik 1.14 Perkembangan Indeks Harga Saham Global	15	Grafik 2.2 Suku Bunga Kebijakan	33
Grafik 1.15 Neraca Bank Sentral: Total Aset	16		
Grafik 1.16 Aliran Modal ke <i>Emerging Market</i>	16	3. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	43
Grafik 1.17 Volatilitas Pasar Keuangan	17	Grafik 3.1 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan	46
Grafik 1.18 Perkembangan Indeks Harga Saham Asia	17	Grafik 3.2 Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran	46
Grafik 1.19 Perkembangan CDS Komposit	17	Grafik 3.3 Kontribusi PDB Sisi Penawaran	47
Grafik 1.20 Imbal Hasil Obligasi Negara PIGS	18		

Daftar Grafik

Grafik 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	48	Grafik 3.25	Pertumbuhan Sektor Penghasil Barang dan Penghasil Jasa	59
Grafik 3.5	Kontribusi PDRB	48	Grafik 3.26	Pertumbuhan Sektor Pertanian	59
Grafik 3.6	Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga	50	Grafik 3.27	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	60
Grafik 3.7	Indeks Penjualan Eceran	50	Grafik 3.28	Pertumbuhan Sektor Pertambangan	60
Grafik 3.8	Perkembangan Kelas Menengah	51	Grafik 3.29	Perkembangan Sektor Utama Berdasarkan Kawasan	61
Grafik 3.9	Nilai Tukar Petani (NTP) dan Upah Riil Buruh	52	Grafik 3.30	Pertumbuhan Sektor PHR	63
Grafik 3.10	Indeks Keyakinan Konsumen	52	Grafik 3.31	Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	63
Grafik 3.11	Indeks Penjualan Eceran Berdasarkan Kota	52	Grafik 3.32	Porsi Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan	64
Grafik 3.12	Indeks Keyakinan Konsumen Kawasan	53	Grafik 3.33	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kawasan	64
Grafik 3.13	Konsumsi Pemerintah	53	Grafik 3.34	Tingkat Kemiskinan	66
Grafik 3.14	Kontribusi Investasi Terhadap PDB	53	Grafik 3.35	Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kawasan	66
Grafik 3.15	Indeks Tendensi Bisnis	54			
Grafik 3.16	Realisasi Penanaman Modal BKPM	54			
Grafik 3.17	Perkembangan Investasi Kawasan	55			
Grafik 3.18	Nilai Ekspor Riil Nonmigas Menurut Komoditas	56			
Grafik 3.19	Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Kawasan	57	4. Neraca Pembayaran Indonesia	72	
Grafik 3.20	Kontribusi Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Kawasan	57	Grafik 4.1	Volume Perdagangan Dunia, Ekspor dan Harga Ekspor	74
Grafik 3.21	Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Kawasan	57	Grafik 4.2	<i>Terms of Trade Total (ToT)</i>	76
Grafik 3.22	Pertumbuhan Nilai Impor Riil Nonmigas Menurut Kategori Ekonomi	57	Grafik 4.3	<i>Terms of Trade Nonmigas</i>	76
Grafik 3.23	Kontribusi Pertumbuhan Nilai Impor	58	Grafik 4.4	Perkembangan Indeks Harga Ekspor	77
Grafik 3.24	Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Kawasan	58	Grafik 4.5	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas	77

Grafik 4.6 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam	78	Grafik 4.22 Perkembangan Cadangan Devisa	87
Grafik 4.7 Pertumbuhan Ekspor ke Empat Negara Tujuan Utama Asia	78	Grafik 4.23 Indikator Kerentanan Eksternal	87
Grafik 4.8 Pertumbuhan Ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa	79	5. Nilai Tukar	94
Grafik 4.9 Pangsa Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Utama	79	Grafik 5.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	96
Grafik 4.10 Pertumbuhan Impor Nonmigas Menurut Kategori Ekonomi	80	Grafik 5.2 Apresiasi / Depresiasi Nilai Tukar Kawasan	96
Grafik 4.11 Impor Minyak dan Konsumsi BBM	81	Grafik 5.3 Volatilitas Nilai Tukar Rupiah	97
Grafik 4.12 Konsumsi BBM per Sektor Pengguna	81	Grafik 5.4 Volatilitas Nilai Tukar Kawasan	97
Grafik 4.13 Perkembangan Neraca Jasa	81	Grafik 5.5 Analisis Rangkaian Kejadian dan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	98
Grafik 4.14 Perkembangan Investasi Langsung Asing	82	Grafik 5.6 Premi Swap	98
Grafik 4.15 Investasi Langsung Asing Menurut Sektor Ekonomi	83	Grafik 5.7 Indeks Risiko dan Selisih Imbal Hasil	98
Grafik 4.16 Investasi Langsung Asing Menurut Negara Asal	83	Grafik 5.8 Indeks Risiko Global	99
Grafik 4.17 Investasi Portofolio Asing Menurut Sektor Penerbit	84	Grafik 5.9 CDS Kawasan Eropa	99
Grafik 4.18 Transaksi Investasi Portofolio Asing Menurut Jenis Instrumen	84	Grafik 5.10 Nilai Tukar terhadap Dolar AS	99
Grafik 4.19 Kewajiban Investasi Lainnya Sektor Swasta	85	Grafik 5.11 <i>Uncovered Interest Parity</i> (UIP)	100
Grafik 4.20 Posisi ULN Indonesia	86	Grafik 5.12 <i>Covered Interest Parity</i> (CIP)	100
Grafik 4.21 Pertumbuhan dan Pangsa ULN	86	Grafik 5.13 Aliran Dana Nonresiden pada Portofolio Rupiah	100
		Grafik 5.14 Kepemilikan Nonresiden pada SBN	101
		Grafik 5.15 <i>Turn Over</i> Harian Pasar Valas Kawasan	101
		Grafik 5.16 Instrumen Pasar Valas Dalam Negeri	102

Daftar Grafik

6. Inflasi	106	7. Operasi Keuangan Pemerintah	124
Grafik 6.1 Perkembangan Inflasi	109	Grafik 7.1 Operasi Keuangan Pemerintah	127
Grafik 6.2 Inflasi 2012 dan Historis	109	Grafik 7.2 Komposisi Pendapatan Negara 2011 dan 2012	129
Grafik 6.3 Inflasi Daerah 2012 dan Historis	109	Grafik 7.3 Pola Penyerapan Triwulanan Belanja Negara	130
Grafik 6.4 Indikator Permintaan Domestik	110	Grafik 7.4 Perkembangan Subsidi	131
Grafik 6.5 Kapasitas Terpakai dan Inflasi	110	Grafik 7.5 Komposisi Belanja Negara	131
Grafik 6.6 Inflasi Inti <i>Nontradable</i>	111	Grafik 7.6 Perkembangan Transfer ke Daerah	132
Grafik 6.7 Inflasi Sewa dan Kontrak Rumah	111	Grafik 7.7 Pangsa Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	132
Grafik 6.8 Ekspektasi Inflasi Pedagang Eceran	111	Grafik 7.8 Pangsa Belanja Modal Terhadap Total Belanja	133
Grafik 6.9 Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i>	112	Grafik 7.9 PAD per Kawasan	133
Grafik 6.10 Inflasi Inti <i>Tradable</i>	112	Grafik 7.10 Perkembangan Rasio Belanja Pemda Terhadap Dana Perimbangan	134
Grafik 6.11 Inflasi Inti dan Nilai Tukar	112	Grafik 7.11 Perkembangan Pembiayaan	135
Grafik 6.12 Inflasi Inti Makanan dan Nonmakanan	113	Grafik 7.12 Perkembangan Imbal Hasil SBN	135
Grafik 6.13 Inflasi Inti Makanan dan Harga Global	113	Grafik 7.13 Perkembangan Utang Pemerintah	136
Grafik 6.14 Inflasi Beras	114	Grafik 7.14 Perbandingan Rasio Keseimbangan Primer Terhadap PDB Beberapa Negara Berkembang	136
Grafik 6.15 Pola Inflasi Daging Sapi	114	Grafik 7.15 Perkembangan Rekening Pemerintah Pusat di BI	136
Grafik 6.16 Inflasi Daging Sapi dan Daging Ayam	115		
Grafik 6.17 Inflasi Hortikultura	115		
Grafik 6.18 Pola Inflasi Cabai Merah	116		
Grafik 6.19 Inflasi Bahan Bakar Rumah Tangga	116		
Grafik 6.20 Inflasi <i>Headline</i> Negara Kawasan	117		
Grafik 6.21 Inflasi Bahan Makanan Negara Kawasan	117		

8. Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran

142

Grafik 8.1 Jumlah Kantor Bank Tahun 2009 – 2012	144
Grafik 8.2 Rasio Densitas	144
Grafik 8.3 Perkembangan Kredit Tahun 2009 – 2012	145
Grafik 8.4 Perbandingan Kredit per PDB	145
Grafik 8.5 Pertumbuhan Kredit KI, KMK dan KK	146
Grafik 8.6 Porsi Kredit UMKM	146
Grafik 8.7 Komposisi Pendapatan Perbankan	147
Grafik 8.8 NIM BU Konvensional Tahun 2009 – 2012	147
Grafik 8.9 Rasio BOPO Perbankan Tahun 2009 – 2012	148
Grafik 8.10 Perkembangan CAR Tahun 2009 – 2012	148
Grafik 8.11 Perkembangan Modal Tahun 2009 – 2012	149
Grafik 8.12 Perkembangan Struktur DPK Tahun 2009 – 2012	149
Grafik 8.13 Perkembangan DPK Pemerintah dan Swasta	149
Grafik 8.14 Rasio Aksesibilitas	150
Grafik 8.15 Komposisi Jangka Waktu Deposito Tahun 2009 – 2012	150
Grafik 8.16 Perkembangan LDR Tahun 2009 – 2012	151

Grafik 8.17 Perkembangan NPLs Tahun 2009 – 2012	151
Grafik 8.18 Instrumen Keuangan yang Dimiliki Tahun 2009 – 2012	152
Grafik 8.19 Komposisi Surat-Surat Berharga Dalam <i>Pos Available For Sale</i>	152
Grafik 8.20 IHSG dan Imbal Hasil SBN	153
Grafik 8.21 Kontribusi Sektoral dalam IHSG	154
Grafik 8.22 Nilai Perdagangan Saham	154
Grafik 8.23 Kapitalisasi Pasar per PDB	155
Grafik 8.24 Posisi dan Volume Perdagangan Obligasi Negara	155
Grafik 8.25 Rasio Penerbitan Obligasi terhadap PDB	156
Grafik 8.26 Perkembangan Aset LKBB	156
Grafik 8.27 Porsi Kepemilikan SBN	157
Grafik 8.28 Perkembangan Transaksi RTGS	159
Grafik 8.29 Perkembangan Transaksi SSSS	159
Grafik 8.30 Perkembangan Transaksi SKNBI	160
Grafik 8.31 Perkembangan Transaksi APMK	160
Grafik 8.32 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	161
Grafik 8.33 Perkembangan Transaksi <i>e-Money</i>	161
Grafik 8.34 Perkembangan UYD, PDB dan Inflasi	161
Grafik 8.35 Pertumbuhan UYD, Konsumsi RT, Rasio UYD terhadap Konsumsi RT	162
Grafik 8.36 Perkembangan Posisi UYD	162

Daftar Grafik

Grafik 8.37 Perkembangan Pangsa UYD di Perbankan	163	Grafik 9.10 Perkembangan Suku Bunga KI, KMK, dan KK	184
Grafik 8.38 Pecahan UYD Berdasarkan Nominal	163	Grafik 9.11 Perkembangan Uang Primer dan Kartal	185
Grafik 8.39 Pecahan UYD Berdasarkan Bilyet/Keping	163	Grafik 9.12 Perkembangan M1 dan M2	185
Grafik 8.40 Aliran Uang Kartal Keluar	164	Grafik 9.13 Perkembangan Giro, Tabungan, Deposito	186
Grafik 8.41 Perkembangan <i>Inflow</i>	164	Grafik 9.14 Kontribusi M1, Tabungan dan Giro	186
Grafik 8.42 Perkembangan Aliran Uang Kartal Masuk	165	Grafik 9.15 Rasio Likuiditas Perekonomian / PDB	186
Grafik 8.43 Perkembangan <i>Netflow</i> Daerah	165	Grafik 9.16 Kontribusi Faktor yang Memengaruhi M2	187
9. Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar	174	Grafik 9.17 Velositas M1 dan M2	187
Grafik 9.1 Perkembangan Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia	180	Grafik 9.18 Velositas M2 U-Shape Jangka Panjang	187
Grafik 9.2 Perkembangan Suku Bunga Instrumen	181	10. Kebijakan Makroprudensial, Mikroprudensial dan Sistem Pembayaran	198
Grafik 9.3 Posisi Instrumen Operasi Moneter dan Cadangan Devisa	181	Grafik 10.1 Perkembangan Fraud Pemalsuan Kartu Kredit	209
Grafik 9.4 Posisi Instrumen Operasi Moneter	182	11. Koordinasi Kebijakan	226
Grafik 9.5 Komposisi Instrumen Operasi Moneter	182	Grafik 11.1 Peta Sebaran TPID	229
Grafik 9.6 Perkembangan Suku Bunga PUAB	183	12. Prospek Tantangan dan Arah Kebijakan	245
Grafik 9.7 Perkembangan Volume Transaksi PUAB	183	Grafik 12.1 PDB Dunia dan Harga Komoditas	249
Grafik 9.8 Perkembangan Bank Pelaku Transaksi PUAB	184		
Grafik 9.9 BI Rate, LPS dan Suku Bunga Perbankan	184		

Grafik 12.2 Struktur Demografi Indonesia	250
<hr/>	
Grafik 12.3 Perkembangan Rasio PMTB Terhadap PDB	250
<hr/>	
Grafik 12.4 Prakiraan Pertumbuhan Negara Tujuan Ekspor Indonesia	251
<hr/>	
Grafik 12.5 Perkembangan Pertumbuhan Komponen PDB	251
<hr/>	
Grafik 12.6 Perkembangan Industri Pengolahan, Ekspor, dan Konsumsi	253
<hr/>	
Grafik 12.7 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia dan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	254
<hr/>	
Grafik 12.8 Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah	255
<hr/>	

Dewan Gubernur



Darmin Nasution

Gubernur

Hartadi A. Sarwono

Deputi Gubernur



Muliaman D. Hadad

Deputi Gubernur

s.d. Juli 2012





Budi Mulya
Deputi Gubernur

s.d. November 2012

Ardhayadi Mitroatmodjo
Deputi Gubernur

s.d. November 2012



Halim Alamsyah
Deputi Gubernur

Ronald Waas
Deputi Gubernur



Prakata

Darmin Nasution

Gubernur Bank Indonesia



Tahun 2012 adalah tahun, yang selain penuh tantangan, sekaligus juga memberikan banyak pelajaran. Sejak awal tahun 2012, turbulensi di pasar keuangan global masih berlanjut akibat ketidakpastian penanganan krisis Eropa. Di tengah perbaikan ekonomi AS, luasnya dimensi permasalahan krisis Eropa menimbulkan implikasi global yang sangat besar. Ekonomi negara-negara *emerging market* yang sebelumnya dapat bertahan dan diharapkan menjadi penyangga pemulihan ekonomi global kembali mengalami perlambatan. Melalui jalur perdagangan, ekonomi China terkena imbasnya karena Eropa adalah mitra dagang utamanya. Pada tahun 2012, ekonomi China pun melambat cukup berarti sehingga menyebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Pelemahan ekonomi mendorong otoritas di sebagian besar negara *emerging market* mengalihkan fokus kebijakan dari pengendalian inflasi ke upaya mendorong pertumbuhan.

Perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas begitu saja dari dinamika dan mata rantai perdagangan global tersebut. Apabila sejak krisis 2008 dampak global dominan dirasakan melalui jalur keuangan, maka sejak tahun 2012 Indonesia mulai terkena imbasnya, baik melalui jalur pasar keuangan maupun jalur perdagangan. Dengan melambatnya ekonomi beberapa negara mitra dagang Indonesia, terutama China, serta merosotnya harga komoditas global, nilai ekspor Indonesia menunjukkan penurunan terutama sejak pertengahan 2012. Namun, di tengah melambatnya kinerja ekspor, perekonomian domestik secara keseluruhan dapat tetap tumbuh tinggi karena kuatnya permintaan domestik. Dalam delapan tahun terakhir, perekonomian Indonesia dapat tumbuh stabil dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,0% per tahun. Kuatnya permintaan domestik ditopang oleh dua kekuatan struktural. Pertama, struktur demograf yang menguntungkan karena kelompok masyarakat berpenghasilan menengah berada dalam fase sedang tumbuh. Kedua, kegiatan konsumsi dan investasi dimungkinkan terus tumbuh karena lingkungan ekonomi makro dan sistem keuangan yang dapat dipertahankan kondusif.

Kestabilan ekonomi makro terutama tercermin dari perkembangan tingkat inflasi yang rendah dan dalam tren yang menurun sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi $4,5 \pm 1\%$. Sementara itu, kestabilan sistem keuangan dapat terjaga dengan baik karena sektor perbankan yang semakin baik dalam menyerap risiko dan tetap dapat menjalankan peran intermediasinya secara efektif. Secara keseluruhan, kestabilan ekonomi makro dan sistem keuangan tidak terlepas dari dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang tetap dijalankan secara konsisten dan hati-hati dengan jalinan koordinasi yang semakin solid.

Tingginya pertumbuhan permintaan domestik di pihak lain menimbulkan konsekuensi fundamental, yaitu berupa tekanan terhadap keseimbangan eksternal. Sejak triwulan IV 2011, neraca transaksi berjalan beralih dari surplus ke defisit karena kuatnya permintaan domestik tidak ditopang oleh kemandirian industri domestik untuk memasok barang modal dan bahan baku, serta semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Berbagai permasalahan tersebut, serta turunnya ekspor yang cukup tajam sebagai dampak melambatnya perekonomian dunia, menyebabkan transaksi berjalan pada tahun 2012 mengalami defisit yang cukup besar. Namun, neraca pembayaran secara keseluruhan tetap mencatat surplus karena neraca modal mengalami surplus yang besar sehingga dapat menutupi defisit neraca transaksi berjalan.

Dinamika global dan domestik sebagaimana tersebut di atas menghadapkan Bank Indonesia pada tantangan kebijakan yang cukup berat. Di satu sisi, Bank Indonesia harus menjaga kestabilan ekonomi makro karena meningkatnya tekanan pada nilai tukar rupiah sejak akhir tahun 2011 sebagai dampak tidak langsung krisis Eropa dan sebagai konsekuensi fundamental dari defisit neraca transaksi berjalan. Di sisi lain, Bank Indonesia harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pelemahan ekonomi global dan pada saat bersamaan menjaga keseimbangan neraca transaksi berjalan.

Menyikapi tantangan tersebut, Bank Indonesia melakukan bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan. Kebijakan moneter diarahkan

Prakata

agar suku bunga mampu membawa inflasi ke depan tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Bank Indonesia pada Februari 2012 menurunkan BI Rate 25 bps sebagai langkah antisipatif lanjutan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi global. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat BI rate 5,75% serta memperkuat operasi moneter dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi makro. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keseimbangan eksternal dengan mengeluarkan kebijakan *loan-to-value ratio* (LTV) dan *minimum down payment* (DP). Penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan komunikasi kebijakan juga terus dilakukan untuk mendukung efektivitas kebijakan.

Ke depan, berbagai langkah kebijakan akomodatif di negara-negara maju dan *emerging market* diperkirakan akan mampu menstimulasi perekonomian global menuju pemulihan meskipun secara bertahap. Sejalan dengan meningkatnya harga-harga komoditas di pasar global, ekspor Indonesia akan kembali meningkat. Permintaan domestik akan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan, dengan pola pertumbuhan yang tetap berimbang antara konsumsi dan investasi. Aktivitas persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 akan memberikan daya dorong tambahan pada kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pada tahun 2013 perekonomian domestik diperkirakan akan tumbuh

dalam kisaran 6,3%-6,8%, lebih baik dari tahun 2012. Membaiknya prospek ekonomi global dan domestik ke depan tidak berarti tanpa risiko dan tantangan, dan untuk melewati tantangan tersebut akan tergantung pada keberhasilan perekonomian domestik untuk terus berbenah diri. Meskipun ekonomi global diperkirakan akan pulih, risiko dapat mengemuka karena kegagalan otoritas di negara maju dalam mengatasi *trade-off* antara upaya menstimulasi kegiatan ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal dan pengurangan beban utang. Sementara itu, beberapa tantangan struktural dalam perekonomian domestik yang terus dihadapi memerlukan jalinan koordinasi yang semakin kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan dunia usaha untuk mengembalikan ekonomi pada jalurnya yang benar (*on-track*), terutama dalam mengatasi tekanan defisit pada neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu, langkah kebijakan strategis ke depan adalah bagaimana mengurangi tingginya ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan baku, serta BBM. Tanpa langkah konkrit, upaya mendorong ekonomi untuk tetap tumbuh tinggi hanya akan menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan atau keseimbangan eksternal, yang pada gilirannya menimbulkan gangguan pada stabilitas ekonomi makro.


Kebijakan Bank Indonesia akan tetap diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran sasarannya dan mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal, melalui penguatan bauran kebijakan moneter, nilai tukar, dan makroprudensial. Bauran kebijakan tersebut akan ditopang oleh penajaman strategi komunikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Di samping itu, koordinasi dengan Pemerintah guna memperkuat respons

penawaran dan pemantapan Protokol Manajemen Krisis juga akan terus diperkuat. Di sektor perbankan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kebijakan Bank Indonesia akan difokuskan pada tiga koridor, yaitu (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan dan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi perbankan.

Demikianlah gambaran perekonomian Indonesia tahun 2012 dan prospeknya tahun 2013 yang uraiannya secara lengkap terdapat pada Laporan Perekonomian Indonesia ini. Saya berharap laporan ini dapat menjadi bahan referensi yang mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Akhir kata, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, saya menyampaikan penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Perekonomian Indonesia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi setiap langkah kita dalam berkarya.

Jakarta, Maret 2013
Gubernur Bank Indonesia



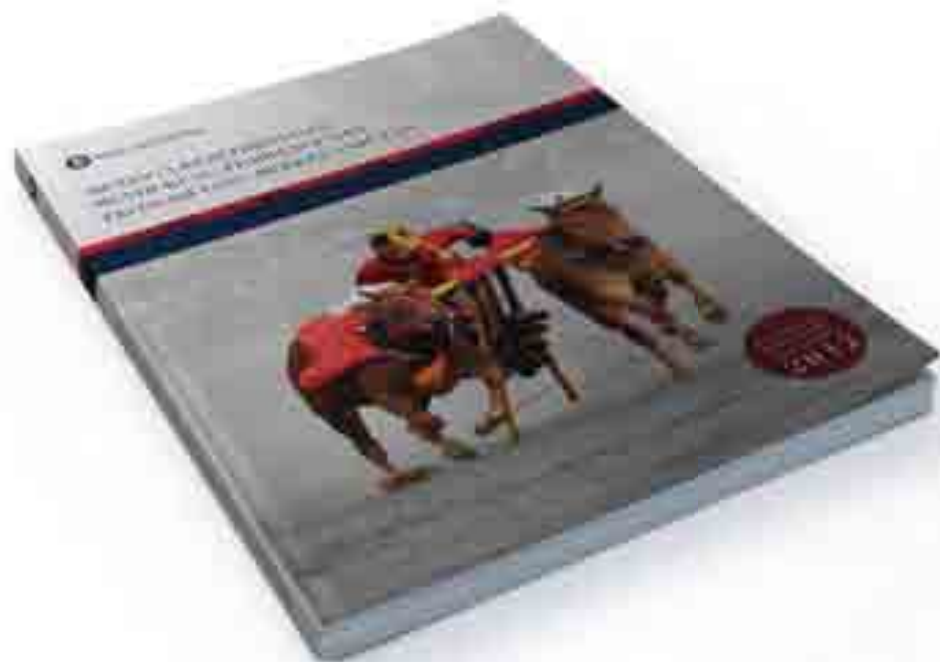
Darmin Nasution

Tinjauan Umum

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2012

“Menjaga Keseimbangan, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi $4,5 \pm 1\%$. Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan.



Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5±1%. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan.

Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan.

Perekonomian Global

Ekonomi global terus mengalami penurunan sejalan dengan dampak krisis di negara maju yang mulai dirasakan negara-negara *emerging market*. Selama periode laporan, ekonomi global tercatat tumbuh melambat menjadi 3,2%, lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 3,9%. Memburuknya pertumbuhan ekonomi di negara maju terutama disebabkan oleh kinerja ekonomi negara-negara di kawasan Eropa yang masih dihadapkan pada permasalahan utang, kontraksi fiskal, terbatasnya ruang kebijakan moneter, tingkat pengangguran yang meningkat tajam, rapuhnya sektor keuangan, serta merosotnya kepercayaan pasar. Seluruh problematika tersebut membentuk sebuah lingkaran permasalahan (*vicious circle*) yang menyebabkan pemulihan krisis Eropa berjalan lambat. Lesunya perekonomian di negara maju mulai berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara *emerging market*. Pertumbuhan ekonomi China dan India sebagai motor penggerak perekonomian di negara *emerging market* mengalami perlambatan terutama di pertengahan tahun 2012.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi dunia secara umum mengalami penurunan. Penurunan inflasi tersebut juga sejalan dengan menurunnya harga komoditas global, terutama komoditas nonmigas. Sebaliknya harga minyak justru mengalami kenaikan, yang antara lain disebabkan oleh menurunnya pasokan. Di kelompok komoditas nonmigas, penurunan harga terutama terjadi pada komoditas berbasis sumber daya alam (SDA). Komoditas yang mengalami penurunan harga cukup tajam adalah komoditas logam dasar dan batubara, terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi China yang merupakan konsumen terbesar di dunia untuk komoditas tersebut. Sementara itu, komoditas hasil industri mengalami penurunan harga yang relatif moderat.

Pelemahan ekonomi mendorong otoritas di sebagian besar negara untuk mengalihkan fokus kebijakan

dari pengendalian inflasi ke upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, negara maju tetap mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif meskipun beberapa diantaranya melakukan pengetatan fiskal terkait dengan tingginya defisit fiskal. Di kelompok negara-negara *emerging market*, sebagian besar merespons pelemahan ekonominya dengan melakukan pelonggaran moneter, sementara beberapa negara lainnya menempuh kebijakan moneter netral terkait masih tingginya tekanan inflasi. Di sisi fiskal, pemerintah negara-negara *emerging market* pada umumnya merespons pelemahan ekonomi dengan memberikan stimulus mengingat masih tersedianya ruang kebijakan fiskal yang ekspansif (*fiscal space*).

Kebijakan-kebijakan yang cenderung akomodatif di negara-negara maju berdampak pada meningkatnya likuiditas di pasar keuangan global, yang selanjutnya meningkatkan arus investasi khususnya ke negara-negara *emerging market* di kawasan Asia, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun portofolio di pasar modal dan pasar obligasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja bursa saham dan pasar obligasi dunia secara umum meningkat meskipun sempat terkoreksi pada triwulan II 2012, terkait meningkatnya tekanan krisis utang Eropa, terutama Yunani.

Kinerja Perekonomian Indonesia

Di tengah ekonomi dunia yang tumbuh melambat, ekonomi Indonesia pada tahun 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,2%, terutama ditopang oleh permintaan domestik. Dalam delapan tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh cukup tinggi mencapai rata-rata di atas 6% per tahun dan merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi sekaligus paling stabil di dunia. Terjaganya kesinambungan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh lingkungan ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif dan stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ditopang oleh kenaikan kontribusi permintaan domestik di tengah

pelemahan kinerja ekspor yang terimbas oleh melemahnya permintaan eksternal. Sementara itu, kinerja impor, meskipun melambat masih tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Kuatnya permintaan domestik terutama berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai pertumbuhan tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008/2009, didukung oleh terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen yang meningkat. Di sisi investasi, pertumbuhan yang cukup tinggi terutama didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Dari sisi Pemerintah, pertumbuhan belanja pemerintah secara riil tercatat mengalami penurunan. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi domestik masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian dan sektor bangunan juga mengalami peningkatan sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Namun, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan yang masih relatif rendah sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.

Dari sisi daerah, capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 masih ditopang oleh kontribusi ekonomi kawasan Jawa dan kawasan Jakarta yang tetap besar, disertai kontribusi ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa dan kawasan Jakarta yang masih relatif stabil pada tingkat yang cukup tinggi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi KTI tercatat lebih tinggi dari tahun sebelumnya, didorong oleh menguatnya aktivitas domestik di kawasan ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera cenderung melambat sehingga kontribusinya pada perekonomian nasional sedikit menurun. Dengan perkembangan tersebut, dalam sepuluh tahun terakhir, disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia cenderung mengecil, dengan peran KTI yang relatif meningkat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi, kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,1%, dibandingkan 6,6% pada tahun sebelumnya. Hal ini juga diiringi dengan membaiknya kualitas ketenagakerjaan seperti tercermin pada meningkatnya tenaga kerja pada sektor formal dan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Dengan perbaikan tersebut, jumlah dan persentase penduduk miskin tercatat sebesar 28,6 juta orang atau 11,7% dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 29,9 juta orang atau 12,4% dari total penduduk.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2012 masih mencatat surplus, meskipun mengalami tekanan defisit transaksi berjalan. Melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang dan merosotnya harga komoditas ekspor berdampak pada menurunnya kinerja ekspor. Di sisi lain, impor masih tumbuh cukup tinggi, terutama dalam bentuk barang modal dan bahan baku, sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Tingginya impor juga tercatat pada komoditas migas akibat melonjaknya konsumsi BBM, sehingga berdampak pada defisit neraca migas yang terus meningkat dan menambah tekanan pada defisit transaksi berjalan. Akibatnya, di sepanjang tahun 2012 transaksi berjalan mengalami defisit sekitar 2,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan tersebut dapat diimbangi oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga NPI masih mengalami surplus. Tingginya aliran masuk modal asing selama 2012 didukung oleh beberapa faktor. Dari sisi domestik, respons bauran kebijakan yang tepat, kinerja ekonomi domestik yang cukup baik, dan imbal hasil investasi rupiah yang masih menarik menjadi faktor yang menarik aliran masuk modal asing. Dari sisi eksternal, aliran masuk modal asing didorong oleh kebijakan stimulus ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara. Kenaikan arus masuk modal asing terjadi

baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio yang ditanamkan ke dalam pasar saham maupun pasar obligasi. Meningkatnya arus masuk modal tersebut menggambarkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental dan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Kenaikan aliran modal masuk dalam bentuk investasi portofolio juga didorong oleh meningkatnya penerbitan utang luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Meskipun meningkat, posisi utang luar negeri secara keseluruhan masih berada dalam tingkat yang aman. Berdasarkan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir tahun 2012 mencapai 112,8 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.

Sejalan dengan tekanan yang terjadi pada NPI, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dengan volatilitas yang dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Secara rata-rata, rupiah terdepresiasi sebesar 6,3% (yoy) ke level Rp9.358 per dolar AS dari Rp8.768 per dolar AS pada tahun sebelumnya. Tingkat volatilitas rupiah yang relatif rendah tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dalam melakukan stabilisasi nilai tukar. Tekanan depresiasi rupiah selama 2012 terutama disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan melebarnya defisit transaksi berjalan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di pasar valuta asing dalam negeri. Namun, peningkatan arus modal asing yang cukup besar baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio dapat menahan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah lebih lanjut.

Inflasi sepanjang 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi sebesar $4,5\% \pm 1\%$. Terkendalinya inflasi merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang didukung oleh semakin baiknya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Inflasi pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,3% (yoy), terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi *volatile food* yang terkendali, dan inflasi *administered prices*

yang rendah. Inflasi inti yang stabil didukung oleh penerapan strategi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan, harga komoditas impor, dan ekspektasi inflasi tetap terkendali. Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh koordinasi yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Inflasi inti tahun 2012 tercatat rendah sebesar 4,4% (yoy). Ekspektasi inflasi selama tahun 2012 secara umum dapat terkendali dengan baik, meski sempat meningkat pada awal tahun terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut sebagaimana tercermin pada beberapa indikator ekspektasi inflasi seperti hasil survei *Consensus Forecast* dan Survei Konsumen Bank Indonesia yang pada awal tahun cenderung tinggi namun secara berangsur-angsur membaik. Membaiknya ekspektasi inflasi tersebut tidak terlepas dari penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang turut didukung oleh penguatan strategi komunikasi yang terarah dan berkelanjutan untuk pembentukan ekspektasi para pelaku ekonomi.

Rendahnya inflasi inti tersebut juga didukung oleh terkelolanya permintaan domestik serta meningkatnya kemampuan sisi produksi dalam merespons permintaan domestik sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi dalam beberapa tahun terakhir. Terjaganya kapasitas utilisasi pada level 70%-75% masih dapat mengimbangi permintaan yang masih kuat sehingga tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan pada harga. Selain itu, rendahnya inflasi inti juga disebabkan oleh rendahnya tingkat inflasi dari sisi impor (*imported inflation*) seiring dengan penurunan harga komoditas akibat perlambatan perekonomian dunia, nilai tukar yang terjaga pada tingkat volatilitas rendah, dan kebijakan pemerintah terkait bea masuk impor.

Inflasi kelompok *volatile food* dan *administered prices* tahun 2012 cukup terkendali. Di sisi kelompok

volatile food, terkendalinya inflasi pada tingkat yang rendah, sebesar 5,7% (yoy), terutama dipengaruhi oleh peningkatan produksi pangan domestik dan kelancaran distribusi. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pertanian dan keterhubungan antarwilayah serta koordinasi yang intensif antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama pada upaya peningkatan kecukupan produksi/ pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis. Peningkatan produksi/pasokan pangan terutama didukung oleh meningkatnya luas lahan tanam dan produktivitas, serta impor bahan pangan. Sementara itu, inflasi *administered prices*, tercatat cukup rendah, yaitu 2,7% (yoy). Inflasi *administered prices* terutama disumbang oleh kenaikan harga rokok. Komoditas *administered prices* lainnya seperti bahan bakar rumah tangga dan bensin memberikan sumbangan yang minimal terhadap inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kelompok *administered prices* pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor keuangan, kinerja perekonomian domestik yang berdaya tahan tersebut juga didukung oleh membaiknya kinerja perbankan. Membaiknya kinerja perbankan antara lain terlihat dari ekspansi kredit yang masih tetap tinggi dan dapat dipertahankan pada tingkat yang aman bagi perekonomian. Hal tersebut diikuti dengan strategi penyaluran kredit yang ditujukan ke sektor produktif dalam bentuk kredit investasi. Selama tahun 2012, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti oleh kredit KMK dan kredit konsumsi. Membaiknya kinerja perbankan juga terlihat dari sisi pendanaan sebagaimana terlihat dari meningkatnya dana pihak ketiga, terutama dalam bentuk deposito.

Kinerja intermediasi yang cukup baik juga didukung oleh kondisi perbankan yang sehat dengan eksposur risiko yang dapat dikelola dengan baik. Permodalan bank tercatat mengalami peningkatan dengan

struktur permodalan terutama dalam bentuk modal inti (tier 1). Dengan struktur permodalan yang lebih didominasi oleh modal inti, ketahanan bank dalam menyerap risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank atau perubahan lingkungan bisnis bank menjadi lebih baik. Dari aspek risiko, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang sehat berperan besar dalam mendukung upaya perbankan untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko likuiditas pada tingkatan yang relatif rendah. Di tengah ekspansi kredit yang tinggi, perbankan mampu menjaga risiko kredit pada tingkatan yang aman. Sementara itu, dengan volatilitas nilai tukar yang dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan sistem pembayaran nasional yang handal, risiko pasar dan operasional perbankan tetap terjaga.

Membbaiknya kinerja dan ketahanan Bank juga diikuti oleh peningkatan efisiensi. Upaya Bank Indonesia mendorong efisiensi perbankan mulai menunjukkan hasilnya. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan penurunan menjadi sebesar 75,4% dari 85,3% pada tahun 2011 yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi. Selain di bank umum, peningkatan efisiensi juga terlihat di perbankan syariah dan BPR. Meskipun secara umum perbankan menunjukkan adanya perbaikan efisiensi, Bank Indonesia mencatat bahwa tingkat efisiensi perbankan masih perlu terus ditingkatkan. Selisih suku bunga kredit dan suku bunga simpanan tercatat masih cukup besar. Selain itu, meskipun menurun, rasio BOPO perbankan Indonesia masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN yang berkisar antara 40%-60%.

Kinerja yang positif juga terjadi pada pasar keuangan domestik. Di pasar saham, meski pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diwarnai oleh beberapa gejolak sebagai imbas dari peningkatan risiko eksternal, IHSG ditutup pada level 4.316,7 pada akhir tahun 2012 atau meningkat sebesar 12,9% dibanding tahun sebelumnya. Dukungan stabilitas

ekonomi makro yang terjaga, kinerja emiten yang membaik, serta kebijakan pereconomian yang tepat menjadi faktor penopang penguatan IHSG. Sejalan dengan kinerja di pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan perkembangan yang membaik. Hal ini terutama didukung oleh fundamental ekonomi yang tetap kuat, defisit fiskal yang masih tetap rendah, dan perolehan peringkat layak investasi (*investment grade*). Sejalan dengan hal tersebut, imbal hasil nominal SBN kembali mengalami penurunan sehingga pada akhir tahun 2012 berada pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan berbagai indikator domestik yang positif serta likuiditas global yang meningkat mendorong aliran modal masuk khususnya dalam bentuk penempatan di SBN. Di pasar obligasi korporasi, penerbitan obligasi korporasi mencatat kenaikan yang signifikan pada tahun 2012 terutama didominasi oleh emiten sektor keuangan yang antara lain ditujukan untuk memenuhi keperluan modal kerja. Maraknya penerbitan obligasi korporasi selama 2012 antara lain didorong oleh penurunan biaya pendanaan (*cost of funding*) pasar obligasi.

Stabilitas sistem keuangan yang terjaga dan aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat tidak terlepas dari peran sistem pembayaran yang mendukung kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi perekonomian. Pada tahun 2012, peran sistem pembayaran dalam mendukung aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha di Indonesia semakin meningkat sebagaimana terlihat dari nilai transaksi melalui berbagai sistem pembayaran yang meningkat. Peningkatan transaksi tersebut selain didorong oleh kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas perekonomian domestik yang terus meningkat juga diakomodasi dengan pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (UYD) di masyarakat. Hal ini tercermin pada meningkatnya pertumbuhan rata-rata uang kartal yang diedarkan (UYD) maupun

aliran keluar (*outflow*) dan masuk (*inflow*) uang kartal melalui Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transaksi rumah tangga.

Respons Kebijakan

Berbagai pencapaian positif pada kinerja perekonomian nasional pada tahun 2012 tidak terlepas dari berbagai langkah yang ditempuh Bank Indonesia serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Dari sisi Bank Indonesia, perumusan kebijakan tetap ditempuh dengan melakukan bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, penguatan koordinasi, dan komunikasi kebijakan.

Kebijakan moneter diarahkan agar pergerakan inflasi ke depan tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Bank Indonesia pada Februari 2012 menurunkan BI Rate 25 bps sebagai langkah antisipatif lanjutan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi global dan tetap terkendalinya inflasi. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga menurunkan koridor bawah suku bunga operasi moneter Bank Indonesia sebesar 50 bps menjadi 3,75%. Penurunan koridor bawah suku bunga operasi moneter tersebut dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan antar bank dan mengurangi risiko likuiditas bank, sekaligus memperluas sumber pendanaan. Pada Maret 2012, ekonomi Indonesia dihadapkan pada melambungnya ekspektasi inflasi yang dipicu oleh adanya rencana kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM. Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk mengantisipasi dampak peningkatan ekspektasi inflasi jangka pendek melalui penguatan operasi moneter untuk mengendalikan akses likuiditas jangka pendek. Selanjutnya untuk menjaga kestabilan ekonomi makro, sejak Maret 2012, BI Rate juga dipertahankan pada tingkat tingkat 5,75%.

Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Dalam menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah dan melakukan langkah stabilisasi di pasar valuta asing (*valas*) secara terukur. Untuk membantu upaya ini, ketersediaan pasokan valas yang lebih berkesinambungan menjadi sangat penting. Dalam rangka tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan terkait penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai efektif pada Januari 2012. Sesuai dengan kebijakan DHE, eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui bank devisa di dalam negeri. Selain itu, untuk memperkuat struktur pasokan devisa, sejak Juni 2012 Bank Indonesia secara reguler melakukan lelang *Term Deposit* (TD) valas. Instrumen ini dimaksudkan untuk memperkaya instrumen valas domestik dan menjadi *outlet* penempatan devisa untuk memfasilitasi masuknya devisa, termasuk yang berasal dari hasil ekspor. Bank Indonesia juga melakukan relaksasi terhadap ketentuan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valas oleh bank untuk mendukung penguatan pasokan valas melalui pendalaman pasar valas domestik¹. Perubahan Peraturan Bank Indonesia dilakukan sebagai salah satu upaya dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonominya di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat keterkaitan antara transaksi valas di pasar domestik dengan kegiatan ekonomi.

Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus untuk mendukung keseimbangan eksternal. Untuk mencegah terjadinya risiko pada stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari meningkatnya kredit perbankan secara drastis serta mendukung

1 Peraturan Bank Indonesia No. 14/10/PBI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2008 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

upaya mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan, khususnya di sektor- sektor yang konsumtif, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial melalui pengaturan besaran *loan-to-value ratio* (LTV) dan minimum *down payment* (DP). Kebijakan tersebut mengatur tentang besaran rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan minimum *down payment* (DP) untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) yang berlaku sejak Juni 2012. Kebijakan tersebut kemudian diperluas bagi perbankan syariah. Selain itu, kebijakan serupa juga dikeluarkan oleh Bapepam-LK yang berlaku untuk perusahaan pembiayaan.

Kebijakan makroprudensial tersebut juga didukung oleh kebijakan mikroprudensial perbankan dan sistem pembayaran. Di bidang mikroprudensial perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMU) dan kewajiban pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum bagi kantor cabang bank asing (KCBA) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengantisipasi, memitigasi, dan menyerap risiko. Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan melalui penataan struktur kepemilikan bank serta pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dan mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan dimaksud antara lain dilakukan melalui persiapan implementasi Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) Generasi II, pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway-NPG), interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik, persiapan

implementasi standar nasional kartu ATM/Debet berbasis chip, perluasan akses BPR dalam sistem pembayaran, dan penyempurnaan ketentuan untuk lebih meningkatkan penerapan aspek perlindungan konsumen. Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan juga dilakukan dari sisi pembayaran tunai. Untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, layak edar dan tepat waktu, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat tiga pilar kebijakan pengelolaan uang, yaitu : i) tersedianya uang rupiah yang berkualitas; ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan terpercaya; dan iii) layanan kas prima.

Penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan komunikasi kebijakan juga terus dilakukan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Penguatan koordinasi dilakukan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dapat saling mendukung dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh Pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi makro serta momentum pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan melalui forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pegendali Inflasi Daerah (TPID). TPI secara aktif melakukan pemantauan serta merumuskan dan merekomendasikan respons kebijakan yang perlu diambil untuk mengendalikan tekanan inflasi. Sementara itu, TPID yang tersebar di seluruh Indonesia memusatkan programnya untuk mendorong stabilisasi harga melalui operasi pasar, penguatan pasokan dan distribusi barang, serta penguatan strategi komunikasi. Selanjutnya, dalam kerangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam memperkuat protokol manajemen krisis tingkat nasional melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Sementara itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat strategi komunikasi kepada masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan.

Prospek, Tantangan, dan Arah Kebijakan

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, mencapai kisaran 6,3%-6,8% . Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Dari sisi konsumsi, perbaikan daya beli dan keyakinan konsumen, serta meningkatnya aktivitas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan. Sementara itu, kontribusi ekspor dalam pembentukan PDB diperkirakan juga akan meningkat sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia dan meningkatnya harga komoditas global. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan juga akan memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama, yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap mendominasi perkembangan perekonomian nasional. Secara umum, perkembangan secara sektoral akan membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik dan global.

Di sisi eksternal, sejalan dengan upaya Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal, rasio defisit neraca transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan akan menurun. Sementara dari sisi transaksi modal dan finansial, masih akan mencatat surplus yang cukup besar, terutama dalam bentuk PMA seiring dengan iklim investasi yang tetap kondusif.

Untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat, Pemerintah (berkoordinasi dengan Bank Indonesia) pada tahun 2012 menetapkan sasaran inflasi jangka menengah, yaitu $4,5\% \pm 1\%$ tahun 2013, $4,5\% \pm 1\%$ tahun 2014, dan $4,0\% \pm 1\%$ tahun 2015. Dengan dukungan bauran kebijakan yang terus diperkuat serta koordinasi dengan Pemerintah yang semakin erat, inflasi pada 2013 diperkirakan akan tetap terkendali dan berada pada kisaran sasarannya. Inflasi inti

diprakirakan relatif terkendali dengan dukungan peningkatan kapasitas produksi dan ekspektasi inflasi yang semakin terjangkau. Tekanan inflasi yang berasal peningkatan permintaan diperkirakan relatif moderat diikuti dengan ekspektasi inflasi yang terjaga. Sementara itu, inflasi *volatile food*, diprakirakan akan tetap terkendali, sejalan dengan prakiraan perbaikan produksi dan distribusi. Kenaikan upah minimum provinsi dan tarif tenaga listrik diprakirakan akan meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2013, meskipun tidak signifikan.

Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, di sisi struktural, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Dari sektor perbankan, tantangan yang dihadapi berupa masih relatif tingginya inefisiensi dalam sektor perbankan dan perlunya perluasan akses masyarakat ke layanan jasa perbankan. Dari pasar valas, tantangan, yang dihadapi adalah mendorong pendalaman pasar.

Dengan kondisi tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal. Dalam kaitan tersebut, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten dengan prakiraan inflasi ke depan agar tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai

dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal. Kebijakan tersebut juga akan dilengkapi oleh kebijakan-kebijakan lain di bidang mikroprudensial perbankan dan sistem pembayaran. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan.

Di bidang perbankan, kebijakan difokuskan pada 3 koridor utama yaitu (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi. Di dalam koridor kebijakan penguatan fungsi intermediasi, Bank Indonesia akan mendorong perluasan akses layanan perbankan secara nonkonvensional, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi, dan kerjasama keagenan (*branchless banking*) sehingga layanan perbankan diharapkan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat tanpa perlu menghadirkan fisik kantor bank. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan akan tetap diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran serta kesetaraan akses dalam sistem pembayaran dengan memerhatikan aspek perlindungan konsumen. Di bidang pengelolaan uang, kebijakan diarahkan untuk menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah NKRI, meningkatkan kualitas uang dan efisiensi pengelolaan rupiah serta implementasi UU Mata Uang.

Dalam jangka menengah, Bank Indonesia berupaya untuk terus menurunkan inflasi pada level yang setara dengan negara kawasan. Dalam 3 tahun ke depan, sasaran inflasi Bank Indonesia ditetapkan menurun secara bertahap. Dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di atas 7% diperkirakan dapat tercapai.

Pada tahun 2012, inflasi IHK dapat dikendalikan pada level yang rendah dan berada dalam kisaran sasarannya ($4,5\% \pm 1\%$). Inflasi mencapai 4,3% (yoy), didukung oleh terjaganya inflasi inti (4,4%, yoy), terkendalnya inflasi *volatile food* pada level yang rendah (5,7%, yoy) serta rendahnya inflasi *administered prices* (2,7%, yoy). Perkembangan demikian diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi, yakni menuju sasaran inflasi jangka panjang yang lebih rendah setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang yang rendah. Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi secara baik di level pusat maupun daerah dapat mengatasi berbagai sumber tekanan inflasi selama 2012.

Dinamika perekonomian global mempengaruhi tekanan inflasi sepanjang tahun 2012, sementara berbagai faktor domestik secara umum kondusif bagi pencapaian sasaran inflasi. Perekonomian global yang melemah, sementara permintaan domestik masih cukup kuat, menyebabkan tekanan terhadap defisit neraca transaksi berjalan. Kondisi ini pada gilirannya memberikan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Sejalan dengan pelemahan ekonomi global tersebut, harga komoditas global secara umum cenderung turun. Namun memasuki paruh kedua tahun 2012, beberapa harga pangan global meningkat akibat kekeringan yang terjadi di beberapa negara produsen utama. Kondisi ini memberikan tekanan pada harga sejumlah komoditas pangan domestik. Sementara itu, secara umum kondisi dalam negeri masih cukup kondusif bagi perkembangan harga-

harga. Kondisi permintaan domestik yang kuat masih dapat direspons dengan baik oleh sisi produksi, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya produksi pangan, khususnya beras. Stabilitasnya harga-harga juga didukung oleh ekspektasi inflasi yang relatif terkendali meskipun sempat meningkat di awal tahun terkait dengan kebijakan di bidang energi. Selain itu, minimalnya kebijakan Pemerintah terkait *administered prices* turut mendukung terkendalnya inflasi tahun 2012.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat tidak terlepas dari koordinasi kebijakan yang semakin baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui forum TPI dan TPID. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka mengelola ekonomi makro untuk membawa inflasi ke dalam sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, kebijakan Pemerintah diarahkan untuk mengatasi tekanan inflasi yang berasal dari keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi, khususnya bahan pangan dan energi.

Kebijakan moneter diarahkan agar pergerakan inflasi ke depan tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan pertimbangan inflasi dapat dijaga pada sasarannya, pada awal 2012 Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi di tengah

menurunnya kinerja ekonomi global. Dalam perkembangan selanjutnya, ekonomi Indonesia dihadapkan pada melambungnya ekspektasi inflasi yang dipicu oleh berkembangnya wacana kebijakan Pemerintah terkait subsidi BBM dan meningkatnya tekanan neraca pembayaran. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, Bank Indonesia sejak Maret 2012 mempertahankan BI Rate pada tingkat 5,75% dan mengambil langkah lanjutan melalui penguatan operasi moneter untuk mengendalikan likuiditas jangka pendek, kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan makroprudensial, serta penguatan komunikasi kebijakan.

Selanjutnya, dengan semakin besarnya tekanan pada nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamentalnya untuk mendukung penyesuaian keseimbangan eksternal, memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan pengendalian likuiditas¹, dan meningkatkan pendalaman pasar valas². Sementara itu,

1 Langkah ini dilakukan melalui penyempitan koridor bawah suku bunga operasi moneter Bank Indonesia menjadi 4,00% di Agustus 2012 dan penguatan struktur suku bunga instrumen moneter. Pembentukan struktur suku bunga, khususnya jangka menengah-panjang, yang lebih kompetitif diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi pada sekuritas domestik dan dapat mendorong pasokan valas pada pasar keuangan domestik, sehingga pada gilirannya dapat membantu stabilisasi nilai tukar.

2 Dilakukan melalui penguatan pasokan valas, yaitu: (a) Ketentuan penerimaan Devisa hasil ekspor (DHE) mulai efektif pada Januari 2012 dalam rangka penguatan pasokan valuta asing yang lebih berkesinambungan; (b) lelang Term Deposit (TD) Valas secara reguler sejak Juni 2012 untuk memperkuat struktur pasokan devisa dan (c) melakukan relaksasi terhadap ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank untuk mendukung penguatan pasokan valuta asing melalui

Pemerintah melanjutkan kebijakan *tax holiday* untuk mendorong investasi yang dapat menghasilkan barang modal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang jadi.³

Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keseimbangan eksternal. Untuk mencegah terjadinya risiko pada stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari meningkatnya secara tajam kredit perbankan, khususnya di sektor perumahan dan otomotif, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial melalui pengaturan besaran rasio *loan-to-value ratio* (LTV) dan *minimum down payment* (DP). Kebijakan tersebut mengatur tentang besaran rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) dan *minimum down payment* (DP) untuk kredit

pendalaman pasar valuta asing domestik. Perubahan Peraturan Bank Indonesia dilakukan sebagai salah satu upaya dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat keterkaitan antara transaksi valuta asing di pasar domestik dengan kegiatan ekonomi sehingga dapat meminimalkan transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif dan mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan antara lain merupakan industri pionir yang mencakup industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan; industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau industri peralatan komunikasi.

kendaraan bermotor (KKB) yang berlaku pada Juni 2012. Kebijakan makroprudensial LTV dan minimum DP juga mendukung upaya menekan impor guna mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan.

Sementara itu, koordinasi kebijakan yang solid telah mendorong stabilitas harga kelompok pangan. Inflasi kelompok *volatile food* tahun 2012 cukup rendah yakni mencapai 5,7% (yoy), didukung oleh inflasi beras yang jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya dan inflasi pangan lain yang relatif terkendali. Harga beras mengalami inflasi sebesar 6,0% (yoy), jauh menurun dari tahun sebelumnya 10,8% (yoy) dan rata-rata historisnya 13,1% (yoy).⁴ Melambatnya inflasi beras terutama didukung oleh pasokan yang meningkat. Produksi beras tahun 2012 meningkat sebesar 4,9%, dibandingkan tahun lalu yang mengalami penurunan produksi (-1,07%). Kinerja ini pada gilirannya mempengaruhi besarnya pengadaan beras Bulog yang pada tahun 2012 mencapai sebesar 3,55 juta ton, dua kali lipat dari pengadaan tahun 2011 sebesar 1,7 juta ton. Membaiknya pengadaan beras Bulog juga didukung penetapan kebijakan HPP yang diputuskan sebelum memasuki panen raya serta perbaikan strategi pengadaan beras domestik yang lebih baik. Dalam hal yang terakhir ini, langkah yang dilakukan Bulog antara lain melalui pendekatan langsung ke petani dan tidak hanya ke penggilingan. Untuk memperkuat stabilitas harga dan menjamin kecukupan kebutuhan Raskin, Pemerintah juga melakukan impor beras. Stabilitas harga beras juga didukung oleh penyaluran Raskin hingga 13 kali yang lebih tepat waktu.

4 Periode 2003-2011 (kecuali tahun 2005 dan 2008).

Berbagai kegiatan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan masyarakat juga tetap dilakukan oleh Pemda, diiringi penyelenggaraan pasar murah dan komunikasi yang intensif di berbagai media di daerah. Relatif stabilnya harga beras menyebabkan penurunan jumlah penyaluran Operasi Pasar (OP) yang pada tahun 2012 hanya mencapai 275.000 ton, atau sekitar dua pertiga dari pelaksanaan tahun lalu yang mencapai 397,739 ton. Rendahnya inflasi *volatile food* juga dipengaruhi oleh deflasi yang terjadi hingga enam kali di sepanjang tahun didukung oleh pasokan domestik yang melimpah yang disertai oleh cuaca yang lebih kondusif. Membaiknya produksi pangan tahun 2012 juga didukung oleh besarnya anggaran subsidi pangan (subsidi pangan, pupuk dan benih) yaitu sekitar Rp33 triliun pada tahun 2012, sama besarnya seperti pada tahun 2011.⁵ Sementara itu, pemberlakuan pembatasan impor hortikultura yang diberlakukan mulai tahun 2012, sejauh ini berdampak minimal terhadap inflasi, terutama oleh adanya penundaan implementasi dari semestinya di awal tahun menjadi triwulan III dan langkah sosialisasi yang cukup intensif.

Minimalnya kebijakan pemerintah yang terkait *administered prices* strategis menyebabkan rendahnya tekanan inflasi *administered prices*. Sepanjang tahun 2012, tidak ada kebijakan di bidang harga yang strategis. Di bidang energi, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan di tengah tingginya harga minyak dunia, namun alokasi subsidi BBM dalam

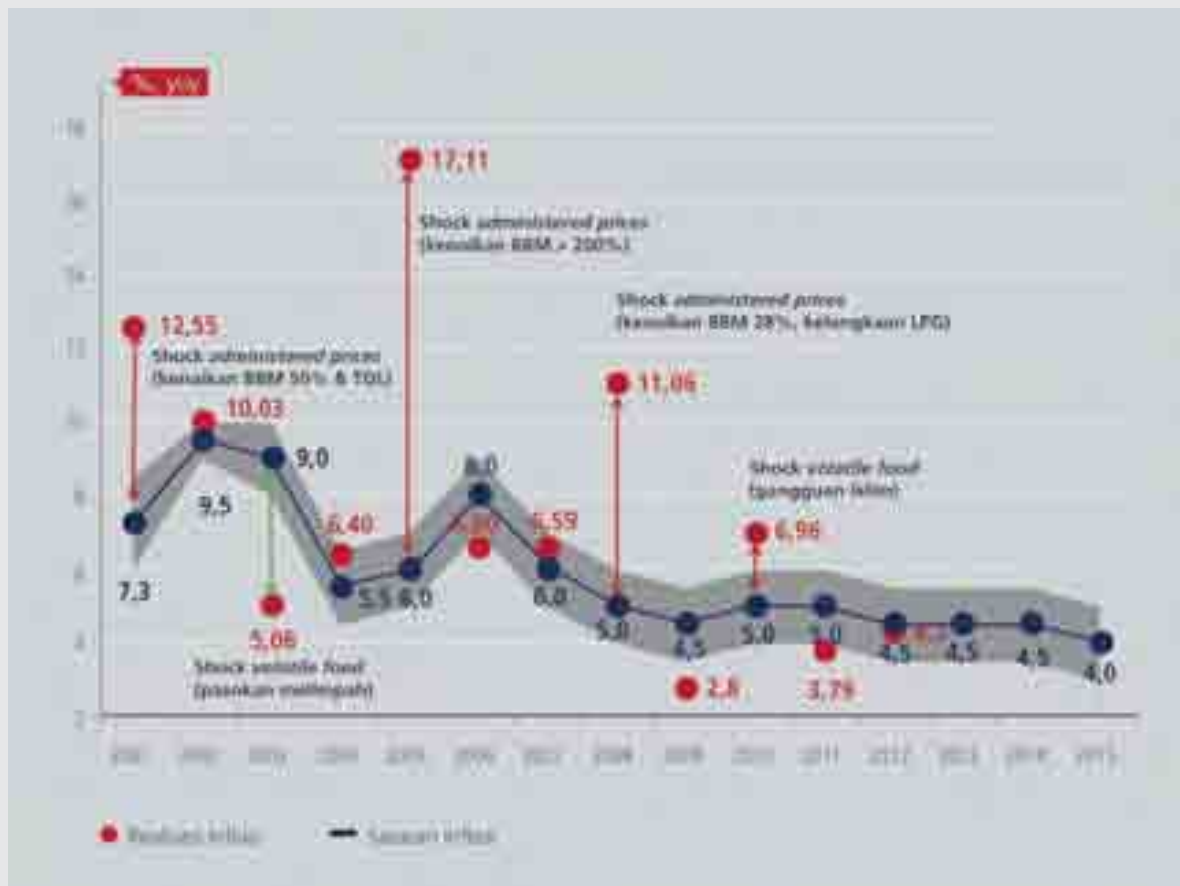
5 Di dalamnya mencakup cadangan stabilisasi pangan (cadangan beras pemerintah dan cadangan stabilisasi harga pangan) yang meningkat dari Rp3,6 triliun tahun 2011 menjadi Rp5 triliun tahun 2012 untuk mengantisipasi potensi gangguan pangan.

APBN tahun 2012 meningkat signifikan. Realisasi subsidi energi mencapai Rp 306,5 triliun (151,5% dari APBNP tahun 2012)⁶ seiring dengan jumlah kuota BBM bersubsidi yang meningkat dari semula 40 juta kiloliter menjadi 45,2 juta kiloliter. Jumlah tersebut meningkat dari realisasi tahun 2011 yakni sebesar Rp 255,6 trlun (130,9% dari APBNP tahun 2011) untuk kuota BBM bersubsidi sebesar 41,9 juta kiloliter. Disamping itu, Pemerintah juga melakukan berbagai langkah penghematan penggunaan BBM bersubsidi dan diversifikasi energi untuk mengendalikan peningkatan subsidi BBM. Pengendalian penggunaan BBM

bersubsidi⁷ dilakukan secara bertahap, yaitu untuk kendaraan dinas, BUMN dan BUMD di wilayah Jabodetabek, efektif per 1 Juni 2012, kemudian dilanjutkan di wilayah Jawa dan Bali pada 1 Agustus 2012, dan selanjutnya pelarangan mobil barang untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan untuk jenis minyak solar pada 1 September 2012. Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini tidak berdampak signifikan pada perkembangan harga di tingkat konsumen sehingga inflasi relatif terjaga. Selain itu, program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg pada tahun 2012 masih berlanjut dan dilaksanakan di

6 Menunggu audit BPK

7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.



provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Program konversi tersebut juga tidak terindikasi memberikan tekanan pada inflasi. Kebijakan diversifikasi energi lainnya yang dilakukan antara lain pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk sektor transportasi.

Selanjutnya, dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi jangka menengah, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/PMK.011/2012 tanggal 30 April 2012 telah menetapkan sasaran inflasi untuk tahun 2013, 2014 dan 2015, masing-masing sebesar 4,5%; 4,5%; dan 4,0% dengan deviasi $\pm 1\%$. Dalam menetapkan sasaran inflasi ini Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, sebagaimana mengacu pada undang-undang yang berlaku.



Bab 1. Perkembangan Ekonomi Global

Bab 2. Respons Kebijakan Ekonomi Global

Bagian 1

PERLAMBATAN
EKONOMI
GLOBAL



Bagian 1

Perlambatan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 cenderung terus menurun dengan mencatat pertumbuhan sebesar 3,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,9%. Kontraksi ekonomi terjadi di kawasan Eropa yang masih menghadapi krisis utang pemerintah. Bahkan perekonomian AS dan Jepang yang tumbuh membaik tidak cukup kuat untuk menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu, negara-negara emerging markets juga mengalami penurunan pertumbuhan meskipun masih lebih tinggi dari negara-negara maju. Perekonomian negara-negara maju hanya tumbuh sebesar 1,3%, melambat dari 1,6% pada tahun 2011, sedangkan perekonomian negara-negara berkembang tumbuh sebesar 5,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,3%.

Permasalahan mendasar di negara-negara maju pada umumnya yaitu masih tingginya beban fiskal dan angka pengangguran. Kondisi tersebut menjadikan permintaan domestik melemah sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Di kawasan Eropa permasalahan utama masih berpusat di negara-negara yang mengalami krisis utang pemerintah. Negara-negara tersebut menghadapi permasalahan angka pengangguran yang tinggi,

proses deleveraging dan program penghematan fiskal yang memasung pertumbuhan ekonomi (vicious circle). Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi sektor keuangan yang rapuh di tengah memburuknya risiko utang. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi sangat rendah (low growth trap), bahkan beberapa negara mengalami kontraksi ekonomi dan jatuh ke dalam resesi ekonomi. Beberapa upaya penyelesaian krisis yang diambil – antara lain berupa introduksi Long-Term Refinancing Operation, kesepakatan Fiscal Compact, program Private Sector Involvement, program Outright Monetary Transaction dan ratifikasi European Stability Mechanism – belum berhasil membalik tren penurunan pertumbuhan di kawasan ini meskipun memberikan arah pemulihan yang lebih jelas. Dampak melemahnya perekonomian kawasan Eropa juga terlihat pada aktivitas perdagangan antar-negara Eropa yang terus menurun.

Kelompok negara berkembang masih menunjukkan resiliensi yang tinggi – berkat dukungan fundamental perekonomian yang kuat – meskipun dampak melemahnya perekonomian negara maju semakin terasa. Hal itu tercermin pada semakin menurunnya ekspor negara-negara berkembang yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi

yang melambat. China yang menjadi motor pertumbuhan juga mengalami penurunan ekspor ke negara-negara maju, yang juga berdampak pada penurunan pertumbuhan investasi. Di kawasan Asia, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam dialami oleh India, sedangkan di kawasan Amerika Latin, Brazil dan Argentina juga menurun sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan kontraksi di Eropa.

Perekonomian global yang melemah juga tercermin pada laju inflasi dan harga komoditas global yang terus menurun terutama komoditas sumber daya alam (SDA). Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menurun direspons dengan kebijakan moneter yang semakin longgar, diiringi oleh kebijakan fiskal yang tetap ekspansif. Negara-negara maju cenderung semakin melonggarkan kebijakan moneter untuk mengkompensasi konsolidasi fiskal yang mulai dilakukan. Negara-negara berkembang juga menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang cenderung longgar. Beberapa negara yang tahun sebelumnya melakukan pengetatan moneter – misalnya China dan India – bahkan berbalik melonggarkan kebijakan moneter untuk memacu permintaan domestik dan aktivitas perekonomian. Meskipun sempat mengalami gejolak akibat

meningkatnya tekanan krisis utang Eropa, pasar keuangan global secara umum mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut didorong oleh adanya peningkatan likuiditas global dan ekspektasi perbaikan ekonomi global sejalan dengan kebijakan yang cenderung akomodatif serta berbagai langkah penyelesaian krisis. Peningkatan likuiditas global tersebut mendorong masuknya aliran modal asing ke negara berkembang di kawasan Asia, terutama untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Selain dalam bentuk penanaman modal asing langsung, arus modal ke negara berkembang juga dalam bentuk investasi portofolio di pasar modal dan pasar obligasi sehingga mendorong peningkatan harga aset di pasar keuangan.



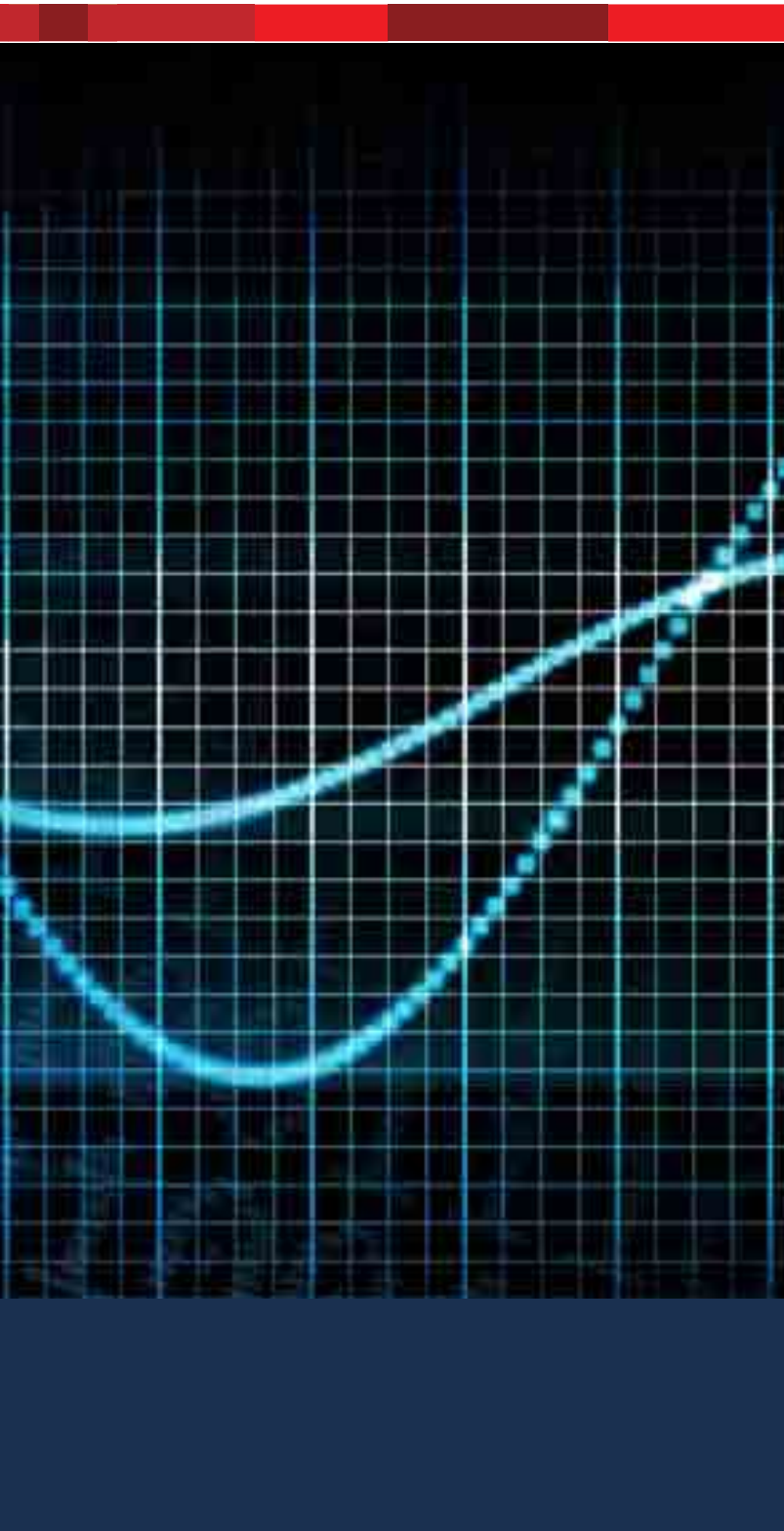
Bab 1

Perekonomian Dunia





Perekonomian Dunia



Perekonomian global pada tahun 2012 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh perekonomian negara-negara maju yang tumbuh rendah, bahkan negara-negara di kawasan Eropa mengalami kontraksi ekonomi. Sementara itu, meski membaik, kinerja ekonomi AS dan Jepang belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi negara-negara berkembang masih tumbuh tinggi meskipun mengalami penurunan. Di sisi lain, secara umum pasar keuangan global justru menunjukkan kinerja yang membaik sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang ditempuh, meskipun sempat diwarnai sentimen negatif. Likuiditas global yang melimpah akibat kebijakan stimulus di negara-negara maju, mengalir ke pasar keuangan negara-negara berkembang. Dari sisi inflasi, pelemahan permintaan global mendorong terkendalinya tekanan inflasi dan turunnya harga komoditas.



1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2012 yang rendah merupakan dampak lanjutan dari permasalahan ekonomi di beberapa negara maju yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Beberapa negara maju, terutama di Eropa, telah mengalami resesi yang berulang (*double-dip recession*). Negara-negara yang mengalami resesi tersebut umumnya merupakan negara yang mengalami krisis utang pemerintah yang parah. Adapun negara maju lainnya telah memasuki fase pertumbuhan ekonomi yang

melambat secara signifikan. Sementara itu, meskipun aktivitas ekonomi negara-negara *emerging market* masih relatif tumbuh baik, intensitas rambatan (*spillover*) krisis dari negara maju semakin menguat. Dengan kondisi tersebut ekonomi dunia tahun 2012 hanya tumbuh 3,2%, lebih rendah dari tahun 2011 yang mencapai 3,9% (Tabel 1.1).

Fundamental ekonomi yang lemah di negara maju masih berlanjut dan menjadi sumber permasalahan yang menghambat aktivitas perekonomian global. Negara-negara maju, terutama di Eropa yang mengalami tekanan krisis utang pemerintah, terjebak dalam efek spiral yang menarik seluruh kinerja ekonomi ke bawah (Tabel 1.2). Hal tersebut terjadi karena krisis utang pemerintah (beserta risiko terkait) yang meningkat telah memicu kerentanan di sektor perbankan yang sebagian portofolio asetnya ditempatkan pada surat utang pemerintah yang terkena krisis dan aset-aset bermasalah lain yang mengalami koreksi harga. Selanjutnya, lemahnya sektor perbankan memicu meningkatnya kebutuhan dana talangan (*bailout*) yang mengakibatkan semakin membengkaknya defisit fiskal. Defisit yang meningkat pada gilirannya semakin memperburuk krisis utang pemerintah. Selain itu, memburuknya kinerja fiskal juga disumbang oleh penurunan penerimaan pajak sebagai akibat dari penurunan aktivitas ekonomi. Meskipun kebijakan moneter berupa *quantitative*

Tabel 1.1 Indikator Perekonomian Global

Persen

Indikator	2010	2011	2012				
			Jan 2012	Apr 2012	Jul 2012	Okt 2012	Jan 2103
Dunia	5,1	3,9	3,3	3,5	3,5	3,3	3,2
Negara-negara Maju	3,0	1,6	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3
Amerika Serikat	2,4	1,8	1,8	2,1	2,0	2,2	2,3
<i>Euro Area</i>	2,0	1,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Jepang	4,5	-0,6	1,7	2,0	2,4	2,2	2,0
Emerging & Developing Economies	7,4	6,3	5,4	5,7	5,6	5,3	5,1
<i>Developing Asia</i>	9,5	8,0	7,3	7,3	7,1	6,7	6,6
China	10,4	9,3	8,2	8,2	8,0	7,8	7,8
India	10,1	7,9	7,0	6,9	6,1	4,9	4,5
Amerika Latin & Karibia	6,2	4,5	3,6	3,7	3,4	3,2	3,0
Harga Konsumen							
Negara-negara Maju	1,5	2,7	1,6	1,9	2,0	1,9	2,0
<i>Emerging & Developing Countries</i>	6,1	7,2	6,2	6,2	6,3	6,1	6,1

Sumber: WEO - IMF

easing berhasil membantu meredakan tekanan krisis utang, namun langkah tersebut merupakan solusi temporer dan tidak menyentuh pokok permasalahan, yaitu ketidaksinambungan fiskal. Selanjutnya, krisis utang yang direspons dengan penghematan fiskal belum dapat menarik perekonomian negara maju keluar dari resesi dan mengurangi pengangguran.

Menurunnya kinerja ekonomi Eropa telah menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2012. Krisis utang pemerintah dan program penghematan fiskal, di tengah perlambatan permintaan global dan meningkatnya harga minyak, berdampak pada menurunnya volume perdagangan dan resesi di kawasan Eropa (Grafik 1.1). Negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, yaitu Jerman, juga tidak luput dari dampak krisis, yang tercermin pada perlambatan aktivitas ekonomi yang signifikan.

Kinerja ekonomi AS sepanjang tahun 2012 relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja ekonomi kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS ditopang oleh kuatnya pertumbuhan investasi dan ekspor, terutama pada awal tahun. Namun, kinerja ekonomi selanjutnya melemah sejalan dengan melemahnya permintaan global dan masih tingginya tingkat pengangguran. Sementara itu, hal positif lainnya dari perekonomian AS yaitu mulai munculnya tanda-tanda pemulihan sektor perumahan, terutama dengan



adanya dukungan dari kebijakan *quantitative easing* tahap ketiga (QE III).

Di Jepang, ekonomi tahun 2012 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi akibat gempa bumi dan tsunami. Pertumbuhan ekonomi Jepang ditopang oleh upaya pemulihan ekonomi dan program rekonstruksi pascabencana. Namun, sektor eksternal Jepang mengalami tekanan terutama akibat memburuknya kinerja ekspor, sejalan dengan pelemahan permintaan global dan berlanjutnya tekanan apresiasi mata uang yen.

Tabel 1.2 Indikator Makroekonomi Negara Maju

Persen

	Defisit Fiskal/ PDB			Utang Pemerintah/ PDB			Pengangguran			PDB		
	2010	2011	2012p	2010	2011	2012p	2010	2011	2012p	2010	2011	2012p
AS	-11,2	-10,1	-8,7	28,6	102,9	107,2	9,6	9,0	8,2	2,4	1,8	2,2
Jepang	-9,4	-9,8	-10,0	215,3	229,6	236,6	5,0	4,6	4,5	4,5	-0,6	2,2
<i>Euro Area</i>	-6,2	-4,1	-3,3	85,4	88,0	93,6	10,1	10,2	11,2	2,0	1,4	-0,4
Irelandia	-30,9	-12,8	-8,3	92,2	106,5	117,7	13,6	14,4	14,8	-0,8	1,4	0,4
Italia	-4,5	-3,8	-2,7	118,6	120,1	126,3	8,4	8,4	10,6	1,8	0,4	-2,3
Portugal	-9,8	-4,2	-5,0	93,3	107,8	119,1	10,8	12,7	15,5	1,4	-1,7	-3,0
Spanyol	-9,4	-8,9	-7,0	61,3	69,1	90,7	20,1	21,7	24,9	-0,3	0,4	-1,5
Yunani	-10,5	-9,1	-7,5	144,6	165,4	170,7	12,5	17,3	23,8	-3,5	-6,9	-6,0

Sumber: WEO - IMF

Permasalahan ekonomi di negara maju telah merambat ke negara-negara *emerging market* melalui penurunan permintaan produk ekspor negara *emerging market*, penurunan harga komoditas global dan meningkatnya volatilitas *capital flows* ke negara-negara *emerging market*. Pada saat yang sama, kinerja investasi di sebagian besar negara-negara *emerging market* juga menurun, baik terkait kendala struktural seperti ketersediaan infrastruktur maupun imbas pengetatan moneter. Perlambatan ekonomi negara-negara *emerging market* utama seperti China dan India berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi negara *emerging market* lainnya, termasuk negara-negara ASEAN (Grafik 1.2).

Melemahnya permintaan global juga berdampak pada menurunnya tekanan inflasi global sepanjang tahun 2012. Menurunnya tekanan inflasi sejalan dengan penurunan harga komoditas global. Kombinasi melemahnya kinerja ekonomi dan rendahnya tekanan inflasi serta dinamika berbagai permasalahan fundamental ekonomi termasuk isu kesinambungan fiskal dan utang pemerintah mendorong otoritas moneter negara-negara maju dan sebagian besar negara-negara *emerging market* menempuh kebijakan yang akomodatif, termasuk kebijakan suku bunga rendah dan langkah pelonggaran moneter.

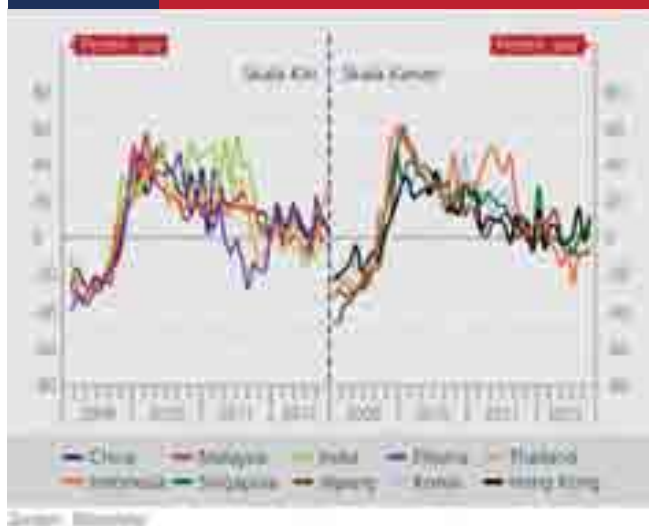
1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Global

Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju

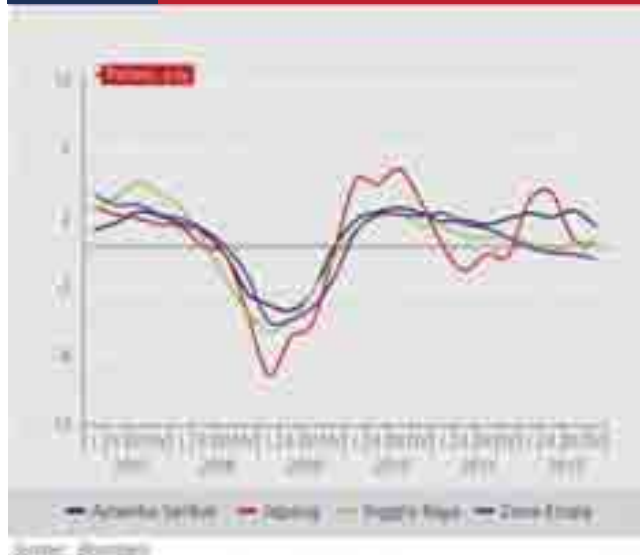
Perekonomian global secara umum melambat pada tahun 2012. Di kelompok negara maju, negara-negara kawasan Eropa mengalami kontraksi ekonomi, sementara aktivitas ekonomi AS dan Jepang justru mengindikasikan pemulihan (Grafik 1.3). Di kelompok *emerging market*, perlambatan ekonomi terjadi secara merata meskipun pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara-negara *emerging market* masih melaju di level yang tinggi.

Kinerja positif ekonomi AS pada triwulan I 2012 sempat memberikan optimisme atas pemulihan ekonomi global. PDB AS tumbuh 2,4% (yoy), melebihi ekspektasi pelaku pasar dan disertai dengan penurunan angka pengangguran dari kisaran 9% di akhir tahun 2011 menjadi 8,2% pada Maret 2012. Selain itu, bursa saham AS membukukan kenaikan yang cukup solid dan kredit membaik signifikan yang disertai meningkatnya konsumsi. Namun, momentum tersebut meredup pada triwulan II 2012 ketika angka

Grafik 1.2 Kinerja Ekspor Negara-Negara Emerging Market Asia



Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju

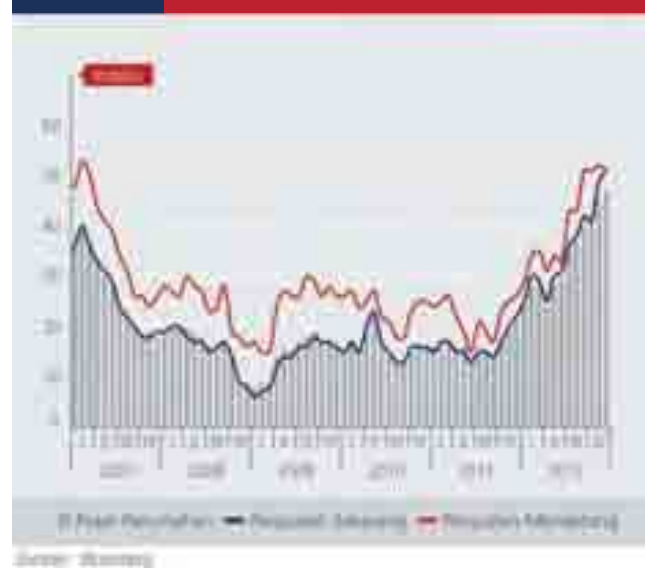


pengangguran, khususnya pengangguran jangka panjang, kembali meningkat¹ dan diikuti oleh sektor perumahan yang kembali memburuk dan harga minyak yang meningkat cukup tinggi. Melemahnya performa perekonomian AS pada periode tersebut sejalan dengan meningkatnya krisis utang pemerintah di kawasan Eropa sehingga melemahkan permintaan global. Kombinasi berbagai faktor tersebut telah memangkas pengeluaran konsumen sehingga pada triwulan II ekonomi AS tercatat hanya tumbuh sebesar 2,1% (yoy).

Pada triwulan III 2012, perekonomian AS kembali mencatat adanya perbaikan. Indikator sektor produksi seperti indeks produksi dan *Purchasing Manager Index* (PMI) sektor manufaktur membukukan peningkatan, sementara konsumsi juga membaik yang tercermin pada peningkatan penjualan eceran dan tingkat keyakinan konsumen. Perbaikan kinerja berbagai indikator makroekonomi tersebut bermuara pada angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencapai 2,6% (yoy). Sementara itu, untuk mengatasi masih tingginya tingkat pengangguran dan rentannya sektor tenaga kerja, bank sentral AS mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dan kembali melakukan kebijakan moneter nonkonvensional berupa *Quantitative Easing* tahap III (QE III). Pada Desember 2012, the Fed juga mengeluarkan kebijakan pembelian *treasury securities* sebagai pengganti *operation twist* yang berakhir pada penghujung tahun 2012. Kebijakan tersebut turut mendukung perbaikan konsumsi dan produksi pada akhir tahun, meski masih dibayangi oleh dampak jurang fiskal. Penjualan ritel, sebagai indikator konsumsi, terus membaik didukung dengan perbaikan di pasar tenaga kerja, perbaikan pasar perumahan, kenaikan harga rumah, penurunan harga BBM, dan inflasi. Di sisi produksi, PMI baik sektor manufaktur maupun jasa dan *industrial production* (IP) juga membaik pada triwulan terakhir (Grafik 1.4). Secara keseluruhan tahun 2012 PDB AS

1 US Bureau of Labor Statistic: *Long-term unemployed*: menganggur lebih dari 27 minggu dan masih berkeinginan mendapatkan pekerjaan.

Grafik 1.4 Indikator Sektor Perumahan AS



tumbuh 2,3% (yoy), atau lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 1,8% (yoy).

Di kawasan Eropa, negara-negara yang terkena krisis utang Pemerintah telah mengalami resesi pada tahun 2012. Sampai dengan triwulan II, sedikitnya enam negara telah mengalami resesi, termasuk Inggris Raya. Negara-negara yang terkena krisis utang pemerintah terperangkap dalam jebakan lingkaran pertumbuhan ekonomi rendah (Grafik 1.5). Baik indikator konsumsi maupun produksi menunjukkan bahwa kinerja ekonomi berada pada fase kontraksi (Grafik 1.6). Proses *deleveraging* oleh bank, korporasi dan rumah tangga telah mengeringkan likuiditas di pasar kredit, baik untuk konsumsi maupun investasi. Hal tersebut memperlemah kondisi sektor riil. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran di Eropa yang tinggi merupakan penyebab sekaligus dampak dari lambatnya pemulihan ekonomi. Program penghematan fiskal (*austerity program*) di negara-negara yang mengalami krisis utang seperti Yunani, Portugal, Irlandia, Italia dan Spanyol semakin mengurangi daya dorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya menjadikan krisis utang semakin parah. Adapun sektor perbankan mempunyai eksposur yang tinggi pada surat utang pemerintah yang terkena krisis. Kondisi tersebut, dikombinasi dengan lemahnya kinerja sektor riil, meningkatkan

Grafik 1.5

Lingkaran Krisis Eropa



Sumber: Ashraf Habibullah

kerentanan di sektor keuangan yang pada giliran kembali memicu proses *deleveraging*. Sementara itu, *intra-trade* di kawasan Eropa yang selama periode sebelum krisis cukup besar volumenya mengalami penurunan dengan melemahnya permintaan di masing-masing negara Eropa. Hal tersebut berdampak negatif bagi negara yang tidak mengalami krisis. Penurunan ekspor negara-negara tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

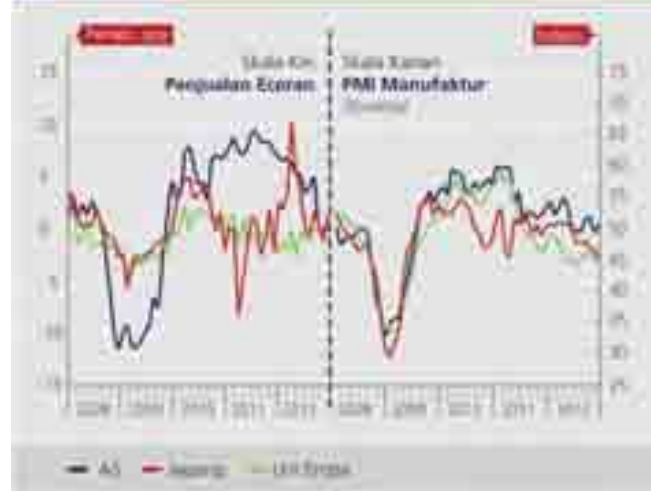
Pada awal tahun 2012 beberapa kemajuan telah dibuat oleh para pengambil kebijakan di kawasan Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil meredakan tensi (kenaikan volatilitas harga aset dan biaya pinjaman antar bank) di pasar keuangan Eropa, terutama melalui kebijakan *Long-Term Refinancing Operation* (LTRO)², kesepakatan "*Fiscal Compact*", dan keberhasilan Yunani melakukan pemotongan utang melalui program "*Private Sector Involvement*" (PSI).³ Selanjutnya indikator keyakinan mulai stabil

2 LTRO merupakan skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan Eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas dan *credit crunch* dengan jangka waktu 3 tahun.

3 *Fiscal compact* adalah kesepakatan para pemimpin Uni Eropa yang mengatur besaran defisit fiskal dan tahapan penurunan rasio utang terhadap PDB ke tingkat yang *sustainable* dalam jangka panjang. PSI merupakan program keterlibatan kreditor

Grafik 1.6

Indikator Konsumsi dan Produksi Negara Maju



Sumber: Bloomberg

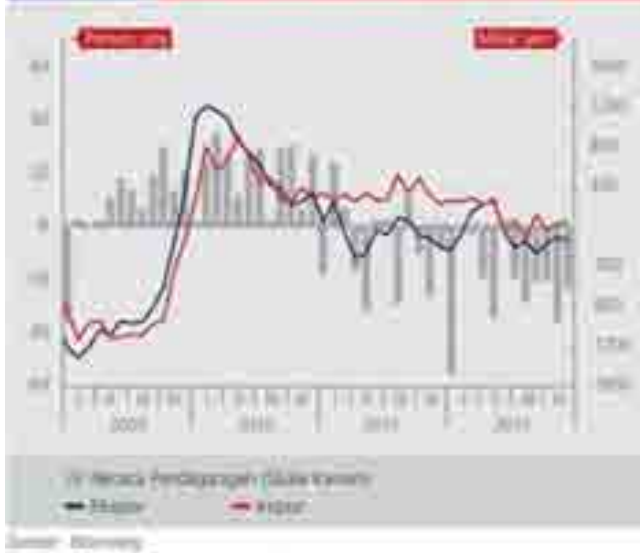
dan meningkat. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan fundamental yang dihadapi. Hal itu terbukti dengan kembali meningkatnya tekanan krisis utang pada triwulan II 2012 akibat merebaknya sentimen negatif terkait akan keluarnya Yunani dari *Monetary Union* (penggunaan mata uang euro) yang muncul pada masa pemilu di Yunani. Gejala tersebut terjadi di tengah masih rentannya tingkat keyakinan, lemahnya sektor perbankan, berlanjutnya pengetatan fiskal, menurunnya permintaan global, tingginya angka pengangguran, dan meningkatnya harga minyak, sehingga menjadikan PDB kawasan Euro berkontraksi 0,5% (yoy) pada triwulan II 2012. Pada triwulan III 2012, eskalasi krisis kembali mereda, hal itu didukung oleh kebijakan *Outright Monetary Transaction* (OMT) guna mengatasi krisis likuiditas

di sektor perbankan dan ratifikasi *European Stability Mechanism* (ESM) serta kesepakatan penggunaan ESM secara langsung dalam program rekapitalisasi perbankan sehingga tidak berdampak pada membengkaknya utang pemerintah.⁴

swasta dalam program *debt swap* Yunani yang menghasilkan pemotongan utang 53,5%.

4 OMT adalah pembelian SSB oleh ECB dengan jumlah dan jangka waktu yang belum ditentukan (*open-ended*) guna penyediaan likuiditas di pasar keuangan Eropa. ESM merupakan

Grafik 1.7 Neraca Perdagangan Jepang



Di Jepang, perekonomian kembali tumbuh positif sebesar 2,0% (yoy), setelah mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2011 akibat bencana gempa bumi dan tsunami serta dampak banjir di Thailand. Masih solidnya sektor konsumsi dan ekspor pada triwulan I 2012 telah menopang pertumbuhan ekonomi melebihi ekspektasi pelaku pasar yaitu sebesar 2,9%. Namun, pada triwulan selanjutnya, Jepang kehilangan momentum pemulihan akibat melemahnya permintaan eksternal dan apresiasi mata uang yen sehingga kinerja ekspor memburuk. Sementara itu, meningkatnya kebutuhan minyak akibat tidak berfungsinya pembangkit listrik tenaga nuklir yang terkena bencana tsunami, mengakibatkan tingginya pertumbuhan impor minyak sehingga untuk pertama kalinya sejak tahun 1981 neraca perdagangan Jepang mengalami defisit (Grafik 1.7).

Pada triwulan II 2012, meski kinerja sektor eksternal memburuk, ekonomi Jepang masih dapat tumbuh tinggi mencapai 3,2% yang didukung oleh program pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa/tsunami, serta subsidi pembelian kendaraan hemat energi yang berhasil menopang konsumsi swasta tetap solid. Namun, kinerja ekonomi Jepang pada semester II 2012 kembali melemah seiring dengan berakhirnya

Grafik 1.8 Inflasi Negara Maju



program subsidi tersebut dan turunnya konsumsi swasta di tengah masih lemahnya kinerja sektor eksternal.

Meskipun aktivitas perekonomian meningkat pada tahun 2012, Jepang masih mengalami deflasi. Penurunan harga komoditas akibat lemahnya permintaan global menjadi penyebab deflasi tersebut. Selain Jepang, tekanan inflasi di negara maju secara umum mereda pada tahun 2012 (Grafik 1.8). Hal tersebut mendorong bank sentral negara maju untuk tetap mempertahankan kebijakan yang akomodatif dengan menjaga suku bunga kebijakan di level yang sangat rendah. Selain itu, the Fed, ECB, BoE dan BoJ juga melakukan kebijakan *quantitative easing* dengan melakukan pembelian surat berharga pasar keuangan.

Perkembangan Ekonomi Negara- Negara *Emerging Market*

Pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging market* kembali melambat pada tahun 2012, terimbas memburuknya permintaan negara maju. Penurunan ekspor China dan India yang cukup signifikan juga berdampak pada negara-negara *emerging market* lainnya. Secara keseluruhan, negara-negara *emerging*

mekanisme permanen resolusi krisis bagi negara-negara euro. Untuk lebih lengkap lihat <http://www.esm.europe.eu>

market hanya tumbuh 5,1% di tahun 2012, menurun dari 6,3% pada 2011 (Grafik 1.9). Pertumbuhan negara-negara *emerging market* yang relatif tetap tinggi ditopang oleh ketahanan permintaan domestik.

Di China, pertumbuhan ekonomi melambat sekaligus membukukan realisasi pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi China turun dari 9,3% pada tahun 2011 menjadi 7,9% pada 2012 disebabkan oleh menurunnya permintaan ekspor negara-negara maju dan penurunan pertumbuhan investasi yang cukup tajam. Perekonomian China ditopang oleh permintaan domestik (84% dari total PDB pada tahun 2011), yang terdiri dari investasi (49% dari PDB) dan konsumsi (35% dari PDB). Pertumbuhan investasi menurun dari sekitar 25% pada tahun 2011 menjadi sekitar 20% di tahun 2012 (Grafik 1.10). Sementara itu, ekspor neto, yang kontribusinya relatif kecil terhadap PDB, yaitu 2,6% pada tahun 2011, menurun dari level tertingginya sebesar 8,8% pada tahun 2007. Meskipun pangsa ekspor neto relatif kecil, dampaknya terhadap investasi cukup besar, mengingat sebagian investasi tersebut terkait dengan pemenuhan permintaan ekspor. Guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan pelengkap, China

banyak mengimpor dari negara-negara di kawasan Asia, terutama berupa impor bahan baku. Oleh karena kuatnya dukungan permintaan domestik dalam struktur perekonomian China, pelemahan permintaan global tidak menyebabkan penurunan pertumbuhan yang berlebihan (*hard-landing*).

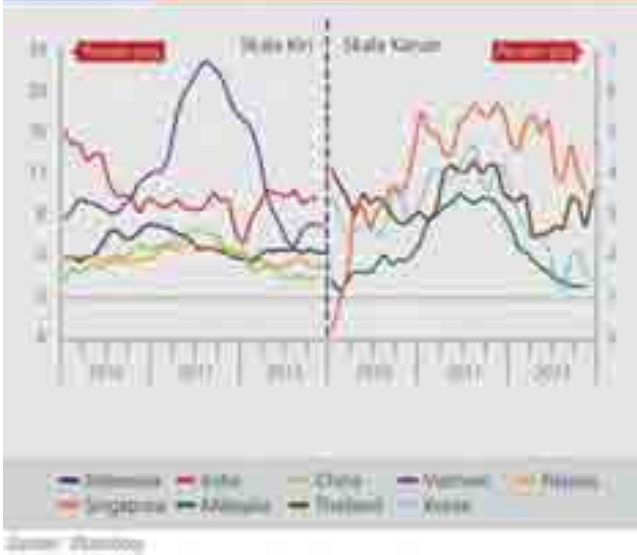
Dampak pelemahan permintaan global pada pertumbuhan ekonomi lebih terlihat pada negara-negara dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor, seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi beberapa negara-negara ASEAN masih relatif cukup baik terkait solidnya konsumsi dan investasi sehingga dapat mengompensasi penurunan ekspor neto.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Latin disebabkan oleh melemahnya perekonomian Brazil dan Argentina, yang juga terimbas dari pelemahan ekonomi China dan kawasan Euro. Namun, pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat tersebut, ditopang oleh masih solidnya permintaan domestik dan masih rendahnya tingkat pengangguran.

Secara umum, tekanan inflasi di negara-negara *emerging market* mengalami penurunan pada tahun 2012, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan



Grafik 1.11 Inflasi Negara Berkembang Asia

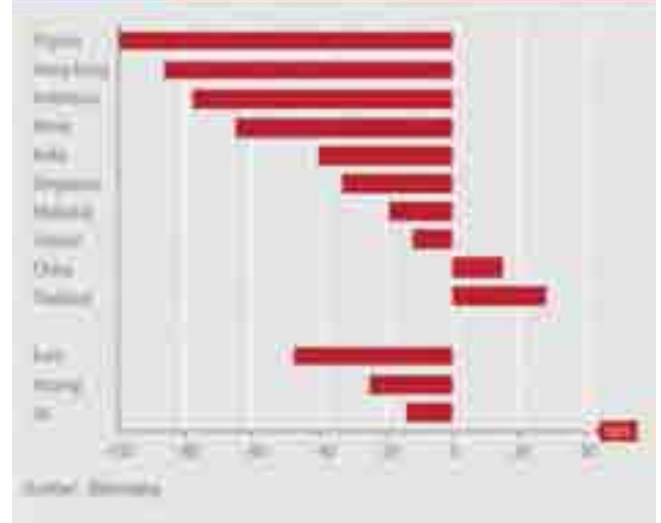


ekonomi dan penurunan harga komoditas global (Grafik 1.11). Laju inflasi di sebagian besar negara-negara *emerging market* Asia berada pada kisaran target otoritas moneter masing-masing negara.

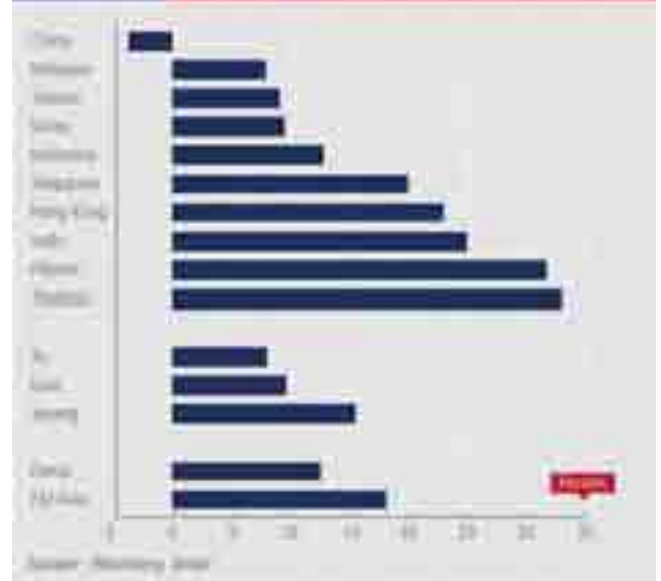
1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Global

Dengan kondisi inflasi yang relatif terkendali, mayoritas negara-negara *emerging market* mengalihkan fokus kebijakannya pada upaya menahan pelemahan ekonomi dengan pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan stimulus fiskal. Pasar keuangan global menunjukkan pemulihan sepanjang tahun 2012 yang ditunjukkan oleh kembali meningkatnya harga aset keuangan. Sebagian besar negara baik negara-negara maju maupun negara-negara *emerging market*, mengalami kenaikan harga saham dan obligasi (Grafik 1.12, 1.13, dan 1.14). Namun, dalam perkembangannya kenaikan harga aset keuangan tersebut tidak terjadi secara terus menerus sepanjang tahun. Dalam beberapa periode, terutama di triwulan II 2012, harga aset keuangan sempat mengalami koreksi tajam, sejalan dengan

Grafik 1.12 Perubahan Imbal Hasil Obligasi



Grafik 1.13 Perubahan Harga Indeks Saham



Grafik 1.14 Perkembangan Indeks Harga Saham Global



memburuknya persepsi risiko dan sentimen pasar. Meskipun risiko pasar keuangan global masih tinggi, perkembangan harga aset sepanjang tahun relatif lebih stabil yang tercermin pada turunnya volatilitas harga.

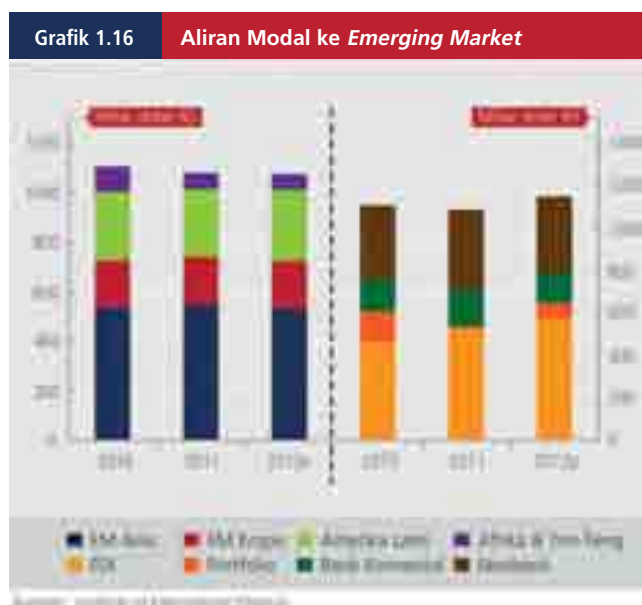
Peningkatan kinerja pasar keuangan global terutama didukung oleh pertumbuhan harga aset di negara-negara berkembang. Kinerja positif pasar keuangan negara-negara berkembang sejalan dengan fundamental ekonomi yang lebih solid. Sementara itu, pertumbuhan harga aset keuangan yang tinggi di negara-negara maju di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih rentan, ditopang oleh besarnya likuiditas terkait berbagai kebijakan *quantitative easing* bank sentral di negara-negara maju. Kebijakan *quantitative easing* tersebut selain meredakan tekanan likuiditas juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor serta menurunkan tingkat risiko. Kondisi tersebut mendorong pembelian aset-aset keuangan, termasuk aset yang lebih berisiko seperti saham. Bahkan, besarnya likuiditas yang dikeluarkan bank sentral di negara-negara maju – tercermin pada ekspansi neraca masing-masing bank sentral – juga mengalir ke pasar keuangan negara berkembang. Pada tahun 2012, aset the Fed meningkat sekitar 42%, aset ECB meningkat 10,9%, sementara aset BOJ meningkat 9,3% (Grafik 1.15).

Di satu sisi kebijakan QE menjadi faktor pendorong yang signifikan bagi aliran modal ke negara-negara *emerging market*. Di sisi lain, suku bunga di negara-negara *emerging market* yang relatif tinggi dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan iklim investasi yang kondusif menjadi faktor penarik bagi aliran modal global untuk masuk dan diinvestasikan ke negara-negara *emerging market*. Aliran masuk modal ke negara-negara *emerging market* sepanjang tahun 2012 mencapai sekitar 1.026 miliar dolar AS, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar aliran modal tersebut, sekitar 49% dari total aliran modal yang masuk ke negara-negara *emerging market*, mengalir ke negara-negara *emerging market* di kawasan Asia, terutama China



yang menyerap sekitar 72% aliran masuk modal ke kawasan Asia (Grafik 1.16).

Berdasarkan jenis investasi, aliran masuk modal dalam bentuk FDI merupakan yang paling dominan, yaitu mencapai 513 miliar dolar AS atau 50% dari total aliran masuk modal ke negara *emerging market*. Aliran masuk modal dalam bentuk pinjaman oleh nonbank juga cukup dominan, diikuti oleh aliran pinjaman bank dan aliran investasi portofolio. Meskipun aliran investasi portofolio (secara neto) relatif kecil, aliran modal tersebut bersifat jangka



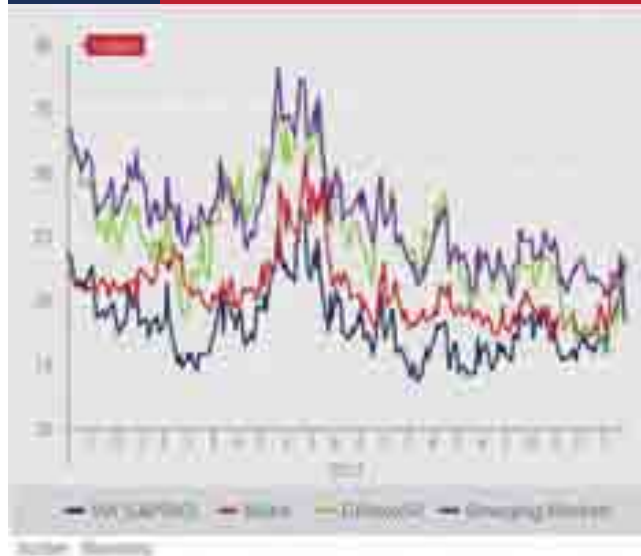
pendek dan cenderung fluktuatif sehingga sangat memengaruhi perkembangan pasar keuangan.

Meskipun secara umum pasar keuangan menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2012, pasar keuangan global sempat mengalami tekanan baik di semester pertama maupun kedua. Volatilitas dan dinamika di pasar keuangan tersebut tidak terlepas dari dinamika krisis di negara-negara maju dan perubahan sentimen atas prospek perekonomian global sepanjang tahun 2012 (Grafik 1.17).

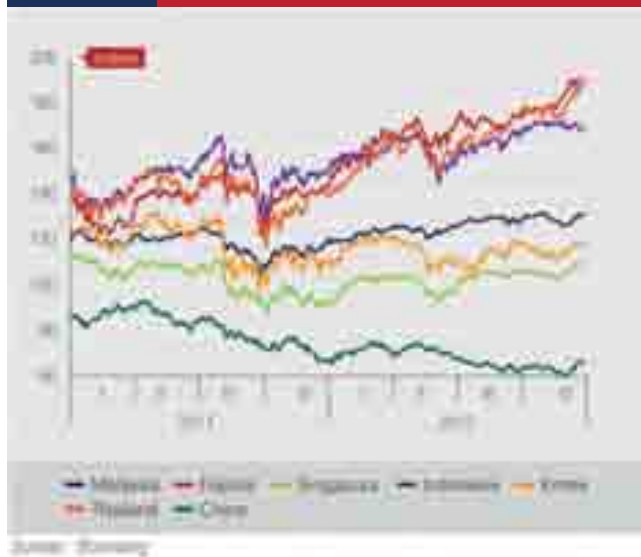
Melanjutkan tren positif di akhir tahun 2011, harga aset di pasar keuangan global pada triwulan I 2012 mengalami kenaikan. Keberhasilan program *debt swap* yang dilakukan Yunani dapat meredakan ketidakpastian dan sentimen negatif di pasar keuangan. Program *debt swap* tersebut melibatkan sektor swasta (*private sector involvement-PSI*) dan berhasil memotong utang Yunani sekitar 50%. Selain itu, peluncuran program *Long Term Refinancing Operation* (LTRO) kedua dari ECB di akhir Februari 2012 juga menekan perilaku *risk aversion* investor global. Hal tersebut menjadikan bursa saham global, termasuk bursa saham negara-negara Asia, semakin bergairah (*bullish*) (Grafik 1.18). Selain itu, kinerja ekonomi AS yang positif dan membaiknya ekspor negara-negara *emerging market* Asia juga menjadi penopang peningkatan kinerja pasar keuangan global pada triwulan I 2012.

Perkembangan di bursa saham global tidak terlepas dari pergerakan indikator risiko di pasar keuangan global. Penurunan tingkat risiko dan membaiknya *risk appetite* investor global terindikasi pada tren penurunan *credit default swap* (CDS) dan volatilitas harga di pasar keuangan global (Grafik 1.19). Perkembangan serupa juga terjadi di pasar obligasi yang tercermin dari pergerakan imbal hasil baik obligasi negara-negara *emerging market* maupun obligasi negara-negara maju, termasuk negara-negara yang terkena krisis utang (Grafik 1.20). Selain itu, tingkat likuiditas pasar keuangan global juga

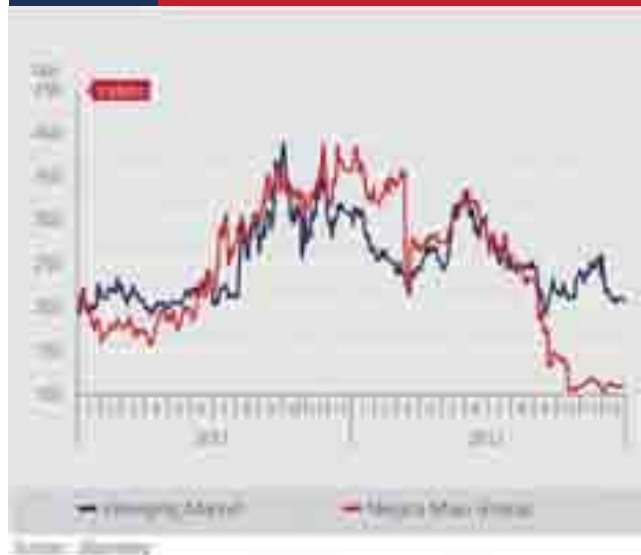
Grafik 1.17 Volatilitas Pasar Keuangan



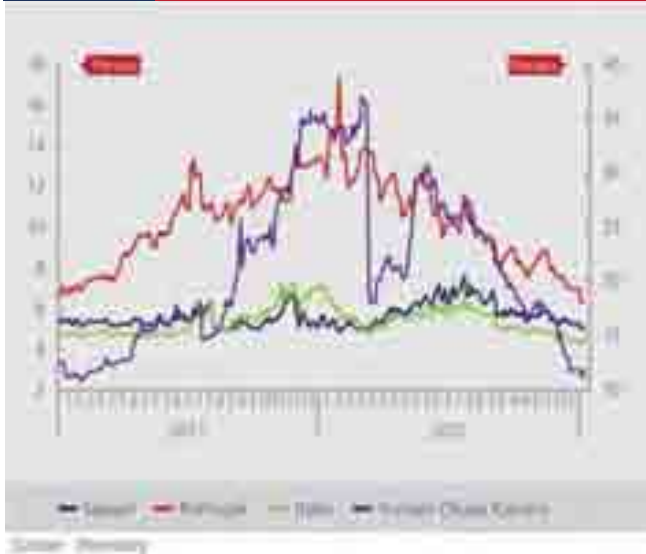
Grafik 1.18 Perkembangan Indeks Harga Saham Asia



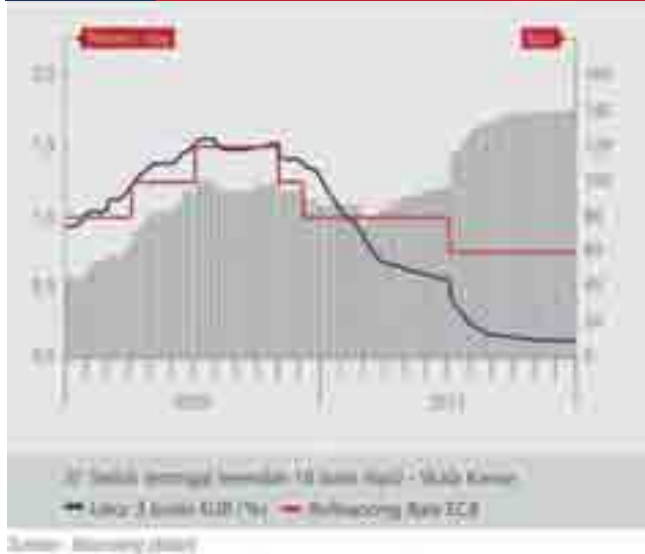
Grafik 1.19 Perkembangan CDS Komposit



Grafik 1.20 Imbal Hasil Obligasi Negara PIGS



Grafik 1.22 Suku Bunga Tertinggi - Terendah Bank Eropa



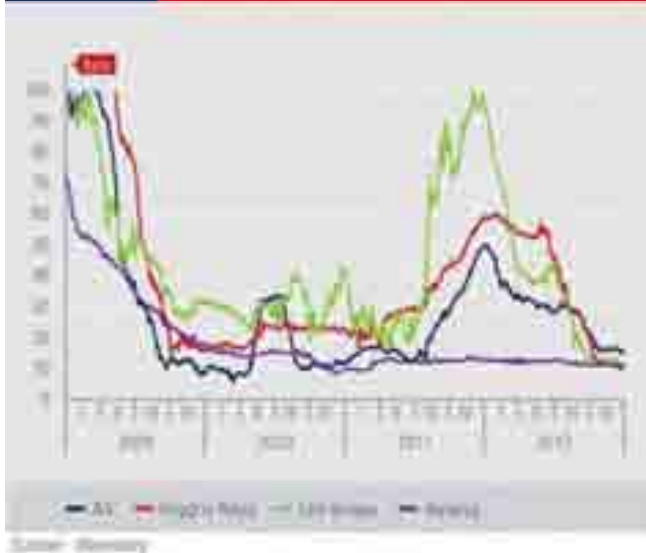
membalik yang diindikasikan oleh penurunan selisih suku bunga LIBOR terhadap *overnight index swap* (OIS), meski demikian, selisih suku bunga tertinggi dan terendah dari 16 bank Eropa, sebagai gambaran *counterparty risk*, mengalami peningkatan (Grafik 1.21 dan 1.22).

triwulan I 2012. Sejalan dengan derasny aliran modal masuk tersebut, nilai tukar negara-negara *emerging market* Asia secara umum cenderung menguat terhadap dolar AS (Grafik 1.23).

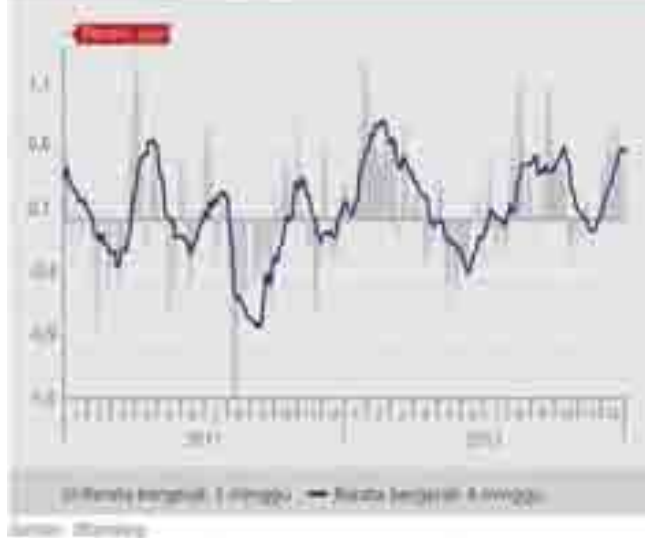
Solidnya pasar keuangan global dan meningkatnya toleransi terhadap tingkat risiko mendorong investor membeli aset-aset keuangan negara-negara *emerging market*. Bursa saham di negara-negara *emerging market* Asia mencatat *net foreign buy* pada

Pasar keuangan global kembali melemah pada triwulan II sebelum membaik pada triwulan III 2012. Eskalasi krisis Eropa yang diwarnai oleh meningkatnya suhu politik terkait wacana keluarnya Yunani dari penggunaan mata uang euro "Grexit", memburuknya kinerja ekonomi Eropa, indikasi pelemahan aktivitas ekonomi AS dan China, serta kekhawatiran

Grafik 1.21 Selisih Libor - OIS 3 Bulan



Grafik 1.23 Aliran Modal Asing ke Emerging Market Asia



atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global memicu tekanan di pasar keuangan internasional selama triwulan II 2012. Akibatnya, *risk aversion* yang meningkat tersebut memicu terjadinya *flight to quality*, yaitu investor global melepas aset-aset berisiko tinggi, termasuk aset-aset negara *emerging market* dan menempatkannya pada aset-aset yang lebih aman (*safe haven*). Hal ini menyebabkan pelemahan mata uang negara-negara *emerging market* terhadap dolar AS. Meskipun demikian, sejumlah langkah responsif dari otoritas di Eropa, AS, Jepang dan China pada akhirnya mampu kembali menopang penguatan pasar keuangan global selama triwulan III 2012.

Setelah sempat tertekan sentimen negatif akibat isu *fiscal cliff* di AS, meningkatnya tekanan krisis Eropa terkait pencairan dana *bailout* Yunani dan prospek ekonomi Spanyol pada awal triwulan IV 2012, pasar keuangan global akhirnya kembali pada tren peningkatan di akhir triwulan IV 2012. Bursa saham global kembali meningkat sejak November 2012 setelah berbagai ketidakpastian di atas menemukan titik terang. Yunani menempuh program *austerity* yang lebih keras dan reformasi pasar tenaga kerja guna memenuhi persyaratan pencairan dana bantuan sebesar 34,4 miliar euro yang sempat tertunda. Sementara itu, kebijakan OMT dari ECB telah berhasil mengembalikan keyakinan investor sehingga imbal hasil obligasi pemerintah Yunani, Spanyol dan Italia turun secara signifikan selama bulan November 2012. Meskipun penyelesaian untuk masalah yang bersifat lebih fundamental memerlukan komitmen politik dan ekonomi yang lebih luas, pembentukan *Single Supervisory Mechanism* (SSM) untuk perbankan Eropa merupakan satu langkah awal yang sangat positif.

Di AS, bursa saham juga mengalami *rebound* pada November 2012, setelah mengalami tekanan sentimen negatif dari isu jurang fiskal pascapemilu AS. Hal ini terjadi setelah adanya tanda-tanda awal tercapainya kompromi yang mengarah pada

terhindarnya jurang fiskal di tahun 2013. Selain itu, data-data ekonomi AS yang menjadi kunci pemulihan ekonomi, seperti data ketenagakerjaan dan perumahan, juga menunjukkan terus berlanjutnya pemulihan dan mendukung kenaikan konsumsi masyarakat. Data ekonomi tersebut menopang membaiknya kinerja pasar keuangan AS.

1.4 Perkembangan Harga Komoditas Global

Perkembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan merupakan faktor penentu utama pergerakan harga di pasar komoditas dunia. Dalam situasi perekonomian yang dibayangi perlambatan pertumbuhan sebagaimana tahun 2012, harga komoditas juga sangat dipengaruhi oleh prospek indikator ekonomi makro dan sentimen pasar. Bahkan pengaruh sentimen pasar, terutama sentimen negatif, dapat lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan perkembangan fundamental dari komoditas yang diperdagangkan. Dengan kecenderungan seperti itu, pergerakan harga komoditas sering kali sejalan dengan fluktuasi harga di bursa saham. Selain itu, terdapat indikasi bahwa perilaku perdagangan yang bersifat spekulatif, sebagaimana disinyalir juga terjadi di pasar komoditas, dapat memengaruhi pergerakan harga komoditas.

Perkembangan Harga Minyak

Perkembangan harga minyak selama tahun 2012 dipengaruhi oleh pergerakan aktivitas perekonomian global, dinamika interaksi antara permintaan dan pasokan serta sentimen geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak tahun 2012 secara rata-rata tumbuh sebesar 1,4% (Grafik 1.24)⁵. Tren peningkatan harga pada akhir tahun 2011 berlanjut hingga triwulan pertama 2012. Harga minyak cenderung meningkat

5 Angka rata-rata UK Brent, Dubai dan WTI

dan mencapai sekitar 118 dolar AS pada Maret 2012. Harga minyak sempat terkoreksi dan mengalami penurunan pada triwulan II 2012, namun kembali meningkat pada triwulan III 2012 yang disertai dengan volatilitas yang juga meningkat. Pada triwulan IV 2012, tekanan kenaikan harga minyak kembali mereda.

Kenaikan harga minyak pada triwulan I 2012 dipicu oleh memburuknya sentimen geopolitik Iran. Di sisi lain, produksi dan pasokan minyak dari Suriah, Yaman dan Sudan Selatan juga menurun disebabkan oleh konflik internal di negara-negara tersebut sehingga menambah kekhawatiran terjadinya gangguan pasokan minyak di pasar dunia. Sementara itu, perbaikan indikator ekonomi makro AS dan masih solidnya konsumsi di kawasan Asia, di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global yang masih tinggi, juga menjadi faktor pendorong meningkatnya permintaan minyak yang selanjutnya mendorong kenaikan harga minyak (Grafik 1.25).

Meredanya tekanan konflik geopolitik di Timur Tengah, kembali memburuknya prospek ekonomi dunia, serta meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan terkait eskalasi krisis Eropa, mendorong penurunan harga minyak. Faktor lain

yang mendorong penurunan harga minyak tersebut yaitu meningkatnya pasokan minyak dari negara-negara OPEC, terutama Arab Saudi yang produksinya meningkat tajam dan menyentuh rekor tertinggi dalam 30 tahun terakhir (mencapai sekitar 10 juta barel per hari). Peningkatan produksi minyak juga terjadi di Libya dan Irak. Hal tersebut menjadikan produksi OPEC sebesar 1,9 juta barel per hari lebih tinggi dari total kuota sebesar 30 juta barel per hari (Grafik 1.26). Selain itu, kenaikan produksi juga terjadi di negara-negara non-OPEC, yaitu sekitar 1 juta barel per hari, seperti AS, Kanada dan Meksiko. Kenaikan produksi tersebut dapat menutup penurunan produksi di Suriah, Sudan Selatan dan Yaman, sehingga secara keseluruhan (neto) terjadi kenaikan produksi non-OPEC sebesar 0,4 juta barel per hari. Berlimpahnya pasokan minyak tersebut mendorong kenaikan inventori di negara-negara OECD, China dan Arab Saudi.

Permintaan minyak dunia pada triwulan II 2012 meningkat 1,2 juta barel per hari, terutama terkait permintaan dari Asia (China, Jepang dan India) dan Timur Tengah. Sementara itu, permintaan negara maju menurun dibanding dengan triwulan IV 2011. Kenaikan permintaan China terkait dengan



peningkatan cadangan strategis, kenaikan penjualan mobil, serta untuk kebutuhan industri petrokimia. Adapun kenaikan permintaan minyak India ditujukan untuk memenuhi kebutuhan untuk energi listrik. Sementara itu, kenaikan permintaan minyak Jepang terutama terkait dengan kebutuhan pembangkit listrik menggantikan nuklir. Di sisi lain, negara OECD selain Jepang mengalami penurunan permintaan minyak oleh karena berkurangnya intensitas penggunaan minyak sejalan melemahnya aktivitas ekonomi. Kombinasi melimpahnya pasokan dan prospek melemahnya permintaan global tersebut mendorong penurunan harga minyak lebih dalam sepanjang triwulan II 2012.

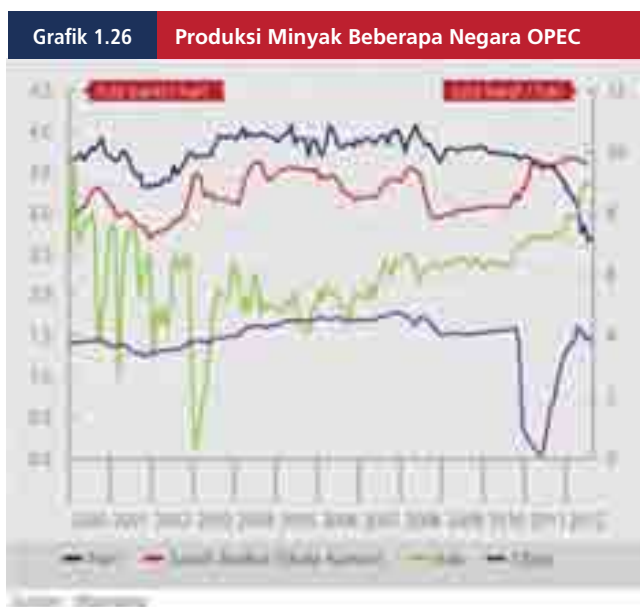
Memasuki triwulan III, harga minyak dunia meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan harga minyak tersebut terkait turunnya produksi minyak negara-negara non-OPEC sebesar 1 juta barel per hari. Di sisi lain, permintaan minyak justru meningkat terkait dengan *driving season* di AS, dan berbagai kebijakan stimulus di negara maju dan China. Tekanan geopolitik di Timur Tengah yang meningkat (konflik Iran-Israel dan pengenaan sanksi larangan ekspor minyak terhadap Iran) juga turut berperan memicu kenaikan harga minyak global. Dari

sisi pasar keuangan, berlimpahnya likuiditas global akibat berbagai kebijakan *quantitative easing* juga ditengarai mendorong kenaikan transaksi spekulatif (*non-commercial contract*) yang pada gilirannya mengakibatkan kenaikan harga minyak (Grafik 1.27).

Dinamika harga minyak dunia pada triwulan IV 2012 ditandai dengan berakhirnya *'driving season'* dan musim dingin di belahan utara bumi yang belum mencapai puncak sehingga permintaan minyak cenderung menurun. Selain itu, aktivitas perekonomian yang menurun juga menjadikan permintaan minyak relatif moderat. Permintaan minyak yang menurun di tengah pasokan yang meningkat berdampak pada penurunan harga minyak. Sementara itu, meski ketegangan konflik timur tengah masih belum sepenuhnya reda, namun secara umum tidak memberikan tekanan bagi kenaikan harga minyak.

Perkembangan Harga Komoditas Non Minyak

Sebagaimana harga minyak, perkembangan harga komoditas nonminyak selain dipengaruhi oleh faktor fundamental masing-masing komoditas, juga



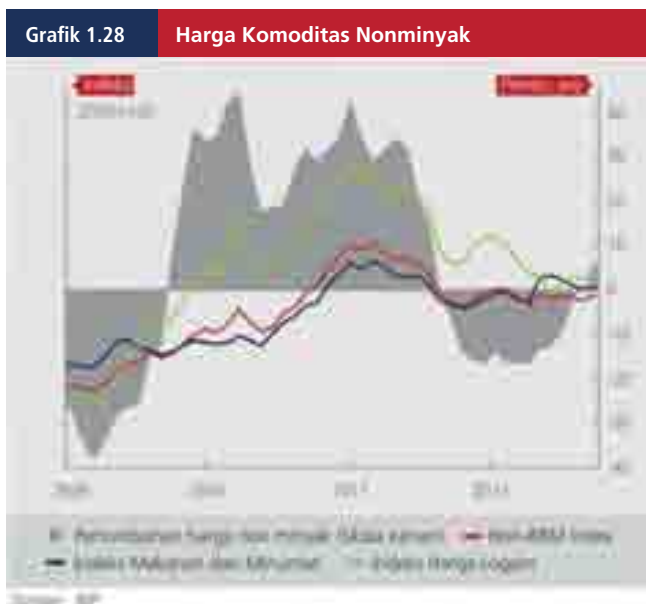
dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan harga komoditas nonminyak sepanjang tahun 2012 terkoreksi, yaitu sekitar 9,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan harga yang cukup tajam terjadi pada komoditas logam dan komoditas bahan makanan, yang disebabkan oleh pasokan yang berlimpah (Grafik 1.28).

Harga komoditas nonminyak sempat meningkat pada awal tahun terkait dengan masih solidnya permintaan global dan adanya permasalahan di sisi pasokan. Melemahnya aktivitas ekonomi global pada triwulan II 2012 mendorong penurunan harga komoditas nonminyak. Selanjutnya, perkembangan harga komoditas nonminyak pada semester II 2012 relatif lebih stabil dengan kecenderungan menurun pada triwulan IV 2012.

Harga logam meningkat sekitar 5% (qto) pada triwulan pertama 2012 sejalan dengan masih solidnya permintaan di AS dan kuatnya permintaan impor dari China. Pada triwulan II 2012 muncul sentimen negatif dari kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan di tengah masih tingginya stok pada sebagian besar komoditas logam dan meningkatnya pasokan. Hal ini

menjadikan harga komoditas logam menurun sekitar 10,3% dari triwulan sebelumnya.

Harga logam mengalami penurunan tajam pada triwulan II 2012. Pelemahan aktivitas ekonomi di negara maju telah menurunkan konsumsi logam, namun penurunan secara tajam justru terjadi di China. Mengingat konsumsi logam dasar China sangat besar (43% dari total konsumsi logam dunia), penurunan permintaan negara tersebut berdampak signifikan pada permintaan global. Penurunan konsumsi logam dasar di China dipicu oleh kebijakan moneter ketat guna menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Akibatnya, pertumbuhan indeks produksi turun ke satu digit pada April 2012, pertama kali sejak pertengahan tahun 2009, dan pertumbuhan sektor *real estate* mengalami perlambatan. Sementara komoditas logam lain, seperti tembaga, juga mengalami penurunan tajam. Sementara itu, pasokan komoditas logam justru meningkat sebagai dampak dari tingginya investasi untuk produksi komoditas logam. Harga komoditas logam pada semester II 2012 meningkat secara terbatas sehingga secara keseluruhan tahun (rata-rata) masih berkontraksi 16,8% dari tahun 2011 (Grafik 1.29).



Perlambatan ekonomi China di tengah tingginya pasokan batubara juga berimbas pada jatuhnya harga batubara, yaitu sebesar 16,7% dari akhir 2011. Selain memiliki pangsa yang besar dalam konsumsi komoditas logam dunia, pangsa China dalam konsumsi batubara dunia bahkan lebih besar, yaitu hampir 50% dari total konsumsi batubara dunia. Besarnya konsumsi batubara China terkait dengan besarnya kebutuhan untuk pembangkit listrik dan sebagai sumber energi untuk mendukung aktivitas sektor manufaktur.

Perkembangan harga komoditas bahan makanan sepanjang tahun 2012 lebih dipengaruhi oleh dinamika di sisi pasokan. Pada triwulan I 2012 sempat terjadi kenaikan harga komoditas pangan akibat terganggunya pasokan dari negara-negara Amerika Latin yang dilanda kekeringan. Namun, pada triwulan II 2012 harga komoditas bahan makanan cenderung menurun, sehingga harga bahan pangan pada semester I 2012 cenderung stabil.

Harga bahan makanan, seperti jagung dan kedelai, meningkat cukup tajam pada pertengahan tahun 2012 sebagai dampak dari terganggunya pasokan yang disebabkan kekeringan yang terjadi di kawasan *Midwest AS* (Grafik 1.30). Pada saat yang sama, panen gandum di kawasan Laut Hitam dan China juga menurun yang disebabkan juga oleh gangguan cuaca. Kenaikan harga komoditas gandum tersebut mengkompensasi penurunan harga gula dan minyak sayur sehingga berakibat pada kenaikan volatilitas harga bahan makanan. Sementara itu, harga minyak sayur (CPO) menurun disebabkan oleh berlimpahnya pasokan sejalan dengan produksi yang meningkat selama tahun 2012. Permintaan bahan makanan selama tahun 2012 relatif stabil meskipun terjadi perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan permintaan untuk komoditas '*grain*', yaitu jagung, gandum, kedelai dan beras, bersumber dari negara-negara *emerging market*, terutama China yang pangsa konsumsi gandumnya lebih dari 50% dari konsumsi dunia.

Grafik 1.30 Harga Komoditas Pertanian



Berbeda dengan komoditas pertanian, harga logam mulia lebih dipengaruhi oleh perkembangan di pasar keuangan global. Kebijakan moneter global yang ekstra longgar melalui LTRO3 dan OMT dari ECB, program pembelian SSB oleh BOE dan BOJ, serta kebijakan QE III the Fed) telah memompa tambahan likuiditas ke pasar keuangan global, yang pada gilirannya harus diinvestasikan pada berbagai outlet investasi, termasuk logam mulia (emas) yang juga berperan sebagai aset investasi *safe haven*. Hal ini mengakibatkan permintaan emas meningkat dan mendorong kenaikan harga komoditas ini sebesar 7,1% dibandingkan akhir tahun 2011 (Grafik 1.31).

Grafik 1.31

Harga Emas dan Pasar Keuangan



Penurunan harga komoditas global sepanjang tahun 2012 di satu sisi telah mendorong penurunan tekanan inflasi global. Di sisi lain, penurunan harga komoditas juga memicu pemburukan *term of trade* bagi negara-negara pengekspor komoditas. Secara keseluruhan, dampak dari penurunan harga komoditas global ini akan tergantung pada kondisi fundamental dan respons kebijakan dari otoritas tiap-tiap negara.

Bab 2

Respons Kebijakan Ekonomi Global





Respons Kebijakan Ekonomi Global



Menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan risiko rambatan krisis Eropa, sebagian besar negara menempuh kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di negara maju kebijakan yang ditempuh lebih diwarnai oleh kebijakan moneter yang akomodatif mengingat terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Di pihak lain, negara berkembang selain menempuh kebijakan moneter longgar juga memberikan stimulus fiskal. Pelemahan ekonomi global pada tahun 2012 juga diwarnai dinamika pada pasar keuangan global. Krisis utang Eropa menimbulkan tekanan di pasar keuangan pada triwulan II 2012. Sehubungan dengan hal tersebut, respons kebijakan yang ditempuh oleh otoritas dari berbagai negara pada umumnya selain terkait upaya menahan pelemahan aktivitas perekonomian juga disinergikan dengan upaya meredakan tekanan di pasar keuangan.



2.1 Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kondisi ekonomi global pada tahun 2012 sangat diwarnai oleh nuansa kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan dinamika pasar keuangan global yang cukup intens. Sehubungan dengan hal tersebut, respons kebijakan yang ditempuh oleh mayoritas otoritas di berbagai negara pada umumnya ditujukan untuk menahan pelemahan ekonomi dan meredakan tekanan di pasar keuangan. Eskalasi krisis Eropa, khususnya kawasan Uni Eropa, kekhawatiran terhadap dampak jurang fiskal di AS, dan perlambatan ekonomi China menjadi tema utama yang membesut perhatian otoritas global selama tahun 2012 mengingat porsi gabungan ketiganya menguasai lebih dari 50% PDB dunia.

Negara Maju

Otoritas di negara maju terus melanjutkan stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal, untuk mendorong aktivitas perekonomian dan menjaga kepercayaan pelaku pasar. Mayoritas negara maju menempuh kebijakan moneter ekstra akomodatif dengan mempertahankan suku bunga pada kisaran yang rendah dan tetap melanjutkan langkah-langkah

nonkonvensional berupa pelonggaran kuantitas (*quantitative easing* - QE). *Stance* kebijakan yang ekstra longgar di sisi moneter tersebut sekaligus mengimbangi keterbatasan ruang fiskal (*fiscal space*) menyusul defisit fiskal dan rasio utang terhadap PDB yang telah cukup tinggi. Bahkan sebaliknya, langkah penghematan fiskal justru semakin mendesak untuk ditempuh negara maju, terutama di Uni Eropa, guna mencapai postur fiskal yang lebih sehat.

Di Amerika Serikat, kebijakan moneter ekstra longgar ditempuh oleh bank sentral AS (the Federal Reserve atau the Fed) selama tahun 2012 seiring dengan masih lemahnya perekonomian AS, tingginya angka pengangguran, dan masih rentannya pemulihan di pasar perumahan. Dalam kaitan tersebut, stimulus moneter the Fed mencakup pembelian Surat-surat Berharga (SSB) untuk melonggarkan kondisi likuiditas, melakukan reinvestasi dana pada aset-aset dalam portofolio the Fed yang telah jatuh tempo, dan menyatakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga di tingkat yang ekstra rendah (0%-0,25%). Langkah tersebut ditempuh guna meningkatkan ketersediaan likuiditas dalam rangka menopang aktivitas perekonomian.

Mengacu pada masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi, the Fed kembali mengambil langkah *operation twist* pada 20 Juni 2012¹. Pada FOMC Juni 2012, the Fed merevisi ke bawah prakiraan pertumbuhan ekonomi AS menjadi 1,9%-2,4% di tahun 2012, atau lebih rendah dibandingkan dengan kisaran prakiraan sebelumnya, yaitu 2,4%-2,9%. Revisi ke bawah prospek pertumbuhan

1 *Operation twist* merupakan program pembelian SSB bertenor panjang dan penjualan SSB bertenor pendek yang dilakukan secara bersamaan. Langkah tersebut ditempuh the Fed guna menurunkan suku bunga jangka panjang. Berbeda dengan QE, *operation twist* tidak menimbulkan dampak ekspansif yang dampak likuiditasnya relatif sulit diatasi di kemudian hari. Selain itu, *operation twist* juga tidak mendistorsi harga aset di pasar keuangan. *Operation twist* pertama dilakukan the Fed untuk kurun waktu antara September 2011 sampai dengan Juni 2012. Program tersebut berhasil menukar 400 miliar dolar AS aset bertenor kurang dari 3 tahun dengan aset bertenor 6-30 tahun.

ekonomi AS tersebut menjadi landasan bagi the Fed untuk menempuh program *operation twist* kedua. Program tersebut berlangsung selama kurun waktu Juli – Desember 2012 dan menargetkan penukaran SSB sekitar 267 miliar dolar AS, atau setara dengan 44,5 miliar dolar AS per bulan.

Pada September 2012, the Fed kembali menambah stimulus melalui pelonggaran kuantitas untuk kali ketiga (QE3). Kebijakan QE3 tersebut berupa pembelian SSB (*mortgage-backed securities/ MBS*) sebesar 40 miliar dolar AS per bulan tanpa jangka waktu yang ditentukan (*open-ended*), atau sampai pasar tenaga kerja mengalami perbaikan. Stimulus tambahan tersebut dilandasi kondisi ketersediaan lapangan kerja masih sangat terbatas dan tingkat pengangguran yang masih terus meningkat walaupun tingkat upah secara rata-rata mulai meningkat di atas 1% selama tahun 2012 dan telah berada di atas laju pertumbuhan angkatan kerja (Grafik 2.1). Selain itu, investasi sektor bisnis terus melambat seiring dengan merebaknya kekhawatiran terhadap risiko jurang fiskal².

Meski pada triwulan III 2012 PDB AS tumbuh 2,6%, the Fed kembali melanjutkan kebijakan moneter akomodatif guna terus memantapkan momentum pemulihan ekonomi. The Fed melanjutkan pembelian MBS sebesar 40 miliar dolar AS per bulan dan menambah pembelian obligasi pemerintah sebesar 45 miliar dolar AS per bulan sebagai pengganti *operation twist* yang berakhir pada penghujung tahun 2012. The Fed juga memutuskan untuk tetap menahan tingkat suku bunga pada kisaran 0%-0,25% selama tingkat pengangguran masih lebih tinggi dari 6,5%, sementara inflasi jangka pendek (1-2 tahun) tidak lebih dari 2,5% dan ekspektasi

2 Jurang fiskal, atau juga dikenal dengan istilah *fiscal cliff* terkait erat dengan program penghematan fiskal yang berlaku mulai tahun 2013 sebagaimana diamanatkan undang-undang AS. Congressional Budget Office (CBO) AS memprakirakan ekonomi AS dapat berkontraksi hingga 0,5% di tahun 2013 apabila program penghematan fiskal memangkas defisit fiskal hingga 40% .

inflasi jangka panjang masih terkendali. Selain itu, kekhawatiran terhadap jurang fiskal yang sempat merebak di penghujung tahun 2012, kembali reda setelah tercapainya kompromi antara Pemerintahan Presiden Obama dengan Kongres AS yang kemudian diformalisasi menjadi *Tax Payer Relief Act* (2012).

Di kawasan Eropa, European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BOE) menempuh berbagai kebijakan guna meredakan tekanan krisis utang dan gejolak di pasar keuangan, serta pada saat yang sama, menahan pemburukan aktivitas perekonomian. Pada semester I 2012, ECB mengeluarkan *Long Term Repurchase Operation* (LTRO) dengan meminjamkan 530 miliar euro ke perbankan Eropa dengan tenor pinjaman hingga 3 tahun dan tingkat suku bunga sebesar 1,0%. Demikian juga di Inggris, BOE kembali melakukan pembelian aset sebesar 50 miliar poundsterling. Dengan tambahan tersebut, total pembelian aset oleh BoE telah mencapai 325 miliar poundsterling.

Di kelompok negara Uni Eropa, berbagai kemajuan juga dicapai dalam penanganan krisis Eropa selama semester I 2012. Otoritas Uni Eropa berhasil menyepakati *European Stability Mechanism (ESM) treaty* yang baru, meski *treaty* dimaksud baru berlaku setelah dapat diratifikasi oleh masing-masing negara.



Selain itu, pemerintah Spanyol telah mengadopsi program penghematan baru guna penguatan sektor perbankan dan insentif bagi langkah restrukturisasi perbankan melalui merger dan akuisisi. Pemerintah Yunani juga telah merampungkan langkah-langkah penghematan fiskal yang selaras dengan tuntutan kreditur sebagai prakondisi disetujuinya pengucuran dana talangan (*bailout*) kedua. Pemimpin Uni Eropa juga menyepakati program bantuan untuk Yunani, termasuk di dalamnya penetapan besar kontribusi sektor swasta (*private sector involvement* – PSI) pada *debt swap* dan menaikkan batas pemotongan utang (*hair cut*) menjadi 53,5%, atau lebih tinggi dibandingkan kesepakatan pada Oktober 2011 sebesar 50%³. Keberhasilan program *bailout* Yunani yang melibatkan sektor swasta tersebut dapat meredakan tekanan ketidakpastian di pasar keuangan Eropa dan global.

Pada Maret 2012, negara-negara anggota Uni Eropa kecuali Inggris dan Republik Ceko, menandatangani “*fiscal compact*” guna mengatur besarnya defisit fiskal dan menurunkan rasio utang terhadap PDB ke tingkat yang berkesinambungan. Negara-negara anggota Euro juga berhasil menyepakati peningkatan kapasitas pembiayaan *European Financial Stability Facility* (EFSF)/ESM menjadi 700 miliar euro, dari sebelumnya hanya 500 miliar euro, meski dinilai masih belum cukup untuk menutup kebutuhan pembiayaan seluruh negara yang terkena krisis. Berbagai langkah tersebut, meski belum merupakan solusi jangka panjang, namun mendorong timbulnya sentimen positif di pasar keuangan. Kembali munculnya gejolak di pasar keuangan Eropa pada triwulan II 2012, menyusul spekulasi terkait wacana keluarnya Yunani dari penggunaan mata uang euro “*grexit*” dan meningkatnya kekhawatiran atas kebangkrutan perbankan Spanyol, mendorong otoritas Uni Eropa untuk mengintensifkan langkah-langkah stabilisasi ekonomi dan pasar keuangan. Selain mengandalkan



program LTRO yang telah menggantikan pembiayaan antar-bank (*inter-bank lending*) bagi 800 bank di Eropa, ECB juga menurunkan suku bunga acuan (*refinance rate*) menjadi 0,75% dari sebelumnya 1,0% dan menetapkan suku bunga deposito sebesar 0% guna meredakan tekanan likuiditas di pasar keuangan. Sementara itu, BoE kembali menambah pembelian SSB hingga 50 miliar poundsterling melalui skema *asset purchase facility* sehingga total pembelian SSB oleh BoE naik menjadi 375 miliar poundsterling hanya dalam kurun waktu 4 bulan.

Memasuki semester II 2012, aktivitas penyaluran kredit oleh perbankan Eropa belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan meski program LTRO telah ditempuh ECB dan jumlah uang beredar (M1) telah meningkat. Bahkan sebaliknya, LTRO justru membuat sektor perbankan Eropa menjadi semakin terpapar oleh aset pemerintah. Sebagai upaya memutus rantai tersebut, negara-negara anggota Euro menyetujui proposal *banking union*⁴ dan membuka peluang rekapitalisasi perbankan secara

³ PSI merupakan program keterlibatan kreditor swasta dalam program *debt swap* Yunani yang menghasilkan pemotongan utang 53,5% nilai utang yang dipegang swasta.

⁴ *Banking Union* adalah upaya otoritas Uni Eropa untuk menyatukan pengaturan sektor perbankan dan penyatuan kerangka institusi dalam rangka implementasi, *monitoring*, dan penegakan regulasi guna memastikan terjaganya fungsi dan stabilitas perbankan sehingga menjamin penyatuan mata uang (*monetary union*) berhasil dan dapat berfungsi dengan baik.

langsung melalui ESM⁵ dan pengadopsian program “*growth compact*” dengan rencana pengembangan *road-map* menuju integrasi ekonomi dan moneter yang lebih menyeluruh⁶.

Sebagai upaya menahan eskalasi krisis utang, ECB mengeluarkan kebijakan pembelian aset melalui program *Outright Monetary Transaction (OMT)* pada akhir September 2012. Berbeda dengan LTRO, OMT merupakan pembelian SSB tanpa batas jumlah dan waktu pembelian dan memiliki dampak ekspansi likuiditas yang permanen⁷. OMT ditujukan untuk memperlancar kembali transmisi kebijakan suku bunga yang semakin melemah di kawasan euro, terutama di negara *periphery*. Lemahnya transmisi tersebut terkait meningkatnya tekanan krisis pemerintah dan lemahnya aspek permodalan dan likuiditas perbankan, sehingga berujung pada melemahnya fungsi intermediasi di perbankan Eropa. Selain itu, penurunan tingkat suku bunga sejalan program OMT juga diharapkan dapat menurunkan akumulasi utang pemerintah.

Selain AS, kawasan Uni Eropa, dan BoE, Jepang juga menempuh kebijakan moneter longgar (Grafik 2.2). Bank sentral Jepang (BoJ) tetap mempertahankan



suku bunga di tingkat yang sangat rendah yaitu 0%-0,1%. Selain itu, BoJ juga melakukan kebijakan QE berupa pembelian obligasi pemerintah bertenor pendek sebesar 10 triliun yen guna menahan penguatan nilai tukar yen. Dengan tambahan pembelian tersebut, total target pembelian obligasi mencapai 65 triliun yen. Selain itu, BoJ juga menambah dana pinjaman “*Growth-Supporting Funding Facility*” menjadi 5,5 triliun yen dari sebelumnya 3,5 triliun yen sebagai upaya mendukung kebangkitan industri Jepang yang terimbas bencana di Thailand pada tahun 2011. Langkah QE oleh BoJ juga ditujukan untuk mencapai tingkat inflasi yang ditargetkan (1%), dan memerangi deflasi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang melambat di tengah memburuknya prospek ekonomi global dan ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa memaksa BoJ untuk kembali meluncurkan program tambahan pembelian obligasi pemerintah pada September 2012. BoJ kembali mengumumkan adanya tambahan rencana pembelian SSB pemerintah menjadi 91 triliun yen pada Oktober 2012 yang antara lain terkait berakhirnya program subsidi pembelian kendaraan hemat BBM. Dengan tambahan tersebut, total pembelian SSB ditargetkan mencapai 80 triliun yen pada akhir tahun 2013.

5 Dengan kata lain, rekapitalisasi perbankan dapat dilakukan tanpa berdampak pada kenaikan beban utang pemerintah. Program tersebut akan dapat diinisiasi bila mekanisme pengawasan tunggal di perbankan Eropa berhasil dibentuk dan dalam perkembangannya, otoritas Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan untuk memberikan mandat kewenangan pengawasan tunggal kepada ECB. Selain itu, otoritas Uni Eropa juga menyepakati posisi ESM tidak memegang posisi senior dalam program bantuan keuangan ke Spanyol.

6 *Growth compact* adalah kesepakatan yg dicapai otoritas di Eropa pada akhir Juni 2012 untuk melakukan langkah terkoordinasi baik di level nasional, negara anggota Euro maupun Uni Eropa guna mengembalikan Kawasan Eropa pada “*path of smart, sustainable and inclusive growth*”.

7 Dengan jumlah intervensi yang tidak terbatas, secara tidak langsung ECB memberikan jaminan atas seluruh utang pemerintah. Selain itu, ECB dalam program tersebut tidak lagi berada pada posisi senior dibanding kreditor lain. Langkah ini memberi proteksi bagi sektor swasta pemegang surat utang pemerintah negara di kawasan Euro dengan tidak menimpakan seluruh risiko gagal bayar pada kreditor swasta.

Adapun dari sisi kebijakan fiskal, tingginya rasio utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai lebih dari 200% mendorong pemerintah Jepang berencana menaikan pajak konsumsi yang direncanakan mulai berlaku sejak Januari 2013. Meski memicu penurunan tingkat keyakinan konsumen dan konsumsi rumah tangga pada semester kedua 2012, langkah tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kesinambungan fiskal ekonomi Jepang.

Negara *Emerging Market*

Meskipun masih memiliki ketahanan, perekonomian negara-negara berkembang juga terimbas rambatan krisis utang Eropa dan pelemahan permintaan global. Sebagai upaya menahan pelemahan aktivitas perekonomian, mayoritas negara berkembang melakukan kebijakan akomodatif. Selain pelonggaran kebijakan moneter, negara-negara berkembang yang ruang gerak fiskalnya masih terbuka juga menempuh

Tabel 2.1 Stimulus Fiskal Beberapa Negara *Emerging Market*

Negara	Stimulus fiskal, Proyek infrastruktur dan pengeluaran lain
China	Subsidi konsumen sebesar 26,5 miliar yuan (sekitar 3,3 miliar dolar AS) untuk pembelian peralatan listrik hemat energi
	<i>National Development and Reform Commission</i> (NDRC) mempercepat jalannya proyek sektor swasta dan pemerintah daerah, mis. menyetujui 868 proyek sektor swasta pada Januari-April, meningkat dari 363 proyek pada periode yang sama tahun lalu; menyetujui 25 proyek <i>subway</i> dari 18 pemerintah daerah pada Juni-Agustus, sebanding dengan 25 proyek <i>subway</i> yang disetujui pada awal tahun 2009 sebagai bagian dari paket stimulus 4 triliun yuan.
	NDRC akan menyetujui 20 proyek lainnya, termasuk proyek 13 jalan tol dengan total panjang lebih dari 2000 km.
	Selain itu NDRC juga menyetujui pembangunan pembangkit tenaga listrik dari pembakaran sampah, pengolahan limbah, pelabuhan, pergudangan.
	Menaikan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada eksportir (terutama UKM) menjadi 17% dari 13%-15% pada saat ini.
India	Pemerintah mengumumkan proyek infrastruktur untuk tahun anggaran yang berakhir Maret 2013 yaitu pelabuhan (3 miliar dolar AS), monorel (<i>elevated rail</i>) Mumbai (3,6 miliar dolar AS), bandara-bandara, pembangunan jalan sepanjang 9.500 km (+18,7% vs tahun anggaran 2012), 18.000MW kapasitas pembangkit tenaga listrik baru) dan langkah reformasi untuk mendorong investasi swasta (yaitu liberalisasi FDI dalam ritel <i>multi-brand</i> , aviasi dan siaran media,serta menyetujui divestasi saham pemerintah pada empat perusahaan besar publik)
Brazil	Pemerintah akan menjual ijin untuk membangun dan mengoperasikan jalan sepanjang 7.500 km dan jalur kereta api sepanjang 10.000 km yang akan melibatkan investasi sebesar 66 miliar dolar AS
Korea Selatan	Mengumumkan paket stimulus ekonomi sebesar 5,23 miliar dolar AS (termasuk pemotongan pajak penghasilan dan pembelian rumah dan mobil; meningkatkan program kesejahteraan sosial yang didanai pemerintah) pada September 2012, sebagai tambahan atas rencana stimulus sebesar 7,5 miliar dolar AS (termasuk asistensi untuk UMKM dan pekerja yang berpendapatan rendah) yang diluncurkan pada Juni 2012.
Malaysia	Pencairan Anggaran 2012 untuk pemberian dana tunai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelajar.
	Pengeluaran subsidi dan program pengeluaran populis juga untuk anggaran tahun 2013 (29% dari anggaran program populis tersebut akan termasuk pencairan dana tunai seperti yang telah dilakukan pada tahun 2012)
	Penangguhan program rasionalisasi subsidi sejak pertengahan tahun 2011.
	Kenaikan pendapatan dan bonus pegawai negeri sipil .
	Meluncurkan proyek utama <i>economic transformation program</i> (ETP) bidang infrastruktur dan investasi, misalnya MRT; minyak, gas dan energi; pembangunan lahan strategis pemerintah.
Thailand	Sebesar 350 miliar Baht diluncurkan untuk proyek pengelolaan air terkait keputusan darurat pada Feb 2012 setelah terjadinya banjir parah pada akhir tahun 2011.
	Belanja infrastruktur sebesar 80 miliar dolar AS untuk 10 tahun ke depan (setengahnya untuk pembangunan jalur kereta api, ditambah proyek lainnya untuk fasilitas publik dan telekomunikasi), yang separuhnya akan didanai oleh pemerintah dan dan seperlima lainnya melalui PPP. Pemerintah menunggu parlemen merancang Undang-Undang untuk persetujuan melakukan peminjaman sebesar 2,2 triliun Baht untuk membiayai proyek infrastruktur dalam 7 tahun ke depan.
Filipina	Melaksanakan 8 dari 22 proyek infrastruktur.
	Prospek proyek mitigasi banjir (World Bank mengestimasi sebesar 7 miliar dolar AS dana yang dibutuhkan) pasca banjir.

kebijakan stimulus fiskal. Negara-negara berkembang yang pada tahun sebelumnya masih relatif fokus pada pengendalian tekanan inflasi, pada tahun 2012 mulai beralih pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Meredanya tekanan inflasi secara umum sejalan dengan pelemahan permintaan dan harga komoditas global.

Pemerintah China melakukan kebijakan pelonggaran moneter dan stimulus fiskal dalam menghadapi perlambatan aktivitas ekonomi domestik terkait pelemahan global dan penurunan kegiatan investasi dalam negeri. Selama tahun 2012, bank sentral China (PBoC) menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 200 bps untuk Agricultural Bank of China yang memiliki ratusan cabang, guna mendorong kredit di wilayah pedesaan. PBoC juga dua kali menurunkan GWM, masing-masing sebesar 50 bps, untuk kelompok bank besar dan bank kecil. Selain itu, PBoC juga melakukan injeksi likuiditas melalui mekanisme *reverse repo* sebesar 183 miliar yuan (setara dengan 28,97 miliar dolar AS) ke dalam sistem perbankan. Selain pelonggaran kuantitas, PBoC juga memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali sehingga suku bunga kredit turun 56 bps selama tahun 2012. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat mendorong ekspansi kredit dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah China juga mengeluarkan sejumlah langkah stimulus fiskal khususnya melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur tersebut, antara lain meliputi pembangunan *subway*, jalan tol, bandara dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan subsidi bagi pembelian peralatan elektronik rumah tangga (*home appliance*) yang hemat energi dan menaikkan rabat pajak nilai tambah bagi eksportir UKM dari 13%-15% menjadi 17% untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dengan berbagai kebijakan tersebut, ekspansi kredit mulai menunjukkan peningkatan, sementara indikator sektor industri (PMI manufaktur) telah kembali ke area ekspansi pada penghujung tahun 2012.

Langkah pelonggaran yang hampir serupa juga ditempuh oleh negara-negara *emerging market* lainnya (Tabel 2.1). Selain ditunjukkan untuk memitigasi efek rambatan dari perlambatan ekonomi di negara maju, langkah stimulus tersebut juga ditujukan untuk mengurangi dampak dari perlambatan ekonomi China.

2.1 Kerjasama Internasional

Sepanjang tahun 2012, isu fundamental pemburukan ekonomi dan keuangan global serta langkah konkret guna meredam dampak negatif perlambatan ekonomi global menjadi fokus pembahasan pada fora kerjasama internasional. Di kawasan Asia Pasifik, fokus pembahasan pada forum ASEAN+3 dan SEACEN (South East Asian Central Banks) diletakkan pada upaya menjaga stabilitas kawasan melalui penguatan dan penyempurnaan jaring pengaman keuangan kawasan. Melalui fora dimaksud, kesepakatan untuk terus menjalankan kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati serta meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan juga terus didorong.

Fokus serupa juga mewarnai pembahasan dalam forum menteri keuangan ASEAN. Secara khusus, forum dimaksud menekankan upaya peningkatan stabilitas sistem keuangan dan mobilisasi sumber daya keuangan di kawasan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan. Dalam jangka menengah, para Menteri Keuangan berkomitmen untuk mengarahkan permintaan domestik sebagai basis pertumbuhan ekonomi (*domestic-led growth*) yang ditempuh melalui sejumlah reformasi struktural, menjaga keseimbangan pertumbuhan yang kondusif bagi investasi, serta memajukan pembangunan ekonomi yang inklusif. Mobilisasi sumber daya keuangan di ASEAN tersebut bahkan telah mencapai tahapan yang konkret seiring dengan dimulainya operasionalisasi ASEAN Infrastructure Fund (AIF), yang pada tahun 2012, telah berhasil menggalang

dana bersama hingga mencapai 485,2 juta dollar AS. Operasionalisasi AIF itu menjadi momentum istimewa bagi ASEAN untuk melaksanakan proyek infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sementara itu, menghadapi perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global, fora kerja sama SEACEN juga menitikberatkan pada upaya mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan mengenai rumusan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih efektif guna mengantisipasi dampak gejolak eksternal terhadap stabilitas ekonomi negara di kawasan. Komitmen tersebut akan turut melengkapi jaring pengaman keuangan yang telah disepakati negara ASEAN+3 dalam kerangka mendukung penciptaan stabilitas keuangan dan pertumbuhan kawasan.

Penguatan *surveillance* ekonomi dan sistem keuangan global serta upaya menurunkan risiko sistemik juga menjadi isu utama dalam pertemuan negara anggota IMF dan forum G-20. Berkaitan dengan penguatan *surveillance* IMF, forum G-20 memandang perlu adanya integrasi yang lebih baik antara *surveillance* bilateral dan multilateral dengan fokus pada stabilitas global, domestik, dan keuangan, termasuk efek rambatan kebijakan. Selain itu, G-20 memandang penting adanya *surveillance* yang terkait

kebijakan nilai tukar serta memperluas cakupan *surveillance* hingga mencakup likuiditas global, aliran modal, cadangan devisa, fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas eksternal. Sementara itu, untuk memperkuat proses koordinasi kebijakan dan diskusi dalam rangka akuntabilitas implementasi komitmen kebijakan, G-20 telah menyepakati seperangkat indikator kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar yang akan digunakan untuk memperkuat proses *peer review* negara anggota G-20, sebagai bagian dari *Accountability Assessment Framework*. Selanjutnya, di tahun 2013, akan dibahas indikator-indikator bagi efek tular kebijakan domestik, implementasi reformasi struktural, dan pencapaian pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang.

Sementara itu, terkait dengan reformasi sektor keuangan, forum G-20 melakukan reformasi regulasi dan supervisi sektor keuangan global untuk meningkatkan resiliensi sistem keuangan dan menurunkan risiko sistemik. Fokus agenda reformasi saat ini antara lain meliputi: (i) implementasi *framework* permodalan dan likuiditas Basel III, (ii) regulasi atas lembaga keuangan yang berdampak sistemik serta lembaga *Credit Rating*, dan (iii) pengaturan pasar derivatif *over the counter* (OTC).



KETAHANAN EKONOMI DOMESTIK

Bab 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bab 4. Neraca Pembayaran Indonesia

Bab 5. Nilai Tukar

Bab 6. Inflasi

Bab 7. Operasi Keuangan Pemerintah

Bab 8. Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran

Bagian 2

Bagian 2

Ketahanan Ekonomi Domestik

Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup kuat, diiringi oleh laju inflasi yang tetap terkendali pada kisaran sasarnya sebesar 4,5%±1%. Pencapaian tersebut mengantarkan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mampu menjaga momentum pertumbuhannya di tengah perlambatan ekonomi global. Perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi juga terlihat pada tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin menurun. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan laju inflasi Indeks Harga Konsumen yang stabil terjadi hampir di seluruh daerah. Sementara itu, dengan realisasi inflasi yang cukup rendah, tren disinflasi terus berlanjut. Dalam jangka yang lebih panjang, inflasi Indonesia diharapkan dapat setara dengan tingkat inflasi kawasan.

Terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 ditopang oleh kinerja permintaan domestik yang tetap solid. Daya tahan perekonomian nasional didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang cukup kuat. Di satu sisi, kuatnya permintaan domestik mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya kinerja ekspor akibat melemahnya perekonomian global dan penurunan harga komoditas. Namun, di sisi lain, kuatnya permintaan domestik juga berimplikasi pada kuatnya pertumbuhan impor. Dari sisi penawaran, sektor-sektor yang berorientasi ekspor tumbuh rendah, tetapi kondisi sebaliknya berlangsung pada sektor-sektor yang berorientasi domestik.

Dengan kondisi ekonomi dunia yang tumbuh melambat dan masih kuatnya permintaan domestik, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat penurunan surplus yang besar. Penurunan surplus NPI diakibatkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat cukup tajam, akibat menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan melebarnya defisit neraca perdagangan migas. Meskipun demikian, surplus yang cukup besar pada neraca transaksi modal dan finansial mampu berperan sebagai pengimbang bagi neraca pembayaran untuk tetap mencatat surplus. Kinerja ekonomi domestik yang cukup kuat dan imbal hasil investasi rupiah yang menarik mendorong tingginya aliran masuk modal asing, baik investasi langsung maupun portofolio. Di sisi portofolio, surplus juga didorong oleh peningkatan utang luar negeri pemerintah dan swasta, meskipun masih dalam batas yang cukup aman. Berdasarkan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir tahun 2012 mencapai 112,8 miliar dolar AS atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sejalan dengan defisit neraca transaksi berjalan, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi sepanjang tahun 2012. Intensitas tekanan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan masih tingginya sentimen negatif terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Namun, sejumlah langkah stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia mampu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai

tukar rupiah tersebut dibutuhkan untuk memelihara kepastian bisnis dan kepercayaan pelaku ekonomi.

Inflasi IHK di sepanjang tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan didukung oleh semua komponennya baik inflasi inti, inflasi bahan pangan, dan administered prices. Inflasi inti bergerak stabil didukung oleh terkelolanya permintaan domestik, meningkatnya kapasitas sisi produksi, penurunan harga komoditas, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang rendah. Di sisi kelompok bahan pangan, terkendalinya inflasi pada tingkat yang rendah terutama dipengaruhi oleh peningkatan produksi pangan domestik dan kelancaran distribusi.

Searah dengan kinerja perekonomian, sektor perbankan mampu mempertahankan kinerja positif yang tercermin pada ketahanan dalam menghadapi krisis global, peningkatan fungsi intermediasi dan perbaikan efisiensi. Peningkatan ketahanan sistem perbankan tercermin dari tingkat permodalan yang meningkat dan berada jauh di atas ketentuan minimum. Dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja masih tumbuh cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan kapasitas perekonomian ke depan. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan melalui kebijakan suku bunga dasar kredit (SBDK). Sementara itu, efisiensi perbankan juga mengalami perbaikan, antara lain terlihat dari penurunan rasio Biaya

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja ini juga diiringi membaiknya profil risiko bank.

Di pasar keuangan, perkembangan positif ditandai dengan peran investor domestik yang secara bertahap mampu mengimbangi peran investor asing dalam pembentukan harga. Di samping itu, kinerja pasar saham dan obligasi semakin membaik seperti tercermin pada kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), dan peningkatan valuasi aset.

Sementara itu, sistem pembayaran menunjukkan kinerja yang positif baik dari aspek keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Kinerja yang tetap baik tersebut antara lain didorong oleh ketersediaan infrastruktur yang semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Aktivitas perekonomian domestik yang terus meningkat juga diakomodasi dengan pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (UYD) di masyarakat, termasuk di daerah perbatasan dan atau daerah terpencil. Hal ini tercermin pada pertumbuhan rata-rata UYD maupun aliran keluar dan masuk uang kartal melalui Bank Indonesia.

Bab 3

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan





Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan



Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 sanggup mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah kinerja perekonomian global yang melambat. Perekonomian Indonesia tumbuh 6,2% pada tahun 2012, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sepuluh tahun terakhir, yaitu 5,5%. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah, terutama Kawasan Timur Indonesia.

Dari sisi permintaan, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya permintaan domestik yang tercermin dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang relatif kuat meskipun menurun pada triwulan terakhir. Di sisi lain, ekspor mengalami tekanan yang berat sebagai dampak perlambatan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas. Sementara impor masih tumbuh cukup tinggi sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Dari sisi produksi, kinerja ekonomi ditopang oleh sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara, sektor-sektor yang lebih berorientasi ekspor tumbuh relatif rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Terjaganya stabilitas tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan yang ditempuh baik oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga disertai dengan permintaan terhadap tenaga kerja, tercermin pada tingkat pengangguran yang menurun. Peningkatan tenaga kerja tersebut pada gilirannya berkontribusi pada membaiknya kesejahteraan masyarakat.



3.1 Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 masih tumbuh cukup baik sebesar 6,2%, meski lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,5%. Belum pulihnya ekonomi negara-negara maju telah memberi dampak rambatan kepada kinerja perekonomian negara - negara *emerging market* yang melambat pada tahun 2012. Negara yang cukup besar menopang pertumbuhan *emerging market* yaitu China dan India tumbuh melambat.

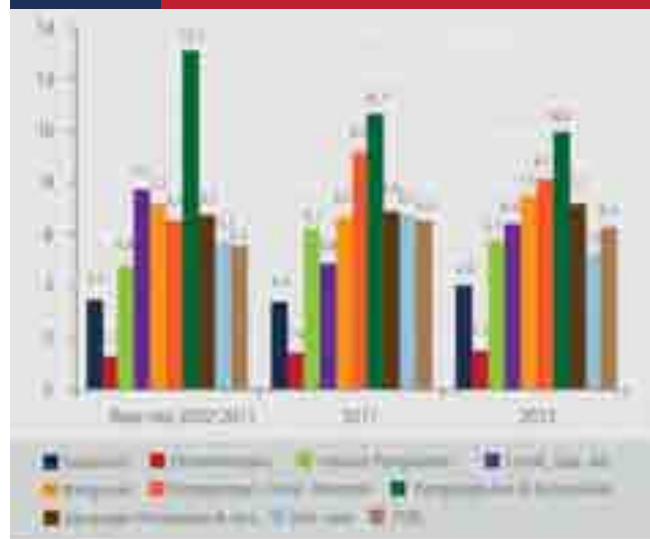
Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Kuatnya permintaan domestik mampu menahan pertumbuhan ekonomi sehingga tetap tumbuh tinggi di atas 6%, dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada sepuluh tahun terakhir sebesar 5,5% (Grafik 3.1). Di sisi lain, masih kuatnya permintaan domestik tersebut menyebabkan impor tercatat tumbuh cukup tinggi. Sementara itu, perlambatan permintaan global telah mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekspor, terutama pada semester II 2012. Pada periode perlambatan ekspor tersebut, kinerja sektor terkait ekspor seperti sektor pertambangan tumbuh relatif rendah. Sementara itu, sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi rumah tangga dan investasi tumbuh meningkat (Grafik 3.2). Masih baiknya pertumbuhan ekonomi disokong oleh stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pada tahun ini inflasi tercatat rendah, volatilitas nilai tukar terjaga stabil sesuai fundamentalnya, serta suku bunga kredit yang bergerak dalam tren menurun. Stabilitas tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan yang terkoordinasi sehingga menghasilkan situasi yang kondusif.

Dari sisi permintaan, motor penggerak pertumbuhan didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan

Grafik 3.1 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan



Grafik 3.2 Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran



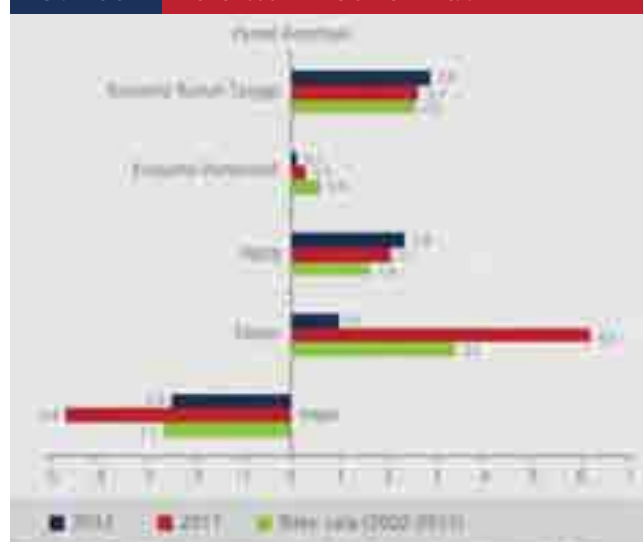
investasi, menggeser peranan ekspor (Grafik 3.3). Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi 5,3% dan mencapai titik tertinggi sejak krisis finansial global 2008/2009 didukung terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen yang terus menguat. Terjaganya daya beli sejalan dengan meningkatnya pendapatan konsumen serta pencapaian tingkat inflasi yang rendah. Investasi tumbuh tinggi sebesar 9,8%, melebihi rata-rata pertumbuhannya pada sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 7,5%, didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan optimisme pelaku usaha. Konsumsi pemerintah hanya tumbuh 1,3%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya 3,2%, disebabkan penurunan realisasi belanja pemerintah.

Berbeda dengan permintaan domestik yang meningkat, kinerja eksternal melemah. Ekspor hanya tumbuh sebesar 1,1%, turun tajam dibandingkan dengan rata-rata historisnya selama sepuluh tahun terakhir yaitu 8,1% akibat berkurangnya permintaan dari negara mitra dagang utama dan turunnya harga komoditas global. Meskipun ekspor tumbuh melambat, impor tumbuh lebih baik sebesar 6,7% sebagai respons kuatnya konsumsi dan investasi.

Pada sisi sektoral, kontributor utama pertumbuhan ekonomi yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran (PHR), serta pengangkutan dan komunikasi (Grafik 3.4). Tetap tingginya pertumbuhan PDB ditopang oleh kinerja sektor penghasil barang¹ dan sektor penghasil jasa². Sektor penghasil barang tumbuh stabil didukung pertumbuhan positif sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang mampu mengompensasi pertumbuhan rendah di sektor pertambangan. Sektor pertanian tumbuh meningkat didukung oleh produksi padi di subsektor tanaman bahan makanan dan produksi kelapa sawit di subsektor perkebunan.

- 1 Sektor penghasil barang meliputi sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.
- 2 Sektor penghasil jasa meliputi sektor listrik gas dan air, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa, serta jasa-jasa.

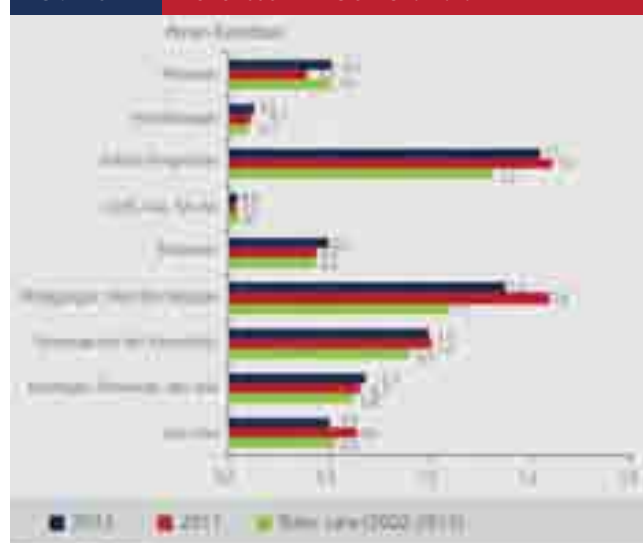
Grafik 3.3 Kontribusi PDB Sisi Permintaan



Sumber: BPS, data: BPS (pertumbuhan tahunan nominal dan triwulanan aktual)

Pertumbuhan sektor industri sejalan dengan laju permintaan domestik, seperti tercermin pada aktivitas produksi subsektor makanan dan minuman, alat angkut, semen, dan kimia. Sedangkan rendahnya pertumbuhan di sektor pertambangan terutama disebabkan oleh berlanjutnya kontraksi di subsektor migas. Pada sektor penghasil jasa, sektor PHR masih mencatat pertumbuhan yang tinggi, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya sejalan dengan arus perdagangan domestik dan eksternal. Sementara itu, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi masih tinggi ditopang kinerja subsektor angkutan

Grafik 3.4 Kontribusi PDB Sisi Penawaran



Sumber: BPS, data: BPS (pertumbuhan tahunan nominal dan triwulanan aktual)

Grafik 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

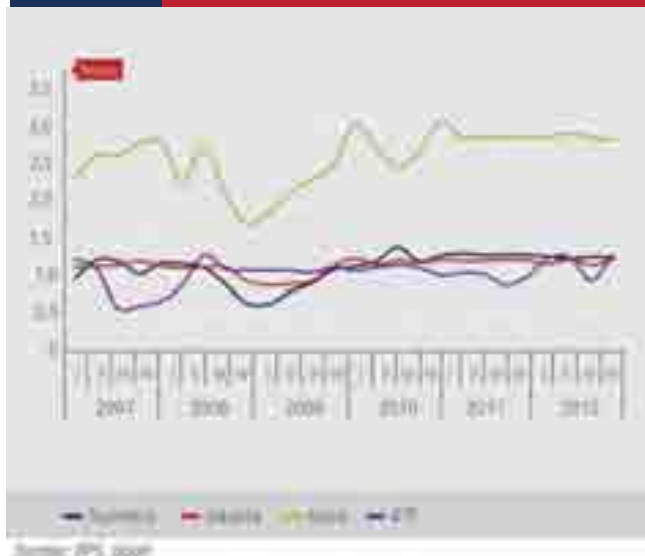


jalan, jasa angkutan dan komunikasi. Sektor keuangan persewaan dan jasa tumbuh meningkat ditopang oleh kinerja subsektor bank dan lembaga keuangan nonbank yang tumbuh positif.

Secara spasial, perekonomian daerah pada tahun 2012 secara umum menunjukkan kinerja yang

tetap terjaga (Grafik 3.5). Pertumbuhan yang tinggi terutama terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencapai 6,0%, dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 5,5% (Tabel 3.1). Pertumbuhan yang tinggi di KTI pada 2012 didukung oleh kinerja ekspor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan investasi infrastruktur. Pertumbuhan yang masih tetap tinggi juga terjadi di kawasan Jawa, Jakarta dan Sumatera meskipun dipengaruhi dinamika penurunan permintaan global. Pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera tercatat sebesar 5,8%, sedikit melambat sejalan dengan penurunan permintaan ekspor pada subsektor perkebunan, khususnya dari komoditas karet, dan pada sektor pertambangan. Walaupun terjadi perlambatan pada ekspor manufaktur di kawasan Jawa dan Jakarta, perekonomian di kedua kawasan tersebut masih mampu tumbuh cukup tinggi sebesar masing-masing 6,6% dan 6,5% pada 2012.

Grafik 3.6 Kontribusi PDRB



Aglomerasi ekonomi³ di kawasan Jawa dan Jakarta dengan dukungan sektor manufaktur dan pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kontribusi kawasan Jawa lebih besar dibandingkan daerah lainnya (Grafik 3.6). Tumbuhnya investasi di sektor manufaktur serta terjaganya konsumsi domestik mendukung kinerja ekonomi di kawasan Jawa dan Jakarta di tengah ekonomi dunia yang tumbuh melambat pada tahun 2012. Kondisi tersebut berbeda dengan pada periode krisis pada tahun 2008-2009. Pada periode tersebut, kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa menurun cukup dalam akibat dari kontraksi pertumbuhan ekspor manufaktur yang signifikan (-13,2% pada 2008 dan -1,9% pada 2009). Setelah periode krisis 2008-2009, perekonomian kawasan Jawa dapat kembali pulih dalam waktu relatif singkat sejalan dengan menguatnya permintaan dan harga komoditas global.

3.2 Permintaan Agregat

Permintaan domestik Indonesia pada tahun 2012 mampu tumbuh cukup baik di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Permintaan domestik yang kuat ditopang oleh daya beli riil masyarakat yang meningkat dan basis konsumen yang luas seiring dengan berkembangnya kelompok kelas menengah di Indonesia (Lihat Boks 3.1). Pasar domestik yang besar dan berdaya tahan baik menjadi insentif untuk peningkatan investasi. Solidnya permintaan domestik mampu mengimbangi perlambatan yang terjadi pada ekspor. Sejalan dengan investasi yang tumbuh tinggi, impor tumbuh positif melebihi laju ekspor.

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,3% atau meningkat dibandingkan dengan

3 Aglomerasi ekonomi adalah konsentrasi aktivitas perekonomian di suatu lokasi yang memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dalam skala regional.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kawasan/ Wilayah	2010				2010	2011				2011	2012				2012
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
	SUMATERA	5,0	5,2	5,5	6,5	5,6	5,9	6,1	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,9	5,7
Bagian Utara	4,7	5,3	5,7	6,3	5,5	6,2	6,5	6,4	6,0	6,3	6,1	6,1	5,9	5,9	5,9
Bagian Tengah	4,5	5,0	5,5	6,7	5,4	5,6	5,5	5,5	5,5	5,4	5,5	5,3	5,8	5,5	5,5
Bagian Selatan	6,0	5,4	5,5	6,4	5,8	6,1	6,8	6,3	7,0	6,5	6,3	6,1	6,0	5,9	6,2
JAKARTA	6,2	6,8	6,4	6,6	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,4	6,7	6,4	6,5	6,5
JAWA	5,8	7,1	6,3	5,8	6,2	7,1	6,6	6,6	6,7	6,6	6,6	6,7	6,6	6,2	6,6
Bagian Barat	5,6	7,9	5,9	4,9	6,1	7,5	6,2	6,4	6,3	6,5	6,3	6,4	6,2	5,6	6,2
Bagian Tengah	5,9	5,9	5,7	5,5	5,7	6,3	6,1	6,1	6,6	6,0	6,1	6,3	6,2	5,9	6,2
Bagian Timur	5,8	6,5	7,1	7,2	6,7	7,2	7,3	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,3
KTI	6,4	6,0	6,3	6,1	6,2	5,7	5,8	5,6	4,7	5,5	7,1	7,0	5,2	6,2	6,0
Bali dan Nusa Tenggara	9,9	6,8	6,0	1,4	5,8	3,3	3,0	3,6	2,9	3,2	3,3	5,2	3,3	4,2	4,1
Kalimantan	6,3	6,3	4,9	4,3	5,4	4,2	4,5	5,1	5,8	4,9	6,1	5,6	4,2	3,7	4,8
Sulawesi, Maluku, dan Papua	5,1	5,2	8,2	10,5	7,3	8,8	8,8	7,2	4,2	7,1	9,9	9,6	7,4	9,8	9,8
TOTAL	5,7	6,2	5,8	6,9	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3	6,4	6,2	6,1	6,2

Sumber: BPS Provinsi

tahun sebelumnya 4,7%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga bersumber dari konsumsi makanan dan nonmakanan (Grafik 3.7). Peningkatan konsumsi nonmakanan dikonfirmasi oleh kenaikan indeks penjualan kelompok tersebut berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (Grafik 3.8).

Kenaikan indeks penjualan terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga, peralatan informasi dan komunikasi, suku cadang kendaraan, makanan dan barang lainnya. Peningkatan juga terjadi pada penjualan mobil yang melampaui angka tertinggi secara historis yaitu satu juta unit atau tumbuh 24%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 17%. Tingginya penjualan mobil tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melanjutkan subsidi bahan bakar pada tahun ini.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh peningkatan daya beli riil masyarakat yang bersumber

dari peningkatan pendapatan dengan didukung tingkat inflasi yang stabil. Secara agregat, peningkatan penghasilan tercermin dalam pendapatan perkapita yang mencapai 3.563 dolar AS pada tahun 2012 (Grafik 3.9). Dengan tingkat pendapatan perkapita tersebut, maka Indonesia semakin dekat ke batas bawah negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income*)⁴. Peningkatan pendapatan terutama dinikmati oleh kelompok kelas menengah (*middle income*) yang terus meningkat dalam jumlah dan porsi (Grafik 3.10). Kelas menengah dengan tingkat konsumsi yang tinggi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga diuntungkan oleh struktur demografi yang didominasi penduduk usia produktif

4 Menurut Bank Dunia, klasifikasi kelompok negara berdasarkan pendapatan perkapita adalah pendapatan rendah (\leq \$1,005); pendapatan menengah bawah (\$1,006 - \$3,975); pendapatan menengah atas (\$3,976 - \$12,275); and pendapatan tinggi (\geq \$12,276).

Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB Permintaan (yoy)

	2011	2012				
		Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total
Konsumsi Rumah Tangga	4,7	4,9	5,2	5,6	5,4	5,3
Konsumsi Pemerintah	3,2	6,4	8,6	-2,8	-3,3	1,2
PMTB	8,8	10,0	12,5	9,8	7,3	9,8
Ekspor	13,6	8,2	2,6	-2,6	0,5	2,0
Impor	13,3	8,9	11,3	-0,2	6,8	6,6
Produk Domestik Bruto	6,5	6,3	6,4	6,2	6,1	6,2

Sumber: BPS



yang mencapai 68% dari seluruh penduduk. Porsi serapan tenaga kerja ke sektor formal yang semakin besar akan meningkatkan pendapatan riil, termasuk untuk konsumsi .

Peningkatan pendapatan juga terjadi pada kelompok buruh formal, seiring kenaikan upah minimum provinsi (UMP) riil yang secara rata-rata meningkat 7% lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5%. Peningkatan upah diperkirakan berlanjut pada tahun 2013 dengan ukuran yang lebih besar. Secara rata-rata, UMP riil tahun 2013 meningkat 14%. Namun, peningkatan upah buruh informal masih terbatas tercermin dari pertumbuhan upah riil yang masih bergerak di bawah konsumsi rumah tangga. Selain itu, nilai tukar petani turun mulai triwulan II 2012. Upah riil buruh tani juga belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sementara itu, upah riil buruh bangunan riil tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya sejalan dengan aktivitas konstruksi yang meningkat (Grafik 3.11).

Selain dari pendapatan, sumber pembiayaan konsumsi rumah tangga juga berasal dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Kredit riil konsumsi dari perbankan tumbuh stabil dengan suku bunga yang dalam tren menurun. Sementara

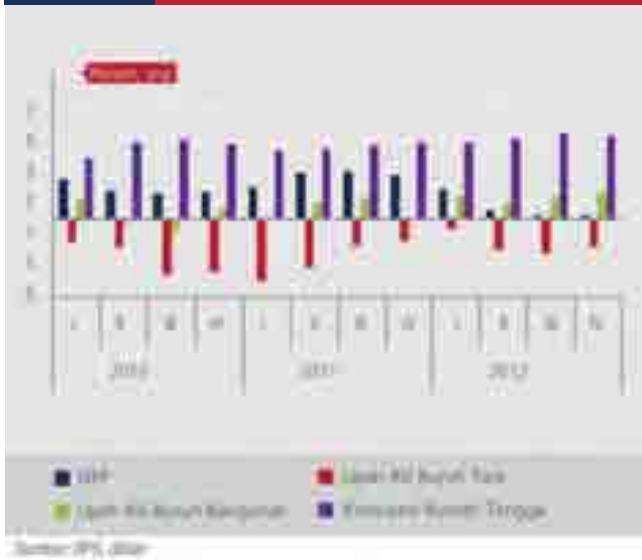
itu, pembiayaan riil konsumsi dari lembaga keuangan bukan bank mengalami penurunan sejak awal tahun. Di sisi simpanan, suku bunga deposito untuk tenor tiga dan enam bulan mengalami penurunan. Suku bunga tabungan riil bahkan tercatat negatif. Rendahnya suku bunga simpanan tersebut memberikan insentif untuk konsumsi.

Ketahanan konsumsi rumah tangga didukung juga oleh kuatnya keyakinan konsumen yang terindikasi dari hasil survei berbagai lembaga (Grafik 3.12). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurut Bank Indonesia dan Danareksa, serta indeks tendensi konsumen dari BPS pada tahun ini menguat dan mencapai level tertinggi secara historis. Penguatan keyakinan konsumen berasal dari optimisme atas kondisi perekonomian yang didukung oleh terjaganya stabilitas ekonomi makro. Optimisme konsumen dengan didukung oleh daya beli riil akan mendorong konsumsi.

Kuatnya konsumsi rumah tangga juga terlihat di sebagian besar daerah dengan rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut dikonfirmasi oleh meningkatnya penjualan eceran di berbagai daerah berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (Grafik 3.13). Keyakinan



Grafik 3.11 Nilai Tukar Petani (NTP) dan Upah Riil Buruh



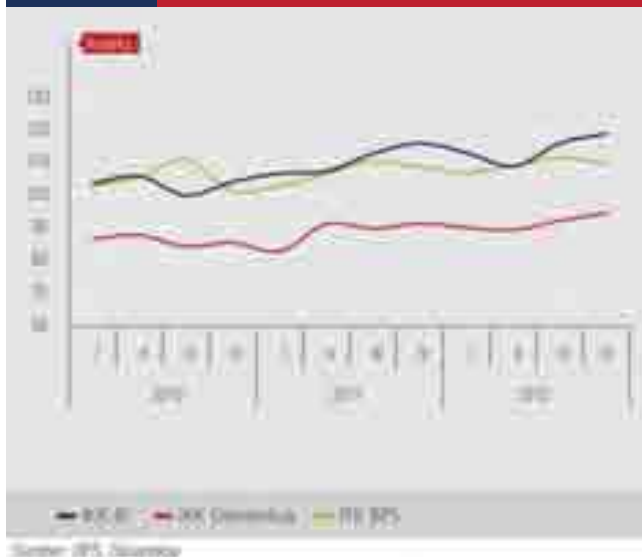
konsumen yang menguat juga dikonfirmasi oleh hasil survei yang dilakukan di 18 kota di Indonesia (Grafik 3.14). Secara umum tingkat keyakinan terhadap kondisi perekonomian di KTI relatif lebih tinggi dibandingkan kawasan lain. Di samping itu, kredit konsumsi yang tumbuh positif juga mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama di kawasan Jawa yang memiliki jumlah penduduk golongan menengah terbesar.

Konsumsi Pemerintah

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2012. Konsumsi pemerintah hanya tumbuh 1,2%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,2% dan rata-rata sepuluh tahun terakhir sebesar 7,7%. Rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan oleh kurang optimalnya belanja pemerintah. Belanja pegawai tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan belanja barang sempat meningkat pada semester pertama, namun tumbuh negatif pada semester kedua seiring langkah efisiensi pemerintah (Grafik 3.15)

Serapan belanja pemerintah yang tercatat dalam konsumsi pemerintah lebih rendah dari targetnya dalam APBN-P tahun 2012. Belanja pegawai mencapai 93,1%, lebih rendah dari daya serap tahun sebelumnya 95,5%. Serapan belanja barang hanya mencapai 73,5% dari target anggaran, jauh di bawah pencapaian tahun lalu sebesar 87,6%. Sedangkan pos belanja transfer ke daerah mampu terserap sesuai targetnya.

Grafik 3.12 Indeks Keyakinan Konsumen



Grafik 3.13 Indeks Penjualan Eceran Berdasarkan Kota



Grafik 3.14 Indeks Keyakinan Konsumen Kawasan



Grafik 3.15 Konsumsi Pemerintah

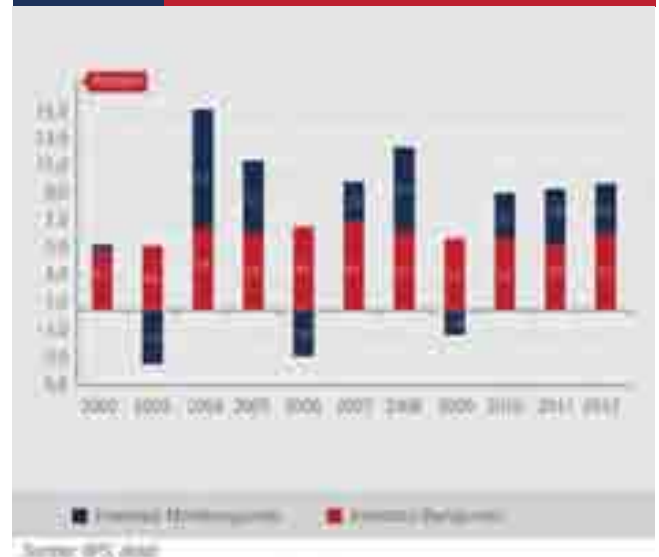


Investasi

Investasi pada tahun 2012 tumbuh tinggi mencapai 9,8%, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 8,8%. Akselerasi investasi terutama pada semester I 2012 sejalan dengan kuatnya konsumsi rumah tangga. Namun memasuki semester II 2012, laju investasi melambat sejalan dengan pertumbuhan konsumsi dan ekspor yang menurun. Peningkatan investasi didukung baik oleh investasi bangunan maupun nonbangunan (Grafik 3.16). Investasi bangunan tumbuh meningkat tercermin dari aktivitas konstruksi sebagai respons pertumbuhan aktivitas ekonomi, seperti tercermin dalam penjualan properti menurut Suvei Bank Indonesia terutama untuk properti komersial. Indikator kegiatan konstruksi antara lain penjualan semen nasional dan impor bahan bangunan meningkat. Pada investasi nonbangunan, akselerasi ditopang oleh investasi mesin dan alat angkut. Peningkatan investasi mesin diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian ke depan. Sementara investasi alat angkut tumbuh sejalan dengan prospek permintaan domestik yang baik. Tingginya investasi nonbangunan mendorong impor terutama barang modal dalam bentuk mesin, dan alat angkut, termasuk pesawat terbang.

Kinerja investasi didukung oleh optimisme pelaku usaha dan iklim investasi yang kondusif. Optimisme pelaku usaha tercermin dalam Indeks Tendensi Bisnis BPS yang bergerak dalam tren yang meningkat (Grafik 3.17). Pandangan positif terhadap investasi juga tertangkap dalam berbagai hasil survei dan laporan

Grafik 3.16 Kontribusi Investasi Terhadap PDB



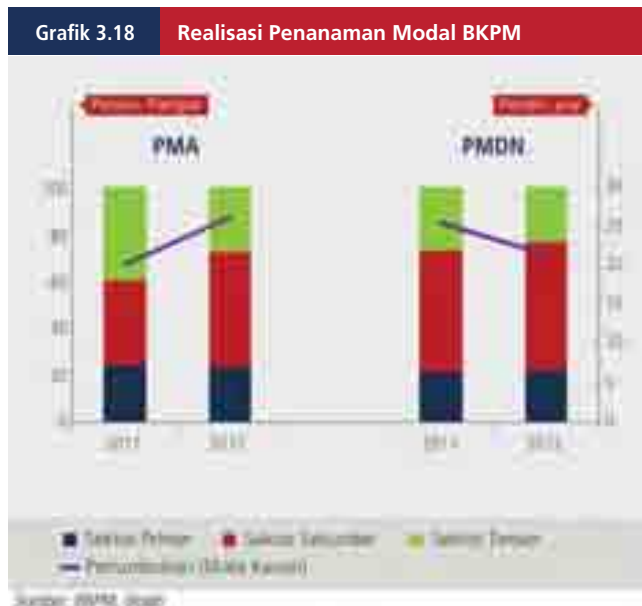
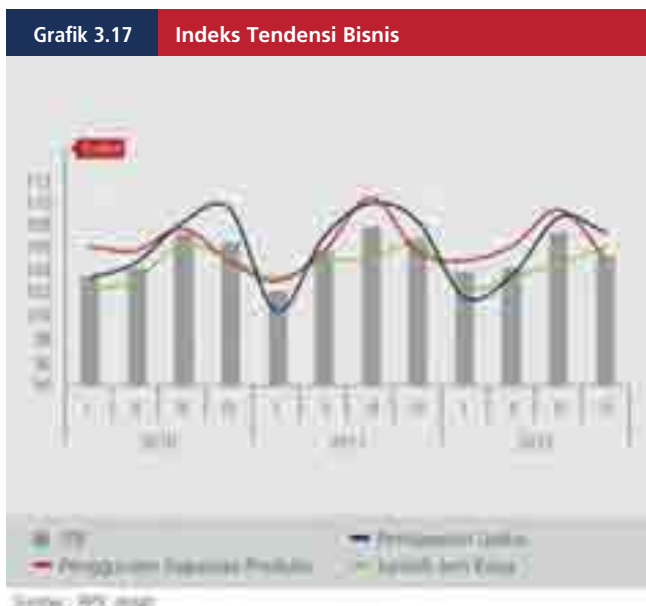
lembaga internasional⁵. Meningkatnya *sovereign rating* Indonesia turut memperkuat kinerja investasi. Setelah tahun lalu mendapat kenaikan peringkat menjadi “layak investasi” dari Fitch Rating dan Japan Credit Rating, Indonesia kembali mendapat pengakuan layak investasi dari Moody’s pada Januari tahun 2012. Pemberian peringkat layak investasi tersebut menunjukkan afirmasi dunia internasional terhadap ketahanan dan prospek ekonomi Indonesia.

Data realisasi investasi menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara total meningkat 25% lebih tinggi dari tahun sebelumnya 21% terutama bersumber dari penanaman modal asing/ PMA (Grafik 3.18). PMA tumbuh 26% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20%. Sementara, penanaman modal dalam negeri masih tumbuh baik 21%, meskipun sedikit lebih

rendah dari tahun lalu 25%. Secara sektoral, investasi baik PMA maupun PMDN masih dominan menyasar pada sektor sekunder atau industri pengolahan. Berdasarkan sektornya, penyaluran PMA terutama pada pertambangan, transportasi pergudangan dan komunikasi, industri kimia, industri logam dasar, dan industri kendaraan bermotor. Sedangkan, porsi PMDN disalurkan pada industri makanan dan minuman, industri mineral bukan logam, pertambangan, perkebunan dan transportasi pergudangan dan komunikasi.

Investasi didukung sumber pendanaan dari modal sendiri, lembaga pembiayaan maupun dari eksternal. Penggunaan modal sendiri meningkat tercermin dari peningkatan laba ditahan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Selain itu, investasi juga didukung oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang tumbuh tinggi seiring dengan rendahnya suku bunga. Peningkatan belanja modal pemerintah turut mendukung kinerja investasi. Investasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tumbuh 19%, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Selain investasi pemerintah tumbuh stabil, juga terjadi perbaikan dari sisi periode realisasi belanja modal yang telah dilakukan sejak awal tahun. Investasi pemerintah yang membaik

5 Beberapa hasil survei dan laporan lembaga Internasional sepanjang tahun 2012 antara lain: Indonesia akan menjadi tujuh negara terbesar di dunia pada tahun 2030 (McKinsey Report-Sept 2012); Peringkat Indonesia naik menjadi peringkat 128 dari tahun sebelumnya 130 dari 185 negara yang disurvei (IFC and World Bank-Doing Business 2013); Indonesia berhasil naik peringkat dari posisi 75 di tahun 2010 menjadi posisi 59 pada tahun 2012 (*Logistic Performance Index 2012*); Kenaikan peringkat sebagai tujuan FDI menjadi peringkat 9 tahun 2012, dari sebelumnya peringkat 20 (*The Foreign Direct Investment Confidence Index A.T.Kearney*)



tersebut terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akselerasi investasi belum sepenuhnya didukung perkembangan pada sisi infrastruktur. Meskipun pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, pencapaian pada tahun 2012 belum menggembirakan. Belum baiknya infrastruktur Indonesia terekam dalam peringkat infrastruktur dari *Global Competitiveness Index* tahun 2012-2013 yang masih berada di urutan 78 dari 114 negara⁶. Dengan peringkat tersebut, Indonesia berada di peringkat kedua terbawah di antara negara-negara Asia, hanya lebih baik dari Filipina. Realisasi infrastruktur jalan tol menurut Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) diperkirakan hanya bertambah 19,7 km. Rencana pengoperasian 24 ruas tol trans Jawa yang ditargetkan tahun 2014 diperkirakan akan meleset karena masih terkendala berbagai persoalan, terutama kendala pembebasan lahan. Infrastruktur listrik yang terangkum dalam proyek 10.000 MW tahap I secara kumulatif baru mencapai 4.510 MW pada tahun 2012, atau belum mencapai separuh dari targetnya. Sedangkan, pembangunan proyek listrik 10.000 MW tahap II yang didominasi energi terbarukan masih terus dikembangkan.

Secara spasial, pertumbuhan investasi di berbagai daerah meningkat terutama pada semester pertama 2012 (Grafik 3.19). Selain stabilitas ekonomi dan optimisme pelaku pasar, faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi daerah adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Investasi di kawasan Sumatera terfokus pada revitalisasi kilang minyak dan industri perkebunan.

6 Dalam laporan *Global Competitiveness Index* tahun 2012-2013 yang diterbitkan oleh World Economic Forum, peringkat Indonesia secara total berada di posisi 50 dari 114 negara, memburuk dari laporan sebelumnya yang berada di posisi 46. Dukungan infrastruktur masih menjadi kendala dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Selain itu, investasi infrastruktur di kawasan Sumatera terkait dengan pembenahan fasilitas pelabuhan, seperti Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan juga infrastruktur kegiatan Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau. Sedangkan di kawasan Jawa, investasi terutama berupa perbaikan infrastruktur di samping penggantian mesin dan alat produksi di sektor pertanian dan industri. Seperti halnya di Jakarta, investasi di kawasan Jawa juga terfokus pada investasi bangunan didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa dan turisme.

Investasi yang tumbuh tinggi di KTI terutama pada triwulan II 2012 didorong oleh maraknya berbagai proyek pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah KTI, seperti jalan raya dan jembatan, bandara dan pelabuhan, pembangkit listrik, serta pembangunan properti baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Di samping itu, investasi di KTI juga diarahkan untuk mendukung ekspansi produksi pada sektor pertambangan yang merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar di KTI seperti pengadaan alat berat dan armada pengangkutan.

Investasi di Jakarta didominasi oleh investasi bangunan sejalan dengan tingginya permintaan properti komersial terutama untuk ruang ritel, kantor

Grafik 3.19 Perkembangan Investasi Kawasan



sewa dan hunian kelas menengah atas. Ekspansi korporasi baik perusahaan domestik maupun asing juga menjadi faktor pendorong tingginya permintaan terutama ruang perkantoran dan hunian apartemen. Dengan semakin tingginya permintaan pada properti komersial serta keterbatasan lahan di daerah urban Jakarta, harga sewa maupun jual juga mengalami peningkatan signifikan sehingga meningkatkan imbal hasil dari investasi di sektor properti.

Ekspor

Ekspor pada tahun 2012 mengalami perlambatan, hanya tumbuh 1,1%, jauh di bawah tahun sebelumnya 13,6%. Perlambatan tersebut disebabkan oleh berlanjutnya dampak pelemahan ekonomi global, khususnya negara-negara maju yang merupakan pasar komoditas ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya juga berimbas pada berkurangnya serapan ekspor ke negara - negara mitra dagang utama di *emerging market* terutama China dan India. Perlambatan permintaan global tercermin dari volume perdagangan dunia yang turun dari 5,9% pada tahun 2011 menjadi 2,6% pada tahun 2012. Tren koreksi harga komoditas global yang masih berlanjut sejak akhir tahun lalu turut menyumbang perlambatan kinerja ekspor. Meskipun perlambatan telah terjadi sejak awal tahun, kontraksi terdalam terjadi pada triwulan III 2012. Memasuki triwulan

terakhir, ekspor menunjukkan pemulihan, meskipun masih terbatas, didukung membaiknya ekspor sektor pertambangan.

Berdasarkan komoditasnya, melambatnya ekspor disumbang oleh melambatnya ekspor manufaktur dan kontraksi ekspor produk pertambangan (Grafik 3.20). Di sisi produk manufaktur, perlambatan ekspor terjadi pada kelompok barang karet olahan, kimia, logam dasar, elektrikal, dan tekstil dan produk tekstil (TPT). Sementara itu, ekspor *crude palm oil* (CPO) masih tumbuh positif dan menopang ekspor produk manufaktur sehingga dapat tumbuh positif (Tabel 3.3). Kinerja ekspor produk manufaktur tersebut sejalan dengan turunnya nilai ekspor negara-negara tujuan utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, China, dan India. Ekspor komoditas pertambangan tumbuh negatif, disebabkan turunnya ekspor biji tembaga, granit dan bauksit. Komoditas ekspor utama di pertambangan yaitu batubara masih mampu tumbuh positif meskipun melambat akibat faktor harga komoditas yang turun. Secara volume, daya serap China dan India menopang masih baiknya kinerja ekspor batubara pada tahun ini. Sementara itu, ekspor produk pertanian meningkat disumbang komoditas kopi, ikan, udang dan rempah-rempah.

Penurunan permintaan global juga berdampak pada kinerja ekspor daerah (Grafik 3.21 dan 3.22). Ekspor produk manufaktur dan sumber daya alam di berbagai daerah tumbuh melambat terutama pada paruh kedua tahun 2012. Kontraksi pertumbuhan ekspor manufaktur di kawasan Jawa dan Jakarta sebagai basis industri nasional telah terjadi sejak awal 2012 sebagai dampak dari melemahnya permintaan global. Dampak penurunan ekspor manufaktur terutama terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil, mebel, bahan kimia dan kendaraan bermotor walaupun penjualan domestik mampu mengompensasi sebagian dari penurunan permintaan global. Perlambatan ekspor manufaktur di Jawa memberikan dampak cukup besar terutama di wilayah Jawa Bagian Barat dan Jakarta yang memiliki

Grafik 3.20 Nilai Ekspor Riil Nonmigas Menurut Komoditas



konsentrasi industri manufaktur yang melambat kinerja ekspornya. Tantangan dari ekspor daerah pada tahun 2012 juga terkait dengan turunnya daya saing akibat belum optimalnya sistem logistik dan distribusi, kenaikan biaya produksi dan distribusi serta gangguan produksi.

Penurunan ekspor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi di kawasan Sumatera dan KTI merupakan imbas dari tingginya inventori global yang berdampak pada penurunan permintaan. Menurunnya nilai ekspor komoditas SDA perkebunan terutama terjadi pada komoditas karet di kawasan Sumatera. Sebagai dampak dari melemahnya permintaan dan siklus penurunan produksi di negara importir, komoditas SDA perkebunan tersebut mengalami tekanan harga memasuki semester II 2012. Demikian pula halnya dengan penurunan harga komoditas hasil tambang khususnya batubara yang dipengaruhi melimpahnya stok batubara dunia dengan adanya pasokan yang cukup besar dari Rusia serta peralihan penggunaan gas untuk pembangkit listrik di India dan Amerika Serikat.

Impor

Permintaan domestik yang tumbuh kuat menyebabkan impor masih relatif tinggi. Secara tahunan, impor masih tumbuh positif 4,9%, meskipun lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu yang tumbuh tinggi 13,3%. Impor tercatat tumbuh tinggi pada paruh pertama terkait tingginya kinerja investasi, namun impor melambat pada periode berikutnya. Kecenderungan turunnya harga komoditas di pasar internasional turut mendorong aktivitas impor.

Masih tingginya impor nonmigas didukung peningkatan impor kelompok bahan baku, serta masih tingginya impor barang modal (Grafik 3.23 dan 3.24). Peningkatan impor bahan baku terutama dikontribusi oleh impor bahan mentah olahan untuk industri, dan suku cadang dan perlengkapan untuk alat angkut dan mesin industri. Impor

Grafik 3.21 Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Kawasan



Grafik 3.22 Kontribusi Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Kawasan



Grafik 3.23 Pertumbuhan Nilai Impor Riil Nonmigas Menurut Kategori Ekonomi



Tabel 3.3 Ekspor Nonmigas Berdasarkan Komoditas (Nilai Riil)

Komoditas	2007		2011		2012	
	Pertumbuhan (%yoy)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (%yoy)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (%yoy)	Pangsa (%)
Batubara	5,5	9,7	12,6	10,7	7,6	11,3
Minyak Kelapa Sawit	-12,1	5,3	-1,7	4,5	16,8	5,2
Tekstil & Produk Tekstil	3,6	16,2	9,6	15,8	-3,4	15,0
Alat Listrik	-7,8	7,7	-9,4	5,8	-0,8	5,7
Produk Kimia	6,6	3,2	22,0	2,2	-18,0	1,8
Karet	2,1	2,3	28,3	6,3	-24,6	4,7
Kertas	10,1	2,7	-10,3	1,8	-9,5	1,6
Tembaga	-17,0	2,4	-33,5	2,4	-45,1	1,3
Lainnya	7,9	50,5	20,3	50,5	7,0	53,4
Total	3,5	100,0	12,1	100,0	1,3	100,0

Grafik 3.24 Kontribusi Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Kawasan



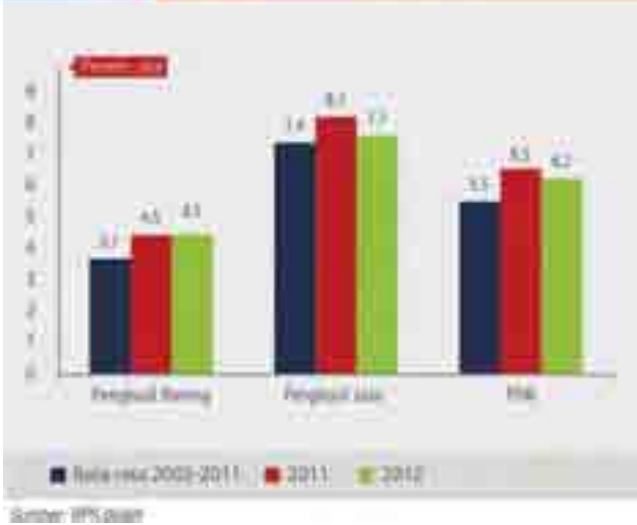
barang modal tercatat masih tinggi sejalan dengan peningkatan investasi, terutama dalam bentuk alat angkutan untuk komersial, termasuk pesawat dan kapal. Sementara impor mesin masih tumbuh baik. Pertumbuhan impor yang masih tetap tinggi menandakan aktivitas ekonomi domestik yang tinggi namun belum didukung oleh pasokan barang modal dan bahan baku dari industri dalam negeri. Impor barang konsumsi tumbuh melambat sejalan dengan berkurangnya impor bahan makanan baik mentah maupun olahan untuk rumah tangga. Hal tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan

produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Turunnya impor bahan makanan mentah juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengaturan impor produk hortikultura termasuk membatasi jumlah pelabuhan masuk impor. Sedangkan impor barang konsumsi nonmakanan, meliputi kendaraan penumpang dan barang tahan lama, tumbuh tinggi seiring permintaan domestik yang meningkat. Sementara itu, perlambatan ekspor tidak secara langsung direspons dengan penurunan impor juga tergambar pada kinerja impor daerah. Kecenderungan tersebut terlihat di hampir seluruh daerah dan ditengarai sebagai pengaruh dari masih kuatnya kinerja investasi dan penyerapan domestik. Pada semester II 2012, sejalan dengan semakin lemahnya permintaan ekspor dan terbatasnya konsumsi pascalebaran, pelaku usaha melakukan penyesuaian produksi yang berdampak pula pada penurunan impor.

3.3 Penawaran Agregat

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi bersumber dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pencapaian secara sektoral juga sejalan

Grafik 3.25 Pertumbuhan Sektor Penghasil Barang dan Penghasil Jasa

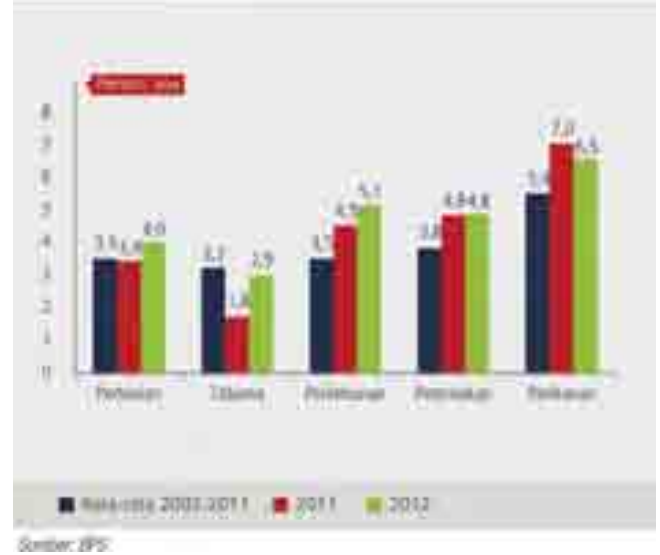


dengan kondisi di sisi permintaan, yaitu sektor-sektor ekonomi yang lebih berorientasi ke pasar domestik tercatat tumbuh cukup tinggi, sementara sektor-sektor dengan porsi ekspor yang lebih besar tumbuh rendah. Sektor penghasil barang (*tradables*) tumbuh stabil, sementara sektor penghasil jasa (*nontradables*) tumbuh tinggi dengan sedikit perlambatan (Grafik 3.25).

Sektor Penghasil Barang

Pertumbuhan sektor pertanian mencapai 4,0%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya 3,4% (Grafik 3.26). Akselerasi pertumbuhan tersebut

Grafik 3.26 Pertumbuhan Sektor Pertanian



ditopang subsektor tanaman bahan makanan terkait meningkatnya produksi padi. Produksi padi pada tahun 2012 menurut angka ramalan (Aram) II BPS diperkirakan meningkat 4,9%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (-1,1%). Peningkatan produksi didukung bertambahnya luas lahan tanam sebesar 2,0% serta peningkatan produktivitas sebesar 2,7%. Faktor cuaca yang cukup kondusif sepanjang tahun turut menjadi faktor pendukung produksi karena mendukung masa tanam dan meminimalkan hama. Kinerja subsektor perkebunan juga meningkat didukung produksi kelapa sawit sejalan permintaan produk olahan kelapa sawit dari eksternal maupun domestik yang masih kuat.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDB Penawaran (yoy)

Komoditas	2011	2012				
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Total
Pertanian	3,4	4,3	4,0	5,3	2,0	4,0
Pertambangan	1,4	2,5	3,3	-0,3	0,5	1,5
Industri Pengolahan	6,1	5,5	5,2	5,9	6,2	5,7
Listrik, Gas, dan Air	4,8	5,7	6,5	6,1	7,3	6,4
Bangunan	6,6	7,2	7,3	7,6	7,8	7,5
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,2	8,7	8,7	7,2	7,8	8,1
Pengangkutan dan Komunikasi	10,7	10,0	9,9	10,4	9,6	10,0
Keuangan, Persewaan, dan Jasa	6,8	6,4	7,1	7,5	7,7	7,1
Jasa-Jasa	6,7	5,5	5,8	4,5	5,3	5,2
Produk Domestik Bruto	6,5	6,3	6,4	6,2	6,1	6,2

Sumber: BPS

Kinerja sektor industri pengolahan tumbuh tinggi sebesar 5,7% dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata 4,8% meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,1% (Grafik 3.27). Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada semester II 2012 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan semester I 2012 sejalan dengan kuatnya permintaan domestik di tengah kontraksi ekspor pada periode tersebut. Aktivitas manufaktur yang meningkat diindikasikan oleh meningkatnya indeks produksi terutama pada semester II 2012. Ketersediaan kapasitas produksi yang cukup memadai turut mengimbangi ekspansi sektor manufaktur. Perkembangan ini tercermin dari tingkat utilisasi kapasitas manufaktur yang berada dalam kisaran yang relatif moderat antara 70%-75%.

Kinerja sektor industri pengolahan didukung oleh dinamika pertumbuhan subsektornya. Kinerja subsektor alat angkut, mesin, dan peralatannya tumbuh meningkat sejalan kinerja penjualan mobil yang tumbuh tinggi. Subsektor semen dan barang galian nonlogam meningkat sejalan dengan produksi semen terkait aktivitas konstruksi yang tinggi. Subsektor kimia dan barang dari karet juga tercatat tumbuh positif. Sementara itu, subsektor makanan minuman masih tumbuh tinggi di atas rata-rata untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang meningkat. Kinerja subsektor makanan minuman juga ditopang oleh produksi CPO untuk pasar ekspor dan domestik yang masih baik. Sedangkan perlambatan terjadi pada subsektor tekstil dan logam dasar terkait kontraksi pertumbuhan eksportnya

Sektor pertambangan pada tahun 2012 tumbuh positif 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,4% (Grafik 3.28). Relatif rendahnya kinerja pertambangan tersebut terutama bersumber dari semakin dalamnya kontraksi pada produksi pertambangan migas. Hal tersebut terkait belum tercapainya produksi minyak akibat penurunan produksi alamiah di samping adanya gangguan produksi. Usaha pemerintah untuk menemukan sumber minyak baru, atau mengefektifkan sumur tua belum mampu mendorong penambahan produksi. Minyak yang diproduksi tahun ini turun menjadi 860 ribu barel per hari dari tahun lalu 893 barel per hari. Sejalan dengan menurunnya produksi minyak, produksi gas juga turun menjadi 3.029,6 juta MMBTU, dari sebelumnya 3.075,4 juta MMBTU akibat gangguan pada beberapa kilang produksi.

Sementara itu, kinerja subsektor barang pertambangan nonmigas sejalan dengan kinerja

Grafik 3.27 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan



Grafik 3.28 Pertumbuhan Sektor Pertambangan



ekspor tambang. Pada periode perlambatan ekspor yaitu semester kedua, pertumbuhan subsektor nonmigas juga turun. Secara volume, produksi batubara nasional mampu tumbuh 9,3% pada tahun 2012, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu 28,3%. Penurunan produksi batubara terjadi akibat permintaan ekspor yang melemah sedangkan permintaan dari pasar dalam negeri untuk pembangkit PLN dan industri masih terbatas. Produksi komoditas pertambangan lainnya seperti emas, tembaga, nikel, bauksit dan granit juga mengalami penurunan sejalan dengan lebih rendahnya ekspor komoditas tersebut.

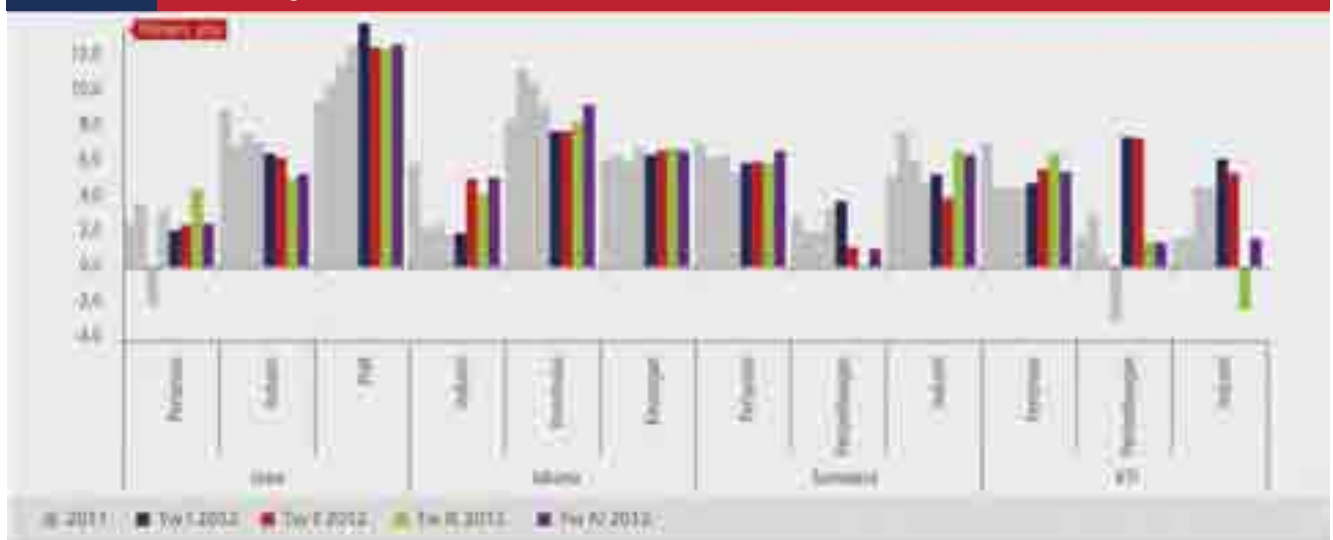
Secara spasial, pertumbuhan sektor pertanian tertinggi di kawasan Sumatera dan KTI pada tahun 2012 masing-masing sebesar 4,9% dan 4,4%, yang disumbang oleh produksi subsektor perkebunan khususnya minyak sawit dan karet (Grafik 3.29). Sedangkan di Jawa, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 2,2%, didukung oleh produksi padi yang meningkat sebagai dampak dari faktor cuaca yang kondusif.

Sektor pertambangan yang merupakan sektor utama di KTI tumbuh signifikan terutama pada semester I 2012 sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan

sebesar 3,5% untuk keseluruhan tahun 2012. Pertumbuhan tersebut didukung terutama oleh kinerja sektor pertambangan di daerah Sulawesi (produksi pertambangan nikel) dan Papua (produksi pertambangan tembaga dan emas). Sementara itu, produksi batubara di daerah Kalimantan yang merupakan komoditas ekspor utama KTI dengan pangsa 66% dari total ekspor masih relatif stabil meskipun terjadi penurunan harga komoditas SDA di semester II 2012.

Perlambatan ekonomi dunia yang memicu penurunan permintaan produk manufaktur, berdampak pada turunnya kinerja sektor industri di kawasan Jawa dan KTI yang tumbuh masing-masing sebesar 4,6% dan 2,1% pada tahun 2012. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar masing-masing 6,1% dan 2,5%. Namun, sektor industri di Jakarta masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 2,4%. Peningkatan pertumbuhan di Jakarta terutama didukung oleh industri pengolahan berskala besar, yakni industri kendaraan bermotor, mesin dan peralatan listrik.

Grafik 3.29 Perkembangan Sektor Utama Berdasarkan Kawasan



Sektor Penghasil Jasa

Kelompok sektor penghasil jasa tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik di sepanjang tahun 2012, meskipun sedikit melambat. Pertumbuhan sektor penghasil jasa ditopang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang masih tumbuh cukup baik sebesar 8,1% pada tahun 2012. Realisasi pertumbuhan sektor PHR pada tahun ini masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan sektor ini selama periode 2002-2011 yaitu sebesar 6,5%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 9,2% (Grafik 3.30). Kinerja subsektor perdagangan masih tinggi seiring aktivitas transaksi domestik yang kuat seperti ditunjukkan oleh Indeks Penjualan Eceran yang meningkat sepanjang tahun 2012. Masih terbatasnya transaksi ekspor menyebabkan subsektor ini sedikit melambat. Pola pertumbuhan yang sama ditunjukkan oleh subsektor perhotelan yang tumbuh positif sejalan dengan tingkat hunian hotel yang tinggi.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tetap tumbuh tinggi mencapai 10,0%, relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya 10,7% (Grafik 3.31) didukung kinerja subsektor angkutan jalan, jasa pengangkutan, serta komunikasi. Pertumbuhan sektor pengangkutan tersebut sejalan dengan mobilitas barang serta penumpang yang meningkat. Pada subsektor komunikasi, peningkatan penggunaan komunikasi data dan internet yang meningkat di tengah relatif terbatasnya penggunaan komunikasi seluler (suara dan SMS) mendorong subsektor komunikasi tumbuh meningkat. Peningkatan penggunaan komunikasi data sejalan dengan tingkat penjualan telepon seluler dan komputer tablet yang tinggi tahun ini.

Sektor bangunan tumbuh 7,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 6,6%. Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi terkait investasi bangunan yang meningkat. Hal tersebut terkonfirmasi

oleh indikasi meningkatnya penjualan properti menurut survei harga properti Bank Indonesia. Penjualan properti residensial mengalami kenaikan terutama untuk rumah tipe kecil. Properti komersial seperti gedung perkantoran dan lahan industri juga mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor listrik, gas, dan air (LGA). Sektor ini tumbuh 6,4%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 4,8%. Kinerja sektor LGA ditopang oleh masih baiknya kinerja subsektor listrik dan subsektor gas. Kinerja subsektor listrik terindikasi dari meningkatnya konsumsi listrik baik untuk segmen rumah tangga maupun bisnis dan industri seiring tingginya pertumbuhan penjualan alat elektronik, program elektrifikasi oleh PLN, serta aktivitas produksi berbasis energi listrik.

Kinerja sektor keuangan, persewaan, dan jasa tumbuh meningkat 7,1%, lebih baik dari kinerja tahun sebelumnya 6,8%. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh peningkatan kinerja lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Selama tahun 2012, kredit perbankan dan lembaga keuangan nonbank masih tumbuh cukup tinggi terutama pada kredit yang bersifat produktif yaitu kredit modal kerja dan investasi. Tingginya pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Sedangkan subsektor jasa penyewaan tumbuh baik sejalan dengan permintaan sewa properti komersial.

Sementara itu, sektor jasa-jasa tumbuh melambat, dengan pertumbuhan sebesar 5,2% lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tahun 2011 sebesar 6,7%. Turunnya kinerja sektor ini disebabkan oleh penurunan jasa-jasa pemerintahan sejalan dengan rendahnya realisasi belanja pemerintah. Namun, subsektor jasa swasta yang meliputi hiburan, rekreasi, sosial dan kemasyarakatan tumbuh tinggi merespons permintaan konsumsi rumah tangga dalam bentuk jasa.

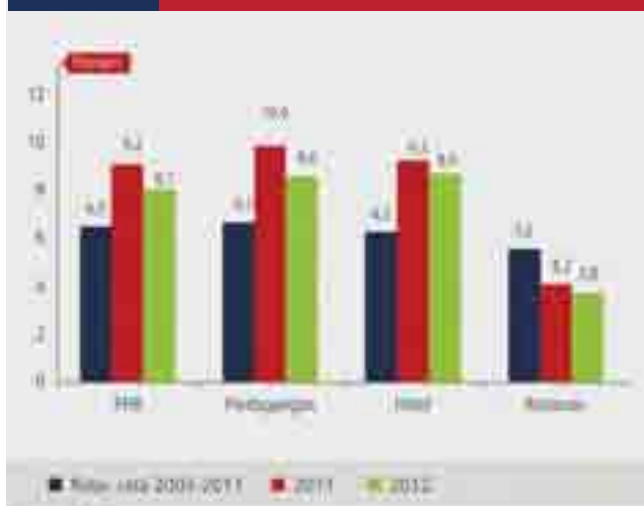
Secara spasial, sektor penghasil jasa mampu mencatatkan pertumbuhan positif di sebagian besar daerah, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor nonpenghasil barang di daerah didukung oleh terjaganya konsumsi domestik dan aktivitas perekonomian sektor riil. Hal tersebut terlihat dari terjaganya kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dalam level yang tinggi di sebagian besar kawasan. Meningkatnya perdagangan antardaerah dan konektivitas antardaerah juga turut mendorong pertumbuhan di sektor PHR terutama di kawasan Jawa dengan sektor PHR yang mampu tumbuh di atas 10% pada tahun 2012. Tingginya aktivitas perdagangan barang juga turut mendukung kinerja di sektor pengangkutan dan komunikasi. Di kawasan Jakarta dan KTI, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya pada tahun 2012 yang didorong oleh kenaikan signifikan dari pengangkutan penumpang sejalan dengan tingkat konektivitas yang semakin tinggi. Sektor nonpenghasil barang lainnya yang memberikan kontribusi cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kawasan pada tahun 2012 adalah sektor konstruksi atau bangunan. Peningkatan konstruksi dipengaruhi oleh kuatnya permintaan akan properti komersial dan hunian rumah tangga

serta pembangunan prasarana dan sarana fisik. Kinerja sektor konstruksi di KTI dan Jakarta tertinggi dibandingkan kawasan lainnya dengan pertumbuhan di atas 10% pada 2012. Sektor jasa terutama jasa keuangan juga berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi 2012, secara khusus di Jakarta sebagai pusat finansial dan di KTI yang salah satunya didukung oleh adanya program keuangan inklusif.

3.4 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

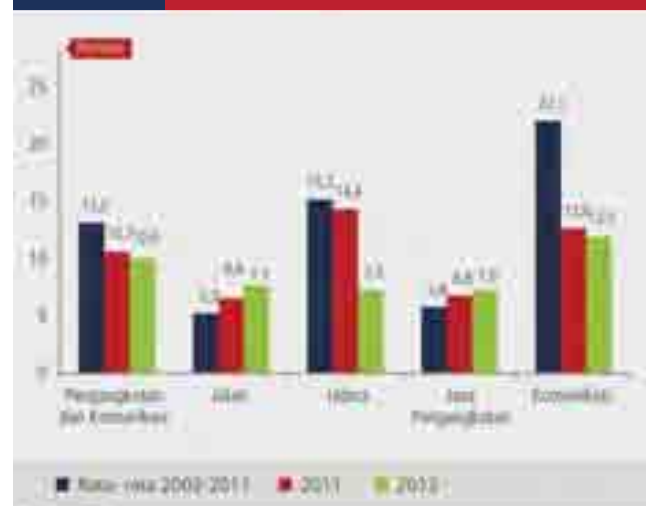
Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas dengan membaiknya perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Perkembangan ketenagakerjaan yang positif antara lain tercermin dari penurunan tingkat pengangguran terbuka seiring dengan perbaikan pendidikan dan peningkatan pangsa tenaga kerja di sektor formal. Sementara, kesejahteraan membaik tercermin dari berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin.

Grafik 3.30 Pertumbuhan Sektor PHR



Sumber: DPS

Grafik 3.31 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



Sumber: DPS

Ketenagakerjaan

Perekonomian yang tumbuh cukup baik menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,1% dari 6,6% pada periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 3.5).⁷ Kualitas ketenagakerjaan juga membaik seiring meningkatnya porsi tenaga kerja pada sektor formal, meskipun porsi tenaga kerja sektor nonformal masih mendominasi (Grafik 3.32). Dari sisi pendidikannya, jumlah tenaga kerja yang berpendidikan menengah-tinggi meningkat, sementara yang berpendidikan dasar terus berkurang (Tabel 3.6). Kebijakan pemerintah di

7 Berdasarkan publikasi BPS, Agustus 2012

bidang pendidikan berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan tenaga kerja⁸. Permintaan terhadap tenaga kerja juga semakin mengarah kepada pekerja dengan jenjang pendidikan tinggi tercermin pada penurunan tingkat pengangguran pada jenjang universitas, berbalik dengan tingkat pengangguran yang meningkat pada jenjang SD dan di bawahnya. Struktur ketenagakerjaan yang membaik ini berpotensi mendukung kuatnya konsumsi rumah tangga melalui perbaikan daya beli.

8 Kebijakan di bidang pendidikan antara lain anggaran pemerintah untuk pendidikan yang meningkat digunakan untuk bantuan operasional sekolah, pembangunan infrastruktur sekolah, dan peningkatan mutu tenaga pengajar. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah turut memberikan kontribusi perbaikan tingkat pendidikan tenaga kerja.



Tabel 3.5 Angkatan Kerja dan Pengangguran

juta orang (kecuali dinyatakan lain)

Kegiatan Utama	2010		2011		2012	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk Usia Produktif (15+)	171,0	172,1	170,7	171,7	172,9	173,9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,8	67,7	70,0	68,3	69,7	67,9
Angkatan Kerja	116,0	116,5	119,4	117,4	120,4	118,0
Pekerja Penuh (%)	64,3	64,3	64,6	64,0	64,2	64,8
Pekerja Paruh Waktu (%)	15,1	15,5	15,5	17,9	17,2	18,2
Setengah Penganggur (%)	13,2	13,1	13,2	11,5	12,3	10,8
Penganggur Terbuka (%)	7,4	7,1	6,8	6,6	6,3	6,1

Sumber: BPS

Terjaganya kinerja perekonomian daerah dan tumbuh kuatnya ekonomi KTI pada 2012 memberikan dampak pada dinamika sosial ekonomi dan disparitas antar kawasan. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan di seluruh kawasan, namun kawasan Sumatera dan KTI mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan Jawa dan Jakarta (Grafik 3.33). Tingkat Pengangguran Terbuka terendah di daerah Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang signifikan terjadi di daerah Kalimantan.

Kesejahteraan

Kesejahteraan pada tahun ini tercatat membaik yang tercermin dari berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin (Grafik 3.34). Penduduk miskin berjumlah 28,6 juta orang (11,7% dari jumlah penduduk)⁹, menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 29,9 juta orang (12,4% dari total penduduk). Meskipun penurunan penduduk miskin masih berlanjut, laju penurunannya semakin berkurang sejak tahun 2010. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Secara persentase, penurunan penduduk miskin lebih besar terjadi di pedesaan yaitu dari 15,6% menjadi 14,7% daripada

perkotaan yang turun menjadi 8,6% dari 9,1%. Namun rasio jumlah penduduk miskin masih tetap dominan ada di kawasan pedesaan (63,2%).

Tren penurunan jumlah penduduk miskin didukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang menurun. Pertumbuhan ekonomi menunjang perbaikan penghasilan masyarakat seiring dengan meningkatnya upah dan serapan tenaga kerja. Sementara itu, inflasi yang menurun menuju tingkat yang lebih rendah menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Penurunan penduduk miskin diiringi perbaikan kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan oleh perbaikan indeks kedalaman kemiskinan¹⁰ dan indeks keparahan kemiskinan¹¹. Perbaikan dalam indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 1,90 dari tahun sebelumnya 2,1 (Tabel 3.7). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga lebih berpotensi keluar dari kelompok penduduk miskin. Sedangkan kondisi kesenjangan antarpenduduk miskin yang tercermin dari indeks keparahan kemiskinan yang membaik. Indeks keparahan kemiskinan turun menjadi 0,48 dari 0,53 pada tahun sebelumnya (Tabel 3.8). Meskipun

9 Berdasarkan publikasi BPS, September 2012

10 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin.

11 Indeks Keparahannya Kemiskinan merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

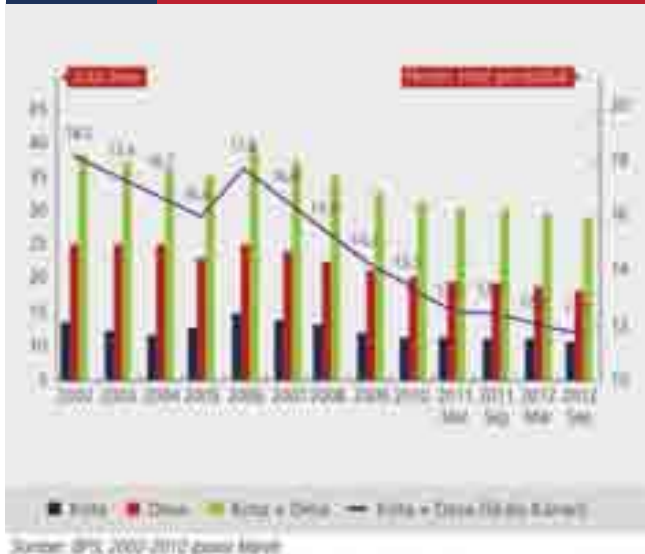
Tabel 3.6 Pertumbuhan Angkatan Kerja berdasarkan Pendidikan

Persen, yoy

Tingkat Pendidikan	2010		2011		2012	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD ke bawah	-0,22	-1,27	0,34	-0,61	0,71	-0,55
SMP	2,27	6,40	4,53	0,34	-4,39	-2,32
SMA dan SMK	7,39	8,68	8,80	4,72	2,11	3,00
Diploma I/II/III	7,84	8,24	14,88	4,97	6,02	6,31
Universitas	12,06	12,66	12,15	7,62	30,87	23,54
Total	2,79	3,18	3,60	1,35	1,37	1,03

Sumber : BPS

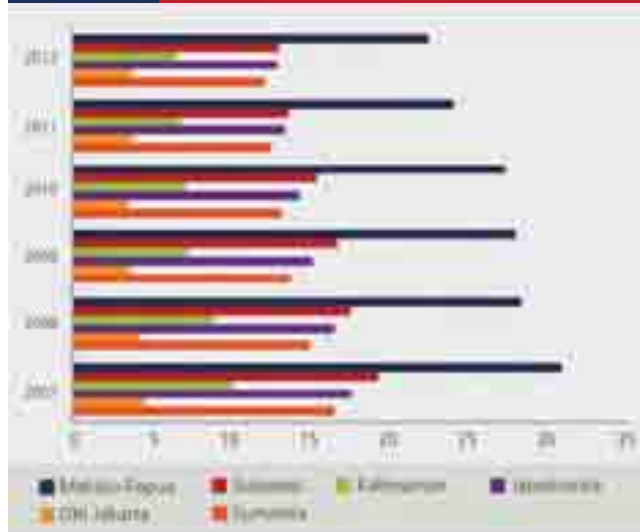
Grafik 3.34 Tingkat Kemiskinan



membalik, laju perbaikan kedua indeks tersebut semakin berkurang terutama sejak krisis tahun 2007/2008. Sementara itu, kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dengan bukan miskin terindikasi memburuk tercermin pada meningkatnya rasio gini dari 0,38 pada 2010 menjadi 0,41 pada tahun 2011.

Secara spasial, kesenjangan angka kemiskinan antar daerah menunjukkan adanya perbaikan walaupun masih terdapat perbedaan yang relatif cukup besar

Grafik 3.35 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kawasan



antara daerah Maluku dan Papua dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua sebesar 24,1% relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah Kalimantan 6,5%. Berkurangnya angka pengangguran sejalan dengan menurunnya persentase penduduk miskin pada 2012. Adapun penurunan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Sedangkan penurunan penduduk miskin di kawasan Jakarta tidak terlalu signifikan pada 2012 seperti halnya di periode sebelumnya (Grafik 3.35).

Tabel 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persen

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2000	1,89	4,68	3,51
2001	1,75	4,68	3,42
2002	2,59	3,34	3,01
2003	2,55	3,53	3,13
2004	2,18	3,43	2,89
2005	2,05	3,34	2,78
2006	2,61	4,22	3,43
2007	2,15	3,78	2,99
2008	2,07	3,42	2,77
2009	1,91	3,05	2,50
2010	1,57	2,80	2,21
Mar 2011	1,52	2,63	2,08
Sep 2011	1,48	2,61	2,05
Mar 2012	1,40	2,36	1,88
Sep 2012	1,38	2,42	1,90

Data : BPS, 2000-2010; (Maret)

Tabel 3.8 Indeks Keparahan Kemiskinan

Persen

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2000	0,51	1,39	1,02
2001	0,45	1,36	0,97
2002	0,71	0,85	0,79
2003	0,74	0,93	0,85
2004	0,58	0,90	0,78
2005	0,60	0,89	0,76
2006	0,77	1,22	1,00
2007	0,57	1,09	0,84
2008	0,56	0,95	0,76
2009	0,52	0,82	0,68
2010	0,40	0,75	0,58
Mar 2011	0,39	0,70	0,55
Sep 2011	0,39	0,68	0,53
Mar 2012	0,36	0,59	0,47
Sep 2012	0,36	0,61	0,48

Data : BPS, 2000-2010; (Maret)

Indonesia sejak tahun 2004 sudah bukan lagi termasuk dalam kategori negara miskin (*low income country*). Meskipun sempat tertunda karena krisis Asia (1997/1998), Indonesia secara resmi telah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah (*middle income country*) berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income country*) dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB, Atlas Method – Bank Dunia) di atas 1.025 dolar AS per orang per tahun. Per akhir 2011, PNB per orang per tahun di Indonesia sudah mencapai 2.940 dolar AS. Tingkat pendapatan tersebut terus mendekati batas atas dari kriteria *lower middle income group*. Hal itu berarti pula bahwa dalam beberapa tahun ke depan jika pertumbuhan PNB per orang per tahun Indonesia dapat terus melaju dengan cukup tinggi maka Indonesia dapat masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah-atas (*upper middle income country*), dengan pendapatan per kapita antara 4.036 dolar AS – 12.475 dolar AS per orang per tahun. Seiring dengan keluarnya Indonesia dari kategori negara miskin, telah terjadi pula pergeseran struktural yang cukup mendasar dalam stratifikasi pendapatan penduduk di Indonesia. Jumlah orang miskin atau hampir miskin semakin menurun dan secara perlahan digantikan oleh sebuah kelompok baru yang proporsinya semakin meningkat terhadap total penduduk, yaitu kelompok yang dapat didefinisikan sebagai kelas menengah.

Secara umum, kelompok penduduk kelas menengah dapat didefinisikan sebagai kelompok penduduk dengan tingkat pengeluaran konsumsi antara 2 dolar AS sampai dengan 20 dolar AS per orang per hari¹. Dalam ulasan-ulasan terkait kelas menengah, penduduk dalam kategori ini dapat dipecah lagi

lebih lanjut menjadi (i) kelompok penduduk kelas menengah bawah/baru keluar dari kemiskinan, yaitu kelompok penduduk dengan tingkat pengeluaran konsumsi antara 2 dolar AS – 4 dolar AS per orang per hari, (ii) kelas menengah – menengah, yaitu kelompok penduduk dengan pengeluaran konsumsi antara 4 dolar AS – 10 dolar AS per orang per hari, dan (iii) kelas menengah-atas yaitu kelompok penduduk dengan pengeluaran konsumsi antara 10 dolar AS – 20 dolar AS per orang per hari. Kelompok yang tingkat pengeluaran konsumsinya di bawah dari kelompok kelas menengah ini adalah kelompok penduduk yang dikategorikan sebagai kelompok penduduk miskin dan hampir miskin, yaitu kelompok miskin hidup dengan pengeluaran konsumsi di bawah 1,25 dolar AS per orang per hari (garis kemiskinan) dan kelompok hampir miskin yang hidup dengan pengeluaran konsumsi antara 1,25 dolar AS – 2 dolar AS per orang per hari.

Pada pengujung 1980an, terdapat setidaknya 9 dari 10 orang Indonesia yang masuk dalam kategori miskin atau hampir miskin berdasarkan kategorisasi di atas. Porsi kelompok ini terus mengecil dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk yang miskin atau hampir miskin tersebut secara bertahap semakin berkurang dan lambat laun telah digantikan oleh kelompok penduduk yang dapat dikategorikan sebagai kelas menengah. Porsi penduduk dalam kategori kelas menengah cenderung meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Per akhir tahun 2010, tercatat sekitar 5 dari 10 penduduk Indonesia berada dalam kategori kelas menengah (Grafik 1). Selanjutnya, jika dilihat secara sub-kategorinya, porsi penduduk dalam kelompok kelas menengah yang dominan sampai dengan akhir 2010 adalah yang termasuk dalam kategori kelas menengah bawah atau kelompok penduduk yang baru saja keluar dari kemiskinan, disusul oleh kelompok kelas menengah-menengah dan kelompok kelas menengah atas. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang juga baru keluar dari kategori negara miskin dan masuk menjadi negara berpenghasilan

1 Dinyatakan dalam 2005 dolar PPP, lihat misalnya pengklasifikasian yang digunakan dalam Asian Development Bank (2010): Key Indicators for Asia and the Pacific, Special Chapter on "The Rise of Asia's Middle Class", ADB, Manila.

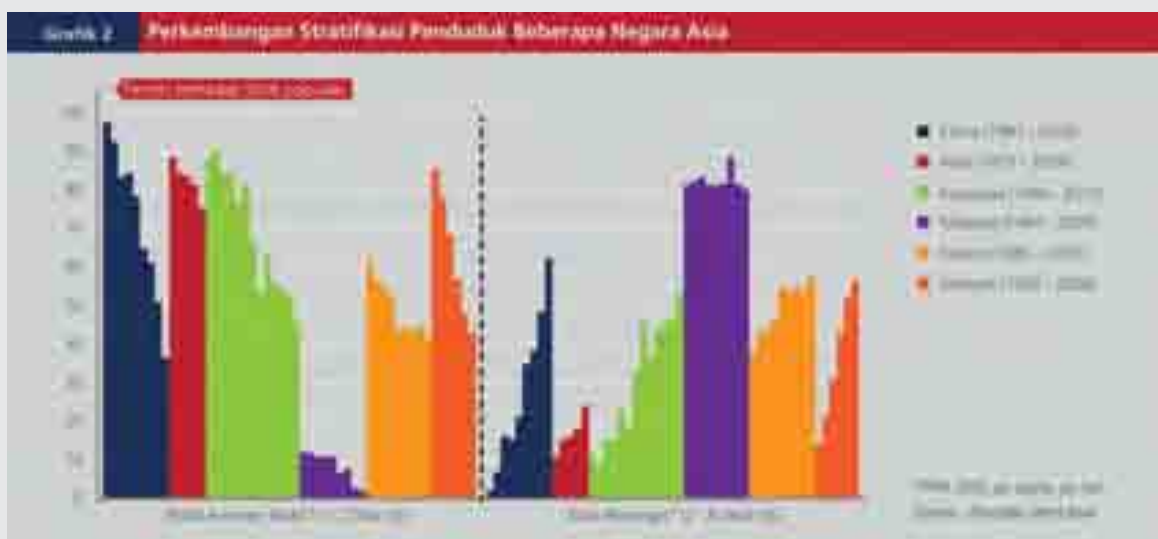


menengah-bawah. Perbandingan terhadap negara-negara berkembang lainnya di Asia menunjukkan bahwa ekspansi kelas menengah ini juga sedang terjadi di banyak negara berkembang Asia (Grafik 2).

Sebagaimana juga yang terjadi di negara lain, konsumen kelas menengah Indonesia adalah tipe konsumen yang mau dan mampu "membayar lebih" untuk mendapatkan produk yang lebih bervariasi, berkualitas, dan bernilai tambah tinggi. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya permintaan atas barang-barang konsumsi oleh

penduduk dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin berkurangnya proporsi konsumsi barang-barang *non-durables* hasil pertanian dalam komposisi konsumsi penduduk. Sementara itu, proporsi permintaan untuk makanan olahan, perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang-barang tahan lama, aneka barang dan jasa serta barang-barang dengan nilai tambah yang berteknologi tinggi semakin besar (Grafik 3).

Selain itu, meskipun jumlah penduduk kelas menengah secara absolut belum berada jauh di atas jumlah penduduk kelompok miskin dan hampir miskin; dan mayoritasnya masih kelas menengah bawah; namun ukuran pasar (*market size*) konsumsi yang tercipta dari kelompok kelas menengah sudah lebih besar dari ukuran pasar konsumsi kelompok miskin dan hampir miskin, dan proporsinya terus meningkat dari waktu ke waktu (Grafik 4). Pada akhir tahun 2010, ukuran pasar yang dibentuk oleh konsumen kelas menengah secara total hampir 3,5 kali lipat ukuran pasar konsumen kelompok miskin dan hampir miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa selain menyebabkan permintaan terhadap barang konsumsi dan jasa yang semakin beragam, munculnya kelompok penduduk kelas menengah telah menyebabkan pula membesarnya ukuran pasar konsumsi domestik dengan segmen pasar yang juga bervariasi.





Tidaklah mengherankan jika kemudian aktivitas investasi di Indonesia dalam setidaknya 7-8 tahun terakhir terlihat sangat kuat. Hal tersebut diindikasikan dari terus meningkatnya rasio investasi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas investasi asing juga mulai terus menunjukkan peningkatan. Keseluruhan peningkatan aktivitas investasi ini akan sangat baik bagi kesinambungan ekspansi kelas menengah. Aktivitas investasi akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan selanjutnya akan lebih memperbesar lagi jumlah dan pasar kelas menengah di Indonesia, *ad infinitum*. Lebih jauh, dengan ekspansi kelas menengah dan aktivitas investasi yang mengikutinya, dapat diharapkan pula bahwa lambat laun akan terjadi perubahan pada karakteristik sektor industri di Indonesia. Pasar domestik dengan kelas menengah yang besar akan menjadi pasar yang menarik bagi kegiatan investasi untuk memproduksi barang-barang dengan nilai tambah tinggi. Kondisi tersebut akan mendorong aktivitas investasi di sektor industri berkembang ke arah yang semakin padat penyerapan modal manusia dan padat teknologi. Oleh karenanya, ekspansi kelas menengah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga keberlangsungannya. Hal ini dalam banyak hal sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan-kebijakan terkait pembangunan manusia sebagai modal dasar pembangunan, seperti kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, riset dan teknologi.



Bab 4

Neraca Pembayaran Indonesia





Neraca Pembayaran Indonesia



*S*isi eksternal perekonomian Indonesia pada tahun 2012 mengalami tekanan yang cukup berat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan tersebut bersumber dari menurunnya perekonomian global di tengah masih kuatnya permintaan domestik. Transaksi berjalan berbalik arah menjadi defisit (-2,7% terhadap PDB) terutama akibat menurunnya kinerja neraca perdagangan. Berdasarkan komponennya, penurunan kinerja neraca perdagangan disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas yang cukup tajam dan membesarnya defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan NPI tetap surplus. Berdasarkan komponennya, surplus TMF didukung oleh kenaikan arus masuk investasi portofolio asing dan tetap solidnya arus masuk PMA. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.1 Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia

Interaksi antara pelemahan perekonomian global dan kuatnya permintaan domestik berdampak terhadap penurunan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2012. Surplus NPI menurun menjadi sebesar 0,2 miliar dolar AS, jauh lebih kecil daripada surplus sebesar 11,9 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Berkurangnya surplus NPI tersebut disebabkan oleh penurunan kinerja transaksi berjalan yang berbalik menjadi defisit sebesar 24,2 miliar dolar AS, meski pada saat yang bersamaan transaksi modal dan finansial mencatat kenaikan surplus yang cukup signifikan menjadi sebesar 24,9 miliar dolar AS.

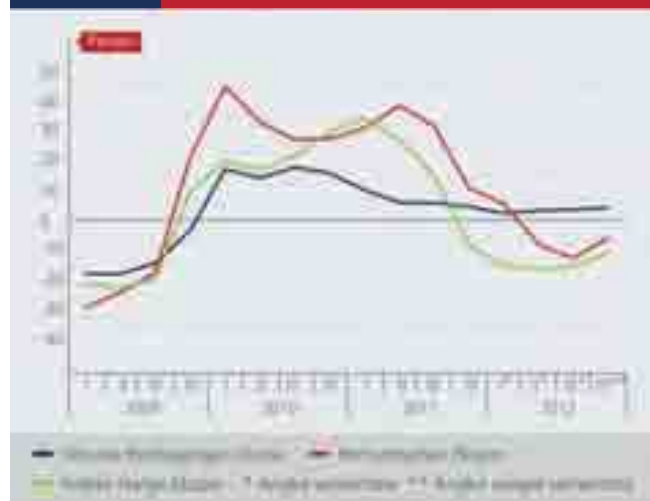
Defisit NPI yang telah berlangsung sejak paruh kedua tahun 2011 terus berlanjut pada triwulan I dan II 2012 karena kinerja neraca perdagangan barang yang terus melemah dan masih terbatasnya arus masuk modal. Memasuki triwulan III dan IV 2012, kinerja NPI mengalami perbaikan yang utamanya bersumber dari peningkatan surplus transaksi modal dan finansial di tengah kinerja neraca perdagangan yang masih mengalami tekanan akibat menyusutnya surplus neraca perdagangan barang.

Neraca perdagangan barang pada tahun 2012 mencatat surplus yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011. Di satu sisi, melemahnya permintaan dunia yang disertai dengan penurunan tajam harga komoditas menyebabkan ekspor nonmigas Indonesia, yang didominasi produk primer, melambat bahkan tumbuh negatif sejak triwulan II 2012 (Grafik 4.1). Di sisi lain, impor nonmigas, khususnya bahan baku dan barang modal, masih tumbuh positif sejalan dengan permintaan domestik yang tetap kuat. Sementara itu, sektor migas juga memberikan kontribusi negatif karena defisit neraca perdagangan minyak melebar dan surplus neraca perdagangan gas mengecil.

Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi oleh ketidakpastian, keyakinan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia masih cukup tinggi, sebagaimana terlihat dari transaksi modal dan finansial yang mengalami kenaikan surplus cukup signifikan. Surplus transaksi modal dan finansial naik menjadi 24,9 miliar dolar AS dari 13,6 miliar dolar AS pada tahun 2011. Kenaikan tersebut terutama dalam bentuk masuknya aliran modal asing baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (Tabel 4.1).

Sejalan dengan kinerja NPI 2012 yang masih mencatat surplus tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi 112,8 miliar dolar AS atau setara dengan 6,1 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah. Namun, defisit yang terjadi pada transaksi berjalan berdampak terhadap beberapa indikator kerentanan eksternal lainnya yang bergerak memburuk, seperti tercermin pada rasio transaksi berjalan terhadap PDB yang mengalami penurunan, dan rasio pembayaran ULN terhadap penerimaan transaksi berjalan yang meningkat.

Grafik 4.1 Volume Perdagangan Dunia, Ekspor, dan Harga Ekspor



Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia

juta dolar AS

Rincian	2008	2009	2010	2011	2012				Total**
					I*	II*	III*	IV**	
I. Transaksi Berjalan	126	10.628	5.144	1.685	-3.105	-7.979	-5.336	-7.763	-24.183
A. Barang, neto ¹⁾	22.916	30.932	30.627	34.783	3.810	818	3.198	591	8.417
- Ekspor	139.606	119.646	158.074	200.788	48.353	47.538	45.549	46.706	188.146
- Impor	-116.690	-88.714	-127.447	-166.005	-44.543	-46.720	-42.351	-46.115	-179.729
1. Nonmigas	15.130	25.560	27.395	35.433	4.694	1.974	3.968	2.899	13.535
a. Ekspor	107.885	99.030	129.416	162.721	38.572	38.433	37.418	38.151	152.575
b. Impor	-92.755	-73.470	-102.021	-127.288	-33.878	-36.460	-33.450	-35.252	-139.040
2. Minyak	-8.362	-4.016	-8.653	-17.526	-5.278	-5.331	-4.213	-5.493	-20.315
a. Ekspor	15.387	10.790	15.691	19.576	4.592	4.332	4.222	4.744	17.891
b. Impor	-23.749	-14.806	-24.344	-37.102	-9.870	-9.664	-8.435	-10.237	-38.206
3. Gas	16.147	9.388	11.886	16.876	4.394	4.176	3.443	3.185	15.197
a. Ekspor	16.333	9.826	12.968	18.491	5.189	4.772	3.909	3.810	17.680
b. Impor	-186	-438	-1.082	-1.615	-795	-597	-466	-625	-2.483
B. Jasa- jasa, neto	-12.998	-9.741	-9.324	-10.632	-2.075	-2.893	-2.480	-3.322	-10.770
C. Pendapatan, neto	-15.155	-15.140	-20.790	-26.676	-5.898	-6.801	-6.915	-6.225	-25.839
D. Transfer berjalan, neto	5.364	4.578	4.630	4.211	1.058	898	861	1.193	4.009
II. Transaksi Modal & Finansial	-1.832	4.852	26.620	13.567	2.256	5.225	6.015	11.415	24.911
A. Transaksi Modal	294	96	50	33	5	3	8	22	37
B. Transaksi Finansial ²⁾	-2.126	4.756	26.571	13.534	2.250	5.222	6.007	11.393	24.873
- Aset	-17.949	-14.395	-6.901	-15.657	-6.752	-2.550	-2.224	-4.237	-15.763
- Kewajiban	15.823	19.151	33.471	29.191	9.002	7.772	8.231	15.631	40.637
1. Investasi Langsung	3.419	2.628	11.106	11.528	1.586	4.020	4.289	4.535	14.430
a. Ke luar negeri	-5.900	-2.249	-2.664	-7.713	-2.932	452	-1.674	-1.268	-5.423
b. Di Indonesia (PMA)	9.318	4.877	13.771	19.241	4.518	3.568	5.964	5.803	19.853
2. Investasi Portofolio	1.764	10.336	13.202	3.806	2.628	3.872	2.516	180	9.196
a. Aset	-1.294	-144	-2.511	-1.189	-457	-186	31	-4.852	-5.465
b. Kewajiban	3.059	10.480	15.713	4.996	3.085	4.058	2.485	5.032	14.661
3. Investasi Lainnya	-7.309	-8.208	2.262	-1.801	-1.963	-2.670	-798	6.679	1.248
a. Aset	-10.755	-12.002	-1.725	-6.755	-3.363	-2.816	-580	1.883	-4.876
b. Kewajiban	3.446	3.794	3.987	4.954	1.400	146	-218	4.795	6.123
III. Total (I+II)	-1.706	15.481	31.765	15.252	-850	-2.754	679	3.652	728
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-238	-2.975	-1.480	-3.395	-184	-57	155	-476	-563
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	-1.945	12.506	30.285	11.857	-1.034	-2.811	834	3.176	165
VI. Cadangan Devisa dan Yang Terkait ³⁾	1.945	-12.506	-30.285	-11.857	1.034	2.811	-834	-3.176	-165
Memorandum:									
- Posisi Cadangan Devisa	51.640	66.105	96.207	110.123	110.493	106.502	110.172	112.781	112.781
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	4,0	6,6	7,2	6,5	6,2	5,8	6,0	6,1	6,1
Rasio transaksi berjalan terhadap PDB (%)	0,0	2,0	0,7	0,2	-1,4	-3,6	-2,4	-3,6	-2,7

1) Dalam free on board (fob)

2) Tidak termasuk cadangan devisa yang terkait

3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

*) Angka sementara

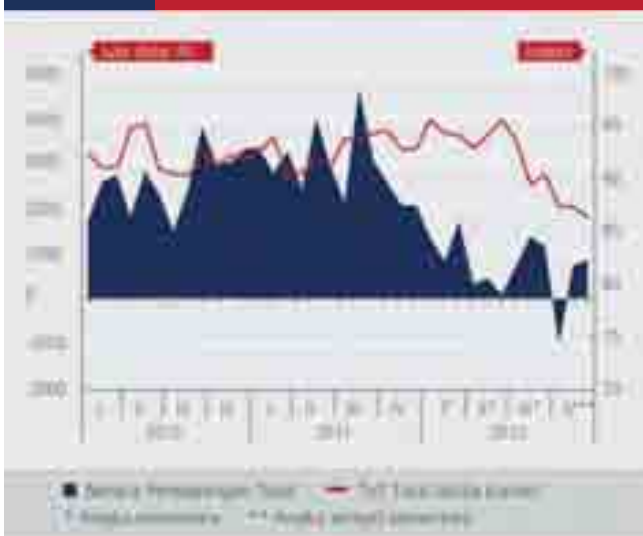
**) Angka sangat sementara

4.2 Transaksi Berjalan

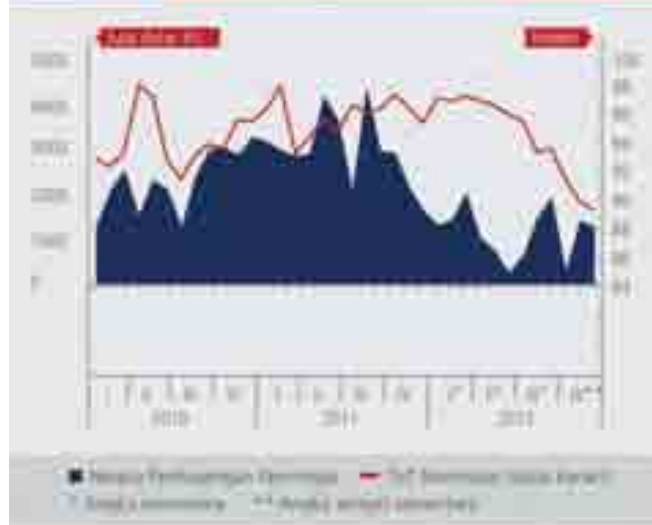
Transaksi berjalan pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar 24,2 miliar dolar AS (-2,7% terhadap PDB), berkebalikan dari surplus sebesar 1,7 miliar dolar AS (0,2% terhadap PDB) pada tahun sebelumnya. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2012 terjadi karena berkurangnya surplus neraca perdagangan barang yang disertai dengan defisit neraca jasa dan pendapatan yang persisten.

Secara triwulanan, memasuki tahun 2012 defisit transaksi berjalan terus melebar dan mencapai puncaknya pada triwulan II 2012, seiring surplus neraca perdagangan barang yang menyusut tajam terutama akibat ekspor nonmigas yang mulai tumbuh negatif di saat impor nonmigas masih tumbuh positif. Penyusutan surplus neraca perdagangan tersebut, selain akibat permintaan dunia yang melemah, juga akibat harga ekspor yang turun lebih tajam daripada penurunan harga impor. Hal tersebut terefleksikan pada *terms of trade* (rasio harga ekspor terhadap harga impor) Indonesia yang menunjukkan penurunan sejak triwulan II 2012 (Grafik 4.2 dan Grafik 4.3). Kinerja neraca perdagangan nonmigas membaik pada triwulan III 2012 karena impor yang turun lebih tajam dibandingkan dengan penurunan ekspor. Memasuki triwulan akhir 2012, kinerja

Grafik 4.2 *Terms of Trade Total (ToT)*



Grafik 4.3 *Terms of Trade Nonmigas*



ekspor nonmigas membaik seiring sinyal penguatan ekonomi negara mitra dagang dan melambatnya laju penurunan harga komoditas, serta tidak terlepas pula dari sejumlah langkah yang ditempuh Bank Indonesia. Namun demikian, laju perbaikan kinerja transaksi berjalan tertahan oleh impor nonmigas yang meningkat signifikan seiring permintaan domestik yang masih tetap kuat, dan melebarnya defisit neraca perdagangan migas akibat membengkaknya impor minyak seiring laju konsumsi BBM yang lebih tinggi dan kebutuhan gas domestik yang meningkat.

Ekspor

Nilai ekspor barang secara keseluruhan pada tahun 2012 tercatat sebesar 188,1 miliar dolar AS (fob) atau turun 6,3% dari tahun sebelumnya, terutama karena menurunnya ekspor produk manufaktur dan produk pertambangan akibat permintaan dunia yang melemah dan harga ekspor yang turun (Tabel 4.2 dan Grafik 4.4). Pada ekspor nonmigas, penurunan kinerja ekspor produk manufaktur dan produk pertambangan terjadi mulai pertengahan tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2012 (Grafik 4.5 dan Grafik 4.6). Beberapa komoditas utama manufaktur seperti karet olahan, produk logam dasar, bahan kimia serta tekstil dan produk tekstil mengalami penurunan ekspor. Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura dan India yang merupakan 5 pasar

Tabel 4.2. Perkembangan Ekspor

Rincian	Nilai (juta dollar AS)		Pangsa (%)		Pertumbuhan (%)	
	2011	2012**	2011	2012**	2011	2012**
Pertanian	5.146	5.584	2,6	3,0	3,1	8,5
Manufaktur ¹⁾	126.653	118.114	63,1	62,8	24,5	-6,7
Pertambangan ¹⁾	66.652	61.626	33,2	32,8	34,0	-7,5
Lainnya ¹⁾	2.337	2.822	1,2	1,5	45,1	20,8
Total Ekspor	200.788	188.146	100,0	100,0	27,0	-6,3
- Nonmigas	162.721	152.575	81,0	81,1	25,7	-6,2
- Minyak	19.576	17.891	9,7	9,5	24,8	-8,6
- Gas	18.491	17.680	9,2	9,4	42,6	-4,4

¹⁾ Termasuk Migas

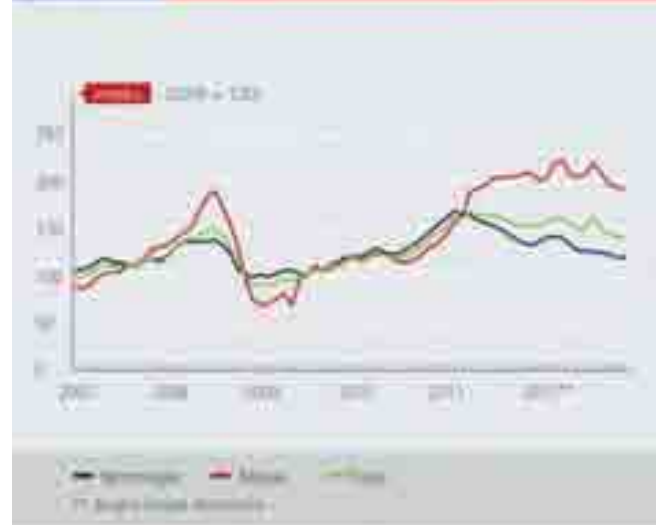
** Angka sangat sementara

terbesar produk manufaktur Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor produk manufaktur, meski secara volume masih tumbuh positif (kecuali Jepang). Untuk kelompok pertambangan, penurunan ekspor terutama terjadi pada komoditas batubara, biji tembaga, bauksit, dan granit. Nilai ekspor batubara, yang merupakan komoditas ekspor utama, dengan pangsa sebesar 17,2%, turun dibandingkan periode tahun lalu akibat merosotnya harga batubara di pasar internasional, meskipun secara volume masih mengalami peningkatan. Ekspor batubara terutama ditujukan ke negara Asia, yaitu China, India, Jepang, dan Korea Selatan, dengan total pangsa mencapai 70% dari total ekspor batubara. Sementara itu, ekspor komoditas pertanian masih mencatat pertumbuhan yang positif dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, terutama disumbang oleh komoditas kopi, udang, ikan, dan rempah-rempah.

Nilai ekspor minyak di tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar 8,6% menjadi 17,9 miliar dolar AS. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak mentah sebesar 10,2% menjadi 12,7 miliar dolar AS dan menurunnya ekspor produk kilang sebesar 4,5% menjadi 5,2 miliar dolar AS (Tabel 4.3). Penurunan ekspor minyak mentah dan produk kilang lebih disebabkan oleh penurunan volume ekspor sedangkan harga masih tercatat meningkat.

Ekspor minyak yang menurun pada tahun 2012 terkait pula dengan produksi minyak yang menurun

Grafik 4.4 Perkembangan Indeks Harga Ekspor



Grafik 4.5 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas



Tabel 4.3. Perkembangan Ekspor Minyak

Rincian	2009	2010	2011	2012**
Minyak Mentah				
Nilai (juta dolar AS)	8.008	11.219	14.167	12.723
Volume (juta barel)	133	144	130	115
Harga ¹ (dolar AS per barel)	60	78	109	111
Produk Kilang				
Nilai (juta dolar AS)	2.782	4.472	5.409	5.168
Volume (juta barel)	38	58	53	47
Harga ¹ (dolar AS per barel)	60	77	104	111

Sumber: SKK Migas dan PT. Pertamina (diolah)

¹ Nilai/ Volume

** Angka sangat sementara

4,7% dari semula 902 ribu barel per hari pada tahun 2011 menjadi 860 ribu barel per hari. Realisasi produksi minyak tersebut jauh di bawah target yang telah ditetapkan APBN-P 2012 sebesar 930 ribu barel per hari. Selain karena *natural declining*, penurunan produksi minyak tersebut disebabkan pula oleh berbagai kendala teknis dan operasional lapangan yang terjadi selama tahun 2012, seperti kebocoran pipa, kebakaran penampungan minyak, dan adanya *unplanned shutdown* di beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas.

Sebagaimana ekspor minyak, nilai ekspor gas pada tahun 2012 juga mengalami penurunan. Ekspor gas

tercatat turun 4,4% menjadi 17,7 miliar dolar AS, yang berasal dari penurunan ekspor LNG dan LPG (Tabel 4.4). Penurunan ekspor LNG terutama disebabkan berkurangnya produksi gas akibat gangguan *reservoir gas* dan adanya *shutdown* di beberapa lokasi kilang gas. Selain itu, berkurangnya ekspor LNG juga disebabkan oleh meningkatnya pasokan LNG untuk kebutuhan domestik. Sementara itu, ekspor gas alam pada tahun 2012 tercatat mengalami peningkatan sebesar 9,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan tumbuhnya volume ekspor gas alam dan naiknya harga gas.

Berdasarkan negara tujuan, kinerja ekspor menunjukkan penurunan di semua kawasan.



Tabel 4.4. Perkembangan Ekspor Gas

Rincian	2009	2010	2011	2012**
LNG				
Nilai (juta dolar AS)	7.189	9.432	12.962	11.944
Volume (juta MMBTU)	1.030	1.211	1.098	949
Harga (dolar AS/ juta MMBTU)	7	8	12	12
LPG				
Nilai (juta dolar AS)	48	0	74	9
Volume (ribu metric ton)	88	0	81	8
Harga (dolar AS/ metric ton)	545	0	852	1,113
Natural Gas				
Nilai (juta dolar AS)	2.589	3.535	5.235	5.727
Volume (juta MMBTU)	309	358	372	379
Harga (dolar AS/ juta MMBTU)	8	10	14	15

Sumber: SKK Migas

** Angka sangat sementara

Penurunan cukup tinggi terjadi di kawasan Uni Eropa (pangsa ekspor 9,5%), terutama Italia, Spanyol, Perancis, dan Belanda, akibat belum pulihnya perekonomian negara-negara kawasan tersebut. Begitu pula dengan kinerja ekspor ke AS yang masih menunjukkan penurunan sejak awal tahun 2011. Sementara itu, *intra-regional trade* kawasan Asia yang semula dapat menjadi bantalan bagi kinerja ekspor Indonesia, pada tahun 2012 ini turut memberikan tekanan yang cukup besar mengingat pangsa ekspor ke negara kawasan yang cukup tinggi, seperti Jepang,

China, Singapura, dan India (Grafik 4.7 dan Grafik 4.8). Namun, ekspor ke beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand, masih tumbuh positif dengan kecenderungan pangsa ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (Grafik 4.9). Pengalihan negara tujuan ekspor serta diversifikasi komoditas ekspor menjadi hal yang cukup relevan guna mendorong kinerja ekspor lebih baik lagi.



Impor

Impor pada tahun 2012 tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski melambat, namun pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan ekspor yang negatif. Pertumbuhan impor didorong oleh meningkatnya permintaan domestik untuk kebutuhan konsumsi dan investasi. Pada tahun 2012, nilai impor (cif) secara keseluruhan mencapai 190,2 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 8,0% dari tahun sebelumnya, terutama terjadi pada impor kelompok barang modal (Tabel 4.5).

Dari sisi impor nonmigas, impor kelompok barang modal tumbuh cukup tinggi dan diikuti impor kelompok bahan baku. Pertumbuhan impor kelompok barang modal terutama terjadi pada kendaraan penumpang, barang modal di luar angkutan, dan kendaraan untuk industri. Ekspansi beberapa maskapai penerbangan nasional dengan menambah jumlah armadanya, selain ikut mendorong pertumbuhan impor barang, juga mendorong pertumbuhan sektor transportasi. Impor barang modal yang tumbuh cukup tinggi dalam jangka menengah diharapkan dapat mendorong kapasitas produksi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, impor kelompok bahan baku, terutama impor suku cadang dan perlengkapan untuk alat

angkutan, serta bahan mentah olahan untuk industri, meningkat sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi nasional. Sementara impor barang konsumsi tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun lalu seiring dengan penurunan impor bahan makanan, baik mentah maupun olahan untuk rumah tangga (Grafik 4.10). Penurunan ini selain mengindikasikan kapasitas produksi bahan makanan dalam negeri yang meningkat, juga terkait dengan kebijakan pemerintah pada awal tahun 2012 yang memperketat impor 65 produk hortikultura masuk ke Indonesia.

Impor minyak dan gas pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Tabel 4.5 Perkembangan Impor (c.i.f)

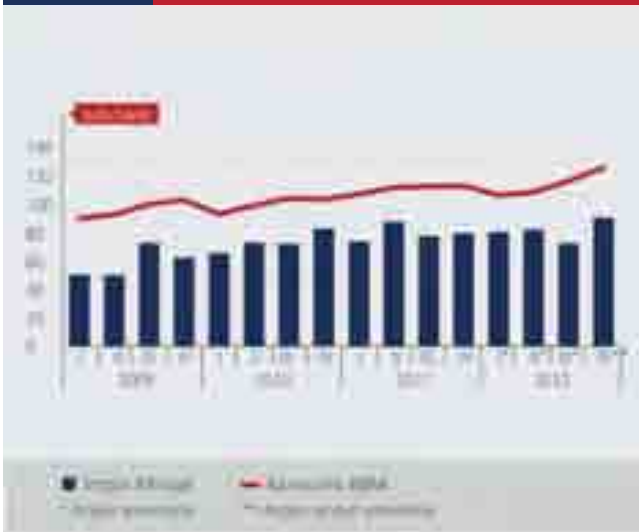
Rincian ¹⁾	Nilai (juta dolar AS)		Pangsa (%)		Pertumbuhan (%)	
	2011	2012**	2011	2012**	2011	2012**
Barang Konsumsi ²⁾	23.258	25.532	13,2	13,4	38,2	9,8
Bahan Baku/Bahan Penolong ²⁾	120.300	127.304	68,3	66,9	30,6	5,8
Barang Modal	31.723	36.067	18,0	19,0	27,0	13,7
Lainnya ²⁾	920	1.323	0,5	0,7	-35,1	43,8
Total Impor	176.201	190.225	100,0	100,0	30,2	8,0
Nonmigas	135.257	147.196	76,8	77,4	25,2	8,8
Migas	40.943	43.030	23,2	22,6	50,0	5,1

1) Berdasarkan kategori ekonomi

2) Termasuk migas

** Angka sangat sementara

Grafik 4.11 Impor Minyak dan Konsumsi BBM



(Grafik 4.11). Kenaikan impor minyak terjadi pada minyak mentah (0,7%) dan produk hasil kilang (3,8%). Meningkatnya impor minyak didorong oleh laju konsumsi BBM yang terus meningkat pada tahun laporan. Peningkatan konsumsi BBM terutama terjadi pada BBM bersubsidi yang digunakan untuk transportasi. (Grafik 4.12)

Neraca Jasa, Pendapatan, dan Transfer Berjalan

Pada tahun 2012 transaksi jasa, tercatat mengalami defisit 10,8 miliar dolar AS, sedikit meningkat

dibandingkan dengan defisit 10,6 miliar dolar AS pada tahun 2011. Defisit tersebut terutama bersumber dari defisit jasa transportasi seiring dengan naiknya impor barang (Grafik 4.13). Defisit jasa transportasi mencapai 9,1 miliar dolar AS sepanjang tahun 2012 terutama akibat tingginya kegiatan pengangkutan impor barang. Sementara itu, jasa perjalanan mencatatkan surplus yang menurun pada tahun 2012 seiring dengan jumlah keberangkatan wisatawan nasional yang naik lebih tinggi dibandingkan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan nasional ke mancanegara meningkat 9,5% sedangkan kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya naik 4,7%. Namun demikian, selama tahun 2012, wisatawan mancanegara (termasuk penumpang transit) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 8,1 juta orang. Pencapaian tersebut sedikit di atas target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 8 juta orang di tahun 2012.

Pada neraca pendapatan, defisit yang terjadi pada tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun 3,1% menjadi 25,8 miliar dolar AS. Penurunan defisit bersumber dari penurunan laba perusahaan PMA di Indonesia dan imbal hasil dari investasi portofolio. Kinerja ekspor

Grafik 4.12 Konsumsi BBM per Sektor Pengguna



Grafik 4.13 Perkembangan Neraca Jasa



yang lebih rendah dari tahun sebelumnya ditengarai ikut memberikan dampak terhadap turunnya perolehan laba perusahaan PMA yang berorientasi ekspor. (Lihat Boks 4.1)

Surplus neraca transfer berjalan turun 4,8% menjadi 4,0 miliar dolar AS pada tahun 2012, terutama karena meningkatnya pertumbuhan pembayaran remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang melampaui peningkatan penerimaan remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pembayaran remitansi TKA naik 14,9% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 2,4 miliar dolar AS karena meningkatnya jumlah TKA di Indonesia terutama pada jabatan-jabatan yang berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, penerimaan remitansi TKI hanya meningkat sebesar 3,9% menjadi 7,0 miliar dolar AS, jauh di bawah laju kenaikan remitansi TKA. Melambatnya penerimaan remitansi TKI dipengaruhi oleh dampak penerapan kebijakan moratorium oleh Pemerintah khususnya ke negara-negara Timur Tengah dan Malaysia. Namun demikian, dampak kebijakan moratorium tersebut sebagian dapat diimbangi dengan struktur gaji yang lebih baik di negara penempatan TKI lainnya dan meningkatnya komposisi TKI formal yang memiliki gaji lebih baik daripada TKI informal.

4.3 Transaksi Modal dan Finansial

Transaksi modal dan finansial pada tahun 2012 mencatatkan kenaikan surplus sebesar 83,6%, yaitu dari 13,6 miliar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 24,9 miliar dolar AS pada tahun laporan. Lonjakan surplus terutama bersumber dari peningkatan surplus investasi portofolio dan investasi langsung serta berkurangnya defisit investasi lainnya. Surplus transaksi modal dan finansial yang lebih besar tersebut tetap disertai dengan struktur yang berkesinambungan, tercermin dari aliran masuk investasi langsung yang lebih dominan dibandingkan dengan investasi portofolio. Secara umum,

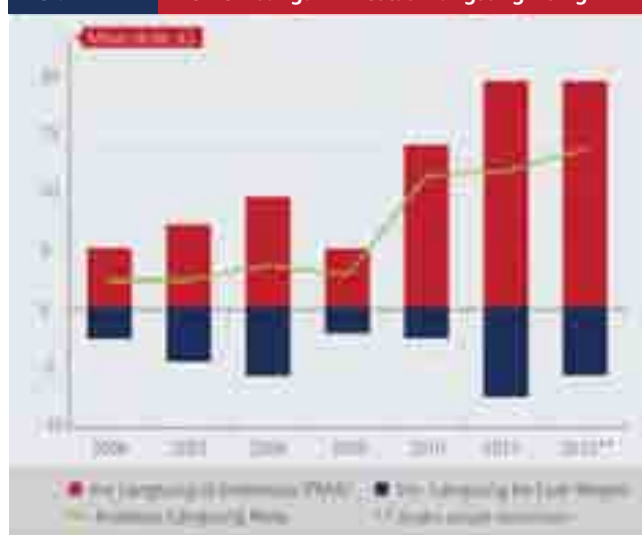
perkembangan ini mencerminkan tetap tingginya kepercayaan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Investasi Langsung

Arus investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia meningkat selama tahun 2012 didukung oleh tingginya kegiatan investasi di dalam negeri yang ditopang oleh stabilitas ekonomi makro yang cukup terjaga dan iklim investasi yang kondusif. Arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia masih cukup kuat dengan catatan surplus sebesar 19,9 miliar dolar AS pada tahun laporan, naik 3,2% dari capaian tahun lalu (Grafik 4.14). Peningkatan aliran masuk investasi langsung asing tersebut terutama disumbang oleh peningkatan aliran modal ekuitas, termasuk di dalamnya bagian laba yang ditanamkan kembali (*reinvested earnings*).

Sementara itu, aliran investasi langsung Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan, menjadi 5,4 miliar dolar AS atau turun 29,7% dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,7 miliar dolar AS. Penurunan tersebut terutama terkait dengan meningkatnya kewajiban (*intercompany*

Grafik 4.14 Perkembangan Investasi Langsung Asing



loans) induk perusahaan di Indonesia kepada anak perusahaannya di luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, investasi langsung neto pada periode laporan mencatat kenaikan surplus 25,2% menjadi 14,4 miliar dolar AS.

Berdasarkan sektor ekonomi, industri manufaktur masih menjadi sektor utama investasi langsung asing di Indonesia. Investasi langsung asing pada sektor manufaktur tercatat sebesar 9,0 miliar dolar AS, disusul kemudian sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 3,1 miliar dolar AS dan sektor pertambangan sebesar 2,1 miliar dolar AS. Pangsa ketiga sektor tersebut mencapai 71,3% dari total Investasi langsung asing pada tahun 2012 (Grafik 4.15). Namun apabila dilihat dari pertumbuhannya, investasi sektor pertanian tumbuh paling tinggi (290%), dan diikuti sektor manufaktur (10,1%).

Investor yang berasal dari negara ASEAN, khususnya Singapura, mendominasi investasi langsung asing di Indonesia. Pada tahun 2012, pangsa negara ASEAN mencapai 40,8% dari total Investasi langsung asing di Indonesia (Grafik 4.16). Pangsa investasi Jepang sebesar 39,6% dari total Investasi langsung asing atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Sementara itu, kondisi perekonomian di kawasan Eropa yang masih berkontraksi berdampak terhadap

Grafik 4.15 Investasi Langsung Asing Menurut Sektor Ekonomi



Grafik 4.16 Investasi Langsung Asing Menurut Negara Asal



aliran investasi asal Uni Eropa di Indonesia yang turun drastis pada tahun laporan. Secara umum, Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing mengingat iklim usaha di Indonesia yang membaik¹.

Investasi Portofolio

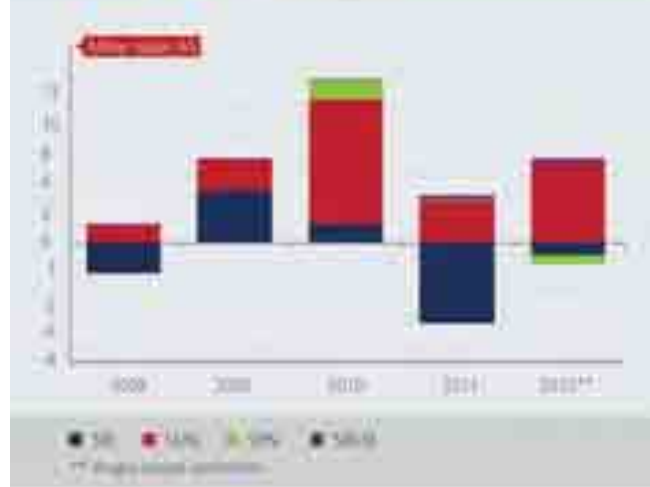
Surplus transaksi investasi portofolio, yang sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2011, kembali meningkat secara signifikan pada tahun laporan. Pada tahun 2012, aliran masuk investasi portofolio asing (sisi kewajiban) meningkat dari 5,0

1 Publikasi World Bank Doing Business 2013 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-128, atau membaik 2 peringkat dibandingkan dengan tahun lalu, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal). Sementara itu, berdasarkan UNCTAD World Investment Report 2012, Indonesia termasuk dalam posisi lima besar negara tujuan Investasi langsung asing yang paling diminati dalam jangka menengah. Sebelumnya, di awal tahun 2012, Economic Freedom Index yang diterbitkan The Wall Street Journal bekerja sama dengan Heritage Foundation, menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 184 negara yang disurvei dengan skor 56,4. Nilai tersebut 0,4 poin lebih baik dari penilaian tahun sebelumnya yang merepresentasikan perbaikan pada separuh dari 10 aspek kebebasan ekonomi yang dipantau, termasuk kebebasan moneter, kendali atas pengeluaran pemerintah, dan kebebasan perdagangan.

Grafik 4.17 Investasi Portofolio Asing Menurut Sektor Penerbit



Grafik 4.18 Transaksi Investasi Portofolio Asing Menurut Jenis Instrumen



miliar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 14,7 miliar dolar AS pada tahun laporan. Pada periode yang sama, investasi portofolio Indonesia di luar negeri (sisi aset) juga meningkat dari 1,2 miliar dolar AS menjadi 5,5 miliar dolar AS. Dengan demikian, secara neto investasi portofolio pada tahun 2012 mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS, meningkat lebih dari dua kali lipat dari surplus pada tahun 2011 yang hanya sebesar 3,8 miliar dolar AS (Grafik 4.17).

Di sektor publik, investasi portofolio asing terutama mengalir pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) rupiah. Selain itu, meningkatnya jumlah penerbitan surat berharga negara dalam valas pada tahun 2012 ikut menambah kuatnya arus masuk modal asing pada investasi portofolio. Peningkatan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga di pasar keuangan. Sementara itu, penerapan kebijakan masa endap minimum 6 bulan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berhasil mengurangi fluktuasi arus keluar masuk investasi portofolio asing dibandingkan dengan tahun 2011.

Sepanjang tahun 2012, akumulasi transaksi SUN oleh asing mencapai 5,4 miliar dolar AS atau naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (Grafik 4.18). Dari sisi kepemilikan asing, hingga akhir Desember

2012 pangsa kepemilikan asing pada SUN sebesar 35% lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2011 dengan pangsa asing tercatat sebesar 31,4%. Sementara itu, pelepasan SBI oleh asing yang terjadi sejak bulan Mei 2011 terus berlanjut di tahun 2012. Aliran keluar neto SBI sepanjang tahun 2012 sebesar 0,8 miliar dolar AS, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya seiring dengan menyusutnya kepemilikan asing pada SBI. Hingga akhir Desember 2012, pangsa kepemilikan SBI oleh investor asing hanya sekitar 0,5%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang masih mencatatkan pangsa kepemilikan asing sebesar 6,5%.

Pada sektor swasta, masih baiknya kinerja ekonomi domestik dan sejumlah sentimen positif baik eksternal maupun internal, berdampak positif terhadap besarnya minat investor asing pada instrumen saham domestik. Meski sempat terjadi penjualan neto oleh pihak asing pada triwulan II 2012 terkait sentimen negatif pelemahan global yang terjadi pada beberapa pasar modal dunia, secara keseluruhan instrumen saham domestik masih mencatatkan pembelian neto. Selama tahun 2012, investasi asing pada instrumen saham domestik mencatat pembelian neto sebesar 1,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan penjualan neto sebesar 0,3 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Selain itu, kemampuan swasta memanfaatkan momentum suku bunga

rendah di pasar keuangan internasional dengan menerbitkan obligasi korporasi dalam valuta asing serta didukung dengan peringkat utang pemerintah (*sovereign credit rating*)² Indonesia yang lebih baik, turut menambah outlet aliran masuk modal asing pada instrumen portofolio sektor swasta. Penerbitan obligasi korporasi yang selalu mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) menjadi cerminan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan investasi yang menarik.

Investasi Lainnya

Transaksi investasi lainnya pada tahun laporan mengalami surplus sebesar 1,2 miliar dolar AS, berbalik dengan tahun 2011 yang tercatat defisit sebesar 1,8 miliar dolar AS. Surplus terutama didorong oleh berkurangnya piutang dagang dan penempatan

2 Selama tahun 2012, terdapat dua lembaga pemeringkat yang menaikkan *sovereign credit rating* Indonesia ke peringkat layak investasi, yaitu Moody's Investor Services pada 18 Januari 2012 (Baa3 *with stable outlook*) dan Rating and Investment Information (R&I) pada 18 Oktober 2012 (BBB- *with stable outlook*). Sementara, tiga lembaga rating lainnya mengafirmasi peringkat sebelumnya, yaitu: S&P pada 23 April 2012 (BB+), Japan Credit Rating Agency pada 13 November 2012 (BBB- *with stable outlook*), dan Fitch Ratings pada 21 November 2012 (BBB- *with stable outlook*).



simpanan sektor swasta Indonesia di luar negeri antara lain karena melemahnya ekspor. Di sisi lain, naiknya kewajiban investasi lainnya sektor swasta dan publik ikut mendorong terjadinya surplus transaksi investasi lainnya.

Selama tahun 2012 kewajiban investasi lainnya sektor publik mengalami surplus 2,5 miliar dolar AS berkebalikan dari defisit pada tahun lalu sebesar 2,3 miliar dolar AS, terutama karena kewajiban lainnya otoritas moneter yang meningkat. Sebaliknya, pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah cenderung meningkat di tengah penarikan pinjaman luar negeri yang sedikit melambat. Di sektor swasta, surplus kewajiban investasi lainnya turun tajam dari 7,2 miliar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 3,7 miliar dolar AS, akibat lebih tingginya pertumbuhan pembayaran pinjaman luar negeri sektor swasta dibandingkan dengan pertumbuhan penarikan pinjaman luar negerinya pada tahun laporan (Grafik 4.19). Pembayaran pinjaman luar negeri sektor swasta tercatat sebesar 31,2 miliar dolar AS atau meningkat 48,6% dari tahun 2011, sedangkan penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta sebesar 33,4 miliar atau naik 27,2% dari tahun lalu.

Sejalan dengan perkembangan transaksi finansial luar negeri (sisi kewajiban) Indonesia selama tahun laporan, baik yang tercatat dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya, posisi utang luar negeri³ (ULN) Indonesia pada tahun 2012 mencapai 251,2 miliar dolar AS, naik 11,5% dibandingkan dengan posisi tahun 2011. ULN sektor pemerintah pada tahun 2012 meningkat 6,3% menjadi 126,1 miliar dolar AS, yang utamanya disumbang dari kenaikan kepemilikan asing atas surat berharga/obligasi global pemerintah, baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Pada periode yang sama, posisi ULN sektor swasta naik 17,2% menjadi 125,1 miliar dolar AS (Grafik 4.20). Dilihat dari pangsaanya,

3 ULN adalah seluruh kewajiban finansial yang tercatat dalam komponen investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya selain ekuitas dan *financial derivatives*.

Grifik 4.20

Posisi ULN Indonesia



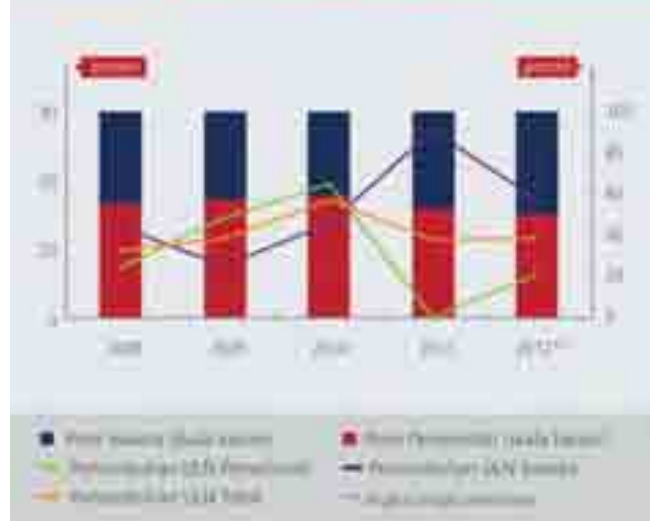
ULN sektor pemerintah cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir dan sebaliknya ULN sektor swasta meningkat. Pada tahun 2012 pangsa ULN sektor pemerintah dan sektor swasta relatif berimbang (Grifik 4.21).

ULN sektor pemerintah pada umumnya berupa pinjaman dari pemerintah negara kreditur (pangsa 51,1%), dengan dominasi Jepang dan AS, disusul kemudian pinjaman dari organisasi internasional (pangsa 18,8%), dan sisanya dari sumber lain. ULN sektor pemerintah tersebut sekitar 55% merupakan pinjaman proyek dan pinjaman program, sisanya merupakan utang lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2011, pinjaman proyek dan pinjaman program mengalami penurunan tingkat serapan belanja modal pada proyek pemerintah yang didanai kedua jenis pinjaman dimaksud.

Pada sektor swasta, ULN yang bersumber dari perusahaan induk dan afiliasi selama tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 17,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa di saat belum seimbangya pemulihan ekonomi global, perusahaan induk masih menaruh kepercayaan kepada anak perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan tingginya permintaan domestik. ULN sektor swasta yang berasal dari

Grifik 4.21

Pertumbuhan dan Pangsa ULN



perusahaan induk dan afiliasi dapat memperkecil magnitude tekanan pembayaran karena relatif lebih fleksibel dan dapat diperpanjang apabila dana masih diperlukan untuk pengembangan usaha. ULN sektor swasta banyak terserap di empat sektor ekonomi, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor listrik, gas dan air bersih dengan pangsa masing-masing sebesar 27%, 21%, 16% dan 13%.

Secara keseluruhan, instrumen ULN didominasi perjanjian kredit (*loan agreement*) dan obligasi global (pangsa 76%), sisanya berupa surat berharga domestik, *currency & deposits* dan utang lainnya (Tabel 4.6). Karakteristik instrumen perjanjian kredit dan obligasi global yang umumnya berjangka waktu panjang, dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan investasi yang dapat memberikan nilai tambah perekonomian dalam jangka menengah panjang. Berdasarkan jangka waktunya, pangsa utang jangka pendek (jangka waktu sisa ≤ 1 tahun) berada pada kisaran 22% dari total ULN, dengan kecenderungan pangsa yang menurun pada ULN sektor swasta. Namun demikian, utang berjangka waktu pendek tersebut perlu menjadi perhatian, terutama terkait dengan ketersediaan valas pada saat jatuh tempo pembayaran.

Tabel 4.6 Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Menurut Instrumen

juta dolar AS

Uraian	2009	2010	2011	2012			
				I	II	III	IV**
Posisi ULN	172.871	202.413	225.375	228.761	238.917	243.649	251.200
ULN Publik (Pemerintah dan BI)	99.265	118.624	118.642	118.383	118.167	120.640	126.119
Perjanjian kredit dan obligasi global	79.974	85.668	88.344	88.486	89.620	90.307	88.566
SSB domestik yang dimiliki NR	16.189	27.881	25.436	24.918	23.766	25.367	28.018
Utang lainnya	3.102	5.075	4.862	4.979	4.780	4.966	9.535
ULN Swasta	73.606	83.789	106.732	110.378	120.750	123.009	125.081
SSB domestik	64.072	68.981	85.195	88.195	95.391	99.430	101.422
SSB domestik yang dimiliki NR	1.958	2.328	2.685	2.761	2.711	2.691	2.691
Kas dan simpanan yang dimiliki NR	2.959	7.158	7.089	6.910	7.251	7.271	8.235
Utang lainnya	4.616	5.322	11.763	12.513	15.397	13.617	12.733
Trade Financing	3.752	4.156	10.407	10.222	13.315	11.788	10.741
Kewajiban lainnya	864	1.166	1.356	2.291	2.082	1.828	1.992

* Terdiri dari alokasi SDR IMF, C&D dan kewajiban lainnya

** Angka sangat sementara

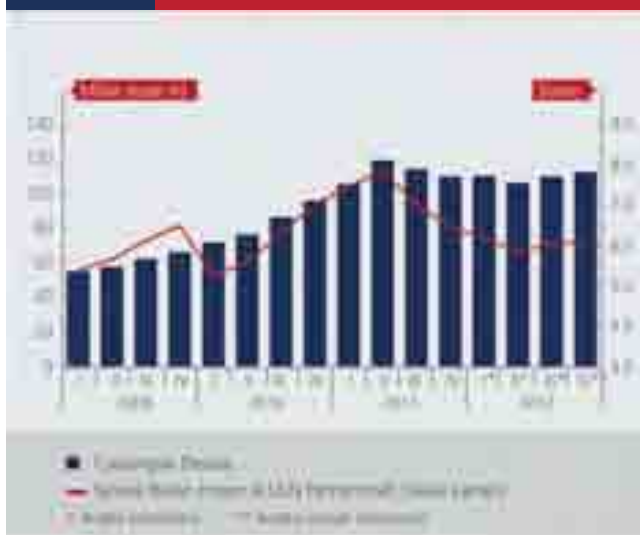
Keterangan : NR (Non Resident)

4.4 Cadangan Devisa dan Indikator Kerentanan Eksternal

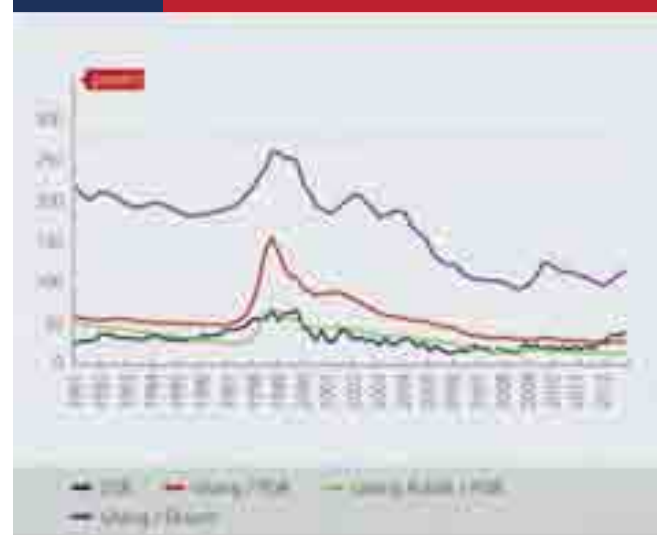
Perkembangan kinerja NPI yang masih mencatat surplus pada tahun 2012 memberikan sumbangan terhadap peningkatan posisi cadangan devisa Indonesia. Posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2012 mencatat peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 112,8 miliar dolar AS (Grafik 4.22). Posisi

cadangan devisa sempat turun menjadi 106,5 miliar dolar AS pada triwulan II 2012 akibat tekanan defisit NPI. Namun seiring dengan membaiknya kinerja NPI, posisi cadangan devisa kembali mengalami peningkatan. Kenaikan posisi cadangan devisa ini didukung oleh langkah BI untuk memelihara kecukupan cadangan devisa sebagai bantalan stabilisasi nilai tukar untuk mengimbangi defisit transaksi berjalan.

Grafik 4.22 Perkembangan Cadangan Devisa



Grafik 4.23 Indikator Kerentanan Eksternal



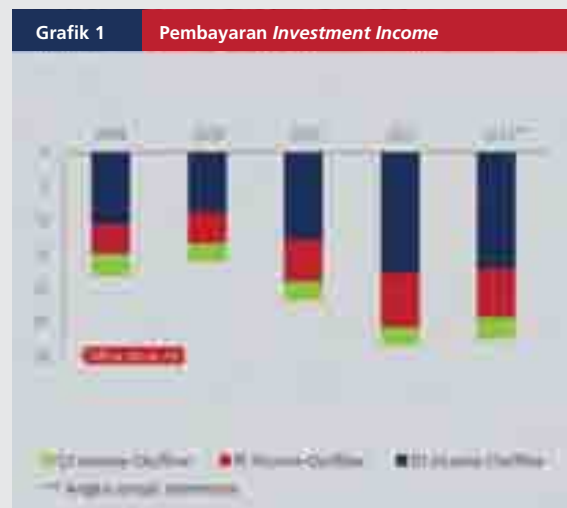
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang menurun pada tahun 2012, berdampak terhadap rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan transaksi berjalan (*debt service ratio* - DSR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan perlu diwaspadai (Grafik 4.23). Namun demikian, ke depan kinerja ekspor yang diperkirakan akan membaik seiring prospek perbaikan ekonomi global diharapkan dapat mendorong DSR ke level yang lebih rendah. Di sisi solvabilitas, meningkatnya posisi ULN berdampak terhadap peningkatan rasio posisi utang luar negeri terhadap PDB dan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Adapun rasio posisi cadangan devisa terhadap impor masih dalam posisi aman karena mampu memenuhi 6,1 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah.

Neraca pendapatan merupakan salah satu komponen transaksi berjalan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang secara persisten mengalami defisit. Pada tahun 2012, neraca pendapatan mencatat defisit sebesar 25,8 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah (3,1%) dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya yang mencapai 26,7 miliar dolar AS. Defisit neraca pendapatan sebagian besar (96%) disumbang oleh defisit transaksi pendapatan investasi (*investment income*), dan sisanya berasal dari transaksi net pembayaran kompensasi tenaga kerja (*compensation of employees*).

Pendapatan investasi berkaitan erat dengan aliran modal investasi yang tercatat dalam transaksi finansial pada NPI. Defisit transaksi pendapatan investasi terjadi karena pendapatan yang diterima investor asing dari investasinya di Indonesia (28,5 miliar dolar AS) jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan investasi yang diterima investor Indonesia dari investasinya di luar negeri (2,6 miliar dolar AS).

Besarnya outflow pendapatan investasi tidak terlepas dari dasarnya aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk penanaman jangka panjang (*Foreign Direct Investment/FDI*) maupun non-FDI (sisi kewajiban *Portfolio Investment* dan *Other Investment*), yang meningkat cukup signifikan (39,2%) dari sebesar 29,2 miliar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 40,6 miliar dolar AS pada tahun laporan. Peningkatan aliran masuk modal asing tersebut disertai dengan struktur investasi yang berkesinambungan dan berjangka panjang, tercermin dari aliran masuk investasi langsung (FDI) yang lebih dominan (48,9%) dibanding investasi portofolio (36,1%).

Sejalan dengan dominasi investasi langsung asing pada aliran masuk modal asing ke Indonesia, komposisi pembayaran *investment income* didominasi oleh pembayaran pendapatan investasi langsung (*direct investment income*) dengan pangsa sebesar 63,4% , disusul kemudian pembayaran



pendapatan investasi portofolio (25,8%), dan sisanya berupa pembayaran pendapatan investasi lainnya (Grafik 1).

Pembayaran pendapatan investasi langsung pada tahun laporan sebesar 17,3 miliar dolar AS, turun 4,0% dari tahun sebelumnya terutama karena berkurangnya transfer keuntungan perusahaan PMA. Kinerja ekspor yang lebih rendah dari tahun sebelumnya ditengarai ikut memberikan dampak terhadap perolehan laba perusahaan PMA, terutama yang berorientasi ekspor. Tidak seluruh outflow pendapatan investasi langsung tersebut ditransfer ke luar negeri karena sebagian dari pendapatan dimaksud direinvestasikan kembali di Indonesia (masuk kembali menjadi bagian inflow investasi langsung asing dalam bentuk *reinvested earnings*).

Pada periode yang sama, pembayaran pendapatan dalam bentuk investasi portofolio juga tercatat mengalami penurunan, dari 7,6 miliar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 7,0 miliar dolar AS pada tahun laporan, atau turun 7,0%. Hal ini seiring dengan menurunnya kepemilikan asing atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dari 2,4 miliar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 0,9 miliar dolar AS pada akhir tahun laporan. Di sisi lain, pembayaran pendapatan pada jenis investasi lainnya tercatat mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,6 miliar dolar AS menjadi 3,0 miliar dolar AS. Peningkatan terutama berasal dari pembayaran bunga atas investasi sektor swasta nonbank sehubungan dengan pinjaman luar negeri yang dilakukan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa besarnya pembayaran *investment income* di satu sisi membebani surplus transaksi berjalan (*current account*), namun di sisi lain adalah refleksi dari masih tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Bab 5

Nilai Tukar





Nilai Tukar



Sepanjang tahun 2012, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi. Sumber tekanan terutama berasal dari ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan ketidakseimbangan eksternal menyusul melebarnya defisit transaksi berjalan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di pasar valuta asing dalam negeri. Namun, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dan peningkatan arus modal asing yang cukup besar dapat menahan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah lebih lanjut dan berlangsungnya secara gradual sehingga volatilitas nilai tukar dapat terpelihara pada level yang rendah.



5.1 Kinerja Nilai Tukar

Sepanjang tahun 2012, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi terkait dengan dinamika perekonomian dunia dan berdampak pada kinerja perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah secara rata-rata melemah 6,3% (ytd) ke level Rp.9.358 per dolar AS dari Rp.8.768 per dolar AS pada tahun sebelumnya (Grafik 5.1). Sementara itu, secara *point-to-point*, rupiah mengalami depresiasi 5,9% dan

ditutup di level Rp.9.638 per dolar AS dibandingkan dengan penutupan tahun sebelumnya di level Rp.9.068 per dolar AS (Grafik 5.2).

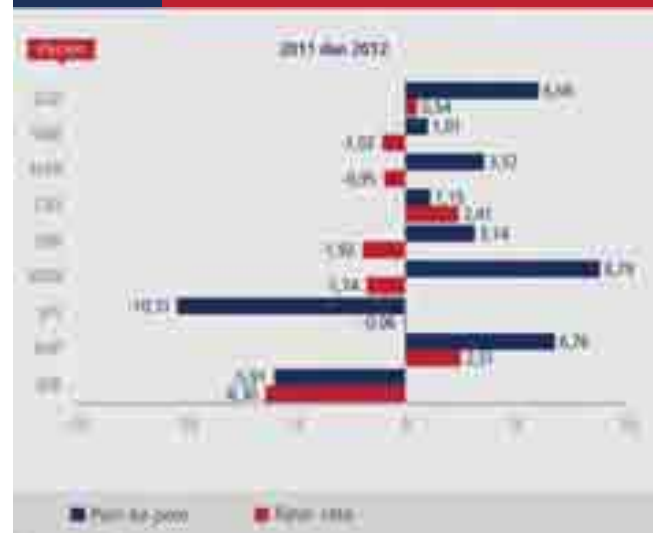
Sumber tekanan terutama berasal dari masih tingginya risiko ketidakpastian pemulihan ekonomi dan keuangan global terkait dengan proses penyelesaian krisis utang dan fiskal di kawasan Eropa, melemahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, khususnya China, serta resolusi fiskal di AS yang dikhawatirkan dapat memicu jurang fiskal (*fiscal cliff*) bagi perekonomian negara tersebut. Moderasi pertumbuhan ekonomi global yang menyebabkan turunnya permintaan negara-negara mitra dagang utama pada gilirannya berdampak pada kinerja ekspor yang mengalami penurunan pertumbuhan. Sementara itu, laju pertumbuhan impor tetap tinggi, seiring dengan permintaan domestik yang tetap tumbuh kuat, telah menyebabkan defisit transaksi berjalan dan memberatkan pergerakan nilai tukar rupiah.

Meskipun demikian, pelemahan nilai tukar rupiah disepanjang tahun 2012 dapat berlangsung secara gradual. Rata-rata volatilitas nilai tukar rupiah di tahun 2012 tercatat sebesar 0,27% atau turun dari 0,38% pada tahun sebelumnya (Grafik 5.3). Apabila dibandingkan dengan nilai tukar mata

Grafik 5.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah



Grafik 5.2 Apresiasi / Depresiasi Nilai Tukar Kawasan



Grafik 5.3 Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

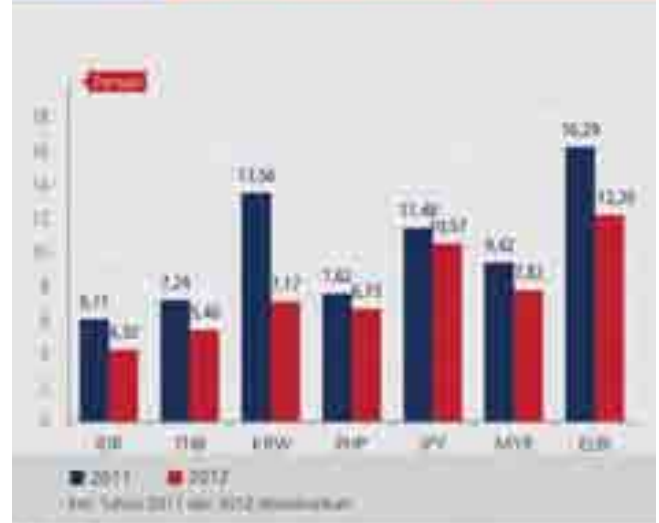


uang di kawasan Asia, volatilitas rupiah secara tahunan (*annualized*) masih lebih rendah (Grafik 5.4). Tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah tersebut pada gilirannya berhasil menjaga tingkat kepercayaan pelaku pasar atas terjaganya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sehat dan meminimalkan dampak pelemahan nilai tukar terhadap laju inflasi. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengelolaan cadangan devisa yang ditempuh Bank Indonesia dan sejumlah kebijakan makroprudensial sebagai komplemen.

5.2 Faktor- Faktor yang Memengaruhi

Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di eksternal dan ekonomi makro domestik (Grafik 5.5). Dari sisi eksternal, penurunan peringkat kredit beberapa negara kawasan Eropa yang mengonfirmasi semakin dalamnya dampak krisis utang dan fiskal, masih rentannya pemulihan perekonomian AS dan perekonomian China yang mencatat pertumbuhan terlemah dalam tiga tahun terakhir, pada gilirannya

Grafik 5.4 Volatilitas Nilai Tukar Kawasan



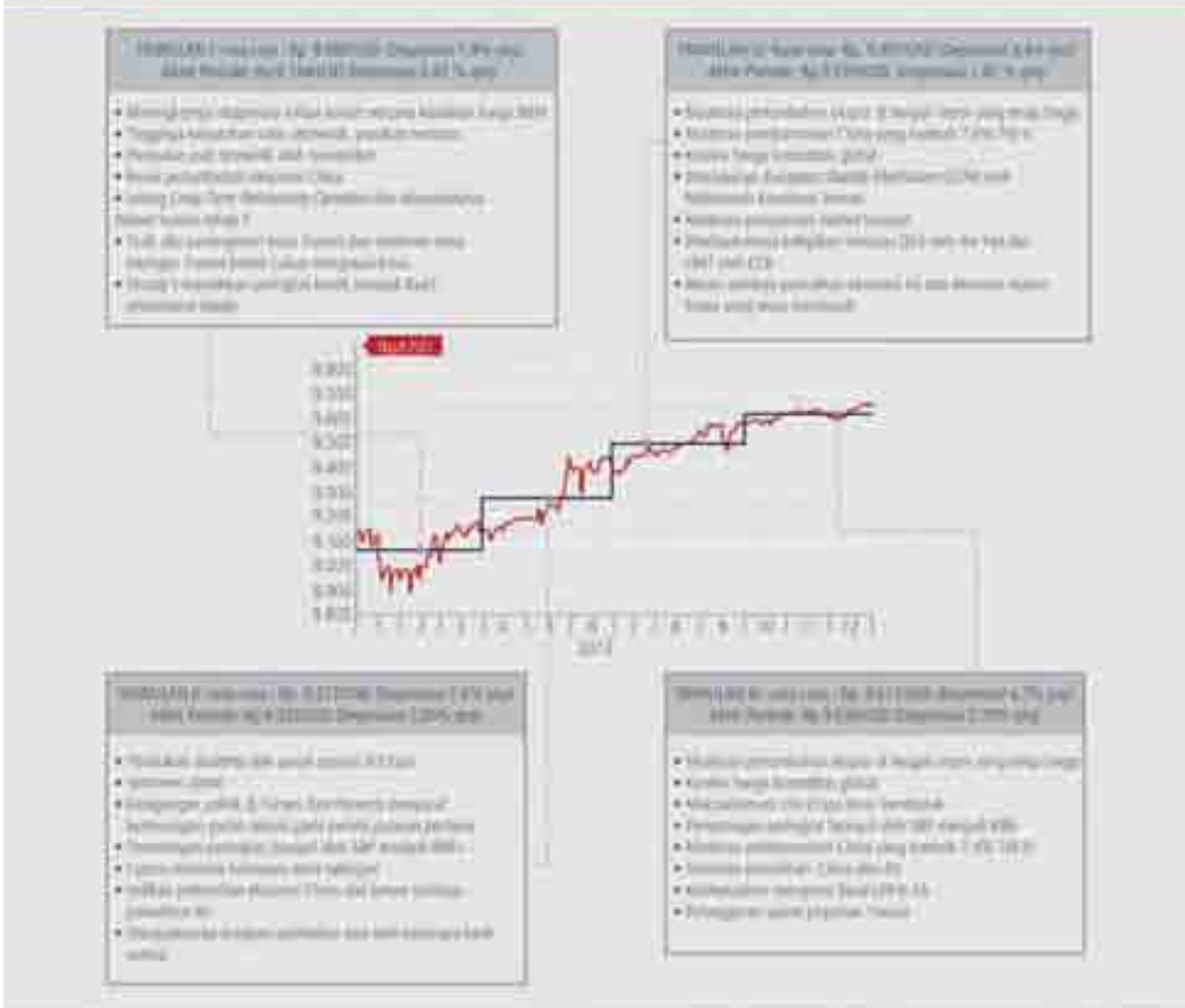
Sumber: Bloomberg

memberikan dampak rambatan terhadap tekanan pelemahan nilai tukar rupiah.

Setelah sempat mengalami perbaikan di triwulan I 2012, berbagai indikator risiko kembali memburuk, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian penanganan krisis utang dan fiskal di negara maju serta melemahnya pertumbuhan global yang memuncak di akhir triwulan II 2012. Pasar keuangan Indonesia yang relatif sensitif terhadap arah pergerakan arus modal asing juga sempat mengalami penyesuaian portofolio (*portfolio rebalancing*) oleh pelaku nonresiden. Selain itu, permintaan valas domestik juga meningkat seiring dengan kegiatan impor yang tinggi.

Faktor risiko global semakin meningkat hingga triwulan II 2012 seiring dengan semakin memburuknya krisis Eropa. Eskalasi kekhawatiran terhadap keberhasilan program penghematan fiskal sempat berlangsung pasca-kemenangan partai yang menolak kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran pada pemilu Perancis dan pemilu putaran pertama Yunani. Selain itu, hasil pemilu putaran pertama Yunani yang tidak konklusif semakin memperkuat sentimen negatif akan keluarnya Yunani dari kawasan Euro (*Grexit*) dan memberikan gejolak di pasar keuangan global.

Grafik 5.5 Analisis Rangkaian Kejadian dan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

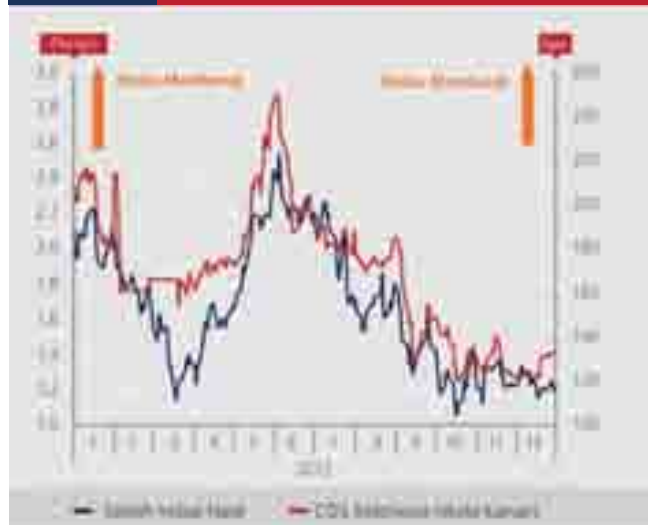


Sumber: Bloomberg

Grafik 5.6 Premi Swap

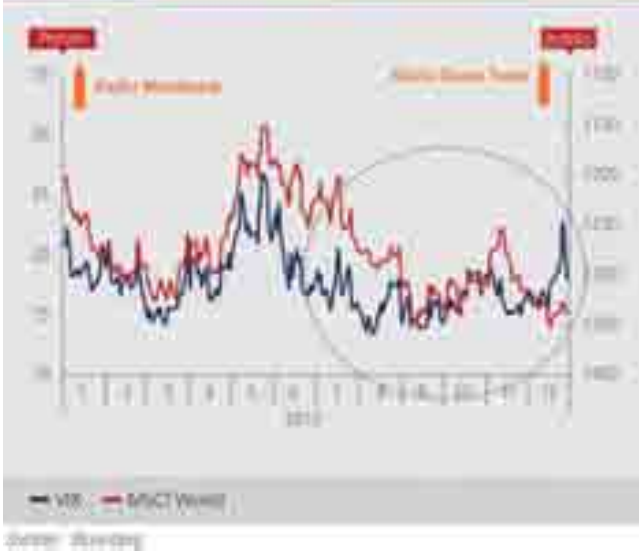


Grafik 5.7 Indeks Risiko dan Selisih Imbal Hasil

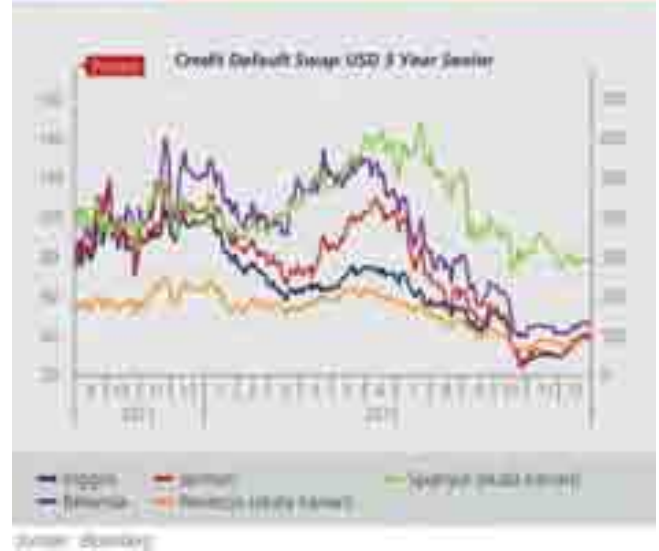


Sumber: Bloomberg

Grafik 5.8 Indeks Risiko Global



Grafik 5.9 CDS Kawasan Eropa



Sementara dari sisi domestik, ekspektasi akselerasi inflasi di awal tahun terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sempat meningkatkan tekanan pada rupiah. Peningkatan tekanan pada rupiah ini tercermin dari sempat melebarnya *spread* antara *bid* dan *ask* rupiah serta *premi swap* (Grafik 5.6). Faktor risiko domestik juga turut mengalami peningkatan hingga triwulan II 2012. *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia pada semester I 2012 sempat mencapai 250,6 yang kemudian mengalami konsolidasi pada semester II 2012 seiring mulai membaiknya faktor risiko global (Grafik 5.7).

Pada semester II 2012, risiko global mengalami perbaikan. Penurunan risiko global terefleksi dari perkembangan indikator risiko global yang mengalami penurunan, khususnya setelah data perkembangan terkini ekonomi makro AS dan China yang positif. Indeks MSCI World dan VIX (Grafik 5.8)¹ serta CDS negara utama Eropa (Grafik 5.9) cenderung bergerak menurun sejak semester II 2012. Sementara CDS Indonesia ditutup menjadi 130, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 208. Selain itu, selisih imbal hasil antara surat utang Indonesia dan *US T-Note* juga mengalami penurunan menjadi 3,8%

(ptp) dari 4,2% di tahun 2011. Intensitas tekanan nilai tukar rupiah juga turut termoderasi sebagaimana terlihat dari penurunan volatilitas nilai tukar rupiah dari 0,38% sepanjang semester I 2012 menjadi 0,18% di semester II 2012. Namun, nilai tukar rupiah masih terus mengalami tekanan pelemahan akibat dari pertumbuhan kinerja ekspor yang terus termoderasi, sementara penyesuaian disisi impor berjalan relatif lambat (Grafik 5.10).

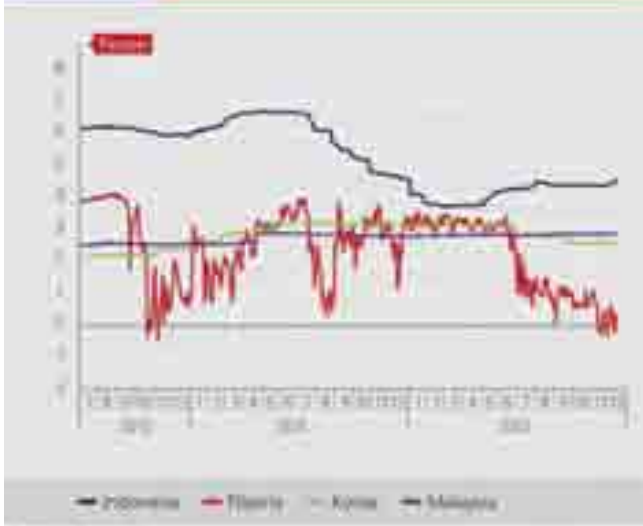
Relatif kompetitifnya imbal hasil aset Indonesia dibandingkan dengan negara kawasan serta

Grafik 5.10 Nilai Tukar terhadap Dolar AS



¹ msci= Morgan Stanley Capital Investment
vix = volatility index

Grafik 5.11 *Uncovered Interest Parity (UIP)*



Sumber: Bloomberg

terjaganya kinerja sumber-sumber pertumbuhan dari sisi domestik berhasil menopang keyakinan investor terhadap perekonomian Indonesia. Indikator imbal hasil investasi pada aset rupiah yang tercermin dari selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri (*Uncovered Interest Parity* - UIP) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Negara di kawasan regional Asia (Grafik 5.11). Bahkan jika memperhitungkan premi risiko, daya tarik dalam rupiah masih tetap tinggi. Indikator imbal hasil yang tercermin dari selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri (*Covered Interest Parity* - CIP) secara umum masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan regional Asia (Grafik 5.12).

Imbal hasil aset rupiah yang kompetitif tersebut didukung pula oleh sustainabilitas fiskal yang terjaga, serta cadangan devisa yang cukup kokoh sebagai bantalan (*cushion*) bagi perekonomian nasional dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya yang bersumber dari sisi eksternal. Ketahanan fundamental ekonomi Indonesia tersebut menjadi basis bagi perolehan peringkat layak investasi (*investment grade*) serta afirmasi peringkat oleh lembaga pemeringkat internasional. Perolehan peringkat investasi dan afirmasi peringkat tersebut menanamkan optimisme bagi investor atas resiliensi prospek perekonomian

Grafik 5.12 *Covered Interest Parity (CIP)*



Sumber: Bloomberg

Indonesia yang sekaligus berperan sebagai penopang atas berlanjutnya aliran dana nonresiden ke pasar keuangan domestik terutama ke obligasi pemerintah (Grafik 5.13).

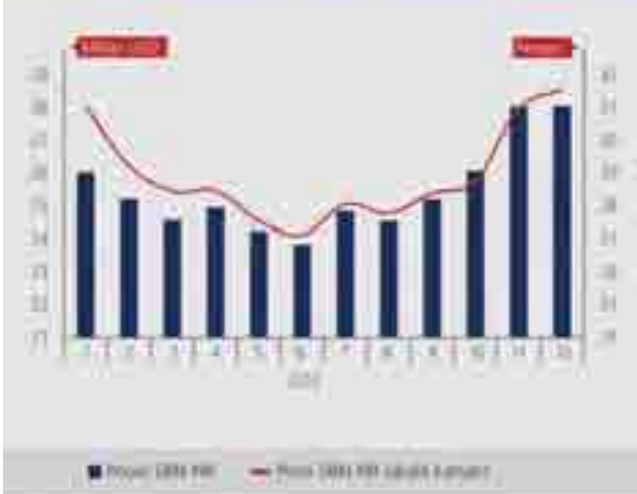
Selama tahun 2012, investor nonresiden membukukan beli neto di pasar Surat Belanja Negara (SBN) sebesar 4,9 miliar dolar AS, melanjutkan akumulasi kepemilikan pada tahun sebelumnya yang sebesar 2,8 miliar dolar AS. Meskipun sempat menurun hingga semester I 2012 seiring dengan meningkatnya faktor risiko global yang mendorong

Grafik 5.13 *Aliran Dana Nonresiden pada Portofolio Rupiah*



Sumber: Bloomberg

Grafik 5.14 Kepemilikan Nonresiden pada SBN



terjadinya *portfolio rebalancing*, investor nonresiden kembali meningkatkan porsi dan nominal kepemilikan SBN pada semester II 2012 (Grafik 5.14). Aliran dana ke SBN sedikit terkoreksi di bulan Agustus 2012 seiring meningkatnya spekulasi memburuknya neraca perdagangan Indonesia. Sementara itu, di bursa saham, aliran dana asing tercatat sebesar 1,26 miliar dolar AS atau menurun dibandingkan dengan jumlah beli neto pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,84 miliar dolar AS. Pada akhir tahun 2012, posisi kepemilikan nonresiden pada instrumen SBN naik menjadi 28,08 dolar AS miliar (31,6%) dari 24,62 miliar dolar AS (29,8%) pada tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, investor nonresiden menjadi investor terbesar kedua pada instrumen SBN. Sementara itu, kepemilikan investor nonresiden di SBI terus mengalami penurunan hingga hanya mencapai 42 juta dolar AS seiring dengan kebijakan masa endap 6 bulan kepemilikan SBI tahun lalu sebagai upaya Bank Indonesia untuk melakukan pendalaman pasar keuangan dan mengurangi tekanan risiko pembalikan yang tiba-tiba (*sudden reversal*).

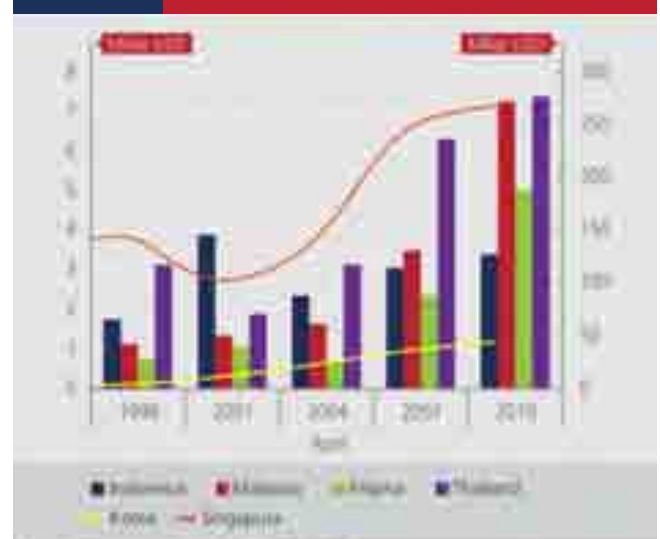
Dari sisi ketahanan eksternal terhadap potensi *capital reversal*, posisi cadangan devisa saat ini masih mampu memenuhi 1,94 kali akumulasi kepemilikan nonresiden pada portfolio investasi rupiah. Kemampuan cadangan devisa tersebut telah

memperhitungkan pemenuhan kebutuhan tiga bulan impor barang dan jasa. Namun, apabila tidak memperhitungkan kebutuhan untuk impor, rasio cadangan devisa terhadap kepemilikan nonresiden menjadi 4,1 kali.

Meskipun neraca pembayaran keseluruhan mencatatkan surplus, defisit yang terjadi pada neraca berjalan telah memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah terkait dengan risiko kerentanan pasokan valas di dalam negeri. Survei BIS menunjukkan *turn over* transaksi harian pasar valas Indonesia pada tahun 2010 hanya sebesar 3,38 miliar dolar AS, tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan pasar valas di kawasan (Grafik 5.15). Relatif masih dangkal dan tersegmentasinya pasar valas domestik mendorong perbankan dan korporasi melakukan penempatan valas di luar negeri sehingga mendorong peningkatan risiko kerentanan pasokan valas di dalam negeri. Dalam periode yang sama, instrumen pasar valas dalam negeri juga didominasi instrumen *Spot* yang mengonfirmasi perlunya pendalaman pasar dan upaya mengurangi segmentasi pasar valas antarbank (Grafik 5.16).

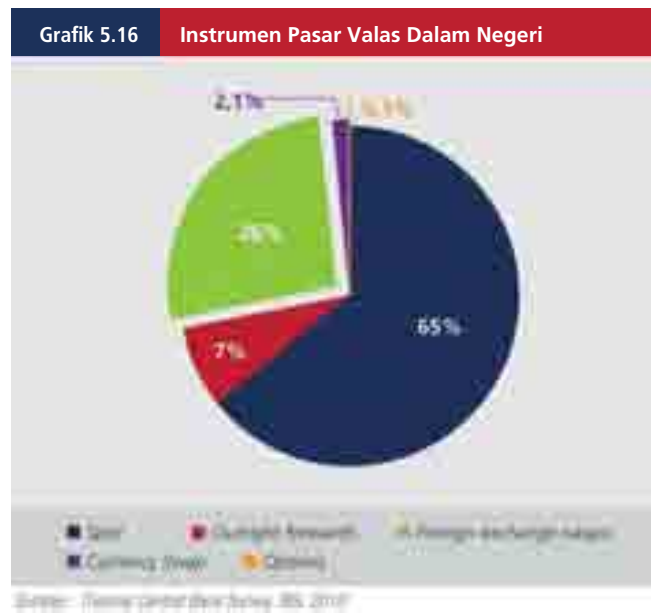
Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah kebijakan untuk memperkuat pasokan valas di domestik yang

Grafik 5.15 Turn Over Harian Pasar Valas Kawasan



Sumber: Bank Indonesia, Bank Survey 2011

sekaligus di tujukan untuk memperdalam pasar valas domestik. Kebijakan- kebijakan tersebut antara lain adalah kewajiban pelaporan Devisa Hasil Ekpor (DHE), penerbitan *Term Deposit Valas* (TD Valas) dan relaksasi ketentuan mengenai tenor lindung nilai.



Bab 6

Inflasi



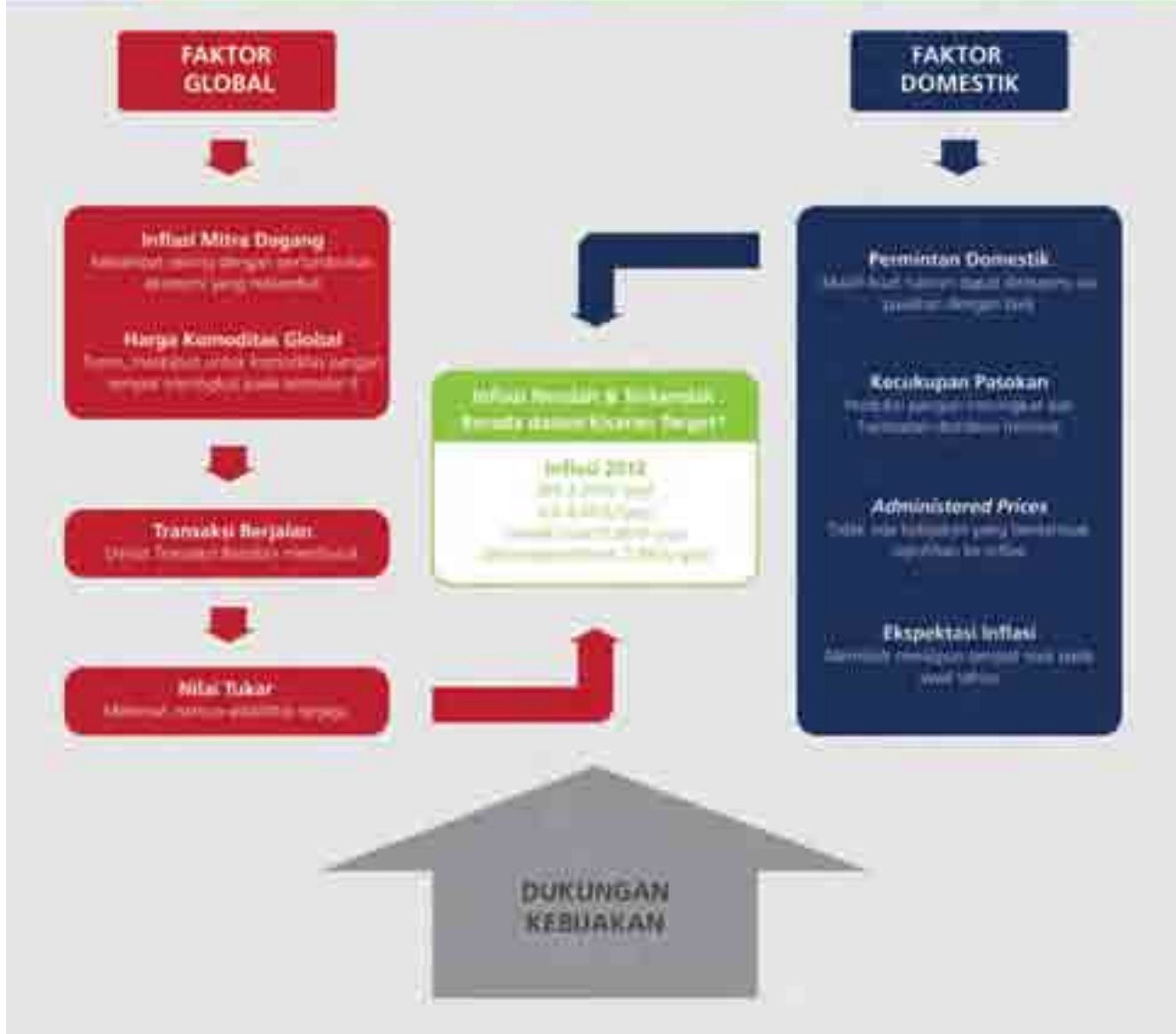


Inflasi



Laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2012, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan berada dalam kisaran sasaran. Terkendalinya inflasi didukung oleh penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah yang semakin solid dalam mendorong kestabilan harga. Sejalan dengan langkah tersebut, inflasi inti dapat tetap terjaga pada level yang relatif rendah. Sementara itu, inflasi volatile food cenderung menurun sejalan dengan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Terkait *administered prices*, tidak terdapat kebijakan pemerintah terkait harga barang di kelompok ini yang berdampak signifikan pada inflasi.

Diagram 1 Inflasi 2012 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi



Pada tahun 2012, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 4,3% (yoy) atau berada di dalam kisaran sasarannya sebesar 4,5%±1%. Realisasi inflasi IHK yang cukup rendah tersebut didukung oleh ketiga komponennya. Inflasi inti, *volatile food* dan *administered prices* masing-masing mencapai 4,4% (yoy), 5,7% (yoy) dan 2,7% (yoy) dan berada di bawah rata-rata historisnya (Grafik 6.1 dan 6.2).¹ Tercapainya sasaran inflasi tahun 2012 tidak terlepas

dari peran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan tekanan yang bersumber dari faktor-faktor eksternal maupun domestik. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga didukung oleh koordinasi kebijakan yang semakin solid baik di tingkat pusat maupun daerah.

Capaian inflasi nasional yang lebih rendah dari historisnya didukung oleh inflasi di berbagai daerah

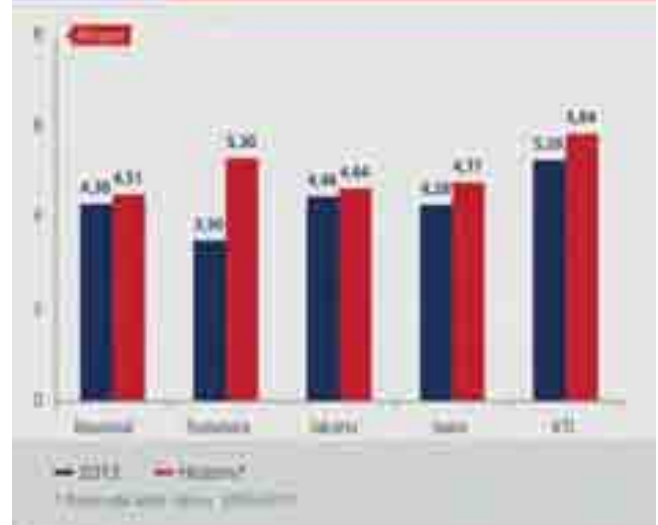
¹ Rata-rata tahun 2002 sampai dengan 2011, kecuali tahun 2005 dan 2008 saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Grafik 6.1 Perkembangan Inflasi



Sumber: BPS

Grafik 6.3 Inflasi Daerah 2012 dan Historis



Sumber: BPS, 2012

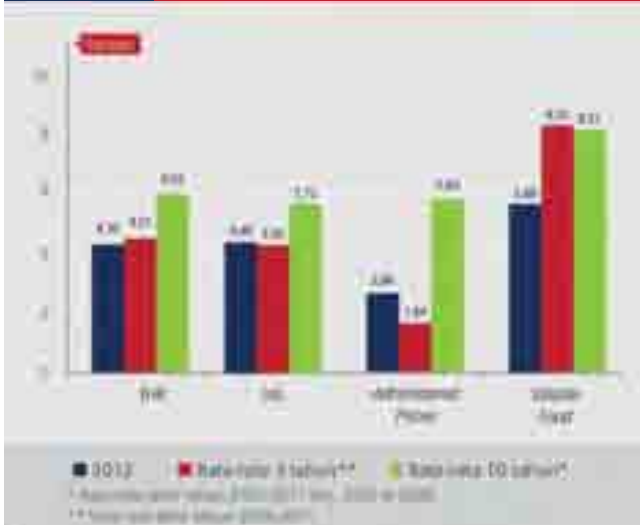
(Grafik 6.3).² Pada tahun 2012, secara umum inflasi di Sumatera dapat mencatat angka yang lebih rendah dari nasional. Hal ini menyebabkan menurunnya kontribusi Sumatera dalam pembentukan inflasi nasional, bahkan bila dibandingkan dengan rata-rata

kontribusinya dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, inflasi di Jawa (termasuk Jakarta) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) secara umum relatif terkendali.

2 Inflasi berbagai daerah berkontribusi signifikan terhadap inflasi nasional. Secara statistik, inflasi nasional merupakan representasi dari inflasi tertimbang berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkendalnya inflasi di berbagai daerah berkontribusi signifikan terhadap capaian inflasi nasional mengingat daerah di luar Jakarta memiliki bobot inflasi yang besar yaitu lebih dari 75% dari total konsumsi masyarakat dalam yang tercakup dalam perhitungan IHK.

Distribusi yang membaik mendukung terjaganya pasokan di berbagai daerah. Pada tahun 2012 relatif tidak terdapat kendala berarti terkait pasokan dan distribusi, termasuk saat perayaan hari-hari besar keagamaan maupun hari libur. Distribusi yang membaik antara lain didukung oleh pertumbuhan jasa transportasi. Jumlah armada pelayaran nasional yang sebagian besar melayani transportasi barang domestik, meningkat 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan juga terjadi dari sisi jumlah pemegang izin usaha pengangkutan laut.³

Grafik 6.2 Inflasi 2012 dan Historis



Sumber: BPS, 2012

3 Sumber: Kementerian Perhubungan, data Oktober 2012. Pada tahun 2012, jumlah kapal berbendera Indonesia naik menjadi 11.620 unit, dari 10.784 unit pada tahun lalu. Sementara, jumlah pemegang izin usaha pengangkutan laut naik mencapai 2.248 perusahaan, dari tahun sebelumnya sebanyak 2.106 perusahaan. Armada pelayaran nasional menguasai 98% pangsa muatan pelayaran dalam negeri.

6.1 Perkembangan Inflasi Inti

Tekanan inflasi inti⁴ cukup terjaga didukung oleh faktor domestik yang terkendali, ekspektasi inflasi yang membaik dan faktor eksternal yang kondusif. Pada tahun 2012 inflasi inti tercatat sebesar 4,4% (yoy). Tekanan terhadap inflasi inti yang sempat terjadi pada beberapa periode relatif minimal dan lebih dipengaruhi oleh faktor musiman.

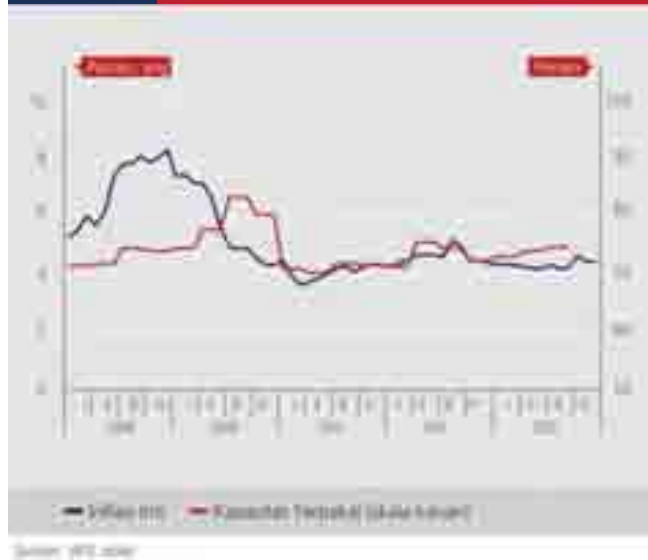
Di sisi domestik, terkendalinya inflasi inti didukung oleh pasokan barang dan jasa yang terjaga baik dalam merespons permintaan domestik yang tetap kuat. Permintaan yang tetap kuat ini tercermin dari angka penjualan eceran yang tumbuh cukup tinggi, bahkan hampir mencapai 20%, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang semakin meningkat (Grafik 6.4). Permintaan konsumen dapat direspons produsen dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang masih memadai (Grafik 6.5). Kenaikan kapasitas terpakai

4 Inflasi Inti digunakan untuk melihat perkembangan harga yang lebih persisten dengan menghilangkan pengaruh harga komoditas yang cenderung fluktuatif atau menimbulkan distorsi seperti bahan makanan dan kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah.

Grafik 6.4 Indikator Permintaan Domestik



Grafik 6.5 Kapasitas Terpakai dan Inflasi



yang cukup besar terjadi pada industri makanan dan minuman. Meskipun demikian kenaikan kapasitas terpakai tersebut belum menimbulkan tekanan biaya produksi secara berlebihan karena tingkat kapasitas yang masih cukup luang.⁵

Dalam jangka yang lebih panjang, tekanan permintaan yang menguat diperkirakan tetap dapat direspons secara memadai oleh sisi penawaran seiring dengan dukungan investasi yang meningkat. Peningkatan kapasitas terpasang melalui penambahan investasi diharapkan dapat menjaga kesinambungan respons sisi pasokan terhadap peningkatan permintaan di masa yang akan datang.

Tekanan harga pada kelompok inti yang berasal dari faktor-faktor domestik tetap terkendali. Terkendalinya tekanan inflasi dari domestik tercermin pada pergerakan inflasi inti *nontradable* yang stabil (Grafik 6.6).⁶ Pada kelompok inti *nontradable*, inflasi

5 Kapasitas utilisasi Industri Makanan dan Minuman berdasarkan Survei Produksi dan Survei Kegiatan Dunia Usaha masih di bawah 70%.

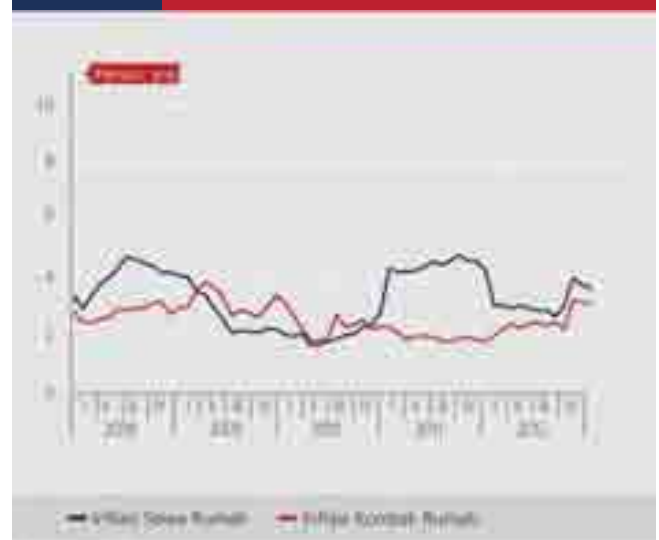
6 Definisi 'tradable' adalah barang yang diperdagangkan baik secara ekspor maupun impor yang tercermin dalam neraca perdagangan. Sebaliknya dengan 'nontradable' adalah barang yang hanya diperdagangkan secara domestik.

kelompok sandang mencatat realisasi yang cukup rendah, yaitu 3,4%. Laju inflasi yang stabil juga dibukukan oleh kelompok *nontradable* makanan dengan realisasi sebesar 5,2%. Lebih tingginya realisasi inflasi makanan karena terimbas secara tidak langsung oleh kenaikan harga pangan global pada pertengahan tahun. Sementara itu, inflasi biaya sewa dan kontrak rumah sempat meningkat pada triwulan IV 2012 seiring dengan permintaan yang meningkat selain karena faktor kenaikan harga rumah dan biaya pemeliharaan. Namun, kenaikan inflasi terkait jasa perumahan ini kembali stabil menjelang akhir tahun, dan ditutup di bawah level 4% (Grafik 6.7).⁷

Ekspektasi inflasi semakin membaik, ditunjukkan oleh berbagai hasil survei. Pada triwulan I 2012, ekspektasi inflasi sempat meningkat dipengaruhi perkiraan perubahan kebijakan terkait bahan bakar bersubsidi. Kenaikan ekspektasi yang cukup tinggi pada periode tersebut tercermin dari hasil Survei Ekspektasi Inflasi Pedagang Eceran (Grafik 6.8) dan hasil survei *Consensus Forecast* (Grafik 6.9). Namun, pada

⁷ Pada Oktober 2012 inflasi sewa dan kontrak rumah secara bulanan naik lebih dari 1% (mtm), jauh lebih tinggi dari historisnya pada bulan tersebut yang di bawah 0,4% (mtm). Pada November 2012 inflasi sewa dan kontrak rumah kembali turun di bawah 0,1% (mtm).

Grafik 6.7 Inflasi Sewa dan Kontrak Rumah



Sumber: BPS, 2012

triwulan II 2012, ekspektasi inflasi mulai membaik dan kembali mengarah ke sasaran inflasi.

Ekspektasi inflasi yang membaik tidak terlepas dari peran bauran kebijakan moneter, nilai tukar, dan kebijakan makprudensial yang didukung oleh strategi komunikasi dan koordinasi yang efektif. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kestabilan harga. Sementara, di tengah kondisi harga global yang tidak menentu, volatilitas nilai tukar dijaga untuk memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Lebih lanjut,

Grafik 6.6 Inflasi Inti *Nontradable*



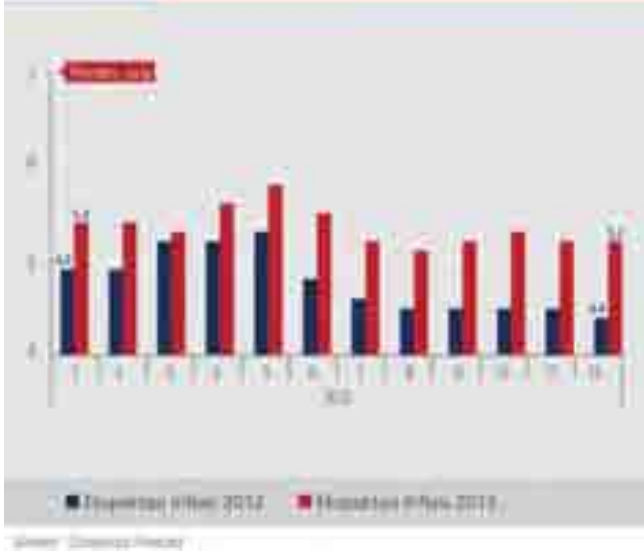
Sumber: BPS, 2012

Grafik 6.8 Ekspektasi Inflasi Pedagang Eceran

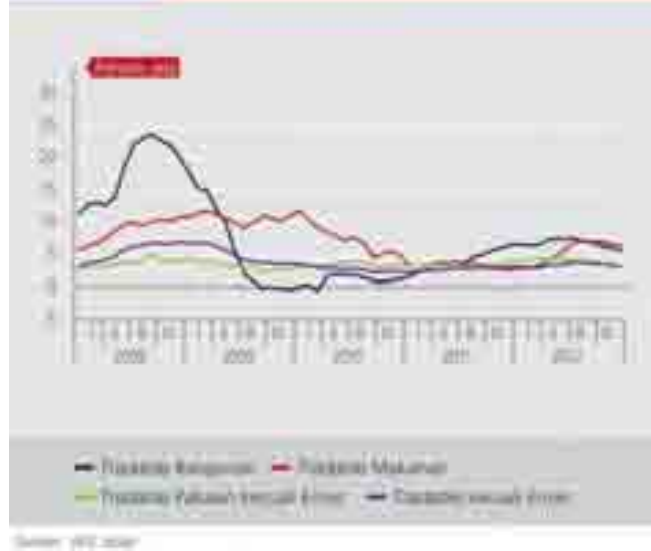


Sumber: BPS, 2012

Grafik 6.9 Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast*



Grafik 6.10 Inflasi Inti *Tradable*



kebijakan makprudensial yaitu *Loan-to-Value* (LTV) dan *Down Payment* (DP) untuk kredit properti dan kendaraan membantu mengelola pertumbuhan kredit dan mengurangi tekanan harga pada sektor-sektor tersebut yang mengalami kenaikan permintaan yang tinggi. Bauran kebijakan ini didukung peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi & koordinasi kebijakan dari sisi Bank Indonesia dan Pemerintah.

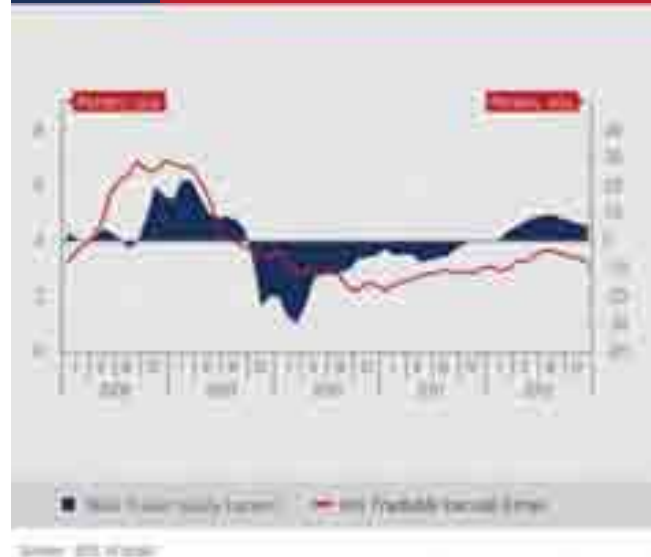
Tekanan Harga Global Menurun

Dari sisi peran faktor eksternal, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat menyebabkan tekanan harga komoditas global menurun. Harga energi relatif stabil bahkan cenderung turun pada paruh kedua tahun 2012. Pada pertengahan tahun timbul tekanan dari harga pangan global, namun berangsur mereda. Terkendalnya tekanan eksternal tercermin dari inflasi inti komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia (*tradable*) yang stabil bahkan menunjukkan pergerakan yang menurun pada pengujung tahun (Grafik 6.10). Jika komoditas

emas dikeluarkan dari perhitungan, inflasi inti tercatat stabil pada level yang cukup rendah di kisaran 4,2%⁸ (Grafik 6.11).

8 Pengecualian komoditas emas karena emas lebih merupakan barang investasi. Menjelang akhir tahun timbul tekanan dari kenaikan harga emas global yang berdampak pada harga emas di pasar domestik. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar menyusul kebijakan ekspansif pemerintah dan bank sentral di AS dan Eropa dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

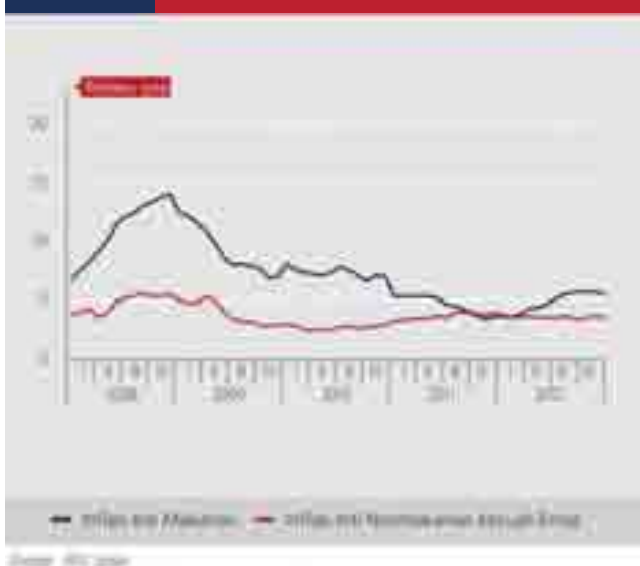
Grafik 6.11 Inflasi Inti dan Nilai Tukar



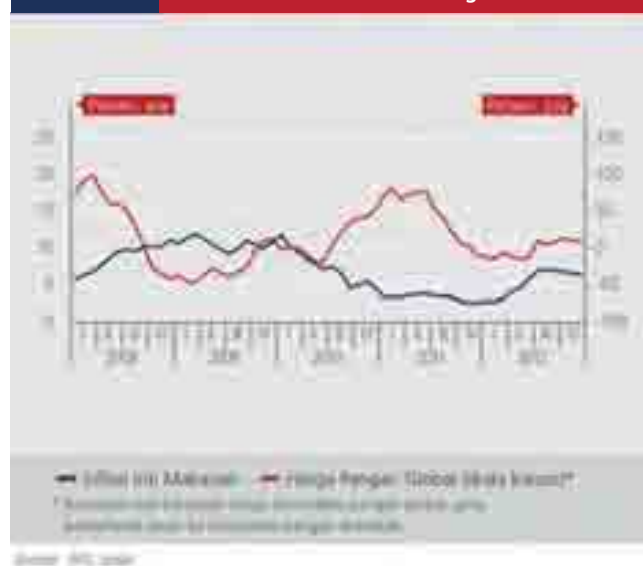
Tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga pangan global yang terjadi pada akhir triwulan II 2012 semakin mereda mendekati akhir tahun. Kenaikan harga pangan global menyebabkan tekanan harga ke komoditas makanan dalam kelompok inflasi inti. Inflasi inti komoditas makanan pada triwulan III 2012 sempat mencapai di atas 5,6%, namun kemudian melambat ke tingkat 5,5% di pengujung tahun. Inflasi inti makanan lebih tinggi daripada inflasi inti komoditas nonmakanan (tidak termasuk emas) yang tercatat 3,6% (Grafik 6.12). Tekanan harga pangan global secara lebih jelas tercermin dari kenaikan inflasi komoditas makanan dalam kelompok inti yang *tradable*. Inflasi kelompok komoditas ini cukup akseleratif mencapai di atas 7% pada Agustus 2012 sebelum kembali melambat ke level 6,4% pada akhir tahun (Grafik 6.13).

Terkendalnya tekanan eksternal didukung oleh kebijakan untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar serta kebijakan untuk menjaga kesinambungan pasokan dan mendorong pemenuhan kebutuhan dari domestik. Sepanjang tahun, volatilitas nilai tukar rupiah cukup terjaga sehingga memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Sementara itu, pada triwulan III 2012, untuk menjaga kesinambungan pasokan domestik dan mengurangi dampak tekanan harga pangan global, pemerintah mengeluarkan kebijakan

Grafik 6.12 Inflasi Inti Makanan dan Nonmakanan



Grafik 6.13 Inflasi Inti Makanan dan Harga Global



penurunan tarif bea masuk kedelai. Kebijakan ini dalam jangka pendek dapat membantu meredakan tekanan harga global ke komoditas terkait di pasar domestik. Dalam jangka yang lebih panjang, untuk meningkatkan kemandirian pangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan produksi melalui pemberian insentif dan perbaikan tata niaga. Terkendalnya tekanan eksternal juga didukung penurunan impor komoditas makanan olahan seiring dengan peningkatan produksi domestik. Impor produk makanan olahan turun signifikan 32,6%. Produksi industri makanan olahan domestik pada tahun ini naik 12,8%, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 7,0%.⁹ Inflasi inti memperlihatkan tren penurunan di hampir seluruh daerah. Penurunan inflasi inti terbesar terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2012 kecuali pada Oktober dan November 2012 saat terjadi kenaikan inflasi bersumber dari emas perhiasan dan biaya sewa/ kontrak rumah. Selain di Jakarta, penurunan inflasi inti juga terjadi di Sumatera dan KTI.

⁹ Data BPS, diolah.

6.2 Perkembangan Inflasi *Volatile Food*

Inflasi kelompok *volatile food*¹⁰ yang relatif rendah di level 5,7% didukung oleh kesinambungan pasokan yang terjaga. Inflasi kelompok ini turun tajam dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya sebesar 7,72%¹¹. Penurunan inflasi ini terutama dipengaruhi oleh produksi domestik yang meningkat dan distribusi yang relatif lancar. Sepanjang tahun 2012 praktis tidak terdapat kendala signifikan dalam distribusi, termasuk saat perayaan hari-hari besar keagamaan maupun hari libur, sehingga kelangkaan bahan makanan tidak terjadi. Sementara itu, pemberlakuan pembatasan impor hortikultura berdampak minimal terhadap inflasi, terutama karena adanya penundaan implementasi dari semestinya di awal tahun menjadi triwulan III 2012.

Produksi pangan yang meningkat mendukung penurunan inflasi. Produksi gabah kering giling tahun 2012 tumbuh 4,9%, jauh meningkat dibandingkan

dengan tahun lalu yang turun 1%. Peningkatan produksi gabah kering giling yang cukup besar terjadi di daerah-daerah sentra produksi Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Faktor yang memengaruhi peningkatan produksi tersebut yaitu naiknya luas lahan tanam sebesar 2,0% dan peningkatan produktivitas sebesar 2,7%.¹² Terjaganya kesinambungan pasokan mendorong terkendalinya harga bahkan pada masa paceklik (Grafik 6.14).

Pada triwulan IV 2012 (periode paceklik), harga beras tercatat naik secara rata-rata sebesar 1%, jauh lebih rendah dari rata-rata historis yang berada pada kisaran 3%.¹³ Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas bumbu. Produksi cabai naik cukup tinggi mendorong koreksi harga yang cukup besar dan terjadi selama beberapa bulan. Produksi pangan yang meningkat didukung oleh kondisi cuaca yang cukup kondusif dan relatif minimalnya gangguan hama dan penyakit tanaman (lihat Boks 6.1).

Produksi bahan pangan pokok yang membaik dan kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) mendorong peningkatan cadangan beras

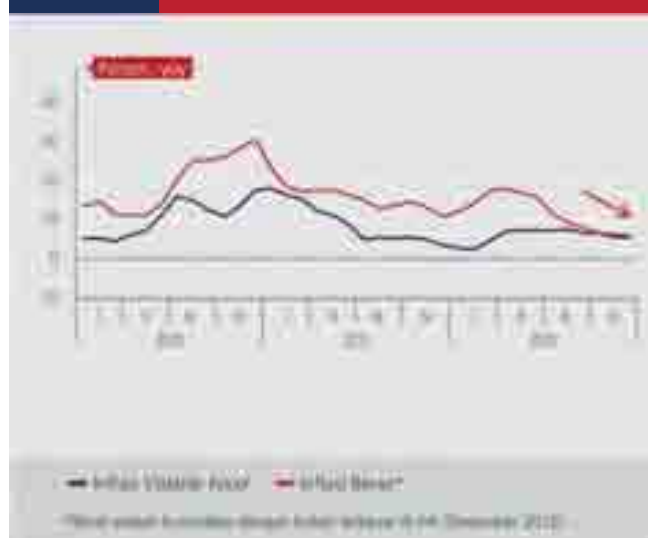
10 Kelompok *volatile food* terdiri dari komoditas bahan makanan yang harganya bergejolak

11 Rata-rata inflasi tahunan Desember tahun 2009 – 2011.

12 Data BPS, Angka Ramalan II 2012

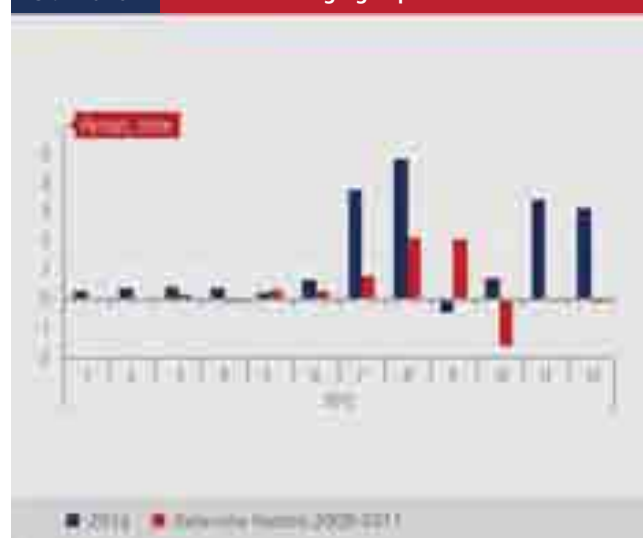
13 Rata-rata kenaikan harga beras triwulan IV 2007 – 2011 mengeluarkan tahun 2010 (krisis harga beras).

Grafik 6.14 Inflasi Beras



Sumber: BPS, 2012

Grafik 6.15 Pola Inflasi Daging Sapi



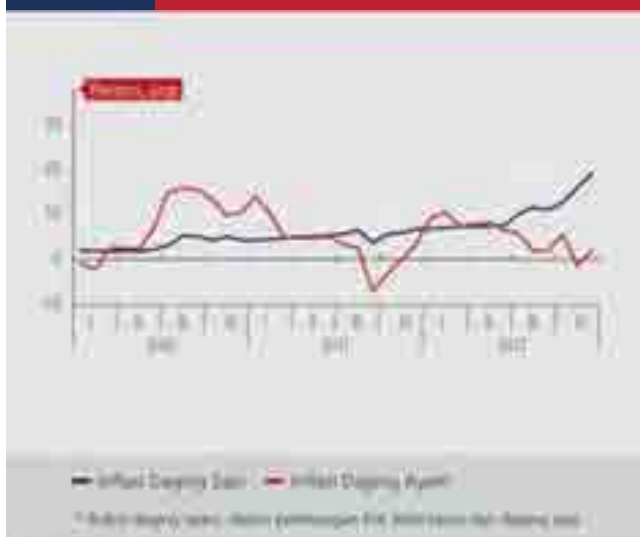
Sumber: BPS, 2012

yang dikelola Bulog. Kenaikan penyerapan beras dalam negeri didukung penetapan kebijakan HPP yang diputuskan sebelum memasuki panen raya. Kenaikan HPP rata-rata sebesar 25% ditetapkan tanggal 25 Februari 2012.¹⁴ Peningkatan produksi dan penetapan kenaikan HPP yang lebih awal mendorong pemupukan cadangan beras dari dalam negeri yang dilakukan oleh Bulog. Pada tahun 2012 pengadaan beras dari domestik mencapai lebih dari 3,5 juta ton, jauh meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 1,7 juta ton. Dengan peningkatan cadangan tersebut, kapasitas dalam upaya stabilisasi harga antara lain melalui operasi pasar, semakin menguat.

Menjelang akhir tahun terjadi lonjakan harga daging sapi. Tekanan harga daging sapi dipengaruhi oleh pasokan yang terganggu di tengah permintaan yang meningkat (Grafik 6.15). Peningkatan pendapatan masyarakat mendorong meningkatnya permintaan daging. Di sisi lain, pasokan baik dari impor maupun dalam negeri mengalami kendala karena kuota impor daging yang terbatas sementara pasokan daging dari domestik belum mencukupi. Namun, kenaikan harga daging sapi tidak menimbulkan dampak signifikan

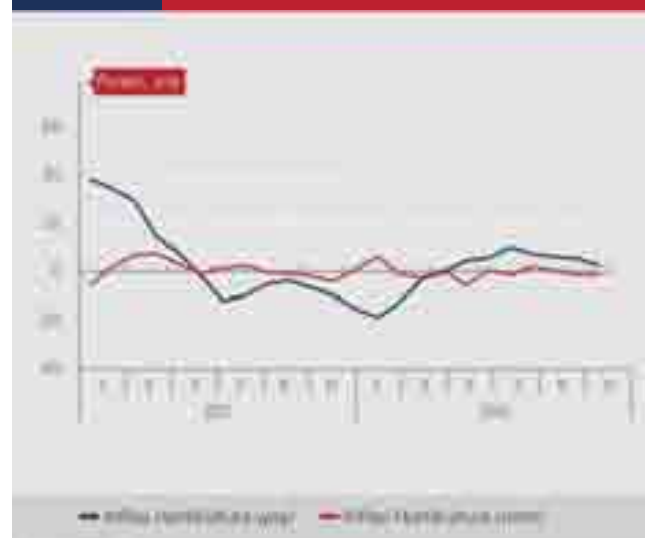
14 Inpres No.3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Grafik 6.16 Inflasi Daging Sapi dan Daging Ayam



Sumber: BPS, 2013

Grafik 6.17 Inflasi Hortikultura



Sumber: BPS, 2013

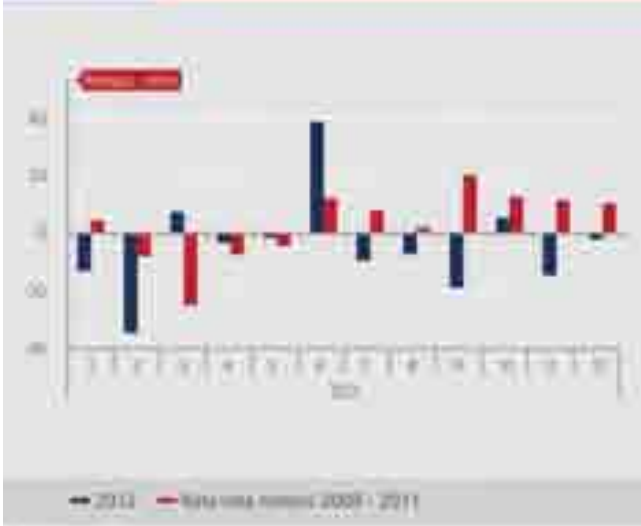
kepada inflasi secara keseluruhan karena pada saat yang sama terjadi koreksi yang cukup dalam pada harga komoditas *volatile food* lainnya. Selain cabai merah, komoditas pangan lain yang harganya turun cukup dalam yaitu daging ayam. Harga daging ayam turun tajam dan memberikan sumbangan deflasi yang cukup besar pada November 2012, bersamaan saat harga daging sapi meningkat (Grafik 6.16).¹⁵

Inflasi komoditas hortikultura cukup terkendali, bahkan terdapat komoditas yang harganya turun cukup besar. Kebijakan-kebijakan pengaturan impor hortikultura pada tahun 2012 diperkirakan dapat menyebabkan tekanan kenaikan harga yang disebabkan pengurangan pasokan dan kenaikan biaya distribusi¹⁶. Namun, hingga akhir tahun kebijakan

15 Pada November 2012, daging ayam memberikan sumbangan deflasi 0,1%, sementara sumbangan inflasi daging sapi hanya 0,03%.

16 Kebijakan pengaturan impor hortikultura yang dikeluarkan pada tahun 2012 adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 dan 43 tahun 2012 yang membatasi pelabuhan masuk impor menjadi empat pelabuhan (Belawan, Tanjung Perak dan Makassar) dan satu bandara (Soekarno Hatta) ditambah kawasan perdagangan bebas yaitu Batam, Karimun dan Bintan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 tahun 2012 yang mengatur tentang Rekomendasi dan dan Persetujuan Impor Produk Hortikultura.

Grafik 6.18 Pola Inflasi Cabai Merah



Sumber: BPS (2012)

tersebut terpantau belum memberikan dampak inflasi yang signifikan (Grafik 6.17). Koreksi harga produk hortikultura domestik yang didukung peningkatan produksi domestik, dapat mengimbangi tekanan harga dari pengurangan pasokan impor. Salah satu komoditas hortikultura yang harganya turun cukup tajam adalah cabai merah (Grafik 6.18).¹⁷

6.3 Perkembangan Inflasi Administered Prices

Inflasi *administered prices* stabil di level yang rendah yaitu 2,66% (yoy). Pada tahun 2012, inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh rokok (Tabel 6.1). Kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi berpengaruh pada minimalnya inflasi *administered prices*. Untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat, pemerintah melakukan berbagai langkah penghematan penggunaan BBM bersubsidi. Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dilakukan secara

¹⁷ Cabai merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki bobot paling besar dalam perhitungan inflasi IHK. Pada tahun 2012, cabai merah mengalami deflasi hingga 50%.

Tabel 6.1 Penyumbang Utama Inflasi Administered Prices

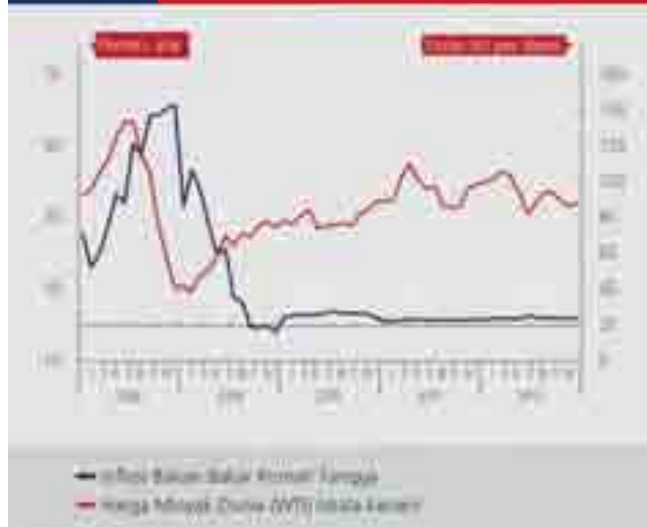
Komoditas	2012	
	Inflasi (Persen, yoy)	Kontribusi (Persen, yoy)
Inflasi		
Rokok Kretek Filter	9,02	0,19
Rokok Kretek	7,75	0,09
Bahan Bakar Rumah Tangga	1,99	0,06
Rokok Putih	8,20	0,04
Bensin	0,80	0,02
Tarif Parkir	12,81	0,02

Sumber : BPS

bertahap yang awalnya dikhususkan untuk kendaraan dinas wilayah Jabodetabek, efektif per 1 Juni 2012, yang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya untuk kendaraan dinas wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan jenis bensin premium serta mobil barang yang menggunakan kegiatan perkebunan dan pertambangan untuk jenis Minyak Solar.

Program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung tiga kg yang masih berlanjut mendukung inflasi yang lebih stabil. Lanjutan program konversi minyak tanah ke gas elpiji di tahun 2012 mencakup Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Semenjak

Grafik 6.19 Inflasi Bahan Bakar Rumah Tangga



Sumber: BPS (2012)

program konversi dilaksanakan, inflasi bahan bakar rumah tangga menunjukkan pergerakan yang lebih stabil didukung kesinambungan pasokan gas yang semakin baik (Grafik 6.19).

Kebijakan *administered prices* lainnya juga berdampak minimal. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain penyesuaian harga terkait transportasi seperti tarif kereta api, tarif tol dan tarif parkir, serta kebijakan cukai rokok.

6.4 Inflasi Indonesia dan Negara Kawasan

Inflasi Indonesia turun cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir, meskipun relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara kawasan. Dalam lima tahun terakhir inflasi IHK atau *headline* Indonesia turun dari 6,6% di tahun 2006 menjadi 4,3% di tahun 2012 (Grafik 6.20). Penurunan inflasi secara signifikan terjadi pada kelompok bahan makanan dari 10,7% di tahun 2006 menjadi 5,7% pada tahun 2012.¹⁸

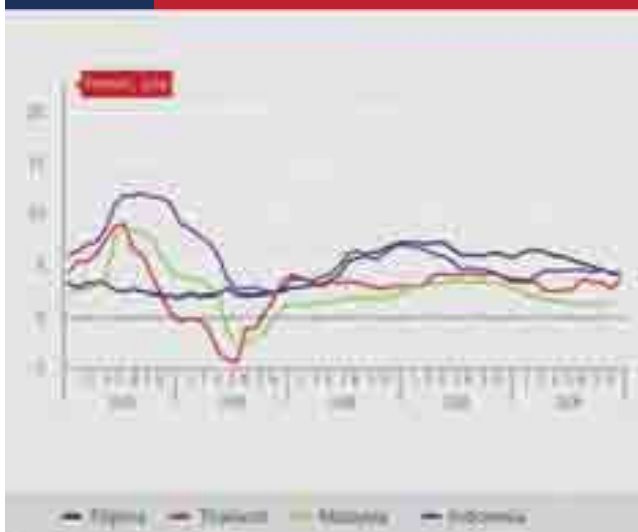
18 Inflasi bahan makanan Indonesia menggunakan data inflasi bahan makanan BPS. Inflasi bahan makanan negara kawasan menggunakan data CEIC.

Sementara kelompok bukan bahan makanan turun dari 3,9% ke 3,2%. Inflasi *headline* Malaysia pada tahun 2012 tercatat rendah yaitu 1,3%, sementara inflasi *headline* Thailand dan Filipina, masing-masing sebesar 3,6% dan 4,1%.

Inflasi Indonesia masih lebih tinggi terutama untuk kelompok bahan makanan. Dibandingkan dengan inflasi bahan makanan Malaysia, Thailand dan Filipina yang pada tahun 2012 masing-masing sebesar 1,3%, 4% dan 2,3%, inflasi bahan makanan di Indonesia yang mencapai 5,68% (yoy) masih tergolong tinggi (Grafik 6.21). Harga bahan makanan di Indonesia lebih tinggi dan fluktuatif karena gangguan pasokan dan distribusi yang lebih sering terjadi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Kondisi geografis Indonesia berupa negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan antardaerah yang satu dengan yang lain menyebabkan kesinambungan pasokan di Indonesia lebih rentan terhadap gangguan distribusi.

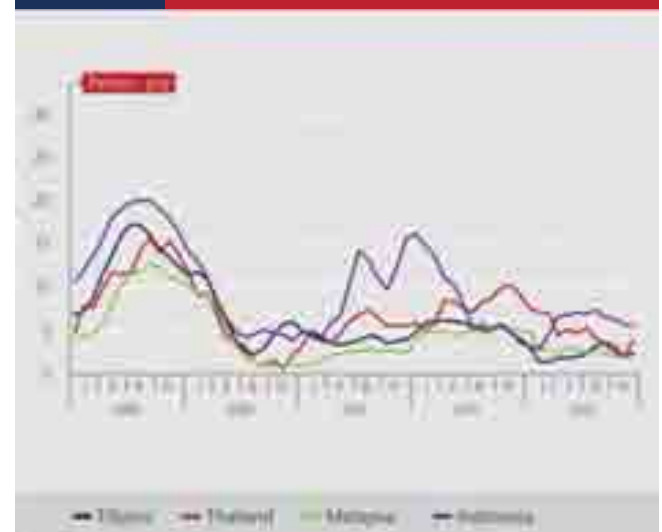
Kesinambungan proses disinflasi perlu didukung oleh kebijakan terutama untuk menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga. Fluktuasi harga pangan perlu diminimalkan dengan menjaga kesinambungan pasokan pangan melalui peningkatan produksi, kecukupan cadangan pangan dan manajemen

Grafik 6.20 Inflasi *Headline* Negara Kawasan



Sumber: CEIC

Grafik 6.21 Inflasi Bahan Makanan Negara Kawasan



Sumber: CEIC

logistik sebagaimana yang telah dilakukan negara kawasan. Selain itu, perlu diatasi hambatan struktural mikro yang menyebabkan inflasi Indonesia masih lebih tinggi melalui peningkatan efisiensi dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, perbaikan infrastruktur dan kecukupan pasokan energi, serta peningkatan produktivitas. Untuk menjaga kesinambungan proses disinflasi menuju tingkat inflasi yang lebih rendah dan semakin setara dengan negara kawasan, sasaran inflasi ditetapkan menurun masing-masing sebesar 4,5%; 4,5%; dan 4,0% dengan deviasi $\pm 1\%$ untuk tahun 2013, 2014 dan 2015¹⁹.

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/PMK.011/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Sasaran Inflasi untuk Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Pemahaman terhadap status/kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah/negara mempunyai peranan yang sangat krusial bagi pengambil kebijakan dan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini di Indonesia belum ada studi formal untuk mengkaji status ketahanan pangan dimaksud. Adapun metode konvensional yang ada yaitu Neraca Bahan Makanan memiliki isu terkait perkiraan yang terlalu tinggi terhadap data pasokan pangan dan perkiraan yang terlalu rendah terhadap data permintaannya (Rosner dan McCulloch, 2008). Oleh karena itu, pendekatan alternatif dengan menggunakan informasi harga dalam menganalisis status ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional perlu untuk dieksplorasi¹. Sebagaimana diketahui, secara teoritis harga dapat merepresentasikan kondisi ketersediaan (ketahanan) pangan di suatu pasar.

Berangkat dari pemikiran di atas, Bank Indonesia melakukan studi untuk memahami ketahanan pangan terhadap lima komoditas pangan (beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan cabai merah) dengan menggunakan pendekatan Model Panel Data Spasial². Keunggulan utama dari metodologi ini adalah kemampuannya untuk menjelaskan isu keterkaitan (interdependensi) antar daerah yang dapat terjadi melalui mekanisme perdagangan antar daerah dan efek rambatan (*spill-over*). Sementara metode ekonometrika klasik cenderung mengabaikan faktor interdependensi antar daerah tersebut, dan pengabaian

interdependensi dapat mengakibatkan hasil estimasi yang bias dan tidak konsisten (Anselin, 2006). Menggunakan data 26 propinsi dari Triwulan I/2002 hingga Triwulan IV/2010, Model Panel Data Spasial menghasilkan estimasi koefisien otokorelasi spasial yang bertanda positif dan secara statistik signifikan untuk kelima komoditas yang dikaji. Temuan tersebut menunjukkan kuatnya *co-movement* harga komoditas antar daerah dimana apabila terjadi perubahan harga komoditas di suatu daerah akan berdampak pada perubahan harga komoditas di daerah lain dengan arah yang sama. Selanjutnya, dengan membandingkan harga hasil estimasi tersebut dengan harga 'fundamentalnya' yang didekati dengan tren jangka panjangnya maka akan dapat ditentukan apakah suatu daerah mengalami surplus atau defisit. Ketahanan pangan di suatu daerah dikatakan mempunyai kecenderungan surplus jika harga estimasi yang diperoleh lebih rendah dari harga fundamentalnya dan demikian sebaliknya. Selanjutnya, kondisi ketahanan pangan dari setiap propinsi di Indonesia dapat dipetakan menjadi: Propinsi Surplus (S) dengan area bergradasi gelap, Propinsi Defisit (D) dengan area bergradasi terang, dan Propinsi Antara S/D dengan area bergradasi sedang. Melalui proses tersebut, dapat diperoleh peta ketersediaan nasional untuk kelima komoditas, yakni : Beras, Gula, Minyak Goreng, Bawang Merah, dan Cabai Merah.

Peta Ketersediaan Beras Nasional

Untuk komoditas beras, berdasarkan analisa spasial tersebut dapat ditunjukkan bahwa wilayah Jawa dan Sumatera secara umum cenderung mengalami surplus (pasokan yang memadai di pasaran) beras, serta sebagian di wilayah Kalimantan dan Sulawesi selama periode pengamatan. Surplus di Jawa berkaitan erat dengan dominasi Jawa sebagai sentra produksi pangan dan juga sebagai pusat perdagangan dan distribusi beras (khususnya di Jakarta dan Surabaya) ke seluruh nusantara.

- 1 Ketahanan pangan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada aspek ketersediaan komoditas pangan di pasaran, yang terutama dilihat dari dimensi kuantitas dan harga.
- 2 Ridhwan, M.M., M.N. Nugroho, T. Winarno, dan M.V. Grace (2012), "Analisis Status Ketahanan Pangan di Indonesia dengan Aplikasi Model Panel Data Spasial", Working Paper Bank Indonesia, Desember 2012.

Gambar 1 Peta Ketersediaan Beras Nasional



Peta Ketersediaan Gula Nasional

Kondisi ketersediaan gula hampir serupa dengan kondisi ketersediaan beras dimana Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, NTB dan Papua teridentifikasi sebagai daerah surplus gula. Sentra produksi gula selain Jawa, yaitu Lampung, tidak teridentifikasi sebagai daerah surplus melainkan berimbang (*balance*). Hal ini diperkirakan karena hasil produksi gula dari wilayah Lampung didistribusikan ke berbagai wilayah lain, termasuk wilayah sekitarnya seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu, sehingga ketersediaan gula di wilayah-wilayah tersebut relatif berimbang. Selain itu, produk gula dari wilayah Lampung juga mengalir ke Jakarta sebagai sentra perdagangan dan distribusi gula. Selanjutnya, stok gula yang terkonsentrasi di Jakarta dan Surabaya disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, NTB dan Papua, sehingga wilayah-wilayah tersebut menjadi surplus gula.

Gambar 2 Peta Ketersediaan Gula Nasional



Peta Ketersediaan Minyak Goreng Nasional

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang surplus minyak goreng. Namun demikian, Indonesia secara umum dapat dikategorikan mengalami defisit minyak goreng. Hal ini agak mengkhawatirkan mengingat Indonesia adalah pemasok utama ke pasar global untuk komoditas kelapa sawit/CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Gambar 3 Peta Ketersediaan Minyak Goreng Nasional



Peta Ketersediaan Bawang Merah Nasional

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Jawa pada umumnya merupakan wilayah yang mengalami surplus bawang merah. Hal ini cukup relevan mengingat 78% dari produk bawang nasional (2011) dihasilkan di Jawa³. Namun Jawa Tengah sebagai sentra produksi bawang merah (utamanya Brebes) justru teridentifikasi sebagai daerah yang *balanced* dan bukan daerah surplus. Ini diperkirakan karena perdagangan antar daerah sehingga dibawa melalui Jakarta dan Surabaya untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah luar Jawa.

³ Bahan presentasi Kementerian Pertanian dalam Focus Group Discussion (FGD) 7 Februari 2012 di Bank Indonesia.

Gambar 4 Peta Ketersediaan Bawang Merah Nasional



Peta Ketersediaan Cabai Merah Nasional

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa wilayah yang teridentifikasi mengalami surplus cabai merah adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, yang memang merupakan daerah penghasil cabai merah. Wilayah surplus lainnya adalah Bali, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun, wilayah-wilayah tersebut bukan merupakan penghasil cabai merah sehingga diperkirakan pasokan cabai merah didatangkan dari wilayah lain. Sementara itu, wilayah yang merupakan produsen cabai merah namun tidak termasuk wilayah yang surplus adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jambi dan NTB yang termasuk dalam wilayah yang *balanced* (daerah Antara S/D), serta Jawa Timur, Sumatera Barat dan Lampung yang bahkan teridentifikasi sebagai daerah defisit.

Gambar 5 Peta Ketersediaan Cabai Merah Nasional



Selain analisis spasial di atas, analisis antar waktu (temporal) mendapatkan hasil yang sesuai teori dimana kondisi eksek permintaan akan diikuti oleh tren kenaikan harganya (mengalami kondisi defisit), dan sebaliknya, eksek suplai akan diiringi oleh penurunan harga (mengalami kondisi surplus) untuk kelima komoditas tersebut. Untuk menguji *predictive power (robustness)*, harga hasil estimasi model *di-tracking* dari setiap periode dan dibandingkan dengan perkembangan harga aktualnya. Melalui kriteria yang digunakan, secara umum model estimasi yang digunakan relatif *robust* dalam menentukan status ketahanan (ketersediaan) pangan baik di tingkat daerah maupun di nasional.

Hasil studi ini juga menyimpulkan bahwa faktor penyebab variasi ketersediaan pangan baik antar daerah dan antar waktu tersebut, selain disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan tidak berimbangnya antara pasokan dan permintaan di daerah itu sendiri, juga dikarenakan oleh adanya mekanisme arbitrase spasial terutama melalui interaksi hubungan dagang antar daerah. Berangkat dari hasil temuan studi ini, sejumlah rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan antara lain adalah: perbaikan distribusi dan tata niaga pangan, perbaikan manajemen stok (logistik), peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi, dan dalam jangka panjang, gerakan perubahan budaya khususnya untuk diversifikasi pangan non beras perlu terus diintensifkan.

Bab 7

Operasi Keuangan Pemerintah





Operasi Keuangan Pemerintah



Defisit operasi keuangan Pemerintah pada tahun 2012 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keterbatasan tambahan pendapatan negara ditengah kebutuhan belanja negara yang terus meningkat berakibat pada melebarnya defisit operasi keuangan Pemerintah, sekaligus memicu defisit keseimbangan primer. Moderasi pertumbuhan pendapatan negara bersumber dari melambatnya pendapatan pajak akibat dari turunnya kinerja pos pajak penghasilan (PPh). Sementara itu, kenaikan belanja negara dipicu oleh membengkaknya kebutuhan subsidi energi menyusul aktivitas ekonomi domestik yang masih tumbuh kuat dan dipertahankannya kebijakan subsidi BBM. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah efisiensi belanja negara guna mengurangi peningkatan beban fiskal secara berlebihan, diantaranya melalui penghematan belanja barang. Langkah strategis tersebut mampu menjaga defisit fiskal dan defisit keseimbangan primer dari risiko lonjakan yang berlebihan sehingga realisasi defisit fiskal maupun defisit keseimbangan primer dapat dijaga dibawah prakiraan APBN-P 2012.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2012 tetap mampu berkontribusi secara positif pada terpeliharanya stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam meminimalkan dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, langkah menjaga kesinambungan fiskal perlu terus dikedepankan mengingat kondisi keseimbangan primer yang telah memasuki area defisit.



7.1 Perkembangan Operasi Keuangan Pemerintah

Kebijakan fiskal tahun 2012 diarahkan untuk mendukung percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 secara khusus diarahkan pada 3 (tiga) hal, yaitu: (i) mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur untuk menggalakkan kegiatan investasi, dunia usaha, sekaligus menjaga kelancaran arus distribusi barang; (ii) meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar; serta (iii) menjamin keamanan pasokan energi yang dicapai melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi produksi dan optimasi produksi. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2012 juga diarahkan untuk mendorong berbagai kebijakan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka perluasan akses lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dan juga menjaga kesinambungan fiskal.

Dinamika perekonomian menyebabkan Pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (RAPBN-P) pada awal tahun 2012. Terdapat empat faktor utama yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap postur APBN 2012. Pertama, kondisi perekonomian global yang diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis utang dan fiskal di Eropa. Kondisi ini selain akan membawa dampak pada neraca pembayaran, diperkirakan juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi (jauh di atas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN). Hal tersebut akan berdampak secara signifikan terhadap APBN, karena meningkatkan beban subsidi BBM dan listrik secara tajam. Ketiga, adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sebagai akibat dari ketidakpastian penyelesaian krisis global yang juga akan berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran APBN. Keempat, *lifting* minyak yang diperkirakan lebih rendah dari asumsi *lifting* dalam APBN 2012 sebesar 950 ribu barel per hari yang akan berdampak pada penurunan penerimaan dari sektor migas.

APBN-P tahun 2012 disahkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 dengan perubahan struktur yang cukup signifikan dibandingkan APBN 2012. Asumsi makroekonomi yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, rata-rata suku bunga, dan *lifting* minyak mengalami revisi dengan nuansa yang lebih pesimis. Asumsi pertumbuhan ekonomi direvisi dari 6,7% menjadi 6,5% (yoy) setelah mempertimbangkan imbas perlambatan ekonomi global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi domestik. Sebaliknya, asumsi inflasi mengalami revisi ke atas dari 5,3% menjadi 6,8% setelah mempertimbangkan dampak dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2012. Asumsi rata-rata nilai tukar ditetapkan pada level yang lebih lemah menyusul prakiraan peningkatan tekanan defisit neraca pembayaran. Asumsi harga

minyak (ICP)¹ meningkat dari 90 dolar AS per barel pada APBN 2012 menjadi 105 dolar AS per barel pada APBN-P 2012, sejalan dengan prakiraan peningkatan harga minyak dunia. Sebaliknya, asumsi *lifting* minyak mengalami revisi ke bawah seiring dengan terjadinya *natural decline*. Revisi ke bawah juga dilakukan pada asumsi rata-rata suku bunga akibat peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade* (Tabel 7.1). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan alokasi stimulus perekonomian yang lebih besar dalam bentuk belanja modal yang memiliki efek pengganda lebih besar untuk perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, realisasi operasi keuangan pemerintah pada tahun 2012 menunjukkan pengelolaan yang berhati-hati dan masih mampu memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional meski terdapat sedikit penurunan kinerja dibandingkan tahun 2011. Pendapatan dan hibah negara pada tahun 2012 mencapai Rp1.335,7 triliun atau tumbuh 10,3% (yoy) atau 98,3% dari target APBN-P. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.481,7 triliun atau tumbuh 14,4% (yoy) atau 95,7% dari target APBN-P. Dengan realisasi tersebut pemerintah berhasil mencapai defisit yang lebih rendah dari prakiraan APBN-P yaitu sebesar Rp146 triliun atau setara 1,8% dari PDB, sementara defisit APBN-P 2012 adalah sebesar Rp190,1 triliun atau

1 Indonesia Crude Price (ICP) adalah rata-rata harga 50 jenis minyak mentah produksi Indonesia yang digunakan sebagai acuan asumsi harga minyak dalam APBN.

Tabel 7.1 Perkembangan Asumsi Makro 2012

Asumsi Makro	2012		
	APBN	APBN-P	Realisasi*
Pertumbuhan ekonomi y.o.y (%)	6,7	6,5	6,3
Inflasi y.o.y (%)	5,3	6,8	4,3
Nilai tukar (Rp/USD)	8.800	9.000	9.384
Rata-rata suku bunga SPN 3 bln (%)	6,0	5,0	3,2
Harga minyak internasional (Dolar AS/ barel)	90	105	112,7
<i>Lifting</i> minyak Indonesia (ribu barel per hari)	950	930	861



setara 2,2% dari PDB. Realisasi defisit tersebut berhasil dipenuhi oleh realisasi pembiayaan sebesar Rp180 triliun yang tercapai di tengah antusiasme positif pelaku pasar. Namun, di tengah capaian defisit yang lebih rendah dari prakiraan dan rasio utang yang moderat, untuk pertama kalinya sejak Pemerintah mengadopsi struktur anggaran *I-account* sesuai manual Government Finance Statistics Manual (GFSM) tahun 2001, realisasi keseimbangan primer pemerintah mencapai defisit yaitu sebesar Rp45,5 triliun (Grafik 7.1). Kondisi tersebut memberi sinyal kepada pemerintah untuk terus mewaspadai kesinambungan fiskal pemerintah (lihat Boks 7.1).

7.2 Pendapatan Negara dan Hibah

Pada tahun 2012 realisasi pendapatan dan hibah negara mencapai Rp 1.335,7 triliun, tumbuh cukup baik yaitu sebesar 10,3% (yoy). Namun, pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 21,6% (yoy). Dari sisi pencapaian target, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2012 hanya mencapai 98,3% dari target, lebih rendah daripada realisasi tahun lalu yang mampu mencapai 103,5% dari target (Tabel 7.2).

Tabel 7.2 Perkembangan Operasi Keuangan Pemerintah

Rincian	APBN-P 2011	Realisasi 2011			APBN-P 2012	Realisasi 2012*		
	Triliun Rp	Triliun Rp	%yoy	%APBN-P	Triliun Rp	Triliun Rp	%yoy	%APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.169,9	1.210,6	21,6	103,5	1.358,2	1.335,7	10,3	98,3
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.165,3	1.205,3	21,5	103,4	1.357,4	1.331,7	10,5	98,1
Penerimaan Perpajakan	878,7	873,9	20,8	99,5	1.016,2	980,1	12,2	96,4
- Pajak Dalam Negeri	831,7	819,8	18,1	98,6	968,3	930,5	13,5	96,1
- Pajak Perdagangan Internasional	46,9	54,1	87,2	115,3	47,9	49,5	-8,5	103,3
Penerimaan Negara Bukan Pajak	286,6	331,5	23,3	115,7	341,1	351,6	6,1	103,1
- Penerimaan SDA	192,0	213,8	26,7	111,4	217,2	226,5	5,9	104,3
- Bagian Laba BUMN	28,8	28,2	-6,4	97,7	30,8	30,8	9,3	100,1
- PNBP lainnya	50,3	69,4	16,7	137,8	72,8	73,2	5,6	100,6
- Pendapatan BLU	15,4	20,1	89,8	130,4	20,4	21,2	5,3	103,7
II. Hibah	4,7	5,3	73,8	112,7	0,8	4,0	-24,5	480,7
B. Belanja Negara	1.320,8	1.295,0	24,3	98,1	1.548,3	1.481,7	14,4	95,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	908,2	883,7	26,7	97,3	1.069,5	1.001,3	13,3	93,6
Belanja Pegawai	182,9	175,7	18,7	96,1	212,3	197,7	12,5	93,1
Belanja Barang	142,8	124,6	27,7	87,3	162,0	137,2	10,1	84,7
Belanja Modal	141,0	117,9	46,8	83,6	176,1	140,2	18,9	79,6
Pembayaran Bunga Utang	106,6	93,3	5,5	87,5	117,8	100,5	7,8	85,4
Subsidi	237,2	295,4	53,3	124,5	245,1	346,4	17,3	141,3
- Subsidi BBM, LPG, dan BBN	129,7	165,6	165,6	165,6	137,4	211,9	27,9	154,2
- Subsidi Non BBM, LPG, dan BBN	107,5	129,7	129,7	129,7	107,7	134,5	3,7	124,9
Belanja Hibah	0,4	0,3	328,7	74,1	1,8	0,1	-74,8	4,2
Belanja Sosial	81,8	71,1	3,6	86,9	86,0	75,3	6,0	87,6
Belanja Lain-lain	15,6	5,5	-74,8	35,0	68,5	3,9	-28,2	5,7
II. Transfer Ke Daerah	412,5	411,3	19,3	99,7	478,8	480,4	16,8	100,3
Dana Perimbangan	347,5	347,2	9,6	99,9	408,4	411,1	18,4	100,7
- DBH	96,8	96,9	5,1	100,1	108,4	111,3	14,8	102,7
- DAU	225,5	225,5	10,8	100,0	273,8	273,8	21,4	100,0
- DAK	25,2	24,8	18,4	98,3	26,1	25,9	4,6	99,3
Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian	65,0	64,1	128,7	98,6	70,4	69,4	8,2	98,5
C. Keseimbangan Primer	(44,3)	8,8	-78,7	-19,9	(72,3)	(45,5)	-615,9	62,9
D. Surplus/Defisit Anggaran	(150,8)	(84,4)	79,9	56,0	(190,1)	(146,0)	72,9	76,8
E. Pembiayaan	151,1	130,9	43,0	86,7	190,1	180,0	37,5	94,7
I. Pembiayaan Dalam Negeri	153,2	148,7	54,8	97,1	194,5	199,2	33,9	102,4
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(2,1)	(17,8)	289,8	834,9	(4,4)	(19,1)	7,3	431,6

Sumber: Kementerian Keuangan

*Angka sementara prakiraan pemerintah

Penurunan pendapatan dan hibah negara dibandingkan targetnya terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak pada lebih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan realisasi penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 sebesar Rp980,1 triliun berhasil tumbuh sebesar 12,2% (yoy) sejalan dengan peningkatan rasio pajak² dari 11,8% pada tahun 2011 menjadi 11,9% pada tahun 2012. Meski demikian, penerimaan perpajakan tersebut hanya mencapai 96,4% dari target, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2011 sebesar 99,5% dari target. Realisasi penerimaan perpajakan ini relatif sejalan dengan PDB sehingga rasio pajak tahun 2012 masih sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah (Tabel 7.1).

Meski penerimaan pajak dibandingkan dengan targetnya mengalami penurunan, namun dari sisi komposisi penerimaan, pangsa penerimaan perpajakan terhadap seluruh pendapatan meningkat dari 72,2% pada tahun 2011 menjadi 73,4% pada tahun 2012, dengan peningkatan terbesar berasal dari peningkatan pangsa PPN dan Cukai. Pangsa PPh Nonmigas yang merupakan jenis pajak terbesar

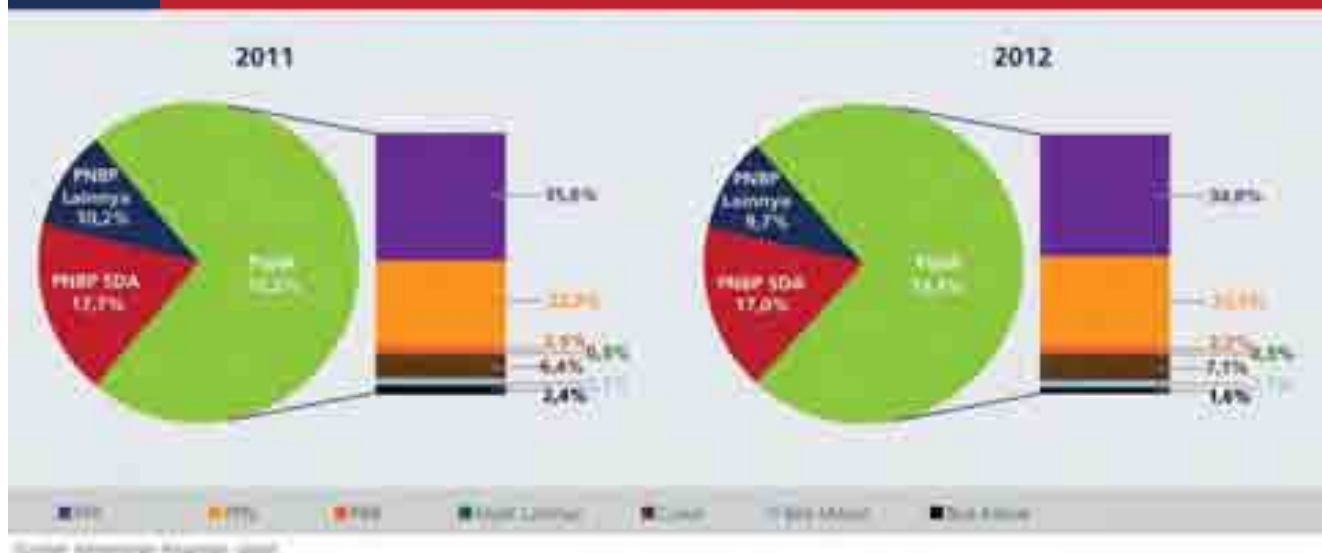
mengalami penurunan dari 35,6% menjadi 34,8% (Grafik 7.2).

Penurunan kinerja realisasi penerimaan relatif terbatas karena adanya dukungan dari pertumbuhan dan capaian kinerja yang baik, yaitu penerimaan PPN, cukai, dan PPh nonmigas. Penerimaan PPN mencapai Rp337,6 triliun atau tumbuh 25,3% (yoy) dengan capaian 100,5% dari target, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 93,1% dari target. Perbaikan kinerja PPN disebabkan adanya perbaikan administrasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Realisasi penerimaan cukai mencapai Rp95 triliun atau tumbuh 123,4% (yoy) dengan capaian 114,1% dari target, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 113,1% dari target. Kenaikan penerimaan cukai tersebut sejalan dengan peningkatan impor pada tahun 2012. Penerimaan PPh migas mencapai Rp83,5 triliun atau tumbuh 14,2% (yoy) dengan capaian 122,9% dari target, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 112,1% dari target. Peningkatan kinerja PPh migas dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar, kenaikan harga minyak dan gas, di tengah penurunan *lifting* minyak³ (Tabel 7.1).

2 Rasio pajak adalah besarnya porsi penerimaan perpajakan dalam PDB

3 Penurunan *lifting* minyak terjadi karena *unplanned shutdown*, penurunan produksi alamiah, dan masalah nonteknis lainnya.

Grafik 7.2 Komposisi Pendapatan Negara 2011 dan 2012



Selain itu, realisasi yang melampaui target juga dibukukan oleh pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya PNBP Sumber Daya Alam (PNBP SDA) yang berasal dari peningkatan harga gas serta bertambahnya jenis-jenis mineral yang menjadi sumber PNBP (Grafik 7.2).

7.3 Belanja Negara

Pada tahun 2012 realisasi belanja negara mencapai Rp1.481,7 triliun, tumbuh cukup baik yaitu sebesar 14,4% yoy. Namun, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sebesar 24,3% yoy. Dari sisi pencapaian target, realisasi belanja negara tahun 2012 hanya mencapai 95,7% dari target, lebih rendah daripada realisasi tahun lalu yang mampu mencapai 98,1% dari target (Tabel 7.2). Meski Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan penyerapan anggaran, berbagai kendala khususnya dalam penyerapan belanja modal masih belum dapat sepenuhnya diatasi.

Pertumbuhan belanja terutama berasal dari pertumbuhan transfer ke daerah dan subsidi, khususnya subsidi BBM. Pertumbuhan transfer ke daerah menunjukkan keseriusan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional sementara pertumbuhan subsidi BBM disebabkan oleh peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, kenaikan ICP, depreasiasi nilai tukar dan langkah Pemerintah dalam melanjutkan kebijakan subsidi BBM. Relatif terbatasnya pertumbuhan belanja bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu menyebabkan sedikit penurunan porsi belanja negara terhadap PDB dari 9,0% pada tahun 2011 menjadi 8,9% pada tahun 2012. Penurunan serapan belanja negara terhadap target APBN-P disebabkan oleh berbagai faktor seperti moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), efisiensi belanja barang, dan masih adanya berbagai kendala terkait penyerapan belanja modal.

Dari sisi waktu, penyerapan belanja membaik dibandingkan tahun 2011. Penyerapan belanja pada triwulan IV 2012 tercatat sebesar 35% dari total realisasi belanja, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 40% dari total belanja dan rata-rata penyerapan pada triwulan IV selama 6 tahun terakhir sebesar 38%. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pola penyerapan belanja dengan mengurangi penumpukan pada akhir tahun. Upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain melalui kemudahan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pembentukan Tim Evaluasi, Pemantauan, dan Percepatan Anggaran (TEPPA) terlihat cukup berhasil (Grafik 7.3).

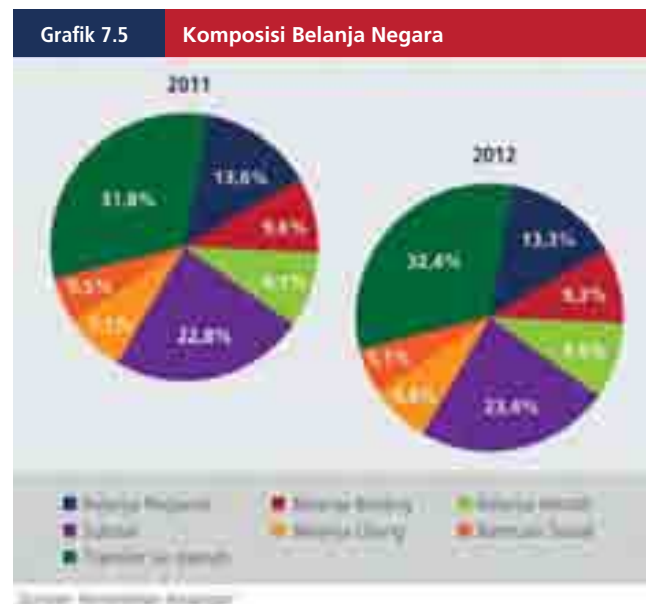
Berdasarkan perkembangan pos belanja negara, realisasi tertinggi tercatat pada pos subsidi. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, Pemerintah menganggarkan belanja subsidi yang cukup besar dalam APBN-P 2012. Realisasi subsidi secara total melampaui pagu APBN-P sebesar 41,3%. Jumlah nominal subsidi menembus level Rp300 triliun, menjadi sebesar Rp346,4 triliun atau meningkat 17,3% dibandingkan dengan realisas subsidi di tahun 2011. Lebih dari separuh jumlah tersebut, atau sebesar Rp211,9 triliun (61,2% dari total subsidi), merupakan subsidi BBM



yang realisasinya melampaui pagu APBN-P hingga 54,2%. Pelampauan ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor, yaitu tidak adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, harga minyak yang melampaui asumsi, dan depresiasi nilai tukar. Volume konsumsi BBM tahun 2012 diperkirakan mencapai 45,1 juta kilo liter, melampaui pagu APBN-P sebesar 40 juta kilo liter. Realisasi komponen subsidi energi lain, yaitu subsidi listrik, mencapai Rp94,6 triliun, atau melampaui pagu APBN-P sebesar 45,2%. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan konsumsi listrik dalam negeri. Pada tahun 2012, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengurangi penggunaan BBM sebagai bahan bakar listrik. Di sisi lain, capaian realisasi subsidi nonenergi tampak tidak mengalami perubahan berarti. Capaian subsidi nonenergi masih di bawah target, yaitu hanya sebesar Rp39,9 triliun atau hanya tumbuh 1,6% (yoy) dengan capaian 93,4% dari target, lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 93,7%. Capaian terendah terdapat pada realisasi subsidi benih yang hanya mencapai 46,5% dari target. Penyerapan subsidi nonenergi yang rendah juga disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa program terkait kompensasi kenaikan BBM seperti penyaluran raskin dan subsidi bunga untuk sarana dan fasilitas BBM nonsubsidi (Grafik 7.4).

Pos belanja lain yang juga meningkat adalah belanja modal. Pangsa realisasi belanja modal meningkat, meskipun masih jauh lebih kecil dibandingkan pangsa belanja subsidi, sebesar 23,4%. Penyerapan belanja modal tertinggi terjadi pada semester I 2012 namun kemudian semakin melambat pada semester II 2012. Secara keseluruhan, capaian pada tahun 2012 sebesar 79,6% dari target APBN-P lebih rendah dari capaian pada tahun 2011 sebesar 83,6%. Penurunan penyerapan belanja modal dari target APBN-P masih terkendala oleh berbagai hambatan struktural seperti permasalahan pengadaan/pembebasan lahan, hambatan institusional berupa reorganisasi dan kendala kelengkapan administratif dalam pengajuan anggaran, serta sikap terlalu berhati-hati dalam mencairkan anggaran, sehingga menyebabkan penumpukan anggaran di akhir tahun (Grafik 7.5).

Realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial, yang merupakan komponen konsumsi pemerintah pusat dalam perhitungan PDB, mengalami pertumbuhan meski masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu. Realisasi penyerapan ketiga jenis belanja tersebut terhadap target APBN-P juga mencatatkan penurunan dibandingkan tahun lalu. Lebih rendahnya penyerapan belanja pegawai dari targetnya disebabkan oleh moratorium CPNS yang telah



dilaksanakan selama 16 bulan dan berakhir pada 31 Desember 2012. Sementara itu, lebih rendahnya penyerapan belanja barang terutama disebabkan oleh keberhasilan program optimalisasi dan efisiensi, khususnya dalam perjalanan dinas. Realisasi komponen konsumsi pemerintah pusat lain dalam perhitungan PDB, yaitu belanja lain, secara nominal maupun penyerapan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2011. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terealisasinya berbagai program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) seiring pilihan Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan subsidi BBM.

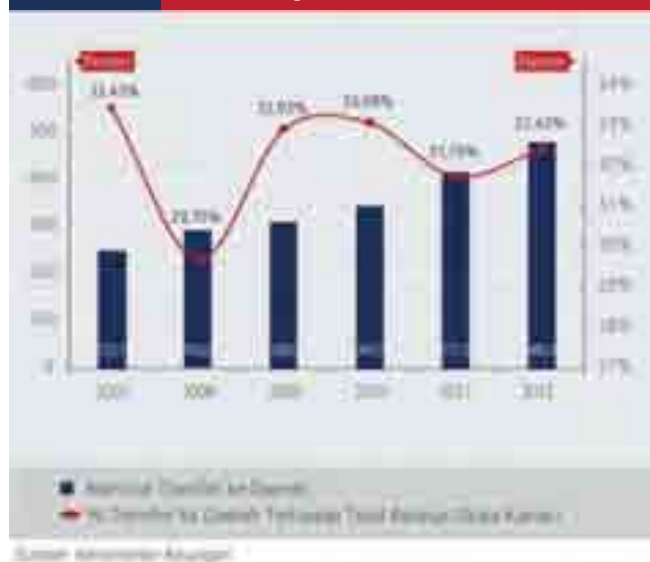
Dari sisi pembayaran bunga utang, realisasi yang lebih rendah dari pagu disebabkan penurunan rata-rata suku bunga SBN, yang terkait dengan perolehan predikat *investment grade* yang telah diperoleh Indonesia dari Fitch, Moody's dan R&I pada tahun 2011 dan 2012. Realisasi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan berada di bawah prakiraan asumsi makro APBN-P yaitu hanya 3,2% (Tabel 7.1).

Belanja Pemda

Komponen belanja negara yang meningkat paling signifikan pada tahun 2012 adalah transfer ke daerah. realisasi transfer ke daerah meningkat dari 31,8% pada tahun 2011 menjadi 32,4% dari total belanja, mempertegas arah peningkatan perimbangan alokasi anggaran kepada daerah, sejalan dengan semangat kebijakan otonomi daerah⁴ (Grafik 7.6). Kenaikan transfer khususnya terjadi untuk kawasan Jawa dan KTI. Kenaikan alokasi transfer tersebut didorong oleh adanya pemekaran struktur organisasi dan peningkatan program pembangunan serta pendapatan SDA di daerah.

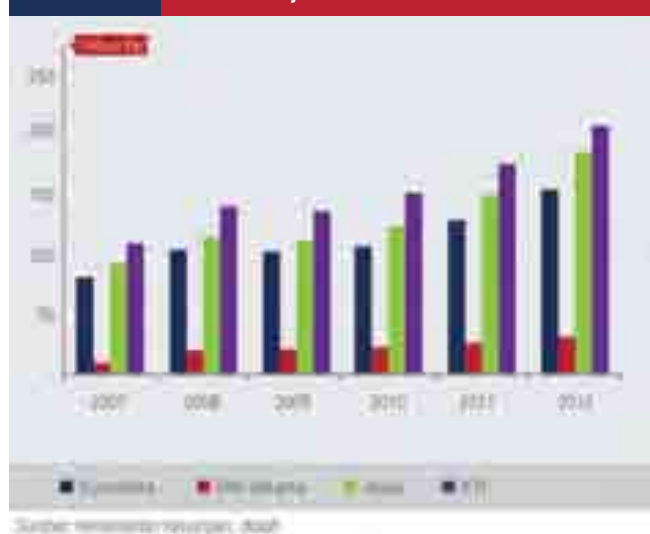
4 Kebijakan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU No. 25/1999 tentang Fiskal Desentralisasi merupakan salah satu cara mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah dan ketimpangan antar daerah.

Grafik 7.6 Perkembangan Transfer ke Daerah



Transfer ke daerah, khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki peran yang semakin besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, peningkatan DAU tersebut lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Pada tahun 2012, secara rata-rata alokasi belanja pegawai di daerah mencapai 40,7% dari APBD. Di beberapa daerah tertentu bahkan belanja pegawai memiliki alokasi yang sangat besar terhadap keseluruhan belanja (hampir mencapai 60%). Dibandingkan dengan total belanja, pangsa belanja pegawai menunjukkan peningkatan di seluruh wilayah (Grafik 7.7). Sebaliknya, pangsa belanja modal dalam

Grafik 7.7 Pangsa Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja



APBD relatif rendah dan tidak banyak mengalami perubahan, bahkan di sebagian besar wilayah justru cenderung menurun. Hanya sebagian wilayah Kalimantan dan Jakarta yang menganggarkan belanja modal hingga 30% dari APBD pada tahun 2012 (Grafik 7.8).

Merujuk pada kajian Bank Indonesia di 2012⁵, besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja pegawai memiliki hubungan yang positif dengan kenaikan pendapatan perkapita walaupun dengan level korelasi yang kecil. Hal itu ditunjukkan oleh pola sebaran alokasi DAU yang terkonsentrasi di sejumlah daerah yang memiliki pangsa alokasi belanja pegawai yang besar, meskipun tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita di daerah tersebut. Bahkan terdapat daerah yang menerima alokasi DAU cukup besar namun relatif tidak mengalami kenaikan pendapatan perkapita. Selain DAU, faktor urbanisasi dan aglomerasi (interaksi antar daerah) juga signifikan memengaruhi kegiatan ekonomi daerah.

Selain karena kenaikan alokasi transfer ke daerah, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turut

menyebabkan kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah terjadi di seluruh kawasan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspansi PAD dari pajak dan retribusi. PAD yang meningkat terutama terjadi di kawasan Jawa dan KTI, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah didukung oleh sektor utama kawasan. Di kawasan Jawa, peningkatan pajak dan retribusi berasal dari sektor konstruksi, sektor pengangkutan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Selain itu, kuatnya konsumsi rumah tangga juga mendukung penerimaan pajak di kawasan Jawa, terutama dari penjualan kendaraan bermotor. Adapun di KTI, penerimaan pajak dan retribusi didorong oleh laju pertumbuhan sektor pertambangan (Grafik 7.9).

Secara total, realisasi belanja daerah pada tahun 2012 mengalami sedikit perbaikan didukung oleh upaya percepatan penyerapan anggaran yang dikordinasikan oleh tim dibawah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) meski masih terdapat indikasi pemanfaatan yang belum optimal. Realisasi belanja daerah pada 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah rata-rata kinerja selama lima tahun terakhir. Hal ini tampak dari penurunan rasio posisi mutasi rekening pemda di bank umum dibandingkan dengan realisasi transfer

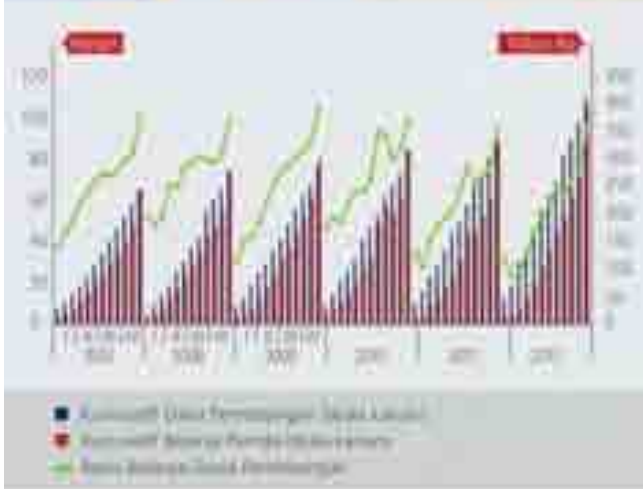
5 Kajian Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Grup Riset Ekonomi Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2012.

Grafik 7.8 Pangsa Belanja Modal Terhadap Total Belanja



Grafik 7.9 PAD per Kawasan





ke daerah meski saldo rekening pemda di bank umum masih terus meningkat. Saldo total rekening Pemerintah Daerah di bank umum pada akhir Desember 2012 mencapai Rp99 triliun, atau naik Rp18,7 triliun dari posisi akhir tahun 2011. Dengan transfer ke daerah yang telah terealisasi sebesar Rp411,1 triliun, maka dana dari Pemerintah Pusat yang belum digunakan oleh Pemda di bank umum per Desember 2012 hanya sebesar 4,6%, turun dari posisi tahun 2011 sebesar 5,3%. Rasio belanja pemda terhadap dana perimbangan mencapai 95,4%, lebih tinggi dari posisi Desember tahun lalu sebesar 94,7% namun masih di bawah rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir sebesar 98,5% (Grafik 7.10).

Berbagai permasalahan penyerapan anggaran di daerah terutama terkait dengan mekanisme dan proses pengadaan. Sementara permasalahan pada realisasi belanja modal bersumber dari sulitnya proses pengadaan lahan dan administrasi pelaksanaan proyek. Realisasi belanja modal daerah pada tahun 2012 juga relatif lebih baik walaupun belum sepenuhnya mampu mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur publik yang dinilai strategis di daerah.

Realisasi defisit tahun 2012 berada di bawah target APBN-P, namun untuk pertama kalinya keseimbangan primer telah mencapai posisi negatif. Meski realisasi defisit tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, namun capaian defisit sebesar 1,8% PDB masih tergolong moderat. Peningkatan defisit lebih disebabkan oleh capaian penerimaan yang berada di bawah target APBN-P dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang melampaui target APBN-P. Berdasarkan data historis, realisasi defisit cenderung berada di bawah target. Dengan capaian defisit hanya sebesar 76,8% dari target dan capaian pembiayaan sebesar 94,7% dari target, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp34 triliun.

Perlu dicermati bahwa untuk pertama kalinya, keseimbangan primer mencatatkan posisi negatif. Keseimbangan primer adalah rasio yang hanya menggambarkan upaya fiskal pada periode tersebut karena keseimbangan primer mengeluarkan biaya bunga yang besarnya ditentukan oleh kebijakan fiskal pada periode-periode lalu. Di tengah rasio utang terhadap PDB yang masih moderat, keseimbangan primer yang negatif menggambarkan bahwa penerimaan tahunan pemerintah tidak mampu membiayai belanja murni di tahun 2012 dan memberikan sinyal perlunya kewaspadaan akan kesinambungan fiskal.

Capaian pembiayaan dalam negeri tercatat di atas target, yaitu sebesar 102,4%, sementara realisasi pembayaran pembiayaan luar negeri jauh melampaui target yaitu sebesar 431,6%. Sepanjang tahun 2012, Pemerintah melakukan pembayaran pokok utang luar negeri sebesar Rp51,2 triliun atau 102,9% dari target Rp49,7 triliun, sementara penarikan pinjaman luar negeri baru (bruto) hanya sebesar Rp34,2 triliun atau 63,6% dari target. Dari capaian tersebut, tampaknya Pemerintah cenderung menitikberatkan penggunaan

pembiayaan dari dalam negeri yang relatif lebih bebas dari risiko nilai tukar (Grafik 7.11).

Secara keseluruhan, penerbitan SBN sampai dengan Desember 2012 telah mencapai 96,3% dari target bruto penerbitan SBN, sedikit lebih rendah dibandingkan penerbitan tahun 2011 yang mencapai 96,9%. Namun, capaian penerbitan SBN dari target neto APBN-P telah sedikit terlampaui, yaitu telah mencapai 100,1% dan lebih tinggi dari capaian target neto tahun 2011 sebesar 94,6%. Hal tersebut seiring dengan capaian defisit APBN-P 2012 yang lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit tahun 2011. Secara keseluruhan pada tahun 2012, Pemerintah memperoleh Rp212,9 triliun, atau 76% dari SBN domestik, dan Rp55,9 triliun dari SBN global, atau sebesar 24% dari total SBN. Sebagaimana periode-periode sebelumnya, Pemerintah masih melakukan strategi *front loading* untuk mengantisipasi pembiayaan belanja di awal tahun di tengah masih minimnya penerimaan.

Antusiasme investor domestik dan global terhadap SBN masih tinggi yang tampak dari total *bid to cover ratio* yang mencapai 2,4 kali, meski turun dibandingkan dengan rasio tahun 2011 sebesar 2,8 kali. Pasar domestik yang kondusif serta peringkat kredit Indonesia yang membaik menyebabkan imbal

hasil SBN domestik dan global pada tahun 2012 relatif stabil dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2011. Imbal hasil rata-rata tertimbang SPN 3 bulan mencapai 3,2% sementara imbal hasil SUN rata-rata mengalami penurunan (Grafik 7.12). Penerbitan *Samurai Bonds*⁶ dan sukuk global⁷ pada tahun 2012 terbilang sukses dan lebih baik dari lelang sejenis sebelumnya. Dari *Samurai Bonds* tersebut Pemerintah memperoleh pembiayaan sebesar 60 miliar yen atau sekitar Rp7,2 triliun. Situasi yang kondusif juga terjadi pada lelang sukuk global dengan *bid to cover ratio* mencapai 5,3 kali dan imbal hasil lebih rendah dari prakiraan awal.

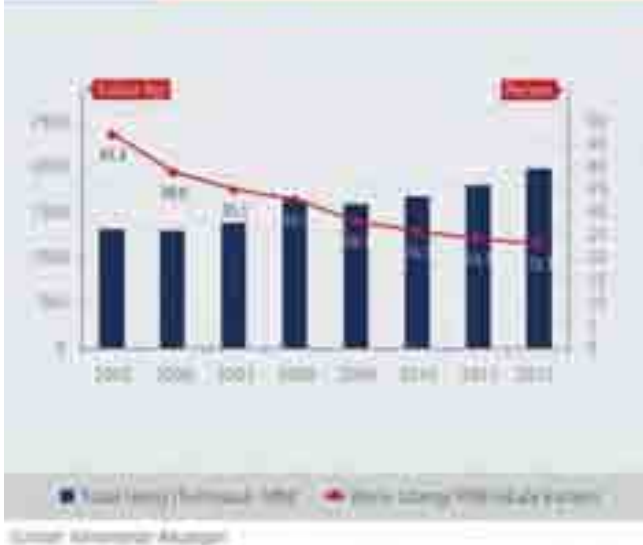
Dengan kondisi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,3%, meskipun jumlah utang meningkat dari Rp1.809 triliun menjadi Rp1.991 triliun. Penurunan rasio ini menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi yang masih lebih besar

6 Berjangka waktu 10 tahun dan diterbitkan dengan format *private placement* dengan garansi dari Japan Bank for International Corporation (JBIC). Penerbitan *Samurai Bonds* sebelumnya dilakukan pada November 2010.

7 Berjangka waktu 10 tahun dan merupakan penerbitan sukuk internasional ketiga sejak 2009. Penerbitan sukuk global terakhir dilakukan pada November 2011.



Grafik 7.13 Perkembangan Utang Pemerintah



dibandingkan peningkatan utang pemerintah atau menyiratkan tingkat kesinambungan fiskal yang masih terjaga (Grafik 7.13).

Dampak Terhadap Moneter

Operasi keuangan pemerintah menunjukkan peningkatan ekspansi yang terutama terjadi pada akhir tahun 2012. Selama tahun 2012, kegiatan Pemerintah memberikan tambahan likuiditas rupiah ke perbankan sebesar Rp241,3 triliun. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan ekspansi tahun 2011 sebesar Rp177,9 triliun, sejalan dengan peningkatan jumlah defisit Pemerintah (Grafik 7.14). Berbeda dengan tahun 2011 ketika ekspansi baru terjadi pada triwulan III 2012, pada tahun 2012 ekspansi rupiah Pemerintah telah terjadi sejak triwulan II. Hal ini mengindikasikan kemajuan upaya percepatan belanja yang telah dijalankan Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ekspansi terutama bersumber dari pembayaran termin proyek, subsidi BBM serta transfer DBH. Ekspansi tersebut berdampak pada penurunan posisi rekening pemerintah pusat di Bank Indonesia yang turun menjadi Rp51,7 triliun dari akhir tahun sebelumnya sebesar Rp89,6 triliun (Grafik 7.15).

Grafik 7.14 Perbandingan Rasio Keseimbangan Primer Terhadap PDB Beberapa Negara Berkembang



Grafik 7.15 Perkembangan Rekening Pemerintah Pusat di BI



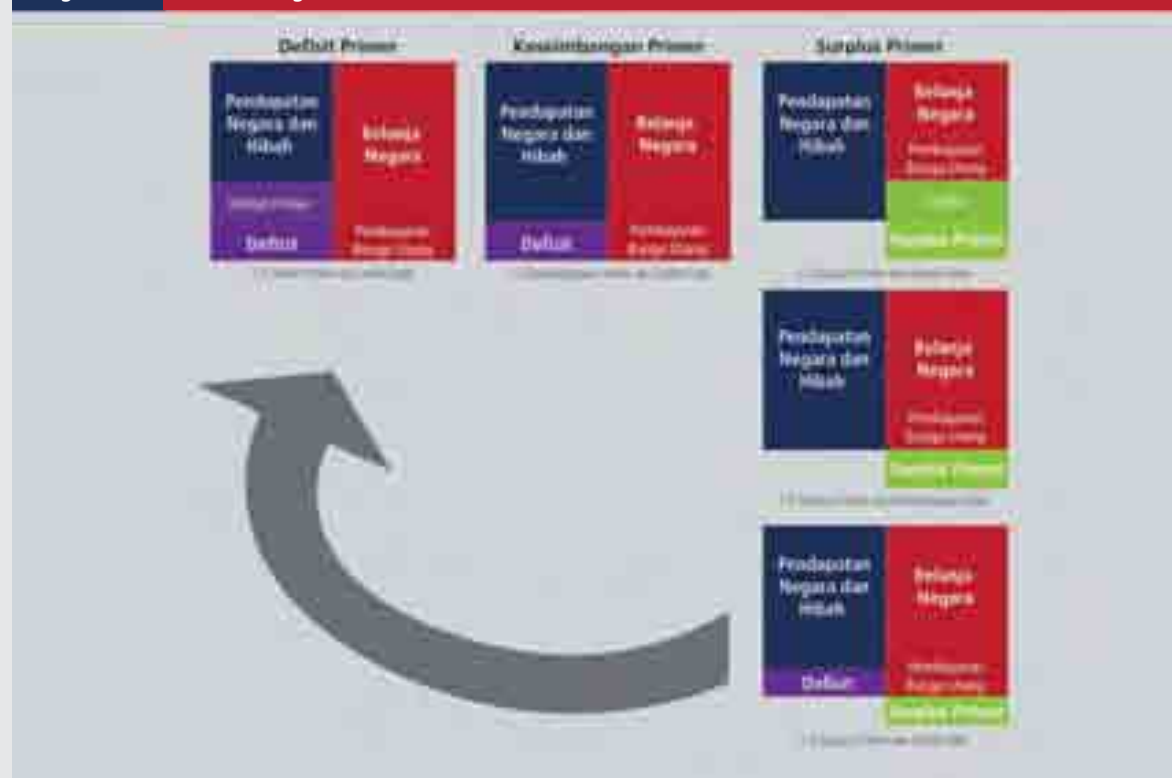
Sejak tahun 2001 struktur APBN beralih dari *T-account*, yang menggunakan prinsip anggaran berimbang dinamis, menjadi *I-account* sesuai Government Financial Statistics Manual (GFSM) yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2001¹. Perubahan ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mempermudah analisis APBN, dan mempermudah komparasi anggaran dengan negara lain. Sebelumnya, prinsip yang digunakan dalam APBN adalah anggaran berimbang dinamis dengan jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara karena sisi pengeluaran memasukkan juga unsur pembiayaan anggaran. Format dan struktur I-account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan hibah,

(ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan. Format tersebut menekankan hasil akhir berupa surplus atau defisit anggaran yang di dalamnya mencakup keseimbangan primer.

Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja selain pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam membayar belanja dari kebijakan dalam tahun anggaran yang sama. Keseimbangan primer menghitung nilai bersih aliran uang Pemerintah dengan mengeluarkan unsur pembayaran bunga utang yang besarnya tergantung dari posisi utang, yang merupakan kebijakan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Defisit primer menggambarkan bahwa untuk memenuhi pembayaran bunga utang, Pemerintah harus mengeluarkan utang baru atau menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

1 Tahun 2000 adalah tahun peralihan struktur dan periodisasi tahun anggaran dari Maret s.d. April menjadi Januari sampai dengan Desember.

Diagram 1 Keseimbangan Primer



Keseimbangan primer yang negatif atau mengalami defisit akan diikuti oleh defisit total (Diagram 1). Selama Pemerintah menggunakan I-account sejak tahun 2001, operasi keuangan pemerintah untuk pertama kalinya mengalami defisit primer pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Pemerintah dalam APBN selalu menganggarkan keseimbangan primer yang defisit, meskipun sampai dengan tahun 2011 realisasinya masih menunjukkan surplus keseimbangan primer, di tengah total anggaran yang mencatat defisit (Diagram 1.5). Pada tahun 2012, realisasi anggaran pemerintah beralih dari surplus primer menjadi defisit primer.

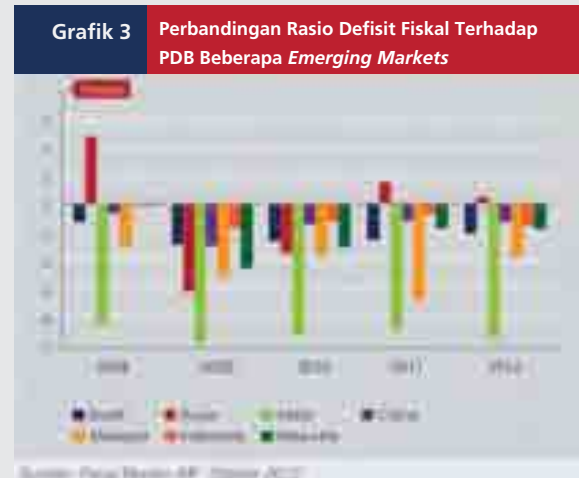
Berdasarkan data historis, realisasi defisit keuangan pemerintah cenderung berada di bawah target. Realisasi defisit keuangan pemerintah tahun 2012 kembali berada di bawah target APBN-P, meskipun untuk pertama kalinya keseimbangan primer mencatat defisit. Terjadinya defisit keseimbangan primer tersebut merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Di satu sisi, pendapatan negara pada tahun 2012 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P. Hal tersebut diakibatkan oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2012. Di sisi lain, belanja negara untuk subsidi BBM yang terus mengalami peningkatan menyebabkan realisasi subsidi jauh melampaui pagu subsidi dalam APBN-P 2012, meskipun total realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan pagu belanja pada APBN-P 2012 (Grafik 1 dan 2).



Meskipun keseimbangan primer mengalami defisit, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2012 masih terus menurun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 23,3%, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan rasio ini menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi yang masih lebih besar dibandingkan dengan peningkatan utang pemerintah sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat kesinambungan fiskal yang masih tetap terjaga (Grafik 7.13). Apabila dibandingkan dengan beberapa negara-negara *emerging market*,

kondisi keuangan pemerintah relatif cukup baik. Realisasi defisit fiskal tahun 2012 sebesar 1,8% PDB masih tergolong moderat, demikian pula dengan defisit keseimbangan primer Indonesia¹ (Grafik 3).

1 Data yang digunakan berasal dari *Fiscal Monitor* yang terbit pada Oktober 2012. Data tahun 2012 masih merupakan prakiraan IMF. PDB yang digunakan adalah PDB dengan *Purchasing Power Parity* (PPP).



Bab 8

Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran





BAN

Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran



Stabilitas sistem keuangan di tahun 2012 tetap terjaga, di tengah perlambatan ekonomi global. Sektor perbankan mampu mempertahankan kinerja positif yang tercermin pada ketahanan dalam menghadapi krisis global, peningkatan fungsi intermediasi, dan perbaikan efisiensi. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank menunjukkan kinerja yang semakin membaik, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan aset dan investasi yang meningkat. Secara lebih luas, peran lembaga keuangan bukan bank sebagai pengelola portofolio dan pengembang produk keuangan turut berkontribusi positif dalam mendorong pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, sistem pembayaran menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta memperlancar aktivitas ekonomi nasional. Dukungan itu dimungkinkan oleh adanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal, serta tersedianya uang kartal dalam masyarakat.



8.1 Kinerja Perbankan

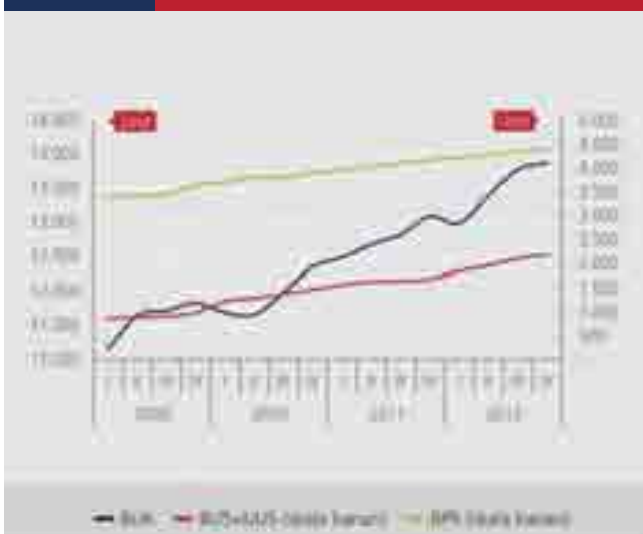
Upaya perbankan untuk mempertahankan kinerja positif selama tahun 2012 menghadapi tantangan yang tidak mudah. Gejolak perekonomian global yang masih berlanjut serta upaya pemulihan yang berjalan lambat berdampak terhadap kinerja perekonomian domestik. Meskipun demikian, perbankan nasional masih mampu mempertahankan kinerja positif, yang antara lain dapat dilihat dari aspek

kelembagaan, fungsi intermediasi, profitabilitas, struktur permodalan, dan pendanaan.

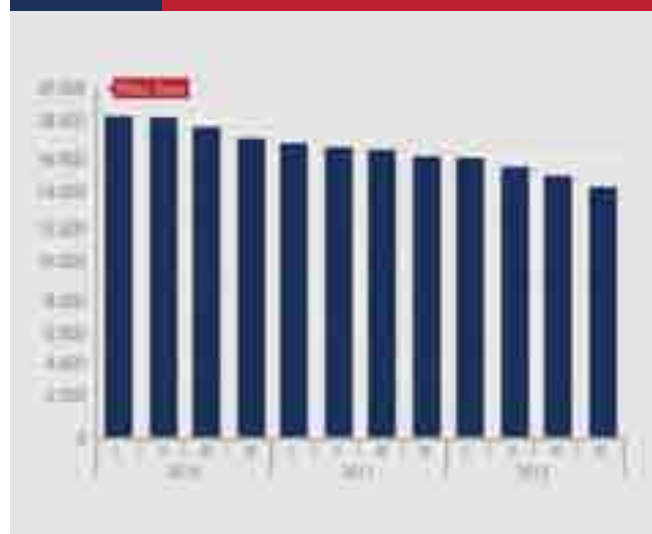
Dari sisi kelembagaan, jumlah bank umum relatif tidak berubah dibandingkan dengan periode 2011 (Grafik 8.1), yaitu sebanyak 120 bank, yang terdiri dari 109 bank konvensional (termasuk 24 unit usaha syariah - UUS) dan 11 bank syariah. Jika dilihat dari jumlah kantor, terdapat 16.625 kantor bank yang terdiri dari 14.343 kantor bank umum konvensional (BUK) dan 2.262 kantor bank umum syariah (BUS). Sementara itu, jumlah BPR mencapai 1.653 bank dengan jumlah kantor mencapai 4.425 kantor. Jika dilihat berdasarkan pola penyebarannya, sebagian besar lokasi kantor, baik bank umum maupun BPR, masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Sebanyak 74% kantor bank umum berada di wilayah Jawa dan Sumatera dan 26,0% kantor bank umum berada di luar Jawa dan Sumatera. Mayoritas BPR, dengan jumlah kantor yang mencapai 3.821 unit, tersebar di wilayah Jawa dan Bali.

Perkembangan jumlah kantor tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan perluasan akses masyarakat terhadap sistem keuangan (*financial inclusion*). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan yaitu rasio antara jumlah kantor bank terhadap jumlah penduduk (*density ratio*). Dari tahun 2010

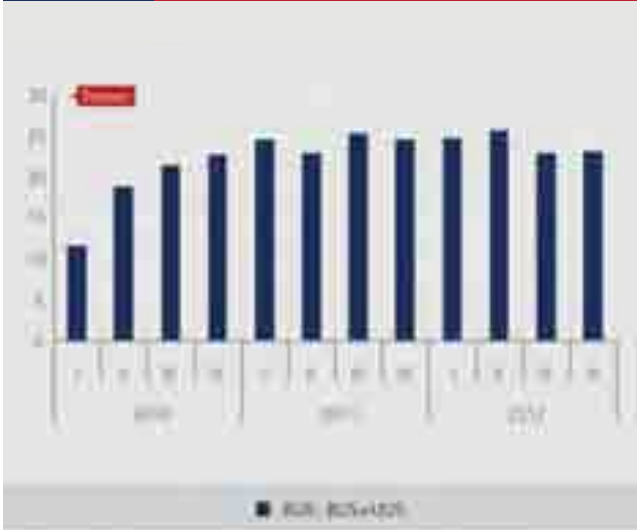
Grafik 8.1 Jumlah Kantor Bank Tahun 2009 – 2012



Grafik 8.2 Rasio Densitas



Grafik 8.3 Perkembangan Kredit Tahun 2009 – 2012

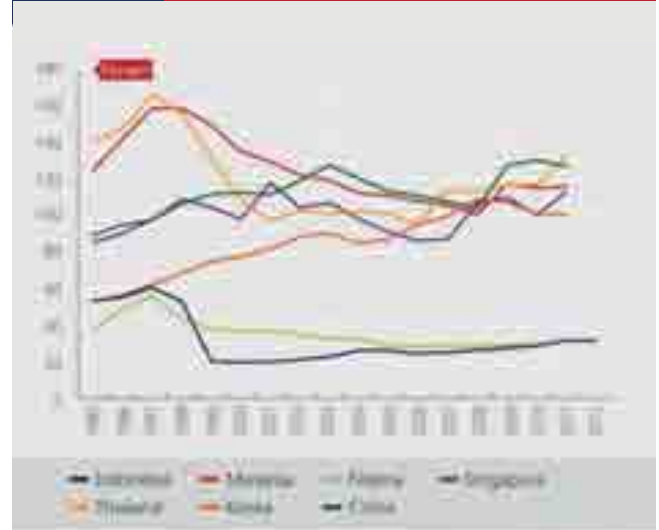


sampai dengan tahun 2012, *density ratio* perbankan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Jika selama tahun 2010 satu kantor bank melayani 17.174 orang, maka jumlah tersebut menurun menjadi 16.060 pada tahun 2011 dan menjadi 14.294 orang pada 2012 (Grafik 8.2)

Secara umum, fungsi intermediasi perbankan masih menunjukkan peningkatan dan dapat dipertahankan pada level yang aman untuk perekonomian. Selama tahun 2012, penyaluran kredit perbankan mencapai 23,1% atau sebesar Rp507,8 triliun, relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar 24,6% atau sebesar Rp434,3 triliun (Grafik 8.3). Perlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan kredit di sektor konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor dan penurunan kinerja korporasi domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian dalam penyelesaian krisis global. Selain itu, penurunan likuiditas perbankan yang disertai dengan proses revitalisasi kredit juga mendorong tren perlambatan tersebut.

Meski tumbuh cukup tinggi, jika dilihat secara agregat, ekspansi kredit secara nasional masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Rasio kredit terhadap PDB Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand,

Grafik 8.4 Perbandingan Kredit per PDB



Korea dan China (Grafik 8.4). Namun, sejak tahun 1999, rasio tersebut terus menunjukkan peningkatan, dari 20,6% (1999) menjadi sekitar 32% (2012). Gambaran tersebut menunjukkan peran kredit dalam pembiayaan pembangunan yang masih relatif kecil.

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, penyaluran kredit ke sektor produktif masih tetap dominan, sementara kredit konsumsi (KK) cenderung menurun (Grafik 8.5). Kredit modal kerja (KMK) tumbuh 23,2% dibandingkan dengan 21,4% pada tahun sebelumnya. Kredit investasi (KI) dan KK mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011, masing-masing sebesar 27,4% dibandingkan dengan 33,2% dan sebesar 20,0% dari sebelumnya sebesar 24,1%. Jika dilihat secara sektoral, seluruh sektor produktif tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2011. Namun, beberapa sektor ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti sektor pertambangan, jasa sosial, lainnya, listrik, dan jasa dunia usaha. Sementara itu, penurunan pertumbuhan KK terkait dengan mulai efektifnya kebijakan LTV dan DP sejak Juni 2012.

Sejalan dengan perbankan konvensional, fokus pembiayaan perbankan syariah ke sektor produktif mulai menunjukkan hasil. Hal tersebut antara lain merupakan dampak dari kebijakan pengenaan

Grafik 8.5 Pertumbuhan Kredit KI, KMK dan KK



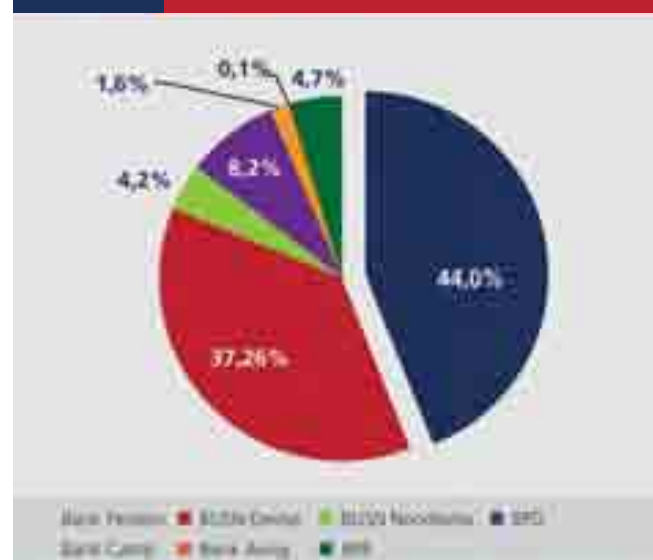
disinsentif terhadap pembiayaan konsumsi seperti pembatasan gadai emas¹ yang menetapkan batas maksimal plafon per nasabah dan frekuensi perpanjangan pembiayaan. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari melambatnya pertumbuhan pembiayaan ke sektor konsumsi (jasa dunia usaha, jasa sosial, dan sektor konsumsi lainnya) sebesar 6,1%.

Sementara itu, realisasi kredit Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) selama tahun 2012 mencapai Rp552,2 triliun atau meningkat Rp72,3 triliun dari Desember 2011 (Rp479,9 triliun) dengan ekspansi kredit neto UMKM mencapai 47,9% dari Rencana Bisnis Bank tahun 2012 sebesar Rp151 triliun. Kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 19,9%, didominasi oleh kredit kepada usaha menengah diikuti oleh usaha kecil dan mikro masing-masing sebesar 48,6%, 30,8%, dan 20,6%. Pemberian kredit UMKM sebagian besar, yaitu 66,6%, disalurkan ke sektor perdagangan, industri pengolahan, serta pertanian, perburuan, dan kehutanan. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 15,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 18,4% (yoy). Perlambatan tersebut antara lain disebabkan proses

penyesuaian data yang masih berlangsung dalam rangka pemenuhan kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM. Di samping itu, proses reklasifikasi terkait dengan upaya penajaman kriteria dengan tidak memasukkan KK sebagai bagian dari kredit UMKM juga berdampak kepada pencatatan kredit UMKM secara statistik. Berdasarkan sumbernya penyaluran kredit UMKM oleh kelompok bank persero masih dominan dengan porsi hingga 44% dari total kredit UMKM (Grafik 8.6).

Selama tahun 2012, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar Rp33,5 triliun (berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian) atau mencapai 111,6% dari target tahun 2012 sebesar Rp30 triliun dengan realisasi KUR oleh bank pelaksana mencapai Rp96,9 triliun. Posisi KUR berdasarkan data LBU tercatat sebesar Rp39,8 triliun, meningkat Rp10,3 triliun (34,8%) dari posisi Desember 2011 sebesar Rp29,5 triliun. Secara geografis, penyaluran KUR masih terpusat di wilayah Jawa (48,7%), Sumatera (22,6%), Kalimantan (10,1%), Sulawesi (11,2%), Bali (4,6%) dan Papua-Maluku (2,8%). Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR masih didominasi sektor perdagangan mencapai 51,19%, sementara penyaluran ke sektor pertanian termasuk perikanan hanya mencapai 19,21%.

Grafik 8.6 Porsi Kredit UMKM



1 Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Upaya perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit berkontribusi positif terhadap peningkatan laba perbankan. Selama tahun 2012, perbankan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp92,8 triliun atau meningkat 23,7% dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp 75,1 triliun. Jika dilihat lebih jauh, ekspansi kredit perbankan berperan besar dalam menjaga tren positif peningkatan laba operasional. Pangsa pendapatan bunga yang bersumber dari kredit mencapai 51,9% dari total pendapatan bank umum, diikuti oleh pendapatan operasional nonbunga sebesar 23,3% (terutama deviden, keuntungan penyertaan *equity method*, komisi/provisi/fee) (Grafik 8.7). Sementara itu, kinerja perbankan syariah dan BPR menunjukkan gambaran yang tidak jauh berbeda. Jika dilihat dari komposisi pendapatan, sebagian besar pendapatan perbankan syariah dan BPR juga berasal dari pembiayaan atau penyaluran kredit. Kondisi ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Peningkatan laba perbankan tidak saja bersumber dari pendapatan bunga kredit atau margin pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur suku bunga. Rata-rata suku bunga kredit menurun 68 bps dibandingkan dengan tahun 2011, menjadi sebesar 12,1%. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mulai berlaku sejak Maret 2011. Sejalan dengan itu, *Net Interest Margin* (NIM) menurun dari 5,9% menjadi 5,5% (Grafik 8.8). Penurunan NIM perbankan tidak serta merta berdampak pada turunnya tingkat profitabilitas. Hal ini tercermin dari *Net Interest Income* (NII) yang masih meningkat. Penurunan suku bunga kredit yang diimbangi dengan peningkatan penyaluran kredit menyebabkan NII secara rata-rata meningkat dari Rp14,9 triliun (Desember 2011) menjadi Rp17,3 triliun.

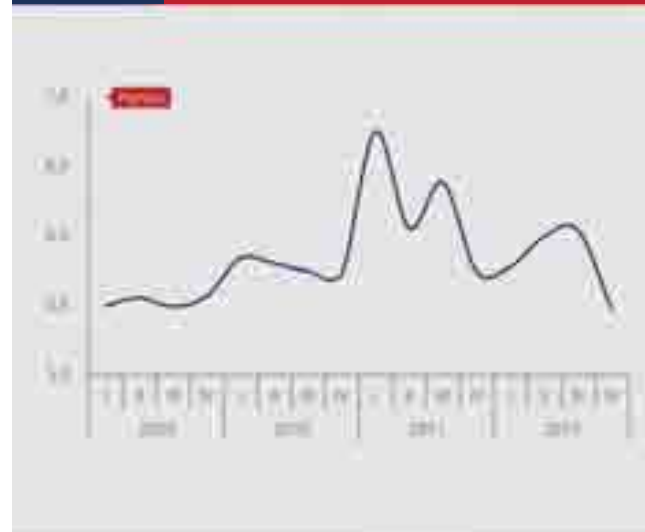
Peningkatan di sisi pendapatan juga dipengaruhi oleh perbaikan efisiensi yang tercermin dari struktur biaya operasional perbankan. Selama tahun 2012, BUK mampu menurunkan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional menjadi 74,1%.

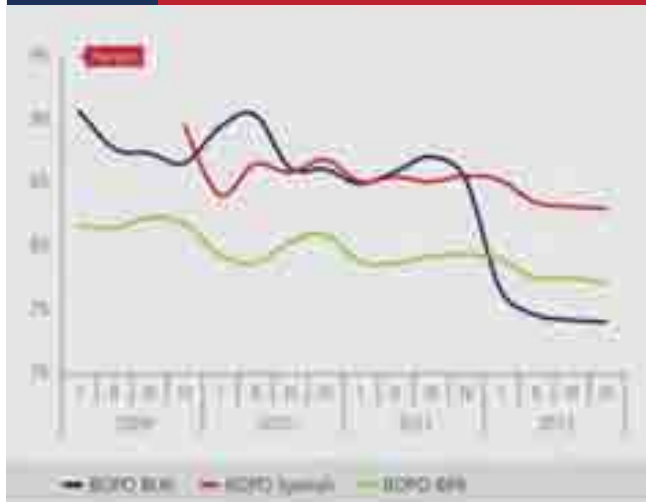
Grafik 8.7 Komposisi Pendapatan Perbankan



Penurunan rasio tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan operasional dan penurunan biaya operasional. Rata-rata pendapatan operasional per bulan meningkat 14,4% dari Rp31,6 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp36,1 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 23,1%. Sementara itu, rata-rata biaya operasional per bulan turun dari Rp27 triliun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp26,8 triliun yang bersumber dari peningkatan efisiensi di beberapa aspek operasional di antaranya biaya *overhead*. Upaya peningkatan efisiensi juga terlihat di perbankan syariah dan BPR. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan

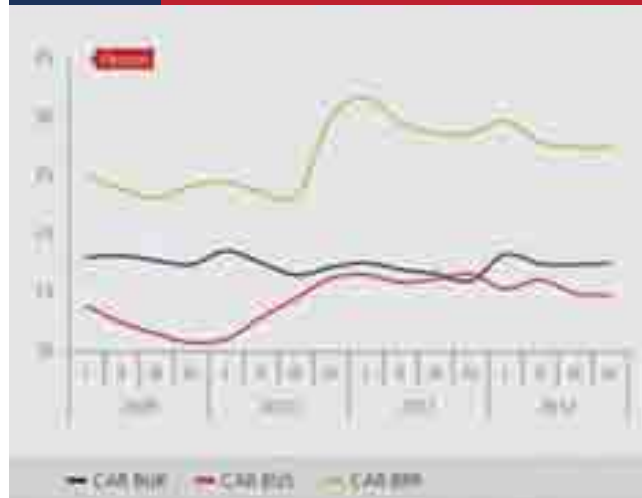
Grafik 8.8 NIM BU Konvensional Tahun 2009 – 2012



Grafik 8.9 Rasio BOPO Perbankan Tahun 2009 – 2012

operasional perbankan syariah (BUS+UUS) dan BPR menunjukkan tren penurunan yaitu dari 85,6% dan 79,5% di tahun 2011 menjadi 82,5% dan 77,8% (Grafik 8.9). Perbaikan tersebut terutama bersumber dari penurunan biaya *overhead*. Meskipun membaik, Bank Indonesia akan terus mendorong peningkatan efisiensi dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan nasional.

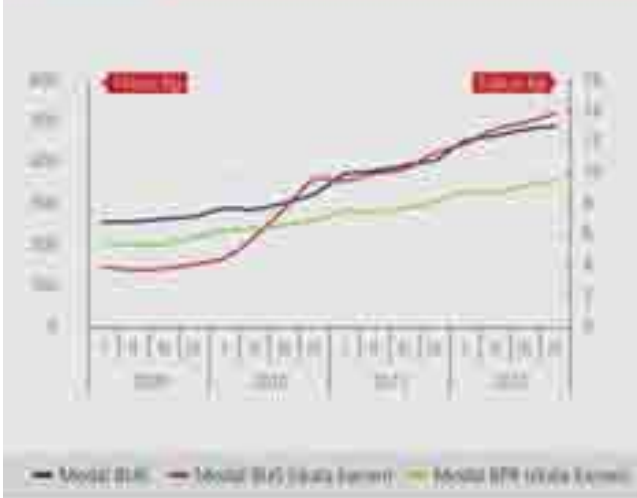
Dari sisi permodalan, modal BUK selama tahun laporan tercatat sebesar Rp500,1 triliun dengan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi sebesar 17,4%. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan adanya penambahan modal sebesar Rp91,9 triliun terutama dari kelompok bank persero. Sementara itu, tingkat permodalan BUS dan BPR masing-masing mencapai Rp13,9 triliun dan Rp9,5 miliar dengan rata-rata CAR masing-masing sebesar 14,1% dan 27,6% (Grafik 8.10). Jika dilihat berdasarkan strukturnya, permodalan bank (BUK dan BUS) yang bersumber dari ekuitas (Tier 1) mencapai Rp444,5 triliun atau mencakup 89,5%, sementara komponen modal lainnya (Tier 2) mencapai Rp52,1 triliun atau sebesar 10,5% (Grafik 8.11). Struktur permodalan dengan komponen modal inti yang lebih kuat sekaligus mengindikasikan ketahanan bank dalam menyerap risiko yang muncul dari kegiatan usaha atau perubahan lingkungan bisnis bank. Level

Grafik 8.10 Perkembangan CAR Tahun 2009 – 2012

permodalan yang cukup tinggi tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat ketahanan perbankan melalui penguatan permodalan. Selain kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga berupaya agar bank selalu menjaga kecukupan modal pada tingkat yang aman sekaligus mendorong industri perbankan nasional agar mampu memenuhi standar internasional sebagaimana diatur dalam dokumen *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*.

Selain dari aspek profitabilitas dan permodalan, kinerja perbankan juga dapat diukur dari kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat. Fungsi tradisional ini menjadi tolok ukur terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Kinerja perbankan dalam menghimpun dana masyarakat menunjukkan peningkatan. Sebagaimana periode sebelumnya, sumber dana bank umum masih didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 91%, diikuti oleh antarbank sebesar 3,5% dan komponen pendanaan lainnya sebesar 5,4%. Dari persentase DPK tersebut, sebesar 94,2% merupakan kontribusi perbankan konvensional, sementara sebesar 4,5% dan 1,3% merupakan kontribusi perbankan syariah dan BPR. Jika melihat pada

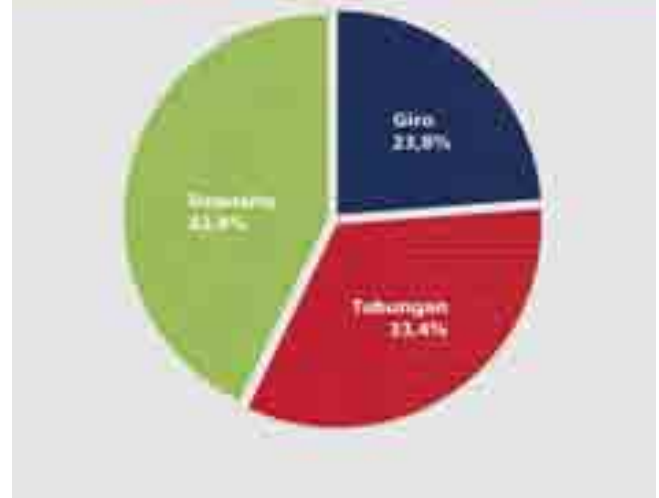
Grafik 8.11 Perkembangan Modal Tahun 2009 – 2012



struktur DPK bank umum (BUK dan BUS), deposito masih mendominasi dana simpanan masyarakat yang mencapai Rp1.381,3 triliun atau 42,8% diikuti oleh tabungan sebesar Rp1.078,8 triliun atau 33,4% dan giro sebesar Rp767,1 triliun atau 23,8% (Grafik 8.12). Dari sisi penguasaan, dari total DPK bank umum yang mencapai RpRp3.225,2 triliun, penguasaan DPK oleh 14 bank besar mencapai 71,8%.

Dari jumlah DPK yang mencapai Rp3.225,2 triliun, komposisi terbesar DPK berasal dari kelompok perorangan dengan porsi mencapai 57% disusul oleh perusahaan swasta lainnya. Secara tahunan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada golongan bukan penduduk yaitu pemerintah pusat (47%) dan swasta lainnya (31,6%). Penurunan DPK terbesar terjadi pada golongan swasta lainnya (25,2%). Secara keseluruhan, DPK yang berasal dari golongan pemerintah terindikasi meningkat diikuti oleh golongan swasta meski sempat menurun pada pertengahan tahun 2012 (Grafik 8.13). Dari sisi pertumbuhan tahunan, tabungan mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 20% diikuti oleh giro dan deposito masing-masing sebesar 17% dan 15,5% pada perbankan konvensional. Sementara itu, di perbankan Syariah (BUS+UUS), giro mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 47,5% disusul oleh tabungan dan deposito masing-masing sebesar 38,3% dan 19,7%. Tingginya

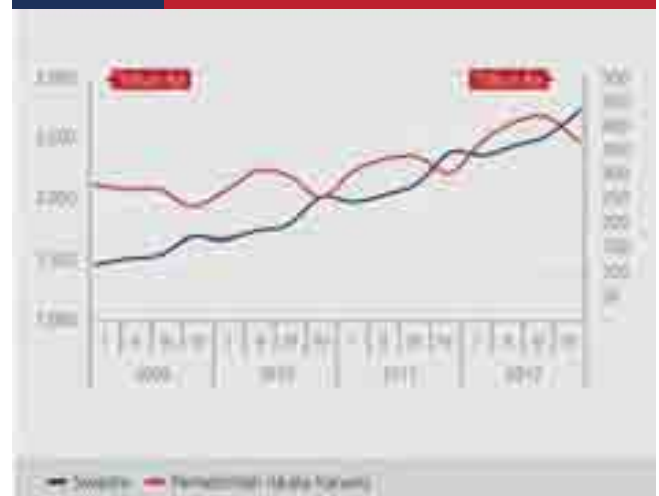
Grafik 8.12 Perkembangan Struktur DPK Tahun 2009 – 2012



pertumbuhan DPK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator peningkatan akses masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan yang umumnya diikuti dengan meningkatnya transaksi keuangan.

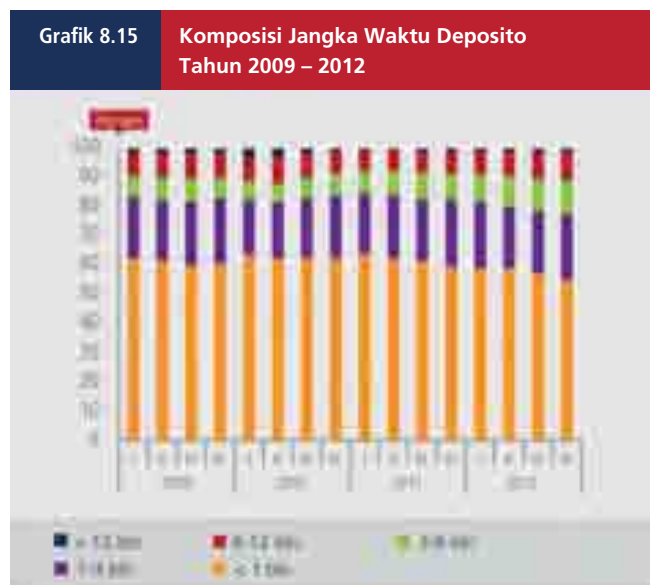
Perkembangan jumlah rekening simpanan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur potensi dana yang dapat diinvestasikan di pasar keuangan terutama dana yang berasal dari rekening giro dan tabungan. Secara historis, rasio jumlah rekening simpanan rupiah terhadap jumlah penduduk (rasio aksesibilitas) terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar

Grafik 8.13 Perkembangan DPK Pemerintah dan Swasta



39,6% pada tahun 2010 dan 41,2% pada tahun 2011 menjadi sebesar 47,1% pada tahun 2012 (Grafik 8.14), sementara rasio jumlah rekening simpanan valuta asing tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tertinggi dialami rekening tabungan yang mengalami peningkatan rasio dari sebesar 37,5% pada tahun 2010 menjadi 38,9% dan 44,6% pada tahun 2011 dan 2012. Sementara itu, laju peningkatan rasio rekening giro dan deposito relatif kecil. Perkembangan tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan mobilisasi dana oleh perbankan dan menjadi sumber pembiayaan potensial bagi produk-produk investasi alternatif yang pada gilirannya akan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Jika dilihat dari jangka waktu, struktur pendanaan perbankan baik perbankan konvensional, syariah, maupun BPR masih didominasi oleh dana-dana jangka pendek berbasis DPK, sedangkan dana-dana jangka panjang masih bersumber dari modal dan pinjaman. Sementara itu, jika dilihat dari struktur deposito di bank umum (BUK dan BUS), jumlah terbesar dana masyarakat disimpan dalam deposito berjangka waktu 1 bulan (54,2%) diikuti oleh deposito berjangka waktu 3 bulan (23%), 6 bulan (11,6%), 12 bulan (10,1%) dan di atas 12 bulan (1,1%). Jika dibandingkan dengan tahun 2011, proporsi DPK dalam bentuk deposito tersebut mengalami pergeseran dari jangka waktu lebih pendek ke jangka waktu yang lebih panjang (Grafik 8.15).



Risiko-Risiko Perbankan

Di tengah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan aset dan menjalankan fungsi intermediasi, risiko kredit perbankan dapat dikendalikan dengan baik. Meski pertumbuhan kredit (BUK dan BUS) selama tahun 2012 mencapai 23,1% atau sebesar Rp507,8 triliun, risiko kredit secara keseluruhan cenderung menurun. Hal ini antara lain disebabkan karena perbankan melakukan proses penyaluran kredit secara selektif dengan orientasi kepada sektor-sektor produktif. Dari angka pertumbuhan tersebut, kredit perbankan konvensional mencapai 22,4%, sementara ekspansi pembiayaan dan kredit perbankan syariah (BUS+UUS) dan BPR masing-masing tercatat sebesar 43,7% dan 20,5%.

Dilihat dari aspek pemanfaatan dana masyarakat serta kualitas kredit, ekspansi kredit perbankan masih berada pada level yang aman bagi perekonomian. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan nasional yang masih berada pada kisaran 84%². Jumlah tersebut mencakup LDR BUK sebesar 83,6%, BUS+UUS sebesar 100%, dan

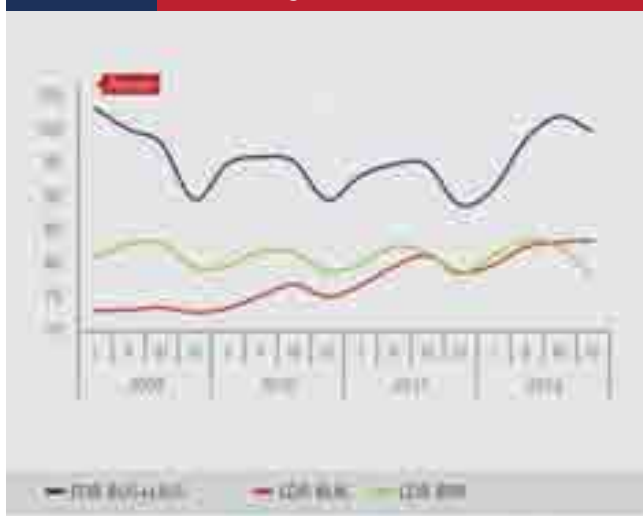


² Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Batas, bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 100%.

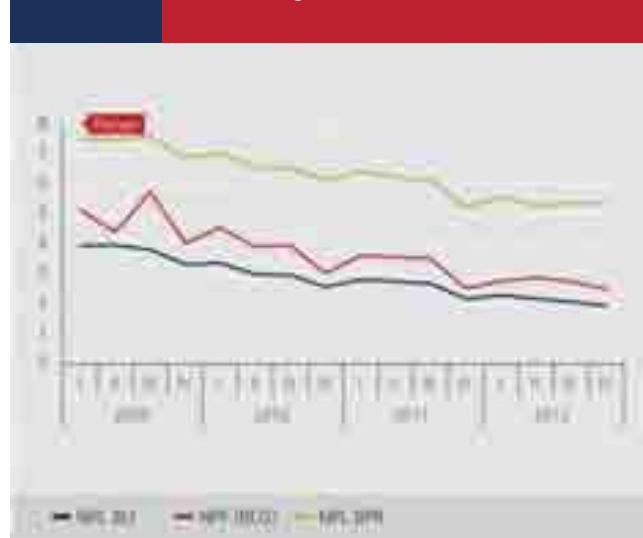
BPR sebesar 78,6% (Grafik 8.16). Sementara itu, *Non Performing Loans* (NPL) perbankan tercatat sebesar 1,9% yang merupakan rasio NPLs terendah yang pernah dialami oleh perbankan nasional. Dari jumlah tersebut, NPL perbankan konvensional tercatat sebesar 1,85% sementara NPL perbankan syariah (BUS+UUS) dan BPR tercatat sebesar 2,2% dan 4,8% (Grafik 8.17). Meski secara keseluruhan risiko yang berasal dari ekspansi kredit masih berada pada level yang aman, ancaman peningkatan risiko dari NPL perlu terus dicermati. Hal tersebut dilakukan mengingat beberapa sektor ekonomi seperti pertambangan, listrik dan konstruksi menunjukkan indikasi peningkatan pertumbuhan nominal NPL di atas sektor lain meskipun secara rasio masih rendah.

Risiko kredit UMKM dan KUR meskipun sedikit meningkat masih jauh di bawah batas NPL sebesar 5%. NPL kredit UMKM pada akhir tahun 2012 mencapai 3,4%, sedikit menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya 4,4%. NPL kredit UMKM tertinggi terjadi pada kredit modal kerja sebesar 3,6%, sementara NPL KUR berdasarkan data LBU Desember 2012 tercatat sebesar 3,5%, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 2%. Berdasarkan data dari Lembaga Penjamin KUR, *Non Performing Guarantee* (NPG) yang merupakan perbandingan antara klaim yang dibiayai dengan KUR yang dijamin (porsi penjaminan) pada Desember 2012 tercatat

Grafik 8.16 Perkembangan LDR Tahun 2009 – 2012



Grafik 8.17 Perkembangan NPLs Tahun 2009 – 2012



sebesar 3,5%, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2011 sebesar 3,2%. Jumlah klaim KUR kepada lembaga penjamin mencapai Rp3,6 triliun atau sebesar 4% dari KUR yang dijamin sebesar Rp83,3 triliun. Jumlah klaim yang ditolak mencapai Rp0,3 triliun atau 7,5% dari jumlah klaim KUR yang diajukan.

Selain risiko kredit, perbankan juga menghadapi potensi peningkatan eksposur risiko yang berasal dari risiko pasar. Eksposur risiko pasar terutama muncul sebagai eksekusi dari upaya menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan target profitabilitas. Perbankan juga melakukan pengalihan penempatan likuiditas dalam bentuk Obligasi Negara (SUN AFS). Jumlah penempatan yang dilakukan perbankan (di luar Giro Bank di Bank Indonesia) turun dari sebesar Rp508,3 triliun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp469,3 triliun pada tahun 2012 atau turun sebesar 7,8%. Sementara itu, jumlah obligasi negara yang dimiliki bank meningkat dari sebesar Rp223,71 triliun (Desember 2011) menjadi Rp246 triliun (Desember 2012) atau naik sebesar 10%. (Grafik 8.18)

Seiring membaiknya kondisi pasar keuangan dan ketahanan perbankan, portofolio SSB berjenis AFS yang dimiliki perbankan tercatat meningkat (Grafik 8.19). Peningkatan pangsa SSB AFS perbankan

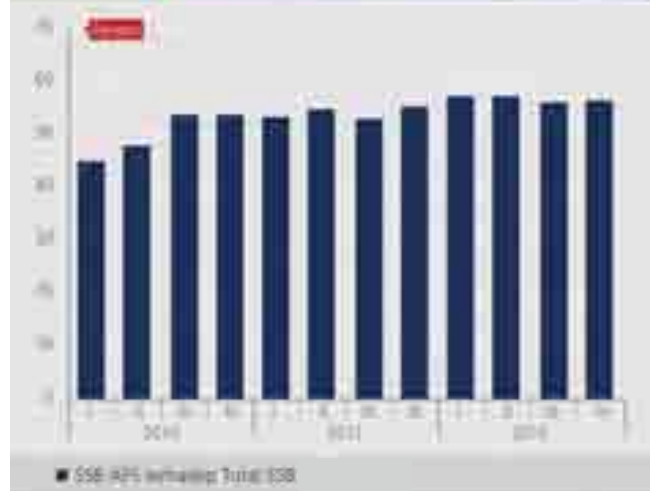
Grafik 8.18

Instrumen Keuangan yang Dimiliki Tahun 2009 – 2012



Grafik 8.19

Komposisi Surat-Surat Berharga Dalam Pos Available For Sale



terutama terjadi pada semester II 2010 hingga akhir tahun 2012 dan stabil pada level 50%-60%. Meski terjadi sedikit peningkatan eksposur risiko pasar, perbankan masih memiliki permodalan yang lebih dari cukup untuk menyerap risiko kerugian akibat *marked to market* apabila terjadi penurunan harga SSB. Dengan mencermati tingkat likuiditas sampai dengan akhir tahun 2012 dan pergeseran penempatan likuiditas bank, secara keseluruhan, risiko pasar perbankan masih relatif rendah.

Semakin kompleksnya produk dan transaksi keuangan yang dilakukan perbankan juga berdampak terhadap peningkatan eksposur risiko operasional. Faktor keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia serta peningkatan aspek keamanan teknologi sistem informasi yang digunakan menjadi prasyarat utama dari keamanan dan kelancaran transaksi keuangan melalui perbankan. Selama periode laporan, kasus-kasus *fraud* dan penyalahgunaan teknologi sistem informasi khususnya terhadap kartu kredit mengalami penurunan, yaitu dari sebanyak 7.826 kasus pada tahun 2011 menjadi hanya sebanyak 791 kasus (November 2012) dengan total kerugian mencapai sebesar Rp31,8 miliar. Untuk mengantisipasi dan menekan kasus-kasus penyalahgunaan produk-produk yang dikeluarkan perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan peningkatan

sistem keamanan dalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) serta mendorong perbankan untuk selalu meningkatkan keamanan teknologi sistem informasi yang digunakan.

Meski perbankan sempat mengalami penurunan alat likuid, likuiditas perbankan pada akhir tahun kembali meningkat sehingga secara keseluruhan risiko likuiditas masih relatif moderat dan berada pada tingkat yang aman. Umumnya alat likuid perbankan terbagi dalam tiga kelompok utama yaitu *primary reserves*³, *secondary reserves*⁴ serta *tertiary reserves*⁵. Secara tahunan, alat likuid meningkat Rp47,5 triliun (4,5%) sehingga menjadi Rp1.100,9 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari komponen *primary reserve* terkait peningkatan ekspansi pemerintah di akhir tahun 2012. Sejalan dengan peningkatan alat likuid, secara keseluruhan kemampuan perbankan untuk mengantisipasi penarikan DPK masih mencukupi sebagaimana terlihat dari rasio alat likuid terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) yaitu 113,7%, masih berada di atas *threshold* 100%.

3 Kas dan Giro di BI

4 SBI, penempatan antarbank, SUN *Trading* dan SUN *Available For Sale*

5 SUN *Hold to Maturity*

8.2 Kinerja Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Secara umum, kinerja pasar keuangan selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan serta perbaikan ketahanan dalam menghadapi guncangan. Hal tersebut, antara lain, terlihat dari kinerja pasar keuangan yang dapat segera pulih setelah mengalami tekanan pada pertengahan tahun 2012 (Grafik 8.20). Dinamika pasar keuangan domestik selama 2012 juga ditandai oleh menurunnya volume perdagangan. Namun hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan karena merupakan fenomena global menyusul implementasi *volcker rule*⁶ serta menurunnya kinerja emiten berbasis komoditas. Dukungan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pasar keuangan domestik merespons tekanan yang terjadi. Meski demikian, pencapaian kinerja pasar keuangan domestik masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara kawasan seperti Thailand dan Filipina.

6 Volume transaksi sebesar Rp,4,5 triliun per hari pada tahun 2012 atau turun dari tahun 2011 yang mencapai Rp4,9 triliun per hari.



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Pasar Saham

Pasar saham domestik menunjukkan kinerja positif ditopang oleh struktur fundamental dan sektoral yang semakin baik. Dari sisi fundamental, pertumbuhan laba bersih perusahaan yang mencapai 11% pada tahun 2012⁷ menjadi faktor positif penggerak IHSG. Secara sektoral, kontribusi sektor-sektor utama yang berperan besar dalam pembentukan IHSG mengalami pergeseran cukup signifikan. Peran saham-saham berbasis komoditas mengalami penurunan, sementara saham-saham berbasis infrastruktur mengalami peningkatan. Sementara itu, saham-saham dari sektor keuangan masih dominan dalam pembentukan IHSG meski porsinya sedikit menurun (Grafik 8.21).

Perbaikan kinerja bursa saham domestik di pasar sekunder belum diikuti oleh peningkatan kinerja di pasar perdana. Selama tahun 2012, jumlah pembiayaan dalam bentuk *Initial Public Offering* (IPO) dan *right issue* mengalami penurunan (Tabel 8.1). Pertumbuhan IPO dan *right issue* selama tahun 2012 masing-masing mencapai Rp10,1 triliun dan Rp18,1 triliun, sementara pada tahun 2011 masing-masing mencapai Rp19,6 triliun dan Rp42,1 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan IPO dan *right issue* selama tahun 2012 antara lain tren penggunaan laba ditahan untuk membiayai ekspansi usaha, khususnya oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi.

7 Data Laporan Keuangan Emiten per September 2012 dibandingkan dengan September 2011, sumber BEI.

Tabel 8.1 Pembiayaan Ekonomi dari Pasar Modal

Pembiayaan Pasar Modal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IPO (Equity) (tril Rp)	3,0	16,9	24,4	3,9	29,7	19,6	10,1
Rights (tril Rp)	12,6	29,5	56,6	8,6	48,2	42,1	18,1
Warrant (tril Rp)	0,8	2,5	2,0	2,5	1,9	0,6	1,6
Corporate Bonds, Sukuk & ABS	11,6	30,2	12,9	29,7	39,1	45,9	69,4

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Meski secara keseluruhan menunjukkan kinerja positif, nilai perdagangan saham secara bulanan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya (Grafik 8.22). Selama tahun 2012, rata-rata perdagangan saham per bulan menurun sebesar 8,8% dibandingkan dengan rata-rata perdagangan saham tahun 2011 yang mencapai Rp101,9 triliun per bulan. Kondisi tersebut ditengarai merupakan imbas dari pelemahan kondisi perekonomian global serta penurunan kinerja beberapa emiten utama di bursa saham domestik serta tertundanya beberapa rencana IPO beberapa BUMN. Demikian halnya nilai kapitalisasi bursa domestik jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Nilai kapitalisasi saham terhadap PDB Indonesia relatif rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan India (Grafik 8.23). Kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan belum optimalnya upaya untuk mendapatkan pembiayaan ekonomi yang bersumber dari pasar modal.

Pasar Obligasi

Sejalan dengan peningkatan kinerja di pasar saham domestik, pasar SBN juga mencatat pencapaian positif baik pasar perdana maupun pasar sekunder. Membaiknya kinerja pasar SBN ditunjukkan oleh imbal hasil tiap tenor yang mengalami penurunan. Di pasar

perdana, kinerja pasar SBN mengalami perbaikan sebagaimana terlihat dari tingginya rata-rata *bid to cover ratio* dalam tiap lelang. Bahkan, dalam beberapa periode lelang, pemerintah melakukan strategi *rationing* dalam memutuskan pemenang lelang. Selama tahun 2012, jumlah penerbitan SBN mencapai Rp268,7 triliun⁸ dengan volume transaksi harian rata-rata mencapai Rp6.3 triliun per hari (Grafik 8.24). Posisi SBN dalam periode yang sama mencapai 13,7% dari total aset LKBB.

Pasar obligasi korporasi juga menunjukkan kinerja positif khususnya di pasar perdana. Selama tahun 2012, penerbitan obligasi korporasi mencatat kenaikan yang cukup signifikan mencapai Rp69,4 triliun sementara pada tahun 2011 hanya sebesar Rp45,9 triliun⁹. Penerbitan obligasi korporasi pada tahun 2012 didominasi oleh emiten sektor keuangan, yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Maraknya penerbitan obligasi korporasi tersebut juga dipengaruhi oleh momentum pencapaian peringkat layak investasi oleh Indonesia dan pemanfaatan aturan pasar modal mengenai penerbitan obligasi berkelanjutan. Selain itu, kinerja

8 Meliputi total penerbitan SBN, termasuk rupiah maupun valas

9 Termasuk Obligasi Korporasi, ABS dan Sukuk, sumber BEI.

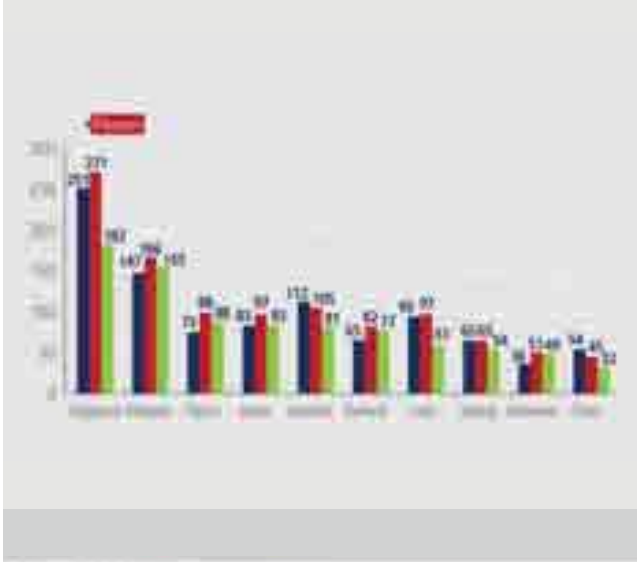


Sumber: Bursa Efek Indonesia



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Grafik 8.23 Kapitalisasi Pasar per PDB



Sumber: Bursa Efek Indonesia

positif pasar obligasi korporasi di pasar perdana turut dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil obligasi SBN, sebagai *benchmark*, serta obligasi korporasi sebesar 145 bps hingga mencapai 8,3% pada akhir tahun 2012.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan, pembiayaan melalui penerbitan obligasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun korporasi di Indonesia masih sangat rendah (Grafik 8.25). Secara total, penerbitan obligasi di pasar domestik sampai dengan Desember 2012 hanya mencapai 13,2% dari PDB dengan 82,8% di antaranya merupakan penerbitan surat utang pemerintah. Rasio tersebut lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 17,7% dari PDB negara tersebut. Di satu sisi, rendahnya rasio penerbitan obligasi terhadap PDB menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menggunakan sumber-sumber pembiayaan pertumbuhan ekonomi berbasis utang. Di sisi lain, rendahnya rasio tersebut mengindikasikan masih tingginya potensi untuk pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*) antara lain melalui peningkatan penerbitan obligasi, inovasi produk investasi alternatif dan peningkatan likuiditas melalui pengembangan pasar sekunder. Tersedianya produk-produk investasi yang didukung dengan

berkembangnya pasar sekunder pada gilirannya akan memudahkan perbankan dalam mengelola likuiditas mengingat akumulasi pertumbuhan dana masyarakat di perbankan yang terus tumbuh tinggi, sementara lembaga keuangan bukan bank akan mendapatkan manfaat melalui pengelolaan aset dan strategi investasi di pasar keuangan.

Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

Peran pasar uang dalam perekonomian domestik juga menunjukkan peningkatan. Dari sisi harga, penurunan suku bunga kebijakan diikuti oleh penurunan suku bunga di PUAB. Rata-rata harian suku bunga PUAB O/N sepanjang tahun 2011 yang tercatat sebesar 5,64%, pada tahun 2012 rata-rata suku bunga turun ke level 4,01%. Penurunan suku bunga PUAB O/N tersebut diikuti dengan efisiensi PUAB yang semakin membaik dan tampak pada menipisnya rata-rata selisih antara suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah pada tahun 2012. Selisih suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah secara rata-rata berkisar 10 bps di tahun 2012 atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 sebesar 22 bps. Indikasi efisiensi lainnya yaitu tingkat volatilitas suku bunga PUAB O/N yang terjaga di level rendah, yaitu pada kisaran 2 bps, atau lebih rendah dari tahun 2011 yang berkisar 6 bps.

Grafik 8.24 Posisi dan Volume Perdagangan Obligasi Negara



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Dari sisi volume pasar uang, meski secara rata-rata volume harian PUAB pada tahun 2012 (Rp9,34 triliun per hari) masih lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 (Rp11,64 triliun per hari), likuiditas PUAB bergerak membaik setelah sempat mencapai titik terendahnya di periode awal 2012. Sejalan dengan berkurangnya volume transaksi PUAB tersebut, rata-rata harian frekuensi transaksi dan jumlah bank yang melakukan transaksi juga mengalami penurunan, yaitu dari rata-rata 184 transaksi menjadi 136 transaksi per hari dengan jumlah pelaku dari 68 bank menjadi 59 bank per hari.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Lainnya

Selain bursa saham, pasar obligasi dan pasar uang, industri asuransi, reksadana, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun juga menunjukkan kinerja yang membaik. Total aset industri asuransi meningkat pesat mencapai Rp310,8 triliun yang diikuti dengan peningkatan di sisi investasi yang mencapai Rp266,6 triliun. Kondisi yang sama juga terlihat dari peningkatan Nilai Aktiva Bersih dari perusahaan reksadana yang secara keseluruhan mencapai Rp182,7 triliun. Sementara itu, perusahaan pembiayaan dan penyelenggara dana pensiun mencatat peningkatan nilai aset yang masing-masing mencapai Rp336,4 triliun dan Rp155,3 triliun (Grafik

8.26). Secara keseluruhan, pangsa aset keuangan yang dimiliki oleh industri asuransi, reksadana, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun masing-masing mencapai 5,1%, 3,0%, 5,5% dan 2,6% dari total aset sistem keuangan di luar perbankan).¹⁰

Struktur Investor

Dinamika di pasar saham domestik menunjukkan bahwa peran investor domestik terus meningkat meski porsi investor asing masih dominan. Selama beberapa tahun terakhir, peran investor domestik terus mengalami peningkatan dari 40,1% pada tahun 2011 menjadi 41,2% pada tahun 2012¹¹ (Tabel 8.2). Sementara itu, kontribusi investor asing masih dominan dengan level kontribusi di atas 50%. Nilai kapitalisasi investor asing di pasar saham tercatat mencapai Rp1.484,3 triliun pada tahun 2012. Secara kelembagaan, kontribusi investor institusional, baik untuk asing maupun domestik, masih cukup besar. Meningkatnya peran investor domestik terutama berasal dari investor institusional yang berperan besar sebagai *shock absorber* dalam mengimbangi dominasi investor asing. Struktur pasar yang relatif

10 Data Asuransi per September 2012, Data Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan per November 2012, Data Reksadana per Desember 2012 (E-Monitoring Bapepam-LK).

11 Posisi per November 2012, BEI



Tabel 8.2 Porsi Kepemilikan Pasar Saham

Tipe Investor*	2011		2012**	
	(Rp, Miliar)	(%)	(Rp, Miliar)	(%)
Investor Domestik	839.320	40,14%	1.023.038	41,15%
Individual	150.951	17,98%	141.176	13,80%
Institusi	687.203	81,88%	880.449	86,06%
Lainnya	1.166	0,14%	1.413	0,14%
Investor Asing	1.251.886	59,86%	1.463.305	58,85%
Individual	23.704	1,89%	31.072	2,12%
Institusi	907.916	72,52%	1.034.377	70,69%
Lainnya	320.266	25,58%	397.856	27,19%
TOTAL	2.091.206		2.486.343	

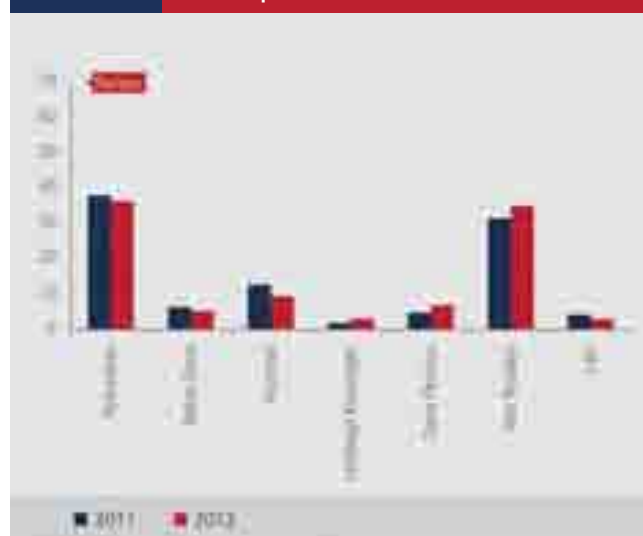
Sumber: Bursa Efek Indonesia
*) Scriptless **) November 2012

berimbang tersebut pada gilirannya berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas di pasar keuangan.

Di pasar SBN, pelaku nonresiden dan perbankan domestik mewarnai pergerakan harga di pasar SBN. Tingginya minat investor asing pada pasar saham dan SBN merupakan cermin atas tingginya kepercayaan investor global pada kondisi ekonomi makro yang kondusif serta ketertarikan atas imbal hasil yang kompetitif. Selama tahun 2012, kepemilikan nonresiden pada pasar SBN mencapai Rp270.5 triliun. Sementara itu, meningkatnya peran perbankan, lembaga asuransi serta dana pensiun secara bersamaan mampu menjadi stabilisator terhadap tekanan jual yang berasal dari investor nonresiden. Dinamika pasar SBN selama tahun 2012 juga menunjukkan semakin meratanya distribusi kepemilikan SBN di antara para pelaku khususnya perbankan (Grafik 8.27). Struktur pasar yang cukup merata tersebut berkontribusi positif bagi penciptaan harga yang semakin baik di pasar SBN.

Peningkatan peran LKBB, khususnya Asuransi dan Dana Pensiun, di pasar keuangan domestik tidak terlepas dari perubahan strategi investasi dan perbaikan struktur industri. Arah kebijakan investasi perusahaan pengasuransi dan dana pensiun mulai mengalami pergeseran. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jenis investasi berbasis

Grafik 8.27 Porsi Kepemilikan SBN



Sumber: Bursa Efek Indonesia

saham, obligasi dan reksadana secara proporsional. Selain berdampak positif bagi perkembangan pasar keuangan domestik, peningkatan tersebut mendorong peningkatan kinerja keuangan LKBB. Sementara itu, perbaikan struktur industri antara lain ditandai oleh semakin meningkatnya peran dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dibandingkan dengan dana pensiun pemberi kerja (DPPK). Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi biaya dan profesionalisme dalam pengelolaan dana.

Produk-Produk Pasar Keuangan

Peningkatan kinerja pasar keuangan domestik tidak terlepas dari semakin beragamnya produk-produk investasi yang ditawarkan. Semakin bervariasi produk yang ditawarkan bertujuan untuk memperluas basis investor sekaligus sebagai strategi diversifikasi risiko baik yang dilakukan untuk kepentingan investor maupun untuk kepentingan para pelaku. Aneka produk dengan fitur gabungan antara tujuan asuransi dan investasi yang terus diperkenalkan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.

Penawaran produk investasi yang semakin beragam juga didorong oleh industri reksadana. Dalam hal ini, produk berbasis Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK-EBA) dan produk penyertaan terbatas menjadi alternatif pilihan investasi. Sementara

8.3 Kinerja Sistem Pembayaran

itu, mengingat bahwa sumber utama pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari pinjaman bank, strategi penawaran produk pembiayaan lebih ditujukan kepada sektor-sektor konsumsi berjangka pendek dengan tetap mempertimbangkan upaya perbaikan di sisi manajemen risiko. Dalam hal ini, jumlah pembiayaan selama tahun 2012 mencapai Rp187,4 triliun antara lain dalam bentuk pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang dan kartu kredit yang masing-masing sebesar Rp187,4 triliun, Rp106,9 triliun, Rp4,1 triliun dan Rp1,2 triliun.

Secara umum, instrumen keuangan yang berkembang di pasar keuangan domestik masih didominasi oleh instrumen keuangan tradisional seperti obligasi dan saham (Tabel 8.3). Beberapa instrumen keuangan, terutama yang memiliki fitur derivatif, kurang diminati oleh investor mengingat masih terbatasnya infrastruktur pendukung serta beberapa kebijakan dari otoritas yang membatasi perkembangan produk derivatif mengingat potensi risikonya yang cukup besar serta masih minimnya pemahaman investor domestik terhadap produk-produk keuangan yang kompleks. Meski demikian, seiring dengan pulihnya perekonomian global, membaiknya faktor risiko serta kebijakan dalam pengembangan pasar keuangan domestik, pengembangan produk-produk keuangan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tabel 8.3 Jenis-Jenis Instrumen Keuangan

jumlah sekuritas (triliun lembar)

Instrumen Keuangan	2011	2012	Perubahan
OBLIGASI KORPORASI	142,1	162,1	19,9
SAHAM	678,6	678,8	0,2
SBN	376,4	356,5	-19,9
MTN	11,7	10,5	-1,2
REKSADANA	0,0	0,0	0,0
RIGHT	0,0	0,0	0,0
SBSN	9,5	25,7	16,2
SUKUK	26,6	21,5	-5,1
WARRANT	0,0	0,0	0,0
Total	1244,9	1255,1	10,2

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran sebagai urat nadi perekonomian Indonesia. Upaya tersebut sejauh ini telah menunjukkan hasil yang baik dengan semakin meningkatnya peran sistem pembayaran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Perekonomian Indonesia tahun 2012 yang tumbuh kuat di tengah memburuknya perekonomian global menjadi faktor utama meningkatnya peran sistem pembayaran. Nilai transaksi melalui sistem pembayaran selama tahun 2012 mencapai Rp104,8 ribu triliun atau meningkat 46,5% dari nilai transaksi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp71,6 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 24,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2012 mencapai 3,3 miliar transaksi.

Apabila dibandingkan dengan PDB Indonesia tahun 2012, total nilai transaksi pembayaran melalui berbagai sistem pembayaran yang ada di Indonesia selama tahun 2012 mencapai 12,7 kali dari nilai PDB. Rasio perbandingan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 9,6 kali dari nilai PDB Indonesia¹². Perkembangan tersebut, menunjukkan bahwa kinerja sistem pembayaran dalam mendukung aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha di Indonesia terus meningkat.

Sistem pembayaran ritel sebagai alternatif instrumen pembayaran semakin banyak digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai transaksi melalui sistem pembayaran ritel (SKNBI, APMK, dan uang elektronik) selama tahun 2012 mencapai Rp 5.439 triliun atau meningkat 17,4% dari nilai transaksi

¹² Dengan mengeluarkan data pengelolaan moneter yang dilakukan Bank Indonesia, nilai transaksi keuangan melalui sistem pembayaran mencapai 5,4 kali dari nilai PDB, tetap tinggi seperti pada tahun 2011 yang mencapai 5,5 kali dari PDB

tahun 2011 sebesar Rp4.631 triliun. Sementara itu, dari sisi volume pembayaran ritel selama tahun 2012 mencapai 3,3 miliar transaksi atau terjadi kenaikan sebesar 24,5% dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 2,6 miliar transaksi.

Seperti pada tahun sebelumnya, peningkatan transaksi melalui sistem pembayaran ritel, terutama berasal dari penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) khususnya kartu ATM/Debet. Peningkatan transaksi APMK tersebut sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan perputaran uang.

Selama tahun 2012, total nilai transaksi melalui sistem pembayaran ritel di Indonesia mencapai 1,2 kali dari nilai konsumsi masyarakat, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 1,1 kali dari nilai konsumsi masyarakat.

Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran

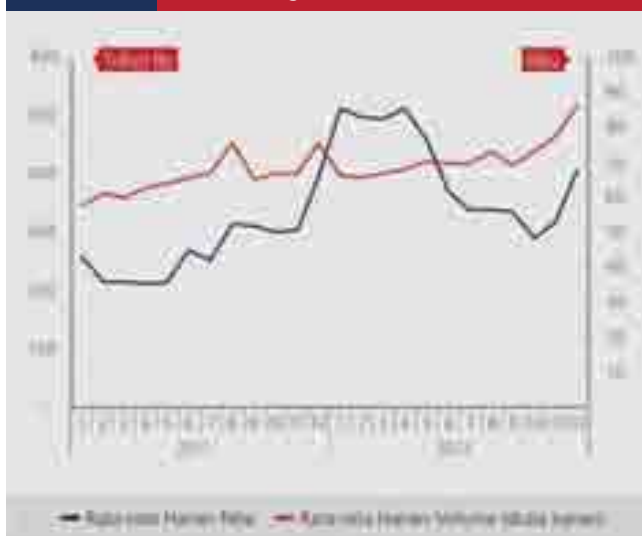
Aktivitas transaksi pembayaran melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 8.28). Nilai transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui Sistem BI-RTGS mencapai Rp99,4 ribu triliun

atau naik sebesar 48,5% dibandingkan dengan tahun 2011, dengan volume transaksi tercatat sebanyak 17,5 juta transaksi atau naik sebesar 8,2% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian, rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS tahun 2012 mencapai nilai Rp404,1 triliun dengan volume sebesar 71,1 ribu transaksi.

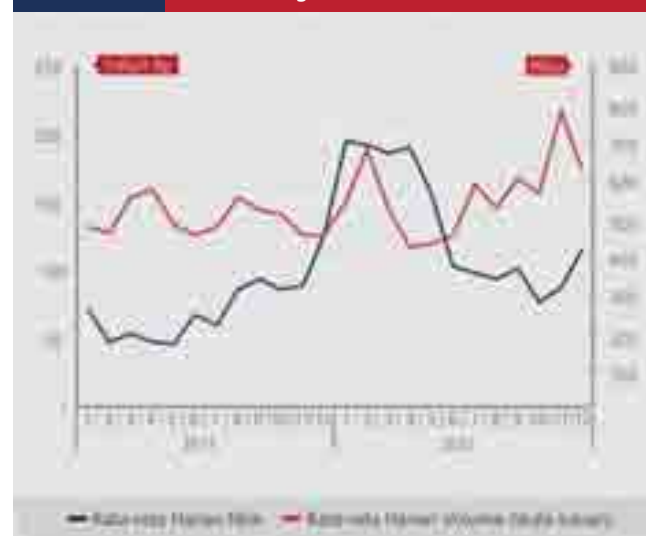
Meningkatnya aktivitas pembayaran melalui Sistem BI-RTGS tidak terlepas dari keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS yang ada saat ini. Hal tersebut diukur dari persentase penyelesaian transaksi (*settled*), ketersediaan sistem dan kedisiplinan dalam memenuhi jadwal (*window time*) Sistem BI-RTGS. Keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS selama tahun 2012 telah memenuhi *service level* yang ditetapkan.

Penatausahaan surat berharga melalui Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) selama tahun 2012, baik dari sisi nilai maupun volume, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 8.29). Nilai surat berharga yang ditatausahakan melalui BI-SSSS mencapai Rp32,5 ribu triliun atau meningkat sebesar 82% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 137,2 ribu transaksi atau meningkat sebesar 12,3% dibandingkan dengan tahun 2011. Rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui sistem BI-SSSS

Grafik 8.28 Perkembangan Transaksi RTGS



Grafik 8.29 Perkembangan Transaksi SSSS



mencapai nilai Rp132,1 triliun dengan volume sebesar 558 transaksi.

Aktivitas transaksi melalui Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 8.30). Nilai transaksi melalui SKNBI mencapai Rp2.170,19 triliun atau naik sebesar 10,1% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 106,1 juta transaksi atau naik sebesar 7% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui SKNBI tahun 2012 mencapai nilai Rp8,8 triliun dengan volume sebesar 431,3 ribu transaksi.

Aktivitas transaksi melalui APMK, yang terdiri dari kartu ATM/Debet dan kartu kredit pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 8.31). Nilai transaksi melalui APMK pada tahun 2012 mencapai Rp3.266,9 triliun atau naik sebesar 22,8% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 3,1 miliar transaksi atau naik sebesar 23,2% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui APMK tahun 2012 mencapai nilai Rp8,9 triliun dengan volume sebesar 8,3 juta transaksi.

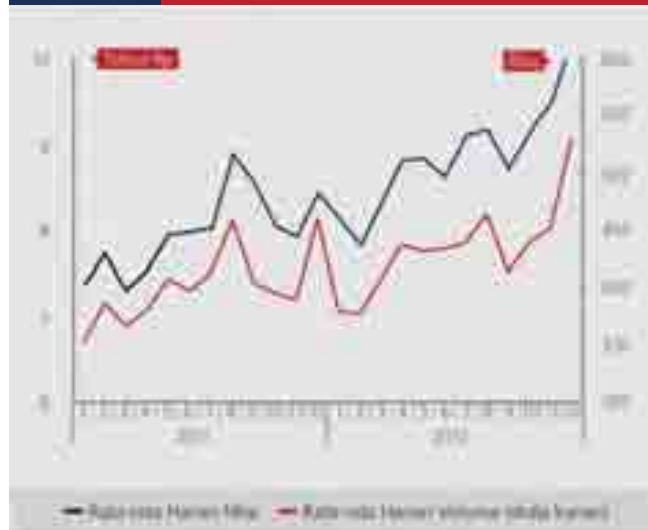
Kontribusi terbesar dari perkembangan transaksi APMK yaitu berasal dari penggunaan kartu ATM dan

kartu ATM/Debet, mengingat sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah kartu ATM dan kartu ATM/Debet beredar mencapai 77,8 juta kartu.

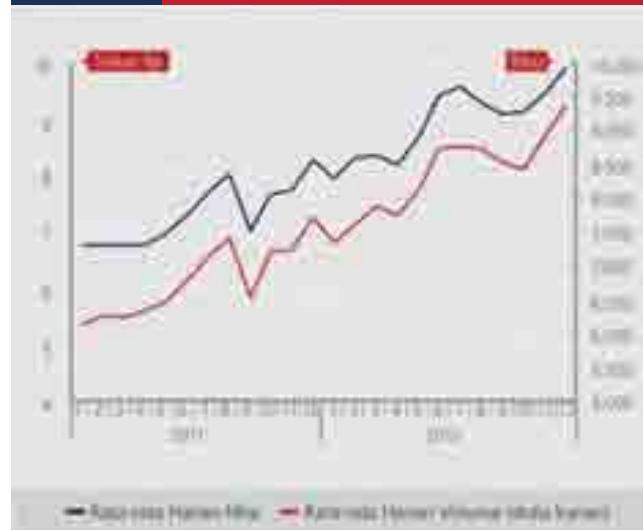
Aktivitas transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM dan kartu ATM/Debet meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi menggunakan kartu ATM dan kartu ATM/Debet pada tahun 2012 mencapai Rp3.065,01 triliun atau naik sebesar 23,7% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 2,82 miliar transaksi atau naik sebesar 24,8% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM dan kartu ATM/Debet pada tahun 2012 mencapai nilai Rp8,4 triliun dengan volume sebesar 7,7 juta transaksi.

Aktivitas transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 8.32). Nilai transaksi menggunakan kartu kredit pada tahun 2012 mencapai Rp201,8 triliun atau naik sebesar 10,5% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 221,6 juta transaksi atau naik sebesar 5,8% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pada tahun 2012 mencapai nilai Rp551,5 miliar dengan volume sebesar 605,4 ribu transaksi.

Grafik 8.30 Perkembangan Transaksi SKNBI



Grafik 8.31 Perkembangan Transaksi APMK



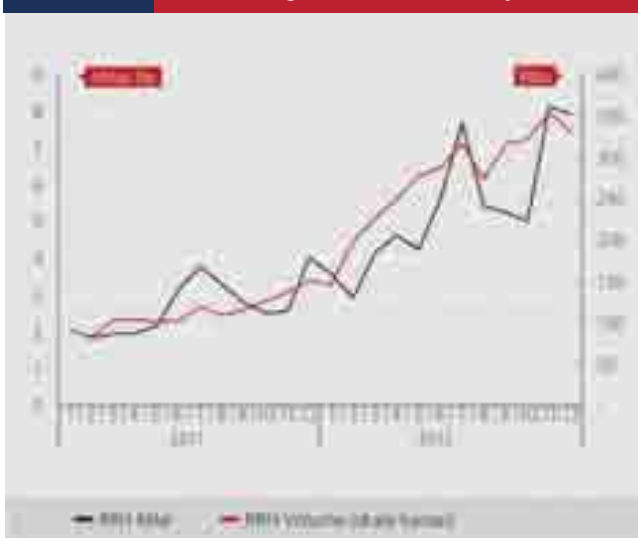
Grafik 8.32 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Aktivitas transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi menggunakan kartu kredit selama tahun 2012 mencapai Rp201,8 triliun atau naik sebesar 10,5% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 221,6 juta transaksi atau naik sebesar 5,8% dibandingkan dengan tahun 2011. Rata-rata harian transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit mencapai nilai Rp551,5 miliar dengan volume sebesar 605,4 ribu transaksi.

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik semakin meningkat secara signifikan selama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik

Grafik 8.33 Perkembangan Transaksi e-Money



8.33). Nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp1,97 triliun atau naik sebesar 101,0% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 100,62 juta transaksi atau naik sebesar 145,1% dibandingkan dengan tahun 2011. Rata-rata harian transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik mencapai nilai Rp5,4 miliar dengan volume sebesar 274,9 ribu transaksi.

Kinerja perekonomian domestik yang meningkat tidak terlepas dari peran uang kartal sebagai salah satu alat pembayaran di masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan PDB dan laju inflasi, jumlah rata-rata uang kartal yang diedarkan (UYD) terus meningkat. Jumlah rata-rata UYD meningkat dari Rp320,4 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp370,6 triliun pada tahun 2012, atau meningkat 15,7%. Seiring dengan perkembangan UYD ini, rasio UYD terhadap konsumsi masyarakat khususnya rumah tangga mencapai 33,6%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini mengindikasikan masih pentingnya uang kartal di masyarakat khususnya di sektor rumah tangga. (Grafik 8.34).

Sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik, posisi dan rata-rata UYD meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Posisi UYD pada akhir tahun 2012 mencapai Rp439,7 triliun atau meningkat 17,9% dibandingkan dengan posisi pada akhir periode

Grafik 8.34 Perkembangan UYD, PDB dan Inflasi



Sumber: BPS, 2012

Tabel 8.4 Perkembangan Rata-rata dan Posisi UYD

Periode	2009	2010	2011	2012
UYD Rata-rata (Triliun Rp)	244,4	274,0	320,4	370,6
Pertumbuhan (yoy)	10,7%	12,1%	16,9%	15,7%
UYD Akhir Tahun (Triliun Rp)	279,0	318,6	373,0	439,7
Pertumbuhan (yoy)	5,5%	14,2%	17,7%	17,9%

sebelumnya sebesar Rp 373 triliun. Secara rata-rata, jumlah UYD sepanjang tahun 2012 mencapai Rp370,6 triliun, atau meningkat 15,7% dibandingkan dengan tahun 2011. (Tabel 8.4)

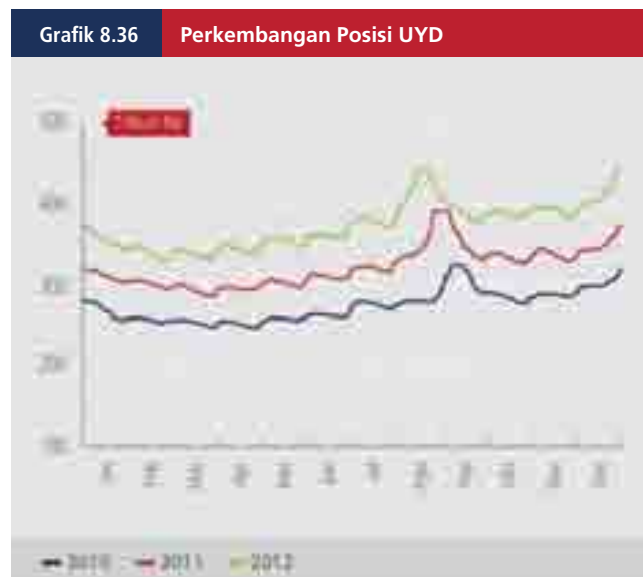
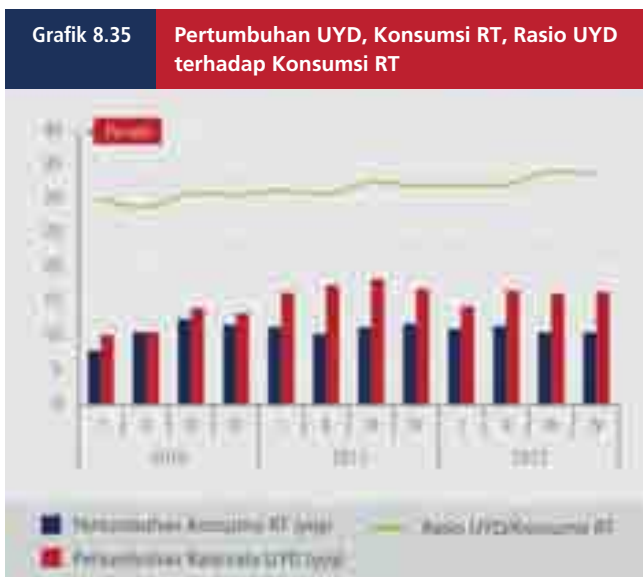
Meskipun meningkat cukup tinggi, laju pertumbuhan rata-rata UYD tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2011 sebesar 16,9%. Hal itu seiring dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pada periode tersebut.

Pertumbuhan rata-rata UYD juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga (Grafik 8.35). Pada tahun 2012, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 10,6% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan rata-rata UYD. Dengan perkembangan tersebut, rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga meningkat dari 32% tahun 2011 menjadi 33,6% tahun 2012.

Perkembangan rasio ini dan laju pertumbuhan UYD yang tinggi mengindikasikan peran uang kartal yang penting sebagai alat pembayaran di masyarakat.

Di tengah laju pertumbuhan yang tinggi, dinamika perkembangan UYD masih diwarnai pola musiman sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pola musiman tersebut ditandai oleh kenaikan UYD pada periode Ramadhan dan Idul Fitri, Natal dan akhir tahun, hari raya Imlek, serta dimulainya tahun ajaran baru. Sebagai contoh, pola tersebut tercermin dari posisi UYD pada pekan terakhir menjelang Idul Fitri dan pada akhir bulan Desember 2012 yang bersamaan dengan hari Raya Natal dan akhir tahun 2012, masing-masing sebesar Rp442,6 triliun dan sebesar Rp439,7 triliun. Posisi UYD pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tersebut merupakan posisi tertinggi selama tahun 2012. (Grafik 8.36)

Faktor musiman juga memengaruhi perkembangan pangsa UYD perbankan. Hal ini tercermin dari pola perkembangan pangsa UYD perbankan yang tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pangsa UYD perbankan terutama meningkat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri dan periode menjelang Natal dan akhir tahun 2012 sebagai upaya perbankan mengantisipasi meningkatnya kebutuhan uang kartal pada periode tersebut.



Sepanjang tahun 2012, rata-rata pangsa UYD perbankan sedikit lebih rendah tercermin pada penurunan rata-rata pangsa UYD perbankan dari 15,8% tahun 2011 menjadi 15,5% tahun 2012. Penurunan pangsa di perbankan tersebut diikuti dengan peningkatan pangsa UYD di masyarakat dari 84,2% pada tahun 2011 menjadi 84,5% pada tahun 2012. (Grafik 8.37)

Pangsa UYD perbankan menurun sejak Maret 2011 dan relatif bertahan pada kisaran 15% hingga tahun 2012. Pada awal Maret 2011, Bank Indonesia memberlakukan penyempurnaan ketentuan penyetoran dan penarikan oleh bank umum di Bank Indonesia yang mendorong pangsa UYD perbankan menurun. Sebelum diberlakukannya ketentuan tersebut, rata-rata pangsa UYD perbankan di atas 16%.

Dari sisi nominal, UYD per pecahan didominasi oleh uang pecahan besar (Rp20.000 ke atas), sedangkan berdasarkan jumlah bilyet/keping sebagian besar merupakan uang pecahan kecil. Berdasarkan nominal UYD, pangsa Uang Pecahan Besar (UPB) mencapai 93,2% dengan komposisi pangsa pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000 masing-masing sebesar 60,6%; 30,1%; dan 2,4%. Sementara itu, berdasarkan jumlah lembar/bilyet, pangsa UPB sebesar 21,4% dengan pangsa pecahan Rp100.000, Rp50.000

dan Rp20.000 sebesar 9,7%, 9,7% dan 2,0% dari total lembar/bilyet UYD. (Grafik 8.38 dan 8.39)

Pangsa UYD pecahan Rp100.000 secara nominal menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan nominal, tren peningkatan pangsa pecahan Rp100.000 diikuti dengan tren penurunan pangsa pecahan Rp50.000, sedangkan pecahan lain relatif tidak berubah. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan uang Rupiah pecahan terbesar dalam kegiatan transaksi masyarakat.

Grafik 8.38 Pecahan UYD Berdasarkan Nominal



Grafik 8.37 Perkembangan Pangsa UYD di Perbankan



Grafik 8.39 Pecahan UYD Berdasarkan Bilyet/Keping



Secara nominal, pangsa uang kertas (UK) dan uang logam (UL) yang diedarkan relatif tidak mengalami perubahan. Pangsa UK yang diedarkan pada akhir tahun 2012 relatif tidak berbeda dibandingkan dengan pangsa tahun 2011, yakni sekitar sebesar 99,0% dari total UYD.

Aliran uang kartal melalui BI meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan. Peningkatan aliran uang kartal keluar dari Bank Indonesia diikuti dengan peningkatan aliran uang kartal masuk. Selama tahun 2012, aliran uang kartal keluar dan aliran uang kartal masuk masing-masing sebesar Rp429,6 triliun dan Rp366,3 triliun, atau meningkat 23,6% dan 24,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi pola aliran uang kartal, fluktuasi aliran uang kartal keluar dan aliran uang kartal masuk relatif tidak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya sesuai pola musimannya. (Grafik 8.40 dan Grafik 8.41)

Meskipun aliran uang kartal meningkat tinggi, pertumbuhan aliran uang kartal keluar dan aliran uang kartal masuk tahun 2012 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2011, aliran uang kartal keluar dan aliran uang kartal masuk masing-masing tumbuh 40,6% dan 39,1%.

Perkembangan ini tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia untuk terus mendorong perbankan melakukan optimalisasi Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) dalam memenuhi kebutuhan likuiditas mereka.

Sebagian besar uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia dalam rangka memenuhi penarikan perbankan. Sepanjang tahun 2012, pangsa penarikan bank mencapai 95,2% terhadap total aliran uang kartal keluar 2012, meningkat tipis dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 94,9%. Selain untuk memenuhi penarikan perbankan, uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia juga untuk memenuhi pembayaran nonbank, kebutuhan masyarakat melalui kegiatan penukaran, kas keliling, dan kas titipan. Meskipun terjadi peningkatan penarikan uang kartal oleh perbankan maupun masyarakat sepanjang 2012, Bank Indonesia dapat memenuhi penarikan tersebut termasuk pada saat permintaan uang kartal meningkat secara signifikan seperti pada hari raya keagamaan. Terpenuhinya permintaan uang kartal baik secara nominal dan pecahan ini, selain untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat juga untuk memberi kontribusi penting bagi kinerja sektor perbankan yang merupakan sektor utama dalam sistem keuangan di Indonesia.



Sepanjang tahun 2012, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia ditandai dengan jumlah aliran uang kartal keluar yang lebih tinggi dibandingkan dengan aliran uang kartal masuk. Jumlah aliran uang kartal keluar yang lebih tinggi dibandingkan dengan aliran uang kartal masuk menyebabkan aliran uang kartal melalui Bank Indonesia mengalami aliran uang kartal keluar neto sebesar Rp63,3 triliun. (Grafik 8.42). Aliran uang kartal keluar neto ini mencerminkan kebutuhan uang kartal yang meningkat sepanjang tahun 2012 seiring dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, aliran uang kartal keluar tahun 2012 meningkat 16,8% dari Rp54,2 triliun tahun 2011 menjadi Rp63,3 triliun tahun 2012.

Perkembangan aliran uang kartal keluar neto berdasarkan regional relatif tidak berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara nasional, terjadi aliran uang kartal keluar neto, sedangkan secara regional, pola aliran uang kartal neto masih menunjukkan pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2012, aliran uang kartal keluar neto tetap terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jabodetabek dan di luar Jawa. Sebaliknya, aliran uang kartal neto masuk terjadi di wilayah Jawa di luar Jabodetabek dengan kecenderungan yang meningkat dari Rp40,4 triliun tahun 2011 menjadi Rp49,1 triliun tahun 2012. (Grafik 8.43).

Fenomena pola aliran uang kartal neto tersebut mencerminkan masih tingginya preferensi masyarakat di luar Jawa dan Jabodetabek untuk menarik uang kartal di wilayahnya, yang kemudian mengalir masuk ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi masih berpusat di Jawa meskipun ekonomi daerah di luar pulau Jawa mulai berkembang.

Di tengah kebutuhan uang kartal yang meningkat, posisi kas Bank Indonesia tetap terjaga pada posisi yang memadai. Berbagai kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia secara simultan selama tahun 2012, yakni kebijakan mengedarkan kembali Uang Layak Edar (ULE) dari setoran perbankan melalui kebijakan *dropshot*¹³ baik dalam satu wilayah maupun antarwilayah, kebijakan sortasi uang kertas dan uang logam, serta kerjasama intensif dengan Perum Peruri, telah membantu Bank Indonesia menjaga persediaan kas selama tahun 2012 dalam

13 Kebijakan *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam satu kemasan plastik transparan (*10 brood*) yang masih utuh, tersegel dan terdapat label bank penyetor.

Grafik 8.42 Perkembangan Jumlah *Netflow* Uang Kartal



Grafik 8.43 Perkembangan *Netflow* Daerah



level yang mencukupi. Kebijakan *dropshot* terutama dimaksudkan agar kondisi uang merata di seluruh wilayah NKRI, sementara kebijakan kerjasama intensif dengan Perum Peruri dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan hasil cetak sempurna (HCS). Rasio posisi kas BI pada tahun 2012 mencapai sekitar 2 bulan rata-rata aliran uang kartal keluar.

Kegiatan pemusnahan rupiah dilakukan agar uang yang beredar di masyarakat dalam kondisi layak edar. Uang yang masuk ke Bank Indonesia dalam kondisi tidak layak edar dimusnahkan dan yang layak edar dapat diedarkan kembali ke masyarakat (*clean money policy*). Pemusnahan rupiah tersebut dilakukan secara rutin terhadap uang tidak layak edar (UTLE) yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia dari peredaran di masyarakat dan Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Sejalan dengan upaya tersebut, selama tahun 2012 jumlah pemusnahan rupiah mencapai Rp47,6 triliun. Jumlah tersebut merupakan 13,0% dari jumlah aliran uang kartal masuk rupiah kertas yang masuk ke Bank Indonesia. Sedangkan terhadap rupiah logam, tidak terdapat pemusnahan. Berdasarkan bilyet/lembar yang dimusnahkan, pangsa pemusnahan uang pecahan kecil (UPK) yaitu pecahan Rp10.000 ke bawah mencapai 78,1% dari total pemusnahan rupiah.

Hal ini mengingat kualitas UPK di masyarakat lebih rendah seiring dengan tingginya perputaran pecahan tersebut di masyarakat.

Jumlah temuan uang palsu menurun pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Berdasarkan bilyet, jumlah temuan uang palsu tahun 2012 menurun 21,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Terkait dengan penanggulangan uang palsu, berbagai upaya terus dilakukan Bank Indonesia melalui upaya preventif dan represif.

Temuan jumlah uang palsu yang menurun dicerminkan dengan turunnya rasio temuan uang palsu. Rasio temuan uang palsu selama tahun 2012 tercatat 8 lembar temuan uang palsu per satu juta lembar uang kertas yang diedarkan. Rasio tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 10 lembar temuan uang palsu per satu juta lembar uang kertas yang diedarkan.

Berdasarkan komposisi per pecahan, temuan uang palsu didominasi oleh UK pecahan Rp100.000 (57,4%) dan Rp50.000 (37,3%). Sedangkan berdasarkan wilayah, temuan uang palsu terbesar berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Banten, dan wilayah Jawa Barat, masing-masing mencapai 25,7% dan 24,0%.

Bab 9. Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar

Bab 10. Kebijakan Makroprudensial, Mikroprudensial
dan Sistem Pembayaran

Bab 11. Koordinasi Kebijakan

RESPONS
BAURAN
KEBIJAKAN



Bagian 3

Respons Bauran Kebijakan

Di tengah pelemahan ekonomi global yang masih berlanjut, perekonomian nasional masih mencatat kinerja yang mengesankan. Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 masih tumbuh cukup kuat diiringi oleh laju inflasi yang tetap terkendali pada level yang cukup rendah. Sementara itu, neraca pembayaran masih mencatat surplus dan diiringi oleh level cadangan devisa yang aman. Namun, kuatnya permintaan dalam negeri telah menyebabkan defisit pada transaksi berjalan. Perkembangan ini mengakibatkan tekanan depresiasi rupiah, meskipun tingkat volatilitasnya relatif terjaga.

Berbagai pencapaian kinerja perekonomian nasional tersebut tidak terlepas dari hasil langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Pada tahun 2012, kebijakan Bank Indonesia yang dirumuskan dalam strategi bauran lima pilar kebijakan diarahkan pada upaya mengawal stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan ditengah berbagai tantangan yang cukup berat. Pada semester pertama tahun 2012, fokus kebijakan Bank Indonesia diletakkan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global dan memitigasi risiko kenaikan inflasi dalam jangka pendek. Hal ini seiring dengan langkah kebijakan Pemerintah untuk

menjaga daya beli masyarakat. Memasuki semester II tahun 2012, fokus kebijakan Bank Indonesia diletakkan pada upaya mengelola penyesuaian ketidakseimbangan eksternal secara bertahap seiring dengan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan. Hal ini juga didukung oleh langkah pemerintah untuk mengelola permintaan dalam negeri melalui antara lain pengaturan kehati-hatian dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan bukan bank. Strategi bauran lima pilar kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, komunikasi, dan koordinasi (lihat boks 9.1). Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan. Pertama, kebijakan moneter diarahkan agar suku bunga tetap mampu merespons pergerakan inflasi sesuai dengan sasaran. Kedua, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro.

Bab 9

Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar





Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar



Perumusan kebijakan moneter dan nilai tukar pada tahun 2012 senantiasa diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mengawal penyesuaian keseimbangan eksternal secara gradual. Strategi kebijakan tersebut ditempuh dengan tetap memerhatikan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di bidang moneter, penetapan BI Rate, penyesuaian koridor bawah suku bunga operasi moneter Bank Indonesia dan penguatan operasi moneter diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pemulihan ekonomi global pascakrisis 2008. Di samping itu, kebijakan moneter juga diarahkan untuk mengendalikan ketidakseimbangan eksternal yang semakin terlihat pada semester II 2012. Di bidang nilai tukar, kebijakan Bank Indonesia senantiasa mengarah pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamental. Langkah stabilisasi tersebut diperkuat dengan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki struktur pasokan devisa melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), lelang Term Deposit (TD) Valas, dan relaksasi tenor lindung nilai (*hedging*). Secara umum strategi bauran kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan.

9.1 Kebijakan Moneter



Kebijakan moneter dan nilai tukar selama tahun 2012 tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan sehingga mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan. Pada semester I 2012, fokus kebijakan moneter dan nilai tukar mengarah pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Pada semester II 2012, fokus kebijakan moneter dan nilai tukar mengarah pada upaya menjaga keseimbangan eksternal pada level yang *sustainable*. Pelaksanaan strategi kebijakan tersebut diperkuat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan komunikasi kebijakan yang diterapkan secara intensif. Strategi bauran kebijakan yang ditempuh sepanjang 2012 terlihat cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini terlihat dari momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, terpeliharanya stabilitas nilai tukar, dan laju inflasi yang terkendali pada level yang rendah.

Respons kebijakan moneter senantiasa diarahkan untuk menjaga konsistensi sinyal pembentukan suku bunga di pasar keuangan yang mampu menjangkar ekspektasi inflasi pelaku pasar terhadap pencapaian sasaran inflasi. Seiring dengan terkendalinya risiko inflasi baik di tahun 2012 maupun dalam jangka menengah panjang, maka fokus kebijakan moneter diletakkan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan mengelola penyesuaian ketidakseimbangan eksternal secara bertahap. Pada awal semester I 2012, kekhawatiran atas dampak rambatan (*spillover*) dari perlambatan ekonomi global terhadap prospek ekonomi nasional semakin mengemuka. Kondisi ini kemudian mendorong Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate sebesar 25 bps pada Februari 2012 menjadi 5,75% serta menurunkan koridor bawah suku bunga operasi moneter Bank Indonesia sebesar 50 bps menjadi 3,75%. Level BI Rate tersebut dipandang masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan dan tetap kondusif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong intermediasi perbankan. Di samping itu, penurunan koridor bawah suku bunga operasi moneter Bank Indonesia turut berperan dalam mendorong pembiayaan antarbank melalui pasar uang yang sekaligus diharapkan mampu mengurangi risiko likuiditas dan memperluas sumber pendanaan bank di tengah risiko ketidakpastian yang masih cukup tinggi.

Pada pertengahan semester I 2012, manajemen makro dan sistem keuangan dihadapkan pada tantangan baru seiring dengan menguatnya ekspektasi inflasi dan memburuknya sentimen global. Hasil survei konsumen dan survei penjualan eceran mengindikasikan kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat menyusul ketidakpastian terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada saat yang sama, perkembangan nilai tukar dan berbagai indikator di pasar keuangan mengonfirmasi pemburukan

sentimen pasar seiring dengan spekulasi keluarnya Yunani dari Uni Eropa (*Grexit*). Menanggapi perkembangan tersebut, sejak Maret 2012 Bank Indonesia memandang bahwa level BI Rate sebesar 5,75% cukup ideal untuk menjaga perimbangan antara tujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat, dan memelihara tingkat kepercayaan pelaku pasar. Sementara itu, manuver kebijakan untuk meredam kenaikan risiko inflasi dalam jangka pendek dan mendukung pengelolaan keseimbangan eksternal dilakukan melalui langkah penguatan operasi moneter. Pilihan kebijakan tersebut dilandasi keyakinan bahwa sumber tekanan ekspektasi inflasi bersifat temporer dan belum membahayakan tujuan pencapaian sasaran inflasi selama gejolak dimaksud dapat diantisipasi lebih dini. Dalam perjalanannya, respons kebijakan tersebut cukup efektif di dalam menjangkar kembali ekspektasi inflasi ke lintasan sarannya sebagaimana diindikasikan oleh sejumlah hasil survei ekspektasi harga. Selain itu, gejolak ekspektasi inflasi yang kembali mereda juga sangat dipengaruhi oleh pembatalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Memasuki semester II 2012, perekonomian Indonesia dihadapkan pada meningkatnya risiko ketidakseimbangan eksternal. Di satu sisi, defisit neraca transaksi berjalan cenderung melebar, sementara di sisi lain, pembiayaan defisit terkendala oleh keterbatasan arus masuk modal asing menyusul memburuknya sentimen global serta harga aset rupiah yang dipersepsikan terlalu mahal. Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah taktis di area moneter berupa penyempitan koridor bawah suku bunga operasi moneter Bank Indonesia sebesar 25 bps menjadi 4,00% pada Agustus 2012. Langkah tersebut diikuti dengan penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang sekaligus berperan sebagai komplemen bagi kebijakan nilai tukar. Penguatan struktur suku bunga jangka pendek diharapkan dapat ditransmisikan ke struktur suku bunga pasar uang dan pasar obligasi secara menyeluruh sehingga aset rupiah dapat

kembali kompetitif sekaligus mampu mendongkrak pasokan valas di pasar keuangan domestik.

Respons kebijakan penyempitan koridor bawah suku bunga operasi moneter tersebut berjalan cukup efektif. Menipisnya *spread* imbal hasil SBN tenor panjang dengan tenor pendek pasca-langkah penguatan struktur suku bunga merefleksikan efektivitas langkah kebijakan dimaksud dalam mendorong kenaikan struktur suku bunga secara menyeluruh. Menyusul perkembangan tersebut, modal asing kembali mengalir ke aset rupiah. Sejumlah faktor eksternal juga turut mendorong perbaikan persepsi risiko pelaku pasar keuangan. Langkah stimulus moneter oleh sejumlah bank sentral negara-negara maju, khususnya *Quantitative Easing* ketiga (QE-3) oleh Bank Sentral Amerika Serikat memberi andil yang sangat signifikan dalam memulihkan kembali *risk appetite* pelaku pasar global untuk berinvestasi di aset-aset *emerging markets* termasuk di dalamnya, aset rupiah.

Secara menyeluruh, respons kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2012 dapat dinilai cukup ampuh dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga tingkat kepercayaan pelaku pasar, dan mendukung upaya penyesuaian keseimbangan eksternal secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2012 tetap mampu melaju di atas 6%. Indonesia bahkan tercatat menjadi satu dari sedikit negara di kawasan yang masih mampu melaju cukup cepat ditengah beratnya dampak perlambatan ekonomi global. Selain itu, gairah berinvestasi di aset rupiah juga dapat terus terpelihara dan pada gilirannya turut mendukung kecukupan pembiayaan defisit transaksi berjalan.

9.2 Kebijakan Nilai Tukar

Strategi kebijakan nilai tukar rupiah selama tahun 2012 diarahkan untuk tetap mendukung pengendalian inflasi serta tercapainya stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Di sepanjang tahun 2012, nilai tukar rupiah cenderung mengalami tekanan depresiasi dengan intensitas yang cukup besar seiring dengan terganggunya keseimbangan eksternal. Kuatnya permintaan domestik di tengah perlambatan ekonomi global serta masih tingginya sentimen pelaku pasar terhadap dinamika pemulihan ekonomi global berdampak pada tingginya permintaan valuta asing (valas) yang sekaligus mengeskalisasi tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah.

Menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang berpegang pada konsistensi arah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap kondisi fundamentalnya. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia memberikan ruang penyesuaian yang lebih besar bagi nilai tukar sebagai daya dukung terhadap penyesuaian ketidakseimbangan eksternal. Pada saat yang sama Bank Indonesia melakukan langkah stabilisasi nilai tukar melalui intervensi valas secara terukur untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan dan memastikan berlangsungnya proses penyesuaian secara teratur. Bank Indonesia juga menempuh sejumlah kebijakan di area pengelolaan arus modal melalui langkah pendalaman pasar valas sebagai komplemen dari langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur pasokan devisa sekaligus mendorong pendalaman pasar valas di dalam negeri.

Pada semester I 2012, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan nilai tukar untuk menjaga kepercayaan pelaku bisnis dan meredam peningkatan risiko inflasi dalam jangka pendek. Nilai tukar yang stabil tentunya dibutuhkan dalam memelihara tingkat kepercayaan pelaku usaha, khususnya di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak

perlambatan ekonomi global. Stabilitas nilai tukar rupiah juga berperan dalam meredam gejala peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat yang sempat melonjak menyusul ketidakpastian rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Tekanan terhadap nilai tukar memuncak di pengujung terakhir semester I 2012 seiring dengan memburuknya sentimen pelaku pasar global akibat ketidakpastian resolusi krisis di Uni Eropa dan semakin terbatasnya pasokan valas seiring dengan mulai memburuknya defisit neraca transaksi berjalan.

Kondisi ketidakseimbangan eksternal terus berlanjut di paruh kedua tahun 2012. Sementara itu, kondisi pasar valas domestik yang masih dangkal seringkali memicu keketatan likuiditas valas meski ketersediaan pasokan valas masih cukup memadai.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia merumuskan kebijakan pengelolaan arus modal yang ditujukan untuk memperdalam pasar valas di domestik. Dalam rangka penguatan pasokan valas yang lebih berkesinambungan Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai efektif pada Januari 2012. (lihat Boks 9.2). Berdasarkan kebijakan tersebut, eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui bank devisa di Indonesia paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)¹. Selanjutnya, dalam rangka pengayaan instrumen valas di pasar domestik, sejak Juni 2012 Bank Indonesia membuka lelang *Term Deposit* berdenominasi valas (TD valas) yang dapat menjadi *outlet* penempatan likuiditas valas milik perbankan, termasuk devisa yang berasal dari hasil ekspor. Selain berperan untuk memperkuat cadangan devisa, lelang TD valas juga berfungsi sebagai saluran intermediasi pasokan valas secara tidak langsung dari kelompok bank yang memiliki kelebihan likuiditas valas ke kelompok bank

1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/20/PBI/2011 menyebutkan bagi PEB yang dikeluarkan tahun 2012, DHE wajib diterima eksportir melalui bank devisa dalam negeri paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal PEB. Dengan demikian, DHE atas PEB Januari 2012 harus sudah diterima pada Juli 2012.

yang kekurangan likuiditas valas (lihat Boks 9.3). Bank Indonesia juga merelaksasi ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank untuk mendukung penguatan pasokan valas melalui pendalaman pasar valas domestik².

Perubahan Peraturan Bank Indonesia dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian persyaratan jangka waktu *hedging* pihak asing, dari semula paling singkat tiga bulan menjadi paling singkat satu minggu, penyesuaian persyaratan kegiatan investasi (termasuk penghasilan investasi yang dapat dipastikan) pihak asing yang menjadi *underlying* transaksi *hedging*, dari semula paling singkat tiga bulan menjadi paling singkat satu minggu, penyesuaian *underlying* kegiatan ekspor impor perdagangan internasional, dari semula hanya berdasarkan *Letter of Credit* (L/C) menjadi termasuk Non-L/C, serta diperkenalkannya *hedging* dengan jangka waktu kurang dari satu minggu dalam rangka setelmen kegiatan investasi. Langkah pelonggaran tersebut diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan pelaku pasar dalam memitigasi risiko nilai tukar yang dihadapi, sekaligus mendorong pendalaman pasar valas, dan mengurangi dominasi aktivitas *hedging* melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) yang berkembang di luar wilayah Indonesia.

Langkah stabilisasi nilai tukar rupiah beserta kebijakan pengelolaan arus modal sejauh ini cukup efektif dalam meredam depresiasi nilai tukar rupiah secara berlebihan sebagaimana tercermin pada tingkat volatilitas yang rendah sekaligus menjaga level cadangan devisa pada tingkat yang aman. Dampak efektif berbagai kebijakan pengelolaan arus modal terhadap pendalaman pasar valas domestik tentunya

tidak serta merta berlangsung dan membutuhkan upaya penguatan yang lebih menyeluruh secara terus menerus.

Kalibrasi strategi kebijakan moneter dan nilai tukar, termasuk baurannya dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran di tahun 2012 cukup ampuh dalam meredam potensi gejolak yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Tercapainya kestabilan inflasi dan nilai tukar pada gilirannya telah menciptakan sebuah iklim yang kondusif bagi ketahanan industri perbankan. Dengan ketahanan yang semakin teruji, fungsi intermediasi perbankan pun mampu berjalan pada jalur yang tepat. Ini tercermin dari peningkatan kredit produktif dengan laju yang cukup tinggi disertai dengan tingkat kredit bermasalah yang rendah. Dengan risiko makro yang menurun dan stabilitas sistem keuangan yang stabil, dinamika tabungan-investasi pun menjadi lebih bergairah dan kontributif terhadap penguatan fondasi struktural perekonomian.

9.3 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Pelaksanaan kebijakan moneter dan nilai tukar pada tahun 2012 tetap diarahkan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap pasar keuangan domestik. Melalui upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan menjaga volatilitas nilai tukar. Hal ini dilakukan dengan tetap memberikan kepastian dan menjaga kepercayaan pelaku pasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi, memitigasi dampak perlambatan ekonomi global termasuk mengawal proses pengelolaan keseimbangan eksternal secara gradual serta senantiasa menjangkar ekspektasi inflasi ke depan.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter (OM). Strategi pengelolaan likuiditas yang dilakukan melalui

2 Peraturan Bank Indonesia No. 14/10/PBI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2008 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank

Operasi Pasar Terbuka (OPT) pada tahun 2012 tetap difokuskan untuk merespons arah kebijakan BI Rate dan koridor suku bunga yang telah ditetapkan di tengah kondisi eksekusi likuiditas yang relatif besar. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi optimalisasi tenor instrumen, mengelola struktur suku bunga di pasar keuangan dan pengelolaan komposisi instrumen. Sementara itu, strategi pengelolaan nilai tukar dilakukan melalui upaya untuk menjaga keseimbangan di pasar valas domestik dan meminimalkan volatilitas nilai tukar ditengah besarnya arus masuk dan keluarnya dana asing (*capital flow*).

Implementasi Kebijakan Moneter

Turunnya BI Rate ke 5,75% dan suku bunga *Deposit Facility* (DF) ke 4,00% pada semester I 2012 dilakukan untuk memberikan dorongan pada perekonomian (Grafik 9.1). Sejalan dengan sinyal kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia sejak tahun 2011 yang dilanjutkan pada tahun 2012, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga cenderung turun. Penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga simpanan dan pinjaman yang bermuara pada peningkatan kredit perbankan sebagai salah satu stimulus bagi perekonomian domestik.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui penetapan suku bunga instrumen operasi moneter. Untuk membentuk suku bunga pasar uang yang merefleksikan kondisi fundamental, Bank Indonesia menawarkan instrumen moneter dengan berbagai pilihan tenor. Suku bunga di berbagai tenor mengalami peningkatan terutama di tenor yang lebih panjang. Peningkatan suku bunga instrumen dilakukan untuk memperbaiki struktur suku bunga pasar serta upaya pengelolaan tambahan likuiditas musiman terutama menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun 2012. (Grafik 9.2).

Dari sudut pandang pelaksanaan kebijakan moneter, turunnya suku bunga DF diharapkan mampu meningkatkan manajemen likuiditas perbankan melalui pendayagunaan eksekusi likuiditas di PUAB. Melalui diversifikasi sumber pemenuhan likuiditas harian, risiko likuiditas yang dihadapi bank diharapkan dapat berkurang, terlebih setelah mempertimbangkan potensi dampak dari kerentanan pasar keuangan global. Selain itu, langkah penurunan suku bunga DF juga diharapkan mampu memperbaiki struktur OPT Bank Indonesia melalui pergeseran ke arah penempatan eksekusi likuiditas di instrumen OPT yang bertenor panjang.

Implikasi kebijakan tersebut terlihat pada penurunan posisi DF yang merupakan instrumen penyerapan dengan tenor terpendek (*overnight*). Posisi DF mengalami penurunan tertinggi selama tahun 2012 (-50,2%), yaitu dari Rp169,92 triliun menjadi Rp84,62 triliun. Penurunan tersebut diikuti oleh kenaikan volume PUAB ke rata-rata volume normalnya, yaitu sebesar Rp11,14 triliun setelah sempat turun di bawah rata-rata normalnya pada triwulan I 2012. Sementara itu instrumen *Term Deposit* (TD) mengalami kenaikan sebesar 17,1% atau dari Rp154,38 triliun menjadi Rp180,80 triliun. Beralihnya penempatan likuiditas ke instrumen dengan tenor yang lebih panjang sejalan dengan strategi penguatan operasi moneter guna mendorong pendalaman pasar uang dan aktivitas keuangan. Aktifnya pasar uang domestik diharapkan menjadi pendorong menguatnya

Grafik 9.1 Perkembangan Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia



Grafik 9.2 Perkembangan Suku Bunga Instrumen

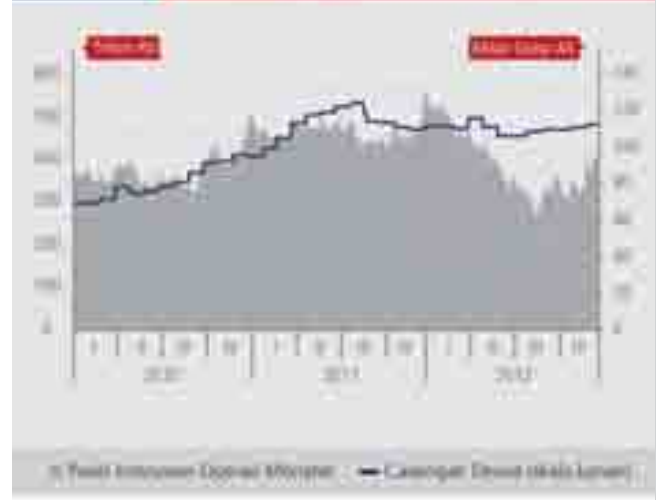


transmisi kebijakan moneter dari BI Rate sebagai acuan suku bunga jangka pendek ke suku bunga yang lebih panjang, seperti halnya suku bunga simpanan atau suku bunga pinjaman perbankan.

Pada semester II 2012, seiring dengan diberlakukannya kebijakan untuk menaikkan suku bunga DF sebesar 25 bps yang berlaku efektif pada 13 Agustus 2012, imbal hasil (*yield*) instrumen operasi moneter jangka menengah mengalami peningkatan. Langkah tersebut diambil setelah volume PUAB kembali normal. Kondisi tersebut menyebabkan preferensi penempatan dana bank semakin beralih dari instrumen operasi moneter berjangka sangat pendek (*overnight/Deposit Facility*) ke jangka lebih panjang, yaitu instrumen TD rupiah atau *Reverse Repo* SBN (RR-SBN).

Strategi pengelolaan likuiditas juga dipengaruhi oleh turunnya ekse likuiditas yang harus diserap sebagaimana tercermin dari berkurangnya posisi instrumen moneter. Posisi instrumen operasi moneter berkurang Rp102 triliun, yaitu dari Rp531 triliun menjadi Rp429 triliun. Berkurangnya likuiditas yang harus diserap tersebut terutama merupakan dampak dari langkah stabilisasi nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Posisi ekse likuiditas yang terserap oleh instrumen moneter bergerak dalam tren menurun sejak awal tahun 2012 seiring

Grafik 9.3 Posisi Instrumen Operasi Moneter dan Cadangan Devisa



dengan pergerakan cadangan devisa yang digunakan untuk transaksi pengelolaan nilai tukar guna menjaga kecukupan valas domestik (Grafik 9.3).

Perubahan posisi instrumen operasi moneter (OM) sepanjang tahun 2012 dipengaruhi oleh dinamika faktor *autonomus* dan dampak dari faktor musiman. Sejak awal tahun hingga akhir triwulan III 2012, posisi OM cenderung menurun. Ekspansi likuiditas yang bersumber dari ekspansi keuangan pemerintah lebih kecil dibandingkan dampak kontraksi likuiditas dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal ini sekaligus berdampak pada berkurangnya ekse likuiditas rupiah di sistem perbankan. Namun, pada triwulan IV 2012, ekse likuiditas tersebut kembali merangkak naik seiring dengan berlangsungnya pola musiman dari lonjakan ekspansi keuangan pemerintah dalam bentuk pembayaran termin proyek, Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi, serta pembayaran gaji dan bonus akhir tahun. Berdasarkan jenis instrumen, posisi instrumen RR-SBN³ mencatat peningkatan tertinggi

3 Penyerapan ekse likuiditas melalui instrumen RR-SBN dapat memberikan dua manfaat, yaitu sebagai instrumen penyerapan ekse likuiditas dan penggunaannya sebagai *underlying* mendorong peningkatan transaksi SBN di pasar. Penggunaan SBN dalam RR-SBN akan membantu perdagangan SBN menjadi semakin likuid dan selanjutnya mendukung upaya memperdalam pasar SBN domestik. Pasar SBN yang "dalam" dapat memperlancar transmisi kebijakan moneter di satu sisi dan memperkuat stabilitas harga SBN itu sendiri.

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Posisi RR-SBN meningkat sebesar 40,2% atau bertambah dari Rp58 triliun di tahun 2011 menjadi Rp81,4 triliun di tahun 2012 (Grafik 9.4). Sampai dengan akhir tahun 2012 tingkat penggunaan SBN milik Bank Indonesia telah mencapai level optimal, yaitu sebesar 97% dari SBN yang dimiliki atau sebesar Rp84 triliun. Sementara itu, posisi SBI⁴ tercatat turun sebesar Rp40,92 triliun dengan posisi pada akhir tahun 2012 sebesar Rp82,33 triliun. Komposisi instrumen OM juga mengalami perubahan. Berkurangnya DF di satu sisi dan bertambahnya TD di sisi yang lain mengakibatkan komposisi DF turun dari 32% menjadi 20% sementara komposisi TD rupiah naik dari 29% menjadi 42% (Grafik 9.5). Perkembangan ini sekaligus menjadi indikasi dari perubahan preferensi perbankan terhadap suku bunga yang ditawarkan oleh instrumen moneter.

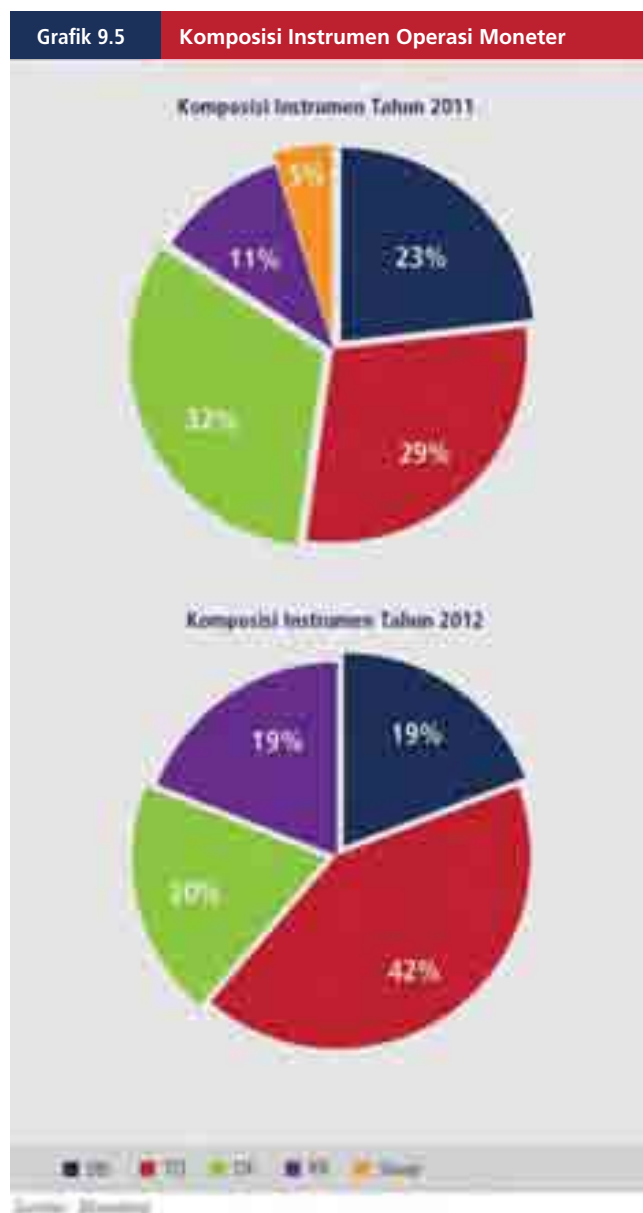
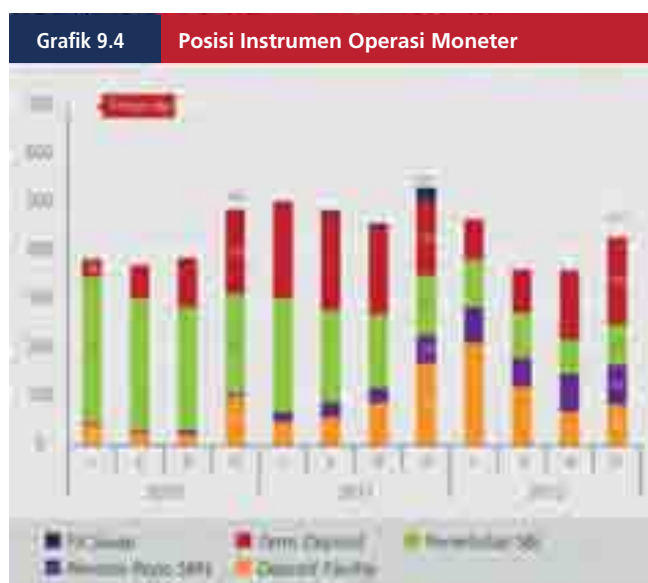
Transmisi Kebijakan Jalur Suku Bunga

Penurunan suku bunga kebijakan diikuti oleh penurunan suku bunga di PUAB (Grafik 9.6). Suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional

operasi moneter bergerak di bawah BI Rate dan berada sedikit lebih tinggi dari koridor bawah suku bunga kebijakan moneter. Rata-rata harian suku bunga PUAB O/N sepanjang tahun 2011 yang tercatat sebesar 5,65%, pada tahun 2012 rata-rata suku bunga turun ke level 4,01%. Seiring dengan strategi penguatan struktur suku bunga OM, suku bunga PUAB cenderung meningkat pada akhir tahun dan rata-rata PUAB O/N pada Desember 2012 tercatat sebesar 4,17% setelah sempat menyentuh 3,75% pada awal triwulan II 2012.

Risiko di pasar PUAB juga semakin membaik. Selisih suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah

4 Di tahun 2012, penawaran SBI hanya dibuka untuk tenor 9 bulan dan tetap diperlengkapi dengan ketentuan masa endap minimum.

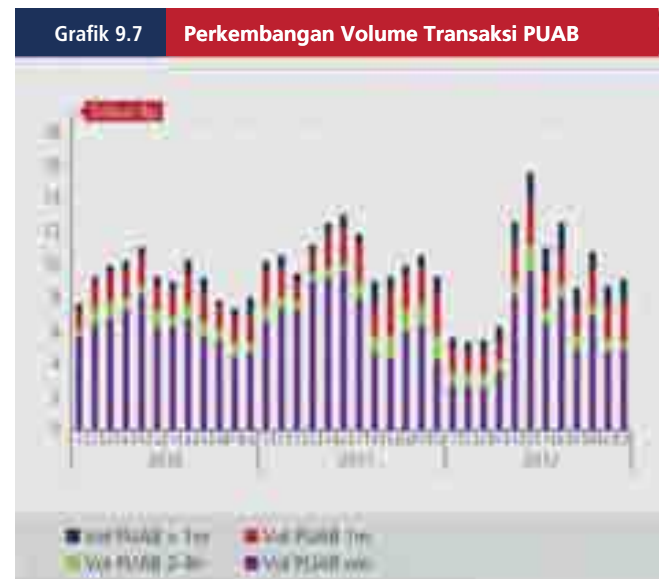


secara rata-rata berkisar 10 bps di tahun 2012 atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 yang berkisar 22 bps. Salah satu faktor pendukung lebih efisiennya harga PUAB pada tahun 2012 yaitu diaktifkannya pengawasan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) (lihat boks 9.4). Indikasi efisiensi lainnya yaitu tingkat volatilitas suku bunga PUAB O/N yang terjaga di level rendah, yaitu pada kisaran 2 bps, atau lebih rendah dari tahun 2011 yang berkisar 6 bps. Kondisi tersebut didorong oleh semakin optimalnya strategi operasi moneter Bank Indonesia.

Sejumlah perbaikan yang telah dicapai pada tahun 2011 tetap dapat dipertahankan dalam konteks likuiditas PUAB. Secara Rata-rata volume harian PUAB pada tahun 2012 (Rp9,3 triliun per hari) masih lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 (Rp10,6 triliun per hari). Demikian pula Rata-rata harian frekuensi transaksi dan jumlah bank yang melakukan transaksi pada tahun 2012 juga mengalami penurunan masing-masing menjadi dari rata-rata 184 transaksi menjadi 136 transaksi per hari dengan jumlah pelaku dari 68 bank menjadi 59 bank per hari (Grafik 97 dan 9.8). Meskipun demikian likuiditas PUAB bergerak dalam kecenderungan yang membaik disepanjang tahun 2012, setelah sempat mencapai titik terendahnya di periode awal 2012.

Penurunan suku bunga instrumen moneter dan suku bunga PUAB dapat ditransmisikan dengan berlanjutnya penurunan suku bunga perbankan pada tahun 2012. Suku bunga perbankan baik dari sisi dana maupun kredit terus mengalami penurunan dan mencapai tingkat terendah sejak tahun 2005. Ketersediaan dana dengan harga yang memadai turut memengaruhi laju investasi yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan transparansi melalui kewajiban untuk mengumumkan penentuan suku bunga dasar kredit (SBDK) kepada masyarakat juga turut mempengaruhi capaian tersebut.

Meski penurunan berlangsung, baik pada suku bunga kredit maupun suku bunga deposito, selisih antara suku bunga kredit dan deposito masih cukup lebar. Dari sisi dana, penurunan suku bunga deposito mencapai 118 bps menjadi 5,56%. Sementara itu rata-rata suku bunga kredit hanya turun sebesar 61 bps menjadi 12,4% (Grafik 9.9). Selisih antara suku bunga dana dan deposito tersebut bahkan cenderung melebar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi mikro, perilaku tersebut tidak terlepas dari upaya bank untuk mempertahankan margin. Sementara dari sisi makro, hal tersebut memberikan indikasi bahwa potensi untuk meningkatkan efisiensi perbankan masih cukup besar.



Grafik 9.8 Perkembangan Bank Pelaku Transaksi PUAB



Dari sisi kredit, penurunan suku bunga kredit investasi (KI) merupakan yang terbesar pada tahun 2012. (Grafik 9.10).

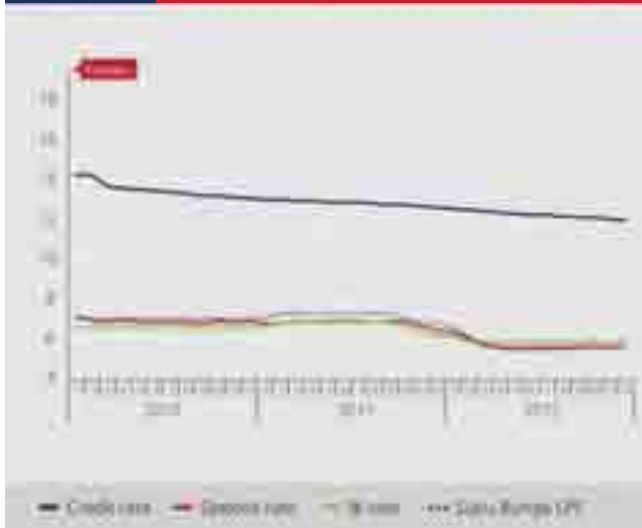
Dari sisi nominal, aktivitas perekonomian yang cukup kuat pada akhirnya mempengaruhi penyaluran kredit meski dengan pertumbuhan yang sedikit melambat, khususnya pada paruh kedua tahun 2012. Penyaluran kredit mencapai puncak pertumbuhannya pada Mei 2012, meski kemudian melambat pada paruh kedua tahun 2012. Pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan dinamika kredit, pertumbuhan

DPK juga mengalami perlambatan. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan seluruh komponen, baik giro, tabungan maupun deposito.

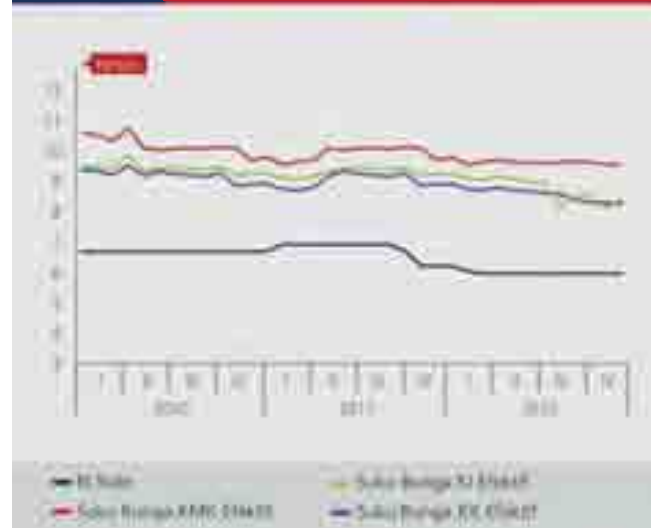
Besaran Moneter dan Faktor-faktor yang Memengaruhi

Pertumbuhan likuiditas perekonomian selama tahun 2012 mampu menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi domestik tanpa menimbulkan tekanan disisi harga. Kondisi tersebut tercermin dalam capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, sementara inflasi bergerak di dalam kisaran target tahun 2012 ($4,5\% \pm 1\%$), yaitu 4,3%. Berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif selama periode tersebut memengaruhi pertumbuhan likuiditas perekonomian pada periode yang sama. Sementara itu, dari sisi pasokan, perkembangan likuiditas perekonomian sejalan dengan dinamika faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti aktiva luar negeri dan dalam negeri, termasuk operasi keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pada semester I tahun 2012, aktiva dalam negeri memegang peran yang cukup tinggi dalam likuiditas perekonomian meski kemudian mereda pada paruh berikutnya menyusul membesarnya porsi aktiva dalam negeri pada periode tersebut. Perilaku operasi keuangan pemerintah juga relatif sama meski sedikit naik pada akhir tahun

Grafik 9.9 BI Rate, LPS dan Suku Bunga Perbankan



Grafik 9.10 Perkembangan Suku Bunga KI, KMK, dan KK



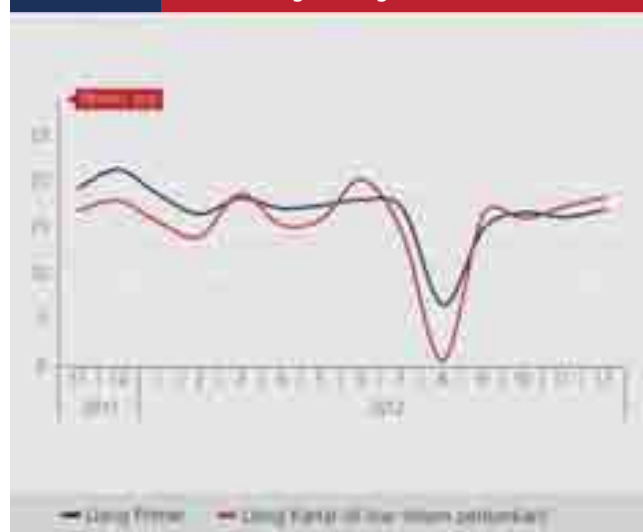
2012 terkait pola ekspansi fiskal. Sedangkan perilaku aktiva luar negeri yang lebih sejalan dengan dinamika perekonomian global.

Tahun 2012 ditandai oleh melambatnya pertumbuhan uang primer di tengah pertumbuhan uang kartal yang masih meningkat. Pertumbuhan uang kartal yang meningkat sebesar 21,6% dibandingkan akhir tahun sebelumnya sebesar 18,3% memberikan indikasi masih kuatnya kegiatan ekonomi pada tahun 2012. Sementara itu, baik dengan memperhitungkan atau mengeluarkan dampak implementasi GWM LDR pada bulan Maret, pertumbuhan uang primer menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan uang primer turun dari sebesar 18,3% pada tahun 2011 menjadi sebesar 14,9% pada tahun 2012 yang lebih disebabkan oleh penurunan giro di Bank Indonesia. (Grafik 9.11). Penurunan pertumbuhan DPK, sebagai basis perhitungan GWM, menjadi pendorong turunnya giro di Bank Indonesia. Pada tahun 2011 pertumbuhan DPK mencapai sebesar 19%, sementara pada tahun 2012 hanya sebesar 15,8%.

Perlambatan pertumbuhan DPK terutama terjadi pada kelompok giro dan deposito. Penurunan pertumbuhan giro terjadi pada paruh kedua tahun 2012, sejalan dengan melambatnya aktivitas perekonomian pada periode tersebut. Penurunan aktivitas perdagangan di sektor keuangan, terkait dengan menurunnya kinerja sektor berbasis komoditas dan turut menjelaskan dinamika pergerakan giro perbankan. Berbeda halnya dengan giro, perlambatan deposito terjadi pada semester I tahun 2012 dan tumbuh stabil sampai dengan akhir tahun 2012. Meski mengalami perlambatan, kontribusi deposito terhadap DPK masih dominan mencapai 42,8% diikuti oleh tabungan dan giro yang masing-masing mencapai 33,4% dan 23,8%.

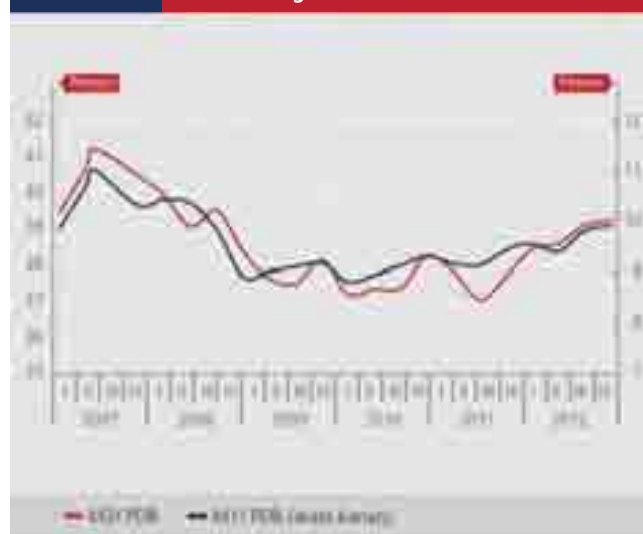
Penurunan kontribusi giro menyebabkan perlambatan pertumbuhan M1 khususnya pada semester II tahun 2012. Pada semester I tahun 2012, pertumbuhan giro dan M1 masing-masing meningkat dari sebesar 20,3% dan 19,4% pada akhir tahun 2011 menjadi sebesar

Grafik 9.11 Perkembangan Uang Primer dan Kartal



24,0 dan 22,5% pada pertengahan tahun 2012. Pertumbuhan giro dan M1 terus melambat sampai dengan akhir tahun 2012 menjadi sebesar 15,5% dan 16,4%. (Grafik 9.13 dan 9.14). Sementara itu, M2 yang tumbuh melambat selama tahun 2012 disebabkan perlambatan pertumbuhan giro dan tabungan. Pola perlambatan giro dan tabungan sejalan dengan menurunnya aktivitas perekonomian dan pasar keuangan selama tahun 2012. Pertumbuhan M2 selama tahun 2012 menurun menjadi 14,8% (yoy) dibandingkan dengan akhir tahun 2011 sebesar 16,4% (yoy). Meski mengalami perlambatan, kontribusi M1 dan M2 terhadap perekonomian terus mengalami

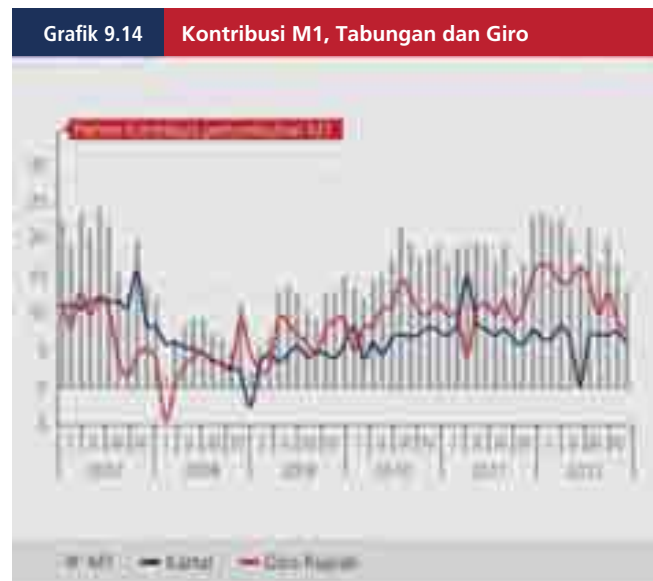
Grafik 9.12 Perkembangan M1 dan M2



peningkatan sejak pertengahan tahun 2011. Sehingga mampu menjaga ketersediaan likuiditas sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Hal ini terlihat dari tekanan inflasi yang relatif stabil meski kontribusi likuiditas perekonomian terhadap PDB meningkat. (Grafik 9.15)

Kontribusi Aktiva Dalam Negeri Bersih (NDA) dalam pertumbuhan M2 masih tinggi, meski cenderung menurun sejalan dengan melambatnya pertumbuhan giro dan kredit rupiah pada paruh kedua tahun 2012. Sumbangan NDA mencapai 71% dalam faktor-faktor yang memengaruhi M2. Pergerakan NDA umumnya sejalan dengan kontribusi Tagihan Bersih Kepada Pemerintah (*Net Claims on Government- NCG*) mengalami penurunan pada paruh kedua tahun 2012. Penurunan NDA lebih jauh tertahan oleh peningkatan NCG pada triwulan IV 2012 sejalan dengan meningkatnya ekspansi fiskal pada akhir tahun. Kontribusi NCG terhadap M2 terus mengalami peningkatan mendekati pertumbuhan sebelum krisis tahun 2000 (Grafik 9.16)

Dinamika aktiva valas dalam kontribusi M2 sedikit berbeda jika dibandingkan dengan perilaku aktiva domestik serta operasi keuangan pemerintah. Kontribusi Aset Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Asset - NFA*) dalam M2 terus mengalami penurunan



hususnya sejak pertengahan tahun 2011 dan berlanjut pada paruh pertama tahun 2012. Penurunan NFA sejalan dengan dinamika arus modal asing yang turut dipengaruhi oleh kinerja perekonomian global. Pada periode tersebut, arus masuk modal asing relatif terbatas. Di sisi perbankan, melambatnya NFA disebabkan pula oleh peningkatan kredit valas yang tidak diikuti oleh pertumbuhan DPK valas dalam level yang memadai. Kontribusi NFA dalam M2 mulai membaik pada semester II tahun 2012. Hal ini didorong oleh upaya stabilisasi nilai tukar dan pelemahan nilai tukar yang memperbesar kontribusi NFA. Sementara itu, kenaikan DPK valas berangsur



Grafik 9.16 Kontribusi Faktor yang Memengaruhi M2



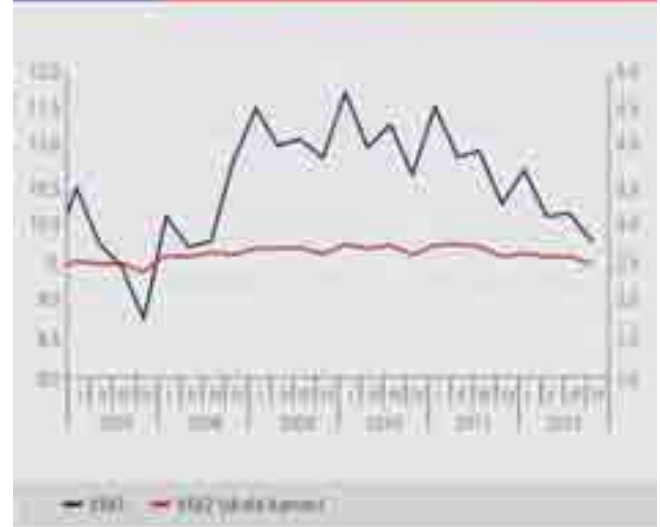
meningkat dan menjadi pendorong kenaikan NFA bank.

Kebijakan moneter yang turut memengaruhi perilaku besaran moneter tercermin pula dalam perkembangan velositas uang selama tahun 2012. Tren peningkatan velositas tercermin dari velositas M2 meski dalam empat tahun terakhir (2009–2012) pergerakannya cenderung lebih landai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu dinamika velositas M1 cenderung tidak stabil dalam 4 tahun terakhir. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa uang yang dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa adalah untuk memfasilitasi transaksi nominal dalam masyarakat (motif transaksi). Rata-rata kecepatan velositas M2 selama empat tahun terakhir tercatat sebesar 2,7 atau meningkat dibandingkan dengan rata-ratanya sejak 1998 sampai dengan tahun 2008 yang sebesar 2,2 (Grafik 9.17 dan 9.18).

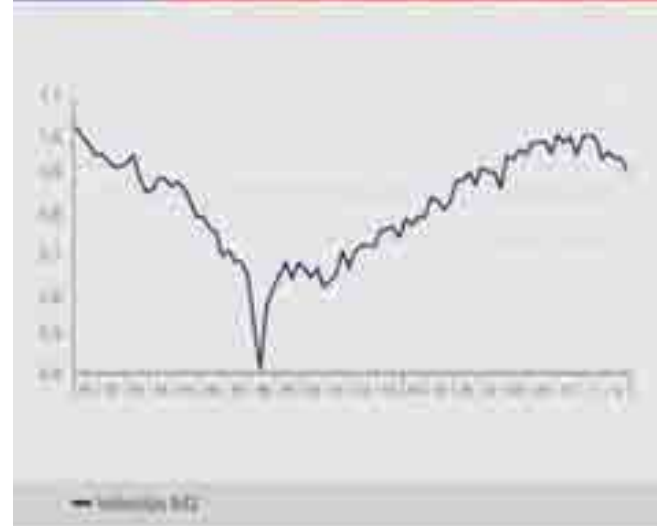
Penggunaan uang mulai tergeser oleh aset dalam bentuk surat berharga, khususnya pada saat kinerja pasar keuangan dalam tren positif. Hal ini terlihat dari hubungan positif antara NBFA dengan velositas uang sekaligus mengindikasikan terjadinya efek substitusi dalam masyarakat atau pergeseran aset dari berbentuk uang menjadi surat berharga. Kondisi pasar keuangan yang positif dapat menyebabkan penurunan permintaan uang dan mendorong naiknya

velositas uang. Dengan berkembangnya pasar keuangan, motif masyarakat berkembang dari yang semula hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga meluas menjadi untuk menyimpan nilai kekayaan (*store of wealth*) dalam bentuk instrumen-instrumen finansial di pasar surat berharga dan pasar modal. Hal ini sejalan dengan tren jangka panjang, yaitu pergerakan fase monetisasi menuju fase *financial sophistication*. Dengan demikian, peningkatan velositas uang selama beberapa periode terakhir tidak semata akibat berkurangnya suntikan likuiditas ke dalam perekonomian namun lebih kearah peralihan fase tersebut.

Grafik 9.17 Velositas M1 dan M2



Grafik 9.18 Velositas M2 U-Shape Jangka Panjang



Memasuki tahun ketujuh sejak penerapannya pertama kali di Indonesia pada tahun 2005, kerangka kerja *Inflation Targeting* (ITF) telah berperan penting dalam mendorong inflasi mengarah pada tren yang terus menurun. Meski pada prinsipnya ITF masih sangat relevan sebagai jangkar kebijakan moneter, langkah penguatan kerangka kerja kebijakan dipandang perlu untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Pertama, krisis keuangan global era 2008-2009 memberikan pelajaran penting bagi bank sentral bahwa kestabilan ekonomi makro memerlukan dukungan kestabilan sistem keuangan. Dalam kaitan tersebut, karakter sistem keuangan yang prosiklikal, seringkali justru memperbesar fluktuasi ekonomi makro, dan karenanya manajemen risiko makro-moneter perlu didukung oleh kebijakan makroprudensial untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam perekonomian. Kedua, pascakrisis global, meningkatnya likuiditas global di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, telah menyebabkan pergerakan arus modal ke negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia, yang berimplikasi pada dinamika nilai tukar. Oleh sebab itu, nilai tukar perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif pada perekonomian domestik. Ketiga, karakteristik inflasi di Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh sisi pasokan dan pengaruh harga komoditas global yang tidak dapat direspons hanya oleh suku bunga. Penguatan koordinasi sangat diperlukan untuk mengatasi sisi pasokan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun daerah.

Dalam konteks tersebut, kerangka kerja ITF yang menggunakan suku bunga BI Rate sebagai instrumen utama perlu diperkaya dengan instrumen-instrumen lainnya. Berbagai permasalahan ekonomi, apakah inflasi yang tinggi, nilai tukar yang bergejolak, kredit yang melaju terlalu cepat, neraca pembayaran yang defisit dan sebagainya, tidak akan efektif apabila hanya diatasi dengan kebijakan suku bunga. Kalau ini yang dijalankan, suku bunga akan terlalu tinggi dan membebani perekonomian. Oleh

sebab itu perlu dirumuskan strategi dan kebijakan moneter dengan mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia untuk mengarahkan perekonomian ke keseimbangan baru yang lebih efisien.

Dengan pertimbangan ini, Bank Indonesia telah merumuskan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia yang pada dasarnya merupakan bauran yang optimal yang terdiri atas lima pilar, yaitu kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, penguatan koordinasi kebijakan dan penguatan komunikasi kebijakan.

Pilar 1. Kebijakan Moneter

Respons moneter melalui suku bunga (BI-Rate) merupakan kebijakan utama untuk mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap konsisten dengan sasaran dan dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Koridor dan struktur suku bunga operasi moneter ditetapkan secara selaras dengan kondisi likuiditas dan pergerakan inflasi dalam jangka pendek. Dinamika dan prospek inflasi inti menjadi indikator utama didalam perumusan kebijakan moneter. Sementara itu, mengingat karakternya yang tidak secara langsung dipengaruhi kebijakan moneter, dinamika inflasi harga pangan (*volatile food*) dan harga komoditas strategis (*administered prices*) menjadi indikator yang tetap diperhatikan dinamikanya dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi fokus bagi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mengakomodasi meningkatnya peran harga aset didalam transmisi kebijakan moneter, kualitas pemantauan terhadap indikator harga aset, misalnya properti, akan terus dikembangkan dan turut dipertimbangkan didalam perumusan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.



Pilar 2. Kebijakan Nilai Tukar

Kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Kebijakan nilai tukar dan pengelolaan arus modal diarahkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran inflasi. Pengelolaan nilai tukar rupiah di bawah rezim nilai tukar mengambang bebas diarahkan untuk menjaga keselarasan antara pergerakan nilai tukar rupiah dengan fundamentalnya. Stabilisasi nilai tukar merupakan instrumen utama didalam operasionalisasi kebijakan nilai tukar. Sementara itu, pengelolaan arus modal tetap dilakukan secara konsisten dengan rezim devisa bebas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan nilai tukar. Langkah-langkah di bidang arus modal diarahkan untuk mengurangi volatilitas arus modal jangka pendek secara berlebihan.

Semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan perekonomian global serta derasnya aliran modal masuk asing meningkatkan kompleksitas manajemen ekonomi makro, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar. Dalam kaitan tersebut

diperlukan langkah pengintegrasian antara kebijakan nilai tukar dan pengelolaan arus modal asing ke dalam respons kebijakan moneter untuk mencapai sasaran inflasi dengan mempertimbangkan keseimbangan eksternal.

Pilar 3. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial akan diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal dan eksternal. Respons moneter melalui suku bunga (BI-Rate) merupakan kebijakan utama. Dalam kaitan tersebut, instrumen makroprudensial merupakan pendukung (*complement*) instrumen moneter dalam mencapai stabilitas moneter dan sistem keuangan, bukan sebagai pengganti (*substitute*). Instrumen moneter dan makroprudensial digunakan untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara menyeluruh, sehingga transmisi moneter melalui likuiditas, kredit dan harga aset berjalan efektif memperkuat transmisi suku bunga, nilai tukar dan ekspektasi. Kebijakan moneter dan makroprudensial didesain agar dapat memperkuat satu sama lain. Untuk itu, koordinasi kebijakan

sangat diperlukan agar integrasi kedua kebijakan tersebut dalam mengelola siklus perekonomian, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan secara makro dapat berjalan dengan baik.

Pilar 4. Penguatan Koordinasi Kebijakan

Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya, dilakukan dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, baik dalam pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah dan/atau forum koordinasi lainnya ditempuh untuk pengendalian inflasi, khususnya stabilitas harga bahan pangan (*volatile foods*), mitigasi dampak kebijakan harga pemerintah terhadap inflasi (*administered prices*), peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan permintaan. Sementara itu, koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Pilar 5. Penguatan Komunikasi Kebijakan

Penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Komunikasi ditujukan tidak sekedar untuk mendukung transparansi, namun lebih sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengarahkan ekspektasi publik dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam pencapaian sasaran inflasi, mengurangi ketidakpastian ekonomi, dan meningkatkan transparansi dan pemahaman publik terhadap kebijakan moneter.

Di tahun 2012 ini, kalibrasi kebijakan melalui strategi bauran kebijakan melalui lima pilar, secara umum, telah mulai terasa dampaknya pada perekonomian. Perekonomian Indonesia, walaupun melambat karena faktor global, tetap sanggup tumbuh cukup tinggi karena ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga. Sementara itu, inflasi tetap terkendali pada tingkat yang rendah.

Kebijakan Penerimaan DHE (Devisa Hasil Ekspor) dan Penarikan DULN (Devisa Utang Luar Negeri) melalui bank devisa domestik ini diawali oleh fakta yang menunjukkan bahwa masih terdapatnya DHE dan DULN yang diterima melalui bank diluar negeri. Hal tersebut berdampak pada keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar valas domestik yang sebagian dipenuhi oleh aliran modal jangka pendek yang rentan terhadap pembalikan (*sudden capital reversal*) dan dapat mengganggu stabilitas nilai tukar dan ekonomi makro. Dengan kebijakan ini diharapkan pasokan valas di pasar domestik menjadi lebih stabil dan berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat, dan mendukung upaya menjaga kestabilan nilai rupiah dan memperkuat stabilitas ekonomi makro. Pascapenerapan kebijakan pada 2 Januari 2012 dan diikuti penyempurnaan ketentuan pelaporan setelahnya, hasil pemantauan terakhir menunjukkan bahwa penerimaan DHE melalui bank devisa di dalam negeri terus meningkat.

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan. Sumber dana dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pasokan valas di pasar domestik yang sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio jangka pendek merupakan salah satu sumber dana pembangunan ekonomi yang rentan terhadap risiko pembalikan (*sudden capital reversal*). Dari dalam negeri, hasil ekspor belum secara optimal memberikan pasokan valas karena tidak dibawa ke dalam negeri. Untuk itu, dengan tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia menggulirkan kewajiban penerimaan DHE dan penarikan DULN melalui Bank Devisa di Indonesia. Penerapan kebijakan ini mulai berlaku 2 Januari 2012 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/20/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penerimaan

Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

Pada awal penerapan kebijakan ini, terdapat beberapa hambatan dalam hal pemenuhan kewajiban penerimaan DHE dan pelaporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE), antara lain terkait: permasalahan umum yang terjadi dalam kegiatan ekspor, kendala waktu penyampaian informasi serta beban administratif eksportir dan bank dalam penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia dikeluarkan penyempurnaan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia No. 14/25/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerimaan DHE dan Penarikan DULN.

Hasilnya, berdasarkan pemantauan pelaporan DHE selama 1 tahun ini, Bank Indonesia telah memiliki data akurat tentang DHE yang diterima oleh per-individu eksportir dan per-individu bank. Selama tahun 2012, aliran DHE melalui bank devisa di dalam negeri terus menunjukkan trend yang meningkat. Pada Januari 2012, DHE yang diterima melalui bank devisa domestik sebesar 9,376 juta dolar AS (79,5% terhadap nilai DHE), yang selanjutnya terus meningkat sampai dengan posisi terkini Oktober 2012 mencapai sebesar 12,067 juta dolar AS (84,8% dari nilai DHE). Sebaliknya DHE yang diterima melalui bank di luar negeri mengalami penurunan dari 2,420 juta dolar AS (20,5% dari nilai ekspor) pada Januari 2012 menjadi sebesar 2,161 juta dolar AS (15,3% dari total ekspor) pada bulan Oktober 2012. Berdasarkan kontribusinya terhadap pelaporan DHE tersebut, lima komoditas utama ekspor Indonesia berturut-turut adalah batubara (*coal*), palm oils, tekstil dan produk tekstil, *machinary and mechanic*, serta produk kimia.

Selanjutnya, dari sisi bank pelapor, saat ini terdapat 64 bank devisa yang telah melaporkan penerimaan DHE dengan sepuluh besar bank devisa tersebut adalah BCA, Bank Mandiri, Citibank, BNI, HSBC, Bank of Tokyo Mitsubishi, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Standard Chartered, BRI dan Bank DBS. Adapun dari sisi eksportir pelapor, lebih dari

11.000 eksportir telah berpartisipasi melaporkan DHE yang diterimadari aktivitas usaha ekspor yang dilakukannya. Sejumlah kecil dari eksportir tersebut yang berjumlah 34 terkena sanksi administratif berupa denda karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa.

TD Valas merupakan salah satu instrumen valas yang memberikan alternatif penempatan valas di Bank Indonesia bagi perbankan dalam negeri. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pasar valas domestik yang cenderung tipis dan tersegmentasi, serta permintaan valas domestik yang bergantung pada pasokan valas dari luar negeri. Sebagai akibatnya ketika terjadi permintaan valas relatif tinggi, nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Instrumen TD valas ditawarkan dalam beberapa tenor penempatan yakni 7 hari, 14 hari dan 30 hari.

Instrumen TD valas memiliki beberapa kelebihan, di antaranya imbal hasil yang kompetitif, memiliki karakteristik yang fleksibel dalam konteks likuiditas, seiring dengan adanya fasilitas *early redemption* maupun statusnya sebagai agunan instrumen *FX-swap* dengan Bank Indonesia, serta dapat menjadi faktor pengurang Posisi Devisa Neto bank.

Dalam operasionalisasinya, sesuai dengan ketentuan, lelang TD valas diselenggarakan secara reguler setiap hari Rabu atau hari kerja lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Lelang TD valas yang pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2012. Selanjutnya lelang TD valas dilakukan paling kurang 1 kali dalam seminggu.

Terkait dengan lelang TD valas, selama tahun 2012 Bank Indonesia telah membuka 30 kali lelang TD valas dan total likuiditas valas yang diserap sebesar 30,408 miliar dolar AS. Perubahan posisi TD valas seiring dengan pelaksanaan lelang dan jatuh waktunya. Minat terhadap instrumen TD valas cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rasio pemenang yang rata-rata di atas 100%. Pada akhir tahun 2012 posisi TD valas tercatat sebesar 2,895 miliar dolar AS.

Posisi TD valas pada akhir tahun 2012 sempat mengalami penurunan yang antara lain dipengaruhi oleh turunnya penawaran lelang TD valas dari beberapa bank akibat besarnya kebutuhan valas akhir tahun karena penarikan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh nasabah (Grafik 1 dan 2).

Grafik 1 Perkembangan Lelang TD Valas



Grafik 2 Komposisi Tenor TD Valas



Seiring dengan tren penurunan suku bunga pasar uang di luar negeri, suku bunga TD valas untuk seluruh tenor juga mengalami penurunan. Pada lelang terakhir di triwulan IV 2012, suku bunga rata-rata tertimbang TD valas untuk 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan masing-masing sebesar 0,12%, 0,13% dan 0,15%. Angka tersebut tercatat turun dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada lelang perdana TD valas (lelang tanggal 20 Juni 2012), yaitu masing-masing 0,17%, 0,18% dan 0,19% (Grafik 3).



Pasar Uang Antar Bank (PUAB) merupakan media pertamabagi transmisi kebijakan moneter. Melalui transaksi PUAB yang sebagian besar berjangka pendek, sinyal kebijakan dari BI Rate ditransmisikan ke suku bunga instrumen lainnya ke pasar keuangan. Pembentukan harga di PUAB merupakan permasalahan utama dalam pengembangan pasar yang efisien. Atas dasar hal tersebut pelaku pasar uang dan otoritas memerlukan acuan suku bunga yang kredibel dan dapat digunakan sebagai referensi/indikasi suku bunga yang diterima baik dari sisi bank peminjam maupun bank pemberi.

Salah satu upaya untuk membentuk acuan suku bunga adalah dibentuknya *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) pada tahun 1993. Namun sejak pembentukan tersebut, JIBOR belum cukup kredibel untuk digunakan sebagai suku bunga acuan. Setelah sempat disempurnakan pada tahun 2005, kembali dilakukan penyempurnaan pada 7 Februari 2011 dan dilanjutkan penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/39/DPM tanggal 28 Desember 2012 perihal Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yang ketentuannya mulai berlaku pada 11 Februari 2013. Bank Indonesia kembali melakukan penyempurnaan JIBOR dengan mengacu kepada *best practices internasional* untuk meningkatkan kredibilitas JIBOR tersebut. Bank Indonesia berinisiasi untuk membangun kembali kredibilitas JIBOR melalui upaya penyempurnaan baik dari sisi input maupun outputnya. Dari sisi input, upaya tersebut dilakukan melalui pemilihan dan penetapan bank yang kredibel menjadi kontributor data JIBOR, pemantauan waktu pelaporan dan validitas data. Sementara itu dari sisi outputnya, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan metode penghitungan dan penyebarluasan informasi yang cepat dan efisien. Informasi data JIBOR yang semula hanya dapat diakses melalui terminal Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia, Thomson Reuters dan Bloomberg, saat ini diperluas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui website Bank Indonesia.

Berangsur JIBOR telah mulai dapat dijadikan suku bunga acuan yang kredibel dan digunakan pada banyak transaksi keuangan di Indonesia, sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik. Kredibilitas JIBOR akan mendorong pengembangan PUAB terutama untuk transaksi dengan tenor di atas satu bulan yang saat ini transaksinya sangat kecil dan tidak memiliki acuan/indikasi suku bunga.

Saat ini JIBOR terdiri atas dua mata uang yakni rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) dengan masing-masing terdiri dari enam tenor, yakni satu hari, satu minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan. Lengkapnya acuan suku bunga di berbagai tenor dapat mendorong pelaku pasar untuk menciptakan instrumen pasar uang lain yang berbasis suku bunga. Menciptakan *benchmark* suku bunga bagi transaksi derivatif dan transaksi yang berbasis *floating rates*. Membantu bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito bagi nasabah prima, dan membantu pembentukan *benchmark* untuk pasar obligasi.

Melalui penyempurnaan yang berkesinambungan, JIBOR diharapkan dapat berperan terhadap pendalaman pasar keuangan domestik, stabilitas sistem keuangan, dan peningkatan efektivitas kebijakan moneter. Berbagai upaya penyempurnaan terkait JIBOR akan terus dikomunikasikan kepada pelaku pasar dan publik dalam rangka membangun *awareness* dan komitmen bersama sebagai bagian dari upaya menjadikan JIBOR sebagai suku bunga acuan yang kredibel di pasar uang domestik.

Bab 10

Kebijakan Makroprudensial, Mikroprudensial dan Sistem Pembayaran





Kebijakan Makroprudensial, Mikroprudensial dan Sistem Pembayaran



Dalam tahun 2012, Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat ketahanan perbankan dan mendorong fungsi intermediasi yang didukung penguatan sistem pembayaran.

Kebijakan makroprudensial yang ditempuh meliputi ketentuan LTV dan trust, sementara kebijakan mikroprudensial mencakup penguatan aspek permodalan bank. Sementara itu, kebijakan di bidang sistem pembayaran ditujukan untuk meningkatkan keandalan, keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, perluasan akses serta perlindungan konsumen. Langkah ini juga didukung oleh upaya untuk memastikan ketersediaan uang tunai layak edar.



10.1 Kebijakan Makroprudensial

Respons kebijakan makroprudensial bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keseimbangan eksternal. Ketentuan mengenai *Loan to Value* dan *Down Payment* bertujuan untuk mengurangi peningkatan risiko kredit yang disebabkan pertumbuhan KPR dan KKB yang cukup pesat. Melalui ketentuan ini diharapkan mengurangi risiko peningkatan NPL. Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) yang diharapkan berdampak positif terhadap stabilitas pasokan devisa ke pasar domestik, meningkatkan daya saing, serta penciptaan pasar keuangan yang aktif dan sehat.

Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia dihadapkan oleh risiko meningkatnya ketidakseimbangan eksternal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh ekspor yang menurun tajam. Sementara itu, permintaan domestik tetap tumbuh tinggi, sehingga meningkatkan tekanan NPI.

Permintaan domestik yang cukup kuat, antara lain didukung oleh akselerasi pertumbuhan kredit

khususnya di sektor konsumsi, yang didominasi oleh Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) melebihi pertumbuhan kredit agregat. Pertumbuhan KPR dan KPA yang tinggi jika tidak dikendalikan akan meningkatkan risiko kredit. Sementara itu, ketentuan mengenai uang muka dilatarbelakangi kecenderungan peningkatan NPL KKB. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif antara jumlah uang muka dan NPLs KKB. KKB dengan DP rendah cenderung memiliki NPL yang tinggi, demikian juga sebaliknya.

Tingginya pertumbuhan kredit di kedua sektor tersebut menjadi salah satu faktor pendorong kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan kredit yang terlalu cepat jika tidak dikelola dengan baik berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam pemberian KPR dan KKB serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai *Loan to Value* (LTV) dan uang muka (*Down Payment*) yang berlaku pada Juni 2012¹ (Boks 10.1). Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengurangi peningkatan risiko kredit yang berlebihan yang disebabkan tingginya pertumbuhan KPR, KPA dan KKB. Pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi berpotensi memicu terjadinya *bubble* akibat akselerasi peningkatan harga properti sehingga dapat meningkatkan risiko kredit. Implementasi ketentuan LTV dan DP dilakukan melalui masa transisi selama tiga bulan untuk memberikan kesempatan kepada bank melakukan penyesuaian *Standard Operating Procedures* (SOP), sosialisasi, serta penyesuaian pelaporan ke Bank Indonesia. Selain ditujukan untuk bank umum konvensional, ketentuan LTV dan DP juga diberlakukan untuk bank umum syariah dan perusahaan pembiayaan guna menghindari

1 Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

terjadinya *regulatory arbitrage*. Penerapan ketentuan DP KKB untuk perusahaan pembiayaan dilakukan berkoordinasi dengan Bapepam-LK selaku otoritas pengawas lembaga keuangan nonbank.

Selain ketentuan LTV dan DP, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang terkait dengan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor dan utang luar negeri melalui perbankan di dalam negeri. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi kegiatan *trust*, yaitu pengelolaan devisa atau harta yang dititipkan oleh perbankan domestik. Pengelolaan devisa di dalam negeri diperlukan agar stabilitas pasokan devisa di pasar domestik relatif terjaga sehingga berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk mendorong penyediaan jasa-jasa keuangan yang lebih luas oleh perbankan domestik sehingga dapat meningkatkan daya saing serta berkontribusi terhadap penciptaan pasar keuangan yang aktif dan sehat.

10.2 Kebijakan Mikroprudensial

Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan mikroprudensial perbankan yang terkait dengan aspek permodalan, penguatan daya saing perbankan serta penguatan fungsi intermediasi. Untuk aspek permodalan, ketentuan yang dikeluarkan meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM) dan kewajiban pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum bagi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). Ketentuan KPMM bertujuan agar tingkat permodalan searah dengan *risk profile* bank, sementara ketentuan CEMA berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa bank-bank internasional dapat memitigasi risiko dari setiap unit bisnisnya yang berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.

Untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan penataan struktur kepemilikan bank, pengaturan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal serta penyempurnaan ketentuan kepemilikan tunggal (*Single Presence Policy*). Ketentuan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor berdasarkan modal bank merupakan bagian dari kebijakan perbankan inklusif, sementara penyesuaian ketentuan kepemilikan tunggal bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi investor strategis. Sementara itu, penguatan fungsi intermediasi perbankan juga bertujuan untuk mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM (inklusif) melalui peningkatan pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM.

Selain kebijakan makroprudensial, koridor pemeliharaan stabilitas sistem keuangan juga mencakup kebijakan mikroprudensial melalui penyempurnaan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM)² dan kewajiban pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum bagi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) yang beroperasi di Indonesia³. Penyempurnaan ketentuan KPMM dilatarbelakangi upaya untuk mengantisipasi dampak permasalahan perekonomian global yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Perhitungan kebutuhan modal bank dilakukan dengan metode yang lebih komprehensif dengan memasukkan berbagai faktor risiko sehingga tingkat permodalan bank lebih dapat menggambarkan kemampuan bank dalam menyerap risiko.

2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)



Dalam ketentuan KPMM yang telah disempurnakan, perhitungan kecukupan modal bank yang semula hanya memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional diperluas dengan memperhitungkan risiko-risiko lain berdasarkan standar internasional yang berlaku. Bank diwajibkan memenuhi standar modal minimum sesuai dengan profil risiko bank dengan kisaran antara 8% sampai dengan 14% melalui *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP). Proses tersebut mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, penilaian kecukupan permodalan, pemantauan dan pelaporan, dan pengendalian internal. Bank dapat dikenakan kewajiban pemenuhan modal minimum yang lebih tinggi jika berdasarkan penilaian Bank Indonesia modal minimum yang ditetapkan melalui proses ICAAP belum cukup untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Proses ini disebut sebagai *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP).

Sementara itu, untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dan sistem keuangan global,

khususnya yang terkait dengan unit bisnis bank-bank internasional yang beroperasi di Indonesia, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan adanya komitmen bank-bank tersebut terhadap unit bisnisnya di Indonesia dengan mewajibkan pengalokasian sejumlah modal dari kantor cabang bank tersebut dalam instrumen keuangan tertentu yang diatur dalam ketentuan mengenai CEMA⁴. Ketentuan CEMA bertujuan agar risiko-risiko yang dihadapi kantor cabang bank asing di Indonesia dapat segera diantisipasi dan dimitigasi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan domestik (*ring fencing*). Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank paling lambat pada bulan Juni 2013. Batasan tersebut akan terus ditingkatkan hingga minimal mencapai sebesar Rp1 triliun pada bulan Desember 2017. Jenis-jenis aset keuangan yang dapat

⁴ CEMA adalah alokasi modal berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu dan yang memenuhi persyaratan tertentu

diperhitungkan dalam CEMA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain yang berbadan hukum Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Bank Indonesia juga menyusun protokol manajemen krisis nilai tukar dan perbankan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Aturan mengenai protokol manajemen krisis Bank Indonesia telah diintegrasikan dengan protokol manajemen krisis nasional di bawah koordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Di dalam kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, ketentuan yang dikeluarkan terfokus pada penataan struktur kepemilikan bank dan pengaturan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (Boks 10.2). Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dinamika perekonomian global dan perubahan lingkungan bisnis bank. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penataan struktur kepemilikan saham bank yang dilandasi filosofi dan semangat penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*) melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif (*moral hazard*) terhadap operasional bank. Dalam penerapannya, bank-bank yang memiliki tata kelola dan tingkat kesehatan yang cukup baik (peringkat 1 dan 2) diberikan pengecualian sepanjang mampu mempertahankan peringkat tersebut. Penerapan kebijakan tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong proses konsolidasi guna memperkuat industri perbankan nasional.

Di samping kebijakan mengenai kepemilikan bank, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan ketentuan kepemilikan tunggal (*Single Presence Policy*). Penyempurnaan dilakukan dalam rangka harmonisasi kebijakan dengan pengaturan kepemilikan saham bank umum dan pengaturan

kegiatan usaha dan perluasan jaringan. Di satu sisi, penyesuaian ketentuan kepemilikan tunggal dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor perbankan dengan memberikan kelonggaran bagi investor yang telah menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada suatu bank di Indonesia melalui opsi pembentukan perusahaan induk (*holding company*). Opsi tersebut memberikan kesempatan kepada investor strategis yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada bank lain untuk menjadi pemegang saham pengendali pada bank lainnya tanpa terkena kewajiban melakukan *merger* atau konsolidasi kepemilikan. Sementara di sisi lain, untuk mendorong *merger/konsolidasi* sebagai opsi pemenuhan ketentuan Kepemilikan tunggal, Bank Indonesia memberikan insentif berupa pelonggaran pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk sementara waktu, perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kemudahan pembukaan kantor cabang, dan/atau pelonggaran sementara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Selain kebijakan mengenai kepemilikan bank, Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan mengenai penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor berdasarkan modal bank⁵ yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional. Ketentuan ini diterapkan dengan mekanisme insentif dan disinsentif berdasarkan kriteria alokasi modal inti dan zonasi wilayah disamping persyaratan tingkat kesehatan. Ketentuan tersebut berlaku untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional dan kantor cabang bank asing (KCBA). Dalam ketentuan tersebut, kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank dibagi kedalam empat kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sesuai dengan jumlah modal inti yang dimiliki. Pembagian kegiatan

5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank



usaha tersebut diterapkan bersamaan dengan pengaturan ulang mekanisme pembukaan jaringan kantor bank yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perbankan dalam pembangunan ekonomi khususnya di wilayah yang kurang mendapatkan akses perbankan (inklusif). Bagi bank-bank yang telah menyediakan alokasi pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan insentif dalam pembukaan jaringan kantor.

Dalam kebijakan yang terkait dengan penguatan fungsi intermediasi, langkah-langkah yang ditempuh bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi intermediasi berada pada jalur yang benar. Penguatan fungsi intermediasi bertujuan untuk mendorong pemerataan akses pembiayaan yang dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM (inklusif). Hal ini dilatarbelakangi kondisi bahwa perbankan belum optimal dalam memberikan akses pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Agar pemerataan pembangunan ekonomi dapat diwujudkan maka perbankan didorong untuk meningkatkan pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM yang produktif. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mewajibkan

pengalokasian kredit/pembiayaan kepada UMKM⁶ sekurang-kurangnya 20% dari total portofolio kredit bank. Pemenuhan ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mekanisme insentif dan disinsentif. Peningkatan akses kredit/pembiayaan untuk UMKM juga akan melibatkan bantuan teknis dari Bank Indonesia serta melalui proses koordinasi dengan instansi lain dalam bentuk kemitraan strategis (*counterpart*) serta penyediaan fasilitas dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung.

Kebijakan penguatan peran perbankan dalam proses intermediasi juga dilakukan melalui perluasan akses masyarakat ke jasa perbankan dengan biaya yang lebih terjangkau (inklusif). Program keuangan inklusif akan dilakukan dari dua sisi sekaligus yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Kebijakan dari sisi penawaran terfokus pada perluasan akses layanan perbankan dengan biaya yang terjangkau serta penyediaan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan

6 Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

rendah. Perluasan akses layanan perbankan akan dilakukan dengan cara-cara nonkonvensional antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi dan kerjasama keagenan (*branchless banking*) sehingga layanan perbankan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat tanpa perlu keberadaan fisik kantor bank. Namun, kebijakan terkait dengan *branchless banking* harus dilakukan secara terukur dengan memerhatikan berbagai potensi risiko yang mungkin timbul termasuk dampaknya pada stabilitas sistem keuangan. Terkait dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2013 Bank Indonesia akan menerbitkan panduan pelaksanaan kegiatan *branchless banking*.

Sementara itu, kebijakan dari sisi permintaan dilakukan dengan mengoptimalkan peran masyarakat kelas menengah melalui percepatan lahirnya wirausaha-wirausaha baru. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pola kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta. Bank Indonesia akan merancang program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa-mahasiswa, eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta masyarakat umum dan penyediaan skim kredit bagi wirausaha pemula (*start-up credit*). Skim pembiayaan ini akan melibatkan instansi teknis dan pihak lainnya dalam kerangka pembinaan, pendampingan, dan penjaminan, serta proses kelayakan agunan kredit. Langkah-langkah tersebut juga didukung dengan upaya mengurangi hambatan suku bunga pada segmen kredit mikro dengan mendorong kompetisi yang sehat antara lain melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Mikro (SBDKM).

10.3 Kebijakan Sistem Pembayaran

Fokus kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran senantiasa mengedepankan empat aspek utama yaitu keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen guna menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagai urat nadi

perekonomian. Kebijakan dimaksud antara lain dilakukan melalui persiapan implementasi Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) Generasi II, pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway-NPG*), interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik, persiapan implementasi standar nasional kartu ATM/Debet berbasis *chip*, perluasan akses BPR dalam sistem pembayaran, dan penyempurnaan ketentuan untuk lebih meningkatkan penerapan aspek perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran, terutama terkait pengaturan mengenai kartu kredit.

Aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka inovasi teknologi sistem pembayaran semakin bermunculan dengan pesat. Peran strategis sistem pembayaran dalam aktivitas perekonomian terutama untuk menjamin terlaksananya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dengan semakin mudah. Melalui peran strategis tersebut, Bank Indonesia dituntut untuk terus memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran selalu berada dalam koridor ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan. Hal



ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran.

Dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran selalu mengedepankan aspek keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen. Terselenggaranya sistem pembayaran yang aman dan efisien merupakan faktor penting untuk mendukung aktivitas perekonomian, stabilitas sistem keuangan, dan pelaksanaan kebijakan moneter. Selanjutnya, perluasan akses dalam sistem pembayaran dapat mendorong terwujudnya program keuangan inklusif bagi lapisan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Aspek perlindungan konsumen merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran, khususnya kepercayaan terhadap berbagai instrumen pembayaran yang semakin beragam dan inovatif. Selain itu, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan pengelolaan rekening Pemerintah untuk mendukung dan memudahkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran ditempuh melalui penguatan infrastruktur dan terus mengupayakan interkoneksi serta perluasan akses sistem pembayaran dalam upaya untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran. Berbagai Kebijakan Bank Indonesia terkait penguatan infrastruktur meliputi pengembangan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) Generasi II, interkoneksi sistem pembayaran ritel melalui pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway-NPG*), interkoneksi penyelenggaraan uang elektronik, serta persiapan implementasi standar nasional kartu ATM/Debet berbasis *chip* secara bertahap. Perluasan akses sistem pembayaran dilakukan Bank Indonesia melalui implementasi Sistem Transfer Kredit Elektronik

(STKE) antar BPR bekerjasama dengan Bank Jatim sebagai penyelenggara STKE. Selanjutnya, Bank Indonesia senantiasa memperkuat aspek hukum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dalam rangka menjamin perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran, melalui penyusunan dan penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran.

Kebijakan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan Bank Indonesia dengan melakukan persiapan implementasi Sistem BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II. Pengembangan ini dilakukan untuk mengimbangi tren peningkatan jumlah transaksi BI-RTGS dan BI-SSSS sejalan dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, pengembangan ini juga dilakukan sebagai persiapan untuk mengantisipasi konektivitas Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan infrastruktur sistem keuangan lainnya, baik domestik maupun internasional. Selain itu, dengan pengembangan ini diharapkan akan tercapai peningkatan kemampuan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga dapat berjalan secara aman dan efisien. Efisiensi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II nantinya, tidak hanya dari sisi penggunaan likuiditas tetapi juga dari sisi infrastruktur sistem yang digunakan. Dalam rangka persiapan implementasi tersebut, selama periode laporan, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan infrastruktur sistem, sosialisasi kepada seluruh peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS mengenai aspek bisnis dan teknis, koordinasi internal Bank Indonesia untuk penyusunan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II.

Kebijakan untuk peningkatan keamanan juga dilakukan melalui persiapan implementasi standar nasional kartu ATM/Debet menggunakan teknologi *chip* dan *Personal Identification Number* (PIN) paling kurang 6 (enam) digit. Penggunaan standar nasional kartu ATM/Debet dengan menggunakan teknologi *chip* ditargetkan dapat diterapkan secara menyeluruh



pada akhir 2015. Teknologi *chip* dinilai mampu mengurangi kejahatan (*fraud*) yang dilakukan melalui infrastruktur sistem kartu ATM/Debet, yang antara lain dilakukan dengan metode *skimming*. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna kartu ATM/Debet. Selama periode laporan, Bank Indonesia telah memfasilitasi terbentuknya lembaga sertifikasi yang akan memberikan akreditasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi standar nasional kartu ATM/Debet dengan menggunakan teknologi *chip*.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia terus mendorong interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran ritel melalui pengembangan NPG. NPG akan membantu pemantauan risiko penyelenggaraan sistem pembayaran dan akan membentuk *database* sistem pembayaran ritel secara nasional yang dapat mendukung pengambilan keputusan bagi otoritas. Kebijakan interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembayaran dan transfer dana.

Bank Indonesia juga terus mendorong interkoneksi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dengan interkoneksi sistem pembayaran, masyarakat tidak harus memiliki banyak alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik, karena hanya dengan satu kartu atau uang elektronik, masyarakat dapat melakukan kegiatan pembayaran dan transfer dana melalui berbagai alternatif infrastruktur sistem pembayaran yang ada. Dari sisi industri, interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran akan meningkatkan efisiensi biaya investasi. Pada tahap awal pengembangan NPG, Bank Indonesia memfasilitasi interkoneksi ATM Bank Mandiri dan BCA. Dengan terkoneksinya infrastruktur ATM kedua bank tersebut, maka jaringan layanan sistem pembayaran menjadi semakin luas sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi secara lebih cepat dan efisien. Pada gilirannya sinergi kedua bank tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri sistem pembayaran dalam menghadapi era persaingan global.

Upaya lain yang dilakukan Bank Indonesia untuk peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel adalah melalui kebijakan pengembangan interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik. Selama periode laporan, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dari koordinasi tersebut disepakati agar pengembangan interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik menjadi program nasional. Salah satu sektor yang akan memperoleh manfaat dari interkoneksi tersebut adalah sektor transportasi yang secara massal digunakan oleh masyarakat.

Masih dalam rangka efisiensi, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan Sistem Bank Indonesia *Government e-Banking* (BIG-eB) untuk meningkatkan layanan dalam pengelolaan rekening Pemerintah. Selama periode laporan, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan



– Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk melakukan tahapan persiapan implementasi penyempurnaan Sistem BIG-eB. Sistem BIG-eB merupakan sarana layanan *on-line banking* yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung kebutuhan Kementerian Keuangan. Adapun tahapan pengembangan yang dilakukan adalah mengakomodasi interkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selain membantu dalam pengelolaan rekening pemerintah, penyempurnaan Sistem BIG-eB sekaligus juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen likuiditas Pemerintah karena seluruh data mutasi dan posisi saldo rekening pemerintah secara *real time* dapat digunakan untuk mendukung kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah.

Untuk meningkatkan kesetaraan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia turut aktif dalam pengembangan sistem transfer kredit elektronik (STKE). Pada tahun 2012, 18 BPR di wilayah Jawa Timur, baik untuk kepentingan BPR sendiri maupun nasabah, telah dapat memanfaatkan layanan sistem pembayaran yang cepat dan aman dengan biaya relatif murah melalui STKE. STKE dikembangkan oleh Bank Jatim sebagai bank pengayom BPR (APEX BPR) di wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan Bank Indonesia. STKE merupakan suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer dana

antar anggota APEX BPR dan/atau dengan bank umum. Bagi BPR, STKE dapat meningkatkan loyalitas nasabah BPR dan meningkatkan daya saing BPR dengan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan *fee based income* BPR. Bagi nasabah BPR, STKE dapat memberikan layanan transfer dana yang cepat, aman, dan efisien, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi. Bagi Bank Jatim, penyelenggaraan STKE dapat meningkatkan peran Bank Jatim sebagai APEX BPR dan memperkuat Bank Jatim sebagai *BPD Regional Champion*.

Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran selalu mengedepankan aspek perlindungan konsumen dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat pengguna jasa sistem pembayaran. Selama periode laporan, penyempurnaan ketentuan APMK dilakukan Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (PBI APMK) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan SEBI No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam PBI dan SEBI tersebut antara lain meliputi pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit (batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan jumlah maksimum penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit), serta penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi (penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit serta pengenaan biaya dan denda, pengaturan kerjasama dengan pihak lain, khususnya yang terkait dengan penagihan utang kartu kredit).

Menindaklanjuti kebijakan pembatasan kepemilikan kartu kredit, Bank Indonesia juga telah menerbitkan SEBI No.14/27/DASP tanggal 25 September 2012

perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit. SEBI ini mewajibkan penerbit kartu kredit melakukan penyesuaian kepemilikan kartu kredit, khususnya yang dimiliki pemegang kartu kredit yang berpendapatan antara Rp3 juta – Rp10 juta tiap bulan. Sementara itu, terkait pembatasan suku bunga kartu kredit, Bank Indonesia menerbitkan SEBI No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit.

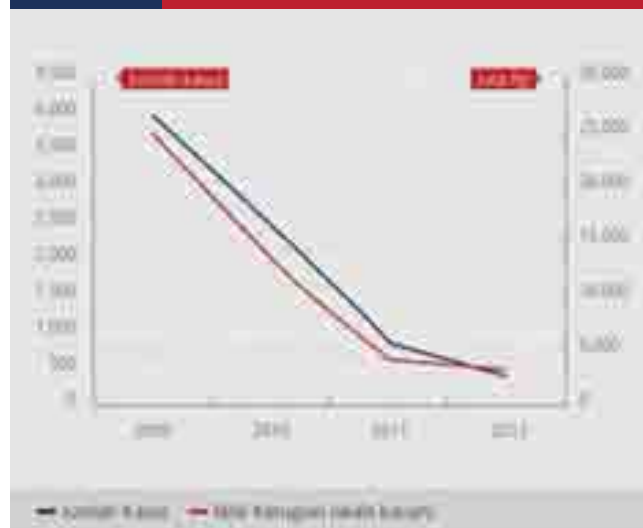
Selain ketentuan terkait APMK, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.14/3/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Evaluasi Kebijakan

Respons kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran yang mengedepankan aspek keamanan melalui penggunaan teknologi *chip* pada APMK, khususnya kartu kredit, telah berhasil menurunkan *fraud* pemalsuan kartu kredit. Pada 2009 sebelum teknologi *chip* digunakan pada kartu kredit, tingkat *fraud* dengan modus pemalsuan kartu relatif tinggi. Sejak implementasi teknologi *chip* untuk kartu kredit pada 2010, tingkat *fraud* pemalsuan kartu mengalami penurunan yang signifikan (Grafik 10.1).

Menurunnya tingkat *fraud* tersebut berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran nontunai yang diharapkan dapat menggantikan penggunaan uang tunai di masa depan. Berkaca dari keberhasilan menurunkan jumlah *fraud* melalui penggunaan teknologi *chip* pada kartu kredit, Bank Indonesia

Grafik 10.1 Perkembangan Fraud Pemalsuan Kartu Kredit



menempuh kebijakan penggunaan teknologi *chip* pada kartu ATM/Debet mengingat pesatnya pertumbuhan jumlah kartu ATM/Debet yang mencapai 76,99 juta kartu sampai dengan akhir 2012.

Dari aspek efisiensi, kebijakan interoperabilitas dalam sistem pembayaran ritel yang diawali dengan menghubungkan jaringan ATM BCA dan Bank Mandiri semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM/Debet. Dengan kemudahan tersebut, efisiensi masyarakat baik dari sisi waktu maupun pengelolaan rekening simpanan semakin dapat ditingkatkan. Kebijakan interoperabilitas uang elektronik diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi secara nasional karena hanya dengan cukup satu kartu, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran di berbagai pedagang (*merchant*) yang bekerjasama dengan seluruh penerbit uang elektronik.

Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan perluasan akses sistem pembayaran yang dilakukan melalui penyelenggaraan STKE oleh BPD Jatim, berdampak pada semakin luasnya layanan sistem pembayaran yang dapat digunakan masyarakat, khususnya nasabah BPR. Dengan kebijakan tersebut, alternatif cara pembayaran bagi masyarakat yang semakin mudah dan cepat menjadi bertambah dan dapat

dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat.

Selanjutnya, dengan penguatan landasan hukum penyelenggaraan APMK juga berdampak pada peningkatan perlindungan konsumen pengguna APMK, khususnya kartu kredit. Hal ini mengingatkan pengguna semakin mengetahui manfaat dan risiko dari penggunaan APMK, tidak akan menerima fasilitas yang berdampak pada pengenaan biaya tanpa konfirmasi dari pengguna, tidak lagi dikenakan suku bunga kartu kredit yang sangat tinggi, mendapatkan plafon fasilitas kartu kredit yang sesuai dengan kemampuan keuangan pengguna, dan lain-lain. Dengan aturan tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin nyaman menggunakan instrumen pembayaran nontunai, khususnya APMK.

Kebijakan Pengelolaan Uang

Pengelolaan uang memiliki peranan yang penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Peran tersebut terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan uang kartal sebagai salah satu alat pembayaran di masyarakat. Di bidang pengelolaan uang, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memenuhi misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang dengan memerhatikan berbagai informasi terkini⁷. Informasi tersebut meliputi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berdampak pada kebutuhan alat pembayaran tunai, maupun perkembangan berbagai isu di bidang pengelolaan uang.

Pada tahun 2012, meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, berdampak pada peningkatan kebutuhan alat pembayaran termasuk alat pembayaran tunai. Dari sisi pengelolaan uang, perkembangan berbagai isu saat ini menjadi tantangan yang membutuhkan

respons kebijakan yang tepat. Berbagai isu tersebut antara lain masih tingginya budaya masyarakat untuk memegang fisik uang untuk kegiatan transaksi, penyediaan uang layak edar secara lebih merata di seluruh Indonesia, perlunya peningkatan kualitas dan unsur pengaman uang dan meningkatkan peran berbagai pihak di luar bank sentral dalam pengolahan uang rupiah.

Selain hal tersebut di atas, implementasi UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga menjadi perhatian Bank Indonesia. Berlakunya UU Mata Uang berimplikasi luas pada kegiatan pengelolaan rupiah yang dilakukan Bank Indonesia. Hal ini ditandai dengan penambahan fungsi baru di bidang perencanaan, pencetakan dan pemusnahan rupiah, yaitu dilakukannya koordinasi dengan Pemerintah, maupun penguatan fungsi yang telah ada terkait dengan penanggulangan uang palsu (BOTASUPAL).

Dalam rangka mewujudkan misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang, serta memerhatikan berbagai isu di atas, sepanjang tahun 2012 Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan di bidang pengelolaan uang dengan mengacu pada tiga pilar kebijakan yaitu i) tersedianya uang rupiah yang berkualitas; ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan terpercaya; dan iii) layanan kas prima. Kebijakan tersebut dijalankan selain untuk mewujudkan misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang, juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan rupiah oleh Bank Indonesia.

Kebutuhan uang kartal masyarakat yang meningkat perlu didukung dengan ketersediaan rupiah layak edar dalam jumlah memadai dan pecahan yang sesuai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rupiah tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan penguatan terhadap strategi pengelolaan pengadaan uang yang telah dilakukan selama ini. Penguatan tersebut tampak pada strategi dalam memenuhi kebutuhan uang masyarakat termasuk kebutuhan selama hari raya keagamaan. Penguatan strategi dilakukan melalui

⁷ Misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang adalah memenuhi kebutuhan uang Rupiah masyarakat dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan perbankan, masyarakat, Pemerintah, Peruri maupun instansi lain terkait termasuk perusahaan penyedia jasa transportasi dalam rangka mendukung kegiatan distribusi uang.

Kebijakan penguatan strategi pengelolaan pengadaan uang juga terlihat dalam penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) dan Rencana Cetak Uang (RCU) 2013⁸. Mulai tahun 2012, penyusunan EKU tahun 2013 telah dilakukan Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Nota Kesepahaman antara BI dan Pemerintah⁹. Sementara itu, penguatan strategi juga dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pengadaan uang yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan Peruri untuk meningkatkan efisiensi pencetakan rupiah.

Upaya memenuhi kebutuhan rupiah dilakukan dengan tetap memerhatikan kualitas rupiah sehingga rupiah yang diedarkan berada dalam kondisi layak edar. Dalam rangka meningkatkan kualitas rupiah, beberapa kegiatan telah dilakukan Bank Indonesia selama tahun 2012 melalui antara lain pengkajian penyempurnaan desain uang untuk meningkatkan kualitas rupiah, survei preferensi masyarakat atas uang kartal dan survei kualitas uang, serta pemantauan pengolahan uang layak edar oleh perbankan dan perusahaan *Cash in Transit* (CiT). Survei kualitas uang bertujuan untuk menggali informasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kualitas uang di daerah yang tidak terlayani oleh layanan

kas Bank Indonesia¹⁰, termasuk di daerah terpencil dan terdepan NKRI, seperti di daerah Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya meningkatkan kualitas rupiah juga dilakukan melalui kebijakan penanggulangan peredaran uang palsu. Upaya preventif penanggulangan peredaran uang palsu dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah melalui berbagai media komunikasi. Selain itu, upaya juga dilakukan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk menjadi saksi ahli di pengadilan dalam kasus temuan uang palsu. Berbagai upaya tersebut sejalan dengan amanat Pasal 29 UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia berkewajiban memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian rupiah kepada masyarakat, serta memberikan klarifikasi tentang rupiah yang diragukan keasliannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga uang rupiah dalam kondisi layak edar dengan kualitas yang dapat diterima, aman dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Disamping itu, Bank Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan Perpres No. 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang mulai berlaku tanggal 7 Desember 2012.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal di masyarakat, kegiatan distribusi dan pengolahan uang yang dilakukan Bank Indonesia juga meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan frekuensi maupun intensitas kegiatan distribusi rupiah dan kegiatan pengolahan rupiah yang dilakukan Bank Indonesia¹¹. Merespons perkembangan tersebut dan untuk

8 EKU merupakan proyeksi perhitungan kebutuhan uang untuk seluruh unit kerja kas di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada periode tertentu, baik jumlah nominal maupun komposisi pecahan uang. Penyusunan EKU mempertimbangkan kebutuhan uang masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, penggantian uang yang tidak layak edar dan kecukupan kas Bank Indonesia.

9 Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah No. 14/1/GBI/DPU/NK //MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012

10 Layanan kas Bank Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rupiah masyarakat dan menjaga agar rupiah tetap dalam kondisi layak edar baik melalui layanan kas dalam kantor yang meliputi kegiatan penyeteroran, penarikan dan penukaran rupiah maupun layanan kas luar kantor yang meliputi kegiatan kas keliling dan kas titipan.

11 Kegiatan distribusi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan persediaan kas yang aman di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia, sedangkan kegiatan pengolahan uang dimaksudkan untuk menjaga uang yang beredar dalam kondisi layak edar.

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan distribusi dan pengolahan uang, Bank Indonesia menempuh kebijakan penguatan atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini, baik dengan perbankan maupun instansi terkait lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan distribusi rupiah, selain menggunakan armada sendiri, Bank Indonesia juga menempuh strategi peningkatan kerjasama dengan penyedia jasa angkutan baik darat, laut dan udara. Melalui berbagai strategi tersebut, persediaan kas di seluruh satuan kerja kas tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat.

Sementara itu, untuk merespons kebutuhan pengolahan rupiah yang meningkat, Bank Indonesia terus memantau perbankan dan perusahaan *cash in transit* (CiT) dalam melakukan kegiatan pengolahan rupiah dan layanan nasabah, serta melakukan penyempurnaan proses pengolahan di Bank Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan pengolahan rupiah selama tahun 2012 dapat dilakukan dengan lebih baik, tercermin pada terpenuhinya kebutuhan rupiah layak edar bagi masyarakat. Selain itu, strategi tersebut juga telah mendorong peningkatan efisiensi dalam kegiatan pengolahan rupiah yang dilakukan perbankan, perusahaan CiT maupun Bank Indonesia.

Pemantauan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perbankan dan perusahaan CiT dalam memenuhi standar pengolahan uang yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini penting mengingat hasil pengolahan uang oleh perbankan dan perusahaan CiT memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Melengkapi strategi tersebut, Bank Indonesia juga terus melakukan penyempurnaan proses pengolahan kas hasil setoran perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengolahan uang yang dilakukan Bank Indonesia dan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengolahan uang rupiah.

Terkait dengan kegiatan layanan kas, pengembangan dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan bank dan instansi lain. Keterlibatan tersebut untuk memenuhi peningkatan kebutuhan rupiah masyarakat dan untuk menjaga rupiah yang beredar berada dalam kondisi layak edar. Peningkatan kegiatan layanan kas kepada masyarakat meliputi layanan kas di seluruh satuan kerja kas, yaitu kegiatan penyeteroran, penarikan dan penukaran rupiah, dan layanan kas di luar kantor melalui kas keliling dan kas titipan.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan penarikan dan penyeteroran rupiah oleh Bank Umum dari dan/ ke Bank Indonesia, telah dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur layanan kas di Bank Indonesia. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan uang di Bank Indonesia dan mengoptimalkan manajemen kas perbankan. Setelah mengeluarkan Ketentuan Penyeteroran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia pada bulan April 2011, pada tahun 2012 Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk melakukan optimalisasi transaksi rupiah antarbank (TUKAB) dalam memenuhi kebutuhan rupiah mereka. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia menerapkan mekanisme pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyeter) atau kepada bank berbeda dalam satu wilayah kerja (KPw DN)¹² maupun antar wilayah kerja KPw DN (*dropshot* antar wilayah). Pembayaran kepada bank dengan uang setoran ULE dari bank ini dilakukan tanpa melakukan perhitungan rinci dan penyortiran atas setoran ULE tersebut. Kebijakan *dropshot* antar wilayah ini merupakan perluasan dari kebijakan *dropshot* dalam satu wilayah yang telah diterapkan sebelumnya.

Selama tahun 2012, mekanisme *dropshot* antar wilayah telah dilakukan di Sumatera dan Aceh; Jawa Timur; Sumatera Barat; Kalimantan Selatan dan Tengah; serta *dropshot* antar wilayah Bandung dan

12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw DN)

Jakarta. Melalui kebijakan baru ini, peredaran kembali (resirkulasi) uang layak edar dapat ditingkatkan, mengingat uang layak edar hasil dari setoran perbankan dapat dibayarkan kembali oleh Bank Indonesia kepada bank yang sama atau bank berbeda di wilayah lain. Selain itu, kebijakan *dropshot* antar wilayah ini bersama dengan kebijakan optimalisasi TUKAB telah berperan penting dalam membantu manajemen kas perbankan dan meningkatkan efisiensi pengolahan uang di Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan layanan kas dengan melakukan peningkatan kegiatan layanan kas keliling di wilayah terpencil dan terdepan NKRI¹³. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin penyediaan uang rupiah layak edar dan meningkatkan layanan kas Bank Indonesia serta menjaga eksistensi rupiah, terutama di daerah terpencil dan wilayah terdepan. Terkait dengan hal ini dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan ini ke depan, telah dilakukan penandatanganan MoU antara BI dan TNI AL¹⁴ pada 22 Februari 2012.

Melengkapi upaya di atas, dalam rangka memperluas jangkauan layanan kas yang ada, Bank Indonesia menempuh kebijakan peningkatan jumlah kas titipan khususnya di daerah terpencil dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Selama tahun 2012 telah dilakukan pembukaan 4 (empat) kas titipan baru yaitu di Muara Teweh (Kalteng), bekerjasama dengan PT BPD Kalteng dan di Luwuk (Sulteng), bekerjasama dengan PT BRI Sulteng, di Waingapu (NTT) bekerjasama dengan PT BRI NTT, dan di Atambua (NTT) bekerjasama dengan BPD NTT. Dengan penambahan tersebut, total kas titipan sampai dengan tahun 2012 berjumlah 19 kas titipan. Layanan kas di daerah saat ini dilakukan melalui kehadiran KPW DN, kas keliling dan kas titipan. Penambahan

jumlah kas titipan dilakukan mengingat kebijakan ini merupakan alternatif yang efisien dibandingkan melakukan kas keliling sementara belum dilakukan pembukaan kantor perwakilan BI.

UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan uang. Penyesuaian tersebut meliputi: i.) Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menetapkan pecahan uang, bahan baku uang, perencanaan, pencetakan, pemusnahan uang; serta ii.) Koordinasi dan pembentukan badan pemberantasan rupiah palsu.

Sesuai dengan amanat UU Mata Uang tersebut, koordinasi dilakukan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam menetapkan pecahan uang, bahan baku uang, perencanaan, pencetakan, pemusnahan uang, serta kerjasama dengan Peruri terkait dengan pencetakan uang. Dalam pemberantasan rupiah palsu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan dalam suatu badan yang disebut BOTASUPAL. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka UU Mata Uang tersebut berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam Rangka Perencanaan dan Pencetakan serta Pemusnahan Rupiah dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Rupiah.

13 Kas Keliling adalah kegiatan layanan penukaran uang oleh unit kerja kas di Kantor Pusat maupun KPw DN kepada masyarakat, bank dan/pihak lain dengan menggunakan sarana transportasi tertentu.

14 Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut

Selama 2011, terjadi akselerasi pertumbuhan kredit yang cukup tinggi terutama pada sektor konsumsi yang didominasi oleh Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan bermotor (KKB). Pertumbuhan kredit di kedua sektor tersebut berada di atas pertumbuhan kredit agregat sebesar 24,4% (yoy). Khusus untuk KPR, pertumbuhannya mencapai 33,12% (yoy). Meskipun NPL KPR secara umum cenderung rendah, NPL KPR untuk tipe di atas 70m² sudah berada di atas rata-rata historisnya. Sementara itu, pertumbuhan KKB selama 2011 mencapai 32,6% (yoy) dengan NPL yang relatif cukup baik (rata-rata 2%) atau di bawah batas normal aman (5%). Meskipun demikian, secara historis NPL KKB cenderung berada di atas NPL kredit secara umum (rata-rata 0,6%).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pembelian rumah bertujuan untuk di huni. Keyakinan bahwa harga akan terus meningkat menyebabkan konsumen berupaya untuk membeli properti sehingga berdampak terhadap akselerasi harga properti. Secara historis, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 terdapat korelasi positif antara kredit ke sektor properti dengan harga properti. Pertumbuhan KPR yang tinggi mendorong kenaikan harga properti. Selain itu, akselerasi harga properti tipe menengah dan besar (di atas 70m²) dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga properti pada tipe yang lebih kecil sehingga menyebabkan harga rumah semakin tidak terjangkau. Sementara itu, tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor terutama dipicu oleh ringannya persyaratan kredit dalam bentuk uang muka yang rendah. Meski NPL KKB relatif rendah, namun jika penarikan kendaraan sebagai akibat kegagalan debitur membayar kewajiban diperhitungkan juga sebagai NPL maka NPL KKB secara keseluruhan menjadi sekitar 10%. Tingginya angka NPL tersebut cenderung terjadi pada KKB dengan uang muka yang rendah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara jumlah uang muka dengan NPL KKB.

KKB dengan DP yang rendah cenderung memiliki NPL yang tinggi dan sebaliknya.

Merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan *loan-to-value ratio* (LTV) yakni rasio antara nilai kredit maksimum yang dapat diberikan Bank terhadap nilai agunan pada awal pemberian kredit untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) dan minimum *down payment* (DP) untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) yang berlaku pada Juni 2012¹. Implementasi ketentuan tersebut melalui masa transisi tiga bulan guna memberikan kesempatan kepada Bank untuk melakukan penyesuaian *Standard Operating Procedures* (SOP), sosialisasi, serta penyesuaian pelaporan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Bapepam-LK selaku otoritas pengawas Lembaga Keuangan Non Bank dalam penerapan ketentuan LTV yang ditujukan untuk perusahaan pembiayaan.

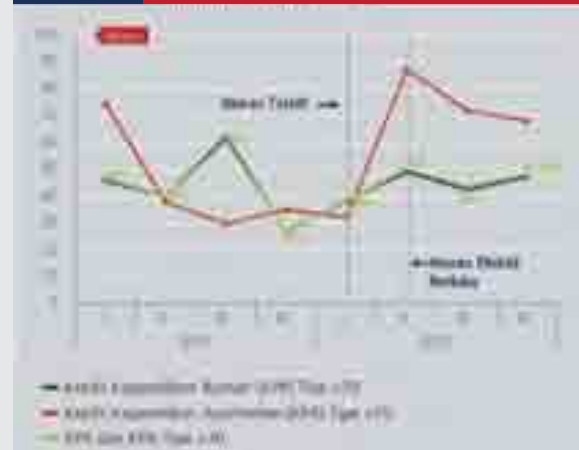
Secara substantif, rasio LTV untuk KPR ditetapkan maksimal sebesar 70% dengan ruang lingkup hanya meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal (termasuk rumah susun dan apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan tipe bangunan lebih dari 70 m². Ketentuan LTV dikecualikan terhadap KPR dengan tipe lebih kecil dari 70 m² disebabkan jumlah pasokan rumah dengan tipe tersebut masih lebih rendah dibandingkan permintaan masyarakat. Ketentuan LTV juga dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah. Dalam penerapannya, ketentuan LTV juga mencakup industri keuangan syariah dan larangan pemanfaatan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk uang muka kredit.

1 Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Sementara itu, penerapan ketentuan uang muka (DP) didasarkan pada pemilahan berdasarkan tujuan pemberian kredit yaitu KKB untuk kegiatan produktif atau konsumtif. KKB yang dapat dikelompokkan untuk keperluan produktif harus memenuhi salah satu syarat yaitu (a) merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau (b) diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimiliki. Kriteria dimaksud bertujuan untuk mewujudkan keberpihakan kepada pemanfaatan KKB untuk kegiatan produktif namun tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian. Implementasi DP bagi KKB ditetapkan sesuai tabel dibawah.

Secara umum, kebijakan LTV mampu menekan laju pertumbuhan KPR khususnya pada tipe diatas 70 m². Meski demikian, terdapat indikasi perbankan melakukan percepatan pembiayaan KPR pada semester I 2012 (sebelum diterapkannya ketentuan LTV) sebagaimana terlihat dari tingginya pertumbuhan KPR diatas 70 m² pada Juni 2012 yaitu sebesar 32% (yoy) dibandingkan Juni 2011 sebesar 12%. Laju pertumbuhan KPR diatas 70 m² mulai terindikasi melambat dari 62% (yoy) pada September 2011 menjadi 43% (yoy) pada September 2012. Pertumbuhan KPR diatas 70 m² kembali meningkat mencapai 48% (yoy) pada Desember 2012 dibandingkan dengan 27% pada Desember 2011 (Grafik 1) dengan rata-rata rasio LTV untuk KPR/ KPA diatas 70 m² pada 56 bank tercatat sebesar 68%. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh siklus kenaikan KPR pada akhir tahun yang tercermin

Grafik 1 Pertumbuhan Tahunan Kredit KPR (Rumah dan Apartemen)



dari peningkatan jumlah debitur, peningkatan nilai KPR terkait dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan serta pergeseran kelompok debitur dari debitur KPR tipe menengah bergeser ke kelompok debitur KPR rumah mewah yang umumnya tidak terpengaruh ketentuan LTV. Berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2013 dari 10 bank yang mencatat pertumbuhan KPR tertinggi, mayoritas bank tetap berencana untuk meningkatkan pembiayaan KPR diatas 70 m².

Dampak kebijakan uang muka (DP) terhadap perkembangan KKB khususnya KKB roda-2 terlihat lebih nyata. Meski perbankan sempat meningkatkan penyaluran KKB menjelang berlakunya ketentuan DP, pertumbuhan KKB pasca-implementasi kebijakan DP menurun cukup signifikan. Penurunan KKB terutama berasal dari KKB roda-2 yang tumbuh negatif sebesar -27,7% pada Desember 2012 dibandingkan Desember 2011 tumbuh 4,7% yoy, sementara KKB roda-4 pada Desember 2012 hanya tumbuh sebesar 4,5% dibandingkan Desember 2011

Tabel 10.5 Pengaturan DP-KKB di Bank dan Lembaga Pembiayaan

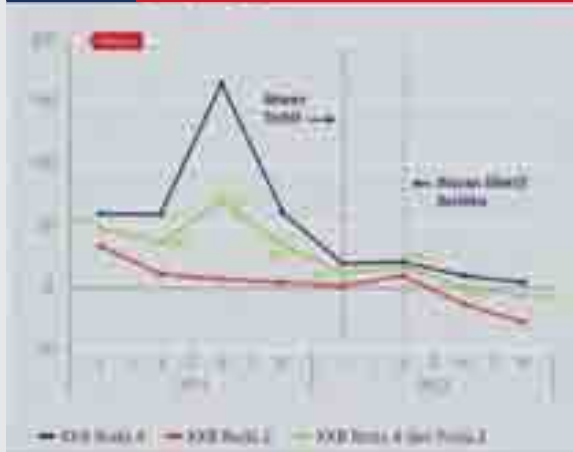
Obyek Yang Diatur	Besaran Dp Minimum	
	Untuk Perbankan	Untuk Lembaga Keuangan Non Bank
Roda-2	25%	20%
Roda-4	30%	25%
Roda-4 untuk keperluan Produktif	20%	20%

sebesar 62,2% (Grafik 2). Pada Desember 2012, rata-rata uang muka yang dikenakan oleh 13 bank penyalur KKB roda-2 tercatat sebesar 25%, dibawah minimum DP yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Dibandingkan tahun 2011, penjualan kendaraan roda-2 selama 2012 mengalami penurunan sebesar 11,2% , sementara penjualan kendaraan roda 4 meningkat sebesar 24,7%. Tren penurunan penjualan kendaraan roda 2 terutama disebabkan oleh pasar kendaraan roda 2 yang mulai jenuh. Penurunan tersebut juga diiringi oleh peningkatan NPL yang mencapai 2,32% pada Desember 2012 (1,7% Desember 2011).

Mencermati perkembangan KPR yang sempat bergerak melambat serta penurunan pembiayaan KKB, kebijakan LTV dan DP dipandang efektif dalam menekan potensi peningkatan risiko yang mengancam stabilitas sistem keuangan kedepan. Kebijakan tersebut juga mendukung pengelolaan permintaan domestik sehingga membantu penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkatan yang *sustainable*. Di sisi mikro, kebijakan LTV dan DP diharapkan menjadi *screening mechanism* dalam mencari debitur potensial dengan kemampuan keuangan yang memadai sekaligus dapat mengendalikan perilaku spekulasi sehingga dapat memperbaiki profil risiko perbankan khususnya di segmen KPR dan KKB.

Grafik 2 Pertumbuhan Tahunan KKB Roda-2 dan Roda-4



Dinamika Perekonomian dan Perbankan Indonesia

Perkembangan perekonomian dan sistem keuangan Indonesia dihadapkan pada tantangan yang muncul dari dinamika perekonomian global dan regional. Dari perekonomian global, tantangan terutama berasal dari kelanjutan penyelesaian krisis Eropa dan permasalahan ekonomi Amerika. Sementara itu, dari kawasan regional, rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015 yang memudahkan arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri. Kompleksitas permasalahan akan semakin bertambah seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan ASEAN mulai 2020 yang memungkinkan bank-bank di kawasan ASEAN yang memenuhi kriteria sebagai Qualified ASEAN Banks (QAB) beroperasi secara bebas di negara-negara ASEAN layaknya bank-bank domestik.

Selain tantangan dari eksternal, sistem keuangan khususnya sistem perbankan nasional juga dihadapkan pada permasalahan dari dalam negeri yang antara lain berupa rendahnya rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto yang baru mencapai sekitar 32%, kegiatan ekonomi yang terpusat di pulau Jawa dan sebagian Sumatera serta layanan jasa keuangan formal yang belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat (inklusif). Kompleksitas permasalahan tersebut memerlukan terobosan kebijakan yang bersifat fundamental dan *extraordinary* yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan secara keseluruhan. Terkait dengan itu, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan *multilicensing* yang pada dasarnya merupakan salah satu perangkat implementasi Pilar 1 Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Mengapa *Multilicensing*?

Multilicensing pada intinya adalah pengaturan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan kapasitas permodalan yang dimiliki. Bank-bank dengan kapasitas permodalan yang memadai diyakini memiliki ketahanan yang lebih baik karena mampu menyerap berbagai risiko yang dihadapi, lebih efisien karena beroperasi pada skala ekonomisnya serta lebih fokus pada produk dan aktivitas yang dikuasai. Dengan beroperasi pada skala ekonomis, perbankan akan mencapai tingkat efisiensi optimal karena perolehan laba lebih ditentukan oleh volume aktiva produktif dan tidak terpaku pada "*pricing*" atau suku bunga kredit/pembiayaan. Bank-bank diperkirakan dapat beroperasi dengan skala yang ekonomis jika memiliki modal inti setidaknya Rp1 triliun atau setidaknya Rp5 triliun untuk kegiatan yang lebih luas.

Dalam penerapannya, selain menggunakan pendekatan regulasi, kebijakan *multilicensing* juga menggunakan pendekatan pengawasan agar perluasan jaringan kantor dapat berjalan selaras dengan upaya mendorong peningkatan efisiensi. Oleh karena itu, selain penerapan mekanisme insentif dan disinsentif, efisiensi dan pemupukan modal bank dari laba bersih juga menjadi bahan pertimbangan dalam perizinan perluasan jaringan kantor.

Diagram 1 Framework Kebijakan Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Perbankan



Multilicensing dari sisi kegiatan usaha diterapkan dengan mengelompokkan kegiatan usaha bank umum menjadi empat kelompok yaitu Bank Umum Kegiatan Usaha 1 (BUKU 1) - BUKU 4. Untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan efektif dan berkontribusi optimal pada perekonomian nasional, ditetapkan target kredit produktif yang harus dipenuhi setiap bank mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit bank yang meliputi kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

Multilicensing dari sisi perluasan jaringan kantor diimplementasikan dengan melakukan pengaturan kembali mekanisme pembukaan jaringan kantor bank dalam rangka pemerataan dan perluasan



wilayah layanan perbankan serta untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Selain tingkat kesehatan, dukungan modal inti yang cukup diperlukan agar perluasan jaringan kantor tidak terlalu membebani biaya operasional. Oleh karena itu, bank harus

memperhitungkan jaringan kantor yang ada terhadap modal inti bank terlebih dahulu baru kemudian menentukan berapa banyak, jenis serta lokasi kantor yang akan dibuka. Sebagai faktor yang turut dijadikan sebagai bahan pertimbangan, setiap lokasi kantor memiliki faktor pengali (koefisien) yang berbeda untuk masing-masing zona dan setiap jenis kantor bank (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas) memiliki besaran nilai yang berbeda. Perlakuan khusus (insentif) dalam pembukaan jaringan kantor diberikan kepada bank-bank yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar layanan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang produktif tetap dapat dilakukan.

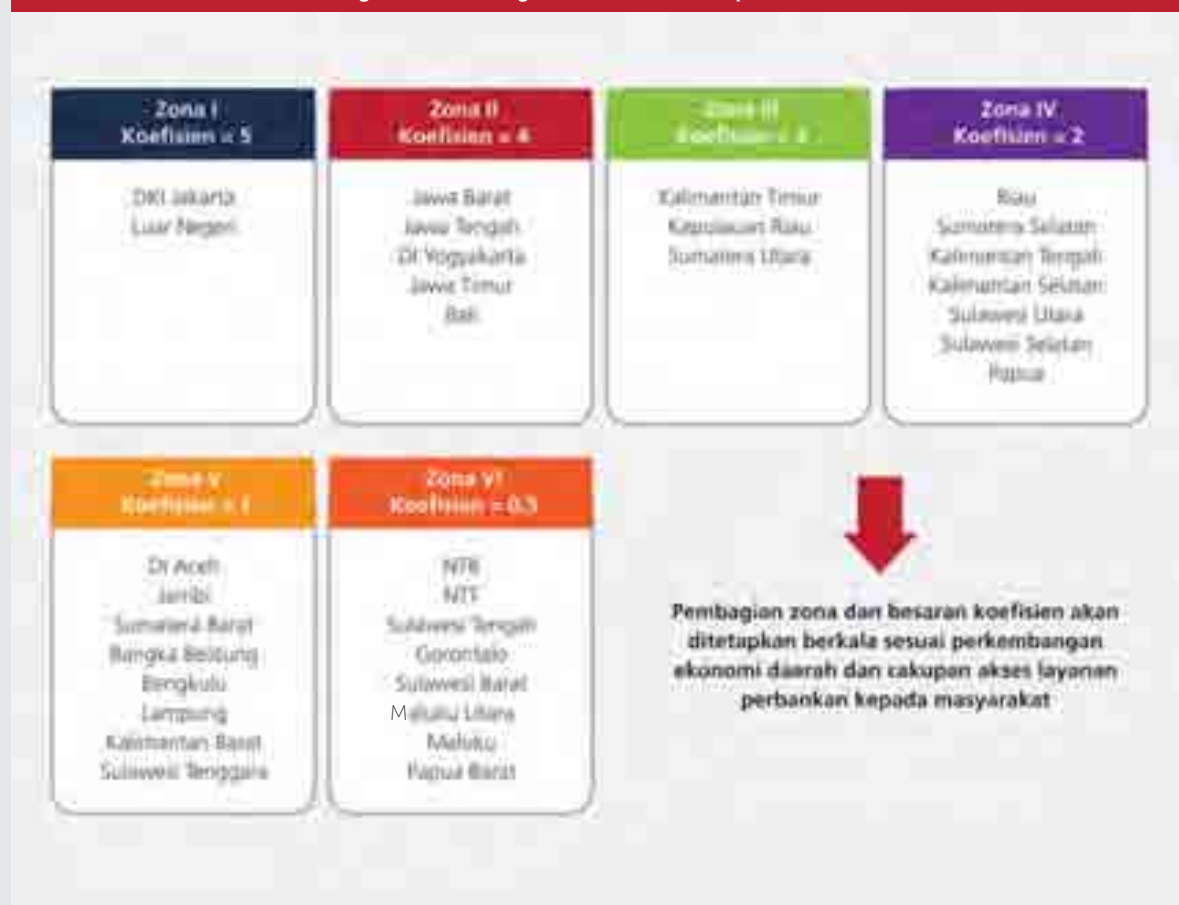
Alokasi Modal Inti Dasar Untuk Setiap Jenis Kantor Bank

Jenis Kantor	Alokasi Modal Inti Dasar BUKU 3 dan BUKU 4	Alokasi Modal Inti Dasar BUKU 1 dan BUKU 2
Kantor Cabang	Rp 10 Miliar	Rp 8 Miliar
Kantor Wilayah	Rp 10 Miliar	Rp 8 Miliar
Kantor Cabang Pembantu	Rp 4 Miliar	Rp 3 Miliar
Kantor Fungsional	Rp 4 Miliar	Rp 3 Miliar
Kantor Kas	Rp 2 Miliar	Rp 1 Miliar

* Tidak termasuk kantor fungsional untuk penyaluran kredit mikro

Alokasi modal inti dasar tidak bersifat permanen dan besarnya akan ditetapkan secara berkala sesuai evaluasi terhadap kondisi perekonomian dan perkembangan akses layanan perbankan kepada masyarakat.

Diagram 2 Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien



Dampak bagi Perbankan dan Perekonomian

Kebijakan *multilicensing* merupakan kebijakan jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki struktur industri perbankan nasional. Dalam penerapannya, kebijakan *multilicensing* tetap menjadikan konsolidasi perbankan sebagai tujuan utama dengan strategi implementasi yang akan berdampak tidak langsung. Upaya untuk memfasilitasi perluasan kegiatan usaha bank dilakukan bersamaan dengan upaya mendorong peningkatan permodalan yang dapat dilakukan dengan setoran modal baru, mengundang *strategic investor*, atau melakukan merger/konsolidasi. Dalam hal ini, kebijakan untuk mendorong konsolidasi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas yaitu sinergi antara bank-bank besar dengan ceruk pasar yang lebih terarah pada nasabah besar dan bank-bank menengah dan kecil yang memilih segmen pasar masyarakat tertentu (*niche market*).

Kebijakan *multilicensing* diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena upaya untuk memperbesar porsi kredit produktif akan memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri dan wirausaha-wirausaha baru untuk menggarap dan mengembangkan potensi pasar yang berbasis ekonomi kreatif yang pada gilirannya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Disamping itu, potensi ekonomi daerah yang selama ini belum tersentuh pembiayaan perbankan diharapkan akan berkembang dan menjadi sektor unggulan sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu pemerataan pembangunan keseluruh pelosok Indonesia. Dengan demikian, kebijakan *multilicensing* diharapkan dapat mencapai dua sasaran sekaligus yaitu membantu mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sebagai instrumen pembayaran nontunai yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, penggunaan APMK yang terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini tercermin dari relatif tingginya pertumbuhan nilai transaksi pembayaran yang menggunakan APMK selama 4 tahun terakhir, yaitu rata-rata 18,93%. Namun, di tengah pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut, sering terjadi keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan penggunaan APMK. Berbagai kasus menimpa nasabah pengguna APMK, khususnya kartu kredit, mulai dari tunggakan utang kartu kredit, tingkat suku bunga yang relatif tinggi, penggunaan kartu kredit bukan oleh pemegang yang sah, sampai pada pelanggaran etika penagihan kartu kredit.

Mengingat masalah tersebut dan sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan kehati-hatian (*prudential*) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran APMK, pada tahun 2012 Bank Indonesia telah menyempurnakan kebijakan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan APMK yang diformalkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan SEBI No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga kartu kredit.

Secara garis besar penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan APMK yang terkait dengan upaya meningkatkan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

(i) *Penyampaian Informasi*

Pengaturan sebelumnya yang telah memuat kewajiban penyampaian informasi mengenai prosedur penggunaan kartu, hak dan kewajiban

pemegang kartu, mekanisme penyampaian keluhan, risiko penggunaan kartu dan biaya yang dikenakan, disempurnakan. Beberapa penyempurnaan pengaturan a.l. mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme penutupan kartu, rincian transaksi tahunan, informasi nilai tukar untuk transaksi di luar negeri dan kualitas kredit bagi pemegang kartu kredit. Tata cara penyampaian informasi ini pun dirinci, termasuk dimuatnya pengaturan mengenai tata cara dan waktu penyampaian rincian tagihan untuk pemegang kartu kredit. Dengan bertambahnya cakupan informasi yang harus disampaikan ini diharapkan pemegang kartu menjadi lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan kartunya.

(ii) *Penyeragaman Pola Penghitungan Tagihan Kartu Kredit*

Langkah penyeragaman yang dilakukan adalah dengan menentukan bahwa penghitungan bunga dimulai sejak tanggal posting transaksi, bukan tanggal transaksi dilakukan. Tanggal posting adalah tanggal kapan penerbit kartu kredit benar-benar melakukan pembayaran atau penalganan dana kepada *acquirer* atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu. Selain itu penyeragaman juga dilakukan dengan membatasi pengenaan bunga hanya terhadap sisa (*outstanding*) tagihan kartu kredit yang belum dibayar dan ditambah dengan penegasan bahwa biaya, denda dan bunga terutang dilarang untuk dikenakan bunga lagi, sehingga pola penghitungan tagihan "bunga berbunga" resmi tidak boleh dilakukan lagi.

(iii) *Etika Penagihan Kartu Kredit*

Penagihan kartu kredit hanya dapat dilakukan di alamat penagihan dan dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat. Penagihan dilarang dilakukan dengan cara-

cara kekerasan, tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tekanan, serta dilarang dilakukan kepada pihak lain yang bukan merupakan pemegang yang bersangkutan. Khusus untuk penagihan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, terdapat beberapa tambahan pengaturan lainnya, yaitu penagihan oleh pihak ketiga ini hanya dapat dilakukan apabila kualitas kredit sudah masuk kategori "macet", kerjasama wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai alih daya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa kualitas penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sama dengan jika penagihan dilakukan oleh penerbit sendiri.

(iv) *Transaction Alert*¹

Untuk melindungi pemegang kartu kredit yang sah dari transaksi yang tidak dilakukannya, penyempurnaan ketentuan APMK selain mewajibkan penggunaan PIN enam digit, juga mewajibkan penyampaian *transaction alert* setelah terdapat transaksi yang memenuhi kondisi tertentu. *Transaction alert* ini disampaikan melalui *short message service* (sms) atau sarana lainnya yang dipilih oleh pemegang kartu. Pada prinsipnya *transaction alert* berisikan notifikasi bahwa telah terjadi transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemegang, dan menginformasikan pemegang nomor telepon yang dapat dihubungi bila pemegang tidak merasa melakukan transaksi tersebut. *Transaction alert* dikirimkan pada saat terdapat transaksi di *merchant* yang masuk kategori berisiko tinggi, terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil pemegang, terdapat transaksi berkali-kali dengan nilai sama, atau

saat kartu kredit digunakan untuk pertama kalinya.

(v) *Penetapan Suku Bunga Maksimum Kartu Kredit*

Salah satu pengaturan baru lainnya terkait penyempurnaan ketentuan APMK adalah mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan batas maksimum suku bunga kartu kredit. Bank Indonesia telah menetapkan bahwa batas maksimum suku bunga kartu kredit yang dapat ditetapkan oleh penerbit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun. Suku bunga tersebut dapat diubah oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan indikator perekonomian yang ada, struktur biaya dalam kegiatan kartu kredit serta praktek suku bunga yang dikenakan oleh penerbit selama ini.

Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan APMK yang terkait dengan peningkatan aspek kehati-hatian adalah sebagai berikut.

(i) *Persyaratan Kepemilikan Kartu Kredit*

Dari sisi kepemilikan kartu kredit, Bank Indonesia mengatur kembali mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu untuk dapat menjadi pemegang kartu kredit. Persyaratan ini dimulai dengan persyaratan dasar, yaitu berupa syarat minimum usia 21 tahun bagi pemegang kartu utama, dan 17 tahun bagi pemegang kartu tambahan. Syarat usia ini diharapkan dapat menyaring agar individu yang memegang kartu kredit adalah individu-individu yang telah dewasa, dan matang dalam memahami risiko penggunaan kartu kredit. Syarat dasar berikutnya adalah minimum pendapatan sebesar tiga juta rupiah per bulan. Syarat ini dimaksudkan agar memastikan bahwa individu pemegang kartu kredit merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk diberikan dan mengelola fasilitas kredit yang diberikan melalui kartu kredit. Dalam hal ini pendapatan ini harus

1 *Transaction alert* adalah pesan yang disampaikan penerbit kepada pemegang kartu kredit mengenai transaksi kartu kredit yang perlu diketahui oleh pemegang kartu kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh pemegang kartu yang bersangkutan.

dibuktikan dengan dokumen resmi berupa slip gaji bagi individu yang bekerja pada perusahaan atau lembaga, atau bukti setoran pajak bagi individu yang memiliki usaha sendiri. Kedua syarat ini disebut syarat dasar karena individu-individu yang tidak memenuhi kedua syarat diatas pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk memegang kartu kredit.

(ii) Penerapan Manajemen Risiko Pemberian Kredit

Setelah pengaturan persyaratan kepemilikan kartu kredit, untuk memperkuat aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit, dalam penyempurnaan ketentuan APMK terdapat pengaturan persyaratan mengenai plafon kredit dan jumlah penerbit yang dapat memberikan kartu kredit. Persyaratan ini hanya berlaku

bagi pemegang kartu kredit yang memiliki pendapatan antara Rp3 juta-Rp10 juta. Bagi pihak yang masuk dalam kategori tersebut, maka batas maksimal plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh penerbit kartu kredit adalah sebesar tiga kali pendapatan bulanannya. Batas maksimal plafon ini berlaku secara industri, artinya total plafon seluruh kartu kredit yang dimiliki oleh pemegang kartu akan dijumlahkan, dan jumlah tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan. Pembatasan selanjutnya adalah mengenai jumlah penerbit. Untuk pemegang kartu yang masuk kategori diatas dibatasi hanya dapat menerima kartu kredit dari dua penerbit yang berbeda.

Bab 11

Koordinasi Kebijakan





Koordinasi Kebijakan



Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah serta pihak-pihak terkait. Koordinasi kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bentuk koordinasi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia selama tahun 2012 difokuskan pada upaya (i) pengendalian inflasi, (ii) penyesuaian keseimbangan eksternal, (iii) pencegahan dan penanganan krisis, (iv) penguatan sistem pembayaran. Selain itu, di tahun 2012 Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan untuk mendukung stabilitas ekonomi makro serta memperkuat struktur perekonomian. Di bidang fiskal, Pemerintah tetap mempertahankan subsidi energi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, serta mengupayakan percepatan pencairan anggaran dan perbaikan kualitas belanja. Di sektor keuangan, Pemerintah terus mendorong penguatan basis pembiayaan nonbank. Selanjutnya dalam rangka memperkuat struktur sektor riil, Pemerintah menempuh sejumlah langkah kebijakan untuk memperkuat nilai tambah sektor produksi, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong kinerja ekspor.



11.1 Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan koordinasi kebijakan yang lebih intensif baik dari sisi moneter, fiskal maupun sektoral, karena Indonesia saat ini sedang dalam proses membawa inflasi pada tingkat yang lebih rendah (disinflasi). Pencapaian inflasi yang rendah dan terkendali selama tahun 2012 tidak terlepas dari semakin solidnya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI dan TPID) yang telah diformalkan Bank Indonesia dan Pemerintah sejak tahun 2005. Solidnya kerjasama tersebut terutama tercermin dari koordinasi kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi pangan, pengamanan pasokan melalui kelancaran distribusi, stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta peningkatan efektivitas komunikasi kepada *stakeholders* dalam rangka mengarahkan ekspektasi inflasi.

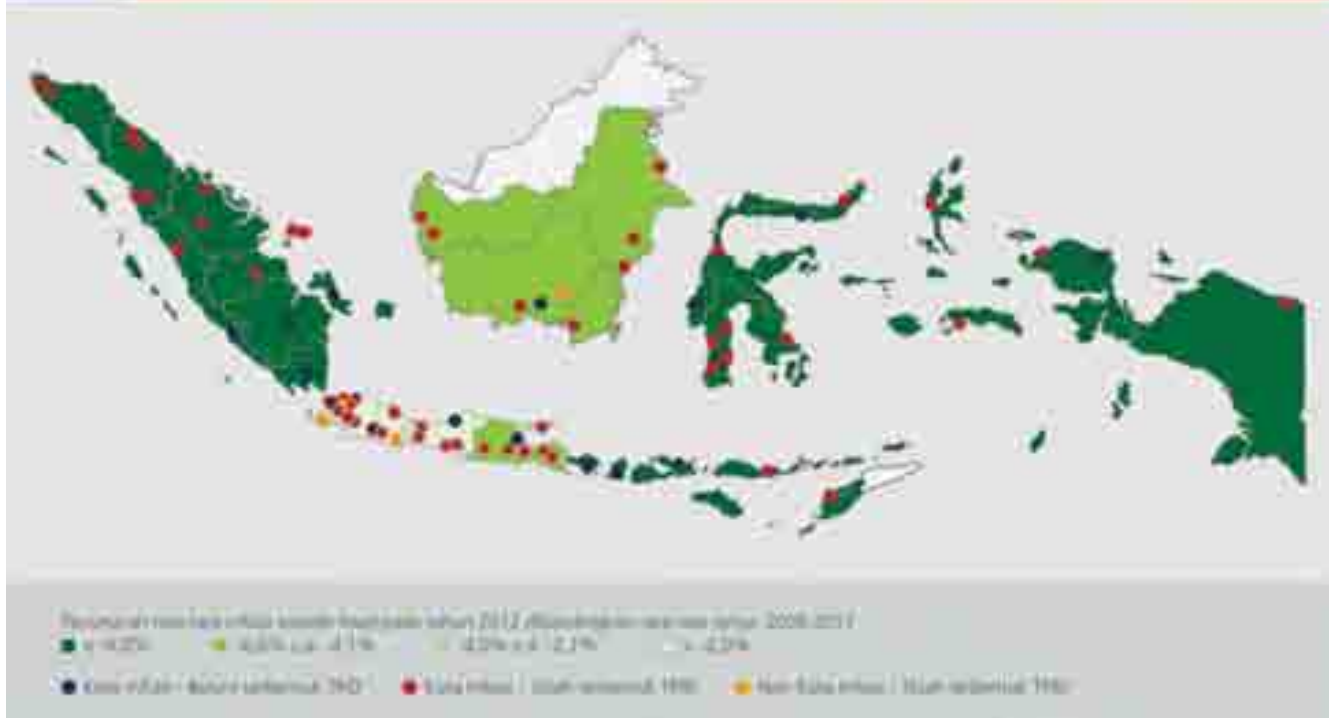
Kegiatan koordinasi kebijakan yang dilakukan TPI pada tahun 2012 mencakup (i) koordinasi dan komunikasi terkait penetapan sasaran inflasi tahun 2013-2015 (ii) *monitoring*, identifikasi dan penyusunan

rekomendasi langkah-langkah pengendalian tekanan inflasi; (iii) melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan stabilisasi harga beras; (iv) peningkatan koordinasi TPI di tingkat pusat dan daerah.

Terkait dengan penetapan sasaran inflasi tahun 2013-2015, koordinasi yang dilakukan TPI berupa pembahasan usulan kisaran sasaran inflasi secara intensif dalam forum TPI baik di tingkat teknis maupun di tingkat pengarah, sebelum disampaikan kepada Pemerintah. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.011/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014 dan 2015, Menteri Keuangan menetapkan sasaran inflasi untuk periode tahun 2013, 2014 dan 2015, yang kemudian dikomunikasikan bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi ke arah sasarannya.

Selain itu, mengingat masih tingginya risiko tekanan inflasi dari komoditas pangan dan energi, TPI melakukan koordinasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan untuk kedua jenis kelompok barang tersebut. Di sektor pangan, TPI melakukan kajian terkait efektivitas kebijakan stabilisasi harga beras dan mengkaji potensi kenaikan inflasi *volatile food* terkait ketentuan pengendalian impor hortikultura. Sementara itu, terkait sektor energi, TPI melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait melakukan diskusi tentang dampak dari kebijakan harga dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Hasil pembahasan digunakan untuk mendukung penguatan analisa terhadap dampak dari kebijakan serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing kementerian dan lembaga, sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah antisipasi yang lebih konkret terhadap potensi risiko tekanan inflasi yang timbul.

Upaya meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi juga dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga keselarasan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat



pusat dan daerah, mengingat perkembangan inflasi secara nasional merupakan cerminan dari dinamika inflasi daerah. Dalam kaitan ini, upaya pencapaian sasaran inflasi nasional tidak terlepas dari upaya untuk menjaga stabilitas harga-harga di daerah. Oleh karena itu, upaya penyalarsan antara kebijakan pengendalian inflasi di masing-masing daerah dengan upaya pencapaian inflasi nasional yang sesuai sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan.

Upaya mengendalikan tekanan inflasi juga dilakukan melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang keanggotaannya terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, dan Kementerian Dalam Negeri. Pokjanas merupakan wadah koordinasi seluruh TPID di berbagai daerah yang secara konsisten mendorong partisipasi aktif daerah untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Sepanjang tahun 2012, terdapat lima TPID yang dibentuk yaitu TPID Kabupaten Barito Selatan, TPID Kabupaten Ciamis, TPID Kota Jambi, TPID Kota Padang, dan TPID Kota Manado. Sampai dengan saat ini terdapat 87 TPID yang terdiri dari 33 TPID di

tingkat provinsi dan 54 TPID di tingkat kabupaten/kota (termasuk 5 kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, yaitu: Pandeglang, Tangerang Selatan, Barito Selatan, Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya). Dengan demikian, dari 66 kota sebagai basis penghitungan inflasi (berdasarkan Survei Biaya Hidup tahun 2007), masih terdapat 17 kota yang belum memiliki TPID di tingkat kabupaten/kota meskipun telah memiliki TPID di tingkat provinsi (Grafik 11.1). Di waktu mendatang, Pokjanas TPID akan terus memfasilitasi pembentukan TPID di berbagai daerah terutama di seluruh ibu kota provinsi untuk lebih meningkatkan efektivitas upaya stabilisasi harga.

Pokjanas TPID mendorong penerapan sistim resi gudang di berbagai daerah sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga. Pola produksi pangan yang masih sangat tergantung pada faktor musim berdampak pada pergerakan harga pangan yang diwarnai tekanan pada masa paceklik. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani bergerak fluktuatif. Untuk mengatasi hal tersebut, sistim resi gudang menjadi suatu solusi yang memberikan

keleluasaan bagi petani untuk mengatur waktu penjualan hasil panen sehingga mendukung stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.

Pokjanas TPID juga mendorong ketersediaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang aktual, terpercaya, dan mudah diakses untuk mengurangi disparitas harga antar-waktu, antar-tempat dan antar pelaku ekonomi. Disparitas harga dipicu informasi asimetris akibat belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan informasi harga yang aktual, terpercaya dan mudah diakses untuk mendukung keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi dari tingkat produsen hingga konsumen. Pembenahan basis data pada sistem yang telah dikembangkan selama ini di berbagai lembaga menjadi langkah penting untuk menjamin kredibilitas data yang dibangun dalam PIHPS. Pengembangan PIHPS nasional secara komprehensif akan dituangkan di dalam suatu cetak biru yang disusun bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait. Sebagai tahapan awal pada tahun 2012, Bank Indonesia telah melakukan diskusi terfokus dan peninjauan kerjasama informasi harga pangan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta menginisiasi kerjasama pengembangan PIHPS dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai percontohan.

11.2 Penyesuaian Keseimbangan Eksternal

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 tumbuh cukup tinggi, dengan inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Namun, keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia menghadapi tekanan terhadap akibat meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan.

Terkait itu, Bank Indonesia dan Pemerintah melakukan koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mengatasi meningkatnya

defisit transaksi berjalan. Hal ini perlu dilakukan agar penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkat yang *sustainable* sehingga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Untuk mengendalikan laju defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia menempuh empat langkah kebijakan. Pertama, Bank Indonesia akan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya untuk mendukung penyesuaian keseimbangan eksternal tersebut. Kedua, memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian likuiditas. Ketiga, meningkatkan pendalaman pasar valas, termasuk dengan merelaksasi ketentuan terkait tenor *forward* dengan nonresiden dari yang sebelumnya minimum 3 bulan menjadi minimum 1 minggu. Keempat, kebijakan makroprudensial melalui pengelolaan pertumbuhan kredit dengan memperkuat implementasi *loan to value* (LTV), termasuk penerapan untuk industri keuangan berbasis syariah dan larangan pemanfaatan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk uang muka kredit.

Di sisi Pemerintah, sejumlah kebijakan telah dan akan ditempuh untuk memperkuat transaksi berjalan melalui upaya mendorong ekspor, menekan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui instrumen fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif melalui perpajakan dan bea masuk. Dari sisi perpajakan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *tax holiday* yang diarahkan untuk mendorong investasi yang dapat menghasilkan barang modal sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Di sisi bea masuk, Pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengurangan ketergantungan impor barang jadi (PMK 76/PMK.011/2012). Di sektor pertambangan saat ini terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam penyelesaian *Clean and Clear* di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu sekitar 4000



perusahaan. Artinya, perijinan ke-4000 perusahaan tersebut telah memenuhi UU Minerba. Hal ini akan memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Sejalan dengan kebijakan antisipatif tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan delapan peraturan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan 10 peraturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang tujuan akhirnya untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan impor barang sejenis. Optimalisasi pengawasan penyelundupan di bidang kepabeanan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan.

Di waktu yang akan datang, Pemerintah akan memperkuat kebijakan industri pengolahan yang dapat mengurangi ketergantungan barang modal, bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung pemenuhan pohon industri nasional yang berbasis produk dalam negeri. Dalam jangka menengah, kebijakan Pemerintah diarahkan agar ketergantungan terhadap impor dapat berkurang, di samping untuk terus mendorong ekspor. Selanjutnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil.

11.3 Pencegahan Dan Penanganan Krisis

Melanjutkan kebijakan pembentukan Protokol Manajemen Krisis (PMK) pada periode sebelumnya, Bank Indonesia bekerjasama dengan otoritas terkait lainnya berupaya melakukan penyempurnaan terhadap PMK Nasional. Dalam kerangka PMK Nasional, tanggung jawab Bank Indonesia terfokus pada pemantauan krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Sementara itu, pemantauan terhadap krisis pasar keuangan, fiskal, dan lembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh Pemerintah dan otoritas terkait lainnya.

Secara kelembagaan, PMK nasional berada di bawah koordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), suatu forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, berdasarkan pasal 44 Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang berlaku sejak November 2011. Adapun keanggotaan FKSSK adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan, selaku anggota merangkap koordinator;

- b. Gubernur Bank Indonesia, selaku anggota;
- c. Ketua Dewan Komisiner OJK, selaku anggota; dan
- d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, selaku anggota

Dalam rapat FKSSK perdana yang dilakukan pada 7 Juni 2012, forum menyepakati dua hal penting. Pertama, penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keuangan. Kedua, Surat Keputusan Bersama yang memuat sejumlah kesepakatan antara lain adanya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan II dan dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yang membawahkan bidang kebijakan moneter dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, penunjukan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan selaku Koordinator Sekretariat FKSSK, serta tugas Sekretariat FKSSK. Selain itu, terbentuknya OJK, telah dilakukan pembaruan Nota Kesepahaman tersebut pada tanggal 1 November 2012 untuk memasukkan OJK dalam kerangka FKSSK.

Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan seperangkat ketentuan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam kerangka PMK, nilai tukar dan perbankan. Mekanisme tersebut dituangkan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 14/1/PDG/2012 tentang Protokol Manajemen Krisis yang diterbitkan pada tanggal



11 Januari 2012. PDG tersebut mengatur tentang kegiatan *surveillance*, mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya, termasuk aspek komunikasi ke publik. Sebagai acuan dalam operasionalisasi PMK, pada 9 April 2012 telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Intern No.14/11/INTERN tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Krisis yang mengatur mekanisme kerja yang lebih rinci untuk setiap Departemen terkait di Bank Indonesia.

Terkait dengan implementasi koordinasi antar-lembaga dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan, telah diselenggarakan pertemuan koordinasi antara Wakil Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Eksekutif LPS (*Deputies' Meeting*). Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai hasil pemantauan kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan, untuk melihat ada atau tidaknya potensi risiko yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, simulasi mini penanganan krisis (*Fire Drill*) juga telah dilakukan yang merupakan tahap awal untuk menuju simulasi krisis skala nasional (*Full-Dressed Simulation*) pada tahun 2013 dengan dukungan dari World Bank dan Toronto Centre.

Selain upaya penguatan penanggulangan krisis secara domestik, upaya juga dilakukan dalam tingkat kerja sama regional dan internasional. Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui penguatan jaring pengaman keuangan kawasan, dengan meningkatkan kontribusi pada *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM). Dengan demikian, akses Indonesia pada fasilitas bantuan likuiditas, untuk mencegah maupun mengatasi krisis mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, CMIM yang merupakan inisiatif penyediaan fasilitas bantuan likuiditas di kalangan ASEAN+3, mengalami penguatan di berbagai aspek. Pertama, ukuran total fasilitas CMIM ditingkatkan menjadi 240 miliar dolar AS dari yang telah disepakati pada tahun 2010, yakni sebesar 120 miliar dolar AS. Kedua, jenis fasilitas yang ada di dalamnya juga diperluas dari

yang semula hanya dapat digunakan untuk resolusi krisis, menjadi mencakup pencegahan krisis. Ketiga, IMF *de-linked portion*¹ untuk kedua fasilitas tersebut dinaikkan menjadi 30% pada tahun 2012 dan jika memungkinkan, akan ditingkatkan menjadi 40% pada tahun 2014. Keempat, lamanya periode maturitas diperpanjang, yakni menjadi 3 tahun untuk IMF *linked portion* dari semula hanya 2 tahun, dan menjadi 2 tahun bagi IMF *de-linked portion* dari semula hanya 1 tahun. Selain itu, panduan operasional CMIM juga telah disusun untuk mendukung efisiensi dan kecepatan pemenuhan permintaan bantuan anggota. Fitur ini merupakan salah satu kelebihan CMIM dibandingkan fasilitas pencegahan dan resolusi krisis yang disediakan IMF.

Seiring peningkatan tersebut, hak akses masing-masing negara ASEAN+3 terhadap fasilitas CMIM juga meningkat, meskipun kewajiban kontribusi masing-masing juga bertambah. Dalam hal ini, Indonesia, bersama empat negara ASEAN terbesar lainnya, memberikan kontribusi masing-masing sebesar 9,10 miliar dolar AS, dari sebelumnya sebesar 4,55 miliar dolar AS. Adapun hak akses Indonesia kepada bantuan pendanaan CMIM meningkat menjadi 22,76 miliar dolar AS, dari yang sebelumnya sebesar 4,55 miliar dolar AS. Prosedur pengajuan bantuan likuiditas CMIM yang lebih mudah dan lebih singkat, menguntungkan bagi Indonesia guna mencegah kondisi ekonomi yang lebih buruk manakala dihadapkan pada ancaman krisis.

Dalam skala yang lebih luas, untuk mencegah dampak rambatan dari krisis di kawasan Eropa, IMF menghimbau negara di dunia untuk melakukan upaya bersama menjaga kelangsungan proses pemulihan ekonomi global dan menjamin stabilitas keuangan global. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyediakan *Global Financial Safety Net* (GFSN) atau lebih dikenal dengan *global firewall* dengan

1 IMF *de-linked portion* adalah batas maksimal akses fasilitas bantuan likuiditas dari CMIM yang tidak disertai kewajiban untuk mengaktivasi program IMF.

cara memperkuat sumber pendanaan IMF untuk menjamin ketersediaan dana bagi negara anggota yang membutuhkan likuiditas. Keinginan untuk meningkatkan dana IMF tersebut juga diperkuat pada forum G-20, yang menghasilkan komitmen untuk memperkuat dana IMF hingga mencapai sebesar 430 miliar dolar AS. Sebagai negara anggota IMF, Indonesia juga mempunyai akses terhadap GFSN tersebut, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan krisis semakin kuat.

11.4 Sistem Pembayaran

Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan penyediaan uang rupiah yang berkualitas dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.

Dalam rangka mewujudkan misi Bank Indonesia di bidang pengedaran uang, kebijakan Bank Indonesia mengacu pada tiga rancangan kebijakan yaitu i) tersedianya uang rupiah yang berkualitas; ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan terpercaya; dan iii) layanan kas prima. Selain perkembangan ekonomi makro, implementasi rancangan kebijakan tersebut dilakukan dengan memerhatikan perkembangan isu pengedaran uang termasuk UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terkait dengan itu, beberapa kebijakan Bank Indonesia dilakukan berkoordinasi dengan instansi lain. UU Mata Uang mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pencetakan serta pemusnahan dilakukan Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah yang pada pelaksanaannya berpedoman pada Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka perencanaan dan pencetakan, serta pemusnahan uang yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.



Dalam rangka menjamin ketersediaan uang rupiah dan sesuai dengan amanat UU Mata Uang, mulai tahun 2012 Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dalam penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU). Hasil EKU tersebut kemudian menjadi dasar bagi Bank Indonesia melakukan pengadaan uang dan penyusunan Rencana Cetak Uang (RCU) 2013. Bank Indonesia menyampaikan EKU dan RCU tahun 2013 kepada Kementerian Keuangan dengan disertai asumsi ekonomi makro yang mendasarinya.

Untuk menjaga kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat dalam kondisi layak edar, Bank Indonesia secara berkala melakukan pemusnahan uang tidak layak edar berupa uang lusuh, uang rusak, uang cacat, serta uang yang telah di cabut dan ditarik dari peredaran. Sesuai dengan amanat UU Mata Uang, koordinasi dengan pemerintah dalam pemusnahan rupiah ini dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi rupiah yang dimusnahkan kepada Kementerian Keuangan setiap tiga bulan dan kepada Kementerian Hukum dan HAM setiap satu tahun sekali untuk diumumkan kepada masyarakat melalui penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk data pemusnahan periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selain kegiatan di atas, koordinasi juga dilakukan Bank Indonesia dengan berbagai instansi terkait dalam pemberantasan Rupiah Palsu yaitu Badan

Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut sebagai tindak lanjut Perpres No. 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang telah ditandatangani Presiden pada tanggal 7 Desember 2012.

Sementara itu, dalam rangka pengembangan layanan kas, Bank Indonesia selama tahun 2012 melakukan penguatan koordinasi dengan TNI-AL. Hal itu tercermin pada Penandatanganan MOU kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI AL pada tanggal 25 Februari 2012. MOU ini meliputi perjanjian kerjasama mengenai distribusi dan pengamanan uang di daerah perbatasan dan terpencil NKRI, serta kerjasama sosial di wilayah tersebut.

Upaya lain yang dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel yaitu melalui kebijakan pengembangan interoperabilitas dalam penyelenggaraan uang elektronik. Selama periode laporan, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dari koordinasi tersebut disepakati agar pengembangan interoperabilitas dalam penyelenggaraan uang elektronik menjadi program nasional. Salah satu sektor yang akan memperoleh manfaat dari interoperabilitas tersebut yaitu sektor transportasi yang secara massal digunakan oleh masyarakat.

Dalam rangka persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia tetap melanjutkan peran aktifnya melalui berbagai kegiatan dan koordinasi dengan negara ASEAN dalam forum Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS). Selama periode laporan telah diselenggarakan beberapa kegiatan untuk membahas perkembangan dari gugus kerja yang telah dibentuk, yaitu gugus kerja bidang Cross

Border Trade Settlement, Money Remittance, Retail Payment System, Capital Market Settlement, dan Standardization. Perkembangan masing-masing gugus kerja adalah: i.) gugus kerja Cross Border Trade Settlement merekomendasikan pentingnya peningkatan efisiensi melalui penyusunan panduan pengaturan transparansi biaya; ii.) gugus kerja Cross Border Money Remittance telah mengidentifikasi *roadmap* pengembangan *money remittance* di negara ASEAN; iii.) gugus kerja Retail Payment Systems telah melakukan koordinasi dengan Asian Payment Network (APN) untuk mengembangkan sistem pembayaran ritel regional yang meliputi antara lain transfer kredit dan kartu debit; iv.) gugus kerja Cross Border Capital Market Settlement telah melakukan koordinasi dengan ASEAN Exchanges untuk mengembangkan *linkages* dan kliring pasar modal ASEAN; dan gugus kerja Standardization telah melakukan survei mengenai standar yang digunakan negara ASEAN dan telah menyetujui penggunaan ISO 20022 untuk *business to business* serta akan melakukan survei kepada ASEAN Bankers Association (ABA) dan APN untuk mengetahui standar yang digunakan oleh industri sistem pembayaran.

11.5 Kebijakan Pemerintah di Bidang Fiskal, Sektor Riil dan Sektor Keuangan

Kinerja ekonomi Indonesia yang menggembirakan selama tahun 2012 juga didukung oleh kebijakan yang ditempuh Pemerintah, baik di bidang fiskal, sektor riil, maupun sektor keuangan. Di bidang fiskal, kebijakan Pemerintah mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat, berkontribusi pada terjaganya stabilitas perekonomian nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kebijakan tersebut juga mendukung pencapaian laju inflasi yang terjaga di bawah asumsi makro sebesar 4,3% yoy di tengah tekanan nilai tukar rupiah.

Selain kebijakan subsidi energi, Pemerintah juga telah mengupayakan percepatan pencairan anggaran melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dengan dikeluarkannya Perpres ini dan pemberlakuan sistem *reward and punishment* dalam pencairan anggaran, waktu pencairan belanja pemerintah mengalami perbaikan yang tampak dari penurunan realisasi anggaran pada triwulan IV 2012 dibandingkan dengan rata-rata pencairan pada triwulan terakhir tahun sebelumnya.

Dari sisi kualitas belanja, pemerintah melakukan berbagai upaya optimalisasi dan efisiensi dalam belanja barang dan belanja pegawai antara lain dalam bentuk seruan pengurangan perjalanan dinas yang berdampak terhadap penurunan realisasi kedua jenis belanja tersebut dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Di sisi penerimaan, pemerintah melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagai upaya penggalian potensi perpajakan, selain juga melakukan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak serta pembenahan internal aparatur dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi perpajakan. Pokok-pokok kebijakan tersebut diterjemahkan dalam berbagai bentuk inisiatif strategis yang dapat dikelompokkan ke dalam *policy measures* dan *administrative measures*. Inisiatif strategis yang termasuk dalam *policy measures* meliputi pembenahan sistem dan regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keberhasilan inisiatif ini terlihat dari penerimaan PPN yang berada di atas target APBN-P 2012 yaitu sebesar 100,5%, adapun inisiatif strategis yang termasuk dalam *administrative measures* yaitu (a) operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertambangan dan migas; (b) realokasi WP di KPP tertentu; dan (c) penunjukan lembaga survei independen. Di bidang kepabeanan dan cukai berbagai kebijakan optimalisasi penerimaan berhasil meningkatkan penerimaan cukai hingga melampaui target APBN-P yaitu mencapai sebesar 114,1%.

Selain pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), untuk mendukung peningkatan kegiatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu, Pemerintah pada tahun 2012 memberikan fasilitas PPh kepada beberapa sektor. Fasilitas PPh antara lain diberikan untuk pengembangan *coal bed methane* (CBM), sebagaimana tercantum dalam PP nomor 52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelampauan PNBP menjadi 103,1% dari target APBN-P 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) dan harga gas, serta pelemahan nilai. Penerimaan Pemerintah atas Laba BUMN masih berhasil melampaui target yaitu mencapai 100,1% dari target di tengah pelaksanaan strategi optimalisasi antara penarikan dividen untuk menunjang APBN dengan laba ditahan untuk investasi. Untuk mendukung penerimaan negara dari bagian laba BUMN, Pemerintah menerapkan kebijakan sebagai berikut: (a) menjaga tingkat dividen berkisar antara 20-55 persen, kecuali perseroan dengan akumulasi rugi dan/atau perseroan jasa asuransi; (b) konsolidasi dan ekspansi BUMN yang memiliki prospek pertumbuhan yang bagus; (c) peningkatan pengendalian internal dan mutu penyajian laporan keuangan melalui adaptasi International Financial Reporting Standards (IFRS) di tahun 2012; (d) *Pay out ratio* Pertamina sebesar 45 persen, dan *pay out ratio* PLN sebesar 30 persen; dan (e) optimalisasi investasi (*capital expenditure*) yang dapat menciptakan efisiensi BUMN sehingga diharapkan adanya peningkatan kinerja BUMN untuk tahun-tahun berikutnya yang berdampak pada peningkatan setoran dividen BUMN. Dengan aset yang dimiliki dan sinergi antar-BUMN yang semakin baik, diharapkan profitabilitas BUMN

dan kontribusinya bagi APBN dapat mengalami peningkatan.

Kinerja ekonomi di tahun 2012 juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di sektor riil. Untuk mendorong kemajuan di sektor riil, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian. Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 07 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2012, Pemerintah mewajibkan dilakukannya pengolahan/pemurnian hasil tambang di dalam negeri untuk komoditas tambang seperti tembaga, emas, perak, timah, bauksit, dan nikel. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pelonggaran dengan memberikan izin ekspor kepada perusahaan yang telah memiliki rencana pengolahan bijih tambang/*smelter* dengan mempertimbangkan kinerja ekspor sektor pertambangan di tengah pelemahan permintaan dan tekanan harga global yang turun. Meskipun dalam jangka pendek memberi imbas pelemahan ekspor, kebijakan ini akan meningkatkan investasi pada pembangunan *smelter* sehingga dalam jangka menengah panjang diharapkan akan terjadi peningkatan nilai tambah dari produk tambang yang dihasilkan dan diekspor. Selain kebijakan pembatasan di sektor pertambangan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal berupa pemberlakuan tarif bea keluar sebagai disinsentif ekspor barang mentah (Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK 011/2012).

Di sisi investasi, pemerintah terus mendorong arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan perizinan dan pemberian insentif perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007, pemerintah memperluas insentif perpajakan untuk 52 kelompok bidang usaha tertentu dan 77 kelompok usaha di daerah tertentu. Insentif diarahkan guna mengisi kekosongan pada pohon industri yaitu industri pionir antara lain industri kimia dasar dan logam dasar. Beberapa industri pengolahan



yang mensubsitusi impor sekaligus meningkatkan nilai tambah produk antara lain pengolahan kakao dan coklat, pengolahan karet, serat kain, komponen elektronik juga mendapatkan fasilitas perpajakan.

Di bidang ekspor dan impor, pengaturan insentif untuk melakukan ekspor masih terbatas pada perusahaan yang berada pada kawasan berikat. Peraturan Menteri Keuangan No. 147/2011 tentang Kawasan Berikat mengatur batasan *output* yang wajib diekspor oleh pengusaha dalam kawasan berikat yaitu sebesar 75%. Beberapa kemudahan sebagai insentif bagi kawasan berikat yaitu adanya fasilitas di bidang perpajakan untuk kegiatan importasi maupun ekspor. Sementara itu, melalui Permentan No. 42/2012 dan Permentan No. 43/2012, pemerintah melakukan pengetatan impor produk hortikultura mulai 15 Juni 2012. Dalam jangka menengah panjang kebijakan ini diharapkan dapat merangsang konsumsi dan produksi hortikultura domestik. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 mengatur ketentuan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Dalam peraturan tersebut, ketentuan teknis seperti syarat pelabelan, manual, dan kartu garansi purna jual wajib ditulis dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan konsumen. Tempat pelabuhan laut impor yang bisa dilalui juga diatur yaitu Belawan, Tanjung Priok,

Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Soekarno Hatta serta pelabuhan udara Polonia, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Juanda dan Hassanudin.

Di sektor keuangan, kebijakan pemerintah terkait dengan dana pensiun arahnya telah sejalan dengan *roadmap* pengembangan pasar modal dan industri keuangan tahun 2010-2014. Dalam kebijakan tersebut, portofolio dana pensiun didorong untuk lebih bervariasi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan yang juga sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk memperdalam pasar keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan aturan tentang investasi dana pensiun termasuk penyusunan laporan keuangan dana pensiun sebagai akibat makin beragamnya investasi dana pensiun. Batas maksimum pembayaran manfaat diubah menjadi Rp1,5 juta per bulan atau Rp500 juta jika dihitung secara keseluruhan. Basis dana pensiun lembaga keuangan juga lebih didorong untuk mencapai efisiensi industri dan profesionalisme yang lebih baik. Dari sisi pengawasan, metode pengawasan bergeser dari kepatuhan dana pensiun menjadi pengawasan berbasis risiko.

Penguatan industri asuransi juga terus dilakukan pemerintah selama tahun 2012. Serangkaian

kebijakan industri asuransi telah dikeluarkan antara lain terkait dengan penguatan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan pengasuransian melalui PMK No. 53 tahun 2012. Selain itu, diterbitkan pula peraturan Bapepam-LK No. 3 dan No. 4 tahun 2012 mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan perusahaan asuransi dan pengasuransian serta pedoman pemeriksaan perusahaan pengasuransian. Kebijakan investasi industri asuransi juga diarahkan sejalan dengan diversifikasi risiko dengan tetap memerhatikan unsur keamanan investasi.

Di pasar modal, aturan penerbitan obligasi korporasi berkelanjutan mendorong peningkatan penerbitan obligasi korporasi selama tahun 2012. Aturan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) tertuang dalam peraturan IX.A.15 yang efektif berlaku pada Desember 2010. Meski demikian, ketentuan tersebut baru banyak dimanfaatkan selama dua tahun terakhir. Dengan aturan tersebut, perusahaan publik hanya melakukan satu kali pendaftaran dan dapat melakukan penawaran obligasi secara bertahap selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan non emiten dapat mengaplikasikan aturan PUB jika perseroan pernah menerbitkan surat utang obligasi atau sukuk serta telah melunasi surat utang tidak lebih dari 2 tahun sebelum menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB atau tidak pernah mengalami gagal bayar.



PROSPEK,
TANTANGAN
DAN ARAH
KEBIJAKAN

Bab 12. Prospek, Tantangan dan Arah Kebijakan

Bagian 4

Bagian 4

Prospek, Tantangan dan Arah Kebijakan

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang mulai membaik, perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya disertai dengan inflasi yang terkendali. Sementara itu, neraca pembayaran diperkirakan akan mencatat defisit transaksi berjalan yang menurun dalam rasionya terhadap PDB.

Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan masih akan tumbuh meningkat dan menjadi motor pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, selain disebabkan oleh perbaikan daya beli dan keyakinan konsumen, juga terkait dengan aktivitas persiapan dan penyelenggaraan Pemilu. Kinerja ekspor juga akan mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia dan harga komoditas. Seiring dengan peningkatan permintaan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun ekspor, pertumbuhan investasi juga diperkirakan akan meningkat. Sejalan dengan perbaikan ekonomi tersebut, impor diperkirakan juga akan tumbuh meningkat.

Dari sisi sektoral, kontribusi pertumbuhan terbesar masih akan berasal dari sektor industri pengolahan,

sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.

Sejalan dengan upaya Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal, rasio defisit neraca transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan akan menurun. Sementara itu, dari sisi transaksi modal dan finansial masih akan mencatat surplus yang cukup besar, terutama dalam bentuk PMA seiring dengan iklim investasi yang tetap kondusif.

Dengan dukungan bauran kebijakan yang terus diperkuat serta koordinasi dengan Pemerintah yang semakin erat, inflasi pada tahun 2013 diperkirakan akan tetap terkendali dan berada pada kisaran sasarannya.

Sementara itu, kinerja sektor keuangan Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan meningkat dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Dari sektor perbankan, pertumbuhan kredit diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Sejalan dengan iklim usaha yang tetap kondusif, penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif diperkirakan tetap tinggi

yang dapat mendorong peningkatan kapasitas perekonomian. Penerbitan obligasi dan IPO juga akan marak sejalan dengan fundamental dan prospek ekonomi yang membaik, serta imbal hasil yang relatif menarik.

Dalam jangka menengah, ekonomi nasional diskenariokan dapat melaju dalam lintasan pertumbuhan yang meningkat secara bertahap dengan pola yang berimbang dalam lingkungan ekonomi makro dan sistem keuangan yang stabil. Skenario lintasan pertumbuhan tersebut didukung terutama oleh asumsi penguatan daya saing dan produktifitas sebagai buah dari transformasi struktur perekonomian ke arah yang semakin berbasis pada efisiensi, kapasitas inovasi, dan modal manusia yang handal. Dalam konteks transformasi struktural tersebut, prasyarat kebijakan yang utama adalah adanya implementasi dari kebijakan-kebijakan yang memperkuat konektivitas domestik, kesiapan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

Namun, sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, bagaimana mengurangi tekanan kesinambungan defisit transaksi berjalan dan fiskal akibat meningkatnya konsumsi

BBM di tengah penurunan produksi. Kedua, bagaimana mengurangi tingginya ketergantungan impor, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi dan perluasaan akses masyarakat ke layanan jasa perbankan dengan biaya yang lebih terjangkau. Keempat, bagaimana mendorong pendalaman pasar valuta asing.

Dengan kondisi tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk pencapaian sasaran inflasi serta mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan eksternal. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan, yaitu: kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, penguatan strategi komunikasi kebijakan, dan penguatan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah. Kebijakan tersebut juga akan didukung oleh kebijakan mikroprudensial perbankan dan sistem pembayaran


Bab 12

Prospek, Tantangan dan Arah Kebijakan





Prospek Tantangan dan Arah Kebijakan



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai kisaran 6,3%-6,8%, dengan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai mesin pertumbuhan. Kinerja ekspor diperkirakan juga akan mengalami perbaikan sejalan dengan prakiraan ekonomi dunia dan harga komoditas yang tumbuh lebih tinggi. Dari sisi produksi, kontribusi pertumbuhan terbesar diperkirakan masih akan berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi. Bauran kebijakan yang terus diperkuat serta koordinasi dengan Pemerintah yang semakin erat akan mendukung pencapaian sasaran inflasi tahun 2013 sebesar 4,5%±1%. Sejalan dengan prakiraan membaiknya faktor-faktor pendukung ekspor di tengah aktivitas perekonomian domestik yang meningkat, rasio defisit neraca transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan akan membaik. Selain itu, surplus neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan masih membukukan surplus dalam jumlah cukup besar seiring dengan iklim investasi yang kondusif.

Ekonomi nasional diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan melampaui 7% dalam periode 2014 - 2017. Prakiraan perekonomian ke depan juga disertai oleh sejumlah tantangan dan faktor risiko baik dari dalam dan luar negeri. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan risiko tersebut Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan.



12.1 Prospek Ekonomi 2013

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, prospek ekonomi Indonesia tahun 2013 akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan membaik. Selain itu, faktor struktural dan respons kebijakan, baik yang telah maupun yang akan ditempuh, juga akan memengaruhi dinamika ekonomi Indonesia ke depan. Dengan kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 6,3% - 6,8% dengan inflasi yang tetap berada dalam kisaran sasaran dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang terjaga.

Prospek Perekonomian Global

Setelah tumbuh terbatas pada tahun 2012, kinerja perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2013, sebesar 3,4% (Tabel 12.1). Prospek ekonomi negara maju diperkirakan sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun masih relatif rendah dan diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi. Konsolidasi fiskal, masih tingginya tingkat pengangguran, dan masih

rendahnya keyakinan konsumen serta pelaku usaha, diperkirakan masih akan menjadi faktor penahan pertumbuhan perekonomian negara maju pada tahun 2013. Aktivitas perekonomian AS pascakrisis keuangan tahun 2008 menunjukkan tren kinerja yang membaik. Namun, laju pertumbuhan ekonomi AS masih rapuh mengingat masih ada beberapa isu penting baik dari sisi eksternal, maupun dari sisi domestik, seperti isu pemotongan belanja pemerintah (*automatic spending cut*) dan pagu utang (*debt ceiling*). Di kawasan Eropa, beberapa langkah sudah diambil untuk mengatasi dampak krisis keuangan, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, antara lain kapasitas negara-negara terkait untuk melakukan penyesuaian fiskal dan struktur perekonomian mereka. Selain masalah tersebut, kesiapan institusi di masing-masing negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang berlaku di kawasan Eropa serta kesiapan ECB dan *European Financial Stability Facility / European Stability Mechanism* (EFSF/ESM) dalam merespons risiko pemburukan ekonomi juga masih menjadi pertanyaan. Di Asia, ekonomi Jepang diperkirakan akan tumbuh melambat akibat ketegangan politik dengan China dan semakin terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi akibat rasio utang pemerintah terhadap PDB yang lebih dari 200%.

Di negara-negara berkembang, pertumbuhan lapangan kerja dan kuatnya pertumbuhan konsumsi serta membaiknya iklim usaha diperkirakan akan tetap mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Walaupun demikian, pertumbuhan negara-negara berkembang diperkirakan belum akan kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum krisis tahun 2008. Di kawasan Asia, China diperkirakan masih menjadi lokomotif pertumbuhan. Hal itu terkait dengan rencana pembangunan proyek infrastruktur untuk keperluan publik dan reformasi jaring pengaman sosial yang dapat meningkatkan konsumsi. Selain itu, ekonomi India juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan adanya perbaikan persepsi terhadap perekonomian India terkait dengan berbagai program

Tabel 12.1 Proyeksi PDB Dunia (% , yoy)

Komoditi	Proyeksi		
	2012	2013	2014
PDB Dunia	3,1	3,4	3,9
Jepang	2,2	0,8	1,1
Amerika Serikat	2,0	2,0	2,6
Kawasan Eropa	-0,5	0,1	1,0
Perancis	0,3	0,6	1,1
Jerman	0,8	0,9	1,4
Italia	-2,4	-0,7	0,5
Spanyol	-1,9	-1,2	0,8
Negara Kawasan Eropa Lainnya	-0,8	-0,1	0,7
China	7,7	8,0	8,2

reformasi yang akan ditempuh.

Ke depan, masih terdapat berbagai faktor risiko yang perlu diwaspadai seperti berkepanjangannya proses negosiasi penetapan pagu utang (*debt ceiling*) dan pemotongan belanja secara otomatis (*automatic spending cut*) di AS, kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tertahan di China, Jepang dan India, serta berlarutnya penyelesaian krisis Eropa.

Prakiraan pertumbuhan ekonomi global yang lebih tinggi diikuti dengan prakiraan kegiatan volume perdagangan dan harga komoditas yang meningkat

(Grafik 12.1). Pada tahun 2013, Bank Indonesia memprakirakan volume perdagangan dunia tumbuh sebesar 4,1%. Sejalan dengan hal tersebut, harga komoditas nonmigas diprakirakan juga akan mengalami peningkatan walaupun masih relatif terbatas.

Prospek Perekonomian Domestik

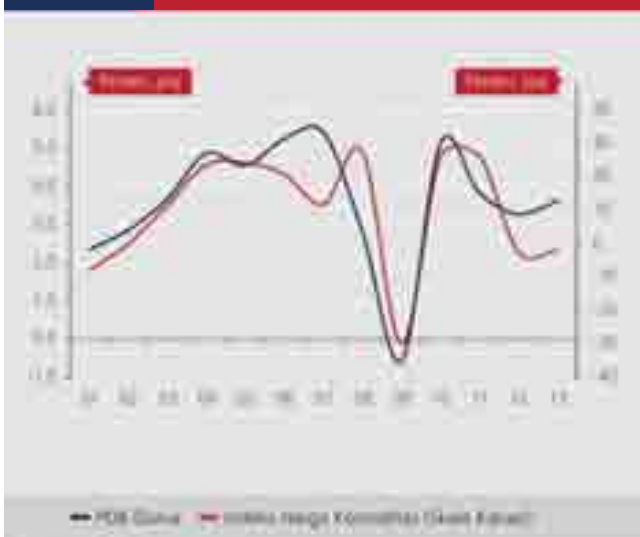
Pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2013 diprakirakan meningkat dan mencapai kisaran 6,3% - 6,8% sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian dunia dan harga komoditas internasional. Permintaan domestik diprakirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi ke depan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi yaitu aktivitas persiapan dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Dari sisi eksternal, pertumbuhan perekonomian dunia yang lebih tinggi dan peningkatan harga komoditas akan meningkatkan permintaan produk ekspor, sehingga kontribusi ekspor dalam pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan lebih tinggi. Dengan kondisi permintaan dari sisi domestik dan eksternal yang membaik, investasi diprakirakan tumbuh cukup tinggi.

Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama, yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta sektor pengangkutan dan komunikasi diprakirakan tetap mendominasi perkembangan perekonomian nasional. Secara umum, perkembangan sektoral akan membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik dan global.

Prospek Pertumbuhan Sisi Permintaan

Pada tahun 2013, konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,8% - 6,3%. Secara struktural, peningkatan konsumsi rumah tangga didukung oleh populasi dan struktur demografi penduduk Indonesia yang didominasi usia produktif dan semakin meningkatnya jumlah kelas

Grafik 12.1 PDB Dunia dan Harga Komoditas



Sumber: BPS dan BPS, Desember 2012

Tabel 12.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

Harga Konstan 2000 (%yoy)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Produk Domestik Bruto	6,0	4,6	6,2	6,5	6,2	6,3 - 6,8
Konsumsi Rumah Tangga	5,3	4,9	4,7	4,7	5,3	5,8 - 6,3
Konsumsi Pemerintah	10,4	15,7	0,3	3,2	1,2	10,0 - 10,5
PMTB	11,9	3,3	8,5	8,8	9,8	10,2 - 10,7
Ekspor Barang dan Jasa	9,5	-9,7	15,3	13,6	2,0	3,3 - 3,8
Impor Barang dan Jasa	10,0	-15,0	17,3	13,3	6,6	6,8 - 7,3

Sumber : BPS
* Proyeksi Bank Indonesia

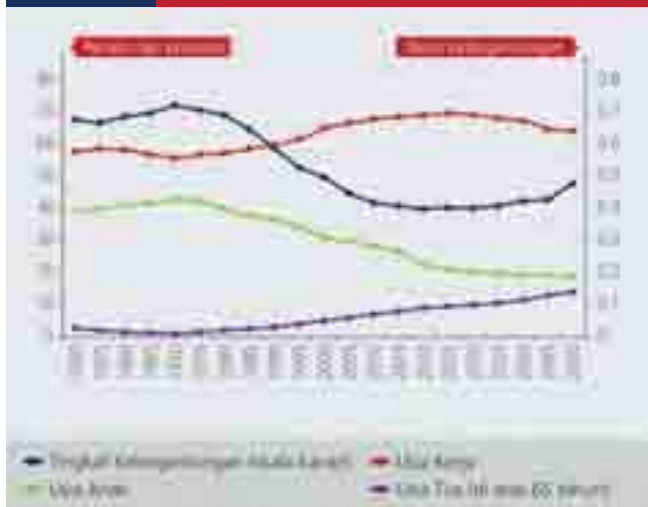
menengah (Grafik 12.2). Prakiraan meningkatnya aktivitas konsumsi juga didukung oleh adanya kegiatan persiapan Pemilu tahun 2014, peningkatan upah dan gaji, serta potensi meningkatnya pendapatan melalui peningkatan ekspor akibat perekonomian global yang membaik. Daya beli masyarakat juga diperkirakan akan membaik terkait adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp18 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun. Selain itu, dukungan terhadap daya beli masyarakat juga berasal dari tingkat inflasi yang terkendali.

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyerapan anggaran, kontribusi konsumsi riil pemerintah pada tahun 2013 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja barang

yang akan ditempuh oleh Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, serta pemeliharaan rutin infrastruktur. Pemerintah juga akan melanjutkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian dan lembaga agar lebih terarah dan tepat waktu. Upaya tersebut diiringi dengan peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sejalan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi riil pemerintah pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 10,0% - 10,5%.

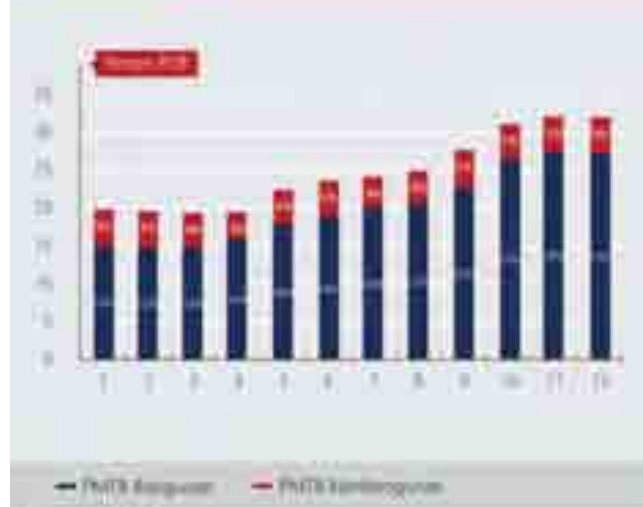
Investasi pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh 10,2% - 10,7%. Prakiraan lebih tingginya pertumbuhan investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya didasarkan pada tren pertumbuhan konsumsi rumah

Grafik 12.2 Struktur Demografi Indonesia



Sumber: MP3EI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Grafik 12.3 Perkembangan Rasio PMTB Terhadap PDB



Sumber: BPS, BPS

tangga domestik yang menguat serta prospek kinerja ekspor yang membaik. Selain itu, prakiraan meningkatnya investasi pada tahun 2013 juga didukung oleh meningkatnya alokasi belanja modal pemerintah, serta membaiknya optimisme investor dan iklim usaha domestik. Dengan pertumbuhan investasi yang meningkat tersebut, tren peningkatan rasio investasi terhadap PDB diperkirakan terus berlanjut melebihi rasio tahun sebelumnya. (Grafik 12.3)

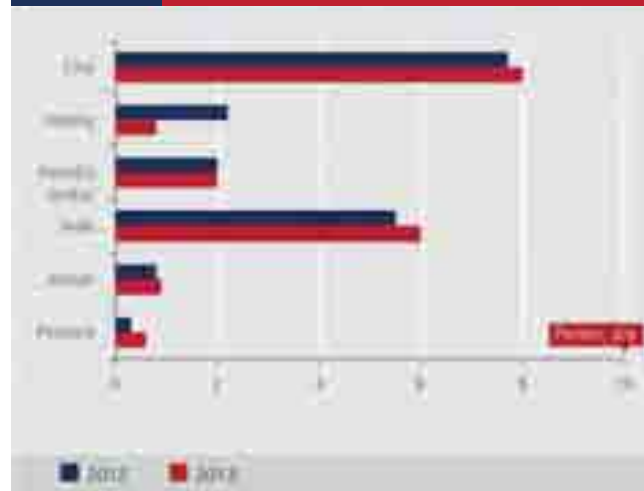
Dalam APBN 2013, Pemerintah telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp184,4 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja infrastruktur. Peningkatan belanja infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya *debottlenecking*, serta meningkatkan keterhubungan antarwilayah, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dalam APBN-2013 meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan dan rehabilitasi bandar udara, pembangunan jalur kereta api baru, pembangunan terminal, transportasi jalan, pembangunan prasarana dermaga penyeberangan, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Selain itu, sebagai pendukung pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan perluasan jaringan transmisi. Pemerintah juga merencanakan peningkatan kapasitas jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Agenda akselerasi pembangunan infrastruktur dalam RAPBN-2013 juga didukung dengan penerbitan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres 71/2012 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum. Kedua Perpres ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur

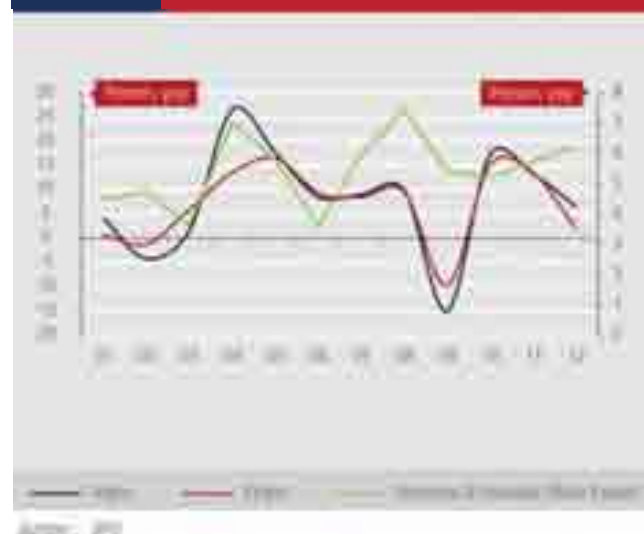
sehingga target pembangunan dan pemerataan pertumbuhan dapat tercapai.

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa diperkirakan meningkat pada tahun 2013, mencapai kisaran 3,3% - 3,8%. Pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2012 terkait pertumbuhan perekonomian global yang lebih baik dan harga komoditas yang meningkat. Terkait dengan hal ini, membaiknya ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan India memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kinerja dengan Indonesia (Grafik 12.4).

Grafik 12.4 Prakiraan Pertumbuhan Negara Tujuan Ekspor Indonesia



Grafik 12.5 Perkembangan Pertumbuhan Komponen PDB



Sejalan dengan permintaan domestik yang kuat dan ekspor yang tumbuh positif, impor barang dan jasa pada tahun 2013 diperkirakan meningkat menjadi 6,8%-7,3%. Laju permintaan domestik dan pertumbuhan ekspor yang meningkat akan menambah aktivitas produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan bahan baku, barang modal dan barang konsumsi yang sebagian berasal dari impor (Grafik 12.5).

Prospek Pertumbuhan Sisi Penawaran

Dari sisi lapangan usaha dominasi sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2013 (Tabel 12.3). Pertumbuhan investasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan kinerja ekspor, dan masih kuatnya konsumsi masyarakat menjadi faktor positif yang menjaga kinerja sektor industri (Grafik 12.6). Daya beli masyarakat yang kuat dan pasar domestik yang relatif besar mendorong sektor perdagangan, hotel dan restoran tetap tumbuh tinggi. Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik yang tetap tinggi juga berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat dan kebutuhan akan jasa komunikasi. Hal tersebut menjadi faktor yang mendorong kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2013 masih cukup tinggi, meskipun masih menghadapi risiko rentannya pemulihan ekonomi global. Relatif tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh kegiatan investasi yang relatif tinggi sejak awal tahun 2010 khususnya dalam bentuk FDI. Status peringkat layak investasi yang disandang Indonesia memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tempat tujuan investasi. Dengan prospek ekonomi domestik dan global yang lebih baik, konsumsi rumah tangga dan ekspor diperkirakan semakin membaik dan mendorong perbaikan kinerja sektor industri pengolahan (Grafik 12.6). Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 6,4% - 6,9%.

Kontributor utama kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan berasal dari subsektor otomotif, makanan dan minuman, besi dan baja, serta semen. Perkembangan subsektor otomotif sangat didukung oleh keberadaan kelas menengah yang meningkat dengan daya beli yang relatif kuat. Besarnya potensi pasar pada kelompok ini menjadi salah satu faktor Indonesia dijadikan basis produksi beberapa merek otomotif. Untuk beberapa tahun ke depan tren produksi kendaraan bermotor diperkirakan masih terus meningkat. Dari sisi industri makanan dan minuman, jumlah penduduk yang besar dan permintaan domestik yang tetap solid menjadi faktor

Tabel 12.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

Harga Konstan 2000 (Persen, yoy)

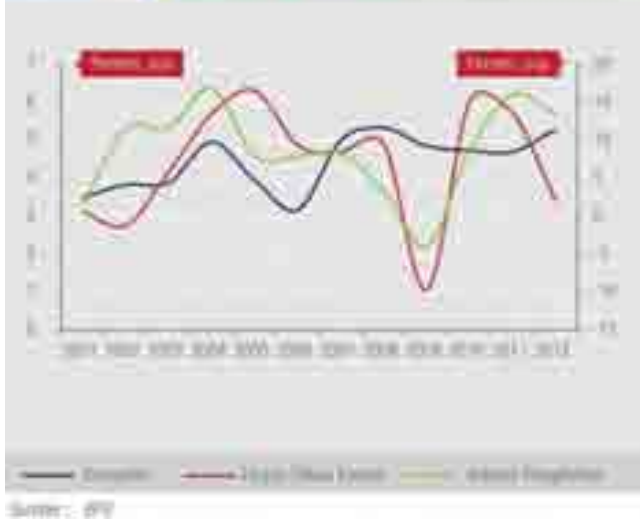
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Produk Domestik Bruto	6,0	4,6	6,2	6,5	6,2	6,3 - 6,8
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	4,8	4,0	3,0	3,4	4,0	3,7 - 4,2
Pertambangan & Penggalian	0,7	4,5	3,9	1,4	1,5	1,4 - 1,9
Industri Pengolahan	3,7	2,2	4,7	6,1	5,7	6,4 - 6,9
Listrik, Gas & Air Bersih	10,9	14,3	5,3	4,8	6,4	6,1 - 6,6
Bangunan	7,6	7,1	7,0	6,6	7,5	7,7 - 8,2
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,9	1,3	8,7	9,2	8,1	7,7 - 8,2
Pengangkutan & Komunikasi	16,6	15,8	13,4	10,7	10,0	9,8 - 10,3
Keuangan, Real Estate & Jasa	8,2	5,2	5,7	6,8	7,1	7,1 - 7,6
Jasa-Jasa	6,2	6,4	6,0	6,7	5,2	5,9 - 6,4

Sumber : BPS

* Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 12.6

Perkembangan Industri Pengolahan, Ekspor, dan Konsumsi



utama pendorong kinerja subsektor ini. Sementara itu, kegiatan pada industri besi dan baja serta semen diperkirakan semakin tinggi seiring dengan kegiatan pembangunan berbagai infrastruktur yang diperkirakan akan terus meningkat.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,7% - 8,2%. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan konsumsi masyarakat dan aktivitas impor yang diperkirakan meningkat. Meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah menyebabkan kebutuhan barang dan jasa, termasuk rekreasi akan semakin meningkat (wisatawan domestik). Selain wisatawan domestik, jumlah kunjungan wisatawan asing juga diperkirakan meningkat. Dengan kondisi tersebut pengeluaran sehubungan dengan kegiatan wisata yang mencakup antara lain akomodasi serta makan dan minum akan ikut meningkat.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh mencapai 9,8% - 10,3%. Prospek ekonomi domestik yang tetap solid akan meningkatkan mobilitas ekonomi domestik seperti kegiatan arus barang, aktivitas perjalanan serta arus informasi. Kegiatan arus barang tercermin dari aktivitas bongkar pasang di pelabuhan dan angkutan kargo. Sementara itu, meningkatnya aktivitas perjalanan terlihat dari meningkatnya jumlah

penumpang yang diangkut oleh berbagai jenis moda transportasi terutama pesawat udara. Pilihan penerbangan berbiaya murah yang semakin banyak serta aktivitas ekonomi yang tetap tinggi menjadi pendorong bertumbuhnya subsektor pengangkutan. Selanjutnya untuk mendukung aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, ketersediaan informasi yang tepat dan cepat semakin dibutuhkan. Dengan kondisi tersebut penggunaan internet dan komunikasi data akan terus meningkat.

Kinerja sektor bangunan pada tahun 2013 diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan komitmen pemerintah yang kuat dalam mendorong implementasi proyek infrastruktur, terutama yang terkait pada program MP3EI, aktivitas di sektor bangunan akan meningkat. Fokus pemerintah pada sektor ini terutama terkait pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, jalur kereta, bandara dan pelabuhan. Dukungan Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat. Proyek pembangunan infrastruktur transportasi tersebut didorong untuk mempercepat konektivitas antarkoridor ekonomi. Dengan perkembangan tersebut sektor bangunan diperkirakan tumbuh sebesar 7,7% - 8,2%.

Prospek Inflasi

Pada tahun 2013, inflasi diperkirakan dapat diarahkan pada kisaran sasarannya sebesar 4,5%±1%. Prakiraan inflasi yang tetap terkendali tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi makro yang kondusif dan prakiraan perbaikan produksi dan distribusi bahan makanan. Meneruskan keberhasilan pencapaian sasaran inflasi pada tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus memperlakukan koordinasi baik di tingkat pusat dan daerah serta melanjutkan penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dengan tujuan utama untuk menjaga inflasi dalam kisaran 4,5%±1% dengan tetap memerhatikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sumber tekanan inflasi diperkirakan antara lain berasal dari peningkatan permintaan domestik. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik. Walaupun demikian, kapasitas produksi yang ada diperkirakan masih dapat mengimbangi peningkatan permintaan sehingga dampaknya terhadap kenaikan harga relatif terbatas. Terkendalnya inflasi juga didukung oleh ekspektasi masyarakat yang semakin terjangkau ke rentang sasaran inflasi.

Sementara itu, inflasi *volatile food* diperkirakan akan tetap terkendali, sejalan dengan prakiraan perbaikan produksi dan distribusi yang didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian dan keterhubungan antarwilayah. Kenaikan UMP yang cukup tinggi pada tahun 2013 diperkirakan memberikan dampak terhadap inflasi yang relatif moderat. Hal ini sejalan dengan hasil survei Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan akan merespons kenaikan UMP tersebut dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Inflasi *administered prices* diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2012 seiring dengan adanya penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15% pada tahun 2013. Dengan memperhitungkan dampak kenaikan UMP dan TTL, inflasi tahun 2013 diperkirakan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi.

Prospek Neraca Pembayaran Indonesia

Pada tahun 2013, tekanan defisit transaksi berjalan relatif terhadap PDB diperkirakan menurun seiring ekspektasi pemulihan kondisi perekonomian global dan membaiknya harga komoditas internasional. Kinerja perdagangan nonmigas diperkirakan akan lebih baik, didukung oleh meningkatnya volume perdagangan dunia dan harga komoditas ekspor (Grafik 12.7). Ekspor nonmigas diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan impor nonmigas, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi China dan India yang lebih baik serta prospek meningkatnya investasi di sektor publik di Jepang terkait dengan adanya stimulus.

Grafik 12.7

Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia dan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia



Sumber: BPS, Oktober 2012

Di sisi transaksi modal dan finansial, arus masuk modal investasi langsung asing (PMA) diperkirakan masih meningkat seiring dengan investasi domestik yang tetap kuat.

Prospek Sistem Keuangan

Kinerja sektor keuangan Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan tetap meningkat dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh kuat sehingga akan memberikan stimulus bagi peningkatan kinerja perbankan, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Peningkatan kinerja perbankan yang tercermin dari pertumbuhan kredit dan profitabilitas diperkirakan akan tetap tinggi dengan risiko kredit yang relatif terjaga. Sejalan dengan arah kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia pada 2013, perbankan akan terus didorong untuk lebih memperkuat ketahanan, efisiensi dan perannya dalam intermediasi. Kondisi likuiditas dan permodalan perbankan nasional diperkirakan masih akan berada pada level yang aman untuk mendukung ekspansi kredit perbankan. Prakiraan tersebut didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) perbankan pada tahun 2013 yang secara rata-rata menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 23,1%.

Kinerja pasar keuangan diperkirakan juga akan tetap meningkat didukung oleh kondisi ekonomi makro dan fundamental perusahaan yang kuat. Penerbitan obligasi dan IPO di pasar modal diperkirakan akan meningkat karena potensi imbal hasil investasi di Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan rata-rata imbal hasil global. Peningkatan pembiayaan ekonomi yang berasal dari perusahaan pembiayaan diperkirakan akan tetap tumbuh. Sementara dari sisi investor, meningkatnya peran serta investor institusional seperti dana pensiun, asuransi, reksadana dan investor asing diperkirakan akan siap menyerap peningkatan penerbitan efek di pasar modal.

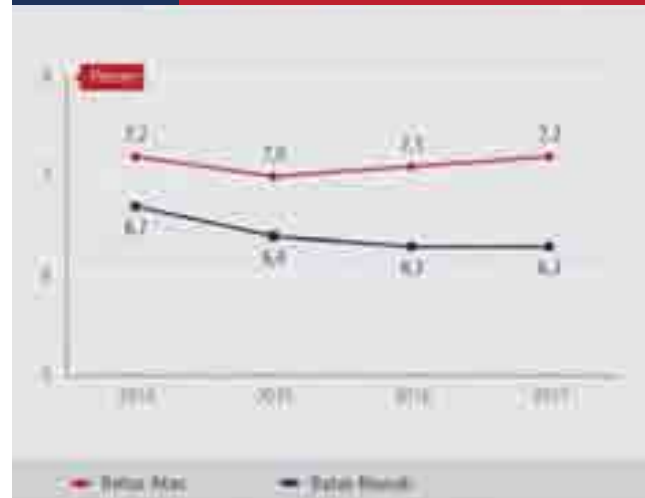
12.2 Prospek Perekonomian Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat melaju pada suatu lintasan yang meningkat secara bertahap di atas rata-ratanya yang hanya sekitar 6% pada lima tahun sebelumnya (tahun 2007-2012). Dengan suatu prakondisi bahwa tersedia lingkungan perekonomian domestik yang tepat bagi berkembangnya sektor-sektor industri yang semakin berdaya saing dan berperan di pasar global dan domestik, maka lambat laun perekonomian Indonesia dapat melaju berkesinambungan pada rata-rata yang lebih tinggi dan mencapai 7% atau lebih dalam jangka menengah (Grafik 12.8).

Dalam jangka menengah, aktivitas produksi domestik diperkirakan dapat lebih kuat dengan ditopang antara lain oleh prakiraan bahwa pemulihan kondisi perekonomian global dapat berjalan lebih baik. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan pulih secara lebih konsisten, walaupun di Kawasan Eropa masih agak lambat. Sementara itu perekonomian di negara-negara berkembang di Asia diperkirakan akan terus melanjutkan dinamikanya yang positif, seiring dengan semakin banyaknya negara-negara di Asia

Grafik 12.8

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah



yang masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah (*middle income country*). Aktivitas ekspor Indonesia, baik komoditas primer berbasis sumber daya alam, maupun barang-barang manufaktur, akan mendapat imbas positif dari berlanjutnya pemulihan ekonomi dunia. Sementara itu, khusus untuk tahun 2013 dan 2014, perekonomian domestik diperkirakan akan mendapat tambahan daya dorong, walaupun hanya sementara sifatnya, dari kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Apabila kondisi keamanan kondusif, berbagai aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya diperkirakan akan mendorong kegiatan usaha melalui permintaan terhadap barang manufaktur dan jasa swasta.

Selain didukung oleh kondisi global yang diperkirakan secara umum akan lebih baik dalam lima tahun mendatang, meningkatnya aktivitas perekonomian domestik dalam jangka menengah juga diperkirakan akan mendapat dukungan positif dari implementasi program-program pembangunan ekonomi yang diasumsikan akan semakin menguat. Penguatan tersebut terjadi melalui implementasi program-program yang telah dicanangkan sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, serta penguatannya melalui kerangka kebijakan MP3EI dan pada waktunya

nanti dari program-program yang terkait dengan RPJMN 2015 – 2019. Implementasi dari program-program pembangunan di berbagai bidang ekonomi tersebut merupakan prakondisi bagi terwujudnya suatu lingkungan perekonomian yang dapat menjadi landasan bagi perekonomian nasional yang semakin maju, berdaya saing dan menyejahterakan.

Terkait dengan itu, aktivitas investasi oleh Pemerintah dalam rangka penguatan konektivitas domestik, termasuk penguatan infrastruktur transportasi di perkotaan diasumsikan akan terus menguat. Dengan semangat membangun konektivitas antarkoridor ekonomi melalui program MP3EI, aktivitas pembangunan fisik, terutama sarana dan prasarana publik, diperkirakan akan meningkat untuk merealisasikan program yang telah dicanangkan. Dampak eksternalitas positif dari implementasi program-program tersebut diperkirakan dapat semakin dirasakan oleh pelaku ekonomi, melalui menurunnya biaya logistik dalam perekonomian, semakin lancar dan efisiennya aktivitas distribusi barang, dan semakin terbukanya akses daerah-daerah yang tertinggal ke pusat-pusat industri dan perdagangan. Dalam konteks ini pula, produktivitas dan daya saing pelaku usaha domestik baik di pasar global maupun dalam negeri diperkirakan akan menguat.

Sementara itu, implementasi RPJMN tahap II diasumsikan pula akan semakin menguat dan mencapai sasaran-sasaran yang telah dicanangkan sehingga keseluruhan prakondisi struktural bagi perekonomian yang semakin efisien dan berdaya saing dapat semakin kokoh. Diasumsikan pula bahwa penguatan lebih lanjut pada aspek pembangunan kualitas dan keandalan sumber daya manusia dan pembangunan kesiapan teknologi melalui program-program penguatan kapasitas inovasi yang bersinergi antara sektor industri, institusi-institusi pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan teknologi, dapat mencapai tujuannya. Dengan perbaikan tersebut, perekonomian domestik secara keseluruhan akan memiliki

kemampuan yang lebih kuat dalam menyerap teknologi dan berinovasi.

Dengan asumsi-asumsi di atas, pertumbuhan ekonomi diharapkan mulai beranjak naik secara bertahap dan berkesinambungan dalam kondisi ekonomi makro yang seimbang dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Kegiatan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun modal asing (PMA) diperkirakan akan terus meningkat dan membangun kapasitas perekonomian yang lebih tinggi dan lebih berdaya-saing. Penguatan konektivitas domestik, perbaikan kualitas modal manusia, penguatan kapasitas penyerapan teknologi, dan sinergi yang kuat antara kebijakan-kebijakan perindustrian, pendidikan, dan riset dan teknologi, yang terbentuk dari tercapainya program-program pembangunan yang terkait dengan itu, diperkirakan dapat secara bertahap mengubah postur daya saing sektor industri nasional. Kegiatan usaha di sektor manufaktur lambat laun akan semakin padat modal manusia, padat riset dan pengembangan, dan padat penyerapan teknologi, sehingga Indonesia lebih kompetitif di pasar global dan mampu bersaing di pasar domestik.

Aliran penanaman modal asing dari negara maju dengan tingkat teknologi yang semakin tinggi diperkirakan akan meningkat, sehingga memperkuat difusi teknologi dan ilmu pengetahuan dalam perekonomian. Secara keseluruhan, perekonomian tersebut diperkirakan akan lebih produktif dalam memasok keperluan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ekspansi kelas menengah yang tengah berlangsung di Indonesia dan di banyak negara berkembang di Asia saat ini (lihat Boks 3.1). Lebih dari itu, dengan lingkungan perekonomian yang lebih kondusif bagi berkembangnya perekonomian berbasis efisiensi dan kapasitas inovasi, Indonesia diperkirakan dapat menjadi salah satu pusat produksi (*production hub*) dalam rantai pasokan global, khususnya di Asia, yang memasok barang-barang manufaktur, baik barang modal antara, maupun konsumsi, untuk pemenuhan pasar

global dan domestik. Dalam konteks ini pula, postur transaksi berjalan dan neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhannya diprakirakan akan lebih kokoh dalam jangka menengah.

12.3 Tantangan dan Arah Kebijakan

Di tengah optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia mendatang, terdapat beberapa tantangan dan risiko yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakseimbangan eksternal.

Beberapa risiko utama dari sisi perekonomian global yaitu terbatasnya akses terhadap sumber daya finansial Eropa seiring dengan kerentanan yang masih terjadi di kawasan Eropa, proses negosiasi yang berkepanjangan antara pembuat kebijakan di AS terkait kebijakan fiskal, serta kemungkinan adanya dampak negatif dari pergerakan harga komoditas yang ekstrem. Tertahannya pemulihan ekonomi global akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap neraca pembayaran Indonesia, khususnya pada neraca transaksi berjalan.

Selain dari sisi global, terus meningkatnya konsumsi BBM di tengah produksi minyak yang menurun akan meningkatkan impor minyak. Hal itu akan meningkatkan tekanan defisit pada neraca transaksi berjalan. Di samping itu, meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi di atas kuota yang diasumsikan, akan semakin menambah beban subsidi dalam APBN. Kondisi tersebut dapat semakin membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggarannya sehingga dapat membahayakan kesinambungan fiskal. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan baik, dikhawatirkan dapat terbentuk sentimen negatif mengenai kesinambungan fiskal yang pada gilirannya dapat menekan nilai tukar rupiah.

Sejalan dengan perkiraan semakin meningkatnya pertumbuhan investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun berupa penanaman modal asing, serta aktivitas konsumsi yang terus meningkat, ketergantungan terhadap barang impor, khususnya barang modal dan bahan baku diprakirakan akan meningkatkan impor. Hal tersebut juga akan memberikan tekanan defisit terhadap neraca transaksi berjalan.

Dari sisi inflasi, risiko terutama berasal dari kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi dan distribusi bahan makanan. Selain itu, masih terdapat risiko terjadinya penyesuaian harga lebih lanjut terhadap barang-barang subsidi yang harganya masih cukup jauh dari harga keekonomiannya. Dari sektor perbankan, tantangan yang dihadapi berupa masih relatif tingginya inefisiensi dalam sektor perbankan dan perlunya perluasan akses masyarakat ke layanan jasa perbankan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Dari pasar valas, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong pendalaman pasar valuta asing.

Apabila risiko dan tantangan di atas tidak dikelola dengan baik, kestabilan ekonomi makro dapat terganggu dan menghambat keberlangsungan kinerja perekonomian yang telah dicapai sejauh ini. Bank Indonesia mengarahkan kebijakannya untuk mencapai sasaran inflasi dengan mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan sebagai berikut:

- Pertama, kebijakan moneter diarahkan agar suku bunga tetap mampu merespons pergerakan inflasi sesuai dengan sasaran.
- Kedua, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk stabilisasi nilai tukar agar pergerakan nilai tukar rupiah tersebut sesuai dengan kondisi

fundamentalnya. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak secara berlebihan, jauh dari kondisi fundamentalnya.

- Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal.
- Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi.
- Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah, dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta pementapan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Kebijakan tersebut juga akan dilengkapi oleh kebijakan-kebijakan lain di bidang mikroprudensial perbankan, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang. Di bidang perbankan, kebijakan difokuskan

pada tiga koridor utama yaitu (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi. Di dalam koridor kebijakan penguatan fungsi intermediasi, Bank Indonesia akan mendorong perluasan akses layanan perbankan secara nonkonvensional antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi, dan kerjasama keagenan (*branchless banking*) sehingga layanan perbankan diharapkan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat tanpa perlu menghadirkan fisik kantor bank. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan akan diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran serta kesetaraan akses dalam sistem pembayaran dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen. Di bidang pengelolaan uang, kebijakan diarahkan untuk ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kualitas uang, upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan rupiah, dan implementasi UU Mata Uang.

Lampiran



Peraturan Bank Indonesia Tahun 2012

No.	Peraturan	Tanggal	Perihal
1	14/1/PBI/2012	4 Januari 2012	Perubahan atas PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
2	14/2/PBI/2012	6 Januari 2012	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
3	14/3/PBI/2012	29 Maret 2012	Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.
4	14/4/PBI/2012	7 Juni 2012	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank.
5	14/5/PBI/2012	8 Juni 2012	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter.
6	14/6/PBI/2012	18 Juni 2012	Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7	14/7/PBI/2012	27 Juni 2012	Pengelolaan Uang Rupiah.
8	14/8/PBI/2012	13 Juli 2012	Kepemilikan Saham Bank Umum
9	14/9/PBI/2012	26 Juli 2012	Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Perkreditan Rakyat.
10	14/10/PBI/2012	8 Agustus 2012	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.
11	14/11/PBI/2012	28 Agustus 2012	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.
12	14/13/PBI/2012	16 Oktober 2012	Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank
13	14/14/PBI/2012	18 Oktober 2012	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
14	14/15/PBI/2012	24 Oktober 2012	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
15	14/16/PBI/2012	23 November 2012	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
16	14/17/PBI/2012	23 November 2012	Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)
17	14/18/PBI/2012	28 November 2012	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
18	14/19/PBI/2012	30 November 2012	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program
19	14/20/PBI/2012	17 Desember 2012	Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.
20	14/21/PBI/2012	21 Desember 2012	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
21	14/22/PBI/2012	21 Desember 2012	Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM
22	14/23/PBI/2012	26 Desember 2012	Transfer Dana
23	14/24/PBI/2012	26 Desember 2012	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
24	14/25/PBI/2012	27 Desember 2012	Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
25	14/26/PBI/2012	27 Desember 2012	Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
26	14/27/PBI/2012	28 Desember 2012	Penerapan Program APU PPT bagi Bank Umum

Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2012

Tanggal	Keterangan	Nomor Peraturan
Januari		
14	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Undang-Undang No.2 tahun 2012
30	Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012
Februari		
2	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2012.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012
15	Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 123/M-IND/PER/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2012
21	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Peraturan Pemerintah No. 24/2012
Maret		
14	Program Revitalisasi Industri Gula melalui Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/3/2012
15	Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012
31	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012	Undang-undang Nomor 4TAHUN2012
April		
3	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012
16	Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2012
30	Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, dan 2015.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.011/2012
Mei		
1	Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012
12	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012
16	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11/2012
16	Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
29	Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2012
Juni		
13	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2012.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012
13	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, dan/ atau Geotekstil untuk Tahun 2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomor.96/PMK.011/2012
13	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun 2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomor.102/PMK.011/2012
13	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun 2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomor.104/PMK.011/2012

13	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomor.107/PMK.011/2012
Juni		
13	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomor.110/PMK.011/2012
14	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2012
Juli		
10	Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA).	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012
10	Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012
12	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012
Agustus		
7	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan Presiden RI No. 71/2012
13	Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2012
14	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2012
24	Penyelenggaraan Waralaba	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012
September		
3	Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- daerah Tertentu	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012
4	Ketentuan Impor Garam	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012
19	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 /2012
21	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir (API)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012
21	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012
24	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012
Oktober		
8	Perubahan atas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.28/2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24/2012
22	Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012
29	Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012
November		
12	Tarif Cukai Hasil Tembakau.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012
13	Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas	Peraturan Presiden RI No. 95/2012
Desember		
5	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 193/PMK.011/2012
14	Ketentuan Ekspor Timah	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012
20	Sistem Informasi Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian No.77/Permentan/OT.140/12/2012
21	Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 30/2012

Daftar Tabel

Tabel 1	Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan
Tabel 2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)
Tabel 3	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)
Tabel 4	Perkembangan Upah Minimum Propinsi per Bulan
Tabel 5	Indeks Harga Konsumen Indonesia
Tabel 6	Angka Inflasi di 66 Kota
Tabel 7	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Tabel 8	Neraca Pembayaran Indonesia
Tabel 9	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 10	Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 11	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (F.o.B)
Tabel 12	Nilai Impor Barang Menurut Kelompok Barang
Tabel 13	Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif)
Tabel 14	Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif)
Tabel 15	Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif)
Tabel 16	Nilai Ekspor Minyak dan Gas (F.o.B)
Tabel 17	Uang Beredar
Tabel 18	Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Tabel 19	Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank
Tabel 20	Pasar Uang Antarbank di Jakarta (Rata-rata Volume Transaksi PUAB Pagi dan Sore Berbagai Tenor)
Tabel 21	Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Tabel 22	Penghimpunan Dana Oleh Bank Umum
Tabel 23	Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank
Tabel 24	Kredit Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi
Tabel 25	Kredit Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi
Tabel 26	Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Jakarta dan KKBI
Tabel 27	Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Jakarta dan KKBI
Tabel 28	Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Tabel 29	Inflasi Dunia
Tabel 30	Suku Bunga dan Nilai Tukar

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan
dalam Miliar Rupiah

Jenis Penggunaan	2007	2008	2009	2010	2011**	2012***
Harga Konstan ¹⁾						
Pengeluaran Konsumsi	1.284.157	1.360.488	1.444.905	1.504.742	1.572.637	1.647.483
Rumah Tangga	1.130.847	1.191.191	1.249.070	1.308.273	1.369.881	1.442.193
Pemerintah	153.310	169.297	195.834	196.469	202.756	205.290
Pembentukan modal tetap domestik bruto	441.362	493.822	510.086	553.348	601.891	660.942
Perubahan stok	-243	2.170	-2.065	-604	9.033	53.228
Diskrepansi statistik	54.187	27.040	2.205	13.823	2.184	15.662
Ekspor barang dan jasa	942.431	1.032.278	932.249	1.074.569	1.221.229	1.245.781
Dikurangi Impor barang dan jasa	757.566	833.342	708.529	831.418	942.297	1.004.958
Produk Domestik Bruto	1.964.327	2.082.456	2.178.850	2.314.459	2.464.677	2.618.139
Pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi	-120.564	-96.596	-109.819	-92.992	-96.459	-100.656
Produk Nasional Bruto	1.843.764	1.985.861	2.069.031	2.221.467	2.368.218	2.517.483
dikurangi Pajak tidak langsung neto	56.398	45.381	83.422	81.054	42.980	40.384
dikurangi Penyusutan	98.216	104.123	108.943	115.723	123.234	130.907
Pendapatan Nasional	1.689.149	1.836.356	1.876.667	2.024.690	2.202.004	2.346.193
Harga Berlaku						
Pengeluaran Konsumsi	2.840.264	3.416.824	3.828.585	4.230.708	4.721.946	5.228.718
Rumah Tangga	2.510.504	2.999.957	3.290.996	3.643.425	4.053.364	4.496.373
Pemerintah	329.760	416.867	537.589	587.283	668.583	732.345
Pembentukan modal tetap domestik bruto	985.627	1.370.717	1.744.357	2.064.994	2.372.766	2.733.180
Perubahan stok	-1.053	5.822	-7.264	18.364	70.774	178.190
Diskrepansi statistik	-33.647	103.109	-116.791	24.732	152.544	229.940
Ekspor barang dan jasa	1.162.974	1.475.119	1.354.409	1.584.674	1.955.821	1.999.380
Dikurangi Impor barang dan jasa	1.003.271	1.422.902	1.197.093	1.476.620	1.851.070	2.127.545
Produk Domestik Bruto	3.950.893	4.948.688	5.606.203	6.446.852	7.422.781	8.241.864
Pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi	-162.485	-175.865	-196.220	-180.969	-211.689	-239.186
Produk Nasional Bruto	3.788.409	4.772.823	5.409.984	6.255.302	7.211.092	8.002.678
dikurangi Pajak tidak langsung neto	112.189	104.045	214.833	225.194	179.725	46.436
dikurangi Penyusutan	197.545	247.434	280.310	321.814	371.139	412.093
Pendapatan Nasional	3.478.675	4.421.344	4.914.841	5.708.295	6.660.228	7.544.148
Memorandum Item:						
Produk Domestik Bruto per Kapita ²⁾						
dalam ribuan Rupiah	17.365	21.431	23.914	26.800	30.400	33.300
dalam Dolar AS	1.922	2.245	2.350	2.977	3.498	3.563
Produk Nasional Bruto per Kapita ²⁾						
dalam ribuan Rupiah	16.651	20.669	23.077	26.000	29.601	32.400
dalam Dolar AS	1.843	2.165	2.268	2.930	3.399	3.459

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2000 menggunakan tahun dasar 2000=100

²⁾ Perhitungan menggunakan harga berlaku

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)¹⁾
dalam Miliar Rupiah

Lapangan Usaha	Harga Konstan					
	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	271.509	284.619	295.884	304.737	313.728	327.600,0
Tanaman bahan makanan	133.889	142.000	149.058	151.501	153.409	158.695
Tanaman perkebunan	43.199	44.784	45.558	47.110	48.964	51.763
Peternakan	34.221	35.425	36.649	38.214	39.929	41.972
Kehutanan	16.548	16.543	16.844	17.250	17.362	17.423
Perikanan	43.653	45.866	47.775	50.662	54.064	57.697
Pertambangan dan penggalian	171.278	172.496	180.201	186.635	189.179	192.600
Minyak dan gas bumi	94.747	95.168	95.230	95.628	94.682	91.691
Pertambangan tanpa migas	58.151	57.569	63.820	68.482	70.280	74.836
Penggalian	18.381	19.760	21.150	22.525	24.218	26.058
Industri pengolahan	538.085	557.764	570.103	597.135	634.247	670.100
Industri migas	47.823	47.663	46.935	47.199	46.767	45.492
Pengilangan minyak bumi	20.781	20.972	21.084	21.347	21.361	21.088
Gas alam cair	27.042	26.691	25.851	25.853	25.406	24.404
Industri tanpa migas	490.262	510.102	523.168	549.936	587.480	624.617
Makanan, minuman dan tembakau	136.722	139.922	155.620	159.947	174.644	188.082
Tekstil barang kulit dan alas kaki	52.923	50.994	51.300	52.206	56.131	58.484
Barang kayu dan hasil hutan lainnya	19.658	20.336	20.055	19.360	19.427	18.887
Kertas dan barang cetakan	25.861	25.477	27.092	27.545	27.957	26.460
Kimia dan barang dari karet	65.470	68.390	69.514	72.782	75.658	83.412
Semen & barang galian bukan logam	16.233	15.991	15.909	16.256	17.424	18.792
Logam dasar besi dan baja	8.213	8.045	7.702	7.886	8.915	9.491
Alat angkutan, mesin & peralatannya	161.376	177.178	172.085	189.948	203.244	216.970
Barang lainnya	3.806	3.770	3.890	4.007	4.080	4.039
Listrik, gas, dan air bersih	13.517	14.994	17.137	18.050	18.921	20.100
Bangunan	121.809	131.010	140.268	150.022	160.090	17.200
Perdagangan, hotel, dan restoran	340.437	363.818	368.463	400.475	437.251	472.600
Perdagangan besar dan eceran	282.116	301.941	302.028	331.313	364.450	395.890
Hotel	13.646	14.262	15.201	16.231	17.696	19.297
Restoran	44.676	47.615	51.234	52.931	55.105	57.459
Pengangkutan dan komunikasi	142.327	165.906	192.199	217.977	241.285	265.400
Pengangkutan	72.791	74.787	79.572	85.290	91.797	97.874
Komunikasi	69.536	91.119	112.627	132.687	149.489	167.505
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	183.659	198.800	209.163	221.024	236.077	253.000
Bank	78.241	84.040	86.058	90.168	96.393	104.391
Lembaga keuangan tanpa bank	15.150	16.518	18.148	19.334	20.730	22.223
Jasa penunjang keuangan	1.331	1.376	1.425	1.509	1.628	1.730
Sewa bangunan	55.819	60.775	63.958	67.497	71.705	76.100
Jasa perusahaan	33.118	36.090	39.576	42.517	45.621	48.579
Jasa-jasa	181.706	193.049	205.434	217.782	232.465	244.700
Pemerintahan umum	80.778	84.378	88.683	92.743	97.726	99.563
Swasta	100.928	108.671	116.751	125.040	134.739	145.157
Produk Domestik Bruto	1.964.327	2.082.456	2.178.850	2.313.838	2.463.242	2.618.139
Nonmigas	1.821.758	1.939.626	2.036.686	2.171.010	2.321.793	2.480.956
Migas	142.570	142.830	142.165	142.828	141.449	137.183

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2000 menggunakan tahun dasar 2000=100

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku					
	2007	2008	2009	2010*	2011**	2012**
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	541.932	716.656	857.197	985.444	1.091.447	1.190.412
Tanaman bahan makanan	265.091	349.795	419.195	482.378	529.968	574.330
Tanaman perkebunan	81.664	105.961	111.379	136.022	153.709	159.754
Peternakan	61.325	83.276	104.884	119.372	129.298	146.090
Kehutanan	36.154	40.375	45.120	48.290	51.781	54.907
Perikanan	97.697	137.250	176.620	199.384	226.691	255.332
Pertambangan dan penggalian	440.610	541.334	592.061	717.740	879.505	970.600
Minyak dan gas bumi	234.162	283.283	254.948	288.495	371.823	382.697
Pertambangan tanpa migas	160.267	195.286	254.243	332.971	398.550	464.012
Penggalian	46.180	62.765	82.870	96.273	109.132	123.890
Industri pengolahan	1.068.654	1.376.442	1.477.542	1.596.601	1.806.141	1.972.847
Industri migas	182.324	237.772	209.841	211.960	253.079	254.408
Pengilangan minyak bumi	122.118	145.943	129.456	122.811	131.482	130.123
Gas alam cair	60.206	91.829	80.385	89.149	121.596	124.285
Industri tanpa migas	886.330	1.138.670	1.267.700	1.384.640	1.553.062	1.718.439
Makanan, minuman dan tembakau	264.101	346.186	420.363	465.369	546.752	624.371
Tekstil barang kulit dan alas kaki	93.598	104.830	116.547	124.204	143.385	156.493
Barang kayu dan hasil hutan lainnya	54.881	73.196	80.198	80.542	84.481	85.802
Kertas dan barang cetakan	45.403	51.912	61.155	65.822	69.340	66.771
Kimia dan barang dari karet	110.770	154.117	162.879	176.213	189.700	216.383
Semen & barang galian bukan logam	32.814	40.179	43.531	45.515	50.791	58.018
Logam dasar besi dan baja	22.908	29.213	26.807	26.854	31.101	33.477
Alat angkutan, mesin & peralatannya	254.278	329.912	346.403	389.600	426.899	465.538
Barang lainnya	7.577	9.126	9.818	10.525	11.278	11.588
Listrik, gas, dan air bersih	34.724	40.889	46.680	49.119	56.789	65.125
Bangunan	304.997	419.712	555.193	660.891	754.484	860.965
Perdagangan, hotel, dan restoran	592.304	691.488	744.514	882.487	1.024.009	1.145.601
Perdagangan besar dan eceran	468.734	551.344	586.112	703.566	827.924	927.057
Hotel	17.320	18.900	20.782	23.876	26.377	31.776
Restoran	106.249	121.244	137.620	155.045	169.708	186.769
Pengangkutan dan komunikasi	264.263	312.190	353.740	423.172	491.283	549.115
Pengangkutan	149.974	171.247	182.908	217.318	254.520	287.356
Komunikasi	114.290	140.943	170.832	205.854	236.814	261.759
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	305.214	368.130	405.162	466.564	535.153	598.523
Bank	105.537	125.515	132.186	146.915	166.490	191.095
Lembaga keuangan tanpa bank	32.582	41.753	49.220	59.201	70.576	79.897
Jasa penunjang keuangan	2.490	2.807	3.001	3.481	4.076	4.583
Sewa bangunan	110.240	132.024	145.261	168.221	191.929	209.522
Jasa perusahaan	54.365	66.030	75.494	88.746	102.082	113.428
Jasa-jasa	398.197	481.848	574.117	657.292	783.971	888.677
Pemerintahan umum	205.344	257.548	318.581	356.768	432.785	485.536
Swasta	192.853	224.301	255.536	300.525	351.185	403.141
Produk Domestik Bruto	3.950.893	4.948.688	5.606.203	6.439.307	7.422.781	8.241.864
Nonmigas	3.534.407	4.427.634	5.141.414	5.938.851	6.797.879	7.604.759
Migas	416.487	521.055	464.789	500.456	624.902	637.106

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4. Perkembangan Upah Minimum Provinsi per Bulan

dalam Rupiah

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nanggroe Aceh Darussalam	850.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
Sumatera Utara	761.000	822.205	905.000	965.000	1.035.500	1.200.000
Sumatera Barat	650.000	800.000	880.000	940.000	1.055.000	1.150.000
Riau	710.000	800.000	901.650	1.016.000	1.120.000	1.238.000
Kepulauan Riau	805.000	833.000	892.000	925.000	975.000	1.015.000
Jambi	658.000	724.000	800.000	900.000	1.028.000	1.142.000
Sumatera Selatan	753.000	743.000	824.730	927.825	1.048.440	1.195.220
Bangka Belitung	830.000	813.000	850.000	910.000	1.024.000	1.110.000
Bengkulu	516.000	683.528	727.950	780.000	815.000	930.000
Lampung	555.000	617.000	691.000	767.500	855.000	975.000
Banten	661.613	837.000	917.500	955.300	1.000.000	1.042.000
DKI Jakarta	816.100	972.604	1.069.865	1.118.009	1.290.000	1.529.150
Jawa Barat	447.654	568.193	628.191	671.500	732.000	780.000 ¹⁾
Jawa Tengah	500.000	547.000	575.000	660.000	675.000	720.000 ²⁾
D.I. Yogyakarta	460.000	586.000	700.000	745.694	808.000	892.660
Jawa Timur	448.500	500.000	570.000	630.000	705.000	745.000 ³⁾
Bali	622.000	682.650	760.000	829.316	890.000	967.500
Nusa Tenggara Barat	550.000	730.000	832.500	890.775	950.000	1.000.000
Nusa Tenggara Timur	600.000	650.000	725.000	800.000	850.000	925.000
Timor Timur	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Barat	560.000	645.000	705.000	741.000	802.500	900.000
Kalimantan Tengah	665.973	765.868	873.089	986.500	1.134.580	1.327.459
Kalimantan Selatan	745.000	825.000	930.000	1.024.500	1.126.000	1.225.000
Kalimantan Timur	766.500	815.000	955.000	1.002.000	1.084.000	1.177.000
Sulawesi Utara	750.000	845.000	929.500	1.000.000	1.080.000	1.250.000
Sulawesi Tengah	615.000	670.000	720.000	777.500	827.500	885.000
Sulawesi Selatan	673.200	740.520	905.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Sulawesi Tenggara	640.000	700.000	770.000	860.000	930.000	1.032.300
Sulawesi Barat	691.464	760.500	909.400	944.200	1.006.000	1.127.000
Maluku	635.000	700.000	775.000	840.000	900.000	975.000
Maluku Utara	660.000	700.000	770.000	n.a.	889.350	960.498
Gorontalo	560.000	600.000	675.000	710.000	762.500	837.500
Papua	987.000	1.105.500	1.216.100	1.316.500	1.403.000	1,515,000 ⁴⁾
Papua Barat	n.a.	1.105.500	1.180.000	1.210.000	1.410.000	1.450.000

- Sumber : Kemenakertrans, Direktorat Pengupahan & Jamsostek - Ditjen PHI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER-01/MEN/1999 tahun 1999, setiap awal tahun Upah Minimum Regional Tingkat I atau Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur

berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah masing-masing provinsi

- Penjelasan "n.a", yaitu : Provinsi Timtim keluar dari NKRI, Provinsi belum terbentuk, Provinsi Maluku Utara tidak menetapkan UMP

- na : data tidak tersedia

¹⁾ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur no.561/Kep.1540-Bangsos/2011, UMP Provinsi Jawa Barat mengacu kepada UMK Kab.Banjars sebesar Rp 780.000,-

²⁾ Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah no.561.4/73/2011, UMP Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada UMK Kab.Cilacap sebesar Rp 720.000,-

³⁾ Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur no.81 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012, mengacu kepada UMK Kab.Ponorogo sebesar Rp745.000,-

⁴⁾ UMP Provinsi Papua masih dalam proses persetujuan Gubernur Papua

Tabel 5. Indeks Harga Konsumen Indonesia

Akhir Periode ¹⁾	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transpor dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
2007 ²⁾	159,01	148,90	155,58	140,41	132,51	160,74	169,15	155,50	6,59
2008 ³⁾	122,70	114,98	113,02	112,27	109,13	109,84	107,26	113,86	11,06
2009	127,46	123,96	115,09	119,01	113,38	114,11	103,32	117,03	0,33
2010									6,96
Januari	129,66	126,35	115,48	118,77	113,55	114,22	103,49	118,01	0,84
Februari	130,78	126,85	115,71	118,21	113,76	114,30	103,60	118,36	0,30
Maret	129,59	127,21	115,86	118,22	114,04	114,32	103,67	118,19	-0,14
April	130,02	127,52	115,98	118,38	114,23	114,33	103,71	118,37	0,15
Mei	130,66	127,95	116,09	119,79	114,35	114,35	103,73	118,71	0,29
Juni	134,84	128,48	116,36	120,91	114,42	114,42	103,89	119,86	0,97
Juli	141,17	129,32	116,66	120,80	114,73	115,40	105,46	121,74	1,57
Agustus	141,83	130,19	118,51	120,87	115,04	116,86	105,84	122,67	0,76
September	142,46	130,87	118,81	122,18	115,30	117,16	106,44	123,21	0,44
Oktober	141,25	131,50	119,24	124,29	115,58	117,68	105,83	123,29	0,06
November	143,36	132,11	119,54	125,40	115,68	117,78	105,84	124,03	0,60
Desember	147,39	132,59	119,79	126,76	115,86	117,86	106,10	125,17	0,92
2011									3,79
Januari	150,64	133,24	120,37	126,95	116,41	118,36	106,43	126,29	0,89
Februari	150,14	133,86	120,85	126,85	117,21	118,51	106,59	126,46	0,13
Maret	147,22	134,29	121,20	127,33	117,65	118,71	106,68	126,05	-0,32
April	144,42	134,56	121,46	128,28	118,10	118,80	106,75	125,66	-0,31
Mei	144,01	134,86	121,76	129,10	118,69	118,83	106,90	125,81	0,12
Juni	145,84	135,41	122,13	129,84	119,18	119,04	107,06	126,50	0,55
Juli	148,52	135,98	122,36	130,65	119,50	120,20	107,24	127,35	0,67
Agustus	150,11	136,60	122,76	134,66	119,81	122,77	108,10	128,54	0,93
September	149,97	137,25	123,08	135,96	120,07	123,43	108,29	128,89	0,27
Oktober	149,45	137,61	123,33	134,25	120,38	123,80	107,85	128,74	-0,12
November	150,33	137,88	123,60	136,08	120,58	123,85	107,99	129,18	0,34
Desember	152,76	138,57	123,95	136,35	120,79	123,94	108,14	129,91	0,57
2012									4,29
Januari	155,59	139,47	124,62	136,24	121,40	124,12	108,39	130,90	0,76
Februari	154,45	139,95	124,96	137,90	121,58	124,22	108,46	130,96	0,05
Maret	153,94	140,59	125,21	138,11	121,77	124,31	108,57	131,05	0,07
April	154,13	141,46	125,51	137,48	122,05	124,39	108,80	131,32	0,21
Mei	153,90	142,03	125,74	137,18	122,27	124,41	108,88	131,41	0,07
Juni	156,32	142,71	126,19	137,71	122,53	124,55	108,91	132,23	0,62
Juli	158,94	143,98	126,39	137,96	123,04	125,25	109,25	133,16	0,70
Agustus	161,29	144,94	126,72	139,14	123,34	127,38	110,89	134,43	0,95
September	159,80	145,76	127,16	141,19	123,51	128,74	110,00	134,45	0,01
Oktober	159,12	146,32	127,69	142,52	123,82	129,01	109,98	134,67	0,16
November	158,91	146,61	127,88	142,38	124,08	129,09	110,23	134,76	0,07
Desember	161,44	147,04	128,10	142,72	124,30	129,16	110,52	135,49	0,54

¹⁾ Angka tahunan adalah angka akhir periode yang bersangkutan

²⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

³⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 6. Angka Inflasi di 66 Kota

Persen, yoy

Kota	2007 ¹⁾	2008	2009	2010	2011	2012	Propinsi	2007 ¹⁾	2008	2009	2010	2011	2012
Lhokseumawe	4,18	13,78	3,96	7,19	3,55	0,32	Palangkaraya	7,96	11,65	1,39	9,49	5,28	1,61
Banda Aceh	11,00	10,27	3,50	4,64	3,32	0,66	Banjarmasin	7,78	11,62	3,86	9,06	3,98	0,85
Padang Sidempuan	5,87	12,34	1,87	7,42	4,66	0,54	Balikpapan	7,27	11,30	3,60	7,38	6,45	0,96
Sibolga	7,13	12,36	1,59	11,83	3,71	0,76	Samarinda	9,18	12,69	4,06	7,00	6,23	0,42
Pematang Siantar	8,37	10,16	2,72	9,68	4,25	1,12	Manado	10,13	9,71	2,31	6,28	0,67	0,10
Medan	6,42	10,63	2,69	7,65	3,54	0,48	Palu	8,13	10,40	5,73	6,40	4,47	1,69
Padang	6,90	12,68	2,05	7,84	5,37	0,94	Makassar	5,71	11,79	3,24	6,82	2,87	0,63
Pekanbaru	7,53	9,02	1,94	7,00	5,09	0,41	Kendari	7,53	15,28	4,60	3,87	5,09	0,02
Batam	4,84	8,39	1,88	7,40	3,76	0,65	Gorontalo	7,02	9,20	4,35	7,43	4,08	0,54
Jambi	7,42	11,57	2,49	10,52	2,76	0,62	Ternate	10,43	11,25	3,88	5,32	4,52	0,77
Palembang	8,21	11,15	1,85	6,02	3,78	0,32	Ambon	5,85	9,34	6,48	8,78	2,85	0,94
Bengkulu	5,00	13,44	2,88	9,08	3,96	0,57	Jayapura	10,35	12,5	1,92	4,48	3,40	2,57
Bandar Lampung	6,58	14,82	4,18	9,95	4,24	0,66	Dumai	na	14,30	0,80	9,05	3,09	1,13
Pangkal Pinang	2,64	18,40	2,17	9,36	5,00	0,92	Tanjung Pinang	na	11,90	1,43	6,17	3,32	1,03
Jakarta	6,04	11,11	2,34	6,21	3,97	0,56	Bogor	na	14,20	2,16	6,57	2,85	0,16
Tasikmalaya	7,72	12,07	4,17	5,56	4,17	0,22	Sukabumi	na	11,39	3,49	5,43	4,26	0,20
Serang/Celegon	6,31	13,91	4,57	6,18	2,78	0,67	Bekasi	na	10,10	1,93	7,88	3,45	0,52
Bandung	5,25	10,23	2,11	4,53	2,75	0,19	Depok	na	11,70	1,30	7,97	2,95	0,40
Cirebon	7,87	14,14	4,11	6,70	3,20	0,24	Sumenep	na	10,20	2,73	6,75	4,18	0,46
Purwokerto	6,15	12,06	2,83	6,04	3,40	0,53	Probolinggo	na	10,89	3,55	6,68	3,78	0,49
Surakarta	3,28	6,96	2,63	6,65	1,93	0,30	Madiun	na	13,27	3,40	6,54	3,49	0,34
Semarang	6,75	10,34	3,19	7,11	2,87	0,41	Tangerang	na	10,75	2,49	6,08	3,78	0,29
Tegal	8,89	8,52	5,83	6,73	2,58	0,40	Cilegon	na	12,96	3,11	6,12	2,35	0,52
Yogyakarta	7,99	9,88	2,93	7,38	3,88	0,66	Bima	na	14,36	4,09	6,35	7,19	0,54
Jember	7,25	10,63	3,66	7,09	2,43	0,78	Maumere	na	16,17	5,22	8,48	6,59	0,86
Kediri	6,85	9,52	3,60	6,80	3,62	0,37	Singkawang	na	12,66	1,15	7,10	6,72	0,62
Malang	5,93	10,49	3,39	6,70	4,05	0,70	Tarakan	na	19,85	7,21	7,92	6,43	1,14
Surabaya	6,27	8,73	3,39	7,33	4,72	0,52	Watampone	na	14,22	6,84	6,74	3,94	0,30
Denpasar	5,91	9,25	4,37	8,10	3,75	0,58	Pare-pare	na	13,34	1,40	5,79	1,60	0,40
Mataram	8,76	13,01	3,14	11,07	6,38	0,46	Palopo	na	17,58	4,18	3,99	3,35	0,44
Kupang	8,44	10,90	6,49	9,97	4,32	1,54	Mamuju	na	11,66	1,78	5,12	4,91	0,43
Pontianak	8,56	11,19	4,91	8,52	4,91	1,08	Manokwari	na	20,51	7,52	4,68	3,64	1,89
Sampit	7,57	8,89	2,85	9,53	3,60	0,98	Sorong	na	19,56	2,61	8,13	0,90	0,61
Inflasi Nasional	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	4,29							

Keterangan:

¹⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok²⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

na: data tidak tersedia

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 7. Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia ¹⁾

Kelompok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Perubahan 2012 terhadap 2011 (%)
Pertanian	214,0	275,0	208,8	231,4	248,8	263,0	5,7
Pertambangan dan penggalian	187,0	223,0	206,5	212,3	221,5	231,1	4,3
Industri	218,0	273,0	164,8	172,0	180,3	187,3	3,9
Impor	186,0	235,0	156,6	160,8	177,4	188,7	6,4
Ekspor	167,0	209,0	134,1	138,0	154,1	163,2	5,9
Migas	241,0	345,0	108,2	124,5	173,1	153,2	-11,5
Nonmigas	143,0	166,0	142,4	142,0	148,0	194,	31,4
Indeks Umum	195,0	246,0	162,7	170,6	183,3	192,5	5,0

Keterangan:

¹⁾ dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2000=100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 8. Neraca Pembayaran Indonesia

dalam Juta Dolar AS

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011				2011	2012				2012
					Q1	Q2	Q3	Q4		Q1*	Q2*	Q3*	Q4**	
I. Transaksi Berjalan	10.491	126	10.628	5.144	2.947	273	766	-2.301	1.685	-3.105	-7.979	-5.336	-7.763	-24.183
A. Barang ¹⁾	32.753	22.916	30.932	30.627	9.264	9.223	9.700	6.596	34.783	3.810	818	3.198	591	8.417
- Ekspor	118.014	139.606	119.646	158.074	45.901	51.810	52.376	50.701	200.788	48.353	47.538	45.549	46.706	188.146
- Impor	-85.261	-116.690	-88.714	-127.447	-36.637	-42.587	-42.676	-44.105	-166.005	-44.543	-46.720	-42.351	-46.115	-179.729
1. Nonmigas	27.084	15.130	25.560	27.395	8.899	10.622	9.291	6.621	35.433	4.694	1.974	3.968	2.899	13.535
a. Ekspor	93.142	107.885	99.030	129.416	37.092	42.307	42.168	41.153	162.721	38.572	38.433	37.418	38.151	152.575
b. Impor	-66.058	-92.755	-73.470	-102.021	-28.193	-31.685	-32.877	-34.532	-127.288	-33.878	-36.460	-33.450	-35.252	-139.040
2. Minyak	-6.676	-8.362	-4.016	-8.653	-3.214	-5.751	-4.312	-4.249	-17.526	-5.278	-5.331	-4.213	-5.493	-20.315
a. Ekspor	12.496	15.387	10.790	15.691	4.855	4.845	4.929	4.947	19.576	4.592	4.332	4.222	4.744	17.891
b. Impor	-19.172	-23.749	-14.806	-24.344	-8.069	-10.596	-9.242	-9.196	-37.102	-9.870	-9.664	-8.435	-10.237	-38.206
3. Gas	12.345	16.147	9.388	11.886	3.579	4.352	4.721	4.224	16.876	4.394	4.176	3.443	3.185	15.197
a. Ekspor	12.376	16.333	9.826	12.968	3.954	4.658	5.278	4.601	18.491	5.189	4.772	3.909	3.810	17.680
b. Impor	-31	-186	-438	-1.082	-375	-306	-557	-377	-1.615	-795	-597	-466	-625	-2.483
B. Jasa- jasa	-11.841	-12.998	-9.741	-9.324	-1.822	-3.133	-2.562	-3.115	-10.632	-2.075	-2.893	-2.480	-3.322	-10.770
1. Ekspor	12.487	15.247	13.155	16.766	4.482	4.528	5.389	6.292	20.690	5.833	5.768	5.460	6.081	23.143
2. Impor	-24.328	-28.245	-22.896	-26.089	-6.304	-7.661	-7.951	-9.407	-31.323	-7.908	-8.661	-7.941	-9.403	-33.912
C. Pendapatan, neto	-15.525	-15.155	-15.140	-20.790	-5.525	-6.776	-7.416	-6.959	-26.676	-5.898	-6.801	-6.915	-6.225	-25.839
1. Penerimaan	3.469	3.592	1.921	1.890	580	637	659	641	2.517	767	652	583	625	2.627
2. Pembayaran	-18.994	-18.747	-17.061	-22.680	-6.105	-7.412	-8.075	-7.600	-29.192	-6.665	-7.454	-7.498	-6.850	-28.466
D. Transfer berjalan, neto	5.104	5.364	4.578	4.630	1.029	960	1.045	1.176	4.211	1.058	898	861	1.193	4.009
1. Penerimaan	6.801	7.352	7.241	7.571	1.830	1.841	1.908	2.057	7.636	1.936	1.882	1.964	2.199	7.981
2. Pembayaran	-1.697	-1.989	-2.663	-2.941	-800	-881	-863	-881	-3.425	-879	-984	-1.102	-1.007	-3.972
II. Transaksi Modal & Finansial	3.592	-1.832	4.852	26.620	4.835	11.626	-3.110	216	13.567	2.256	5.225	6.015	11.415	24.911
A. Transaksi Modal	547	294	96	50	1	4	5	23	33	6	3	8	22	37
B. Transaksi Finansial ²⁾	3.045	-2.126	4.756	26.571	4.834	11.622	-3.115	193	13.534	2.250	5.222	6.007	11.393	24.873
- Aset	-13.576	-17.949	-14.395	-6.901	-3.360	-731	-4.515	-7.051	-15.657	-6.752	-2.550	-2.224	-4.237	-15.763
- Kewajiban	16.621	15.823	19.151	33.471	8.194	12.353	1.400	7.244	29.191	9.002	7.772	8.231	15.631	40.637
1. Investasi Langsung	2.253	3.419	2.628	11.106	3.782	2.507	2.119	3.120	11.528	1.586	4.020	4.289	4.535	14.430
a. Ke luar negeri	-4.675	-5.900	-2.249	-2.664	-1.529	-2.526	-1.350	-2.307	-7.713	-2.932	452	-1.674	-1.268	-5.423
b. Di Indonesia (PMA)	6.928	9.318	4.877	13.771	5.311	5.034	3.469	5.428	19.241	4.518	3.568	5.964	5.803	19.853
2. Investasi Portofolio	5.567	1.764	10.336	13.202	2.920	5.213	-4.571	245	3.806	2.628	3.872	2.516	180	9.196
a. Aset	-4.415	-1.294	-144	-2.511	-829	-508	91	57	-1.189	-457	-186	31	-4.852	-5.465
b. Kewajiban	9.982	3.059	10.480	15.713	3.749	5.721	-4.662	188	4.996	3.085	4.058	2.485	5.032	14.661
1. Sektor Publik	5.271	3.361	9.578	13.526	4.383	2.964	-4.270	-2.250	827	1.304	1.626	1.889	4.431	9.251
2. Sektor Swasta	4.711	-303	902	2.187	-634	2.757	-391	2.438	4.169	1.781	2.432	596	601	5.410
3. Investasi Lainnya	-4.775	-7.309	-8.208	2.262	-1.868	3.902	-663	-3.172	-1.801	-1.963	-2.670	-798	6.679	1.248
a. Aset	-4.486	-10.755	-12.002	-1.725	-1.002	2.303	-3.255	-4.800	-6.755	-3.363	-2.816	-580	1.883	-4.876
b. Kewajiban	-289	3.446	3.794	3.987	-865	1.599	2.592	1.628	4.954	1.400	146	-218	4.795	6.123
1. Sektor Publik	-2.363	-1.436	1.526	1.756	95	-1.402	-712	-240	-2.258	-220	-1.638	-296	4.608	2.454
2. Sektor Swasta	2.074	4.882	2.268	2.231	-961	3.000	3.304	1.868	7.212	1.620	1.783	79	187	3.669
III. Total (I+II)	14.083	-1.706	15.481	31.765	7.781	11.899	-2.344	-2.085	15.252	-850	-2.754	679	3.652	728
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-1.368	-238	-2.975	-1.480	-115	-23	-1.616	-1.641	-3.395	-184	-57	155	-476	-563
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	12.715	-1.945	12.506	30.285	7.666	11.876	-3.960	-3.726	11.857	-1.034	-2.811	834	3.176	165
VI. Cadangan Devisa yang terkait ³⁾	-12.715	1.945	-12.506	-30.285	-7.666	-11.876	3.960	3.726	-11.857	1.034	2.811	-834	-3.176	-165
A. Transaksi Cadangan Devisa	-12.715	1.945	-12.506	-30.285	-7.666	-11.876	3.960	3.726	-11.857	1.034	2.811	-834	-3.176	-165
B. Pinjaman IMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Penarikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Memorandum:														
- Posisi Cadangan Devisa	56.920	51.639	66.105	96.207	105.709	119.655	114.503	110.123	110.123	110.493	106.502	110.172	112.781	112.781
- Dalam Bulan Impor dan Pem- -bayaran Utang Luar Negeri - Pemerintah	6	4	7	7	8	8	7	6	7	6	6	6	6	6,1
- Transaksi Berjalan (% PDB)	2	0	2	1	2	0	0	-1	0	-1	-4	-2	-4	-2,8
- Rasio Pembayaran Utang (%)	18	17	21	20	18	22	20	25	21	30	37	35	40	35,3
a.I. Rasio Pembayaran Utang Pemerintah & Otoritas Moneter (%)	6	5	6	4	2	4	2	4	3	2	4	2	4	3,2

Keterangan:

¹⁾ dalam free on board (fob)²⁾ tidak termasuk cadangan defisa terkait³⁾ angka sementara^{**} angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 9. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾

dalam Ribu Dolar AS

Keterangan	2008		2009		2010		2011		2012**	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	4.666.805	4,33	4.347.116	4,39	4.991.385	3,86	5.145.979	3,16	5.584.172	3,66
Biji coklat	849.215	0,79	1.076.547	1,09	1.186.717	0,92	616.519	0,38	388.325	0,25
Udang	992.218	0,92	783.930	0,79	850.988	0,66	1.064.620	0,65	1.111.417	0,73
Biji kopi	990.077	0,92	822.731	0,83	812.001	0,63	1.030.339	0,63	1.241.923	0,81
Ikan dan lain-lain	742.197	0,69	641.651	0,65	804.456	0,62	970.634	0,60	1.106.560	0,73
Rempah-rempah	278.846	0,26	238.702	0,24	408.873	0,32	430.318	0,26	631.799	0,41
Teh	125.441	0,12	144.050	0,15	149.581	0,12	136.367	0,08	126.753	0,08
Bahan nabati	117.670	0,11	90.198	0,09	137.917	0,11	160.043	0,10	134.133	0,09
Buah-buahan	126.233	0,12	105.310	0,11	130.513	0,10	172.768	0,11	181.321	0,12
Tembakau	82.082	0,08	101.954	0,10	77.154	0,06	61.483	0,04	60.791	0,04
Sayur-sayuran	43.637	0,04	66.633	0,07	71.688	0,06	57.605	0,04	83.942	0,06
Damar dan getah damar	32.257	0,03	42.213	0,04	68.022	0,05	87.947	0,05	94.132	0,06
Karet alam	14.373	0,01	12.190	0,01	35.965	0,03	30.832	0,02	19.482	0,01
Hasil pertanian lainnya	272.560	0,25	221.006	0,22	257.511	0,20	326.502	0,20	403.594	0,26
Hasil industri	88.894.036	82,40	74.147.513	74,87	98.153.760	75,84	122.291.013	75,15	114.835.128	75,26
Minyak sawit	11.858.611	10,99	10.254.111	10,35	13.422.626	10,37	17.294.554	10,63	17.682.471	11,59
Tekstil dan produk tekstil	10.242.813	9,49	9.303.520	9,39	11.292.188	8,73	13.352.823	8,21	12.510.045	8,20
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	8.793.235	8,15	8.569.144	8,65	10.947.800	8,46	11.546.386	7,10	11.067.388	7,25
Produk logam dasar	9.920.126	9,20	7.173.329	7,24	9.876.620	7,63	11.853.787	7,28	9.189.467	6,02
Karet olahan	7.463.973	6,92	4.681.744	4,73	9.239.750	7,14	14.128.206	8,68	10.368.056	6,80
Kertas dan barang dari kertas	3.878.880	3,60	3.428.698	3,46	4.133.882	3,19	4.154.687	2,55	3.938.376	2,58
Makanan olahan	2.918.794	2,71	2.946.171	2,98	3.606.896	2,79	4.746.049	2,92	5.086.943	3,33
Bahan kimia	2.764.685	2,56	2.278.481	2,30	3.425.997	2,65	4.655.547	2,86	3.648.593	2,39
Produk kayu olahan	2.789.349	2,59	2.226.292	2,25	2.820.894	2,18	3.246.114	1,99	3.345.863	2,19
Alas kaki	1.932.046	1,79	1.758.707	1,78	2.509.432	1,94	3.293.133	2,02	3.518.256	2,31
Damar tiruan, bahan plastik	2.141.709	1,99	1.747.012	1,76	2.153.714	1,66	2.495.420	1,53	2.474.487	1,62
Furnitur	1.992.601	1,85	1.656.937	1,67	1.824.631	1,41	1.741.211	1,07	1.728.652	1,13
Kapal laut dan sejenisnya	1.143.279	1,06	1.443.112	1,46	1.442.683	1,11	1.380.680	0,85	397.399	0,26
Bahan kertas	1.422.499	1,32	858.782	0,87	1.442.108	1,11	1.537.799	0,95	1.540.092	1,01
Suku cadang kendaraan	1.340.572	1,24	993.104	1,00	1.398.848	1,08	1.386.714	0,85	1.961.841	1,29
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	1.338.935	1,24	642.809	0,65	1.101.613	0,85	1.541.870	0,95	2.491.878	1,63
Asam berlemak	734.177	0,68	547.458	0,55	904.784	0,70	1.653.770	1,02	1.878.792	1,23
Komputer dan bagiannya	856.096	0,79	867.450	0,88	877.605	0,68	714.684	0,44	699.778	0,46
Sabun mandi dan cuci	540.279	0,50	519.913	0,53	582.262	0,45	740.907	0,46	866.607	0,57
Minyak atsiri dan lainnya	366.215	0,34	338.549	0,34	471.711	0,36	584.727	0,36	546.067	0,36
Makanan ternak	420.024	0,39	247.468	0,25	347.458	0,27	510.353	0,31	599.167	0,39
Margarin dan lemak lainnya	528.416	0,49	262.282	0,26	345.491	0,27	926.482	0,57	811.402	0,53
Produk farmasi	210.398	0,20	254.478	0,26	315.799	0,24	428.511	0,26	441.750	0,29
Barang dari logam mulia	175.484	0,16	302.090	0,31	298.973	0,23	1.053.139	0,65	170.300	0,11
Kulit dan barang dari kulit	237.251	0,22	174.437	0,18	205.542	0,16	228.504	0,14	211.206	0,14
Preparat pembasmi kuman	136.779	0,13	162.297	0,16	203.084	0,16	246.583	0,15	247.673	0,16
Pesawat udara dan bagiannya	240.539	0,22	204.881	0,21	132.464	0,10	162.886	0,10	105.439	0,07
Bahan celup organik sintetik	135.067	0,13	94.319	0,10	113.182	0,09	133.993	0,08	140.127	0,09
Semen	154.626	0,14	157.761	0,16	109.098	0,08	57.801	0,04	20.049	0,01
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	67.456	0,06	42.311	0,04	58.275	0,05	109.139	0,07	197.902	0,13
Barang anyaman	58.895	0,05	40.427	0,04	44.203	0,03	58.419	0,04	84.964	0,06
Rotan olahan	32.025	0,03	29.396	0,03	33.803	0,03	42.101	0,03	1.587	0,00
Peti kemas	19.093	0,02	5.672	0,01	8.407	0,01	15.868	0,01	9.256	0,01
Gliserol dan larutan alkali	26.574	0,02	9.038	0,01	6.192	0,00	22.961	0,01	47.162	0,03
Hasil industri lainnya	8.836.520	8,19	6.976.629	7,04	8.903.628	6,88	12.117.702	7,45	12.153.259	7,97

Keterangan	2008		2009		2010		2011		2012*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	13.878.589	12,86	19.946.484	20,14	25.546.857	19,74	34.288.814	21,07	31.231.469	20,47
Batubara	10.305.207	9,55	13.765.088	13,90	17.801.230	13,76	26.924.583	16,55	26.177.958	17,16
Biji tembaga	2.316.366	2,15	5.380.287	5,43	6.325.231	4,89	4.706.933	2,89	2.484.712	1,63
Biji nikel	503.860	0,47	291.554	0,29	574.683	0,44	1.333.172	0,82	1.466.588	0,96
Bauksit	202.491	0,19	240.056	0,24	453.951	0,35	767.139	0,47	633.935	0,42
Granit	52.632	0,05	22.648	0,02	42.802	0,03	35.792	0,02	15.598	0,01
Hasil pertambangan lainnya	488.262	0,45	236.173	0,24	339.253	0,26	505.113	0,31	439.542	0,29
Hasil sektor lainnya ²⁾	9.771	0,01	10.679	0,01	9.707	0,01	16.082	0,01	13.136	0,01
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ³⁾	445.449	0,41	588.459	0,59	724.032	0,56	995.053	0,61	923.995	0,61
Jumlah, fob	107.884.879	100,00	99.029.573	100,00	129.416.034	100,00	162.720.858	100,00	152.574.764	100,00

Keterangan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan Harmonized System (HS)

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

³⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam

*) data sementara

Tabel 10. Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾

dalam Ribu Ton

Keterangan	2007		2008		2009		2010		2011		2012*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Hasil pertanian	2.666	0,87	2.778	0,92	2.782	0,83	2.937	0,71	2735	0,53	3.004	0,55
Biji coklat	379	0,12	374	0,12	440	0,13	432	0,10	214	0,04	171	0,03
Udang	132	0,04	192	0,06	142	0,04	109	0,03	118	0,02	133	0,02
Biji kopi	319	0,10	467	0,15	509	0,15	432	0,10	344	0,07	448	0,08
Ikan dan lain-lain	598	0,19	514	0,17	422	0,13	556	0,13	550	0,11	643	0,12
Rempah-rempah	101	0,03	108	0,04	109	0,03	129	0,03	96	0,02	113	0,02
Teh	56	0,02	84	0,03	83	0,02	79	0,02	69	0,01	63	0,01
Bahan nabati	96	0,03	105	0,03	141	0,04	181	0,04	232	0,05	169	0,03
Buah-buahan	243	0,08	213	0,07	215	0,06	234	0,06	208	0,04	243	0,04
Tembakau	26	0,01	30	0,01	33	0,01	96	0,02	19	0,00	19	0,00
Sayur-sayuran	114	0,04	107	0,04	131	0,04	124	0,03	88	0,02	147	0,03
Damar dan getah damar	52	0,02	38	0,01	51	0,02	47	0,01	38	0,01	72	0,01
Karet alam	15	0,00	9	0,00	10	0,00	15	0,00	12	0,00	10	0,00
Hasil pertanian lainnya	535	0,17	536	0,18	496	0,15	504	0,12	745	0,14	781	0,14
Hasil industri	64.541	21,00	61.109	20,16	58.468	17,54	60.882	14,64	62704	12,20	64.774	11,76
Minyak sawit	11.610	3,78	13.819	4,56	16.717	5,02	16.157	3,89	16364	3,18	18.953	3,44
Tekstil dan produk tekstil	1.839	0,60	1.775	0,59	1.760	0,53	1.984	0,48	1946	0,38	1.950	0,35
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	655	0,21	667	0,22	608	0,18	672	0,16	667	0,13	623	0,11
Produk logam dasar	3.766	1,23	3.467	1,14	2.906	0,87	2.991	0,72	2805	0,55	2.347	0,43
Karet olahan	2.807	0,91	2.685	0,89	2.439	0,73	2.902	0,70	3086	0,60	3.031	0,55
Kertas dan barang dari kertas	4.090	1,33	4.057	1,34	4.271	1,28	4.516	1,09	4255	0,83	4.228	0,77
Makanan olahan	1.713	0,56	2.394	0,79	1.859	0,56	1.971	0,47	2566	0,50	2.317	0,42
Bahan kimia	7.512	2,44	7.487	2,47	4.123	1,24	4.661	1,12	4913	0,96	4.101	0,74
Produk kayu olahan	3.460	1,13	2.745	0,91	2.754	0,83	3.638	0,88	3990	0,78	4.213	0,77
Alas kaki	114	0,04	129	0,04	122	0,04	165	0,04	197	0,04	199	0,04
Damar tiruan, bahan plastik	1.224	0,40	1.219	0,40	1.216	0,36	1.257	0,30	1251	0,24	1.278	0,23
Furnitur	897	0,29	808	0,27	697	0,21	692	0,17	618	0,12	598	0,11
Kapal laut dan sejenisnya	410	0,13	507	0,17	369	0,11	403	0,10	277	0,05	165	0,03
Bahan kertas	2.405	0,78	2.615	0,86	2.222	0,67	2.537	0,61	2901	0,56	3.186	0,58
Suku cadang kendaraan	170	0,06	186	0,06	147	0,04	195	0,05	178	0,03	230	0,04
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	143	0,05	194	0,06	89	0,03	140	0,03	177	0,03	262	0,05
Asam berlemak	699	0,23	895	0,30	890	0,27	961	0,23	1366	0,27	1.856	0,34
Komputer dan bagiannya	42	0,01	38	0,01	35	0,01	33	0,01	28	0,01	24	0,00
Sabun mandi dan cuci	485	0,16	508	0,17	543	0,16	552	0,13	621	0,12	746	0,14
Minyak atsiri dan lainnya	55	0,02	62	0,02	69	0,02	86	0,02	108	0,02	100	0,02
Makanan ternak	2.568	0,84	3.103	1,02	3.316	0,99	3.281	0,79	3659	0,71	4.237	0,77
Margarin dan lemak lainnya	354	0,12	507	0,17	346	0,10	355	0,09	797	0,16	765	0,14
Produk farmasi	11	0,00	14	0,00	12	0,00	19	0,00	19	0,00	23	0,00
Barang dari logam mulia	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00
Kulit dan barang dari kulit	12	0,00	13	0,00	11	0,00	13	0,00	12	0,00	12	0,00
Preparat pembasmi kuman	51	0,02	55	0,02	58	0,02	73	0,02	85	0,02	72	0,01
Pesawat udara dan bagiannya	4	0,00	5	0,00	34	0,01	2	0,00	0	0,00	-	0,00
Bahan celup organik sintetik	34	0,01	27	0,01	20	0,01	24	0,01	26	0,01	30	0,01
Semen	6.425	2,09	4.217	1,39	4.251	1,28	2.954	0,71	1319	0,26	274	0,05
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	5	0,00	8	0,00	5	0,00	7	0,00	12	0,00	20	0,00
Barang anyaman	27	0,01	21	0,01	15	0,00	14	0,00	22	0,00	24	0,00

Keterangan	2007		2008		2009		2010		2011		2012*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Rotan olahan	49	0,02	33	0,01	29	0,01	33	0,01	41	0,01	-	0,00
Peti kemas	33	0,01	15	0,00	2	0,00	2	0,00	3	0,00	1	0,00
Gliserol dan larutan alkali	42	0,01	70	0,02	50	0,02	33	0,01	96	0,02	165	0,03
Hasil industri lainnya	8.506	2,77	5.089	1,68	4.588	1,38	4.934	1,19	6020	1,17	6.216	1,13
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	240.165	78,13	239.257	78,93	272.053	81,62	351.915	84,65	448461	87,27	482.850	87,69
Batubara	205.895	66,99	196.272	64,75	232.121	69,64	286.856	69,00	348055	67,73	383.966	69,73
Biji tembaga	1.805	0,59	1.051	0,35	2.476	0,74	2.449	0,59	1480	0,29	1.092	0,20
Biji nikel	9.145	2,98	10.417	3,44	10.645	3,19	18.050	4,34	37474	7,29	47.062	8,55
Bauksit	11.563	3,76	15.553	5,13	15.264	4,58	25.911	6,23	39635	7,71	29.569	5,37
Granit	3.036	0,99	5.359	1,77	2.791	0,84	5.144	1,24	4468	0,87	2.002	0,36
Hasil pertambangan lainnya	8.721	2,84	10.605	3,50	8.756	2,63	13.505	3,25	17345	3,38	19.156	3,48
Hasil sektor lainnya ²⁾	4	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00	-	0,00
Jumlah	307.372	100,00	303.143	100,00	333.303	100,00	415.734	100,00	513895	100,00	550.629	100,00

Keterangan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

^{*)} data sementara

Tabel 11. Nilai Ekspor Nonmigra Menurut Negara Tujuan (F.o.B)
dalam Ribu Dolar AS

Keterangan	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Amerika	13.840.845	14,86	15.469.957	14,34	12.971.852	13,10	17.217.444	13,30	20.450.254	12,57	18.823.528	12,34
Amerika Utara	11.868.336	12,74	12.977.582	12,03	10.899.719	11,01	14.012.434	10,83	16.592.279	10,20	15.284.414	10,02
Amerika Serikat	11.295.678	12,13	12.332.203	11,43	10.399.534	10,50	13.295.428	10,27	15.628.585	9,60	14.496.790	9,50
Kanada	566.814	0,61	642.154	0,60	499.133	0,50	716.049	0,55	963.694	0,59	787.625	0,52
Amerika Tengah dan Selatan	1.972.508	2,12	2.492.375	2,31	2.072.133	2,09	3.205.010	2,48	3.857.977	2,37	3.539.114	2,32
Argentina	181.974	0,20	192.779	0,18	157.239	0,16	279.535	0,22	353.093	0,22	310.358	0,20
Brasil	749.951	0,81	1.017.087	0,94	903.654	0,91	1.517.062	1,17	1.696.982	1,04	1.479.316	0,97
Meksiko	358.494	0,38	452.810	0,42	398.055	0,40	486.520	0,38	609.280	0,37	594.669	0,39
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	682.088	0,73	829.699	0,77	613.185	0,62	921.893	0,71	1.198.622	0,74	1.154.769	0,76
Eropa	15.428.656	16,56	17.573.496	16,29	15.196.710	15,35	19.262.875	14,88	23.413.030	14,39	20.830.776	13,65
Uni Eropa	13.499.190	14,49	15.186.990	14,08	13.557.522	13,69	16.768.592	12,96	20.220.539	12,43	17.783.258	11,66
Belanda	2.630.630	2,82	3.779.735	3,50	2.950.230	2,98	3.676.192	2,84	4.961.290	3,05	4.479.400	2,94
Belgia	1.317.911	1,41	1.356.558	1,26	1.047.620	1,06	1.184.559	0,92	1.369.237	0,84	1.292.609	0,85
Inggris	1.494.129	1,60	1.559.715	1,45	1.384.141	1,40	1.634.653	1,26	1.698.748	1,04	1.678.542	1,10
Italia	1.369.307	1,47	1.878.884	1,74	1.659.243	1,68	2.359.740	1,82	3.155.722	1,94	2.279.581	1,49
Jerman	2.357.625	2,53	2.462.746	2,28	2.378.998	2,40	3.034.089	2,34	3.288.185	2,02	3.063.468	2,01
Perancis	806.536	0,87	931.821	0,86	857.479	0,87	1.030.844	0,80	1.278.492	0,79	1.116.316	0,73
Spanyol	2.074.805	2,23	1.593.024	1,48	1.792.677	1,81	2.119.782	1,64	2.369.755	1,46	2.059.199	1,35
Uni Eropa lainnya ¹⁾	1.448.247	1,55	1.624.506	1,51	1.487.133	1,50	1.728.733	1,34	2.099.107	1,29	1.814.143	1,19
Rusia	323.013	0,35	346.734	0,32	312.620	0,32	598.076	0,46	856.236	0,53	866.353	0,57
Turki	1.015.310	1,09	879.993	0,82	679.922	0,69	1.066.361	0,82	1.428.810	0,88	1.361.951	0,89
Eropa lainnya	591.143	0,63	1.159.778	1,08	646.646	0,65	829.847	0,64	907.447	0,56	819.213	0,54
Asia dan Timur Tengah	59.025.109	63,37	69.278.781	64,22	66.023.403	66,67	86.575.026	66,90	109.847.091	67,51	103.417.346	67,78
ASEAN	19.832.770	21,29	24.160.548	22,39	21.349.364	21,56	27.297.660	21,09	32.313.295	19,86	30.635.000	20,08
Brunei Darussalam	45.802	0,05	57.515	0,05	57.089	0,06	60.697	0,05	76.909	0,05	116.888	0,08
Filipina	1.849.000	1,99	1.923.334	1,78	2.396.472	2,42	3.109.097	2,40	3.672.801	2,26	3.595.716	2,36
Kamboja	124.037	0,13	174.540	0,16	199.187	0,20	216.622	0,17	266.486	0,16	290.186	0,19
Laos	4.080	0,00	4.222	0,00	4.668	0,00	5.504	0,00	10.663	0,01	23.734	0,02
Malaysia	4.481.076	4,81	6.199.131	5,75	5.619.470	5,67	7.705.956	5,95	9.102.164	5,59	8.439.658	5,53
Myanmar	238.205	0,26	235.245	0,22	180.610	0,18	280.941	0,22	358.934	0,22	412.643	0,27
Singapura	9.092.503	9,76	10.538.807	9,77	8.854.735	8,94	9.959.442	7,70	11.390.885	7,00	10.040.508	6,58
Thailand	2.744.539	2,95	3.327.830	3,08	2.587.799	2,61	4.026.380	3,11	5.163.571	3,17	5.469.457	3,58
Vietnam	1.253.527	1,35	1.699.924	1,58	1.449.334	1,46	1.933.020	1,49	2.270.884	1,40	2.246.204	1,47
Hong Kong SAR	1.730.863	1,86	1.803.650	1,67	2.116.123	2,14	2.484.581	1,92	3.179.064	1,95	2.636.998	1,73
India	4.485.993	4,82	6.902.059	6,40	7.473.379	7,55	9.595.633	7,41	13.417.605	8,25	12.356.410	8,10
Irak	2.849	0,00	276.865	0,26	40.569	0,04	55.057	0,04	154.230	0,09	44.884	0,03
Jepang	13.860.852	14,88	13.324.908	12,35	12.256.927	12,38	16.089.606	12,43	18.367.609	11,29	17.073.215	11,19
Korea Selatan	3.988.433	4,28	4.537.030	4,21	5.109.184	5,16	6.805.981	5,26	7.330.865	4,51	6.656.299	4,36
Pakistan	733.081	0,79	932.807	0,86	654.424	0,66	676.303	0,52	927.582	0,57	1.374.096	0,90
Republik Rakyat Cina	6.699.767	7,19	7.818.686	7,25	8.801.649	8,89	13.963.445	10,79	21.629.863	13,29	20.778.341	13,62
Saudi Arabia	918.123	0,99	1.203.657	1,12	931.964	0,94	1.116.973	0,86	1.398.371	0,86	1.769.929	1,16
Taiwan, Provinsi China	2.461.999	2,64	2.785.676	2,58	2.860.955	2,89	3.181.294	2,46	4.172.450	2,56	4.095.337	2,68
Asia dan Timur Tengah lainnya	4.310.379	4,63	5.532.895	5,13	4.428.865	4,47	5.308.493	4,10	6.956.156	4,27	5.996.835	3,93
Australia dan Oseania	2.567.135	2,76	2.694.866	2,50	2.242.936	2,26	3.069.282	2,37	3.986.120	2,45	4.026.175	2,64
Australia	2.110.669	2,27	2.150.453	1,99	1.715.776	1,73	2.434.510	1,88	3.181.303	1,96	3.295.966	2,16
New Zealand	248.913	0,27	303.937	0,28	232.528	0,23	293.807	0,23	496.785	0,31	730.209	0,48
Afrika	1.736.542	1,86	2.422.329	2,25	2.006.214	2,03	2.567.375	1,98	4.029.309	2,48	4.552.946	2,98
Afrika Selatan	542.696	0,58	624.051	0,58	468.453	0,47	670.466	0,52	1.410.409	0,87	1.642.409	1,08
Afrika lainnya	1.193.845	1,28	1.798.279	1,67	1.537.761	1,55	1.896.909	1,47	2.618.903	1,61	2.910.535	1,91
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ²⁾	543.885	0,58	445.449	0,41	588.459	0,59	724.032	0,56	995.053	0,61	923.995	0,61
Jumlah, fob	93.142.172	100,00	107.884.879	100,00	99.029.573	100,00	129.416.034	100,00	162.720.858	100,00	152.574.764	100,00

¹⁾ Pemekaran menjadi 27 negara sejak Bulgaria dan Romania bergabung dengan Uni Eropa pada Januari 2007

²⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam

SAR : Special Administrative Region

Tabel 12. Nilai Impor Barang Menurut Kelompok Barang

dalam Ribu Dolar AS

Rincian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Barang konsumsi	12.579.877	14,8	15.724.480	13,5	10.620.557	12,0	16.825.679	13,2	23.258.383	14,0	25.531.526	14,2
Makanan dan minuman, baku, untuk rumah tangga	763.831	0,9	803.630	0,7	966.478	1,1	1.178.969	0,9	1.857.702	1,1	1.537.345	0,9
Makanan dan minuman, olahan, untuk rumah tangga	2.048.741	2,4	1.903.894	1,6	1.368.659	1,5	2.442.550	1,9	3.598.907	2,2	2.758.894	1,5
Mobil penumpang	334.266	0,4	478.859	0,4	327.467	0,4	701.884	0,6	879.378	0,5	1.498.307	0,8
Alat angkutan bukan untuk industri	241.935	0,3	413.019	0,4	440.391	0,5	573.436	0,4	558.325	0,3	367.714	0,2
Barang konsumsi tahan lama	598.044	0,7	841.946	0,7	822.675	0,9	1.131.912	0,9	1.284.740	0,8	1.593.347	0,9
Barang konsumsi semi-tahan lama	914.325	1,1	1.155.812	1,0	921.597	1,0	1.350.901	1,1	1.754.896	1,1	1.920.530	1,1
Barang konsumsi tidak tahan lama	1.000.920	1,2	1.269.330	1,1	1.172.670	1,3	1.490.961	1,2	1.689.655	1,0	1.910.249	1,1
Bahan bakar dan pelumas, olahan, produk minyak ¹⁾	6.528.713	7,7	8.756.261	7,5	4.461.898	5,0	7.748.091	6,1	11.465.941	6,9	13.720.367	7,6
Barang yang tidak dirinci secara spesifik	149.101	0,2	101.730	0,1	138.722	0,2	206.977	0,2	168.837	0,1	224.768	0,1
Bahan baku dan bahan penolong	65.686.906	77,0	89.215.819	76,5	63.242.770	71,3	92.097.671	72,3	120.299.803	72,5	127.303.767	70,8
Makanan dan minuman, baku untuk industri	2.007.854	2,4	3.287.211	2,8	2.669.923	3,0	3.143.862	2,5	4.121.554	2,5	4.005.709	2,2
Makanan dan minuman, olahan untuk industri	1.134.127	1,3	1.313.281	1,1	1.551.430	1,7	2.250.639	1,8	3.264.179	2,0	3.325.465	1,9
Bahan pasokan, baku untuk industri	3.069.140	3,6	4.702.917	4,0	2.873.785	3,2	4.439.135	3,5	6.723.026	4,0	5.486.583	3,1
Bahan pasokan, olahan untuk industri	29.049.847	34,1	41.120.749	35,2	29.266.229	33,0	41.700.571	32,7	52.838.464	31,8	58.931.621	32,8
Suku cadang dan perlengkapan untuk barang modal	11.727.457	13,8	14.942.430	12,8	10.953.467	12,3	14.785.927	11,6	16.776.839	10,1	17.993.151	10,0
Suku cadang dan perlengkapan untuk alat angkutan	4.173.728	4,9	6.511.688	5,6	3.990.012	4,5	6.181.181	4,9	7.129.249	4,3	8.275.085	4,6
Bahan bakar dan pelumas, baku	8.788.739	10,3	9.658.384	8,3	5.188.131	5,8	8.359.686	6,6	10.923.738	6,6	11.008.475	6,1
a.l: minyak mentah ¹⁾	8.779.003	10,3	9.619.278	8,2	5.167.423	5,8	8.336.533	6,5	10.905.440	6,6	10.987.073	6,1
Bahan bakar dan pelumas, olahan	5.736.014	6,7	7.679.158	6,6	6.749.794	7,6	11.236.669	8,8	18.522.753	11,2	18.277.680	10,2
a.l: produk minyak ¹⁾	5.412.172	6,3	7.258.764	6,2	6.118.327	6,9	9.854.156	7,7	16.590.030	10,0	15.413.260	8,6
a.l: gas elpiji ²⁾	34.025	0,0	202.045	0,2	484.385	0,5	1.196.084	0,9	1.708.094	1,0	2.626.816	1,5
Barang modal	14.203.812	16,7	21.648.346	18,6	19.408.089	21,9	24.983.047	19,6	31.723.053	19,1	36.066.847	20,1
Barang modal (kecuali alat angkutan)	11.382.814	13,4	16.517.358	14,2	13.291.147	15,0	18.722.367	14,7	23.504.414	14,2	26.631.187	14,8
Mobil penumpang	334.266	0,4	478.859	0,4	327.467	0,4	701.884	0,6	879.378	0,5	1.498.307	0,8
Alat angkutan lainnya, untuk industri	2.486.732	2,9	4.652.129	4,0	5.789.475	6,5	5.558.796	4,4	7.339.264	4,4	7.937.353	4,4
Asuransi dan ongkos pengangkutan	7.839.510	9,2	10.848.170	9,3	5.071.718	5,7	7.876.779	6,2	10.196.471	6,1	10.495.909	5,8
Jumlah, fob	85.261.085	100,0	116.690.287	100,0	88.714.213	100,0	127.446.711	100,0	166.004.921	100,0	179.729.338	100,0

¹⁾ Merupakan komponen impor minyak²⁾ Merupakan komponen impor gas

Tabel 13. Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif) ¹⁾

dalam Ribu Dolar AS

Rincian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	4.068.711	6,16	5.662.566	6,10	4.743.366	6,46	6.226.965	6,10	9.314.463	7,32	8.129.732	5,85
Biji coklat	39.190	0,06	59.574	0,06	76.376	0,10	89.460	0,09	62.896	0,05	62.720	0,05
Udang	12.903	0,02	14.336	0,02	14.288	0,02	19.277	0,02	49.459	0,04	51.708	0,04
Biji kopi	73.371	0,11	12.531	0,01	20.981	0,03	30.388	0,03	39.091	0,03	109.396	0,08
Ikan dan lain-lain	54.665	0,08	74.882	0,08	106.729	0,15	150.358	0,15	174.457	0,14	129.258	0,09
Rempah-rempah	14.022	0,02	6.363	0,01	10.320	0,01	16.591	0,02	397.091	0,31	153.669	0,11
Teh	12.281	0,02	9.572	0,01	10.912	0,01	17.078	0,02	24.749	0,02	28.732	0,02
Bahan nabati	1.095	0,00	2.316	0,00	1.507	0,00	2.215	0,00	1.896	0,00	1.749	0,00
Buah-buahan	430.630	0,65	445.424	0,48	594.915	0,81	646.801	0,63	803.505	0,63	834.603	0,60
Tembakau	46.027	0,07	72.405	0,08	50.971	0,07	66.333	0,07	134.432	0,11	258.930	0,19
Sayur-sayuran	235.759	0,36	284.494	0,31	297.102	0,40	422.486	0,41	571.238	0,45	470.674	0,34
Damar dan getah damar	1.029	0,00	2.257	0,00	1.137	0,00	8.441	0,01	4.994	0,00	2.175	0,00
Karet alam	17.357	0,03	14.904	0,02	14.490	0,02	29.339	0,03	27.446	0,02	39.577	0,03
Hasil pertanian lainnya	3.130.382	4,74	4.663.507	5,03	3.543.638	4,82	4.728.199	4,63	7.023.206	5,52	5.986.547	4,31
Hasil industri	66.536.614	100,72	93.811.067	101,14	71.548.088	97,38	99.539.091	97,57	124.061.871	97,47	136.891.103	98,45
Minyak sawit	1.104	0,00	5.108	0,01	13.034	0,02	37.803	0,04	24.992	0,02	506	0,00
Tekstil dan produk tekstil	3.159.891	4,78	4.149.842	4,47	3.266.801	4,45	5.012.919	4,91	6.687.762	5,25	6.791.579	4,88
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	12.107.498	18,33	15.792.834	17,03	11.968.798	16,29	16.256.236	15,93	18.830.091	14,79	19.645.155	14,13
Produk logam dasar	10.041.754	15,20	15.271.905	16,46	9.611.637	13,08	13.792.037	13,52	17.139.414	13,47	20.904.424	15,03
Karet olahan	606.958	0,92	922.131	0,99	763.117	1,04	1.068.660	1,05	1.348.771	1,06	1.630.129	1,17
Kertas dan barang dari kertas	1.288.427	1,95	1.560.273	1,68	1.330.302	1,81	1.677.017	1,64	2.051.328	1,61	1.930.829	1,39
Makanan olahan	2.198.398	3,33	2.031.461	2,19	2.039.002	2,78	3.316.140	3,25	5.268.631	4,14	4.580.196	3,29
Bahan kimia	5.288.585	8,01	6.941.602	7,48	5.143.580	7,00	7.042.111	6,90	8.711.547	6,84	9.288.016	6,68
Produk kayu olahan	282.487	0,43	327.842	0,35	223.604	0,30	305.236	0,30	388.867	0,31	378.699	0,27
Alas kaki	120.598	0,18	173.659	0,19	129.543	0,18	229.975	0,23	338.827	0,27	367.041	0,26
Damar tiruan, bahan plastik	3.084.446	4,67	4.058.756	4,38	3.256.336	4,43	4.823.907	4,73	6.724.951	5,28	7.138.050	5,13
Furnitur	127.076	0,19	176.525	0,19	127.076	0,17	208.658	0,20	274.307	0,22	365.770	0,26
Kapal laut dan sejenisnya	911.518	1,38	1.444.668	1,56	2.731.446	3,72	1.878.619	1,84	2.164.720	1,70	2.001.051	1,44
Bahan kertas	758.432	1,15	976.015	1,05	621.882	0,85	1.050.378	1,03	1.181.740	0,93	1.046.253	0,75
Suku cadang kendaraan	1.961.798	2,97	3.212.202	3,46	1.560.806	2,12	2.660.187	2,61	3.164.262	2,49	3.891.253	2,80
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	1.401.543	2,12	3.196.202	3,45	2.194.804	2,99	4.460.658	4,37	5.856.359	4,60	7.581.212	5,45
Emas batangan	1.835.175	2,78	2.350.967	2,53	1.394.537	1,90	1.651.411	1,62	1.942.917	1,53	2.620.581	1,88
Suku cadang mesin	31.031	0,05	40.101	0,04	33.779	0,05	39.441	0,04	66.582	0,05	66.342	0,05
Asam berlemak	1.156.598	1,75	1.848.859	1,99	1.413.591	1,92	2.320.351	2,27	2.829.843	2,22	2.640.606	1,90
Komputer dan bagiannya	141.626	0,21	184.989	0,20	163.352	0,22	212.492	0,21	271.550	0,21	325.245	0,23
Sabun mandi dan cuci	81	0,14	88	0,13	81	0,14	97	0,13	101	0,11	125	0,14
Minyak atsiri dan lainnya	438.025	0,66	549.716	0,59	509.120	0,69	632.128	0,62	741.401	0,58	849.357	0,61
Gelas dan barang dari gelas	322.616	0,49	279.403	0,30	177.740	0,24	294.773	0,29	332.191	0,26	398.862	0,29
Pupuk	726.435	1,10	2.626.344	2,83	1.101.275	1,50	1.644.787	1,61	2.588.674	2,03	2.617.925	1,88
Perlengkapan olahraga	144.517	0,22	167.872	0,18	107.516	0,15	164.525	0,16	203.138	0,16	248.529	0,18
Produk keramik	125.436	0,19	210.210	0,23	152.122	0,21	215.109	0,21	268.229	0,21	425.842	0,31
Makanan ternak	1.156.183	1,75	1.742.482	1,88	1.678.480	2,28	1.870.971	1,83	2.220.889	1,74	2.783.271	2,00
Margarin dan lemak lainnya	13.062	0,02	11.269	0,01	14.500	0,02	18.533	0,02	27.942	0,02	41.562	0,03
Produk farmasi	298.208	0,45	329.859	0,36	374.375	0,51	481.283	0,47	513.699	0,40	560.167	0,40
Barang dari logam mulia	13.053	0,02	12.573	0,01	6.821	0,01	16.111	0,02	32.231	0,03	28.077	0,02
Kulit dan barang dari kulit	256.243	0,39	379.945	0,41	219.601	0,30	364.153	0,36	484.688	0,38	445.068	0,32
Preparat pembasmi kuman	115.963	0,18	160.797	0,17	162.988	0,22	220.966	0,22	280.957	0,22	289.488	0,21
Pesawat udara dan bagiannya	1.744.888	2,64	2.148.093	2,32	2.255.618	3,07	2.048.929	2,01	2.015.087	1,58	2.320.776	1,67
Bahan celup organik sintetik	238.387	0,36	277.762	0,30	253.992	0,35	299.760	0,29	350.636	0,28	378.174	0,27
Semen	47.235	0,07	62.123	0,07	79.907	0,11	88.432	0,09	96.555	0,08	210.810	0,15
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	24.156	0,04	57.878	0,06	41.183	0,06	67.899	0,07	139.206	0,11	165.926	0,12
Barang anyaman	1.277	0,00	1.701	0,00	1.250	0,00	1.760	0,00	4.567	0,00	1.752	0,00
Rotan olahan	21	0,00	17	0,00	13	0,00	48	0,00	82	0,00	5	0,00

Rincian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Peti kemas	4.101	0,01	6.668	0,01	21.047	0,03	11.769	0,01	25.641	0,02	13.959	0,01
Gliserol dan larutan alkali	452	0,00	2.539	0,00	135	0,00	2.671	0,00	2.629	0,00	959	0,00
Hasil industri lainnya	14.353.504	21,73	20.114.858	21,69	16.400.652	22,32	23.036.595	22,58	28.421.867	22,33	31.901.050	22,94
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	993.959	1,50	1.278.664	1,38	747.929	1,02	1.005.478	0,99	1.235.392	0,97	1.133.791	0,82
Batubara	8.242	0,01	38.359	0,04	19.034	0,03	13.952	0,01	12.860	0,01	18.702	0,01
Biji tembaga	64	0,00	10	0,00	14.594	0,02	1.268	0,00	103.823	0,08	102.762	0,07
Biji nikel	86	0,00	42	0,00	1	0,00	2	0,00	14	0,00	11	0,00
Bauksit	758	0,00	850	0,00	668	0,00	1.043	0,00	423	0,00	716	0,00
Granit	5.637	0,01	10.841	0,01	7.201	0,01	6.967	0,01	9.492	0,01	9.882	0,01
Hasil pertambangan lainnya	570.325	0,86	1.216.632	1,31	689.593	0,94	970.883	0,95	1.099.710	0,86	988.070	0,71
Hasil sektor lainnya ²⁾	408.847	0,62	11.930	0,01	16.837	0,02	11.364	0,01	9.070	0,01	13.649	0,01
Impor yang tidak dapat diklasifikasi ³⁾	630.000	0,95	784.328	0,85	384.702	0,52	1.254.693	1,23	645.746	0,51	1.041.127	0,75
Jumlah, cif	72.229.285	109,34	101.536.625	109,47	77.424.085	105,38	108.026.226	105,89	135.257.475	106,26	147.195.753	105,87
Asuransi dan ongkos pengangkutan	6.171.170	9,34	8.781.268	9,47	3.954.554	5,38	6.005.633	5,89	7.969.356	6,26	8.155.519	5,87
Jumlah, fob	66.058.114	100,00	92.755.356	100,00	73.469.531	100,00	102.020.593	100,00	127.288.117	100,00	139.040.235	100,00

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

³⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut dan barang untuk diperbaiki

Tabel 14. Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif) ¹⁾

dalam Ribu Ton

Rincian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	8.943	15,06	8.686	13,20	8.946	15,87	11.137	15,24	13.953	15,87	12.788	13,95
Biji coklat	20	0,03	24	0,04	28	0,05	27	0,04	18	0,02	24	0,03
Udang	5	0,01	4	0,01	6	0,01	3	0,00	7	0,01	9	0,01
Biji kopi	48	0,08	6	0,01	13	0,02	18	0,03	15	0,02	51	0,06
Ikan dan lain-lain	63	0,11	93	0,14	138	0,25	181	0,25	215	0,24	141	0,15
Rempah-rempah	18	0,03	14	0,02	22	0,04	26	0,04	73	0,08	58	0,06
Teh	9	0,02	5	0,01	6	0,01	11	0,01	19	0,02	24	0,03
Bahan nabati	1	0,00	2	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Buah-buahan	484	0,82	482	0,73	619	1,10	662	0,91	794	0,90	780	0,85
Tembakau	16	0,03	16	0,02	12	0,02	16	0,02	36	0,04	61	0,07
Sayur-sayuran	586	0,99	698	1,06	657	1,17	658	0,90	919	1,05	791	0,86
Damar dan getah damar	1	0,00	2	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
Karet alam	11	0,02	8	0,01	11	0,02	14	0,02	10	0,01	18	0,02
Hasil pertanian lainnya	7.682	12,93	7.333	11,14	7.432	13,18	9.516	13,02	11.845	13,47	10.833	11,82
Hasil industri	44.474	74,88	50.100	76,12	42.265	74,98	54.958	75,19	66.745	75,92	71.762	78,30
Minyak sawit	1	0,00	9	0,01	19	0,03	47	0,06	23	0,03	0	0,00
Tekstil dan produk tekstil	890	1,50	996	1,51	706	1,25	1.022	1,40	1.096	1,25	1.252	1,37
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	1.128	1,90	1.255	1,91	698	1,24	967	1,32	2.471	2,81	1.206	1,32
Produk logam dasar	10.343	17,42	12.627	19,18	9.120	16,18	11.545	15,80	13.045	14,84	17.642	19,25
Karet olahan	193	0,32	269	0,41	174	0,31	255	0,35	351	0,40	304	0,33
Kertas dan barang dari kertas	2.796	4,71	2.760	4,19	2.826	5,01	3.057	4,18	3.191	3,63	3.065	3,34
Makanan olahan	3.819	6,43	2.181	3,31	2.406	4,27	3.782	5,17	6.038	6,87	5.453	5,95
Bahan kimia	5.692	9,58	6.323	9,61	6.433	11,41	7.493	10,25	7.672	8,73	8.787	9,59
Produk kayu olahan	580	0,98	640	0,97	470	0,83	566	0,77	748	0,85	735	0,80
Alas kaki	45	0,08	54	0,08	31	0,06	45	0,06	55	0,06	58	0,06
Damar tiruan, bahan plastik	1.801	3,03	2.056	3,12	1.938	3,44	2.373	3,25	3.573	4,06	3.401	3,71
Furnitur	167	0,28	98	0,15	62	0,11	132	0,18	148	0,17	141	0,15
Kapal laut dan sejenisnya	279	0,47	578	0,88	1.079	1,91	1.087	1,49	1.387	1,58	1.225	1,34
Bahan kertas	1.054	1,77	1.189	1,81	1.072	1,90	1.250	1,71	1.309	1,49	1.354	1,48
Suku cadang kendaraan	426	0,72	526	0,80	235	0,42	393	0,54	484	0,55	538	0,59
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	183	0,31	348	0,53	225	0,40	454	0,62	534	0,61	663	0,72
Emas batangan	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suku cadang mesin	181	0,30	229	0,35	115	0,20	171	0,23	236	0,27	263	0,29
Asam berlemak	22	0,04	22	0,03	27	0,05	24	0,03	31	0,04	36	0,04
Komputer dan bagiannya	56	0,09	69	0,11	61	0,11	69	0,09	67	0,08	52	0,06
Sabun mandi dan cuci	81	0,14	88	0,13	81	0,14	97	0,13	101	0,11	125	0,14
Minyak atsiri dan lainnya	60	0,10	70	0,11	69	0,12	78	0,11	85	0,10	93	0,10
Gelas dan barang dari gelas	252	0,42	283	0,43	200	0,36	309	0,42	370	0,42	402	0,44
Pupuk	3.127	5,26	4.924	7,48	2.767	4,91	4.938	6,76	6.461	7,35	6.286	6,86
Perlengkapan olahraga	63	0,11	71	0,11	43	0,08	57	0,08	77	0,09	68	0,07
Produk keramik	236	0,40	336	0,51	246	0,44	378	0,52	538	0,61	870	0,95
Makanan ternak	3.310	5,57	3.902	5,93	3.512	6,23	4.124	5,64	4.410	5,02	4.889	5,33
Margarin dan lemak lainnya	12	0,02	5	0,01	4	0,01	4	0,01	10	0,01	12	0,01

Rincian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Produk farmasi	16	0,03	20	0,03	14	0,02	20	0,03	21	0,02	25	0,03
Barang dari logam mulia	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kulit dan barang dari kulit	39	0,07	56	0,09	42	0,07	58	0,08	58	0,07	53	0,06
Preparat pembasmi kuman	40	0,07	37	0,06	36	0,06	56	0,08	54	0,06	54	0,06
Pesawat udara dan bagiannya	4	0,01	5	0,01	7	0,01	8	0,01	7	0,01	35	0,04
Bahan celup organik sintetik	64	0,11	68	0,10	50	0,09	67	0,09	64	0,07	69	0,08
Semen	1.141	1,92	1.336	2,03	1.552	2,75	2.009	2,75	2.034	2,31	3.426	3,74
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	5	0,01	6	0,01	4	0,01	7	0,01	12	0,01	13	0,01
Barang anyaman	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Rotan olahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Peti kemas	1	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	2	0,00	1	0,00
Gliserol dan larutan alkali	1	0,00	3	0,00	0	0,00	8	0,01	8	0,01	2	0,00
Hasil industri lainnya	6.367	10,72	6.658	10,11	5.940	10,54	8.003	10,95	9.979	11,35	9.154	9,99
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	5.890	9,92	7.032	10,68	5.158	9,15	6.995	9,57	7.218	8,21	7.102	7,75
Batubara	64	0,11	142	0,22	56	0,10	56	0,08	50	0,06	65	0,07
Biji tembaga	2	0,00	0	0,00	10	0,02	0	0,00	33	0,04	39	0,04
Biji nikel	0	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Bauksit	2	0,00	2	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Granit	23	0,04	91	0,14	26	0,05	24	0,03	39	0,04	41	0,04
Hasil pertambangan lainnya	5.798	9,76	6.797	10,33	5.065	8,99	6.914	9,46	7.095	8,07	6.954	7,59
Hasil sektor lainnya ²⁾	1	0,00	3	0,01	2	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	59.390	100,00	65.821	100,00	56.371	100,00	73.091	100,00	87.916	100,00	91.651	100,00

Keterangan:

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

³⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut dan barang untuk diperbaiki

Tabel 15. Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif)

dalam Ribu Dolar AS

Keterangan	2007		2008		2009		2010		2011		2012**	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Amerika	8.107.455	11,2	12.481.010	12,3	10.077.771	13,0	12.431.759	11,6	16.103.429	11,9	16.077.864	11,0
Amerika Utara	6.579.389	9,1	10.017.667	9,9	7.594.771	9,8	9.043.930	8,4	11.407.592	8,4	11.222.150	7,7
Amerika Serikat	5.443.450	7,5	7.865.305	7,7	6.544.538	8,5	7.778.552	7,2	9.388.987	6,9	9.433.813	6,5
Kanada	1.066.538	1,5	2.000.119	2,0	1.050.228	1,4	1.265.378	1,2	2.018.603	1,5	1.788.335	1,2
Amerika Tengah dan Selatan	68.770	0,1	152.242	0,1	2.483.001	3,2	3.387.830	3,2	4.695.838	3,5	4.855.713	3,3
Argentina	1.528.067	2,1	2.463.343	2,4	661.009	0,9	938.376	0,9	1.578.545	1,2	1.721.658	1,2
Brasil	430.489	0,6	613.197	0,6	1.056.704	1,4	1.692.683	1,6	1.840.912	1,4	1.989.567	1,4
Meksiko	705.833	1,0	1.371.509	1,4	139.791	0,2	212.304	0,2	409.197	0,3	567.323	0,4
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	391.744	0,5	478.637	0,5	625.497	0,8	544.467	0,5	867.182	0,6	577.164	0,4
Eropa	11.103.859	15,4	14.142.432	13,9	9.764.632	12,6	12.453.360	11,6	15.404.458	11,4	17.283.302	11,8
Uni Eropa	9.327.990	12,9	10.764.748	10,6	7.839.092	10,1	9.575.241	8,9	12.016.343	8,9	13.387.653	9,2
Belanda	615.485	0,9	627.770	0,6	546.860	0,7	628.375	0,6	851.648	0,6	825.511	0,6
Belgia	381.360	0,5	604.328	0,6	435.898	0,6	538.210	0,5	586.600	0,4	596.607	0,4
Inggris	782.715	1,1	1.102.108	1,1	631.014	0,8	884.113	0,8	1.121.915	0,8	1.259.915	0,9
Italia	752.824	1,0	1.008.358	1,0	737.360	1,0	901.498	0,8	1.197.727	0,9	1.488.148	1,0
Jerman	2.617.311	3,6	3.185.918	3,1	2.334.153	3,0	2.974.449	2,8	3.370.073	2,5	4.055.304	2,8
Perancis	1.624.827	2,2	1.705.838	1,7	1.171.507	1,5	1.248.483	1,2	1.706.666	1,3	1.589.352	1,1
Spanyol	299.966	0,4	258.738	0,3	221.544	0,3	309.467	0,3	399.688	0,3	517.032	0,4
Uni Eropa lainnya ¹⁾	2.253.502	3,1	2.271.690	2,2	1.760.757	2,3	2.090.645	1,9	2.782.028	2,1	3.055.783	2,1
Rusia	441.675	0,6	1.186.360	1,2	553.917	0,7	1.062.822	1,0	1.286.648	1,0	1.777.713	1,2
Turki	148.279	0,2	323.566	0,3	241.857	0,3	289.354	0,3	336.570	0,2	411.742	0,3
Eropa lainnya	1.185.915	1,6	1.867.758	1,8	1.129.767	1,5	1.525.942	1,4	1.764.899	1,3	1.706.191	1,2
Asia dan Timur Tengah	48.155.106	66,7	68.176.358	67,1	52.429.344	67,7	75.725.416	70,4	95.374.245	70,5	104.060.386	71,3
ASEAN	19.070.635	26,4	23.461.840	23,1	18.435.816	23,8	23.735.287	22,1	29.894.859	22,1	31.396.804	21,5
Brunei Darussalam	3.879	0,0	10.193	0,0	1.995	0,0	6.887	0,0	12.285	0,0	12.071	0,0
Filipina	530.158	0,7	718.484	0,7	549.314	0,7	667.059	0,6	841.553	0,6	803.645	0,6
Kamboja	2.295	0,0	2.348	0,0	3.361	0,0	4.730	0,0	7.886	0,0	10.414	0,0
Laos	3.291	0,0	324	0,0	1.393	0,0	616	0,0	1.293	0,0	3.265	0,0
Malaysia	2.888.466	4,0	3.995.114	3,9	3.261.762	4,2	4.517.173	4,2	5.775.392	4,3	6.276.207	4,3
Myanmar	32.239	0,0	29.723	0,0	26.755	0,0	31.649	0,0	69.560	0,1	67.493	0,0
Singapura	10.453.914	14,5	11.769.682	11,6	9.578.610	12,4	9.979.896	9,3	10.613.966	7,8	10.665.594	7,3
Thailand	4.463.297	6,2	6.321.063	6,2	4.514.565	5,8	7.406.918	6,9	10.214.598	7,6	11.121.140	7,6
Vietnam	654.279	0,9	561.250	0,6	484.000	0,6	1.120.358	1,0	2.358.327	1,7	2.436.972	1,7
Hong Kong SAR	1.908.862	2,6	2.500.163	2,5	1.491.482	1,9	1.830.987	1,7	2.408.678	1,8	1.954.818	1,3
India	1.736.869	2,4	2.544.574	2,5	2.089.420	2,7	2.729.850	2,5	4.021.087	3,0	4.015.891	2,8
Irak	413	0,0	236	0,0	1.124	0,0	1.176	0,0	703	0,0	405	0,0
Jepang	9.332.256	12,9	14.969.488	14,7	9.712.649	12,5	16.727.317	15,6	19.316.136	14,3	22.087.400	15,1
Korea Selatan	3.746.251	5,2	4.989.837	4,9	3.750.228	4,8	5.547.732	5,2	7.365.804	5,4	8.199.989	5,6
Pakistan	65.561	0,1	62.248	0,1	63.082	0,1	70.454	0,1	191.265	0,1	282.710	0,2
Republik Rakyat Cina	9.305.459	12,9	15.098.024	14,9	13.309.401	17,2	19.899.319	18,5	25.321.071	18,7	28.778.656	19,7
Saudi Arabia	350.810	0,5	576.526	0,6	458.163	0,6	754.947	0,7	965.377	0,7	1.015.227	0,7
Taiwan, Provinsi China	2.160.941	3,0	2.693.551	2,7	1.965.079	2,5	2.928.944	2,7	3.811.502	2,8	4.106.392	2,8
Asia dan Timur Tengah lainnya	477.050	0,7	1.279.870	1,3	1.152.900	1,5	1.499.403	1,4	2.077.765	1,5	2.222.097	1,5
Australia dan Oseania	3.574.355	4,9	4.920.821	4,8	4.095.998	5,3	4.990.120	4,6	5.815.321	4,3	5.864.426	4,0
Australia	2.828.282	3,9	4.095.546	4,0	3.328.651	4,3	4.209.200	3,9	5.039.644	3,7	5.085.655	3,5
New Zealand	529.620	0,7	707.467	0,7	558.322	0,7	725.040	0,7	775.682	0,6	742.478	0,5
Afrika	658.510	0,9	1.031.676	1,0	671.638	0,9	1.170.878	1,1	1.914.270	1,4	1.703.070	1,2
Afrika Selatan	237.119	0,3	333.609	0,3	298.413	0,4	526.694	0,5	703.990	0,5	657.483	0,5
Afrika lainnya	421.391	0,6	698.067	0,7	373.225	0,5	644.184	0,6	1.210.280	0,9	1.045.591	0,7
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan ²⁾	630.000	0,9	784.328	0,8	384.702	0,5	761.869	0,7	645.746	0,5	1.042.137	0,7
Jumlah, cif	72.229.285	100,0	101.536.625	100,0	77.424.085	100,0	107.533.403	100,0	135.257.475	100,0	146.031.185	100,0

¹⁾ Pemekaran menjadi 27 negara sejak Bulgaria dan Romania bergabung dengan Uni Eropa pada Januari 2007²⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut dan barang untuk diperbaiki.

Tabel 16. Nilai Ekspor Minyak dan Gas (F.o.B)

Rincian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Ekspor (juta dolar AS)						
Minyak Bumi dan produknya	12.496	15.387	10.790	15.691	19.576	17.891
Gas	12.376	16.333	9.826	12.968	18.491	17.680
-LNG	9.273	12.785	7.189	9.432	12.962	11.944
-LPG	210	79	48	-	74	9
-Gas Alam	2.443	3.469	2.589	3.535	5.235	5.727
Total	24.872	31.721	20.616	28.658	38.067	35.571
Volume Ekspor						
Minyak Bumi dan produknya (juta barel)	178	162	178	202	183	162
Gas						
-LNG (juta MMBTU)	1.080	1.068	1.030	1.211	1.098	949
-LPG (ribu MT)	337	101	88	-	81	8
-Gas Alam (juta MMBTU)	293	303	309	358	372	379

MMBTU : Million British Thermal Unit

MT : Metric Ton

Tabel 17. Uang Beredar

Miliar Rupiah

Akhir Periode	M1 ¹⁾		Uang Kuasi ²⁾		M2 ³⁾		
	Posisi	Pangsa (%)	Posisi	Pangsa (%)	Posisi	Perubahan	
						Tahunan	Triwulanan
2007	450.055	27,28	1.196.119	72,51	1.649.662	19,36	
2008	456.787	24,09	1.435.772	75,73	1.895.839	14,92	
2009	515.824	24,09	1.622.055	75,75	2.141.384	12,95	
2010							
Januari	496.527	23,94	1.570.059	75,71	2.073.860	10,66	
Februari	490.084	23,72	1.568.632	75,91	2.066.481	8,75	
Maret	494.461	23,41	1.611.373	76,29	2.112.083	10,19	-1,37
April	494.718	23,38	1.615.203	76,33	2.116.024	10,63	
Mei	514.005	23,98	1.622.981	75,73	2.143.234	11,22	
Juni	545.405	24,45	1.680.374	75,31	2.231.144	12,82	5,64
Juli	539.746	24,34	1.672.443	75,42	2.217.589	13,09	
Agustus	555.495	24,84	1.676.517	74,96	2.236.459	12,09	
September	549.941	24,17	1.720.039	75,61	2.274.955	12,70	1,96
Oktober	555.549	24,07	1.747.976	75,70	2.308.846	14,18	
November	571.337	24,35	1.769.654	75,36	2.347.807	13,80	
Desember	605.411	24,52	1.856.720	75,12	2.471.206	15,32	8,55
2011							
Januari	604.169	24,79	1.822.268	74,78	2.436.679	17,49	
Februari	585.890	24,21	1.823.771	75,36	2.420.191	17,12	
Maret	580.601	23,68	1.862.788	75,99	2.451.357	16,06	-0,80
April	584.634	24,01	1.841.377	75,64	2.434.478	15,05	
Mei	611.791	24,72	1.853.915	74,90	2.475.286	15,49	
Juni	636.206	25,22	1.876.446	74,38	2.522.784	13,07	2,91
Juli	639.688	24,94	1.914.444	74,65	2.564.556	15,65	
Agustus	662.806	25,28	1.943.770	74,15	2.621.346	17,21	
September	656.096	24,82	1.973.573	74,66	2.643.331	16,19	4,78
Oktober	665.000	24,83	2.000.315	74,70	2.677.787	15,98	
November	667.587	24,46	2.047.205	75,00	2.729.538	16,26	
Desember	722.991	25,13	2.139.840	74,37	2.877.220	16,43	8,85
2012							
Januari	696.323	24,39	2.145.246	75,14	2.854.978	17,17	
Februari	683.253	23,98	2.150.808	75,47	2.849.796	17,75	
Maret	714.258	24,53	2.182.891	74,96	2.911.920	18,79	1,21
April	720.924	24,63	2.190.885	74,84	2.927.259	20,24	
Mei	749.450	25,05	2.227.527	74,45	2.992.057	20,88	
Juni	779.416	25,55	2.254.329	73,90	3.050.355	20,91	4,75
Juli	771.792	25,26	2.270.112	74,31	3.054.836	19,12	
Agustus	772.429	25,01	2.304.474	74,60	3.089.011	17,84	
September	795.518	25,45	2.318.559	74,18	3.125.533	18,24	2,46
Oktober	774.983	24,51	2.376.102	75,15	3.161.726	18,07	
November	801.403	25,00	2.393.320	74,67	3.205.129	17,42	
Desember	841.722	25,47	2.452.503	74,21	3.304.645	14,86	5,73

¹⁾ Terdiri atas uang kartal dan giro²⁾ Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan, dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk³⁾ Terdiri atas uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham dengan sisa jangka waktu s.d 1 tahun

Tabel 18. Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Miliar Rupiah

Rincian	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
						I	II	III	IV
Uang Beredar									
M2	267,168	246,177	245,545	329,822	406,014	460,563	527,571	482,202	427,425
M1	103,042	6,732	59,037	89,586	117,581	133,657	143,210	139,422	118,730
Kartal	32,313	26,780	16,259	34,221	47,533	45,429	53,166	46,342	54,207
Giral	70,729	-20,048	42,778	55,366	70,048	88,228	90,044	93,080	70,048
Kuasi	163,254	239,653	186,283	234,665	283,120	320,103	377,883	344,986	312,662
Faktor yang Memengaruhi									
Aktiva Luar Negeri Bersih	108,133	83,294	86,311	185,674	47,053	14,731	-45,005	56,732	53,268
Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat	-217	-119,872	42,158	-60,689	-17,540	-20,887	67,545	61,255	38,656
Tagihan Kepada Sektor Lainnya	205,273	332,544	125,670	371,104	473,801	499,994	544,733	508,582	537,111
Tagihan Kepada Pemerintah Daerah	102	298	34	576	-184	-61	464	1,062	1,376
Tagihan Kepada Sektor Swasta	184,090	308,310	89,637	280,522	434,168	461,699	496,978	482,071	466,443

Tabel 19. Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank¹⁾

Persen

Jangka Waktu	Desember 2007		Desember 2008		Desember 2009		Desember 2010		Desember 2011		Desember 2012	
	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas
Bank Persero												
1 bulan	7,00	3,89	10,14	4,57	6,59	2,94	6,48	2,08	6,04	1,32	5,22	0,95
3 bulan	7,33	4,09	10,47	5,44	7,34	3,36	6,73	2,07	6,62	2,11	5,54	1,11
6 bulan	7,13	4,07	10,61	4,14	7,70	3,21	6,55	2,05	6,54	2,05	5,58	1,98
12 bulan	8,41	3,65	11,44	3,75	9,40	3,24	6,93	2,78	6,94	1,47	5,91	1,66
24 bulan	10,8	3,69	7,84	3,52	8,39	2,90	7,66	2,62	6,40	1,25	5,87	1,23
Bank Swasta Nasional												
1 bulan	7,31	3,94	11,30	4,33	7,02	1,92	6,94	1,91	6,62	1,81	5,96	2,06
3 bulan	7,64	4,14	11,65	4,94	7,55	2,03	7,06	1,85	6,91	2,03	5,81	2,14
6 bulan	7,9	4,02	10,05	4,51	7,81	2,26	7,06	1,81	7,28	2,41	6,18	2,40
12 bulan	7,87	4,27	9,36	3,72	9,05	3,33	6,83	2,24	7,05	1,93	5,82	2,47
24 bulan	11,59	3,92	9,00	4,04	10,45	2,49	9,19	2,28	5,83	0,41	4,23	2,63
Bank Pemerintah Daerah												
1 bulan	7,24	3,73	9,83	3,28	7,69	3,68	8,07	1,98	7,39	2,09	5,92	2,03
3 bulan	6,76	4,01	9,38	3,27	8,23	3,96	8,59	2,00	8,04	6,29	6,69	2,48
6 bulan	7,74	3,96	10,11	4,47	9,17	4,14	9,99	1,49	8,24	1,00	6,60	1,55
12 bulan	8,73	4,44	8,81	3,25	10,93	4,48	12,07	1,30	8,41	1,28	7,08	1,04
24 bulan	10,17	-	7,38	-	8,04	-	7,73	-	7,63	-	6,65	1,20
Bank Asing & Campuran												
1 bulan	7,27	4,40	10,78	3,35	6,68	1,74	7,69	2,64	5,00	1,19	4,61	1,51
3 bulan	7,30	4,44	11,97	3,31	6,85	2,09	7,16	1,79	5,74	1,62	5,54	1,90
6 bulan	7,58	4,63	10,66	3,47	7,45	2,26	6,97	2,59	6,47	1,74	6,04	2,04
12 bulan	8,29	4,42	10,24	3,02	9,73	2,05	6,81	2,19	6,64	1,51	6,19	1,86
24 bulan	9,83	4,80	9,47	-	7,37	-	4,04	2,50	6,64	1,17	6,20	0,92
Bank Umum												
1 bulan	7,19	4,01	10,75	4,28	6,87	2,42	6,83	2,05	6,35	1,53	5,58	1,48
3 bulan	7,42	4,26	11,16	4,55	7,48	2,79	7,06	1,93	6,81	1,90	5,76	1,86
6 bulan	7,65	4,27	10,34	4,16	7,87	2,95	7,20	2,03	7,19	2,11	6,05	2,20
12 bulan	8,24	4,21	10,43	3,58	9,55	2,96	7,88	2,56	7,06	1,69	6,09	2,09
24 bulan	10,83	4,52	8,62	3,74	9,1	2,77	8,11	2,43	6,33	0,80	5,47	1,63

¹⁾ Rata-rata tertimbang pada akhir periode

**Tabel 20. Pasar Uang Antarbank di Jakarta
(Rata-rata Volume Transaksi PUAB Pagi dan Sore Berbagai Tenor)¹⁾**

Akhir Periode	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Suku Bunga Rata-rata Tertimbang (Persen per Tahun)	Akhir Periode	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Suku Bunga Rata-rata Tertimbang (Persen per Tahun)
2007			2011		
Januari - Maret	12.582	6,02	Januari	10.341	5,87
April - Juni	11.762	7,07	Februari	10.567	6,10
Juli - September	13.287	5,78	Maret	9.493	6,24
Oktober - Desember	13.464	6,12	Januari - Maret	10.134	6,07
2008			April	11.222	6,25
Januari - Maret	12.482	7,05	Mei	12.534	6,28
April - Juni	7.850	7,93	Juni	13.033	6,12
Juli - September	9.011	9,23	April - Juni	12.263	6,22
Oktober - Desember	4.681	9,87	Juli	11.738	6,03
2009			Agustus	9.019	5,91
Januari - Maret	7.515	8,51	September	9.304	5,45
April - Juni	10.219	7,39	Juli - September	10.020	5,80
Juli - September	9.679	6,47	Oktober	10.434	5,15
Oktober - Desember	8.189	6,34	November	10.539	4,76
2010			Desember	9.288	4,59
Januari	7.649	6,27	Oktober - Desember	10.087	4,83
Februari	9.279	6,20	2012		
Maret	9.979	6,18	Januari	5.622	4,30
Januari - Maret	8.969	6,22	Februari	5.352	3,86
April	10.251	6,11	Maret	5.567	3,77
Mei	11.087	6,17	Januari - Maret	5.514	3,98
Juni	9.277	6,21	April	6.334	3,77
April - Juni	10.205	6,16	Mei	12.622	3,80
Juli	9.002	6,20	Juni	15.603	4,01
Agustus	10.338	6,23	April - Juni	11.520	3,86
September	9.214	6,20	Juli	11.225	4,08
Juli - September	9.518	6,21	Agustus	12.561	4,23
Oktober	7.832	5,91	September	8.454	4,15
November	7.281	5,64	Juli - September	10.747	4,15
Desember	8.030	5,68	Oktober	10.804	4,20
Oktober - Desember	7.714	5,74	November	8.808	4,21
			Desember	8.820	4,27
			Oktober - Desember	9.477	4,23

¹⁾ Angka rata-rata harian

Tabel 21. Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
dalam Miliar Rupiah

Akhir Periode	Penerbitan	Pelunasan	Posisi
Januari - Desember 2003	1.225.665	1.197.376	105.402
Januari - Desember 2004	1.194.384	1.197.054	102.732
Januari - Desember 2005	1.119.549	1.100.922	70.047
Januari - Desember 2006	2.145.485	2.010.322	207.800
2007			
Januari	271.000	243.000	226.491
Februari	236.000	235.400	235.850
Maret	239.346	235.000	244.271
April	247.549	239.346	237.407
Mei	320.441	305.408	259.059
Juni	252.966	260.582	260.068
Juli	284.111	252.966	272.258
Agustus	330.875	352.564	274.425
September	264.842	262.422	263.384
Oktober	337.536	332.980	234.401
November	267.711	269.400	265.468
Desember	152.401	174.783	273.925
2008			
Januari	408.820	381.966	290.164
Februari	277.046	272.182	276.359
Maret	153.484	220.201	260.664
April	133.032	132.180	223.941
Mei	204.047	232.809	216.436
Juni	151.165	170.455	165.446
Juli	199.534	187.961	182.312
Agustus	114.445	139.227	159.975
September	72.517	105.854	135.914
Oktober	107.901	87.435	111.705
November	143.937	114.246	156.894
Desember	147.453	136.863	168.901
2009			
Januari	156.141	161.903	206.450
Februari	134.384	125.951	235.224
Maret	107.870	109.849	233.754
April	141.864	141.112	230.285
Mei	85.000	94.850	232.073
Juni	97.942	88.814	231.392
Juli	150.318	147.013	235.519
Agustus	113.259	125.519	234.585
September	187.680	177.035	217.287
Oktober	198.801	180.199	240.631
November	184.877	173.205	243.719
Desember	247.555	238.642	253.756

Akhir Periode	Penerbitan	Pelunasan	Posisi
2010			
Januari	232.791	192.349	295.965
Februari	221.447	213.564	303.847
Maret	183.931	189.868	297.910
April	150.270	104.374	343.806
Mei	78.287	123.120	298.973
Juni	91.466	120.781	269.658
Juli	61.048	95.981	234.724
Agustus	73.625	38.100	270.249
September	64.161	82.625	251.785
Oktober	36.449	63.227	225.006
November	59.999	71.445	213.561
Desember	55.000	68.448	200.113
2011			
Januari	25.000	29.799	195.314
Februari	14.000	14.680	194.635
Maret	45.525	10.012	230.148
April	23.422	23.499	230.071
Mei	12.281	44.481	197.871
Juni	15.000	26.925	185.946
Juli	4.000	7.950	181.996
Agustus	7.000	17.768	171.228
September	8.000	30.000	149.228
Oktober	13.841	20.000	143.069
November	8.941	14.000	138.010
Desember	27.292	45.525	119.777
2012			
Januari	10.000	23.422	106.355
Februari	5.000	12.281	99.074
Maret	10.423	15.000	94.497
April	5.000	4.000	95.497
Mei	7.167	7.000	95.664
Juni	2.070	8.000	89.734
Juli	6.285	13.841	82.178
Agustus	8.240	8.941	81.477
September	14.003	27.292	68.188
Oktober	11.372	10.000	69.560
November	11.245	5.000	75.805
Desember	13.491	10.423	78.873

Penerbitan SBI dimulai pada bulan Februari 1984, dan sejak Juli 1998 penjualan SBI dilakukan melalui lelang dengan sistem SOR (Stop Out Rate)

Tabel 22. Penghimpunan Dana Oleh Bank Umum¹⁾

dalam Miliar Rupiah

Akhir Periode	Giro			Deposito			Tabungan	Jumlah
	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah ²⁾	Dalam Valas	Sub Jumlah		
2007	266.744	88.529	355.273	529.975	121.695	651.670	437.274	1.444.561
2008	246.390	112.901	359.291	660.444	145.213	805.657	495.980	1.661.578
2009								
Maret	261.273	120.811	382.084	691.274	142.828	834.102	489.703	1.706.531
Juni	278.600	115.314	393.914	710.758	130.815	841.573	512.411	1.748.513
September	279.046	126.547	405.593	714.836	126.440	841.276	533.525	1.781.028
Desember	283.498	124.454	407.952	739.927	138.169	878.096	602.446	1.884.669
2010								
Januari	289.318	125.045	414.363	745.089	134.471	879.560	585.533	1.871.080
Februari	282.214	126.393	408.607	750.743	134.455	885.197	572.619	1.856.680
Maret	293.930	137.590	431.520	777.816	135.731	913.548	573.044	1.906.410
April	288.051	132.910	420.961	785.518	131.346	916.864	577.370	1.903.642
Mei	303.541	130.873	434.414	794.736	128.770	923.505	585.898	1.931.199
Juni	325.575	146.976	472.550	813.826	129.361	943.187	608.091	2.015.107
Juli	315.188	147.182	462.370	798.759	134.269	933.028	616.484	2.000.580
Agustus	318.423	138.803	457.226	797.703	139.050	936.753	630.175	2.014.079
September	323.206	142.151	465.357	818.848	139.988	958.835	650.166	2.066.078
Oktober	324.740	137.905	462.644	848.090	142.318	990.407	656.239	2.097.530
November	337.360	140.314	477.674	863.428	140.926	1.004.354	670.658	2.140.425
Desember	359.571	144.525	504.096	903.166	137.629	1.040.795	728.903	2.251.183
2011								
Januari	361.794	141.472	503.265	894.090	132.868	1.026.958	712.356	2.242.579
Februari	345.967	154.385	500.353	884.628	132.822	1.017.451	709.717	2.227.520
Maret	353.449	157.287	510.736	924.401	139.318	1.063.719	719.320	2.293.775
April	350.450	150.395	500.845	918.156	133.449	1.051.605	731.907	2.284.358
Mei	380.627	148.487	529.114	933.240	133.674	1.066.914	737.047	2.333.075
Juni	400.536	146.137	546.672	945.202	132.275	1.077.477	750.052	2.374.201
Juli	383.966	149.518	533.484	967.619	137.825	1.105.444	759.492	2.398.421
Agustus	356.684	139.717	496.401	982.600	140.700	1.123.300	781.867	2.401.568
September	397.656	145.177	542.833	994.655	145.324	1.139.979	793.297	2.476.109
Oktober	404.941	151.590	556.531	1.013.788	144.874	1.158.662	798.575	2.513.768
November	417.765	158.322	576.087	1.019.156	149.870	1.169.026	819.212	2.564.326
Desember	445.073	160.012	605.085	1.043.418	156.183	1.199.600	893.699	2.698.385
2012								
Januari	434.474	167.378	601.852	1.054.033	157.844	1.211.877	877.772	2.691.502
Februari	425.927	162.760	588.687	1.058.547	162.411	1.220.958	879.787	2.689.432
Maret	451.827	165.349	617.176	1.081.141	165.933	1.247.074	884.564	2.748.813
April	456.285	161.059	617.345	1.078.618	166.675	1.245.292	899.097	2.761.734
Mei	481.790	173.414	655.205	1.086.451	177.382	1.263.833	908.739	2.827.777
Juni	494.271	180.299	674.570	1.082.394	182.292	1.264.686	934.301	2.873.557
Juli	483.977	181.055	665.031	1.086.539	189.150	1.275.689	943.524	2.884.244
Agustus	472.153	179.608	651.762	1.099.383	189.449	1.288.832	965.724	2.906.318
September	500.243	177.663	677.906	1.109.781	202.884	1.312.665	976.362	2.966.933
Oktober	477.446	185.581	663.027	1.130.604	207.154	1.337.758	989.202	2.989.987
November	504.893	189.154	694.046	1.130.584	209.591	1.340.175	1.007.332	3.041.554
Desember	518.969	191.431	710.400	1.139.847	197.494	1.337.341	1.071.485	3.119.227

¹⁾ Tidak termasuk dana milik pemerintah dan bukan penduduk²⁾ Termasuk sertifikat deposito

Tabel 23. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank ¹⁾

Persen

Akhir Periode	Bank Persero		Bank Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Bank Asing & Campuran		Bank Umum	
	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi
2007	13,47	12,93	15,33	14,61	12,96	13,11	10,23	10,56	13,00	13,01
2008	14,61	13,85	14,43	13,52	15,90	14,85	14,58	15,00	15,22	14,40
2009										
Maret	14,45	13,55	14,29	13,32	15,69	14,52	14,11	14,40	14,99	14,05
Juni	14,16	13,28	14,16	13,20	15,15	14,33	13,27	13,53	14,52	13,78
September	14,03	12,78	14,1	12,76	14,67	13,8	12,34	12,27	14,17	13,2
Desember	13,63	12,56	13,91	12,54	14,09	13,51	11,73	12,22	13,69	12,96
2010										
Januari	13,69	11,72	13,74	12,78	13,88	14,06	10,83	11,07	13,54	12,96
Februari	13,70	11,67	13,85	12,84	13,86	14,13	10,46	10,95	13,50	13,00
Maret	13,61	11,54	13,71	12,83	13,94	13,15	10,40	10,83	13,49	12,47
April	13,51	11,40	13,70	12,82	13,73	13,35	10,22	10,93	13,36	12,45
Mei	13,41	11,30	13,66	12,76	13,62	13,31	10,09	10,80	13,24	12,43
Juni	13,29	11,26	13,82	12,48	13,56	13,44	9,92	10,84	13,16	12,54
Juli	13,28	11,62	12,69	12,49	13,38	13,46	10,01	10,52	13,07	12,53
Agustus	13,64	11,09	13,47	12,52	13,52	13,26	10,55	11,69	13,19	12,40
September	13,20	11,01	13,68	12,55	13,29	13,33	10,29	11,61	13,00	12,41
Oktober	13,23	10,95	13,69	12,54	13,30	13,33	10,14	11,52	13,01	12,38
November	13,17	10,89	13,69	12,51	13,20	13,25	10,26	11,79	12,96	12,35
Desember	13,06	10,81	13,57	12,44	13,02	13,20	10,23	11,82	12,83	12,28
2011										
Januari	13,02	10,71	13,54	12,44	13,00	13,21	9,44	10,56	12,75	12,25
Februari	12,99	10,67	13,58	12,47	12,95	13,11	9,34	10,79	12,72	12,20
Maret	11,68	10,61	13,56	12,50	12,96	13,03	9,45	10,96	12,32	12,18
April	11,65	10,61	13,52	12,49	12,90	13,02	9,46	10,64	12,30	12,16
Mei	11,59	10,59	13,59	12,54	12,82	13,01	9,42	10,64	12,24	12,16
Juni	11,52	10,60	13,57	12,55	12,81	12,97	9,55	10,65	12,24	12,13
Juli	12,62	10,60	13,64	12,52	12,80	12,96	9,55	10,47	12,55	12,11
Agustus	12,61	10,56	13,64	12,52	12,75	12,94	9,34	10,56	12,50	12,10
September	12,51	10,57	13,70	12,54	12,63	12,89	9,14	10,11	12,39	12,06
Oktober	12,47	10,53	13,77	12,55	12,61	12,81	9,03	10,20	12,36	12,02
November	12,41	10,49	13,73	12,48	12,56	12,76	8,86	10,06	12,31	11,97
Desember	12,37	10,39	13,52	12,40	12,34	12,64	8,71	14,89	12,16	12,04
2012										
Januari	12,39	10,21	13,47	12,37	12,34	12,58	8,52	9,71	12,14	11,73
Februari	12,38	10,16	11,28	11,24	12,36	12,54	8,25	9,63	12,02	11,62
Maret	12,19	10,12	13,62	12,40	12,27	12,42	8,25	9,44	12,01	11,62
April	12,05	10,05	13,64	12,20	12,11	12,38	8,04	9,46	11,86	11,56
Mei	11,95	10,01	13,62	12,22	12,06	12,31	7,97	9,43	11,78	11,51
Juni	12,00	9,98	13,63	12,33	12,02	12,23	7,98	9,54	11,79	11,46
Juli	11,99	9,98	13,64	12,32	12,03	12,18	7,93	9,50	11,78	11,42
Agustus	11,97	9,92	13,73	12,27	11,99	12,11	7,96	9,52	11,73	11,35
September	11,91	9,94	13,76	12,29	11,95	12,10	7,96	9,58	11,70	11,36
Oktober	11,93	9,86	13,76	12,31	11,88	12,03	8,00	9,60	11,68	11,29
November	11,83	9,92	13,74	12,32	11,81	11,97	7,95	8,93	11,61	11,49
Desember	11,70	10,08	13,66	12,25	11,68	11,88	7,90	9,47	11,24	11,27

¹⁾ Rata-rata tertimbang

Tabel 24. Kredit Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi ¹⁾
dalam Miliar Rupiah

Rincian	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
						Mar	Jun	Sep	Des
Kredit dalam Rupiah	781.797	1.045.358	1.218.064	1.489.164	1.836.273	1.209.471	1.332.409	1.389.211	1.490.456
Pertanian	41.080	53.760	66.181	73.934	95.009	99.667	114.113	115.598	129.397
Pertambangan	2.789	4.386	11.462	13.065	17.772	18.590	21.876	24.114	24.559
Perindustrian	115.172	159.486	166.505	184.134	234.988	239.172	257.648	279.400	301.310
Perdagangan	178.351	223.449	270.825	306.058	370.860	375.112	441.554	449.806	493.104
Jasa-Jasa	162.003	236.298	269.069	380.553	458.076	144.474	133.879	131.045	151.558
Lain-Lain	282.402	367.979	434.022	531.419	659.568	332.457	363.339	389.248	390.528
Kredit dalam Valuta Asing	201.912	243.102	200.729	260.743	346.330	354.665	380.655	389.305	400.008
Pertanian	14.784	12.335	9.211	15.988	18.069	18.584	21.174	20.168	17.258
Pertambangan	22.547	26.155	30.097	47.393	67.695	67.497	68.570	67.233	77.011
Perindustrian	88.636	109.666	79.178	89.720	107.431	118.080	128.610	138.787	142.165
Perdagangan	28.789	27.197	21.256	29.615	31.223	35.052	41.332	43.327	47.015
Jasa-Jasa	46.465	67.171	57.178	73.605	115.361	17.772	19.269	15.656	12.140
Lain-Lain	691	578	3.809	4.421	6.551	97.679	101.700	104.135	104.420
Kredit dalam Rupiah dan Valuta Asing	983.709	1.288.460	1.418.793	1.749.907	2.182.603	1.564.136	1.713.064	1.778.516	1.890.464
Pertanian	55.864	66.095	75.392	89.922	113.078	118.251	135.287	135.766	146.654
Pertambangan	25.336	30.541	41.559	60.459	85.467	86.087	90.446	91.347	101.569
Perindustrian	203.808	269.152	245.683	273.854	342.418	357.252	386.258	418.187	443.475
Perdagangan	207.140	250.646	292.082	335.673	402.083	410.164	482.885	493.133	540.119
Jasa-Jasa	208.468	303.469	326.247	454.158	573.437	162.246	153.148	146.701	163.698
Lain-Lain	283.093	368.557	437.831	535.841	666.119	430.135	465.039	493.383	494.947

¹⁾ Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman

Tabel 25. Kredit Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi ¹⁾
dalam Miliar Rupiah

Rincian	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
						I	II	III	IV
Kredit dalam Rupiah	518.339	668.007	668.983	852.078	1.035.990	1.077.045	1.191.396	1.223.939	1.302.333
Pertanian	31.922	36.496	35.877	35.629	46.403	52.771	66.565	63.569	65.379
Pertambangan	14.693	19.075	26.175	40.029	53.395	52.278	53.541	54.515	65.232
Perindustrian	159.118	213.129	187.702	215.657	264.209	271.978	297.298	321.073	340.177
Perdagangan	177.108	212.251	248.599	270.277	315.966	326.256	392.952	395.425	432.306
Jasa-Jasa	134.159	184.646	186.799	104.925	123.934	117.540	106.686	99.070	114.433
Lain-Lain	1.339	2.409	1.831	185.561	232.082	256.223	274.353	290.286	284.806
Kredit dalam Valuta Asing	183.694	254.373	295.914	336.962	458.566	484.457	518.979	551.769	588.110
Pertanian	23.942	29.599	39.516	51.690	63.543	64.972	68.185	71.639	81.276
Pertambangan	10.642	11.465	15.384	19.344	32.007	33.800	36.895	36.822	36.337
Perindustrian	44.690	56.023	57.980	56.798	77.626	85.221	88.903	97.052	103.298
Perdagangan	30.032	38.396	43.482	50.684	73.690	83.032	89.047	96.800	107.814
Jasa-Jasa	74.310	118.822	139.451	40.002	50.422	44.053	45.808	46.910	49.244
Lain-Lain	78	68	101	118.443	161.280	173.379	190.141	202.547	210.141
Kredit dalam Rupiah dan Valuta Asing	702.033	922.380	982.897	1.189.040	1.494.557	1.561.503	1.710.375	1.775.708	1.890.442
Pertanian	55.864	66.095	75.393	87.320	109.946	117.743	134.751	135.209	146.654
Pertambangan	25.335	30.540	41.559	59.373	85.402	86.078	90.436	91.337	101.569
Perindustrian	203.808	269.152	245.682	272.455	341.835	357.199	386.201	418.125	443.475
Perdagangan	207.140	250.647	292.081	320.961	389.656	409.288	481.999	492.225	540.119
Jasa-Jasa	208.469	303.469	326.250	144.927	174.356	161.593	152.493	145.980	163.677
Lain-Lain	1.417	2.477	1.932	304.004	393.362	429.602	464.494	492.833	494.948

¹⁾ Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman

Tabel 26. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Jakarta dan KKBI*

dalam Miliar Rupiah

Satuan Kerja	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Jakarta	33,6	57,7	39,3	66,7	49,1	65,1	52,1	68,9	63,0	101,1	76,7	136,0
KKBI Medan	18,8	23,2	21,3	23,8	16,8	17,1	17,6	20,9	25,5	28,5	28,6	28,9
KKBI Padang	8,3	18,4	9,5	19,6	10,4	19,6	9,8	24,9	15,7	28,7	20,0	31,4
KKBI Palembang	11,4	15,8	16,0	18,7	14,4	17,4	15,7	22,0	16,7	22,8	17,3	24,9
KKBI Bandung	14,1	5,2	20,2	8,0	22,8	8,3	26,0	11,3	43,7	20,7	60,6	28,9
KKBI Semarang	20,2	10,7	21,1	12,5	23,9	10,3	28,8	15,0	41,6	27,5	52,4	38,0
KKBI Surabaya	20,7	18,6	26,5	24,1	24,6	20,6	28,8	23,2	38,5	35,2	47,4	44,5
KKBI Denpasar	5,7	8,5	4,9	9,0	4,8	7,3	6,2	10,5	10,3	16,4	14,6	19,4
KKBI Banjarmasin	6,7	15,7	6,9	17,4	7,6	16,6	8,4	23,0	13,3	29,5	17,6	33,4
KKBI Makassar	14,8	21,9	19,0	25,9	17,8	22,4	17,3	27,2	25,1	36,4	31,0	43,6
Jumlah	154,2	195,6	184,6	225,8	192,3	204,8	210,9	246,9	293,3	346,8	366,2	428,8

¹⁾ Penyesuaian data sehubungan dengan perubahan wilayah kerja KKBI

Tabel 27. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Jakarta dan KKBI*

dalam Miliar Rupiah

Satuan Kerja	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Jakarta	15,8	160,9	5,3	160,0	6,4	237,9	1,4	246,7	3,2	499,5	2,3	444,5
KKBI Medan	4,6	6,7	0,3	7,4	0,9	11,1	1,6	13,4	1,7	29,7	2,1	20,3
KKBI Padang	1,7	10,0	1,2	15,7	1,2	14,2	2,4	16,5	3,6	20,3	2,6	22,7
KKBI Palembang	1,5	6,2	0,7	11,7	1,5	8,8	3,0	12,9	2,9	28,5	3,8	23,3
KKBI Bandung	39,6	1,7	21,9	5,3	27,2	5,2	32,0	22,9	44,4	36,6	40,3	35,5
KKBI Semarang	40,3	4,3	19,7	3,9	22,5	3,1	39,1	10,9	37,0	21,8	22,5	24,7
KKBI Surabaya	2,5	21,2	0,6	25,8	1,5	20,8	1,8	23,9	4,6	26,2	0,9	35,0
KKBI Denpasar	0,9	8,5	0,5	11,5	0,7	13,9	3,6	18,8	5,1	33,2	6,6	38,9
KKBI Banjarmasin	0,3	14,0	0,1	19,8	0,2	20,3	0,6	24,7	1,2	44,1	1,1	41,5
KKBI Makassar	1,0	6,5	1,2	11,6	1,3	11,7	2,8	18,5	4,1	26,4	3,1	29,4
Jumlah	108,2	239,9	51,5	272,6	63,4	347,0	88,2	409,3	107,9	766,3	85,4	715,7

¹⁾ Penyesuaian data sehubungan dengan perubahan wilayah kerja KKBI

Tabel 28. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Persen

Negara	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Dunia	5,0	3,9	-0,6	5,2	3,9	3,2
Negara Industri Maju	2,6	1,5	-3,4	3,2	1,6	1,3
Amerika Serikat	2,1	0,4	-2,6	3,0	1,8	2,3
Kawasan Euro	2,7	0,7	-4,1	1,9	1,4	-0,4
Jerman	2,5	1,2	-4,7	3,6	3,1	0,9
Perancis	2,3	0,3	-2,5	1,4	1,7	0,2
Italia	1,6	-1,0	-5,0	1,5	0,4	0,2
Jepang	2,3	-0,7	-6,3	4,4	-0,9	2,0
Inggris	2,6	0,7	-4,9	2,1	0,9	-0,2
Kanada	2,5	0,4	-2,5	3,2	2,6	2,0
NIAEs	5,7	1,5	-0,9	8,4	4,0	1,8
Negara Berkembang dan Emerging Market	8,0	6,9	2,6	7,3	6,3	5,1
Afrika Sub- Sahara	6,3	5,2	2,8	5,3	5,3	4,8
Amerika Latin dan Karibia	5,7	4,2	-1,8	6,1	4,5	3,0
Asia	10,0	8,4	7,0	9,5	8,0	6,6
China	13,0	9,0	9,2	10,4	9,3	7,8
Malaysia	6,2	4,6	-1,7	7,2	5,1	4,4
Thailand	4,9	2,6	-2,2	7,8	0,1	5,6
Filipina	7,1	3,8	1,1	7,6	3,9	4,8
Vietnam	8,5	6,2	5,3	6,8	5,9	5,1
Eropa Tengah dan Timur	5,5	3,0	-3,6	4,5	5,3	1,8
Commonwealth of Independent States	8,6	5,5	-6,5	4,6	4,9	3,6
Rusia	8,1	5,6	-7,9	4,0	4,3	3,6
Timur Tengah dan Afrika Utara	5,9	6,4	1,8	4,3	3,5	5,2

Sumber: IMF, *World Economic Outlook Update January 2013*

*¹ Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menggunakan data WEO Oktober 2012

NIAEs : *Newly Industrialized Asian Economies*

Tabel 29. Inflasi Dunia

Rata-rata Tahun, Persen

Negara	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Dunia	4,0	6,0	2,5	3,7		
Negara Maju	2,2	3,4	0,1	1,6	2,7	2,0
Amerika Serikat	2,9	3,8	-0,3	1,6	3,1	2,0
Kawasan Euro	2,1	3,3	0,3	1,6	2,7	2,3
Jerman	2,3	2,8	0,2	1,2	2,5	2,2
Perancis	1,5	2,8	0,1	1,5	2,1	1,9
Italia	2,0	3,5	0,8	1,6	2,9	3,0
Jepang	0,1	1,4	-1,3	-0,7	-0,3	0,0
Inggris	2,3	3,6	2,1	3,3	4,5	2,7
Kanada	2,1	2,4	0,3	1,8	2,9	1,8
NIAEs	2,2	4,5	1,3	2,3	3,7	
Negara Maju Lainnya	2,1	3,8	1,4	2,4	3,4	2,3
Negara Berkembang dan Emerging Market	6,5	9,3	5,1	6,1	7,2	6,1
Afrika	7,0	12,6	9,4	7,5	9,7	9,1
Amerika Latin	5,4	7,9	6,0	6,0	6,6	6,0
Asia	5,4	7,5	3,1	5,7	6,5	5,0
China	4,8	5,9	-0,7	3,3	5,4	3,0
Malaysia	2,0	5,4	0,6	1,7	3,2	2,0
Thailand	2,2	5,5	-0,8	3,3	3,8	3,2
Filipina	2,9	8,2	4,2	3,8	4,7	3,5
Vietnam	8,3	23,1	6,7	9,2	18,7	8,1
Europa Tengah dan Timur	6,0	8,1	4,7	5,3	5,3	5,6
Commonwealth of Independent States	9,7	15,6	11,2	7,2	10,1	6,8
Rusia	9,0	14,1	11,7	6,9	8,4	6,7
Timur Tengah dan Afrika Utara	10,2	13,5	6,6	6,9	9,7	10,4

Sumber: IMF, World Economic Outlook Oktober 2012 dan update Januari 2013

*) proyeksi

Tabel 30. Suku Bunga dan Nilai Tukar

Rincian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (10 th), %						
AS	4,02	2,21	3,84	3,29	1,88	1,76
Jepang	1,51	1,17	1,30	1,13	0,99	0,79
Kawasan Eropa	4,33	2,95	3,39	2,96	1,83	1,32
LIBOR 6 bulan, %						
USD	4,60	1,75	0,43	0,46	0,81	0,51
Yen	0,98	0,95	0,48	0,35	0,34	0,28
Euro	4,71	2,98	0,97	1,18	1,57	0,22
Nilai Tukar						
Yen/USD	112,02	90,21	92,38	81,12	76,91	86,10
USD/EUR	1,47	1,41	1,44	1,34	1,30	1,32
USD/GBP	2,01	1,45	1,62	1,56	1,55	1,62

Sumber: Bloomberg

Daftar Istilah

Administered prices	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah
Asset purchase facility	Fasilitas yang disediakan guna membeli berbagai aset keuangan
Austerity program	Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja Pemerintah
Bail out	Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas
Barrel	Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional
Base money/monetary base	Jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan simpanan perbankan pada bank sentral.
Basel III	Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan resiko likuiditas pasar. Disepakati oleh anggota Basel Committee on Banking Supervision, dan akan diimplementasikan 2013-2018.
Bl rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Bid to cover ratio	Rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat permintaan terhadap suatu surat berharga selama proses lelang/penawaran dengan membandingkan antara jumlah atau nilai penawaran dan yang dapat diterima.
Branchless banking	Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang
Bullish	Kecenderungan harga untuk meningkat
Capital flows	Aliran modal dapat berupa aliran masuk atau keluar
Capital reversal	Pembalikan arah pergerakan aliran modal
Clean money policy	Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar
Counterparty risk	Resiko yang timbul karena salah satu pihak tidak akan dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak.
Credit rating	Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi
Debt service ratio	Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara
Debt swap	Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi.
Deflasi	Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum
Deleveraging	Penurunan rasio leverage, atau penurunan persentase utang dalam neraca suatu entitas ekonomi (rumah tangga atau perusahaan)
Dependency ratio	Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif
Deposit rate	Tingkat suku bunga simpanan
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi rupiah	Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Devisa	Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
Double-dip recession	Peristiwa resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek.
Down payment	Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian
Early redemption	Pembelian kembali (penebusan) surat berharga secara lebih awal
Ekspansi fiskal	Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah
Emerging market	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
E-money	Uang elektronik
Euro	Mata uang negara kawasan eropa
Fee based income	Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga
Financial sophistication	kecanggihan dalam pengelolaan keuangan
Fiscal cliff	Kebijakan fiskal pemerintah AS yang mengombinasikan kenaikan tarif pajak dengan pemotongan anggaran pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi defisit/utang pemerintah.
Fiscal space	Ruang ekspansi kebijakan fiskal
Flight to quality	Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, pada saat investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi beresiko dan membeli investasi yang lebih aman
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindah bukuan
Good corporate governance	Tata kelola yang baik

Growth compact	Kesepakatan yang dicapai otoritas di Eropa pada akhir Juni 2012 untuk melakukan langkah terkoordinasi baik di tingkat nasional, negara anggota euro maupun Uni Eropa guna mengembalikan kawasan Eropa pada <i>path of smart, sustainable and inclusive growth</i>
Growth-supporting funding facility	Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Giro Wajib Minimum	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari DPK.
GWM LDR	Simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.
Hedging	Strategi untuk melindungi nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan
Holding company	Perusahaan induk dari beberapa perusahaan
Idle money	Uang yang tidak terpakai
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Imported inflation	Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor
Indeks kedalaman kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin
Indeks keparahan kemiskinan	Ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin
Inflasi	Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum
Inflasi inti	"Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (<i>persistent component</i>) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan Ekspektasi Inflasi"
Inter-bank lending	Penempatan dana bank pada bank lain
Intercompany loans	Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi
Intra-regional trade	Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan
Investasi portofolio	Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan
Investment grade	Peringkat layak investasi
Sovereign debt crisis	Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga & pokoknya).
Less cash society	Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai
Loan to Deposit Ratio	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.
Long-term financing operation	Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan Eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas <i>credit crunch</i> dengan jangka waktu 3 tahun
Low income country	Negara berpendapatan rendah
Lower middle income country	Negara berpendapatan menengah rendah
M1	Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)
M2	Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Margin	Selisih
Middle income	Golongan orang berpendapatan menengah
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Minimum holding periods	Jangka waktu minimal sebuah aset dimiliki
Monetary union	Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan
Monetisasi	Proses konversi/perubahan sesuatu (aset) menjadi uang
Moral hazard	Kecenderungan untuk melakukan kecurangan
Mortgage-backed securities	Surat berharga yang dibentuk atas kredit kepemilikan perumahan
Neraca transaksi berjalan	Bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara
Non-tradables sector	Sektor yang tidak menghasilkan output yang dapat diperdagangkan ke luar negeri
Offshore	Pasar valas di luar wilayah yang menggunakan mata uang yang ditransaksikan
Online banking	Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet
Onshore	Pasar valas di dalam wilayah yang menggunakan mata uang yang ditransaksikan

Operation twist	Kegiatan the FED pada akhir 2011, pada saat itu the Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang
Otoritas moneter	Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang
Pasar obligasi	Tempat diperdagangkannya obligasi
Pelonggaran moneter	Kebijakan moneter untuk meningkatkan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu lambat. Contoh: menurunkan tingkat suku bunga
Pendapatan disposibel	Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan
Pengetatan moneter	Kebijakan moneter untuk menahan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu cepat. Contoh: menaikkan tingkat suku bunga
Portofolio rebalancing	Penyesuaian struktur investasi portofolio
Primary reserves	Cadangan utama, biasanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)
Private sector involvement	Program keterlibatan kreditor swasta dalam program <i>debt swap</i> Yunani yang menghasilkan pemotongan utang 53,5%
Push factor	Faktor pendorong
Quantitative easing	Kebijakan the Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau
Rasio gini	Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan
Refinance rate	Tingkat bunga baru yang ditanggung oleh peminjam ketika peminjam melakukan pembaharuan kontrak perjanjian pinjaman
Regulatory arbitrase	Suatu upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan aturan
Reinvestment earning	Bagian laba yang diinvestasikan kembali
Repo	Perjanjian untuk membeli kembali
Retribusi	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
Right issue	Hak untuk memesan/membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan
Risk appetite	Limit risiko yang ditetapkan secara menyeluruh
Risk aversion	Penghindaran akan risiko
Safe heaven asset	Aset yang memiliki risiko rendah
Samurai bonds	Obligasi dalam denominasi mata uang yen yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dari suatu negara di luar Jepang dan diperdagangkan pada pasar Jepang
Secondary reserves	Instrumen simpanan jangka pendek yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang apabila terjadi kebutuhan likuiditas
Single presence policy	Ketentuan mengenai kepemilikan tunggal
Sistem pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Solvabilitas	Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk memengaruhi permintaan agregat (<i>aggregate demand</i>) yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Subsidi	Suatu pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Term of trade	perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya.
Tertiary reserves	Instrumen simpanan jangka pendek yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang apabila terjadi kebutuhan likuiditas
Tradables sector	Sektor yang menghasilkan output yang dapat diperdagangkan ke luar negeri
Upper middle income	Golongan orang berpendapatan menengah keatas
Velositas uang	Kecepatan perputaran uang yang beredar
Vicious circle	Lingkaran permasalahan
Volatile food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Yield	Imbal hasil
Yuan	Mata uang China

Daftar Singkatan

ABS	Asset Back Securities	CRM	Crisis Resolution Mechanism
ADB	Asean Development Bank	DAU	Dana Alokasi Umum
AMR	Alert Mechanism Report	DBH	Dana Bagi Hasil
AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office	DF	Deposit Facility
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DHE	Devisa Hasil Ekspor
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan	DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	DP	Down Payment
APU	Anti Pencucian Uang	DPK	Dana Pihak Ketiga
Aram	Angka Ramalan	DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
AS	Amerika Serikat	DPPK	Dana Pensiun Pemberi Kerja
ASEAN	Association of Southeast Asian Nation	ECB	European Central Bank
ATM	Anjungan Tunai Mandiri	EFSF/ESM	European Financial Stability Facility/European Stability Mechanism
Bappepam-LK	Badan Pengatur dan Pengawas Pasar Modal	EKU	Estimasi Kebutuhan Uang
BBM	Bahan Bakar Minyak	ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
BCLMV	Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam	ESM	European Stability Mechanism
BI	Bank Indonesia	f.o.b	Free on Board
BIG-eB	Bank Indonesia Government e-Banking	FAA	Federal Aviation Administration
BIN	Badan Intelijen Negara	FDI	Foreign Direct Investment
BI-RTGS	Bank Indonesia Real Time Gross Settlement	FED	Federal Reserve
BIS	Bank for International Settlement	FGD	Focus Group Discussion
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat	FOMC	Federal Open Market Committee
BMAD	Bea Masuk Anti Dumping	FPJP	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
BMPK	Batas Maksimum Pemberian Kredit	FSRU	Floating Storage and Regasification Unit
BMPT	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	FX-swap	Foreign Exchange Swap
BOE	Bank of England	GCG	Good Corporate Governance
BOJ	Bank of Japan	Grexit	Greek Euro Exit
BOPO	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	GFSN	Global Financial Safety Net
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	GWM	Giro Wajib Minimum
BPR	Bank Perkreditan Rakyat	GWM LDR	Giro Wajib Minimum Loan Deposit to Ratio
BPS	Badan Pusat Statistik	HPP	Harga Pembelian Pemerintah
bps	Basis Point	ICP	Indonesia Crude Price
BU	Bank Umum	IFRS	International Financial Reporting Standards
BUK	Bank Umum Konvensional	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha	IMF	International Monetary Fund
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	IPO	Initial Public Offering
BUS	Bank Umum Syariah	JBIC	Japan Bank for International Corporation
c.i.f	Cost, Insurance, Freight	JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
CAR	Capital Adequacy Ratio	JPSK	Jaring Pengaman Sistem Keuangan
CDS	Credit Default Swap	KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
CEMA	Capital Equivalency Maintained Assets	KI	Kredit Investasi
CIP	Covered Interest Parity	KIK-EBA	Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset
CIT	Cash in Transit	KK	Kredit Konsumsi
CMIM	Chiang Mai Initiatives Multilateralisation	KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
CPO	Crude Palm Oil	KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KMK	Kredit Modal Kerja
KP	Kantor Pusat
KPMM	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KPR	Kredit Kepemilikan Rumah
KPw DN	Kantor Perwakilan Dalam Negeri
KTA	Kredit Tanpa Agunan
KTI	Kawasan Timur Indonesia
L/C	Letter of Credit
LDR	Loan to Deposit Ratio
LGA	Listrik, Gas, dan Air
LIBOR	London Interbank Offered Rate
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LNG	Liquid Natural Gas
LPG	Liquid Petroleum Gas
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTRO	Long-Term Financing Operation
LTV	Loan to Value
mbpd	million barrels per day
MBS	Mortgage-Backed Securities
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
MICE	Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions
MKK	Manajemen Kelangsungan Kegiatan
MOU	Memorandum of Understanding
MP3EI	Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MSCI	Morgan Stanley Capital International
MT	Metric Ton
NBFA	Non Bank Financial Asset
NCD	Non-Core Deposit
NCG	Net Claim on Government
NDA	Net Domestic Asset
NDF	Non-Deliverable Forward
NFA	Net Foreign Asset
NII	Net Interest Income
NIM	Net Interest Margin
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPA	Note Purchase Agreements
NPG	National Payment Gateway
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	Non Performing Loan
O/N	Overnight
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
OEI	Outlook Ekonomi Indonesia
OIS	Overnight Index Swap
OM	Operasi Moneter
OMT	Outright Monetary Transaction
OPEC	Organization of The Petroleum Exporting Countries

OPT	Operasi Pasar Terbuka
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Bruto Regional
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PER	Price Earning Ratio
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perpres	Peraturan Presiden
Peruri	Perum Percetakan Republik Indonesia
PHR	Perdagangan, Hotel, dan Restoran
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIN	Personal Identification Number
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	Purchasing Manager Index
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PMTB	Penanaman Modal Tetap Bruto
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pojaknas	Kelompok Kerja Nasional
POLRI	Polisi Republik Indonesia
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPN DTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
PSI	Private Sector Involvement
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
QE	Quantitative Easing
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RCU	Rencana Cetak Uang
REER	Real Effective Exchange Rate
RR-SBN	Reverse Repo SBN
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBDKM	Suku Bunga Dasar Kredit Mikro
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBN	Surat Berharga Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SE	Surat Edaran
SEBI	Surat Edaran Bank Indonesia
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SK-BI	Survei Konsumen Bank Indonesia
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SLC	Senior Level Committee

SOP	Standard Operating Procedure
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SREP	Supervisory Review and Evaluation Process
SSB	Surat-Surat Berharga
SSM	Single Supervisory Mechanism
STKE	Sistem Transfer Kredit Elektronik
SUN	Surat Utang Negara
TD	Term Deposit
TEPPA	Tim evaluasi, Pemantauan, dan Percepatan Anggaran
TKA	Tenaga Kerja Asing
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TOR	Term of Reference
TPI	Tim Pengendali Inflasi
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
TTL	Tarif Tenaga Listrik
TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
UIP	Uncovered Interest Parity
UK	Uang Kertas
UKM	Usaha Kecil Menengah
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UL	Uang Logam
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UMP	Upah Minimum Propinsi
UPK	Uang Pecahan Kecil
USD	United States Dollar
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah
UYD	Uang Yang Diedarkan
valas	Valuta Asing
VIX	Volatility Index
WCPSS	Working Committee on Payment and Settlement Systems
WEO	World Economic Outlook
WTV	World Trade Volume
yoy	Year on Year
ytd	Year to Date

Tim Penyusun

Komite Pengarah

Perry Warjiyo, Dody Budi Waluyo

Penanggung Jawab & Editor

Sugeng, Juda Agung

Koordinator Penyusun

Juli Budi Winantya, Indra Gunawan, Ryan Rizaldy

Tim Penulis

Berry A. Harahap; Ita Vianty; Kurniawan Agung; Eddy Junaedi; Aswin Kosotali;
Oki Hermawan; Dopul R. Marihot; Yayat Cadarajat; Ade Yulianti Rahayu;
Muchamad Barik Bathaluddin; Alexander Lubis; Elpiwin Adela; Irfan Hendrayadi;
Wishnu Mahraddika; Dhaha Praviandi Kuantan; Darius Tirtosuharto; Saraswati;
M. Cahyaningtyas; Syachman Perdymer; Fenty Tri Suryani; Archi Hilmardhany

Kontributor

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter
Direktorat Pengelolaan Moneter
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Direktorat Pengelolaan Devisa
Direktorat Perbankan Syariah
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Direktorat Pengedaran Uang
Direktorat Kredit, Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM
Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
Biro Sekretariat



Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 - INDONESIA
www.bi.go.id

